



Peraturan Wali Kota Pekalongan

Nomor : 21

Tanggal : 4 Juli 2025

RKPD 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026





SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan berisi satu atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai hasil kegiatan.
12. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- b. penyusunan Renja PD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. penyusunan rancangan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I berisi pendahuluan;
- b. Bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah;
- c. Bab III berisi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. Bab IV berisi sasaran dan prioritas Pembangunan;
- e. Bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. Bab VI berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan; dan
- g. Bab VII berisi penutup.

Pasal 5

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 4 Juli 2025,

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMMAD, S.H.
Pembina/ IV (a)

NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	7
1.4 Maksud Dan Tujuan	18
1.5 Sistematika RKPD Tahun 2026	19
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	21
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi	23
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	54
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	102
2.4. Aspek Pelayanan Umum	149
2.5. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024	297
2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah	410
2.7. Isu Strategis	415
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	437
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	437
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	459
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	459
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026	480
4.3 Inovasi Kebijakan Pembangunan	536
4.4 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2026 Dengan Menerapkan Konsep Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas	537
4.5 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2026 Dengan Menerapkan Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial	553
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	563
5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran	563
5.2 Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026	577

5.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2026	786
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	787
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026	787
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	787
BAB VII PENUTUP	799
DAFTAR PUSTAKA	801

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029	8
Tabel I-2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	9
Tabel I-3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	11
Tabel II-1	Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan	25
Tabel II-2	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2024.....	30
Tabel II-3	Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	31
Tabel II-4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	37
Tabel II-5	Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	38
Tabel II-6	Neraca Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan Tahun 2024.....	39
Tabel II-7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2024	40
Tabel II-8	Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	40
Tabel II-9	Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	42
Tabel II-10	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	42
Tabel II-11	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	43
Tabel II-12	Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2020-2024	44
Tabel II-13	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa).....	45
Tabel II-14	Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan, Daerah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	56
Tabel II-15	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	65
Tabel II-16	Indeks Gini Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	66
Tabel II-17	Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	72
Tabel II-18	Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	72
Tabel II-19	Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	73

Tabel II-20	Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	75
Tabel II-21	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	76
Tabel II-22	Prevalensi Balita Stunting Kota Pekalongan Tahun 2019-2024 berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023.....	77
Tabel II-23	Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	78
Tabel II-24	Jumlah Alokasi Penerima Jamkesmas / Jamkesda di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	78
Tabel II-25	Cakupan Penduduk Kota Pekalongan Penerima Jaminan Kesehatan Tahun 2020-2024.....	79
Tabel II-26	Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	79
Tabel II-27	Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	80
Tabel II-28	Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	80
Tabel II-29	Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	85
Tabel II-30	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2024	85
Tabel II-31	Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	86
Tabel II-32	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2024	87
Tabel II-33	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2024	87
Tabel II-34	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	88
Tabel II-35	Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	88
Tabel II-36	Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2024.....	89
Tabel II-37	Nilai Kemampuan Literasi Dan Numerasi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	89
Tabel II-38	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	90
Tabel II-39	Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024	91
Tabel II-40	Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	93
Tabel II-41	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah / Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	94

Tabel II-42	Penyelenggaraan Even Seni Budaya dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	95
Tabel II-43	Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kota Pekalongan.....	95
Tabel II-44	Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	96
Tabel II-45	Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	97
Tabel II-46	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	97
Tabel II-47	Persentase Cagar Budaya (CB) yang Dilestarikan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	98
Tabel II-48	Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	99
Tabel II-49	Jumlah Pengunjung Museum Batik Nasional Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	100
Tabel II-50	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Lokal Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	101
Tabel II-51	Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	103
Tabel II-52	Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2020-2024	104
Tabel II-53	Inovasi Daerah Bidang Pendidikan.....	107
Tabel II-54	Inovasi Daerah Bidang Kesehatan	108
Tabel II-55	Inovasi Daerah Bidang Perikanan	109
Tabel II-56	Inovasi Daerah Lainnya	111
Tabel II-57	Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.....	113
Tabel II-58	Riset Bersama Kota Pekalongan Tahun 2024	113
Tabel II-59	Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan.....	114
Tabel II-60	Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan	115
Tabel II-61	Rasio kewirausahaan Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2020-2023.....	115
Tabel II-62	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	116
Tabel II-63	Return On Asset BUMD Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	117
Tabel II-64	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	119
Tabel II-65	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2020-2024.....	121
Tabel II-66	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (persen).....	122

Tabel II-67	Rumah Tangga dengan Akses Internet Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	127
Tabel II-68	Nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam PDRB ADHB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	127
Tabel II-69	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kota Pekalongan Tahun 2020-2023	128
Tabel II-70	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	129
Tabel II-71	Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	131
Tabel II-72	Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	131
Tabel II-73	Kategori Tingkat Pelayanan Jalan	133
Tabel II-74	Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan	134
Tabel II-75	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	136
Tabel II-76	Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	137
Tabel II-77	Data Jumlah Pelanggan Layanan Sedot Tinja di Kota Pekalongan.....	138
Tabel II-78	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	140
Tabel II-79	Disparitas harga bahan pokok Kota Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	141
Tabel II-80	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	143
Tabel II-81	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	144
Tabel II-82	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	145
Tabel II-83	Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	148
Tabel II-84	Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	148
Tabel II-85	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2021-2022.....	150
Tabel II-86	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2023-2024.....	150
Tabel II-87	Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2018-2021	151
Tabel II-88	Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2022-2024	151
Tabel II-89	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Semester 2 Tahun 2024	152
Tabel II-90	Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2020-2024.....	156

Tabel II-91	Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	157
Tabel II-92	Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	157
Tabel II-93	Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	157
Tabel II-94	Tabel Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kota Pekalongan Tahun 2018-2023	160
Tabel II-95	Tabel Kegiatan Aksi Perubahan Iklim di Kota Pekalongan Kota Pekalongan Tahun 2024	161
Tabel II-96	Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	162
Tabel II-97	Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	163
Tabel II-98	Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	163
Tabel II-99	Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	163
Tabel II-100	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	164
Tabel II-101	Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	164
Tabel II-102	Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	165
Tabel II-103	Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024.....	165
Tabel II-104	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2020-2024	166
Tabel II-105	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	166
Tabel II-106	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2020-2024.....	167
Tabel II-107	Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	167
Tabel II-108	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	168
Tabel II-109	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	168
Tabel II-110	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	169
Tabel II-111	Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2020-2024 ...	169
Tabel II-112	Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	170

Tabel II-113	Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	170
Tabel II-114	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2020 – 2024	171
Tabel II-115	Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2020-2024...	172
Tabel II-116	Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	172
Tabel II-117	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	173
Tabel II-118	Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	173
Tabel II-119	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2020-2024	174
Tabel II-120	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2020-2024.....	174
Tabel II-121	Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Penerima Jamkesmas / Jamkesda di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	175
Tabel II-122	Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	176
Tabel II-123	Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	176
Tabel II-124	Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	177
Tabel II-125	Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	178
Tabel II-126	Data Dasar Prasarana Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2024	178
Tabel II-127	Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	186
Tabel II-128	Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	187
Tabel II-129	Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	187
Tabel II-130	Data Saluran Drainase Sekunder di Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2024.....	188
Tabel II-131	Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	188
Tabel II-132	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	191
Tabel II-133	Perkembangan Jasa Konstruksi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	192
Tabel II-134	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029	192
Tabel II-135	Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	194
Tabel II-136	Rasio Jamban Layak di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	195
Tabel II-137	Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	195
Tabel II-138	Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	196

Tabel II-139	Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2024	197
Tabel II-140	Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2024	199
Tabel II-141	Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2020-2024	215
Tabel II-142	Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 ..	216
Tabel II-143	Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	216
Tabel II-144	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	217
Tabel II-145	Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	217
Tabel II-146	Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	218
Tabel II-147	Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	219
Tabel II-148	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	219
Tabel II-149	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	220
Tabel II-150	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	221
Tabel II-151	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024	221
Tabel II-152	Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	223
Tabel II-153	Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	223
Tabel II-154	Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 ...	226
Tabel II-155	Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	226
Tabel II-156	Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	227
Tabel II-157	Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	228
Tabel II-158	Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	230
Tabel II-159	Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	232
Tabel II-160	Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	233
Tabel II-161	Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	234
Tabel II-162	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	236
Tabel II-163	Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	237

Tabel II-164	Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	238
Tabel II-165	Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	239
Tabel II-166	Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	240
Tabel II-167	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	240
Tabel II-168	PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	241
Tabel II-169	Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	241
Tabel II-170	Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	242
Tabel II-171	Kategori Tingkat Pelayanan Jalan	244
Tabel II-172	Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan	245
Tabel II-173	Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 ...	248
Tabel II-174	Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	248
Tabel II-175	Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	249
Tabel II-176	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	250
Tabel II-177	Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	250
Tabel II-178	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2020-2024.....	251
Tabel II-179	Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2020-2024	251
Tabel II-180	Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	252
Tabel II-181	Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2020-2024	253
Tabel II-182	Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	253
Tabel II-183	Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	254
Tabel II-184	Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	254
Tabel II-185	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2024	255
Tabel II-186	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024	256
Tabel II-187	Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	256

Tabel II-188	Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2020-2024	257
Tabel II-189	Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	257
Tabel II-190	Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2020-2024	257
Tabel II-191	Nilai Domain SPBE Kota Pekalongan Tahun 2021-2024	258
Tabel II-192	Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator Evaluasi SPBE Tahun 2024	259
Tabel II-193	Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	261
Tabel II-194	Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	261
Tabel II-195	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	262
Tabel II-196	Realisasi PMDN dan PMA di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	262
Tabel II-197	Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	263
Tabel II-198	Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	263
Tabel II-199	Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	265
Tabel II-200	Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kota Pekalongan.....	266
Tabel II-201	Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	266
Tabel II-202	Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	267
Tabel II-203	Cagar Budaya di Kota Pekalongan Register Nasional Tahun 2024	268
Tabel II-204	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	270
Tabel II-205	Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	271
Tabel II-206	Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	271
Tabel II-207	Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2020-2024.....	273
Tabel II-208	Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2020-2024.....	273
Tabel II-209	Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (ton)	274
Tabel II-210	Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (kg/kapita/tahun)...	274
Tabel II-211	Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	275
Tabel II-212	Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	276
Tabel II-213	Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023.....	276

Tabel II-214	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	277
Tabel II-215	Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	277
Tabel II-216	Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	278
Tabel II-217	Data Pengurangan Luas Lahan Kota Pekalongan Tahun 2024	278
Tabel II-218	Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	279
Tabel II-219	Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	280
Tabel II-220	Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan Tahun 2024.....	281
Tabel II-221	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	282
Tabel II-222	Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	282
Tabel II-223	Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	283
Tabel II-224	Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	283
Tabel II-225	Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	283
Tabel II-226	Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	284
Tabel II-227	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	284
Tabel II-228	Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	285
Tabel II-229	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022-2024.....	287
Tabel II-230	Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022-2024	288
Tabel II-231	Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	289
Tabel II-232	Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	290
Tabel II-233	Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	291
Tabel II-234	Riset Bersama Kota Pekalongan Tahun 2019-2023.....	292
Tabel II-235	Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	295
Tabel II-236	Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	295
Tabel II-237	Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	295
Tabel II-238	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	296
Tabel II-239	Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	296

Tabel II-240	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2020-2024	297
Tabel II-241	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024.....	298
Tabel II-242	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekalongan Sampai Dengan Tahun 2024	310
Tabel II-243	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 (Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023)	354
Tabel II-244	Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024.....	357
Tabel II-245	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	359
Tabel II-246	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024.....	361
Tabel II-247	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	363
Tabel II-248	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	376
Tabel II-249	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	378
Tabel II-250	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	379
Tabel II-251	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.....	380
Tabel II-252	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	383
Tabel II-253	Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2024.....	384
Tabel II-254	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2024.....	395
Tabel II-255	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2024.....	401
Tabel II-256	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2024	406
Tabel II-257	Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha	409
Tabel II-258	Permasalahan Pembangunan Daerah	410
Tabel II-259	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	411
Tabel II-260	Isu Strategis.....	415
Tabel III-1	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (persen).....	440

Tabel III-2	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2020-2024.....	441
Tabel III-3	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	443
Tabel III-4	Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan	448
Tabel III-5	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan.....	449
Tabel III-6	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan.....	449
Tabel III-7	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan	449
Tabel III-8	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan.....	450
Tabel III-9	Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan	450
Tabel III-10	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022-2027	454
Tabel III-11	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022-2027	456
Tabel III-12	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022-2027	457
Tabel IV-1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025– 2029	472
Tabel IV-2	Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.....	474
Tabel IV-3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.....	478
Tabel IV-4	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2026.....	486
Tabel IV-5	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026.....	488
Tabel IV-6	Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional.....	498
Tabel IV-7	Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah	515
Tabel IV-8	Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2026 Dengan Pendekatan Teknokratik.....	538
Tabel IV-9	Penyusun RKPD Melalui Pendekatan Partisipatif.....	545
Tabel IV-10	Penjabaran Visi dan Misi Wali Kota ke Dalam Program RKPD	546
Tabel IV-11	Konsep Holistik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan.....	554
Tabel IV-12	Konsep Integratif Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan.....	555

Tabel V-1	Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran Tahun 2026	563
Tabel V-2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026.....	599
Tabel V-3	Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2026	786
Tabel VI-1	Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026.....	787
Tabel VI-2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026	788

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	7
Gambar II-1	Peta Orientasi Kota Pekalongan	24
Gambar II-2	Peta Administratif Kota Pekalongan	25
Gambar II-3	Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan.....	26
Gambar II-4	Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan	28
Gambar II-5	Wilayah Sungai Pemali-Comal	28
Gambar II-6	Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan	32
Gambar II-7	Indeks Jasa Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	36
Gambar II-8	Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	41
Gambar II-9	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	43
Gambar II-10	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	44
Gambar II-11	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	46
Gambar II-12	Peta Rencana Struktur Ruang	47
Gambar II-13	Peta Rencana Pola Ruang	48
Gambar II-14	Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	56
Gambar II-15	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (000 jiwa)	57
Gambar II-16	Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	58
Gambar II-17	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	59
Gambar II-18	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	60
Gambar II-19	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	61
Gambar II-20	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	61
Gambar II-21	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024.....	63
Gambar II-22	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2020-2024	63
Gambar II-23	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2020-2024	66

Gambar II-24	Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	68
Gambar II-25	Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	68
Gambar II-26	Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	69
Gambar II-27	Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	70
Gambar II-28	Indeks Ketimpangan Gender Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	70
Gambar II-29	Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender di Kota Pekalongan dengan Kabupaten sekitar Kota Pekalongan serta Provinsi Jawa Tengah	71
Gambar II-30	Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	74
Gambar II-31	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	76
Gambar II-32	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	81
Gambar II-33	Indeks Ketahanan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	82
Gambar II-34	Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	83
Gambar II-35	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	84
Gambar II-36	Literasi Membaca SD dan SMP di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024	92
Gambar II-37	Numerasi SD / Sederajat di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	93
Gambar II-38	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024	102
Gambar II-39	Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi....	105
Gambar II-40	Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Pekalongan.....	118
Gambar II-41	Cakupan Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan Kota Pekalongan Tahun 2021-2024.....	118
Gambar II-42	Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	129
Gambar II-43	Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	130
Gambar II-44	Peta V/C Ratio Ruas Jalan di Kota Pekalongan	133
Gambar II-45	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	139
Gambar II-46	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2020-2024.....	139
Gambar II-47	Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2020-2024.....	141

Gambar II-48	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	143
Gambar II-49	Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	146
Gambar II-50	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	146
Gambar II-51	Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	147
Gambar II-52	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	149
Gambar II-53	Perolehan Indeks Integritas Nasional (IIN) Kab/Kota Tertinggi di Jawa Tengah Tahun 2020-2024	155
Gambar II-54	Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2020-2024.....	171
Gambar II-55	Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	220
Gambar II-56	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020- 2024	222
Gambar II-57	Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	224
Gambar II-58	Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	224
Gambar II-59	Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	225
Gambar II-60	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	230
Gambar II-61	Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2020-2024	231
Gambar II-62	Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024....	234
Gambar II-63	Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	238
Gambar II-64	Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	239
Gambar II-65	Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	242
Gambar II-66	Cakupan Unmet Need KB di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024	243
Gambar II-67	Peta V/C Ratio Ruas Jalan di Kota Pekalongan	245
Gambar II-68	Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	272
Gambar II-69	Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	410
Gambar III-1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024.....	438
Gambar III-2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2020-2024	439

Gambar III-3	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024.....	441
Gambar III-4	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2020-2024.....	442
Gambar IV-1	Konsep Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan	471
Gambar IV-2	Konsep Tematik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan	554

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran perencanaan pembangunan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional. Penyusunan RKPD diawali dengan penyusunan rancangan awal yang dimulai pada minggu pertama bulan Desember, 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029. Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD 2025-2029 sebagaimana ketentuan Pasal 2 dari Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Dokumen RKPD Tahun 2026 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 merupakan periode pertama RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian visi, misi, dan sasaran dalam RPJMD berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, juga penting untuk menilai capaian pembangunan yang telah dilakukan selama empat tahun sebelumnya. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga menjadi dasar untuk merencanakan arah pembangunan yang selaras dengan kebijakan dan prioritas pada periode RPJMD Tahun 2025-2029

Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih maka periode tahun 2025-2029 maka visi yang akan diwujudkan yaitu **“Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”**. Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu:

1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata.
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat.
4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal.
8. Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah.
9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan.

Sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, Pembangunan Daerah pada Tahun 2026 ditujukan untuk **“Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan”**, dengan prioritas pembangunan meliputi :

- a. Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian, peningkatan kompetensi dan literasi digital ASN, internalisasi nilai-nilai integritas serta penguatan SDM perencana dan keuangan dalam perencanaan, pengukuran, pengelolaan keuangan, pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis outcome.
- b. Peningkatan SDM pendidikan yang memenuhi kualifikasi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius.
- c. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan, serta pemenuhan hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan.
- d. Peningkatan kualitas SDM dan koordinasi perwujudan tujuan rencana tata ruang, sarpas perkotaan dan manajemen rekayasa lalu lintas.
- e. Sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan data tunggal dan pilah gender serta identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka.
- f. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
- g. Peningkatan peran stakeholder budaya dalam pelestarian Budaya Lokal.
- h. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan.
- i. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);

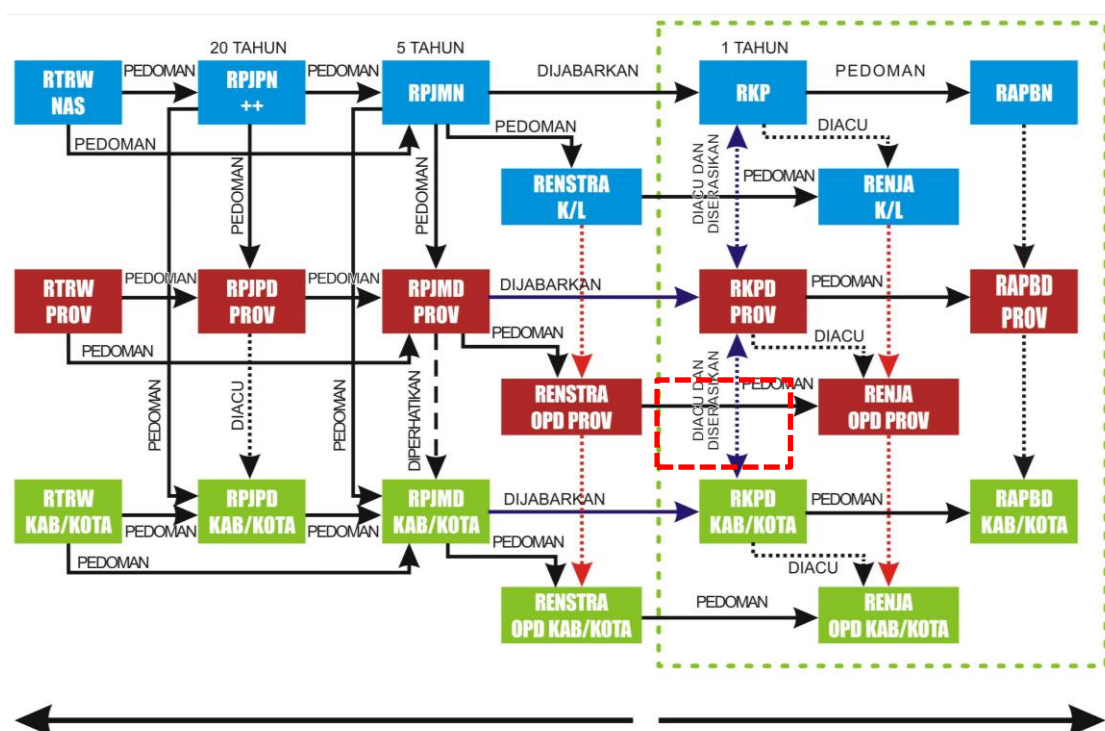
21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 159);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 8);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
48. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 berpedoman/menjabarkan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, serta mengacu RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Bagan hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar I-1 berikut.



Gambar I-1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

1.3.1 RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 merupakan penjabaran atas rencana pembangunan tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029. Arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026 yang dituangkan di dalam RKPD tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan tahun 2026 pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel I-1
Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 dengan
RPJMD Tahun 2025-2029

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026
<i>Tema</i>	<i>Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan</i>	<i>Tema</i>	<i>Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan</i>
1	Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1	Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
2	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan yang inklusif, serta berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan	2	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan yang inklusif, serta berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan
3	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua ² IPM, UHH, Akses Hunian Layak OPD	3	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua ² IPM, UHH, Akses Hunian Layak OPD
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan	4	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan
5	Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, optimalisasi upaya menurunkan angka pengangguran terbuka, serta peningkatan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif	5	Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, optimalisasi upaya menurunkan angka pengangguran terbuka, serta peningkatan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif
6	Peningkatan realisasi investasi daerah melalui penguatan daya saing produk unggulan, implementasi ekonomi sirkular, menurunkan ketergantungan impor, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi serta mendorong pertumbuhan PDRB pada sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi	6	Peningkatan realisasi investasi daerah melalui penguatan daya saing produk unggulan, implementasi ekonomi sirkular, menurunkan ketergantungan impor, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi serta mendorong pertumbuhan PDRB pada sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026
7	Penguatan nilai-nilai budaya masyarakat dan pelestarian budaya lokal untuk mendukung sektor pariwisata	7	Penguatan nilai-nilai budaya masyarakat dan pelestarian budaya lokal untuk mendukung sektor pariwisata
8	Perwujudan kondusifitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA dan pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama.	8	Perwujudan kondusifitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA dan pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama.
9	Pelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan disertai penguatan Fondasi kerjasama daerah.	9	Pelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan disertai penguatan Fondasi kerjasama daerah.

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, 2025

1.3.2 RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Sinergitas antara rencana pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang sangat penting guna memastikan keterpaduan arah kebijakan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2026, pembangunan Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”, yang bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan secara berkelanjutan. Fokus utama pembangunan Provinsi Jawa Tengah meliputi tiga prioritas daerah, yaitu: 1) Penguatan landasan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis, 2) Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, serta 3) Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter.

Sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional dan regional, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 disusun dengan mengacu dan disinergikan secara substansial dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Sinergi ini diwujudkan melalui penyelarasan prioritas pembangunan, program, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel I-2
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	1	Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital.

PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
		8	Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan.
2	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	4	Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas.
		6	Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi <i>stakeholder</i> yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
		9	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu.
3	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	2	Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang <i>smart</i> , inklusif, berkarakter dan religius.
		3	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan / pembinaan / pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan.
		5	Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender.
		7	Penguatan SDM pengelola dan pelaku budaya.

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

1.3.3 RKPD Kota Pekalongan dengan RKP Tahun 2026

Rencana pembangunan Kota Pekalongan juga diselaraskan dengan rencana pembangunan Pemerintah Pusat, yaitu antara RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi yang dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita. Saat ini Pemerintah sudah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang akan dijadikan dasar penyusunan RKP. Sinkronisasi dengan prioritas nasional disajikan dalam Tabel I-3 berikut.

Tabel I-3
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	PRIORITAS	NO.	PRIORITAS
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	8	Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan.
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	8	Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan.
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan / pembinaan / pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan.
		4	Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas.
		5	Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender.
		6	Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
		9	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu.
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2	Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang <i>smart</i> , inklusif, berkarakter dan religius.
		3	Peningkatan derajat kesehatan Masyarakat melalui penyediaan / pembinaan / pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten,

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	PRIORITAS	NO.	PRIORITAS
			peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan.
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	6	Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
		7	Penguatan SDM pengelola dan pelaku budaya.
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5	Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender.
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	1	Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	7	Penguatan SDM pengelola dan pelaku budaya.

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

1.3.4 RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2026. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.5 RKPD dengan KUA PPAS dan APBD

RKPD menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas dan disepakati bersama DPRD. Selanjutnya, masuk ke tahapan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1.3.6 RKPD dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat 5 (lima) urusan yang selanjutnya dikaitkan dengan program pada RKPD, yaitu:

1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Ketiga pelayanan dasar tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Pelayanan dasar tersebut dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik, dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perumahan.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana, dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana.

6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial;

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota, dilaksanakan melalui Program Penanganan Bencana.

1.3.7 RKPD dengan Sustainable Development Goals (SDG's)

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia dikembangkan sejumlah 319 indikator, dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah 222 indikator. Setelah dilakukan penapisan sesuai dengan konteks Kota Pekalongan didapatkan indikator yang relevan dan sesuai konteks sejumlah 188 indikator.

1. Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 30 target dan 106 indikator. Namun hasil penapisan sesuai dengan konteks Kota Pekalongan pilar pembangunan sosial terdiri dari 5 Tujuan, 23 Target dan 40 indikator, yang didukung dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Kepegawaian Daerah.
- 2) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- 4) Program Pemberdayaan Sosial.
- 5) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
- 6) Program Pembinaan Perpustakaan.
- 7) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- 8) Program Penanganan Bencana.
- 9) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
- 10) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 11) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- 12) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- 13) Program Pengelolaan Pendidikan.
- 14) Program Pengembangan Kurikulum.
- 15) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- 16) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 17) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 18) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
- 19) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 20) Program Perlindungan Perempuan.
- 21) Program Rehabilitasi Sosial.
- 22) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 Tujuan 54 target dan 72 indikator. Namun hasil penapisan sesuai dengan konteks Kota Pekalongan pilar pembangunan ekonomi terdiri dari 5 Tujuan, 11 Target dan 16 indikator, yang didukung dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Hubungan Industrial.
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 4) Program Pelayanan Penanaman Modal.
- 5) Program Pemasaran Pariwisata.
- 6) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- 7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
- 8) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 9) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 10) Program Penempatan Tenaga Kerja.
- 11) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- 12) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- 13) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 14) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 15) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
- 16) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- 17) Program Pengembangan Ekspor.
- 18) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- 19) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 20) Program Pengembangan UMKM.
- 21) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.
- 22) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 23) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- 24) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
- 25) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
- 26) Program Penyelenggaraan Jalan.
- 27) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
- 28) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- 29) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
- 30) Program Promosi Penanaman Modal.

3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 6 Tujuan, 29 target dan 64 indikator. Namun hasil penapisan sesuai dengan konteks Kota Pekalongan pilar pembangunan lingkungan terdiri dari 6 Tujuan, 11 Target dan 13 indikator, yang didukung dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Kawasan Permukiman.
- 2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- 4) Program Penanggulangan Bencana.
- 5) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
- 6) Program Penataan Bangunan Gedung.
- 7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
- 8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- 9) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
- 10) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
- 11) Program Pengelolaan Permuseuman.
- 12) Program Pengelolaan Persampahan.
- 13) Program Pengembangan Kebudayaan.
- 14) Program Pengembangan Permukiman.
- 15) Program Pengembangan Perumahan.
- 16) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
- 17) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- 18) Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- 19) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 20) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- 21) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- 22) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 23) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
- 24) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
- 25) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 Tujuan, 8 target dan 32 indikator. Namun hasil penapisan sesuai dengan konteks Kota Pekalongan pilar pembangunan hukum dan tata kelola terdiri dari 1 Tujuan, 8 Target dan 16 indikator, yang didukung dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- 3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
- 4) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 5) Program Pencatatan Sipil.
- 6) Program Pendaftaran Penduduk.
- 7) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 8) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- 9) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- 10) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- 11) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 12) Program Perlindungan Khusus Anak.

1.3.8 RKPD dengan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu:

- 1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD.
- 2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
- 3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
- 4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
- 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 7) Penataan peraturan perundang-undangan, dimana produk hukum Pemerintah Kota Pekalongan dapat diakses melalui alamat <https://jdih.pekalongankota.go.id>.
- 8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu: 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 5) ISO 9001:2015 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) ISO 9001:2015 oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta; 7) ISO 9001:2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

- a. merencanakan dan menyusun program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dengan mempedomani pada visi, misi, serta kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan nasional;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Akhir Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 yaitu:

- a. Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; dan
- b. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2026.
- c. Menyediakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2026

1.5 Sistematika RKPD Tahun 2026

Sistematika RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RPJMD sampai tahun 2024, hasil evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024, hasil evaluasi SDG's tahun 2024, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

1. Kondisi Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
2. Evaluasi pelaksanaan RPJMD sampai tahun 2024 yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, SPM, SDG's dan Perangkat Daerah penanggung jawab.
3. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan IKU tahun 2026 dan memperhatikan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program, SPM dan SDG's tahun 2024.
4. Isu strategis yang dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai tahun 2024 dan perkiraan tahun 2026, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2026, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan

nasional, Provinsi Jawa Tengah, pokok-pokok pikiran DPRD serta keterkaitan arah kebijakan Kota Pekalongan dengan Pusat dan Provinsi.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program pembangunan daerah tahun 2026 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan dokumen rencana pembangunan lainnya yang relevan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan yang ditargetkan di tahun 2026.

BAB VII PENUTUP

Memuat penegasan arah kebijakan, prioritas dan fokus RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 yang telah sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu dari enam kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang secara keseluruhan terdiri atas 35 kabupaten/kota (6 kota dan 29 kabupaten). Secara geografis, Kota Pekalongan memiliki luas wilayah sekitar 0,14 persen dari total luas Provinsi Jawa Tengah, menjadikannya sebagai kota dengan wilayah yang relatif kecil secara administratif. Kota Pekalongan terletak di kawasan pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki posisi yang strategis sebagai simpul jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Letaknya yang berada di pertengahan antara Jakarta dan Surabaya menjadikan Kota Pekalongan sebagai titik transit penting. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta sekitar 384 kilometer, sedangkan ke Surabaya sekitar 409 kilometer. Aksesibilitas menuju Kota Pekalongan sangat baik dan dapat ditempuh melalui moda transportasi darat, baik jalan raya maupun jalur kereta api yang melintasi wilayah ini.

Dengan telah beroperasinya jalan tol trans Jawa sejak Desember 2018, seluruh wilayah yang dilewati jalur jalan tol trans Jawa memiliki posisi yang relatif sama. Posisi strategis wilayah sangat ditentukan oleh seberapa besar daya tarik dan peran suatu daerah tersebut. Oleh karena itu, masing-masing daerah berkompetisi, meningkatkan daya tarik dan perannya, agar tetap dan semakin menarik kunjungan dari wilayah lainnya. Kota Pekalongan, dengan segala potensi dan permasalahan yang dimilikinya, harus terus meningkatkan daya tarik dan perannya, sehingga dapat lebih mendorong laju pertumbuhan ekonominya, dan pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, sekarang ini terus mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan disebabkan kombinasi dari penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) dan dinamika air laut (*pasang surut, kenaikan muka air laut dan gelombang el nino serta la nina*). Para ilmuwan telah mengamati perubahan-perubahan pada indikator-indikator iklim di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, dan secara bersamaan membuat proyeksi menggunakan model AR-4 IPCC untuk menilai perubahan-perubahan masa depan dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Kenaikan suhu permukaan rata-rata akan mencapai 0,8 ° C-1 ° C hingga tahun 2020-2050 dibandingkan dengan periode iklim akhir pada abad ke-20.
- Peningkatan suhu permukaan laut akan mencapai 1-1,2 ° C pada 2050 dibandingkan pada 2000.
- Pada periode 2001-2100, akan terjadi perubahan-perubahan yang berarti (terutama pada periode 2080-an) dengan kecenderungan meningkatnya curah hujan pada musim hujan dan penurunan pada bulan pancaroba.

- Kenaikan permukaan laut (SLR) diproyeksikan mencapai 35-40 cm pada 2050 dibandingkan dengan pada 2000. SLR maksimum dapat mencapai 175 cm pada 2100.

Dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai tertinggi sebagai kota percontohan RAN-API dengan nilai 5. Kota Pekalongan masuk dalam wilayah rentan terhadap perubahan iklim dalam RAN-API meliputi banjir, rob, air bersih, sanitasi, dan kekeringan.

Genangan akibat banjir rob dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan, bahkan sudah meluas sampai ke wilayah bagian Barat dan Timur Kota Pekalongan. Kondisi ini tentu mempengaruhi kehidupan masyarakat dan infrastruktur kota. Namun demikian, kondisi ini diharapkan dapat berkurang secara signifikan, seiring dengan upaya yang dilakukan berbagai pihak baik, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta *stakeholder* lain untuk menangani permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan, dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden nomor 79 Tahun 2019, antara lain:

- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Loji / Pekalongan / Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Miliar dari APBN),
- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Miliar dari APBN),
- Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Miliar dari APBN),
- Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Miliar dari APBN),
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong sistem Kali Boyo untuk melayani Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan kapasitas rencana sebesar 450 liter / detik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir telah melaksanakan pembangunan tanggul pantai dan tanggul sungai di Kota Pekalongan sebagai langkah mitigasi terhadap banjir rob. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir dan sungai dari dampak banjir yang semakin sering terjadi. Selain itu, desain atas sungai yang melintasi Kota Pekalongan juga telah selesai disusun oleh Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah. Desain ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam pengelolaan sungai secara lebih efektif, sehingga risiko banjir rob dapat diminimalisir dan kawasan Kota Pekalongan menjadi lebih aman dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menyusun Revisi *Masterplan* Drainase Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penataan sistem drainase kota yang lebih terarah. Pihak lain non pemerintah seperti akademisi di antaranya Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor banyak terlibat dalam berbagai kajian/studi. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir melibatkan *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) dari Amerika Serikat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut terlibat dalam penanganan banjir rob di Kota Pekalongan di antaranya adalah LSM Bintari melalui Kajian *Loss and Damage* Banjir Rob Pekalongan Raya (2016) serta pembuatan *pilot project* MCK adaptif (2020). *Mercy Corps* Indonesia turut membantu dalam berbagai kajian melalui program *flood resilience city* untuk Kota Pekalongan di antaranya dengan membuat kajian kerentanan (2020) dan saat ini masih berjalan dengan kajian-kajian terkait, dengan melibatkan berbagai *stakeholder* mulai dari

akademisi hingga kementerian maupun pihak lain. LSM Kemitraan juga turut membantu Kota Pekalongan melalui Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dengan pendekatan 3S yaitu *Safekeeping-Surviving-Sustaining* (Melindungi-Mempertahankan-Melestarikan). Selain itu *Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard* (HHSK) Belanda melalui *Witteveen Bos* juga telah membuat kajian tentang *Pekalongan Coastal Zone, Coastal Erosion and Flooding in the city of Pekalongan* yang dibiayai oleh HHSK Belanda tahun 2016.

Selain gambaran di atas, Kota Pekalongan tetap menyimpan berbagai potensi yang relatif besar dengan sejarah perkembangan yang relatif panjang. Potensi tersebut adalah berupa kerajinan batik dan perikanan.

Seperti diketahui bersama, batik sudah sangat melekat dan identik dengan Kota Pekalongan. Bahkan UNESCO telah mengakuinya dengan memasukkan Kota Pekalongan sebagai salah satu Kota Kreatif Dunia untuk kategori *Craft and Folk Art* (Kerajinan dan Kesenian Rakyat). Kerajinan yang diakui tidak lain adalah kerajinan batik. Potensi yang besar ini telah mewarnai hampir sebagian besar dinamika ekonomi penduduk Kota Pekalongan.

Potensi kedua adalah perikanan yang saat ini masih sangat terpuruk sebagai dampak meningkatnya frekuensi kejadian rob. Namun demikian, semangat untuk mengembalikan kejayaan perikanan Kota Pekalongan masih terus dijaga sampai dengan sekarang ini. Pemerintah Kota Pekalongan sendiri masih terus berupaya untuk terus mengajukan permohonan demi terwujudnya Pelabuhan Perikanan *Onshore* di Kota Pekalongan.

Kedua potensi tersebut harus terus dikembangkan agar dapat semakin mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, yaitu dengan semakin memperkuat sektor sekunder dan sektor tersier Kota Pekalongan. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki Kota Pekalongan selama ini, ke depan harus dapat bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Secara umum, gambaran Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 50' 42" s.d. 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s.d. 109 42' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00-518.00 Km membujur dan 517.75-526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009–2029, luas wilayah Kota Pekalongan tercatat sebesar 45,25 km². Namun, melalui proses revisi RTRW yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011, luas wilayah Kota Pekalongan mengalami penyesuaian menjadi 4.642 hektare atau setara dengan 46,42 km². Perubahan ini dikarenakan adanya:

- a. Pemutakhiran garis pantai sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- b. Pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi;

- c. Perbaikan atas hasil kajian teknis dari pusat pemetaan batas wilayah pada Badan Informasi Geospasial terhadap perhitungan luas wilayah.

Dengan demikian maka luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 Ha yang sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran garis pantai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi: sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa, maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

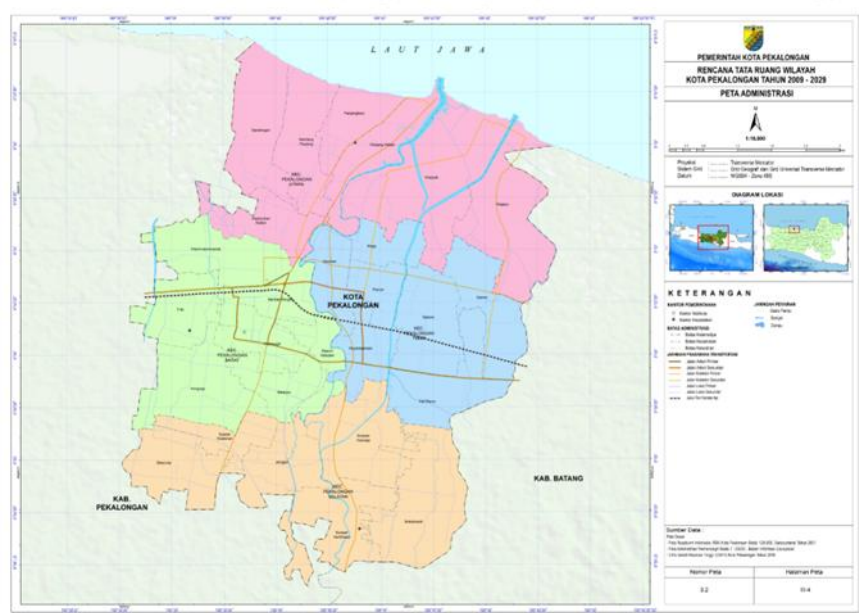


Gambar II-1
Peta Orientasi Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2025

Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar II-2
Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2025

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel II-1
Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas (persen)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,00	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	25
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
	TOTAL	46,42	100

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2025

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,32 km² atau 33 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan.

kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

2.1.2.2. Geologi

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan skala 1:1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung, bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 meter yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses *fluvial* sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.

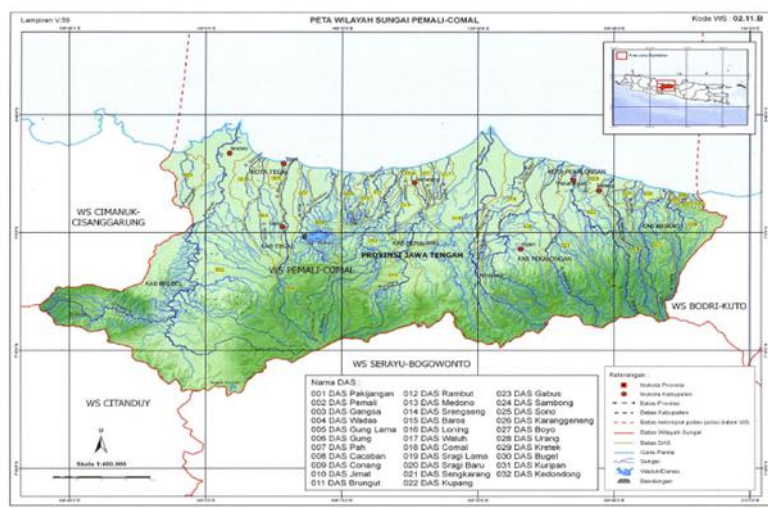


Gambar II-4
Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2025

2.1.2.3. Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.



Gambar II-5
Wilayah Sungai Pemali-Comal

Sumber: Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai, 2025

Daerah Irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI kewenangan Pemerintah Pusat, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah Pusat meliputi DI Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 mdpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran yang sangat besar dari buangan limbah rumah tangga dan industri di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Di wilayah Kota Pekalongan muncul suatu keyakinan, jika air sungainya berwarna-warni atau sangat kotor maka menunjukkan perekonomian sedang bagus. Air sungai yang kotor tersebut menunjukkan limbah buangan industri di Kota Pekalongan meningkat karena terjadinya proses produksi industri yang meningkat. Sebaliknya, jika air sungai relatif bersih maka menandakan berkurangnya proses produksi yang dilakukan industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18' 45,31"-1090 51' 52,35" Bujur Timur dan 060 46' 33,52"-070 13' 24,20" Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Air baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi: a) sumber air baku dari Program SPAM Regional Petanglong Tahap 1 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; b) sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); c) sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; d) sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air). Sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh *al gluvium* dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30 persen dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya. Dari data Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, pada tahun 1985 PDAM Kota Pekalongan mulai membuat sumur bagi air baku dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Namun ketika tahun 2015 PDAM membuat sumur maka kedalamannya telah mencapai \pm 24 meter. Data ini tentunya menunjukkan pemanfaatan air tanah yang telah melebihi daya dukungnya. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka dapat menimbulkan risiko lingkungan yang sangat besar, utamanya intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari pengambilan air tanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusupan (intrusi) air laut.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2020 melakukan penelitian untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Pada tahun 2020 telah dipasang patok tetap penurunan tanah di Stadion Hoegeng dan Kecamatan Pekalongan Selatan, dilanjutkan pemasangan patok tetap penurunan tanah di Tirta, Kandang Panjang, Degayu dan Setono pada tahun 2021. Diharapkan hasil penelitian ini dapat segera didapatkan sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan ke depan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

2.1.2.4. Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 3.303 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 124 hari. Sedangkan Curah hujan terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu 2.036 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 130 hari. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-2 berikut.

Tabel II-2
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan
Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	22	345
2	Februari	18	340
3	Maret	13	339
4	April	14	144
5	Mei	7	138
6	Juni	7	75
7	Juli	5	86
8	Agustus	4	20
9	September	5	160
10	Oktober	1	5
11	Nopember	15	159
12	Desember	19	225
TOTAL		130	2.036
Tahun 2023		95	2.071
Tahun 2022		126	2.365
Tahun 2021		124	3.303
Tahun 2020		116	2.896

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

Dilihat dari kondisi tersebut maka menurut Smith dan Ferguson bahwa tipe iklim di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut

merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100 persen) bernilai antara 14,3-33,3 persen.

Kenaikan curah hujan pada bulan basah dan penurunan pada bulan kering, secara umum merupakan indikasi perubahan iklim. Selain itu, kenaikan suhu akan terus terjadi baik secara global yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. Suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu udara dan permukaan laut. Tujuan perubahan iklim ini untuk memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui upaya peningkatan kesadaran dan mitigasi emisi Gas Rumah Kaca. Target dalam tujuan perubahan iklim ini meliputi (a) Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam; dan (b) Meningkatkan upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Capaian penurunan emisi GRK kumulatif di Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 4,76 Ton CO₂eq.

2.1.2.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya berkurang setiap tahun, namun sebaliknya, tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Pada tahun 2024 tanah sawah mengalami sedikit peningkatan perluasan menjadi 741,17 Ha, tahun 2023 tanah sawah seluas 735 Ha, berkurang sekitar 11,66 persen dari luas 832 Ha pada tahun 2022. Begitu juga dengan tanah kering, meningkat menjadi 3.907 Ha, ada penambahan sekitar 2,55 persen dari luas 3.810 Ha pada tahun 2022.

Tabel II-3
Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	54,00	951,00	1.005,00
2	Pekalongan Timur	228,70	723,30	952,00
3	Pekalongan Selatan	406,90	790,10	1.197,00
4	Pekalongan Utara	31,00	1457,00	1.488,00
TOTAL		720,60	3.921,40	4.642,00
Tahun 2023		735,00	3.907,00	4.642,00
Tahun 2022		832,00	3.810,00	4.642,00
Tahun 2021		886,00	3.756,00	4.642,00
Tahun 2020		886,00	3.756,00	4.642,00

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2025

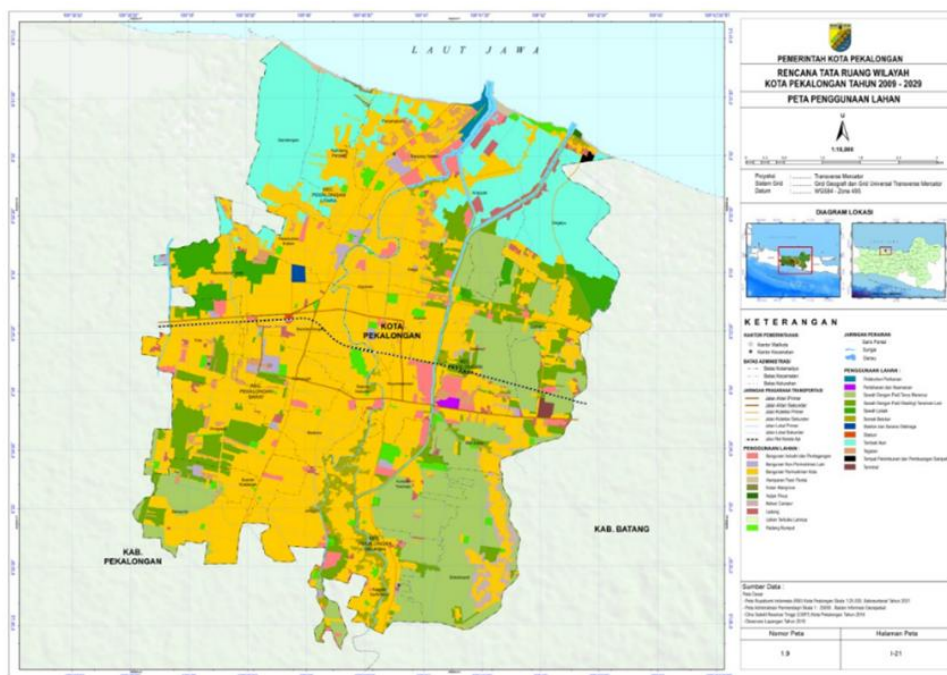
Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan menggunakan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2023 adalah seluas 720,60 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 54 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 228,70 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 406,90 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 31 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2020 seluas 886 Ha, tahun 2021 tidak ada perubahan sementara pada tahun 2022 luasan tanah sawah mengalami penurunan menjadi 832 Ha. Pada tahun 2023 menurun menjadi 735 Ha dan tahun 2024 mengalami penurunan lagi menjadi 720,60 Ha.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan

terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle* (lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 521 Ha atau berkurang dari luasan sebelumnya yaitu seluas 737 Ha. Perubahan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan permukiman, sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam proses perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, diusulkan perubahan luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut. Usulan tersebut adalah penyesuaian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.



Gambar II-6
Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2025

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (*land value*) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dari hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Pekalongan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi pembentukan jasa lingkungan hidup yaitu:

1. **Bentang alam** yang merupakan unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristik elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Kota Pekalongan terdiri dari 2 tipe bentang alam, yaitu dataran fluvial berombak - bergelombang bermaterial aluvium dan dataran fluviomarin bermaterial aluvium. Bentang alam yang paling dominan adalah dataran fluvial berombak – bergelombang bermaterial aluvium yang mencapai 95,50% atau sebesar 4.412,05 hektar. Tipe bentang alam ini tersebar di semua wilayah Kota Pekalongan. Tipe bentang alam kedua adalah dataran fluviomarin bermaterial aluvium yang hanya mencapai 4,50% atau sebesar 207,99 hektar dan di sepanjang wilayah pesisir di Kecamatan Pekalongan Utara.
2. **Vegetasi alami** merupakan vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami tanpa adanya pembudidayaan. Kota Pekalongan terdiri dari 2 tipe vegetasi alami, yaitu vegetasi hutan tepian sungai malar hijau dan vegetasi mangrove. Tipe vegetasi yang paling dominan adalah vegetasi hutan tepian sungai malar hijau yang mencapai 95,5% dari luas total wilayah atau mencapai 4.412,05 hektar yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tipe bentang alam kedua adalah vegetasi mangrove yang hanya mencapai 4,5% atau 207,99 hektar dan hanya terdapat di sepanjang wilayah pesisir di Kecamatan Pekalongan Utara.
3. **Penggunaan lahan** merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia. Penggunaan lahan yang paling dominan di Kota Pekalongan baik pada tahun 2017 maupun tahun 2023 adalah permukiman dan lahan terbangun, yang luasnya mencapai lebih dari 50% wilayah Kota Pekalongan. Tipe penggunaan lahan lainnya yang dominan adalah sawah yang mencapai lebih dari 20%, dan tambak yang mencapai lebih dari 10%.

Analisis jasa lingkungan hidup penting terdiri dari 7 jenis yang terbagi dalam dua kategori yaitu penyedia dan pengatur. Berdasarkan hasil penyusunan daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan hidup di Kota Pekalongan maka memiliki hasil sebagai berikut.

1. **Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air** yang menunjukkan kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan maupun air tanah. Kondisi di Kota Pekalongan saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu lebih dari 90% termasuk dalam kelas sedang. JLH penyedia air kelas tinggi dan sangat tinggi total hanya mencapai kurang lebih 4% yang mana kelas tinggi 0,3% dan sisanya 3,85% merupakan kelas sangat tinggi. Nilai agregat indeks JLH penyedia air di Kota Pekalongan adalah 2,91 pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 yang mencapai 2,97. Kecamatan Pekalongan Utara memiliki agregat indeks JLH penyedia air yang relatif tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.
2. **Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan** merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa suatu kawasan dapat menyediakan pangan baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Kota Pekalongan sebagian besar dalam kategori rendah yang mencapai lebih dari 50%. Meskipun demikian, JLH penyedia pangan di Kota Pekalongan dengan kelas tinggi dan sangat tinggi relatif besar yaitu mencapai 40% yang terdiri dari kelas tinggi mencapai 7,68% dan kelas sangat tinggi mencapai 33,22%. Hal ini yang menyebabkan secara agregat indeks JLH penyedia pangan di Kota Pekalongan masuk dalam kategori kelas sedang yaitu mencapai 3,32 pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 yang mencapai 3,31. Kecamatan yang mempunyai penggunaan lahan berupa sawah dan tambak memiliki nilai agregat indeks JLH penyedia pangan lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Pekalongan Utara.
3. **Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air** merupakan kemampuan lingkungan dalam mengatur siklus hidrologi suatu wilayah. Sebagian besar Kota Pekalongan didominasi oleh JLH pengatur air kelas rendah yaitu mencapai lebih dari 50%. Kawasan dengan kemampuan pengatur air kelas sangat tinggi hanya mencapai 4,15% pada tahun 2023. Nilai Agregat Indeks JLH pengatur air di Kota Pekalongan termasuk pada kelas rendah yaitu 2,79 pada tahun 2023, nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai agregat indeks JLH pengatur air pada tahun 2017 yang mencapai 2,74. Kecamatan Pekalongan Utara merupakan wilayah yang memiliki nilai agregat indeks JLH pengatur air relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.
4. **Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Keanekaragaman Hayati** yang merupakan kemampuan lingkungan dalam memberikan manfaat dengan menyediakan habitat mulai dari tempat istirahat, makan, hingga berkembang biak. Hanya terdapat 2 kelas JLH Pendukung Keanekaragaman Hayati di Kota Pekalongan, yaitu Rendah dan Sedang. Sebagian besar wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam kelas rendah yang mencapai lebih dari 90%. Nilai agregat indeks jasa lingkungan hidup pendukung keanekaragaman hayati di Kota Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 2017 yang mencapai 2,02 dan pada tahun 2023 menjadi 1,99. Wilayah dengan indeks JLH pendukung keanekaragaman hayati relatif tinggi di Kecamatan Pekalongan Barat.
5. **Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim** yang merupakan kemampuan lingkungan dalam mengatur berbagai unsur iklim seperti suhu, hujan dan penguapan, kelembaban, serta angin. Kondisi JLH pengatur iklim di Kota Pekalongan sebagian besar dalam kategori rendah sebesar lebih dari 50% dari total wilayah. Sedangkan kawasan dengan kelas tinggi hanya sebesar 4,32%. Nilai agregat indeks jasa lingkungan hidup pengatur iklim cenderung naik, 2,47 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,79.
6. **Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir** yang merupakan kemampuan lingkungan dalam pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir. Kondisi di Kota Pekalongan saat ini sebagian besar dalam kelas rendah yaitu lebih dari 80%, sedangkan yang masuk kategori kelas tinggi hanya mencapai 4,32%. Nilai agregat indeks jasa lingkungan hidup mitigasi perlindungan bencana banjir di Kota Pekalongan yaitu 2,17 pada tahun 2017, mengalami kenaikan menjadi 2,18 pada tahun 2023.

Kecamatan Pekalongan Barat mempunyai nilai agregat indeks jasa lingkungan hidup mitigasi perlindungan bencana banjir lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

7. **Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor**, merupakan kemampuan lingkungan dalam memberikan perlindungan terhadap bencana longsor. Kondisi di Kota Pekalongan saat ini menunjukkan bahwa sebagai besar wilayah untuk JLH mitigasi perlindungan bencana longsor dalam kelas rendah yaitu lebih dari 50%. Sedangkan wilayah dengan kelas tinggi dan sangat tinggi mencapai 21,92% pada tahun 2023, yang mana 8,13% merupakan kelas tinggi dan 13,79% masuk dalam kategori sangat tinggi. Nilai agregat indeks jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana longsor saat ini mencapai 3,17. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara nilai indeks Kota Pekalongan termasuk ke dalam kelas sedang. Wilayah yang memiliki indeks jasa lingkungan hidup mitigasi perlindungan bencana longsor paling tinggi adalah di Kecamatan Pekalongan Utara.

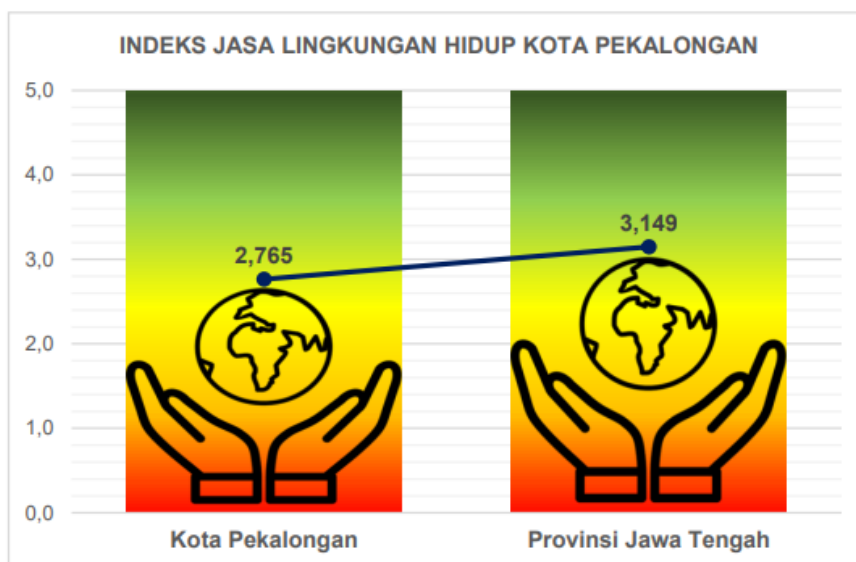
Dalam kajian daya dukung lingkungan hidup dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan terhadap sumber daya yang meliputi daya dukung air dan daya dukung pangan. Hasil kajian daya dukung lingkungan hidup dengan perbandingan ketersediaan dan kebutuhan di Kota Pekalongan menunjukkan hasil berikut.

1. **Daya dukung air** merupakan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Potensi ketersediaan air bersumber dari air permukaan (Wilayah Sungai) serta air tanah bebas (Cekungan Air Tanah). Daya dukung air di Kota Pekalongan menunjukkan kondisi terlampaui baik hanya dari potensi air permukaan (wilayah sungai) maupun dengan menggunakan potensi air bawah tanah bebas, namun jika berbasis pada ketersediaan air permukaan dan air bawah tanah bebas, Kota Pekalongan dalam kondisi belum terlampaui. Potensi ketersediaan air permukaan mencapai 50.573.557,23 m³/tahun, ketersediaan air bawah tanah bebas sebesar 35.403.271,17 m³/tahun, sedangkan kebutuhannya mencapai 53.430.447,59 m³/tahun sehingga surplus 32.546.380,81 m³/tahun. Kecamatan Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur dalam kondisi terlampaui jika hanya berbasis ketersediaan air permukaan. Jika hanya berbasis ketersediaan air bawah tanah bebas, semua wilayah di Kota Pekalongan dalam kondisi terlampaui. Namun jika digabungkan, antara air permukaan dengan air bawah tanah bebas maka seluruh kecamatan dalam kondisi belum terlampaui. Dengan potensi ketersediaan air permukaan dan air bawah tanah bebas yang ada maka Kota Pekalongan masih dapat menampung penduduk sampai dengan 358.854 jiwa, namun potensi ketersediaan air ini hanya dilihat berdasarkan kuantitasnya. Permasalahan yang dihadapi Kota Pekalongan saat ini adalah kualitas air yang ada di sungai yang melintas di Kota Pekalongan tercemar oleh air limbah domestik maupun dari industri rumah tangga. Sedangkan potensi air tanah terutama di kawasan rawan rob dan amblesan tanah juga mengalami pencemaran akibat intrusi air laut yang telah mencapai pusat Kota Pekalongan.
2. **Daya dukung pangan**, merupakan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan yang mana dihitung dengan menggunakan dua pendekatan yaitu berbasis pangan pokok saja (beras) dan juga berbasis kebutuhan total kalori penduduk.
 - **Daya dukung pangan berbasis pangan pokok (beras)** menunjukkan status keseluruhan terlampaui dengan defisit mencapai 16.544,94 ton/tahun yang mana total ketersediaan hanya terdapat 4.235,44 ton/tahun, sedangkan kebutuhan mencapai 20.780,38 ton/tahun. Semua kecamatan di Kota Pekalongan dalam status daya dukung pangan pokok terlampaui.

- **Daya dukungan pangan berbasis kebutuhan kalori**, menunjukkan status yang terlampaui yang mana defisit mencapai lebih dari 243 miliar kalori per tahun. Seluruh kecamatan dalam status terlampaui.

Dengan kondisi daya dukung pangan berbasis pangan pokok yang mana status saat ini menunjukkan defisit atau terlampaui, maka Kota Pekalongan sudah tidak dapat menampung penduduk eksisting, karena jumlah penduduk yang hanya mampu di dukung oleh ketersediaan pangan saat ini hanya 64.849 jiwa saja.

Berdasarkan SK MenLHK No. 973 Tahun 2024 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan yang mana selanjutnya diturunkan menjadi Penentuan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sub Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa biokapasitas yang sesuai dengan karakteristik ekoregion ditentukan oleh jasa lingkungan hidup penyedia air, jasa lingkungan hidup pengatur air, jasa lingkungan penyedia pangan, dan jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati. Berdasarkan kondisi tersebut maka Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) Kota Pekalongan adalah 2,765 (kategori sedang) yang mana lebih rendah dari IJLH Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 3,149 (kategori sedang).



Gambar II-7
Indeks Jasa Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024, 2025

2.1.4. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.4.1. Kualitas Lingkungan Hidup

kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2020-2024 sebesar 8,31 poin, dan pada tahun 2024 IKLH Kota Pekalongan mencapai 59,15. Meski terus mengalami peningkatan, kondisi IKLH Kota Pekalongan masih berada di bawah IKLH Provinsi Jawa Tengah dan IKLH Nasional setiap tahunnya, dengan capaian terendah pada komponen Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dikarenakan peningkatan alih fungsi atau perubahan tata guna lahan serta keterbatasan vegetasi tutupan lahan.

Tabel II-4
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2020	35,33	79,96	23,60	50,84
2021	45,00	80,21	22,40	54,31
2022	45,33	79,29	23,77	54,36
2023	48,86	80,33	24,39	56,24
2024	50,56	84,98	26,14	59,15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2025

Rendahnya IKA di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, DO, dan Fecal Coliform. Parameter tersebut merupakan karakteristik dari limbah cair domestik yang bersumber dari pemukiman berupa grey water yang merupakan hasil dari cucian dapur, cucian pakaian dan kamar mandi, dan sekitar 60-85 persen dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair domestik. Karakteristik dari limbah domestik (*grey water*) yaitu mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan potasium, unsur tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Tingginya kadar organik dalam perairan akan berdampak pada tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya konsentrasi DO. Adanya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan merupakan salah satu potensi terhadap tingginya pencemaran air di Kota Pekalongan.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Metode perhitungan IKTL yang mengkolaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Sementara itu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pekalongan dari tahun 2018-2022 masih sama, dengan nilai IKTL yang kecil. Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kota Pekalongan lebih didominasi oleh pemukiman/kawasan terbangun, sedangkan persentase tutupan lahannya masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya upaya dalam memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Pekalongan terutama di kawasan mangrove.

Kualitas tutupan lahan dapat diukur dengan berbagai parameter seperti keragaman jenis vegetasi, kepadatan vegetasi, keberadaan dan kondisi habitat satwa liar, serta kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh tutupan lahan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan lingkungan kota, seperti menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati dan menyerap polusi udara. Oleh karena itu, RTH menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan.

Persentase tersedianya luasan RTH publik di Kota Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,89 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 18,6 persen. Hal ini disebabkan adanya revisi RTRW pada tahun 2020 sehingga dilakukan pendataan ulang untuk luasan RTH serta adanya perubahan perhitungan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Persentase luasan RTH dari tahun 2021 sampai dengan 2023 terus meningkat, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-5
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik (persen)	18,60	2,89	2,90	2,94	2,94

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2025

2.1.4.2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Pekalongan selama ini mengandalkan penyelesaian di sisi “hilir”, yaitu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu. TPA Degayu berada di Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara dan beroperasi sejak tahun 1994. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dan pemrosesannya menggunakan sistem *control landfill*. Selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, TPA Degayu telah menjadi “tulang punggung” pengelolaan sampah di Kota Pekalongan.

Mulai tahun 2025, Kota Pekalongan harus menerapkan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sebelumnya mengandalkan penyelesaian di “hilir” menjadi penguatan di “hulu” dan “tengah”. Hal ini karena terhitung sejak 20 Maret 2025, TPA Degayu berada dalam pengawasan Pejabat Pengawas LH (PPLH) KLH dan tidak diperbolehkan adanya aktivitas apapun di dalamnya. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2025, Wali Kota Pekalongan secara cepat menetapkan Status Darurat Sampah melalui Surat Nomor 600.4.15/0556 Tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah. Dan puncaknya pada tanggal 7 Mei 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 742 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Seluruh Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Degayu, yang didalamnya berisikan:

- a. Penghentian seluruh kegiatan TPA Degayu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- b. Melaksanakan pembangunan dan pengoperasionalan TPA di tempat baru dengan sistem lahan urug saniter (sanitary landfill) paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Melakukan upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup paling lama 60 (enam puluh) hari, antara lain pembuatan Instalasi Pengolahan Lindi (IPL), Penanganan gas methana dan Pemantauan kualitas udara ambien.

Merespon situasi tersebut, Wali Kota Pekalongan melalui Keputusan No. 600.4.15/0836 tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Rencana Penghentian Seluruh Kegiatan TPA Degayu Kota Pekalongan menetapkan Rencana Penghentian Seluruh Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Degayu Kota Pekalongan.

Berdasarkan data terakhir sebagaimana termuat dalam SIPSN, total timbulan sampah Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah 59.229,58 Ton/ tahun. Sejumlah 10.944,70 Ton (18,48%) berhasil dilakukan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Sebanyak 45.187,00 Ton/ tahun (76,29%) masuk ke TPA, sedangkan sisanya 3.097,88 (5,23%) tidak teridentifikasi. Apabila mengacu pada kategorisasi yang dipedomani selama ini, yaitu membedakan pengelolaan sampah menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) Pengurangan, (2) Penanganan, dan (3) Sampah Tidak Terkelola. Maka, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengurangan sebesar 18,48%, (2) Penanganan sebesar 76,29% dan Sampah Tidak Terkelola sebesar 5,23%, Neraca pengelolaan sampah Kota Pekalongan tahun 2024 sebagaimana tabel II-6.

Tabel II-6
Neraca Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan
Tahun 2024

No.	KETERANGAN	NILAI (Ton/Tahun)
1	2	3
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	
	Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita	56.229,58
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	10.344,70
	Persentase pengurangan sampah	18,48%
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	2.533,10
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	970,3
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	7.441,30
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	45.187,00
	Persentase penanganan sampah	76,29%
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan(*)	-
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	-
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	-
f	Pengolahan	
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	-
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	-
g	Pemrosesan akhir	45.187,00
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	45.187,00
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (B + C)	10.944,70
	Persentase sampah terkelola	18,48%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (A - D)	48.284,88
	Persentase sampah tidak terkelola	81,52%

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, merupakan indikator utama pembangunan (IUP). Dalam Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (dari SIPSN), data yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah: $[(\text{Jumlah Pendaauran Ulang Sampah (data IIc)} + \text{Pengolahan (data IIIf)}) / \text{Timbulan Sampah (data I)}] \times 100$. Pada tahun 2024, jumlah timbulan sampah harian mencapai 59.299,58 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 7.441,30 ton berhasil didaur ulang, dan 7.437,88 ton dikelola melalui proses pengolahan. Dengan demikian, persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah adalah sebesar 25,12%. Angka ini mencerminkan proporsi pengolahan sampah yang telah dilakukan dibandingkan dengan total timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Upaya peningkatan kapasitas dan efisiensi pengolahan sampah perlu terus dilakukan agar

persentase sampah terolah dapat meningkat, mendukung tercapainya target pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Pekalongan.

Tabel II-7
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Tahun 2024

Uraian	2024	
	Satuan	Jumlah
Timbulan sampah (data I)	Ton/hari	59.299,58
Jumlah pendauran ulang sampah (data IIc)	Ton/hari	7.441,30
Pengolahan (data IIIf)	Ton/hari	7.437,88
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	25,12

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2025

2.1.4.3. Pengelolaan Limbah

Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2020-2024 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal di Kota Pekalongan tiap tahunnya mengalami penambahan, baik dalam jumlah industri maupun jumlah limbah yang dihasilkan. Namun untuk IPAL Jenggot dan IPAL Industri Besar mengalami penurunan. Pada IPAL Jenggot dengan jumlah industri yang sama pada tahun 2020 (80 industri) jumlah limbah yang dihasilkan menurun dari 700m³ menjadi 600m³. Sedangkan di tahun 2021 dan 2022 tetap sama dengan 2020, dan ditahun 2023 mengalami penurunan yang cukup besar sehingga hanya menyisakan 150m³ saja. Pada IPAL industri besar, dengan berkurangnya jumlah industri pada tahun 2020 (3 industri) maka jumlah limbah berkurang menjadi 500m³. Jumlah ini sama dengan jumlah di tahun 2021 dan 2022. Beberapa usaha yang belum memiliki pengolahan limbah B3 pada umumnya adalah industri kecil. Untuk IPAL Biogas ternak, sejak tahun 2020 sudah tidak ada limbah karena sudah tidak ada industri yang menghasilkan limbah tersebut. Terjadi anomali jumlah limbah pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan cara perhitungan jumlah limbah pada tahun 2020-2023.

Namun demikian masih terdapat daerah yang merupakan sentra industri kecil yang menghasilkan limbah dan belum terdapat layanan IPAL komunal, yaitu: Pringlangu, Bendan Kergon, Pasir Kraton Kramat, Krapyak, Kelgo, Medono, Kuripan Kertoharjo, sebagian wilayah Jenggot dan sebagian wilayah Banyurip. Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-8
Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

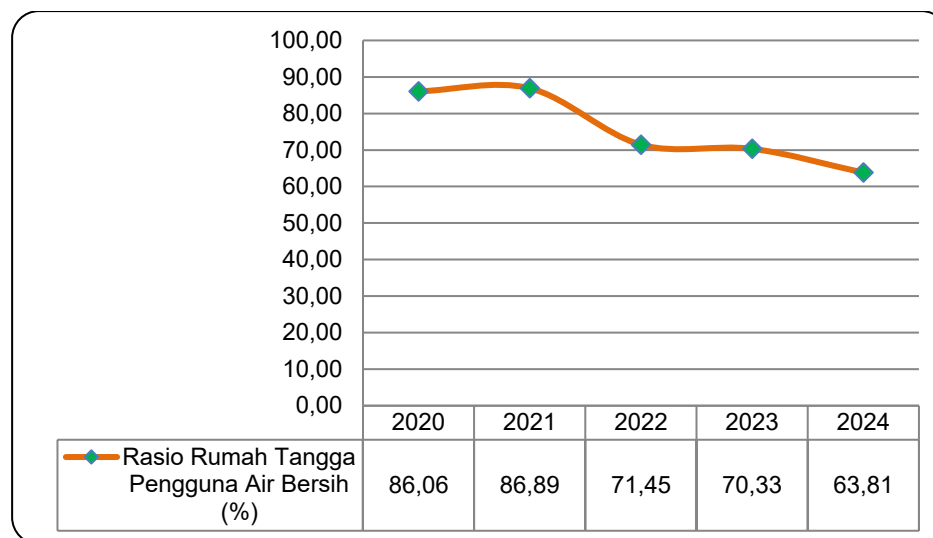
IPAL	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)
Kauman	20	125	20	150	19	150	19	200	19	200
Jenggot	80	600	80	600	80	600	80	150	80	150

IPAL	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah Industri	Limbah (m³)	Jumlah Industri	Limbah (m³)	Jumlah Industri	Limbah (m³)	Jumlah Industri	Limbah (m³)	Jumlah Industri	Limbah (m³)
Industri Kecil	73	426	75	430	75	430	-	-	75	1.998
IPAL Bersama	2	700	2	700	2	700	2	500	2	300
Industri Besar	3	500	3	500	3	500	6	190	8	190
IPAL Biogas Duwet	30	70	30	70	30	70	4	150	4	-
IPAL Biogas Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPAL Pringrejo	25	60	25	75	-	-	-	-	-	-
IPAL Banyurip	55	125	60	150	60	150	-	-	83	250
JUMLAH	288	2.606	295	2.675	269	2.600	171	1440	152	172.800

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2025

2.1.4.4. Penyediaan Air Bersih

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Pemenuhan kebutuhan air minum di Kota Pekalongan dilayani melalui PDAM (oleh Perumda Tirtayasa) dan melalui PAMSIMAS (oleh masyarakat). Secara umum, jumlah layanan air minum (Sambungan Rumah/ SR) oleh PDAM cenderung meningkat. Sebaliknya, jumlah layanan air minum (Sambungan Rumah/ SR) oleh PAMSIMAS cenderung menurun / tetap. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menambah pasokan air minum yang bersumber dari air permukaan di banding dengan air bawah tanah. Meskipun demikian, secara keseluruhan (PDAM dan PAMSIMAS), jika dilihat secara persentase capaian layanan air minum sejak 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.



Gambar II-8
Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: DPUPR, Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan (diolah), 2025

Menurunnya rasio rumah tangga pengguna air bersih yang terjadi pada tahun 2022 dikarenakan perbedaan cara menghitung daekspori tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, diasumsikan 1 SR melayani 4,03 jiwa sebagaimana hasil audit BPKP atas kinerja Perumda Tirtayasa tahun 2023 (mengacu pada data BPS yang diperoleh dari pembagian jumlah penduduk dengan jumlah Kartu Keluarga (KK)). Sementara itu, cara menghitung pada

tahun-tahun sebelumnya diasumsikan 1 SR melayani 5 jiwa. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-9
Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR)
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	PDAM					PAMSIMAS & DAK (Sumur)		TOTAL		Persentase	
	SR (Sambungan Rumah)		HU (Hidran Umum)								
	Jumlah	Jiwa	Jumlah HU	Jumlah Rumah Tangga	Jiwa	Jumlah	Jiwa	Rumah Tangga	Jiwa	Rumah Tangga	Jiwa
2020	26.923	134.615	214	4.280	21.400	21.663	108.315	52.866	264.330	86,06	86,06
2021	27.193	135.965	214	4.280	21.400	22.103	110.515	53.576	267.880	86,89	86,89
2022	27.538	110.978	251	6.228	25.100	21.150	85.235	54.916	221.313	71,45	71,45
2023	28.035	112.981	251	6.228	25.100	21.150	85.235	55.413	223.316	70,33	70,33
2024	27.918	87.383	285	9.105	28.500	27.851	87.174	77.189	203.057	63,81	63,81

Sumber: DPUPR, Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan (diolah), 2025

Pada saat ini, Pemerintah pusat mulai menggeser penggunaan indikator pemenuhan layanan air bersih, dari sebelumnya berupa layanan air bersih menjadi layanan air siap minum. Sehingga terjadi kekosongan data dari lima tahun sebelumnya dimana layanan air siap minum belum didata dengan baik. Selengkapnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-10
Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (persen)	0	0	0	0	0
Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM	0	0	0	0	0
Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM	27.137	27.186	27.789	28.035	28.203

Sumber data: PDAM Kota Pekalongan, 2025

2.1.5. Aspek Demografi

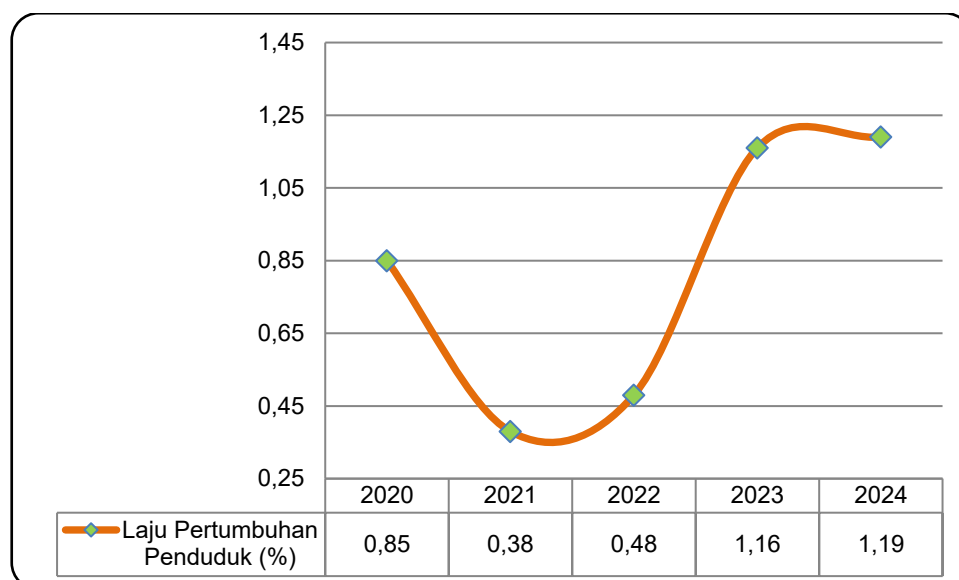
Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2024 berdasarkan data BPS Jawa Tengah sebanyak 321.095 jiwa, terdiri dari 162.158 jiwa laki-laki dan 158.937 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 102,0 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Pada tahun 2024 bertambah 3.571 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,19 persen. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, disajikan dalam Tabel II-11 berikut.

Tabel II-11
Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2020	155.145	152.005	307.150
2021	155.701	152.609	308.310
2022	156.391	153.351	309.742
2023	160.369	157.155	317.524
2024	162.158	158.937	321.095

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025 dan www.jateng.bps.go.id, 2025

Gambar II-9 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2020-2024. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,38 persen. Dari tahun 2020 sampai tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan fluktuatif.



Gambar II-9
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

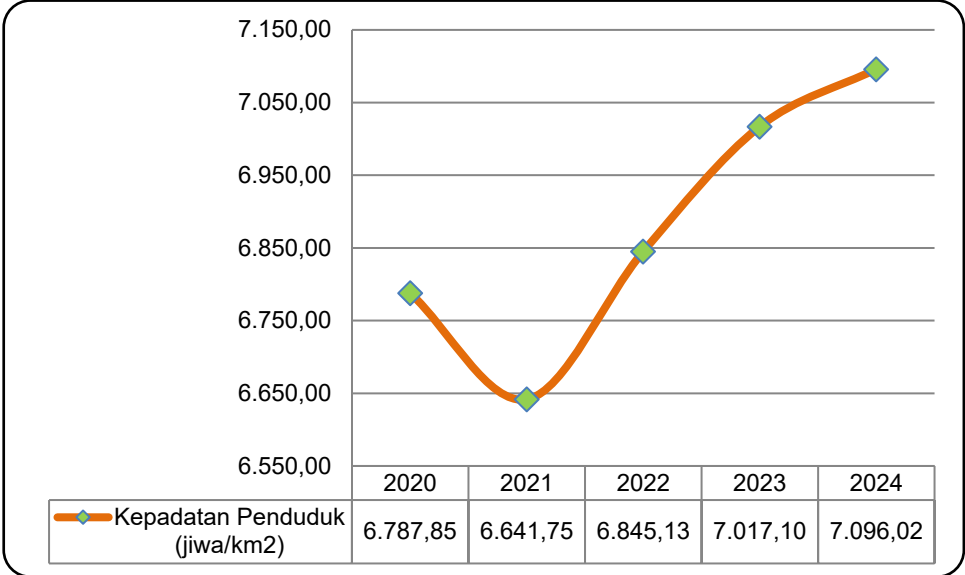
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025 dan www.jateng.bps.go.id, 2025

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan lebih kecil dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia maupun Provinsi Jawa Tengah. Fenomena laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil dan cenderung menurun tersebut, juga dialami kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun menunjukkan pelaksanaan program keluarga berencana membawa dampak yang cukup signifikan. Namun demikian, dalam kerangka pengembangan wilayah, laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun menunjukkan proses urbanisasi yang telah mengalami perlambatan. Kondisi ini merupakan fenomena wajar karena proses urbanisasi pada tahapan tertentu akan mengalami perlambatan dan bahkan pada saat tertentu akan stagnan.

Proses urbanisasi yang mengalami perlambatan dapat dilihat dari penambahan penduduk secara alami dan migrasi. Dengan asumsi penambahan penduduk alami terjadi secara konstan maka perlambatan tersebut diakibatkan daya tarik Kota Pekalongan yang menurun, sehingga semakin menurunnya migrasi masuk ke Kota Pekalongan. Dapat dimaknai juga semakin banyaknya migrasi keluar dari Kota Pekalongan ke wilayah lain karena berbagai

pertimbangan. Fenomena pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan yang cenderung menurun, secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu kondisi, dimana daya tarik Kota Pekalongan yang mulai menurun.

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Namun demikian pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 27,68 jiwa dibandingkan dengan tahun 2022. Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2020-2024 disajikan dalam Gambar II-10 berikut.



Gambar II-10
Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025 dan www.jateng.bps.go.id, 2025

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2024, pendidikan SD ke bawah sebanyak 58.341 jiwa (32,60 persen), diikuti SMP sebanyak 38.926 jiwa (21,75 persen) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 81.685 jiwa (45,65 persen) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2024 berjumlah 178.952 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2020, struktur pekerja yang lulusan SD ke bawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) ke atas selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namun tidak signifikan. Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel II-12 berikut.

Tabel II-12
Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						Jumlah
	≤SD		SLTP		≥SM		
	orang	persen	orang	persen	orang	persen	
2020	52.326	35,79	29.357	20,08	64.536	44,13	146.219
2021	58.085	34,43	34.121	20,22	56.191	33,30	168.725
2022	50.573	31,32	35.349	21,89	75.548	46,79	161.470

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						Jumlah
	≤SD		SLTP		≥SM		
	orang	persen	orang	persen	orang	persen	
2023	50.065	29,19	37.745	22,00	83.712	48,81	171.522
2024	58.341	32,60	38.926	21,75	81.685	45,65	178.952

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025 (diolah), 2025

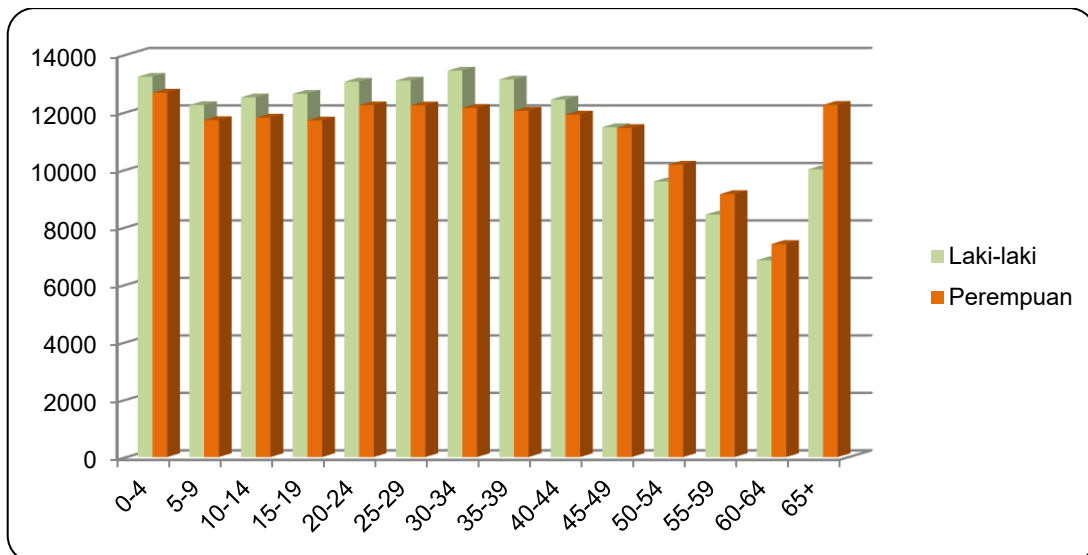
Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2024 paling banyak berada pada rentang usia 0-4 tahun yaitu sebanyak 25.911 jiwa, diikuti rentang usia 30-34 tahun sebanyak 25.591 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 65 tahun sebanyak 22.265 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan dalam Tabel II-13 berikut.

Tabel II-13
Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	13.231	12.680	25.911
5-9	12.245	11.724	23.969
10-14	12.515	11.809	24.324
15-19	12.636	11.711	24.347
20-24	13.057	12.238	25.295
25-29	13.097	12.232	25.329
30-34	13.444	12.147	25.591
35-39	13.135	12.049	25.184
40-44	12.438	11.915	24.353
45-49	11.476	11.447	22.923
50-54	9.588	10.171	19.759
55-59	8.433	9.149	17.582
60-64	6.850	7.413	14.263
65+	10.013	12.252	22.265
Jumlah	162.158	158.937	321.095

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

Penduduk Kota Pekalongan tahun 2024 menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam bentuk diagram batang seperti berikut.



Gambar II-11
Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025 (diolah), 2025

Dari data jumlah penduduk berdasarkan struktur umur tersebut, dapat diketahui bahwa Kota Pekalongan memiliki bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif, yaitu rentang usia 15 hingga 64 tahun. Jumlah penduduk usia produktif Kota Pekalongan adalah 224.626 jiwa atau sebesar 69,96% dari jumlah penduduk seluruhnya.

Fenomena yang cukup jarang terjadi ini tentu akan memberikan banyak perubahan dan penyesuaian pada kehidupan bermasyarakat dalam suatu daerah. Tidak selalu menguntungkan, jika fenomena tersebut tidak diimbangi dengan persiapan yang matang maka justru dapat menjadi ancaman bagi suatu daerah. Pemerintah Kota Pekalongan harus melakukan upaya terintegrasi untuk memanfaatkan bonus demografi ini menjadi keuntungan bagi Kota Pekalongan. Salah satunya, fenomena ini menjadi peluang besar bagi Kota Pekalongan untuk meningkatkan kinerja perekonomian, terutama sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa, serta sektor lainnya yang menjadi sektor unggulan di Kota Pekalongan.

2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

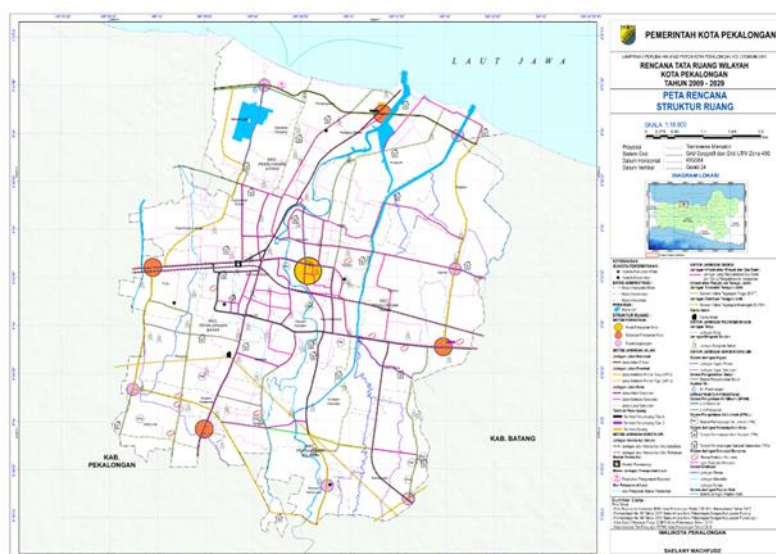
Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Kreatif yang didukung Perdagangan dan Jasa, Industri, dan Perikanan, yang Nyaman, Aman, Produktif, serta Berkelanjutan”.

Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, rencana struktur ruang Kota Pekalongan terdiri atas Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana. Pusat Kegiatan dijabarkan dalam hirarki yang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan Alun-Alun, pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional di Kelurahan Kauman dan kawasan Stasiun di Kelurahan Bendan Kergon. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, SPPK Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan, SPPK Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Tirto, SPPK Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Gamer dan Kelurahan Kalibaros, SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan terletak di Kelurahan Banyurip. Pusat Lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Degayu, Kelurahan Gamer, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Sokoduwet.

Untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Untuk rata-rata ketercapaian infrastruktur dasar perkotaan di Kota Pekalongan, pada tahun 2019 mencapai 91,41 persen yang terdiri dari sektor air minum, sanitasi dan persampahan. Gambaran lebih detail dapat dilihat pada peta rencana struktur ruang berikut.

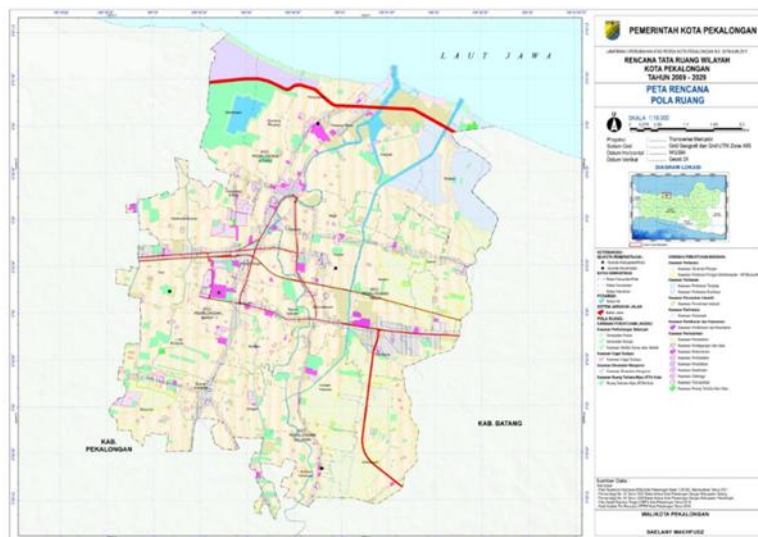


Gambar II-12
Peta Rencana Struktur Ruang

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2025

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH) kota dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan keamanan. Rencana pola ruang digambarkan sebagaimana peta berikut.



Gambar II-13
Peta Rencana Pola Ruang

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2025

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 pada Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

1. Kawasan Lindung

a. Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai memiliki luas ± 24 Ha, sempadan pantai memiliki luas ± 26 Ha dan kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas ± 15 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggung dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Sungai Banger, Sungai Gabus, Sungai Meduri dan Sungai Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi, Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Krapyak dan Degayu. Kawasan sekitar danau atau waduk yang berfungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk yang berada di Kelurahan Bandengan dan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

b. Kawasan Cagar Budaya

Seluas ± 9 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Jetayu di Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Persentase tersedianya luasan RTH publik di Kota Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,89 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 18,6 persen. Hal ini disebabkan adanya revisi RTRW pada tahun 2020 sehingga dilakukan pendataan ulang untuk luasan RTH serta adanya perubahan perhitungan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Persentase luasan RTH dari tahun 2021 sampai dengan 2024 terus meningkat yaitu menjadi 2,94 persen.

d. Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove merupakan sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan ekosistem mangrove berada di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak dan Panjang Baru seluas 88 (delapan puluh delapan) hektar.

2. Kawasan budidaya

a. Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian berupa tanaman pangan seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) Ha berada di Kelurahan Banyurip, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Pringrejo, Degayu, Gamer, Kalibaros dan Setono. Lahan pertanian tanaman pangan tersebut merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

b. Kawasan Perikanan

Terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi:

- a. Pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.
- b. Kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak.
- c. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan.
- d. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.

Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan transportasi, kawasan ruang terbuka non hijau dan kawasan sektor informal yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Dengan luas sebagai berikut:

- a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.430 (dua ribu empat ratus tiga puluh) hektar.
- b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hektar.
- c. Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar.

- d. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.
- e. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) hektar.
- f. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
- g. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar.
- h. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
- i. Kawasan ruang terbuka non hijau, yang terdiri atas TPA dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, Kolam Renang dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar dan Lapangan Olahraga dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar.
- j. Kawasan sektor informal.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan industri menengah. Seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar berada di:

- a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
 - 1. Kelurahan Banyurip;
 - 2. Kelurahan Buaran Kradenan;
 - 3. Kelurahan Jenggot;
 - 4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
 - 5. Kelurahan Kuripan Yosorejo.
- b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
 - 1. Kelurahan Bandengan;
 - 2. Kelurahan Krapyak;
 - 3. Kelurahan Padukuhan Kraton;
 - 4. Kelurahan Panjang Wetan;
 - 5. Kelurahan Kandang Panjang; dan
 - 6. Kelurahan Panjangbaru.
- c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
 - 1. Kelurahan Gamer;
 - 2. Kelurahan Kali Baros;
 - 3. Kelurahan Klego;
 - 4. Kelurahan Noyontaansari;
 - 5. Kelurahan Poncol; dan
 - 6. Kelurahan Setono.
- d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
 - 1. Kelurahan Bendan Kergon;
 - 2. Kelurahan Medono;
 - 3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
 - 4. Kelurahan Pringrejo;
 - 5. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
 - 6. Kelurahan Tirto.

5. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya berada di Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan

Pringrejo Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Kauman. Pariwisata alam seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di Kelurahan Krapyak, Panjang Wetan dan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara. Pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik, kerajinan tenun, dan *handycraft* terletak di Kelurahan Podosugih, Medono, Bendan Kergon, Poncol, Kali Baros, Gamer, Noyontaansari, Setono, Klego, Banyurip, Kauman; dan Pasirkratonkramat.

6. Kawasan Pertahanan-Keamanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor eks Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat; Kantor Koramil dan Kantor Polsekta di seluruh wilayah kecamatan.

7. Sinergi Kota Pekalongan Dengan Daerah Tetangga Berkaitan Dengan Aspek Tata Ruang

Terkait aspek perencanaan tata ruang dalam revisi Perda RTRW Kota Pekalongan telah direncanakan beberapa hal yang dapat bersinergi dengan Perda RTRW Kabupaten Pekalongan dan Perda RTRW Kabupaten Batang, sebagai berikut:

1) Struktur Ruang

- a. Telah direncanakan Jalan Lingkar Utara Petanglong, yang akan menghubungkan kawasan strategis PLTU Batang dan Kawasan Industri Terpadu (di Kabupaten Batang)-Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kawasan Wisata Pantai (di Kota Pekalongan)-Rencana Kawasan Industri (di Kabupaten Pekalongan)-jalur Pantura. Adanya Jalan Lingkar Utara Petanglong ini akan mempermudah akses ke kawasan-kawasan strategis tersebut, sekaligus juga akan mengurangi kemacetan di jalur Pantura, sehingga harapannya akan menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut.
- b. Telah direncanakan jalur transportasi masal (BRT) yang menghubungkan dari Kota Batang-Kota Pekalongan-Kota Kajen. Diharapkan dengan disediakannya fasilitas transportasi masal (BRT) yang nyaman ini, akan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, sehingga akan mengurangi kepadatan lalu-lintas pada jalur-jalur yang menghubungkan 3 daerah tersebut.

2) Pola Ruang

Perencanaan Pola Ruang untuk wilayah-wilayah perbatasan telah melalui proses padu serasi dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, sehingga sudah ada sinkronisasi. Namun demikian, perlu diperhatikan juga perkembangan potensi kebencanaan di masa mendatang yang ada di wilayah-wilayah perbatasan tersebut, yang menjadikan perlu dipikirkan dan disepakati bersama antara dua daerah yang berbatasan, rencana Pola Ruang yang lebih feasible.

Pada wilayah-wilayah yang dekat pantai, “pergerakan kawasan yang terdampak rob dengan probabilitas tinggi bergeser dari tahun 2025 hingga 2030 pada kawasan tambak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan tambak merupakan lahan yang memiliki probabilitas paling tinggi terdampak dan berubah menjadi kawasan rob. Hingga pada akhir tahun 2035, rob mulai masuk pada kawasan persawahan untuk menjadi kawasan rob. Hal ini tentu menggambarkan dampak yang diberikan pada risiko bencana banjir, mengancam aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi kajian, khususnya aktivitas perikanan dan pertanian” (Laporan *Loss and*

3) Batas Wilayah administratif

Telah dilakukan kegiatan survey dan perapatan patok batas wilayah di 3 daerah tersebut, yang melibatkan Bagian Tata Pemerintahan Setda, Lurah / Kepala Desa yang berbatasan dan BPN. Yang outputnya akan menghasilkan batas wilayah yang lebih detail deliniasinya. Untuk melegal formalkan out put kegiatan ini perlu dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan di tingkat kepala daerah, kemudian dimintakan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri.

2.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landscape pesisir.

Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang surutnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (*slum area*) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama

disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

Berdasarkan gambaran potensi kebencanaan di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota (Pasal 5) dan strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana (Pasal 13A) melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, yaitu:

- 1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:
 - a. Pengembangan kegiatan industri kreatif yang mempertimbangkan kualitas lingkungan;
 - b. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong;
 - c. Pengaturan kegiatan industri;
 - d. Peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian;
 - e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
 - f. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
 - h. Peningkatan pengelolaan kawasan strategis Kota;
 - i. Peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
 - j. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 2) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
 - b. Mengembangkan RTH di sekitar DAS dan pada kawasan rawan bencana risiko tinggi;
 - c. Meningkatkan mitigasi bencana risiko tinggi;
 - d. Mewujudkan arahan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana; dan
 - e. Mewujudkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana.

Pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 disebutkan adanya Sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur evakuasi bencana menuju ruang evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana terdiri dari:

- a. Jalur evakuasi terhadap bencana abrasi, meliputi Jalan Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Sari dan Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
- b. Jalur evakuasi terhadap bencana rob, meliputi Jalan Samudera Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Kandang Panjang, Jalan Samudera Pasai di Kelurahan Panjang Baru, Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, dan Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
- c. Jalur evakuasi terhadap bencana banjir terdapat di:
 - Kecamatan Pekalongan Selatan, meliputi Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Buaran Kradenan;
 - Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pringrejo dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendan Kergon; dan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Pasir Kraton Kramat;
 - Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Jalan WR. Supratman dan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Padukuhan Kraton.
- d. Jalur evakuasi terhadap bencana angin topan, terdapat di Jalan Ki Mangun Sarkoro di Kelurahan Degayu dan Jalan Patimura di Kelurahan Gamer.

Sedangkan Ruang evakuasi bencana, antara lain:

- Lapangan;
- Stadion;
- Taman publik;
- Bangunan rumah;
- Bangunan kantor pemerintah;
- Bangunan fasilitas sosial;
- Bangunan fasilitas umum, dan
- Ruang/bangunan Lainnya.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif

2.2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021, terdiri dari:

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, yang meliputi:

- a. Bantuan pangan;
 - b. Bantuan kesehatan;
 - c. Bantuan pendidikan; dan
 - d. Bantuan perumahan.
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. Bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. Fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. Fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
 - f. Fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat.
 3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, meliputi:
 - a. Peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
 - b. Perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
 - c. Peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana usaha.
 4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
 - a. Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
 - b. Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup;
 - c. Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

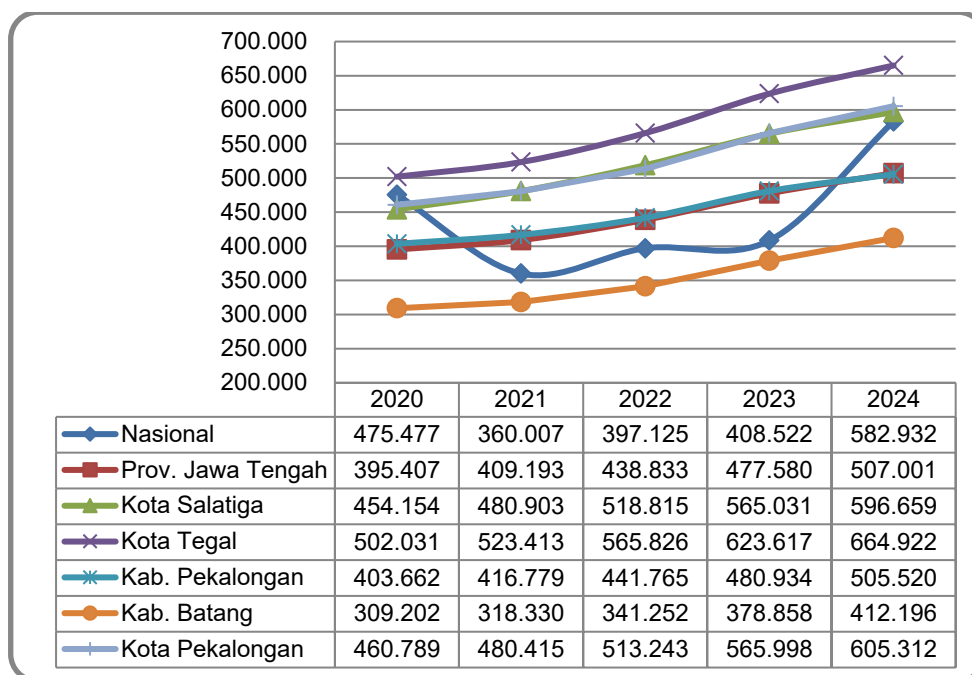
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2024, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp. 605.312/kapita/bulan. Angka ini diatas Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp. 582.932 dan diatas Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 507.001,00.

Tabel II-14
Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan, Daerah Setara,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GK Provinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2020	460.789	309.202	403.662	502.031	454.154	395.407	454.652
2021	480.415	318.330	416.779	523.413	480.903	409.193	472.525
2022	513.243	341.252	441.765	565.826	518.815	438.833	513.517
2023	565.998	378.858	480.934	623.617	565.031	477.580	408.522
2024	605.312	412.196	505.520	664.922	596.659	507.001	582.932

Sumber: <https://pekalongankota.bps.go.id/>, <https://jateng.bps.go.id/>, dan <https://www.bps.go.id/> (diolah), 2025

Untuk memberikan gambaran perbandingan garis kemiskinan antara Kota Pekalongan, daerah setara, Provinsi Jawa Tengah dan nasional, disajikan dalam grafik berikut.



Gambar II-14
Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan
dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: <https://pekalongankota.bps.go.id/>, <https://jateng.bps.go.id/>, dan <https://www.bps.go.id/> (diolah), 2025

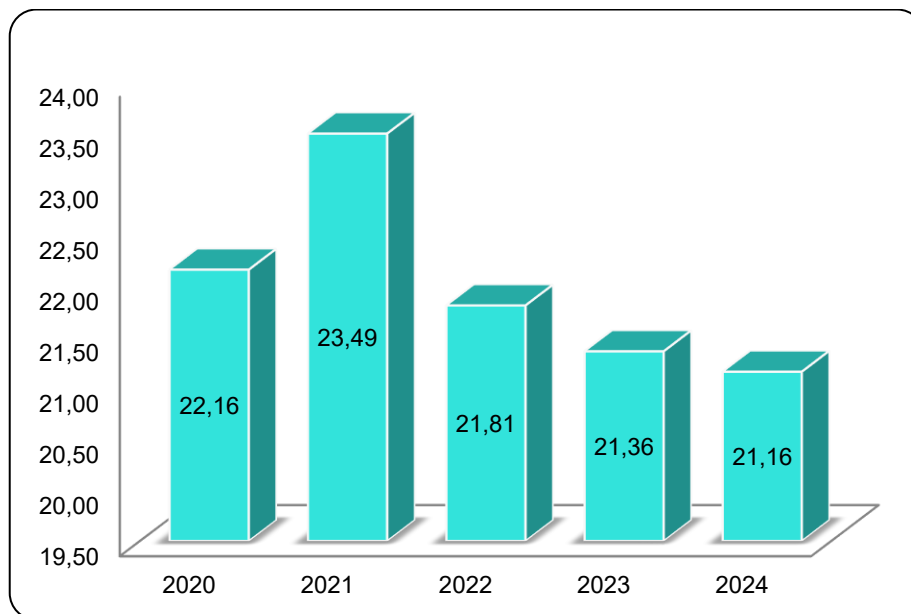
Data garis kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dalam periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, GK Kota Pekalongan tercatat sebesar Rp460.789, kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp605.312 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kenaikan biaya hidup minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika dibandingkan dengan daerah setara di sekitar Kota Pekalongan, seperti Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, garis kemiskinan Kota Pekalongan cenderung lebih tinggi, mengindikasikan standar hidup yang lebih tinggi di wilayah perkotaan.

Selain itu, Kota Pekalongan juga memiliki GK yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan bahkan melebihi rata-rata nasional pada tahun 2020-2023. Namun, pada tahun 2023, terjadi anomali di mana garis kemiskinan nasional mengalami penurunan signifikan menjadi Rp408.522, sementara di Kota Pekalongan dan daerah lainnya justru mengalami kenaikan. Tren ini kembali normal pada tahun 2024 dengan garis kemiskinan nasional naik menjadi Rp582.932, mendekati angka di Kota Pekalongan.

Kenaikan garis kemiskinan di Kota Pekalongan sejalan dengan tren daerah setara dan nasional, menunjukkan adanya tekanan inflasi serta meningkatnya kebutuhan dasar. Hal ini menuntut perhatian lebih dalam upaya pengendalian harga kebutuhan pokok serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar daya beli tetap terjaga.

2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.



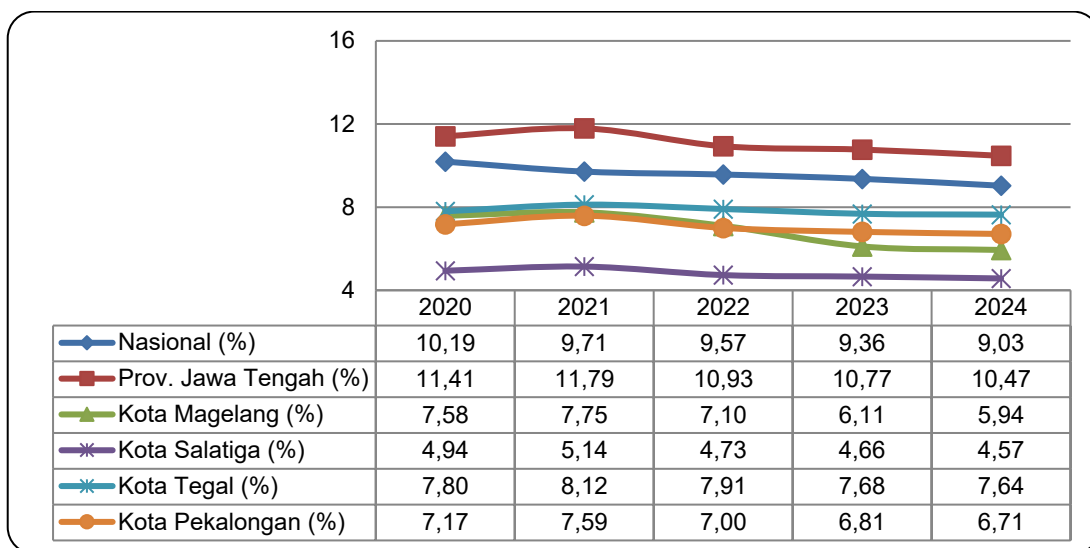
Gambar II-15
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024 (000 jiwa)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan peningkatan signifikan pada 2021 mencapai 23,49 ribu jiwa, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, sejak 2022, angka tersebut menunjukkan tren penurunan bertahap, dari 21,81 ribu jiwa pada 2022 menjadi 21,16 ribu jiwa pada 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya pemulihan ekonomi serta efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah. Meski demikian, angka kemiskinan masih perlu terus ditekan agar mencapai target kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Pekalongan.

Konsistensi strategi pengentasan kemiskinan harus terus dijaga dan ditingkatkan sehingga jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan dapat menurun signifikan. Beberapa strategi tersebut adalah dengan mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, serta menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi mengurangi beban pengeluaran warga miskin yaitu melalui pemberian bantuan sembako dan BLT (bantuan langsung tunai). Dalam hal meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, Pemerintah Kota melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan-pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), Dindagkop UKM, maupun kelurahan. Sedangkan dalam hal menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota menyinergikan kebijakan bantuan tunai yang bersumber dari DBHCHT dengan mempersyaratkan penerima bantuan adalah warga miskin dari DTKS yang belum menerima bantuan apapun.



Gambar II-16
Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan
dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2025

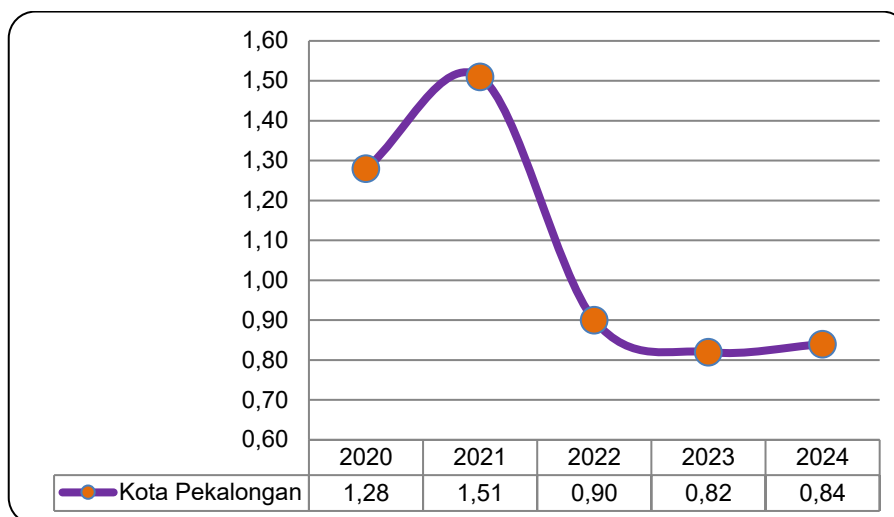
Selama kurun waktu 2020 hingga tahun 2024, Rasio penduduk miskin di Kota Pekalongan menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit kenaikan pada 2021 sebesar 7,59%, sebelum mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 6,71% pada 2024. Dibandingkan dengan daerah setara, Kota Pekalongan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari Kota Tegal namun masih lebih tinggi dari Kota Salatiga yang konsisten berada di bawah 5%. Kota Magelang juga mengalami penurunan signifikan, dari 7,58% pada 2020 menjadi 5,94% pada 2024. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional juga menunjukkan tren menurun, masing-masing dari 11,41% dan 10,19% pada 2020 menjadi 10,47% dan 9,03% pada 2024. Penurunan rasio kemiskinan di Kota Pekalongan mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, meskipun masih perlu langkah strategis untuk mencapai angka yang lebih kompetitif dibandingkan dengan daerah setara yang memiliki capaian lebih baik.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada 2020, indeks ini tercatat sebesar 1,28 sebelum meningkat tajam

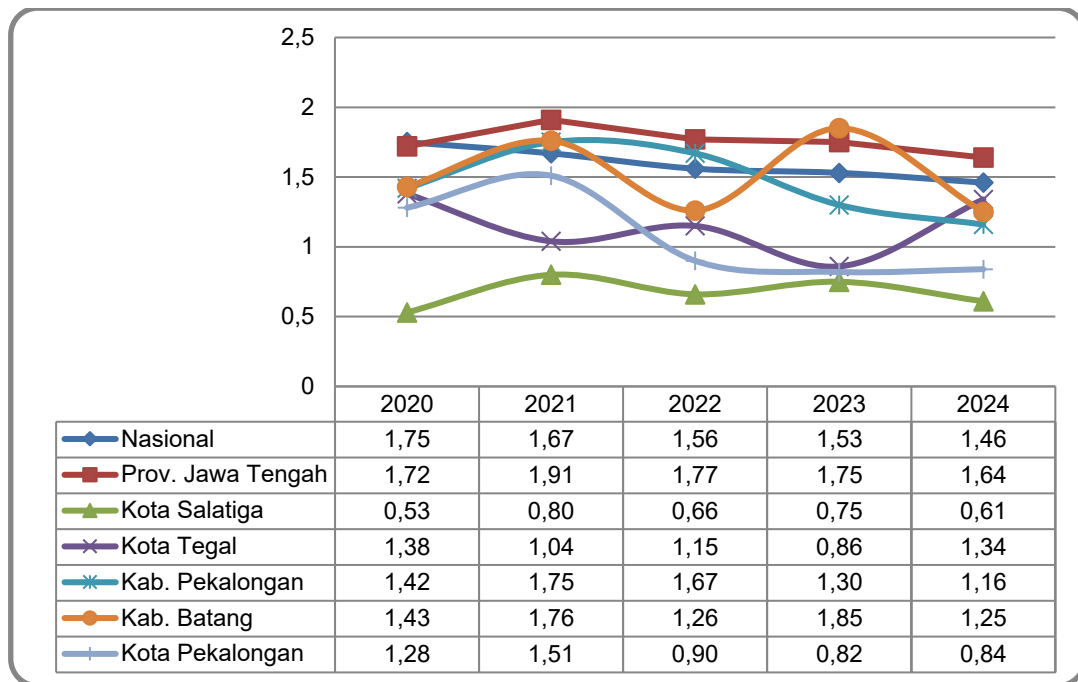
menjadi 1,51 pada 2021, yang kemungkinan mencerminkan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Setelah itu, indeks menunjukkan penurunan signifikan pada 2022 menjadi 0,90 dan terus menurun menjadi 0,82 pada 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 0,84 pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa setelah lonjakan pada 2021, tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Pekalongan berhasil ditekan, mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Namun, kenaikan kecil pada 2024 menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut agar penurunan dapat berlanjut secara konsisten. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 disajikan dalam Gambar II-17 berikut.



Gambar II-17
Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: <https://pekalongankota.bps.go.id/> dan <https://jateng.bps.go.id/> (diolah), 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan daerah setara, Provinsi Jawa Tengah, dan tingkat nasional menunjukkan pola fluktuatif dalam periode 2020-2024. Kota Pekalongan mengalami peningkatan pada 2021 dari 1,28 ke 1,51, sebelum menurun signifikan pada 2022 menjadi 0,90 dan relatif stabil di kisaran 0,82–0,84 pada 2023-2024. Dibandingkan dengan daerah lain, Kota Pekalongan memiliki indeks yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, yang mengalami fluktuasi lebih tajam dengan puncak pada 2021 dan 2023. Kota Salatiga memiliki indeks terendah di antara semua wilayah, menandakan tingkat kedalaman kemiskinan yang lebih ringan. Secara nasional dan di Provinsi Jawa Tengah, indeks menunjukkan tren menurun, mengindikasikan perbaikan ekonomi secara luas. Data ini menunjukkan bahwa Kota Pekalongan telah berhasil menekan kedalaman kemiskinan pasca-2021, tetapi perlu terus mempertahankan tren positif agar kondisi kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II-18 berikut.



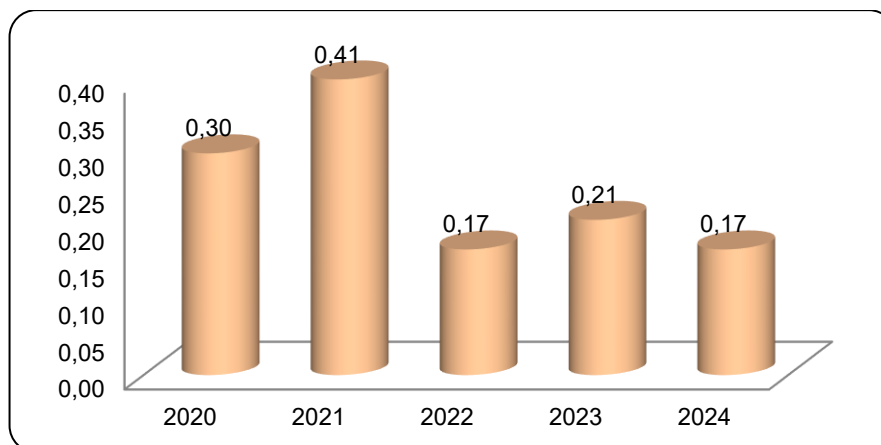
Gambar II-18
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan
dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2025

4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

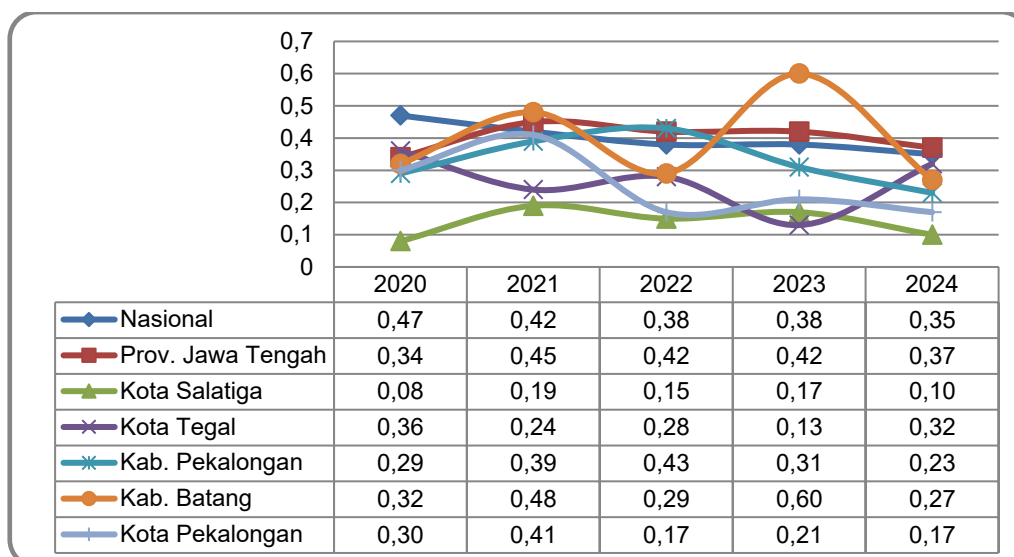
Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, indeks ini tercatat sebesar 0,30 sebelum meningkat signifikan pada 2021 menjadi 0,41, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat. Namun, pada 2022 terjadi penurunan drastis hingga 0,17, menandakan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Pada 2023, indeks sedikit meningkat menjadi 0,21 sebelum kembali turun menjadi 0,17 pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa setelah lonjakan pada 2021, tingkat keparahan kemiskinan berhasil ditekan, meskipun masih terdapat fluktuasi kecil dalam dua tahun terakhir yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar stabilitas kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.



Gambar II-19
Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Sumber: pekalongankota.bps.go.id dan jateng.bps.go.id (diolah), 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi dalam periode 2020-2024, dengan peningkatan signifikan pada 2021 (0,41) sebelum turun drastis pada 2022 (0,17) dan mengalami sedikit kenaikan pada 2023 (0,21), lalu kembali menurun pada 2024 (0,17). Jika dibandingkan dengan daerah setara, Kota Pekalongan memiliki indeks yang relatif lebih rendah dibandingkan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, yang mencapai puncak tertinggi masing-masing pada 2023 dengan 0,60 dan 0,43. Sementara itu, Kota Salatiga memiliki indeks keparahan kemiskinan paling rendah, berkisar antara 0,08 hingga 0,19, menunjukkan kondisi kemiskinan yang lebih terkendali. Secara nasional dan di Provinsi Jawa Tengah, indeks juga menunjukkan tren fluktuatif, dengan sedikit penurunan dari 2020 ke 2024. Data ini mencerminkan bahwa Kota Pekalongan telah berhasil menekan tingkat keparahan kemiskinan pasca-2021, namun tetap perlu memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan agar tren positif ini lebih stabil dan berkelanjutan.



Gambar II-20
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara,
Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2025

Upaya terintegrasi telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan bersama para pemangku kepentingan, dalam rangka untuk terus menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, karena angka kemiskinan telah mencapai angka satu digit, maka penurunan angka kemiskinan telah mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan karena kemiskinan yang harus diatasi adalah kemiskinan struktural. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan lebih terintegrasi antar pemangku kepentingan pembangunan Kota Pekalongan dan dilakukan secara kontinyu.

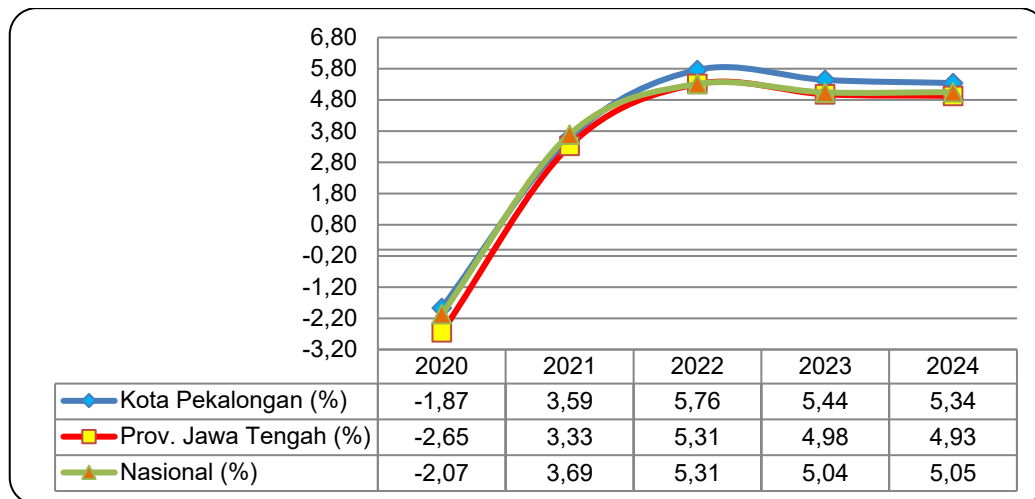
Salah satu cara pandang dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan adalah dengan mencermati data angka kemiskinan selama 1 (satu) dekade ini, dengan dibandingkan indikator yang lain, terutama indikator kinerja makro kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan berbagai perkembangan data berbagai indikator selama 1 (satu) dekade ini (tahun 2013-2022) bahwa angka kemiskinan memiliki korelasi kuat dan signifikan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan PDRB Per Kapita. Angka kemiskinan memiliki korelasi yang lemah dan tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), Indeks Gini, dan Inflasi.

Korelasi angka kemiskinan dengan IPM dan PDRB per kapita adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi IPM dan pendapatan per kapita maka angka kemiskinan akan semakin rendah. Oleh karena itu, upaya terintegrasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus dipadukan dengan upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk terus meningkatkan IPM maupun PDRB atau PDRB per kapita. Di sisi yang lain, indikator pertumbuhan ekonomi dan TPT belum memiliki korelasi yang signifikan dengan angka kemiskinan. Upaya penurunan TPT harus dapat berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang harus diwujudkan pun adalah pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.2.1.2. Kondisi dan Kinerja Ekonomi Daerah

1. Pertumbuhan Ekonomi

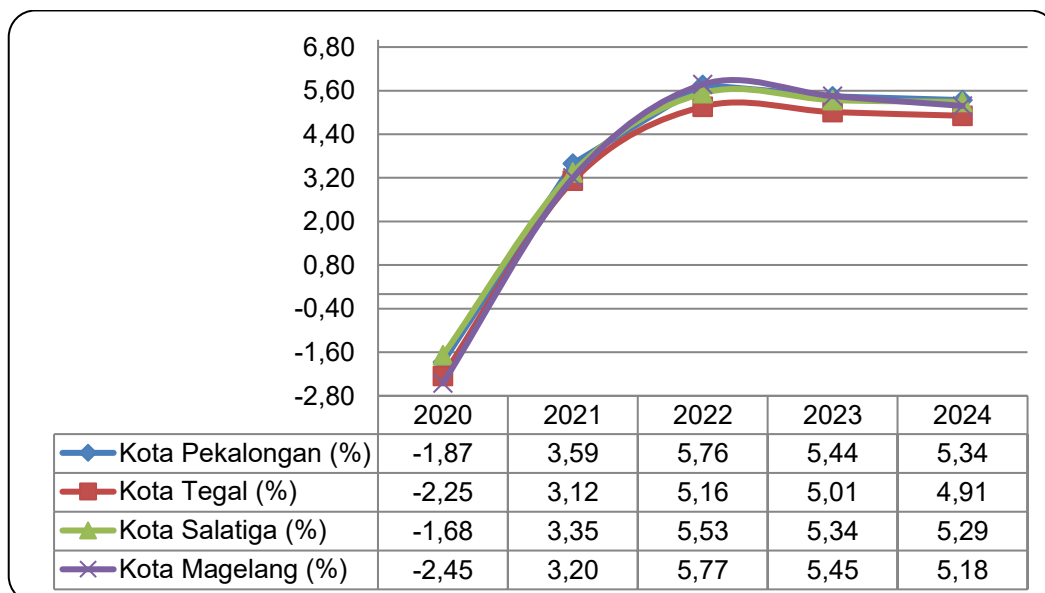
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *COVID-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami perlambatan sebesar 5,44 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami perlambatan lagi sebesar 5,34 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh.



Gambar II-21
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan
Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: www.jateng.bps.go.id (diolah), 2025

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan Kota Tegal dan Kota Salatiga, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang. Sementara pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan dengan kota setara. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II-22 berikut.



Gambar II-22
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan
dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2020-2024

Sumber: www.jateng.bps.go.id (diolah), 2025

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rangka pemulihan dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai dampak pandemi *COVID-19*, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorongnya. Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dapat memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga kesejahteraan masyarakat terus semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi terdiri yang merupakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terdistribusi berdasarkan atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran, dimana pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 67,89% merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sebesar 38,69% merupakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), sebesar 7,53% merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah, sebesar 1,23% merupakan pengeluaran konsumsi LNPRT, sebesar 0,44% merupakan perubahan inventori, serta sebesar -15,78% merupakan net ekspor barang dan jasa. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan persediaan merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cara mengetahui informasi tentang PMTB dan persediaan, tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan suatu wilayah atau negara dari tahun ke tahun. Bergeraknya perekonomian suatu wilayah atau negara ditentukan oleh faktor kapital dan tenaga kerja. Kedua faktor tersebut merupakan penggerak utama suatu perekonomian yang mengubah input menjadi output berupa barang dan jasa. Investasi diperlukan sebagai suatu bagian penting dalam suatu perekonomian, serta mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi, berarti kapasitas produksi juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan output, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Berdasarkan data satu dekade ini, dengan menggunakan analisis korelasi, dapat diidentifikasi bahwa keempat aspek tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan (Indeks Gini), pengentasan kemiskinan (angka kemiskinan), dan kesempatan kerja (TPT, tingkat pengangguran terbuka), memiliki korelasi yang tidak signifikan. Artinya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama ini, tidak berkorelasi atau tidak mempengaruhi terhadap pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas.

2. Pertumbuhan PDRB

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami perlambatan sebesar -1,87 persen. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami kenaikan sebesar 3,59 persen, meningkat pesat sebesar 5,76 persen di tahun 2022 dan kembali mengalami perlambatan di tahun 2023 sebesar 5,44 persen, serta kembali mengalami perlambatan di tahun 2024 sebesar 5,34 persen. Pada tahun 2024, pertumbuhan tiga besar yakni Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 15,16 persen, jasa lainnya 9,40 persen dan jasa perusahaan sebesar 9,10 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan disajikan dalam Tabel II-15 berikut.

Tabel II-15
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,36	-3,21	3,41	-0,47	8,64
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	-0,48	2,38	4,26	2,30	0,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,26	2,91	4,04	11,08	7,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,91	6,34	2,38	3,96	0,39
F	Konstruksi	-1,25	8,64	1,09	8,36	7,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,68	5,46	3,29	5,13	3,74
H	Transportasi dan Pergudangan	-24,25	3,00	48,53	8,05	6,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,78	4,78	12,43	13,08	15,16
J	Informasi dan Komunikasi	17,20	4,23	2,52	8,75	6,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,93	1,35	0,55	2,98	1,83
L	Real Estat	-0,08	1,89	4,89	6,27	7,33
M,N	Jasa Perusahaan	-4,32	2,22	5,32	7,46	9,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,00	-0,85	1,20	2,10	3,33
P	Jasa Pendidikan	-0,56	0,50	0,48	5,47	8,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,35	1,76	2,35	4,35	5,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	-1,19	0,87	5,75	4,32	9,40
Produk Domestik Regional Bruto		-1,87	3,59	5,76	5,44	5,34

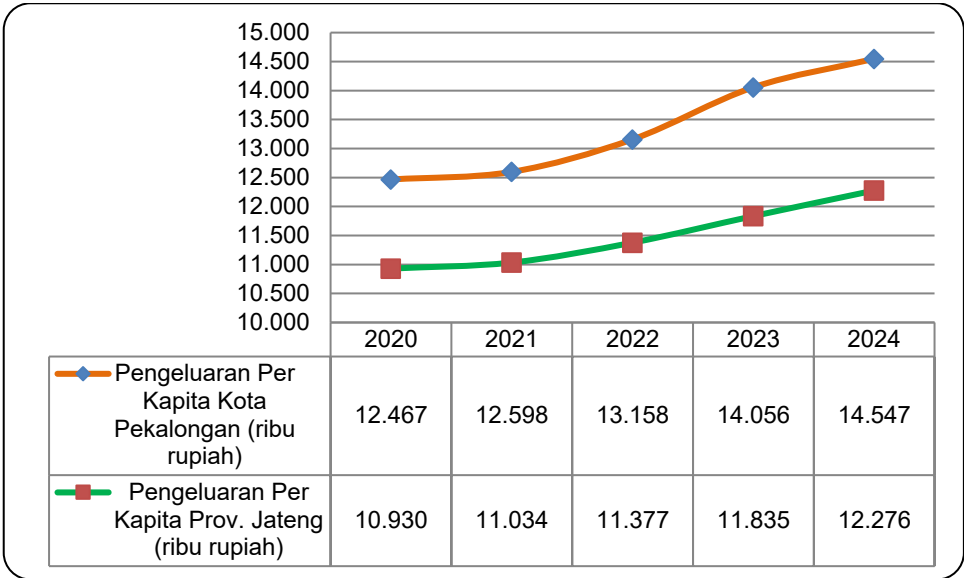
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020-2024 berfluktuasi namun berkesinambungan, dengan penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2024 mayoritas adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

3. Pengeluaran Per Kapita

Tren peningkatan pengeluaran per kapita di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2024. Pengeluaran per kapita Kota Pekalongan meningkat dari Rp12.467 ribu pada 2020 menjadi Rp14.547 ribu pada 2024. Sementara itu,

pengeluaran per kapita di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami kenaikan, meskipun dalam angka yang lebih rendah, dari Rp10.930 ribu pada 2020 menjadi Rp12.276 ribu pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II-23 berikut.



Gambar II-23
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan
dengan Provinsi Jateng Tahun 2020-2024

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

Peningkatan pengeluaran per kapita ini mencerminkan perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Pekalongan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta stabilitas harga barang dan jasa. Namun, untuk memastikan bahwa peningkatan ini benar-benar mencerminkan kesejahteraan yang merata, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai distribusi pengeluaran di berbagai kelompok masyarakat serta intervensi kebijakan yang dapat memastikan daya beli masyarakat tetap stabil dalam jangka panjang.

2.2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-16 berikut.

Tabel II-16
Indeks Gini Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Gini
2020	0,314
2021	0,357
2022	0,373

Tahun	Indeks Gini
2023	0,321
2024	0,330

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2025

Indeks Gini di Kota Pekalongan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif, mencerminkan dinamika ketimpangan pendapatan di masyarakat. Pada tahun 2020, Indeks Gini tercatat sebesar 0,314 dan meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 0,357, kemudian terus naik pada tahun 2022 hingga mencapai 0,373, yang merupakan angka ketimpangan tertinggi dalam periode ini. Namun, pada tahun 2023, indeks ini menurun signifikan menjadi 0,321 dan sedikit meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 0,330. Peningkatan Indeks Gini pada periode 2020-2022 dapat dikaitkan dengan dampak pandemi Covid-19 yang memperburuk perekonomian masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang banyak bergantung pada sektor informal dan usaha kecil. Di sisi lain, kelompok berpenghasilan tinggi relatif lebih mampu bertahan, sehingga ketimpangan semakin melebar.

Penurunan Indeks Gini pada tahun 2023 menjadi 0,321 menandakan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, yang tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemulihan ekonomi serta pengembangan infrastruktur di Kota Pekalongan. Salah satu faktor penting dalam perbaikan ini adalah operasionalisasi Pasar Banjarsari yang menciptakan pusat ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya pedagang kecil dan UMKM. Dengan mulai beroperasinya pasar ini, peluang usaha semakin meningkat, lapangan kerja bertambah, dan distribusi barang menjadi lebih lancar sehingga membantu stabilisasi harga kebutuhan pokok. Hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka.

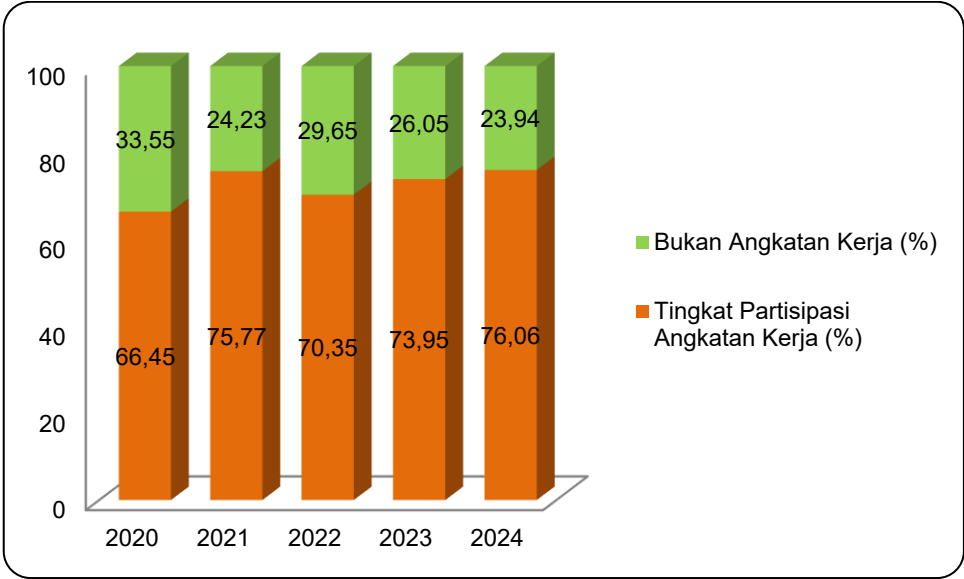
Selain itu, pembangunan tanggul dan Bendung Gerak Loji Banger yang telah beroperasi turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mengendalikan banjir dan rob yang selama ini menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor perikanan, perdagangan, dan industri kreatif seperti batik. Sebelum adanya infrastruktur ini, masyarakat di daerah terdampak sering mengalami kerugian ekonomi akibat gagal panen, kerusakan properti, serta terganggunya aktivitas perdagangan dan transportasi. Dengan risiko bencana yang lebih rendah, stabilitas ekonomi meningkat, sektor usaha kembali tumbuh, dan investasi di Kota Pekalongan menjadi lebih menarik.

Meskipun pada tahun 2024 Indeks Gini sedikit meningkat menjadi 0,330, kondisi ini masih menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Untuk menjaga momentum perbaikan ini, diperlukan optimalisasi kebijakan pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses modal bagi UMKM, serta peningkatan kapasitas SDM dalam memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan rob harus terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Kota Pekalongan dapat terus mengurangi ketimpangan pendapatan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua, yang disebut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Menurut *International Labour Organization* (ILO), penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah mencapai umur 15 tahun atau lebih. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Pekalongan Tahun 2023 tercatat sebanyak 180.587 orang. Dari jumlah tersebut, yang termasuk Angkatan Kerja (penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran) sebesar 76,06 persen pada tahun 2024, naik 2,11 persen dari tahun 2023. Sisanya, yaitu 23,94 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun ke atas yang bersekolah/kuliah, mengurus rumah tangga, pensiunan, atau melaksanakan kegiatan lainnya

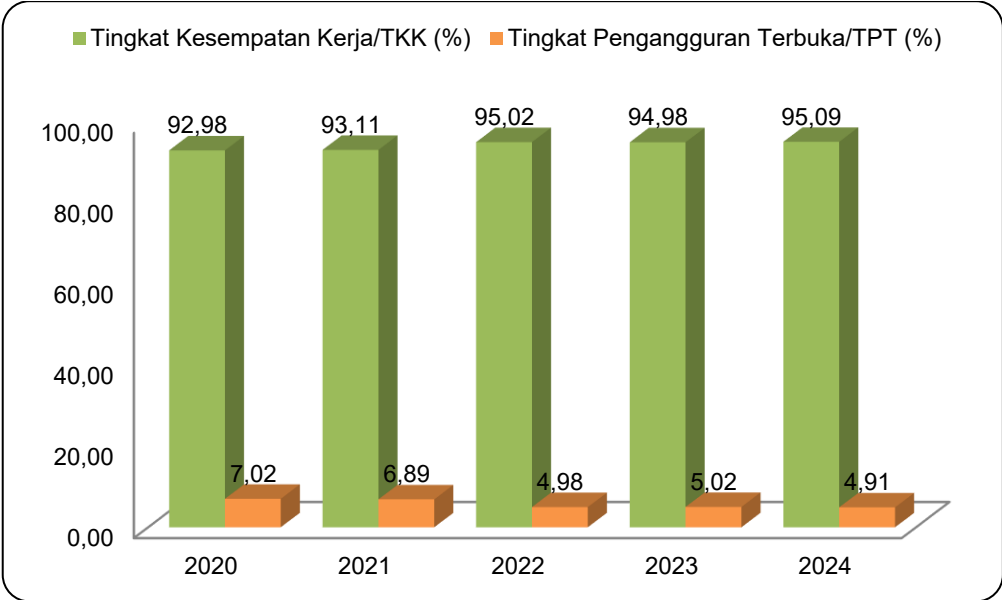
selain kegiatan pribadi. Kenaikan TPAK pada tahun 2020-2024 seiring dengan kenaikan jumlah penduduk usia kerja.



Gambar II-24
Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/>, 2025

Sementara itu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2024 mencapai 95,09 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen atau turun 0,11 poin, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 11 orang yang benar-benar menganggur.



Gambar II-25
Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/>, 2025

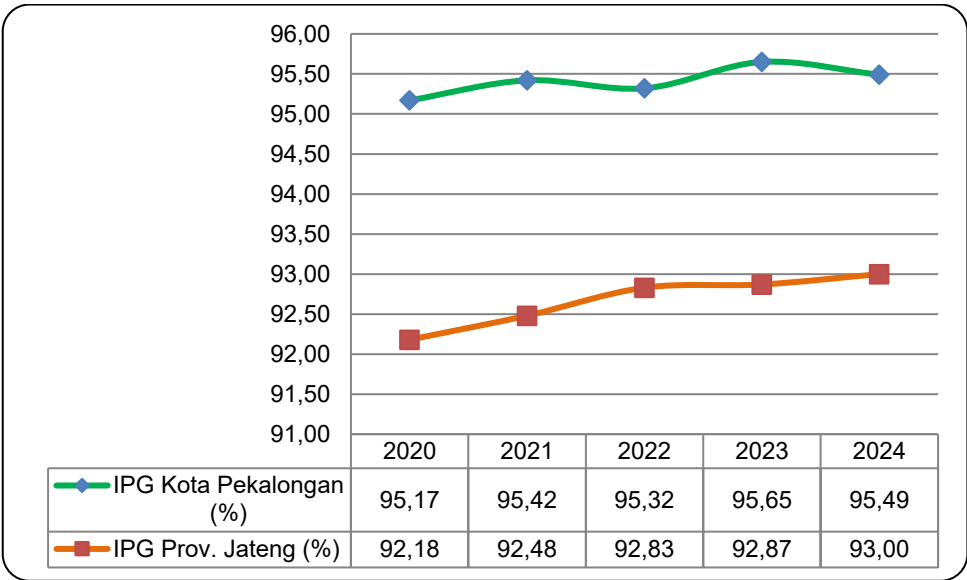
Nilai TPT secara persentase mengalami penurunan dari 5,02 persen menjadi 4,91 persen. Semua sektor diharapkan terus berpacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka mampu menyerap tenaga kerja dan membuka peluang kerja lebih tinggi.

2.2.1.5. Pembangunan Inklusif dan Responsif Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,49 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 tetapi masih lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 95,17. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah.



Gambar II-26
Perbandingan IPG di Kota Pekalongan
dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

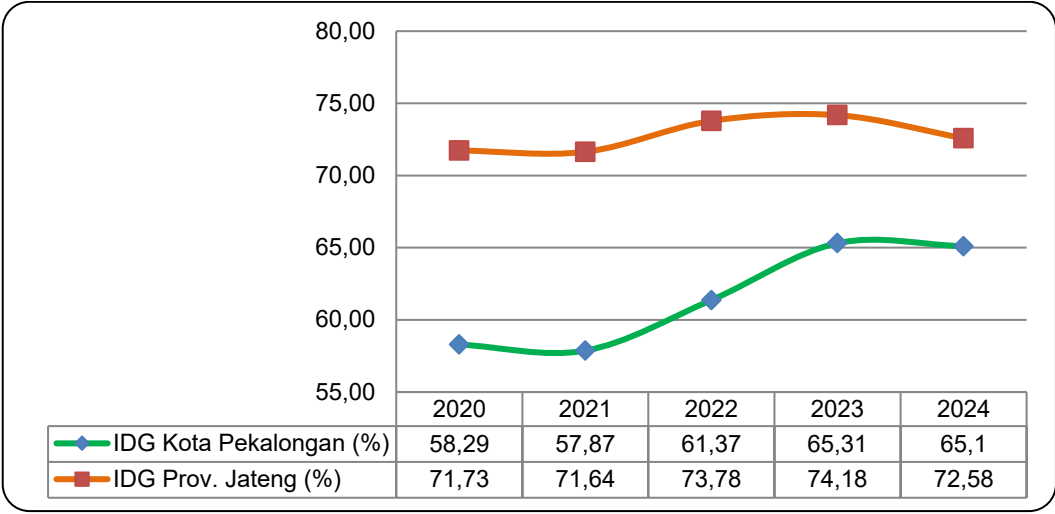
Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2024, nilai IDG Kota Pekalongan cenderung meningkat. Pada tahun 2020, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 58,29, kemudian terus meningkat sampai tahun 2024 menjadi 65,10.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2020-2024, nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Dalam Kondisi ini

menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.

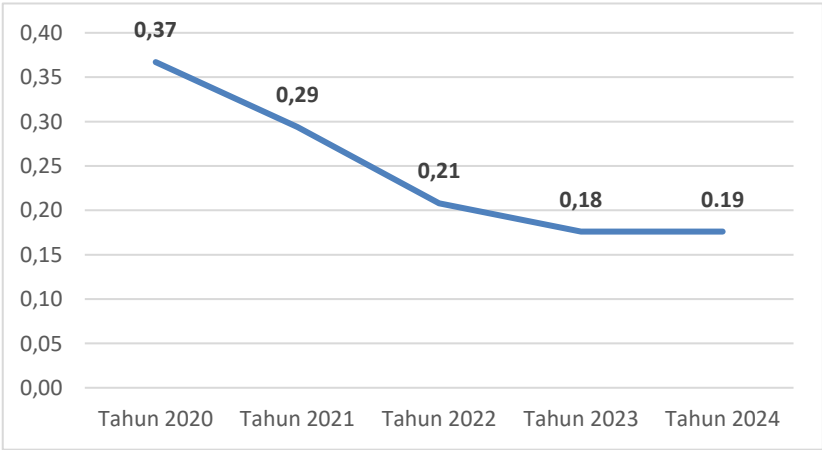


Gambar II-27
Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Pekalongan menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IKG Kota Pekalongan tercatat sebesar 0,37 dan terus menurun hingga mencapai 0,18 pada tahun 2023, naik diangka 0.19 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di Kota Pekalongan. IKG mengukur kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi utama, yaitu: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Penurunan nilai IKG di Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan di ketiga dimensi tersebut.



Gambar II-28
Indeks Ketimpangan Gender Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2025.

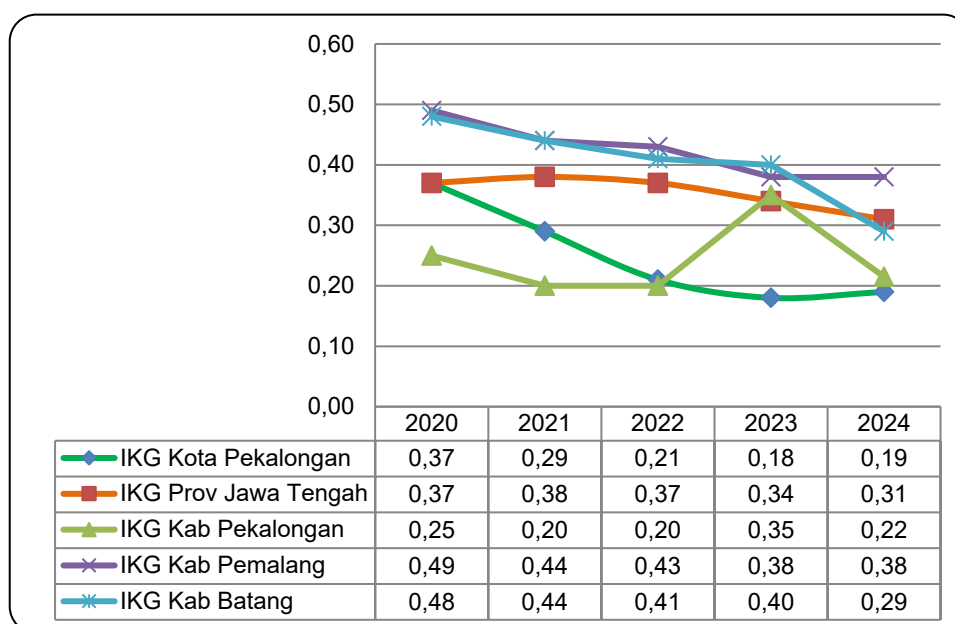
Adanya peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, khususnya layanan persalinan, sosialisasi kesehatan reproduksi kepada remaja, program KB pascapersalinan menjadi salah

satu faktor pendukung dalam dimensi kesehatan reproduksi. Selain itu, adanya kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) atau jaminan kesehatan yang bertujuan memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau juga berkontribusi pada peningkatan ini pada dimensi ini.

Dalam dimensi pemberdayaan, langkah afirmatif seperti penerapan kuota keterwakilan perempuan dalam legislatif dan dukungan partai politik lokal telah membuka ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sektor ekonomi kreatif, khususnya industri batik, menjadi ruang penting pemberdayaan ekonomi perempuan. Pelatihan wirausaha dan dukungan bagi UMKM, penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap OPD, serta peran organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita, Aisyiyah, dan Fatayat NU memperkuat fondasi sosial-ekonomi perempuan di Pekalongan.

Pada dimensi pasar tenaga kerja, tingginya partisipasi perempuan dalam industri kreatif, yang menawarkan fleksibilitas kerja, mendorong peningkatan keterlibatan perempuan di sektor informal maupun formal. Pelatihan keterampilan dan skema pembiayaan usaha kecil seperti kredit ultra mikro telah meningkatkan **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** perempuan, menjadikan ekonomi sebagai alat utama pemberdayaan.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan serta Kabupaten Batang, ketimpangan gender di Kota Pekalongan relatif lebih rendah. Berikut perbandingan Indeks Ketimpangan Gender di Kota Pekalongan dengan Kabupaten sekitar Kota Pekalongan serta Provinsi Jawa Tengah:



Gambar II-29
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender di Kota Pekalongan dengan
Kabupaten sekitar Kota Pekalongan serta Provinsi Jawa Tengah

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

2.2.1.6. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu pilar penting dari sebuah kota yang layak untuk anak. Kota Layak Anak (KLA) didefinisikan sebagai Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ada 24 indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak

sehingga dapat dikatakan menuju kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kluster, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; (5) perlindungan khusus.

Pada tahun 2020, Kota Pekalongan meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya. Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya di Tahun 2022, Kota Pekalongan telah mendeklarasikan bebas pekerja anak, advokasi dan peresmian sejumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekalongan, kegiatan Konvensi Hak Anak (KHA) kepada semua guru di Kota Pekalongan baik di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, serta SMA secara mandiri dan bersinergi kepada Pemkot Pekalongan. Upaya lain juga dilakukan untuk memenuhi indikator dan klaster KLA. Hasilnya, pada tahun 2023 Kota Pekalongan kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya dengan nilai 769,80.

2.2.1.7. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Pada tahun 2020 jumlah organisasi pemuda yaitu 24 organisasi. Pada tahun 2021-2022 jumlahnya menurun menjadi 24 organisasi dan menurun lagi di tahun 2022 menjadi 16 organisasi pemuda serta meningkat kembali menjadi 40 organisasi pada tahun 2023. Sementara itu jumlah kegiatan kepemudaan yang semula 8 kegiatan pada tahun 2020, meningkat pada tahun 2021 menjadi 10 kegiatan dan 16 kegiatan di tahun 2022, lalu meningkat lagi di tahun 2023 dan 2024 menjadi 20 kegiatan dan 33 kegiatan.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2020-2024 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-17 berikut.

Tabel II-17
Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Pemuda	24	24	16	40	40
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	10	16	20	33

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Selain organisasi kepemudaan, Dinparbudpora juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap klub-klub olahraga yang ada di Kota Pekalongan. Dari tahun 2020 jumlah klub olahraga 20 klub dan meningkat secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 35 klub pada tahun 2021 dan 50 klub pada tahun 2022. Di tahun 2022 sampai 2024 jumlah klub masih sama di angka 50 klub olahraga. Sementara itu gedung olahraga milik Pemerintah Kota Pekalongan yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 2 gedung.

Tabel II-18
Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Klub Olahraga	20	35	50	50	50

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan tahun 2020 berjumlah 31 organisasi dan terdapat penambahan 3 (tiga) organisasi olahraga di tahun 2021 sehingga menjadi 34 organisasi olahraga, jumlah ini tidak bertambah sampai dengan tahun 2024. Begitu pula dengan gelanggang/balai remaja selain milik swasta, jumlahnya tetap dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yakni sebanyak 3 gelanggang yaitu GOR Jetayu, Stadion Hoegeng dan Warung Apresiasi. Untuk lapangan olahraga bisa dikatakan cukup banyak, yaitu berjumlah 55 lapangan pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan lapangan olahraga milik sekolah turut diperhitungkan. Kegiatan olahraga sebanyak 10 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olahraga Wilayah Dulongmas, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). Penyelenggaraan olahraga selama tahun 2018 dan 2019 terdiri dari penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan, pusat pelatihan olahraga tingkat karesidenan/provinsi, penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota dan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat.

Tabel II-19
Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

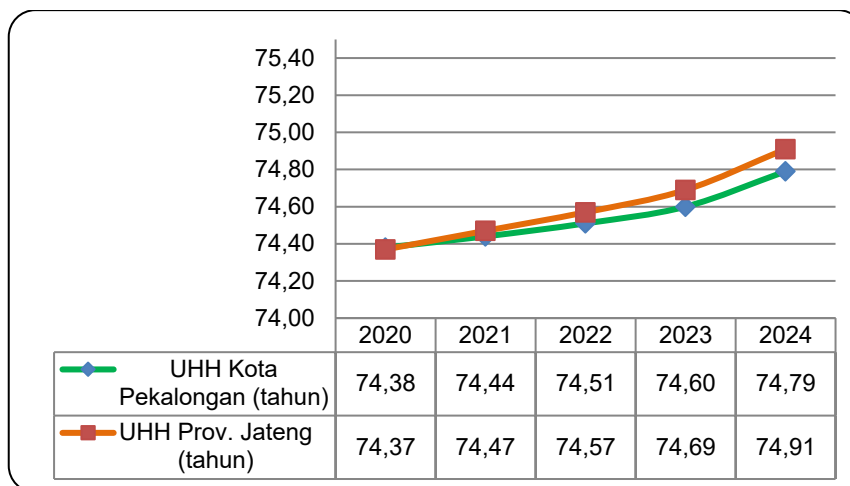
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Olahraga	31	34	34	34	34
Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
Lapangan olahraga	55	55	55	55	55
Jumlah kegiatan olahraga	8	10	15	15	15

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2020-2024, UHH di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,38 pada tahun 2020 menjadi 74,79 di tahun 2024. Artinya, secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, UHH Kota Pekalongan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berada di bawah UHH Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II-30 berikut.



Gambar II-30
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH)
Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).

2.2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain, di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya Angka Kematian Ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Tabel II-20
Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI)
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 kelahiran hidup
2020	9	5905	152,41
2021	11	5844	188,23
2022	7	5621	124,53
2023	6	4887	122,77
2024	5	3855	129,70

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2024, 2025

Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekalongan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 AKI sebesar 152,41 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 9 kasus meningkat menjadi 188,23 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 11 kasus di tahun 2021. AKI tahun 2022 sampai dengan 2024 turun masing – masing menjadi 124,53 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 7 kasus, 122,77 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 6 kasus dan 129,70 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 5 kasus.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan berhasil menurunkan jumlah kasus kematian ibu menjadi 122,77 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 6 kasus. Tingginya angka kematian dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan yang kurang baik selama kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran. Adapun penyebab langsung kematian Ibu di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan karena kasus perdarahan, infeksi, eklamsia dan penyebab lain.

2.2.2.3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal yang merupakan masalah dan kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan congenital. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan status kesehatan ibu selama hamil dan melahirkan yang dipengaruhi beberapa faktor seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Angka Kematian Bayi dari tahun 2021 sampai 2024 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi pada tahun 2021 adalah 8,9 dengan jumlah kasus kematian sejumlah 52 kasus. Sedangkan pada tahun 2022, Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan menjadi 9,91 per 1.000 KH dengan jumlah kasus kematian sejumlah 56 kasus. Di tahun 2023 Angka Kematian Bayi sebesar 13,71 dengan jumlah kasus kematian sebanyak 67 kasus dan di tahun 2024 Angka Kematian Bayi sebesar 10,89 dengan jumlah kasus kematian bayi sebesar 42 kasus.

Angka Kematian Bayi berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika tren Angka Kematian Bayi di suatu wilayah cenderung meningkat maka tren Angka Kelangsungan Hidup Bayi akan semakin menurun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya Angka Kematian Bayi. Angka Kelangsungan Hidup Bayi terendah terjadi pada tahun

2023 dengan angka 986,29 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka 991,19 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, kelainan kongenital, kelainan saluran pencernaan, pnemonia, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

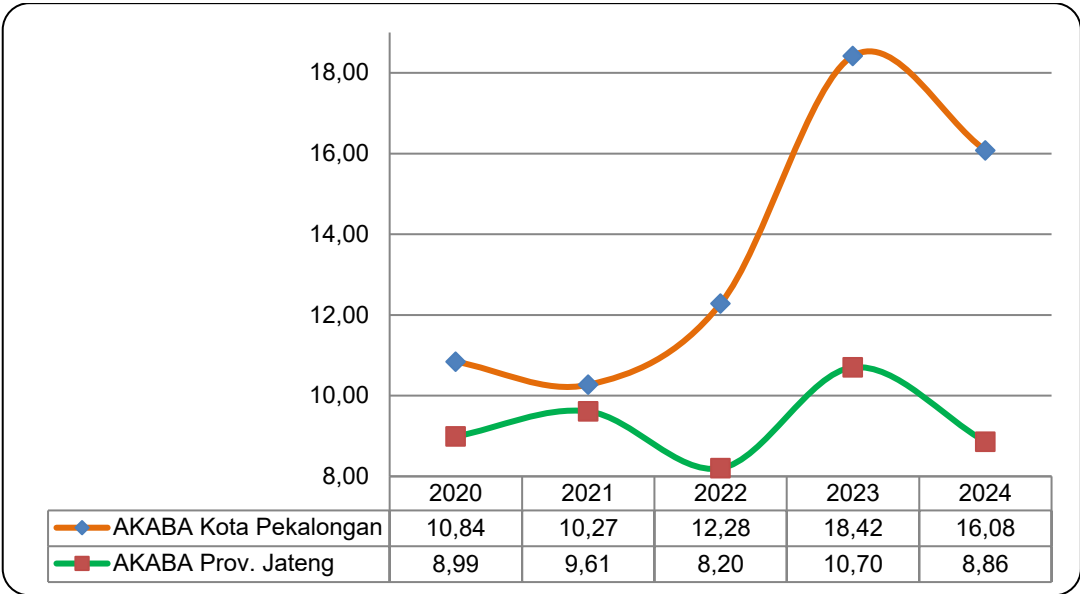
Tabel II-21
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
2020	8,81	991,19
2021	8,90	991,10
2022	9,96	990,04
2023	13,71	986,29
2024	10,89	989,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

2.2.2.4. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.



Gambar II-31
Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan
Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2024 dan Buku Saku Kinerja Program Kesehatan 2022 Dinkes Jawa Tengah, 2025

Sementara itu AKABA di tingkat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020-2024 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 AKABA 8,99 per 1.000 KH pada tahun 2020, meningkat menjadi 9,61 per 1.000 KH di tahun 2021, kemudian kembali menurun 8,20 per 1.000 KH di

tahun 2022, dan kembali meningkat 10,7 per 1.000 KH pada tahun 2023. Pada tahun 2024 AKABA menurun 8,86 per 1.000 Kelahiran Hidup.

Capaian AKABA dalam kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung meningkat. AKABA dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat dari 10,27 per 1.000 KH pada tahun 2021 dengan 60 kasus kematian menjadi 12,21 per 1.000 KH pada tahun 2022 dengan 69 kasus kematian. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 18,42 per 1.000 KH dengan jumlah kasus kematian sebanyak 90 kasus. Pada tahun 2024 menurun di angka 16.08 per 1.000 KH. Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit.

2.2.2.5. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak Balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan dibandingkan umur berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut WHO stunting atau pertumbuhan yang terhambat mencerminkan proses kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan linier sebagai akibat dari kondisi kesehatan atau gizi yang kurang optimal. Berdasarkan populasi, tingkat stunting yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan peningkatan risiko sering dan awal terpapar dengan kondisi buruk seperti penyakit atau praktik pemberian makan yang tidak tepat.

Gambaran prevalensi angka stunting Kota Pekalongan dari tahun 2019-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-22
Prevalensi Balita Stunting Kota Pekalongan Tahun 2019-2024 berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023

Tahun	Prevalensi Stunting (%)
2019	26,59
2020	nihil
2021	20,6
2022	23,1
2023	28,2
2024	19,3

Sumber: Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, Kemenkes, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prevalensi stunting di Kota Pekalongan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama kurun waktu enam tahun terakhir. Pada tahun 2019, prevalensi stunting tercatat sebesar 26,59%, namun, data tahun 2020 nihil dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga tidak dilakukan pendataan/survey. Tahun 2021 prevalensi stunting Kota Pekalongan berada pada angka 20,6%, pada tahun 2022 angka stunting kembali naik menjadi 23,1%, dan bahkan meningkat lebih tinggi pada tahun 2023 mencapai 28,2%. Kenaikan ini menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas program penanggulangan stunting atau mungkin karena faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi ketersediaan pangan bergizi dan layanan kesehatan dasar. Tahun 2024 angka stunting di Kota Pekalongan menurun menjadi 19,3%, meskipun angka tersebut masih merupakan hasil perhitungan sementara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan atas hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024 yang telah dilaksanakan.

2.2.2.6. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (Morbiditas) merupakan angka yang menunjukkan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat. Angka Morbiditas merupakan indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat umum yang dilihat dari persentase penduduk dengan keluhan kesehatan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Angka kesakitan di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, angka kesakitan berada di angka 12,89 persen. Angka tersebut menurun di tahun 2021 menjadi 8,38 persen, kemudian meningkat lagi di tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 menjadi 11,71 persen, 12,20 persen dan 15,29 persen. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-23
Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Kesakitan (persen)
2020	12,89
2021	8,38
2022	11,71
2023	12,20
2024	15,29

Sumber: jateng.bps.go.id dan pekalongankota.bps.go.id, 2025

2.2.2.7. Cakupan Penerima Jaminan Kesehatan

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2024 adalah PBI APBN sebanyak 116.985 jiwa, menurun 1,23 persen jika dibandingkan dengan jumlah PBI APBN tahun 2023. Sedangkan jumlah penerima Jamkesda tahun 2024 sebanyak 86.323 jiwa, meningkat 1,58 persen dibandingkan jumlah penerima Jamkesda tahun 2023. Secara lengkap data penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024) disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-24
Jumlah Alokasi Penerima Jamkesmas / Jamkesda di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Penerima Jaminan Kesehatan			Persen Penerima Jaminan Kesehatan
			Jamkesmas	Jamkesda	Jumlah Total	
2020	307.150	22.160	88.685	70.307	158.992	51,76
2021	308.310	23.490	84.966	62.375	147.341	47,79
2022	309.742	21.810	119.751	47.813	167.564	54,10
2023	316.933	21.360	120.203	80.803	201.006	63,42
2024	318.812	21.160	116.985	86.323	203.308	63,77

Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Program ini

dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) sebagai lembaga yang mengelola jaminan sosial di bidang kesehatan, Melalui JKN, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga layanan rujukan ke rumah sakit, baik negeri maupun swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, sehingga mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Cakupan Penduduk Kota Pekalongan yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (Tahun 2020-2024) semakin meningkat seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang UHC (*Universal Health Coverage*), dimana ditargetkan minimal 98% penduduk Kab/Kota menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan tingkat keaktifan kepesertaan JKN minimal 75% dari seluruh peserta JKN. Secara lengkap data penduduk menjadi penerima jaminan kesehatan di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-25
Cakupan Penduduk Kota Pekalongan Penerima Jaminan Kesehatan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Penerima Jaminan Kesehatan					Cakupan Penerima Jaminan Kesehatan (%)
		PBI JK	PBI APBD	PPU	BP	Jumlah Total	
2020	307.150	91.049	62.196	61.459	6.331	257.992	84,00
2021	308.310	93.980	61.868	59.204	6.554	257.132	83,40
2022	309.742	119.751	47.813	62.197	6.584	273.794	88,39
2023	316.933	120.203	80.803	62.803	7.937	310.902	98,10
2024	318.812	116.985	88.719	63.851	7.067	314.875	98,77

Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

2.2.2.8. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat dilakukan melalui pendekatan keluarga, yang ditujukan untuk pencapaian keluarga sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat. Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan Program Percepatan Indikator Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Dari hasil pendataan tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan bahwa angka IKS Kota Pekalongan masih sangat rendah. Secara rinci capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-26
Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Keluarga Sehat
2020	0,17
2021	0,18
2022	0,28
2023	0,31
2024	0,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

2.2.2.9. Ketahanan Pangan

Ketersediaan Pangan di suatu wilayah dapat diukur melalui rasio ketersediaan pangan utama. Di Kota Pekalongan, ketersediaan pangan selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan tren penurunan. Hal ini tergambarkan melalui data rasio ketersediaan pangan yang fluktuatif dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut mencerminkan dinamika ketersediaan pangan yang secara langsung memengaruhi nilai rasio ketersediaan pangan di daerah ini..

Tabel II-27
Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Rasio
2020	4.769.190	307.150	15,53
2021	5.738.290	308.310	18,61
2022	5.179.300	309.742	16,72
2023	4.235.430	317.520	13,34
2024	4.830.960	321.095	15,05

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2024

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator yang menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan keberagaman dan keseimbangan antar kelompok pangan. Skor PPH selama lima tahun terakhir (2020–2024) di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel berikut

Tabel II-28
Skor PPH Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Skor PPH Kota Pekalongan
2020	92,01
2021	87,10
2022	81,20
2023	93,70
2024	92,12

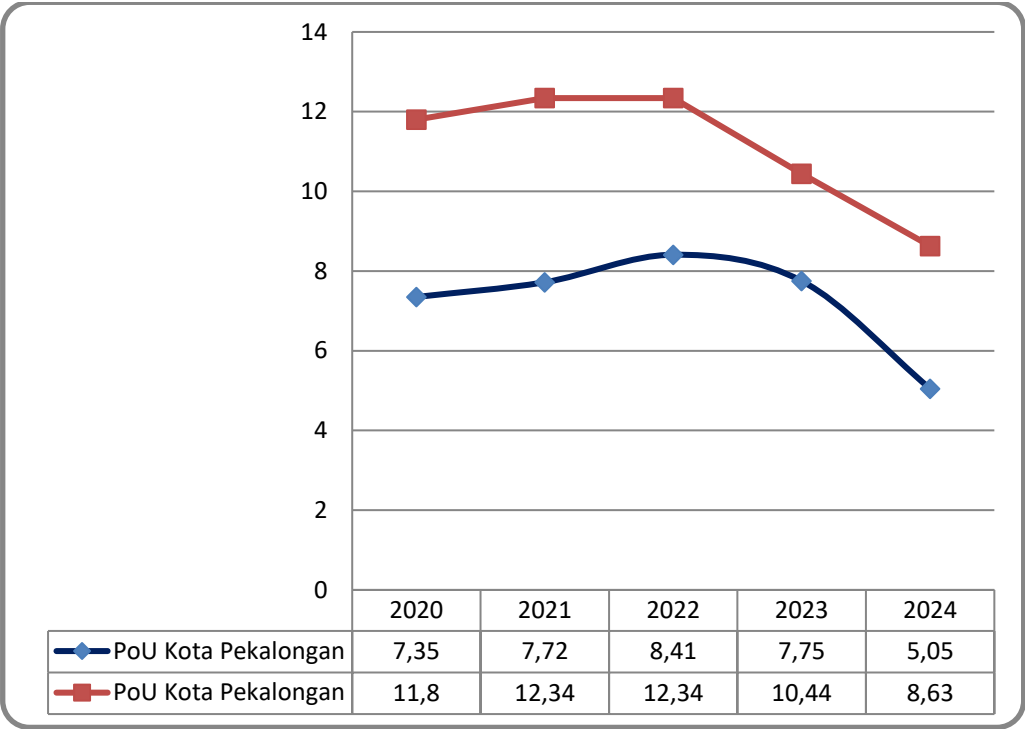
Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2025

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan skor Pola Pangan Harapan antara lain dengan: penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya; penyediaan cadangan pangan daerah; penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; meningkatkan ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Secara umum Skor PPH Kota Pekalongan masih di bawah Provinsi Jawa Tengah, hal ini disebabkan karena Kota Pekalongan merupakan wilayah perkotaan yang kegiatan utamanya bukan pertanian.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah konsep yang lebih holistik daripada sekedar kekurangan kalori dan mencerminkan aspek ketidakamanan panganyang mempengaruhi status gizi dan kesehatan masyarakat. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan secara umum mengacu pada proporsi populasi yang tidak memiliki akses terhadap makanan yang cukup secara kuantitas dan/atau kualitas untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka dalam menjalani kehidupan yang sehat dan aktif. Prevalensi ketidakcukupan

konsumsi pangan mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan enegri yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi bahwa semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya, begitu juga sebaliknya semkin menurun nilai PoU berarti bahwa semakin sedikit penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur oleh BPS Pusat. Meskipun kondisi PoU Kota Pekalongan bersifat fluktiatif namun mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan penurunan nilai PoU dari tahun 2020 sebesar 7,35 persen menjadi 5,05 persen di tahun 2024. Hal ini artinya jumlah populasi penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah jumlah minimum kebutuhan energi semakin berkurang. Kondisi PoU demikian juga terjadi di Jawa Tengah yaitu mengalami perbaikan cukup signifikan yang ditunjukkan dengan penurunan nilai PoU sebesar 11,8 persen di tahun 2020 dan turun menjadi 8,63 persen di tahun 2024. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Pekalongan dan Jawa Tengah dapat terlihat pada tabel di bawah ini:



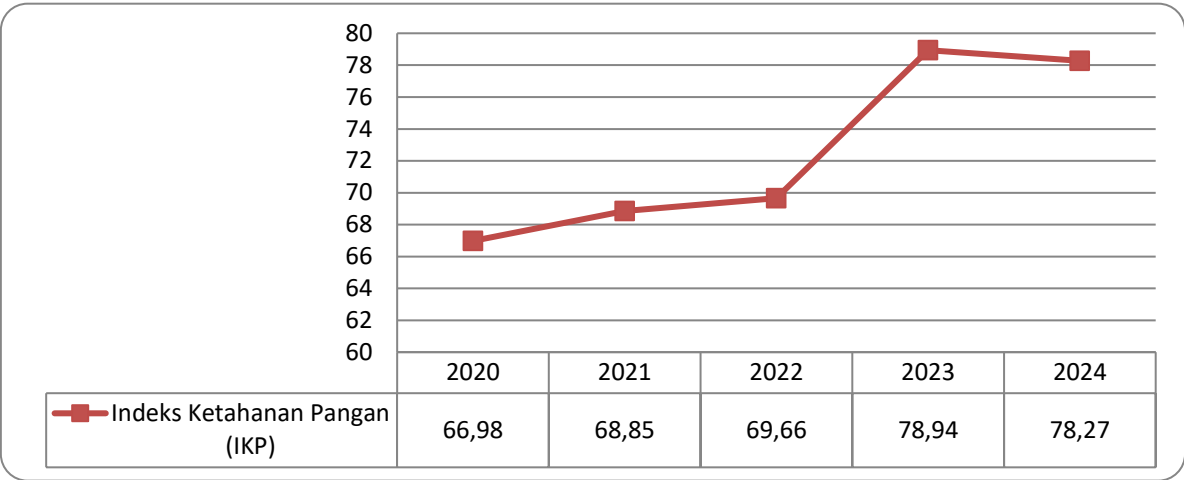
Gambar II-32
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Pekalongan menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada saat dahulu, isu kekurangan gizi terutama pada balita dan kelompok masyarakat rentan menjadi suatu perhatian. Dampaknya terasa pada kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat dan potensi pembangunan kota secara keseluruhan. Namun, dengan upaya dari berbagai pihak, program intervensi gizi mulai digalakkan. Puskesmas dan posyandu semakin aktif memantau tumbuh kembang anak, memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil dan menyusui serta menyediakan makanan tambahan bergizi bagi keluarga yang membutuhkan. Selain itu juga program-program pemberdayaan masyarakat juga turut berperan penting. Pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, sosialisasi mengenai pentingnya diversifikasi

pangan lokal secara bertahap meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Meskipun demikian, upaya berkelanjutan dan kewaspadaan tetap diperlukan untuk memastikan tren positif ini terus berlanjut dan tidak ada lagi warga yang mengalami kekurangan gizi.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Ketahanan pangan Kota Pekalongan dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dilakukan pengukurannya oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional. Indeks Ketahanan Pangan Kota Pekalongan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, IKP Kota Pekalongan sebesar 66,98 dan pada tahun 2024 menjadi 78,27, yang mengindikasikan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan kategori baik. Kondisi ketahanan pangan Kota Pekalongan serupa dengan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, yaitu menunjukkan tren positif sejak tahun 2020 sebesar 82,31 menjadi 84,80 di tahun 2023. Indeks Ketahanan Pangan Kota Pekalongan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:



Gambar II-33
Indeks Ketahanan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Dalam mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Kota Pekalongan termasuk wilayah perkotaan yang menggunakan delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari perdagangan antar wilayah.

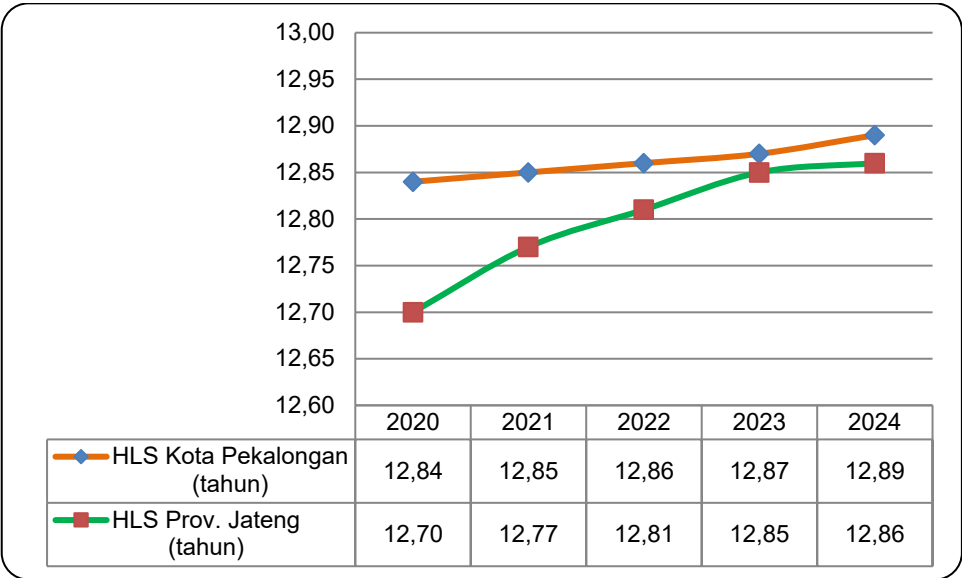
Nilai ketahanan pangan Kota Pekalongan menunjukkan tren positif berarti bahwa aspek keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan di Kota Pekalongan dalam kondisi baik. Keterjangkauan pangan diartikan sebagai akses pangan oleh rumah tangga di Kota Pekalongan untuk mendapatkan makanan melalui produksi sendiri, pembelian, maupun bantuan lainnya. Akses pangan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga, infrastruktur pendukung untuk akses pangan, serta dukungan sosial seperti program jaring pengaman sosial. Pemanfaatan pangan mencakup konsumsi makanan oleh rumah tangga dan kemampuan individu di Kota Pekalongan untuk menyerap nutrisi.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif

2.2.3.1. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Harapan lama sekolah (HLS) di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2024. HLS Kota Pekalongan meningkat dari 12,84 tahun pada 2020 menjadi 12,89 tahun pada 2024. Sementara itu, HLS Provinsi Jawa Tengah juga mengalami kenaikan yang lebih signifikan dari 12,70 tahun pada 2020 menjadi 12,86 tahun pada 2024. Meskipun terjadi peningkatan di kedua wilayah, Kota Pekalongan secara konsisten memiliki HLS yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, menandakan bahwa penduduk Kota Pekalongan memiliki ekspektasi pendidikan yang lebih baik. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II-34 berikut.



Gambar II-34
Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

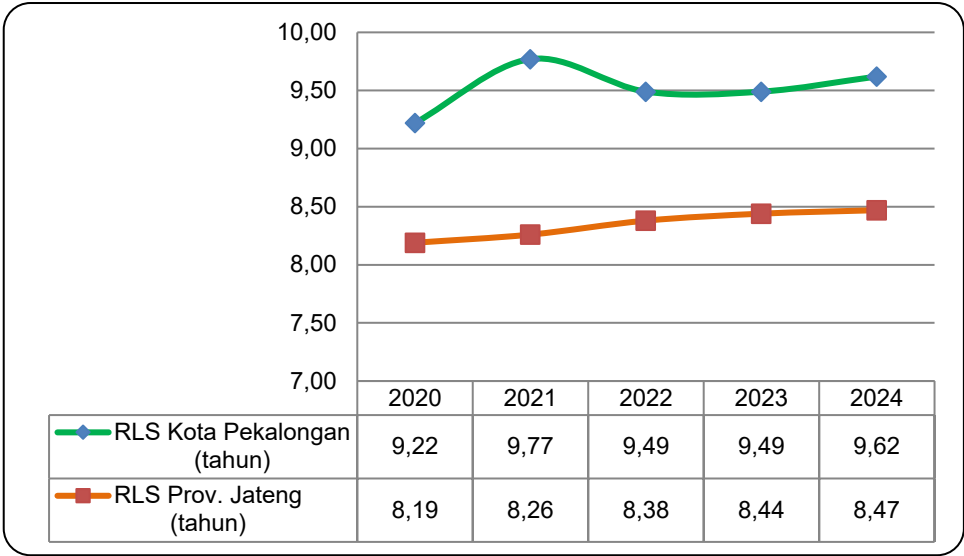
Pada tahun 2024 angka HLS Kota Pekalongan sebesar 12,89 tahun, peningkatan HLS ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kota Pekalongan. Hal ini dapat didorong oleh berbagai faktor, seperti program pendidikan gratis, peningkatan fasilitas sekolah, serta kampanye kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Namun, meskipun peningkatan ini positif, masih diperlukan upaya lebih lanjut agar HLS dapat mendekati atau mencapai angka 13 tahun, sehingga generasi muda di Kota Pekalongan memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan setingkat Diploma atau minimal SMA secara penuh.

2.2.3.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 15 tahun ke atas. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, RLS Kota Pekalongan menunjukkan tren yang relatif stabil dengan capaian yang konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, RLS

Kota Pekalongan tercatat sebesar 9,22 tahun, kemudian meningkat menjadi 9,77 tahun pada tahun 2021 sebagai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2023, yaitu di angka 9,49 tahun, angka tersebut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 9,62 tahun.

Selama lima tahun terakhir, selisih RLS antara Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 1,03 hingga 1,51 tahun, yang mengindikasikan bahwa Kota Pekalongan berada dalam posisi yang relatif lebih baik dalam hal capaian rata-rata lama sekolah. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah berhasil mempertahankan akses dan kualitas pendidikan formal bagi masyarakat. Ke depan, upaya peningkatan RLS tetap menjadi prioritas, khususnya dalam mendorong anak-anak usia sekolah untuk menuntaskan pendidikan menengah serta mengurangi angka putus sekolah Selengkapnya disajikan dalam Gambar II-35 berikut.



Gambar II-35
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

2.2.3.3. Angka Partisipasi Kasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kota Pekalongan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Tabel II-29
Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2020	110,98	106,32	79,36	93,21	78,66	86,83
2021	111,96	106,40	80,69	94,00	76,12	86,65
2022	111,33	106,19	80,07	94,05	77,40	86,83
2023	107,79	105,01	88,63	92,80	84,15	87,84
2024	101,96	103,86	90,24	90,89	84,08	88,54

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2025 dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

Pada tahun 2020 angka partisipasi kasar pada jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 110,98 persen, kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 111,96 persen dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu 111,33 persen, 107,79 persen dan 101,96 persen. Tidak seperti APK di jenjang SD/MI yang mengalami fluktuasi, APK di jenjang SMP/MTs cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2020 di angka 79,36 persen, meningkat di tahun 2021 sebesar 80,69, terjadi penurunan pada tahun 2022 di angka 80,07 persen, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 88,63 persen dan 90,24 persen. Sementara itu APK jenjang SMA/MA/SMK fluktuatif dari awal periode (tahun 2020) hingga di tahun 2024 berada di angka 84,08 persen.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, APK jenjang SD/MI berada di atas 100 persen selama periode tahun 2020-2024, namun cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2024, yaitu sebesar 103,86 persen. APK jenjang SMP/MTs berada di atas 90 persen, dan APK jenjang SMA/MA/SMK berada di kisaran 86-89 persen. Secara umum, APK jenjang SD/MI Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan APK Provinsi Jawa tengah, namun APK jenjang SMP/MTs dan APK jenjang SMA/MA/SMK Kota Pekalongan lebih rendah dibanding APK Provinsi Jawa Tengah.

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di Kota Pekalongan bervariasi. Pada jenjang SD/MI, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih didominasi laki-laki dengan nilai 107,17. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/setara juga lebih didominasi kaum laki-laki dengan nilai 108,36. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-30 berikut.

Tabel II-30
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender
di Kota Pekalongan Tahun 2024

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Kasar	SD/Setara (persen)	107,17	104,34
	SMP/Setara (persen)	108,63	98,78
	SMA/Setara (persen)	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

2.2.3.4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun menunjukkan proporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah. Berdasarkan Rapor

Pendidikan Kemendikbud RI, capaian APS 5-6 Kota Pekalongan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan angka yang berfluktuatif. APS 5-6 tahun pada tahun 2022 sebesar 91,12%, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 93,57%, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 90,58%. Naik-turunnya APS 5-6 tahun, bila mendasari pada jumlah siswa TK/RA dan jumlah anak usia 4-6 tahun, disebabkan karena jumlah peserta didik yang memang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2024 meskipun jumlah penduduk yang relatif mengalami penurunan. Data capaian APS 5-6 tahun selengkapnya disajikan dalam Tabel II-41 berikut.

Tabel II-41
Angka Parisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	APS 5-6 Tahun (persen)
2020	105,80
2021	98,23
2022	91,12
2023	93,57
2024	90,58

Sumber: Rapot Pendidikan Kemendikbud RI, 2023-2025

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD/TK/RA, dalam lima tahun terakhir, jumlah siswa PAUD/TK/RA di Kota Pekalongan berfluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah siswa menurun menjadi 7.077 siswa jika dibandingkan jumlah siswa di tahun 2020. Pada tahun 2022 dan 2023 meningkat menjadi 7.721 siswa dan 7.934 siswa pada tahun 2023 siswa lalu menurun lagi pada tahun 2024 menjadi 7.633 siswa. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-31
Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah siswa TK/RA	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Persentase PAUD
2020	7.485	15.710	47,64
2021	7.077	15.440	45,84
2022	7.721	15.346	50,31
2023	7.934	15.246	52,04
2024	7.633	15.189	50,25

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar, Capaian APS tahun 2020-2024 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung menurun, dari 103,79 di tahun 2020 menjadi 99,70 di tahun 2024. Sama halnya dengan capaian APS jenjang SMP/MTs dari 103,67 di tahun 2020 menjadi 96,52 di tahun 2024. Dalam perjalanannya, di tahun 2023 dan 2024 capaian APS jenjang SD/MI dan SMP/MTS tidak mencapai target seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 100 persen. Penurunan APS juga terjadi di tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini karena adanya kebijakan zonasi yang mulai diterapkan di tahun ajaran 2018/2019. Selain itu, sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia yang lebih muda daripada ketentuan yang berlaku juga menjadi faktor penurunan target ini.

Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-32
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
di Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
APS SD/MI	103,79	101,86	101,74	99,98	99,70
APS SMP/MTs	103,67	102,56	103,29	96,72	96,52

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-15 tahun, Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-33
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan
Tahun 2020 – 2024

Tahun		Jml. Siswa Usia Sekolah TK s.d SMP	Jml. Penduduk Usia 5-15 Tahun	APS (persen)	
2020	L	28.348	29.524	96,02	96,75
	P	27.019	27.703	97,53	
2021	L	29.319	29.610	99,02	101,38
	P	28.911	27.830	103,88	
2022	L	29.567	29.598	99,90	101,96
	P	28.889	27.737	104,15	
2023	L	29.304	29.609	98,97	101,24
	P	28.779	27.763	103,66	
2024	L	29.020	29.690	97,7	97,20
	P	26.852	27.773	96,7	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

2.2.3.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan penduduk Kota Pekalongan berusia 15 tahun ke atas dalam periode 2020-2024. Secara umum, terdapat peningkatan dalam persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi, yang mencerminkan kemajuan dalam akses dan partisipasi pendidikan tinggi. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang menyelesaikan SMA/ sederajat sebesar 30,28%, meningkat menjadi 33,55% pada tahun 2024. Sementara itu, penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan dari 8,15% pada 2020 menjadi 9,63% pada 2024, dengan puncaknya di tahun 2022 sebesar 12,80%.

Namun, masih terdapat tantangan dalam kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Misalnya, persentase penduduk yang tidak/belum tamat SD pada 2023 dan 2024 tetap berada di kisaran 8,47%-8,94%. Sementara itu, data menunjukkan fluktuasi dalam jumlah penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan SD dan SMP, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi atau perubahan kebijakan pendidikan. Ke depan, peningkatan kualitas pendidikan dasar dan program peningkatan keterampilan dapat menjadi fokus untuk memastikan akses yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selengkapnya disajikan pada Tabel II-34 berikut.

Tabel II-34
Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang
Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi
2020	0,98	9,04	27,19	24,36	30,28	8,15
2021	0,69	7,60	22,55	25,62	31,68	11,86
2022	n/a	n/a	31,21	21,30	34,68	12,80
2023	1,26	8,94	23,80	26,88	31,19	9,19
2024	n/a	8,47	24,13	24,21	33,55	9,63

Sumber: <https://pekalongankota.bps.go.id/>, 2025

2.2.3.6. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kota Pekalongan dari tahun 2020-2023 jenjang SD/MI berada di kisaran 99 persen dan terjadi penurunan pada tahun 2024 di angka 98,87 persen. Capaian APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan tahun 2023. Sedangkan APM pada jenjang SM/MA/SMK pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maka APM SD/MI/Sederajat Kota Pekalongan mayoritas lebih tinggi. Tetapi APM SMP/MTs/Sederajat Kota Pekalongan lebih rendah pada tahun 2020-2022 dan lebih tinggi pada tahun 2023-2024. Sedangkan APM SMA/MA/SMK/Sederajat Kota Pekalongan jika dilihat dari tahun 2020-2024 pada tahun 2023 dan 2024 saja Kota Pekalongan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan dari tahun 2020-2024 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA disajikan dalam Tabel II-35 berikut.

Tabel II-35
Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2020	99,48	98,00	74,55	81,00	55,58	59,74
2021	99,11	98,22	75,97	80,99	55,04	60,46
2022	99,78	98,39	76,53	81,02	55,28	61,17
2023	99,56	98,46	82,33	81,56	64,39	61,46
2024	98,87	98,39	82,40	81,03	64,96	62,56

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2025 dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan pada tahun 2023, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan pada jenjang SMP/setara, APM laki-laki juga lebih tinggi daripada perempuan. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-36 berikut.

Tabel II-36
Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender
Tahun 2024

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Murni	SD/Setara	98,05	95,25
	SMP/Setara	81,86	73,66

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

2.2.3.7. Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Indikator ini diukur dari persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks internasional dan teks fisik). Capaian kemampuan literasi peserta didik jenjang SD dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terus meningkat, yaitu 53,25 pada tahun 2021, 56,47 pada tahun 2022, 64,13 pada tahun 2023, dan 65,11 pada tahun 2024. Demikian juga untuk jenjang SMP, kemampuan literasi meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2023, yaitu 64,69 pada tahun 2021, 69,41 pada tahun 2022, 76,57 pada tahun 2023 dan 80,68 pada tahun 2024.

Adapun kemampuan numerasi diukur berdasarkan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Capaian kemampuan numerasi peserta didik jenjang SD dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus meningkat, yaitu 37,45 pada tahun 2021, 41,04 pada tahun 2022, 48,18 pada tahun 2023, dan 54,61 pada tahun 2024. Pada jenjang SMP, kemampuan numerasi berfluktuasi dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2021 sebesar 64,69 meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 69,41, menurun pada tahun 2023 menjadi 65,43 dan meningkat Kembali di tahun 2024 yaitu 68,54. Sebagaimana disajikan dalam table berikut :

Tabel II-37
Nilai Kemampuan Literasi Dan Numerasi di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenjang	Capaian 2021 (Rapor 2022)	Capaian 2022 (Rapor 2023)	Capaian 2023 (Rapor 2024)	Capaian 2024 (Rapor 2025)
1	Kemampuan Literasi	SD	53,25	56,47	64,13	65,11
2	Kemampuan Literasi	SMP	64,69	69,41	76,57	80,68
3	Kemampuan Numerasi	SD	37,45	41,04	48,18	54,61
4	Kemampuan Numerasi	SMP	64,69	69,41	65,43	68,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi masih diminati oleh berbagai kalangan, terutama oleh pelajar. Di Kota Pekalongan, jumlah pengunjung perpustakaan

terbilang cukup tinggi dengan kenaikan di tiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 39.885 pada kondisi pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 dengan diadakannya berbagai macam kegiatan, jumlah pengunjung perpustakaan mulai meningkat dengan jumlah 64.527 orang kemudian pada 2022 terdapat kenaikan juga dengan jumlah kunjungan 66.204 orang. Pada tahun 2023 jumlah pengunjung perpustakaan meningkat cukup drastis sebanyak 119.226 pengunjung dan pada 2024 meningkat cukup drastis juga sebanyak 163.580 pengunjung. Berikut jumlah pengunjung perpustakaan mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tabel II-38
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang Harus Dilayani	Rasio
2020	39.885	266.472	0,15
2021	64.527	266.840	0,24
2022	66.204	267.418	0,25
2023	119.226	271.343	0,44
2024	163.580	257.657	0.63

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2025

Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi masih diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama oleh pelajar. Di Kota Pekalongan jumlah pengunjung perpustakaan terbilang cukup tinggi dengan kenaikan di tiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung sebanyak 39.885 pengunjung pada kondisi pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 upaya-upaya dilakukan untuk kembali menggairahkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan, dan berhasil meningkatkan jumlah pengunjung. Sebanyak 64.527 pengunjung tercatat memanfaatkan layanan perpustakaan.

Tahun 2022 Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan turut aktif dalam program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TP-BIS). Program ini berusaha mengubah paradigma lama perpustakaan, dimana perpustakaan tidak lagi hanya sekedar menjadi tempat membaca dan meminjam buku atau mengerjakan tugas-tugas sekolah melainkan perpustakaan bertransformasi menjadi pusat kegiatan masyarakat, dengan output yang diharapkan adalah meningkatkan kesejahteraan, sesuai tagline program TP-BIS Literasi Untuk Kesejahteraan.

Upaya awal untuk mewujudkan program TP-BIS ini yaitu memberikan bimbingan teknis pelaksanaan program kepada pustakawan serta peningkatan layanan informasi berupa penambahan sarana prasarana perpustakaan meliputi penambahan koleksi buku baru, perangkat komputer, server, printer serta pembukaan cabang pojok baca digital (POCADI) di Taman Nursery yang berlokasi di Kuripan Yosorejo Pekalongan Selatan.

Data kunjungan tahun 2022 meningkat tipis ke angka 66.204 pengunjung. Hal ini tak lain disebabkan karena adanya banjir rob yang menggenangi jalan akses menuju ke perpustakaan yang terjadi hampir setiap hari. Untuk mengatasi hal ini pemerintah kota Pekalongan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupaya mendapatkan bantuan DAK dari Perpustakaan Nasional RI untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan di lokasi yang lebih aman. Dan pembangunan gedung ini terlaksana di tahun 2023.

Di tahun 2023 untuk mendukung program TP-BIS yang telah diinisiasi tahun 2022, digalakkanlah sebuah program promosi perpustakaan bertajuk Roadshow Bunda Literasi yang menysasar sekolah baik dari jenjang pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi. Dalam program ini Bunda Literasi Kota Pekalongan ibu Hj. Inggit Soraya, S.Sn., M.M. berperan aktif

mensosialisasikan pembudayaan gemar membaca ke sekolah-sekolah terpilih. Selain Bunda Literasi program ini juga bersinergi dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) dan TP PKK Kota Pekalongan. Program ini berhasil meningkatkan kunjungan pemustaka secara signifikan sebanyak 119.226 pengunjung.

Akhir tahun 2023 pembangunan gedung perpustakaan baru yang beralamat di Jl.K.H.Sabrawi No. 2 Tirta Kecamatan Pekalongan Barat berhasil diselesaikan dan ditempati mulai awal 2024. Dengan lokasi baru yg lebih strategis, dekat dengan permukiman warga, dan sekolah-sekolah di sekitarnya, berhasil menarik pengunjung dari berbagai sekolah (PAUD, TK, SD, SMP dan SMA/SMK bahkan PT) untuk pembelajaran sesuai kurikulum. Bangunan gedung yang lebih representatif juga menjadikan Perpustakaan sebagai destinasi wisata literasi bagi Masyarakat. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan pengunjung adalah membuat MoU dengan sektor terkait dalam pengembangan dan peningkatan minat baca Masyarakat. Dengan berbagai upaya tersebut Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan berhasil meningkatkan jumlah pengunjung sebanyak 163.580 pengunjung di tahun 2024.

Kemampuan literasi dan numerasi siswa merupakan rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional yang dituangkan dalam rapot pendidikan. Dalam asesmen nasional, kemampuan literasi dan numerasi menjadi penilaian dalam Asesmen Kemampuan Minimum (AKM) siswa yang dapat menggambarkan mutu atau kualitas pendidikan, selain hasil atas penilaian Survey Karakter dan Survey Lingkungan Belajar. Kemampuan literasi membaca dan numerasi di Kota Pekalongan untuk jenjang SD/ sederajat menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Literasi membaca untuk SD/ sederajat pada tahun 2021 sebesar 63,20, meningkat menjadi 76,24 pada tahun 2022 dan 82,29 pada tahun 2023, dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 72,80. Numerasi untuk SD/ sederajat pada tahun 2021 sebesar 36,31, meningkat pada tahun 2022 menjadi 52,62 pada tahun 2022 dan 72,35 pada tahun 2023, dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 71,70. Sedangkan pada jenjang SMP/ sederajat, kemampuan literasi membaca ataupun numerasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami kenaikan. Literasi membaca untuk jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2021 sebesar 65,38 dan pada tahun 2024 naik menjadi 79,10. Numerasi untuk jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2021 sebesar 43,76 dan pada tahun 2024 naik menjadi 76,86. Data selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel II-39
Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi pada Jenjang Pendidikan Dasar
di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

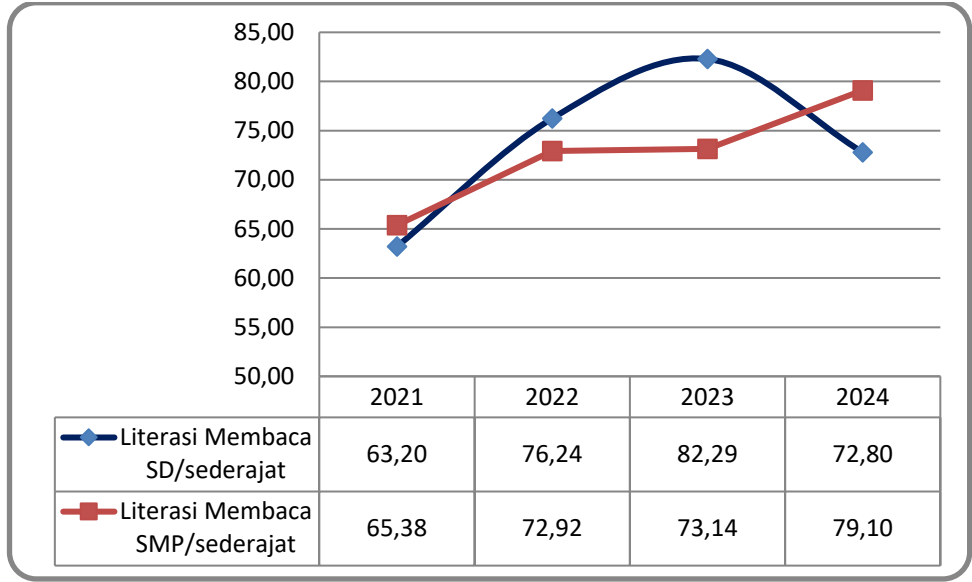
Tahun	Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi SD/ Sederajat (persen)		Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi SMP/ Sederajat (persen)	
	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi
2021	63,20	36,31	65,38	43,76
2022	76,24	52,62	72,92	48,24
2023	82,29	72,35	73,14	68,57
2024	72,80	71,70	79,10	76,86

Sumber: Kemendikdasmen RI, 2025

Literasi Membaca SD dan SMP Sederajat (IUP)

Capaian literasi membaca di Kota Pekalongan selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang cenderung positif, meskipun tidak sepenuhnya konsisten pada semua jenjang. Pada jenjang SD/ sederajat, capaian literasi meningkat signifikan dari

63,20% pada tahun 2021 menjadi 76,24% di tahun 2022, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 82,29%. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 72,80%, yang mengindikasikan adanya tantangan atau kendala dalam pelaksanaan program literasi di tingkat sekolah dasar. Di sisi lain, capaian literasi membaca jenjang SMP/ sederajat menunjukkan tren yang lebih stabil dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dimulai dari 65,38% pada tahun 2021, capaian ini naik menjadi 72,92% pada tahun 2022, kemudian sedikit meningkat menjadi 73,14% di tahun 2023, dan mencapai angka tertinggi sebesar 79,10% di tahun 2024.



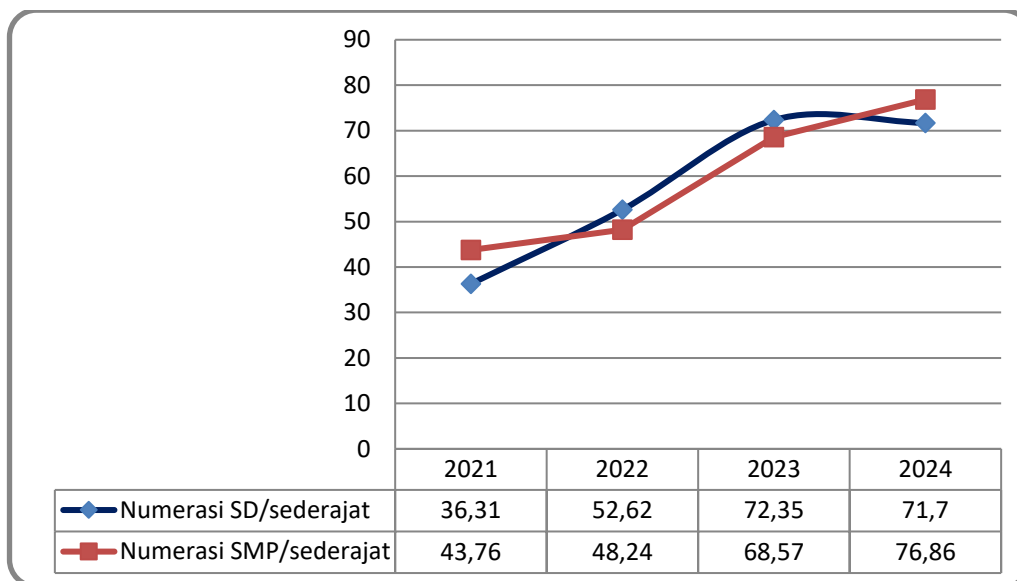
Gambar II-36
Literasi Membaca SD dan SMP di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

Sumber: Kemendikdasmen RI, 2025

Perbedaan pola capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program literasi di tingkat SMP mungkin lebih konsisten dan berhasil, baik dari segi metode pembelajaran, ketersediaan bahan bacaan, maupun peran aktif tenaga pendidik. Sebaliknya, penurunan capaian di jenjang SD pada tahun terakhir menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap intervensi yang telah dilakukan. Diperlukan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas guru, penyediaan sarana pendukung literasi, serta pelibatan orang tua dan komunitas sekolah dalam membangun budaya membaca sejak dini. Pemantauan dan evaluasi rutin juga menjadi kunci untuk memastikan capaian literasi membaca terus meningkat dan merata di semua jenjang pendidikan.

Numerasi SD dan SMP / Sederajat (IUP)

Capaian numerasi siswa SD dan SMP di Kota Pekalongan dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada jenjang SD/ sederajat, capaian numerasi meningkat dari 36,31% pada tahun 2021 menjadi 52,62% pada 2022. Peningkatan yang lebih tajam terjadi di tahun berikutnya, yakni mencapai 72,35% di tahun 2023, meskipun kemudian sedikit menurun menjadi 71,70% pada tahun 2024. Sementara itu, pada jenjang SMP/ sederajat, capaian numerasi juga mengalami kemajuan yang stabil. Dimulai dari 43,76% pada tahun 2021, naik menjadi 48,24% pada 2022, kemudian melonjak ke angka 68,57% di tahun 2023, dan mencapai 76,86% di tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pembelajaran numerasi di sekolah-sekolah Kota Pekalongan, baik di tingkat dasar maupun menengah pertama.



Gambar II-37
Numerasi SD / Sederajat di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Kemendikdasmen RI, 2025

2.2.4. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter

2.2.4.1. Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter

Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan diukur berdasarkan rata-rata persentase implementasi pendidikan keagamaan dan implementasi pendidikan karakter. Pendidikan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai Usia Dini sampai dengan Pendidikan Dasar (PAUD, SD dan SMP). Sedangkan pendidikan karakter diukur berdasarkan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 (K-13).

Tabel II-40
Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Sekolah yang mengimplementasi pendidikan keagamaan		Sekolah yang mengimplementasi pendidikan karakter		Rata-rata
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
2020	294	100	294	100	100
2021	296	100	296	100	100
2022	300	100	300	100	100
2023	304	100	304	100	100
2024	305	100	305	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah / seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan.

Adapun persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan di Kota Pekalongan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung mengalami penurunan. Persentase pada tahun 2020 sebesar

7,53%, meningkat menjadi 8,44% pada tahun 2021 dan mengalami penurunan terus hingga tahun 2024 menjadi 6,06%. Penurunan ini disebabkan jumlah guru yang mengajar mulok bahasa daerah / seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan di Kota Pekalongan semakin berkurang karena guru tersebut pensiun ataupun meninggal dunia, sementara jumlah penambahan guru baru tidak seimbang dengan jumlah pengurangan yang terjadi.

Tabel II-41
Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah / Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Satuan Pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	7,53	8,44	6,95	6,63	6,06

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

2.2.4.2. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, dalam kurun waktu tahun 2020-2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung tetap, tetapi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya justru semakin meningkat dan stabil mulai tahun 2022. Semula berjumlah 2 *event* pada tahun 2020, menjadi 4 *event* di tahun 2021 dan meningkat menjadi 9 *event* seni dan budaya di tahun 2022 - 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan seni dan budaya serta minat masyarakat terhadap penyelenggaraan *event* tersebut. *Event* yang diselenggarakan di tahun 2024 antara lain Festival Imlek Pintu dalam, Kirab Ritual Budaya, Sadranan, Syawalan, Hari Wayang, Bubur Suro, Karnaval Batik, KBAF, Pesindon Batik Vibes.

Selain seni dan budaya, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pengelolaan cagar budaya. Inventarisasi yang dilakukan pada tahun 2017, tercatat sebanyak 282 Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) milik pemerintah daerah, BUMN maupun milik masyarakat. Namun, jumlah ini mengalami penurunan tajam karena banyak diantara bangunan tersebut yang mengalami perubahan fisik secara signifikan, atau pemilik bangunan tidak bersedia untuk ditetapkan sebagai cagar budaya di kemudian hari. Hal ini, menjadikan bangunan tersebut tidak dapat dikategorikan lagi sebagai ODCB. Pada tahun 2024, dilakukan Inventarisasi ulang yang melibatkan pihak akademisi. Dari jumlah 282 obyek, yang mempunyai potensi untuk diteruskan menjadi cagar budaya hanya sebanyak 100 obyek, melalui proses penetapan dengan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Dengan telah dibentuknya TACB di Kota Pekalongan pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2024 telah menetapkan sebanyak 15 OCB yang ditetapkan melalui Surat keputusan Wali Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan terus memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-42
Penyelenggaraan Even Seni Budaya dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	4	9	9	9
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	4
Jumlah Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Obyek Diduga Cagar Budaya yang tercatat	282	282	282	282	282

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Kota Pekalongan merupakan kota dengan tiga corak kebudayaan, yaitu budaya maritim, budaya agraris, dan budaya perniagaan. Banyaknya kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan dapat dilihat dari jumlah data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di Kota Pekalongan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II-43
Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kota Pekalongan

Jenis OPK	Jumlah	Keterangan
Manuskrip	2	Kitab Ramal di Klenteng Po An Thian, Kamus Kuno di Masjid Jami Kauman pekalongan,
Tradisi Lisan	5	Cerita Mitos Dewi Lanjar, Cerita Mitos Kebo Ndanu, Cerita Rakyat Sulasih Sulandono, Cerita Rakyat Ki Bahurekso, dan Cerita Asal Usul Kelurahan
Adat Istiadat	5	Terkait ritual daur hidup manusia: Adat perkawinan, Siklus kelahiran, Siklus dewasa, Ritual kematian dan Prosesi membangun rumah tinggal/ ngedekke omah
Ritus	10	Ritus yang masih sering dilakukan dan lestari di Kota Pekalongan : Syawalan Krapyak, Sya'banan Krapyak, Megengan, sehari sebelum puasa, Rabu Pungkasan, Khoul Habib Ahmad Sapuro, Nyadran Laut, Pek Chun, Perayaan Cap Go Meh, Kirab Panjang Jimat dan Perayaan Bulan Muharram
Pengetahuan Tradisional	3	1. Pembuatan batik mulai dari pemilihan kain, proses pengerjaan hingga pewarnaan. 2. Pembuatan jamu oleh BP. Saintifikasi Jamu 3. Pembuatan Tauco oleh orang Tionghua.
Teknologi Tradisional	2	Pembuatan kapal kayu di galangan kapal Degayu dan Tenun dengan metode ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) di sentra Kampung Tenun Medono.
Seni	4	Berdasarkan genre komunitas, membagi seni menjadi : seni musik, seni tari, seni pertunjukan dan seni rupa
Bahasa	1	Bahasa Jawa Ngoko Dialek Pekalongan
Permainan Rakyat	5	Yang masih relatif masih dimainkan yakni : Egrang, Layangan, Bekelan, Jengklek, dan Gobak Sodor.

Sumber: Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pekalongan, 2025.

Terdapat 10 jenis Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2020-2023 banyaknya jenis OPK yang dilestarikan mengacu pada Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018. Kemudian pada tahun 2024, dimutakhirkan kembali menyesuaikan kondisi yang ada yang tercantum dalam Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024-2025. Pemutakhiran PPKD wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah minimal setiap 5 tahun sekali.

Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat berupaya melestarikan semua seni budaya yang ada dengan cara melakukan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan event seni budaya. Pada tahun 2020 dikelompokkan terdapat 17 macam seni budaya, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 12 macam seni budaya. dikarenakan selama masa pandemi banyak event seni budaya yang tidak diselenggarakan dan kembali meningkat pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sebanyak 19 jenis kesenian. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-44
Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Simtuduror	Seni Lukis	Simtuduror	Simtuduror	Simtuduror
2	Seni Musik	Seni Musik	Rampak	Rampak	Rampak
3	Sanggar Teater	Sanggar Teater	Band	Band	Band
4	Seni Tari	Seni Tari	Terbang/Genjring /Jawan	Terbang/Genjring /Jawan	Terbang/Genjring /Jawan
5	Seni Rakyat	Seni Rakyat	Samroh	Samroh	Samroh
6	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)
7	Perfilman	Perfilman	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong
8	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat	Gendukan	Gendukan	Gendukan
9	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari
10	Samroh	Dekorasi	Sintren	Sintren	Sintren
11	Terbang Genjring/Jawan	Sastra	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan
12	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Wayang	Wayang	Wayang
13	Reklame		Reog	Reog	Reog
14	Dekorasi		Barongan	Barongan	Barongan
15	Seni Lukis		Seni Teater	Seni Teater	Seni Teater
16	Kerajinan		Ketoprak	Ketoprak	Ketoprak
17	Sastra		Kuntulan	Kuntulan	Kuntulan
18			Seni Lukis	Seni Lukis	Seni Lukis
19			Kerajinan	Kerajinan	Kerajinan

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Perkembangan jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-45 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020 terdapat 162 kelompok kesenian. Namun di tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai hampir dua kali lipatnya menjadi 232 kelompok, tetapi kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2022 menjadi 144 kelompok dan kembali menurun pada tahun 2023 sejumlah 128 kelompok kesenian. Jumlah kembali bertambah pada tahun 2024 sejumlah 130 kelompok kesenian. Sementara itu gedung kesenian jumlahnya tetap yaitu 4, antara lain Warung Apresiasi, GOR Jetayu, Sanggar Laras Wisata, Sanggar Cahyo Kedaton.

Tabel II-45
Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Kesenian	162	100	144	128	130
Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok (persen)	2,47	4,00	2,78	3,12	3,08

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Jumlah kelompok kesenian yang dapat difasilitasi dan disediakan sarana masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan jumlah kelompok seni budaya yang jumlahnya cenderung bertambah sedangkan ketersediaan sarana yang akan diberikan terbatas.

Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir, Kebudayaan merupakan suatu kesatuan utuh yang mencakup seluruh gagasan, nilai-nilai, norma, perilaku, adat istiadat, serta karya cipta manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan tidak hanya berperan sebagai identitas daerah, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman hidup yang dapat membentuk kepribadian serta menuntun kehidupan manusia agar menjadi lebih bermartabat, beradab, dan memiliki arah yang jelas. Dalam konteks pembangunan daerah, pembangunan kebudayaan menjadi salah satu aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika globalisasi dan kemajuan zaman. Di era globalisasi seperti sekarang ini, berbagai budaya baru dari luar dengan mudah masuk dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kebudayaan harus mampu menyesuaikan diri dengan pengaruh budaya global tersebut, namun tetap menjaga dan memperkuat identitas nasional yang sarat dengan nilai-nilai luhur sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara.

Kota Pekalongan, yang dikenal sebagai salah satu kota pesisir di wilayah utara Pulau Jawa, juga menerapkan prinsip serupa dalam proses pembangunannya. Pemerintah daerah dan masyarakat Kota Pekalongan memandang bahwa unsur-unsur budaya dan warisan kebudayaan lokal memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai modal dasar dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu wujud nyata dari kebudayaan tersebut adalah kesenian. Kesenian tidak hanya menjadi sarana hiburan atau ekspresi kreatif, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai, sejarah, dan keragaman budaya masyarakat setempat.

Di Kota Pekalongan, perkembangan kesenian sangat dipengaruhi oleh berbagai latar belakang budaya yang membentuk identitas kota. Pengaruh budaya Jawa sebagai budaya lokal, kemudian berpadu dengan unsur budaya Arab, Tionghoa, serta budaya pesisir lainnya, menciptakan ragam kesenian yang unik dan khas. Berikut disajikan data persentase Kelompok Kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian di Kota Pekalongan pada tahun 2020-2024.

Tabel II-46
Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok kesenian yang aktif	162	100	144	128	130

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok kesenian yang tercatat	232	232	144	144	144
Persentase (%)	70	43	100	89	90

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentasenya tercatat sebesar 70%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 43%, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19, di mana banyak kelompok kesenian yang tidak beroperasi. Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dengan persentase mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh kelompok kesenian yang tercatat kembali aktif dan terlibat dalam berbagai pertunjukan. Pada tahun 2023, angka tersebut sedikit menurun menjadi 89%, sebelum akhirnya naik kembali sebesar 1% pada tahun 2024, sehingga mencapai 90%.

Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan

Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan / atau kebudayaan melalui proses penetapan. Objek yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus memenuhi kriteria tertentu, memiliki makna budaya yang kuat, serta dianggap perlu dilestarikan karena berkontribusi terhadap jati diri suatu daerah.

Pelestarian Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, dengan tujuan menjaga keaslian, keutuhan, dan keberlanjutannya. Upaya ini bisa berupa pemugaran bangunan bersejarah, perawatan benda pusaka, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga warisan budaya tersebut.

Pelestarian baik CB maupun WBTB penting dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga identitas budaya lokal dan memperkuat warisan nasional di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Berikut data persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan di Kota Pekalongan pada tahun 2020-2024:

Tabel II-47
Persentase Cagar Budaya (CB) yang Dilestarikan Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan	2	2	3	3	4
Jumlah Cagar Budaya (CB) yang tercatat	100	100	100	100	100
Persentase (%)	2	2	3	3	4

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa persentase Cagar Budaya yang berhasil dilestarikan di Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2020-2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen yang semakin kuat dari pemerintah daerah maupun masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya yang memiliki nilai sejarah.

Pada tahun 2020, persentase Cagar Budaya yang dilestarikan mencapai 2%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 5%. Tren positif ini berlanjut, di mana pada tahun 2022 persentasenya meningkat menjadi 8%, lalu naik kembali menjadi 11% pada tahun 2023, dan mencapai 15% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga situs, bangunan, dan benda bersejarah yang menjadi bagian dari identitas budaya Kota Pekalongan.

Tabel II-48
Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	0	0	0	0	0
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tercatat	10	10	10	10	10
Persentase (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa hingga tahun 2024 belum ada satu pun Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari Kota Pekalongan yang berhasil dilestarikan secara resmi melalui proses penetapan di kancah nasional, meskipun tercatat terdapat sepuluh unsur obyek pemajuan kebudayaan yang berpotensi memperoleh penetapan dari pemerintah pusat.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan belum memperoleh penetapan WBTB tersebut adalah karena proses pengajuan dan penetapan WBTB yang memakan waktu yang panjang dan bersaing dengan daerah lain. Di samping itu, proses penetapan WBTB juga membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit, serta upaya aksi nyata dari pemerintah daerah adalah salah satu faktor keberhasilan penetapan WBTB. Sehingga diperlukan persiapan yang matang dan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk komunitas budaya, akademisi, dan masyarakat umum, agar proses pelestarian WBTB di Kota Pekalongan dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan pengakuan resmi terhadap kekayaan budaya tak benda yang dimiliki.

Jumlah Pengunjung tempat bersejarah

Tempat bersejarah merupakan aset yang sangat penting bagi suatu daerah karena selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, tempat-tempat tersebut juga berperan sebagai cerminan dari identitas dan kekayaan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Pekalongan

adalah Museum Batik Pekalongan. Museum ini diresmikan pada tanggal 12 Juli 2006 dan sejak saat itu telah menjadi salah satu ikon kebudayaan Kota Pekalongan.

Pendirian Museum Batik tidak dapat dipisahkan dari peran serta masyarakat, khususnya mereka yang tergabung dalam berbagai komunitas pecinta dan pelestari batik, baik yang berasal dari Pekalongan sendiri maupun dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Keterlibatan komunitas ini menunjukkan adanya kepedulian dan komitmen kuat untuk melestarikan warisan budaya batik sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Museum Batik Pekalongan tidak hanya dikunjungi oleh Wisatawan Nusantara, tetapi juga Wisatawan Mancanegara. Berikut ini disajikan data jumlah pengunjung Museum Batik Pekalongan selama periode tahun 2020-2024:

Tabel II-49
Jumlah Pengunjung Museum Batik Nasional Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Wisatawan Mancanegara	138	1	85	236	327
Wisatawan Nusantara	9.982	6.193	24.592	40.697	44.205
Total	10.120	6.194	24.677	40.933	44.532

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung Museum Batik Pekalongan mengalami fluktuasi atau perubahan yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah total pengunjung tercatat sebanyak 9.982 orang. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, jumlah pengunjung menurun drastis menjadi hanya 6.193 orang. Penurunan signifikan ini disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19 yang saat itu masih berlangsung, di mana pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan sosial, termasuk pembatasan jumlah pengunjung di tempat-tempat umum seperti museum, demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dampak dari kebijakan tersebut sangat terasa terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke Museum Batik.

Meskipun demikian, mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, terlihat adanya tren peningkatan jumlah pengunjung secara bertahap yaitu secara berturut-turut sebanyak 24.592 orang, 40.697 orang, dan 44.205. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh membaiknya situasi pandemi, dilonggarkannya pembatasan kegiatan masyarakat, serta meningkatnya minat masyarakat dan wisatawan untuk kembali mengunjungi destinasi budaya seperti museum. Peningkatan ini juga mencerminkan kembalinya semangat masyarakat untuk mengenal, menghargai, dan melestarikan warisan budaya bangsa melalui kunjungan ke tempat-tempat bersejarah.

Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pelestarian budaya lokal

Pelestarian budaya lokal merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Budaya lokal adalah identitas dan warisan berharga yang mencerminkan nilai, norma, serta tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam

menjaga kelangsungan budaya tersebut agar tidak tergerus oleh arus globalisasi dan modernisasi.

Di berbagai daerah, masyarakat menunjukkan partisipasi mereka melalui beragam cara, seperti menghidupkan kembali tradisi-tradisi lama, mendukung dan mengikuti kegiatan kesenian lokal, hingga membentuk komunitas-komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian adat, bahasa daerah, maupun kerajinan tradisional. Di Kota Pekalongan, masyarakat turut serta dalam pelestarian budaya lokal melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan seni seperti pertunjukan batik, kesenian musik dan tari tradisional, serta upacara adat yang terus dilestarikan secara turun-temurun.

Dengan adanya kesadaran dan peran aktif dari masyarakat, pelestarian budaya lokal tidak hanya sekadar menjadi program seremonial, tetapi benar-benar menjadi gerakan bersama yang hidup dalam keseharian. Dukungan masyarakat ini sangat penting untuk memastikan bahwa kekayaan budaya lokal dapat terus dinikmati, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Berikut data Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal di Kota Pekalongan tahun 2020-2024:

Tabel II-50
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Lokal Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Event Budaya	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi	Jumlah penduduk Kota Pekalongan	Tingkat Partisipasi Masyarakat
2020	Pembuatan Video dan Pembuatan Tarian	400	307.097	0,13%
2021	Sadranan, Lomba Kesenian, Pekan Seni, Pelatihan Seni	1050	316.119	0,33%
2022	Festival Jl. Belimbing, Sadranan, Pekcun, Syawalan, Hari Wayang, Bubur Suro, Karnaval Batik, Kauman Fest, Pesindon Fest	30.000	316.798	9,4%
2023	Festival Imlek Pintu dalem, Kirab Ritual Budaya, Sadranan, Syawalan, Hari Wayang, Bubur Suro, Karnaval Batik, KBAF, Pesindon Batik Vibes	31.600	316.798	10%
2024	Festival Imlek Pintu dalem, Kirab Ritual Budaya, Sadranan, Syawalan, Hari Wayang, Bubur Suro, Karnaval Batik, KBAF, Pesindon Batik Vibes	32.000	317.535	10,06%

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

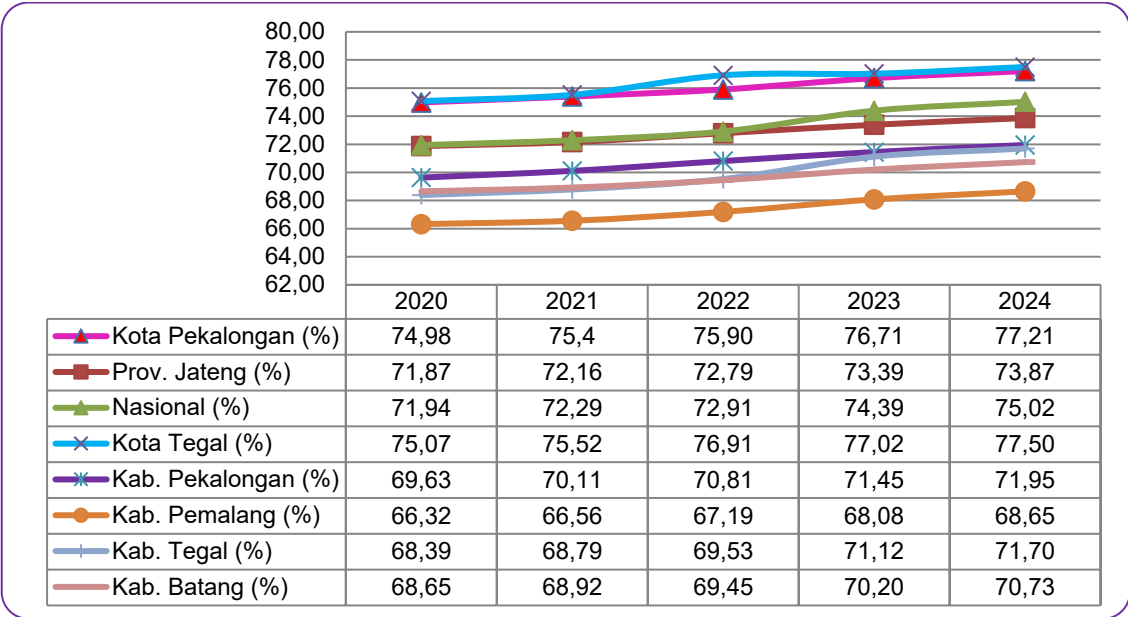
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal di Kota Pekalongan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin antusias dan peduli terhadap pelestarian budaya daerah. Adapun persentase partisipasi masyarakat tercatat sebesar 0,13% pada tahun 2020, naik menjadi 0,33% di tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 9,4% pada 2022, 10% pada 2023, dan sedikit meningkat lagi menjadi 10,06% pada tahun 2024. Peningkatan ini

mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan budaya lokal.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.



Gambar II-38
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024

Sumber: www.jateng.bps.go.id dan www.bps.go.id (diolah), 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2024. Pada 2020, IPM Kota Pekalongan berada di angka 74,98 dan terus meningkat hingga mencapai 77,21 pada 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional, yang masing-masing mencatat angka 73,39 dan 73,78 pada 2024. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, Kota Pekalongan juga memiliki IPM yang lebih unggul dibandingkan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, dan Kota Tegal, meskipun Kota Tegal menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil dan mendekati angka IPM Kota Pekalongan.

Peningkatan IPM ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Pekalongan. Dukungan dari pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkontribusi pada pencapaian ini. Namun, untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pemerataan akses terhadap layanan dasar, peningkatan daya saing

tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi kreatif dan industri lokal agar IPM Kota Pekalongan dapat terus mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan di masa mendatang.

Secara lengkap, Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel II-51 berikut.

Tabel II-51
Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp 000)	IPM
2020	8,96	12,84	74,38	12.467,00	74,98
2021	9,18	12,85	74,44	12.598,00	75,40
2022	9,20	12,86	74,51	13.158,00	75,90
2023	9,29	12,87	74,60	14.056,00	76,71
2024	9,34	12,89	74,79	14.547,00	77,21

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan selama periode 2020-2024 didorong oleh kenaikan di berbagai komponen utama. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,96 tahun pada 2020 menjadi 9,34 tahun pada 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat. Harapan lama sekolah juga mengalami kenaikan meskipun relatif kecil, dari 12,84 tahun pada 2020 menjadi 12,89 tahun pada 2024, yang mencerminkan ekspektasi terhadap lama pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak di Kota Pekalongan.

Selain itu, usia harapan hidup meningkat dari 74,38 tahun pada 2020 menjadi 74,79 tahun pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran per kapita per tahun juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp12.467.000 pada 2020 menjadi Rp14.547.000 pada 2024, menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang lebih baik. Secara keseluruhan, kombinasi peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berkontribusi pada peningkatan IPM Kota Pekalongan dari 74,98 pada 2020 menjadi 77,21 pada 2024, mencerminkan peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan bagi masyarakat.

2.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, dan berkelanjutan dengan menekankan kerja kolaboratif antar-stakeholder. SIDa mencakup berbagai pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), interaksi, serta proses produktif yang mempengaruhi perkembangan, kecepatan inovasi, dan difusi inovasi, termasuk teknologi, praktik terbaik, serta proses pembelajaran.

Untuk mengoptimalkan implementasi SIDa, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang menjadi dasar bagi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Regulasi ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong inovasi di wilayahnya agar tercipta keselarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di Kota Pekalongan, penyelenggaraan SIDa diatur melalui Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2022.

Keberhasilan implementasi Sistem Inovasi Daerah dapat diukur melalui Indeks Inovasi Daerah (IID) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tolak ukur

dalam menilai kapasitas inovasi suatu daerah. IID mencerminkan sejauh mana daerah mampu mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi lokal.

Berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2024, Kota Pekalongan berhasil masuk dalam kategori "Terinovatif", dengan peringkat ke-7 dari 93 kota di Indonesia, memperoleh nilai 77,07. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2023, di mana Kota Pekalongan hanya memperoleh nilai 53,96 dengan predikat "Inovatif". Kenaikan ini mencerminkan efektivitas SIDa dalam mendorong inovasi di berbagai sektor, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan berbasis inovasi.

Selain IID, indikator lain yang menggambarkan keberhasilan inovasi daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dipetakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD bertujuan untuk mengukur kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing guna mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, Kota Pekalongan memperoleh nilai IDSD sebesar 3,87, menunjukkan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.

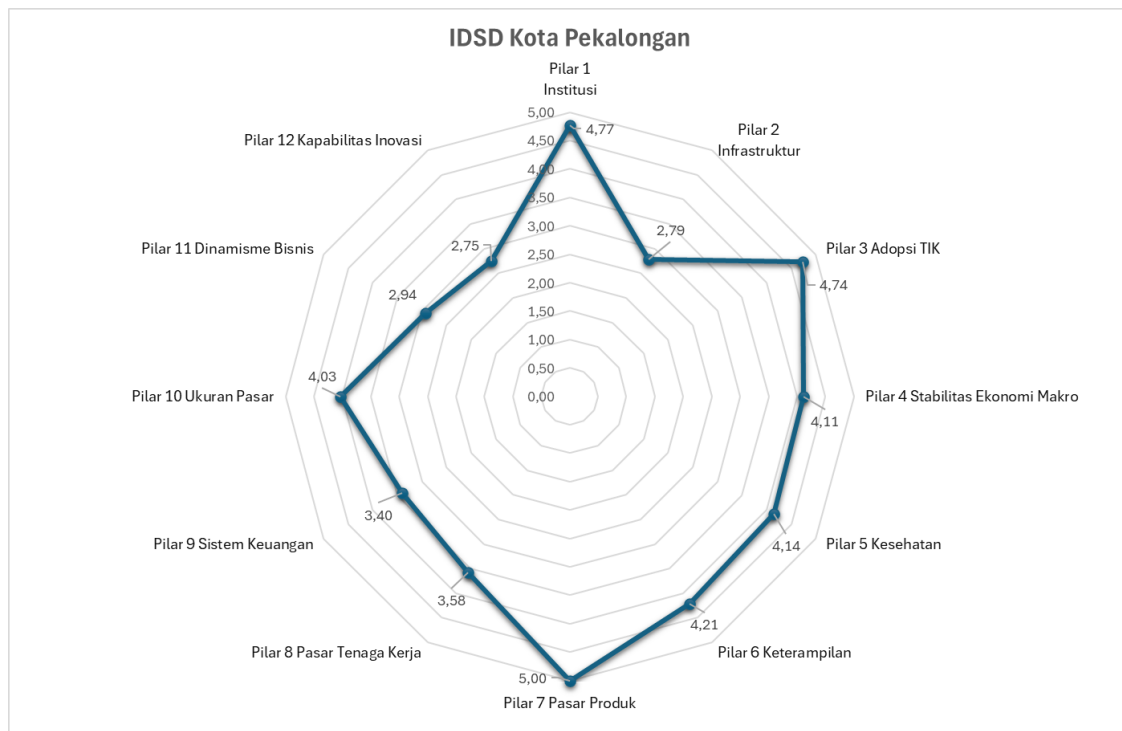
Tabel II-52
Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan
dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	Nilai Indeks				
		2020*	2021*	2022	2023	2024
1	Kota Pekalongan	3,676	3,418	3,14	3,60	3,87
Persandingan dengan kabupaten sekitar						
2	Kab. Pekalongan	3,613	3,395	2,91	3,36	3,61
3	Kab. Batang	3,368	3,403	2,97	3,32	3,59
4	Kab. Pemalang	3,063	2,848	2,93	3,20	3,62
Persandingan dengan kota di Jawa Tengah						
5	Kota Tegal	3,755	3,298	3,30	3,63	4,08
6	Kota Salatiga	3,568	3,430	3,40	3,77	4,16
7	Kota Magelang	3,259	3,130	3,50	3,81	4,26

*Terdapat perubahan metode pengukuran IDSD antara tahun 2018-2021 dan Tahun 2022. Tahun 2018-2021 menggunakan kuesioner yang diisi oleh Pemerintah Provinsi/Kab/Kota sedangkan pada Tahun 2022, pengukuran dilakukan mandiri oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sumber: idsd.jateng.id (diolah), 2025

Secara lebih rinci, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diukur melalui 4 aspek, yang meliputi 12 pilar (Institusi, Instruktur, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Porduk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis, Kapabilitas Inovasi). Capaian Kota Pekalongan berdasarkan skor pilar dalam ekosistem inovasi dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar II-39
Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi

Sumber: diolah dari hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) BRIN 2025

Berdasarkan capaian diatas, Kota Pekalongan memiliki daya saing yang cukup baik dengan skor IDSD 2024 sebesar 3,87, didukung oleh keunggulan pada pasar produk (5,00), institusi (4,77), dan adopsi teknologi informasi (4,74). Stabilitas ekonomi makro, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja juga cukup baik. Namun, terdapat tantangan utama dalam infrastruktur (2,79), kapabilitas inovasi (2,75), dan dinamisme bisnis (2,94). Keterbatasan akses keuangan, pasar tenaga kerja, dan ukuran pasar juga masih perlu diperbaiki. Untuk meningkatkan daya saing, Pekalongan perlu fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan inovasi, digitalisasi UMKM, perluasan akses pembiayaan, serta ekspansi pasar dan konektivitas guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Korelasi antara Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Indeks Inovasi Daerah (IID), dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi sangat penting dalam pembangunan daerah. Implementasi SIDa yang optimal akan meningkatkan IID, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan IDSD. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang berkelanjutan tidak hanya mendorong efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional dan global.

Dalam rangka mengembangkan inovasi lebih lanjut, Kota Pekalongan menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah yang menetapkan Inovasi Daerah Tahun 2023, menetapkan pemenang inovasi tahun 2024 dan inisiasi inovasi tahun 2025, serta inisiasi inovasi yang mendapatkan pembiayaan APBD tahun 2025. Berikut ini gambaran inovasi yang telah dilakukan Kota Pekalongan tahun 2023-2024, yang meliputi:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dalam hal inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government*. Infrastruktur jaringan (disebut Batiknet) serta berbagai aplikasi telah dibangun sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga

sekarang. Hampir semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkoneksi jaringan Batiknet, baik menggunakan serat optik maupun radio *wireless*. Lebih dari 50 SIM (Sistem Informasi Manajemen)/aplikasi telah dibangun guna mendukung tata kelola yang lebih baik.

Pada tahun 2023 – 2024, telah disusun inovasi yang terkait tata kelola pemerintah daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem Penghimpun Inovasi, Krenova & RUD Kota Pekalongan (INSPIRASI). Sistem Inspirasi merupakan sistem berbasis web yang berfungsi untuk mempermudah terkait perhimpunan atau pendataan seluruh Inovasi Daerah Kota Pekalongan sebelum di Upload Ke web Kemendagri (BSKDN) terkait Innovative Government Award (IGA). Selain itu, Sistem Inspirasi juga menghimpun data Riset Unggulan Daerah (RUD) serta Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA)
- b. EPROKUMDA (Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Elektronik) untuk mengoptimalkan mekanisme fasilitasi penyusunan produk hukum daerah pada bagian hukum sekretariat daerah Kota Pekalongan .
- c. SIMANTAP BISA REBORN 23 (Sistem Informasi Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis E-Presensi dan E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan) adalah suatu inovasi yang berfungsi untuk mengintegrasikan aplikasi E-Presensi dan EKinerja sebagai dasar pemberian TPP PNS sehingga proses perhitungan TPP PNS dapat dilakukan secara digital oleh Sistem Informasi secara efektif dan efisien serta akurat dan meminimalisir kesalahan dalam perhitungan
- d. Si-Pandai (Sistem Informasi Pelayanan Digital Kepegawaian Terintegrasi) Sebelum ada aplikasi Si-Pandai, aplikasi yang ada masih berdiri sendiri-sendiri, misalnya aplikasi : E-Kenaikan Pangkat, E-Pensiun, E-Kakak (Karis, Karsu, Karpeg), maupun E-MPP (Masa Persiapan Pensiun), namun setelah adanya aplikasi Si-Pandai, input dokumen cukup sekali data langsung terintegrasi. Sehingga tidak berulang-ulang. Prosesnya langsung bisa dilakukan ASN sehingga lebih akurat, karena usulan dari ASN itu sendiri, sehingga berusaha menyajikan data yang benar
- e. SEKSAMA (sistem Evaluasi Kinerja Satu Masukan) Pengelolaan evaluasi kinerja dari RPJMD, RKPD, LKPJ, dan LAKIP. Fitur-fitur seperti evaluasi IKD, cetak laporan realisasi kinerja, dan pembuatan form data dukung untuk LAKIP memungkinkan user untuk melakukan analisis yang cermat.
- f. SITANTRI (Sistem Informasi Pencatatan Pendapatan Retribusi) Memudahkan dalam merekap data pendapatan retribusi pasar serta dapat mengetahui dengan pasti jumlah pendapatan dari retribusi pasar di seluruh Kota Pekalongan

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan dituntut untuk terus melahirkan inovasi-inovasi. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang berupaya membuat inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

- a. DUKCAPIL PINTAR (Pelayanan Integrasi Tanpa Ribet). DUKCAPIL PINTAR merupakan Sistem digitalisasi administrasi kependudukan dimana masyarakat dapat mengurus dokumen Adminduk secara online kapanpun dan dimanapun sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor.
- b. SIKASTEWE (Sistem Informasi Kas RT RW) adalah sistem informasi pengelolaan kas yang dapat diterapkan oleh pengurus RT/RW se-wilayah kelurahan Kota Pekalongan agar bisa memberikan informasi atau laporan keuangan yang dikelolanya ke warga diwilayah RT/RW setempat

- c. Tuntas (Totalitas Upaya Nyata enTaskan Anak tidak Sekolah). Tujuan pembentukan aplikasi Tuntas adalah untuk menyediakan sistem yang akurat dan efisien dalam mendeteksi, memverifikasi, dan memvalidasi data anak tidak bersekolah di Kota Pekalongan
- d. KATALIS (Kolaborasi Pemerintah dan Lintas Sektor) merupakan inovasi yang digunakan mengkolaborasikan Pemerintah dan Lintas Sektor diantaranya untuk menyediakan database badan usaha dan penerima TJSLBU (Tanggungjawab Sosial Lingkungan dan Badan Usaha), Mekanisme pengajuan dan approval TJSLBU serta menampilkan hubungan kemitraan TJSLBU secara spasial
- e. SIAPPEM adalah inovasi berupa Platform untuk pengelola Penanaman Modal / Investasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang terintegrasi dan terpadu dengan stakeholder terkait
- f. PELANGI (Kelurahan Peduli Lingkungan Dan Adaptasi Perubahan Iklim) adalah program untuk mendorong/memperkuat kepedulian terhadap isu lingkungan secara umum, termasuk persoalan persampahan, dan perubahan iklim. Program Kelurahan PELANGI secara operasional dilaksanakan dalam bentuk Lomba Antar Kelurahan secara umum dan melibatkan satu RW di wilayah Kelurahan sebagai lokus unggulan.

3. Inovasi Daerah Lainnya

Inovasi daerah lainnya merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi dalam konteks ini adalah inovasi selain tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kurun waktu 2023-2024 (sedang berjalan), inovasi daerah lainnya antara lain meliputi:

- a. Inovasi pada urusan pendidikan
 - 1) KARIN (Karnaval Inovasi Guru) merupakan kegiatan yang memfasilitasi guru untuk bisa belajar, berkarya, dan berbagi Praktik Baik/Inovasi melalui channel Youtube
 - 2) BIJAK IPAS (belajar interaksi dan menyenangkan dengan EBook IPAS) Harmonis
 - 3) JELAJAH (Jelantah Jadi Berfaedah) merupakan inovasi yang memanfaatkan minyak jelantah untuk mengurangi limbah minyak jelantah setelah tidak layak digunakan menjadi sabun herbal, sabun cuci piring dan baju, lilin aroma terapi, pestisida dan cairan pengkilap body kasar motor.
 - 4) Mi Gelas Sehat (Micro Green Kelas Sekolah Sehat) adalah inovasi untuk memperkenalkan dan mengajarkan serta mempraktekan menanam sayuran dengan konsep micro green untuk diterapkan di tiap – tiap kelas pembelajaran kepada anak – anak.
 - 5) Inovasi di bidang Pendidikan di berbagi sekolah di tahun 2024

Tabel II-53
Inovasi Daerah Bidang Pendidikan

No.	Nama Inovasi	Sekolah
1	KARIN	PGRI Kota Pekalongan
2	BIJAK IPAS	SDN Bendan 04 Kota Pekalongan
3	JELAJAH	SMP Islam Al Azhar 10
4	Mi Gelas Sehat	TK IT Al fikri

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

- b. Inovasi pada urusan kesehatan

- 1) DIMENSI PEKA yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental dan pencegahan gangguan jiwa yang data di Kota Pekalongan serta meningkatkan pelayanan tentang kesehatan mental yang bisa dijangkau masyarakat terdekat dan intervensi untuk gangguan mental emosional oleh faskes terdekat.
- 2) Pengintegrasian Sistem Informasi Kerjasama Rumah Sakit (SISARASA) Berbasis Web di RSUD Bendan Kota Pekalongan
- 3) CENDOL TBC (Cegah Nular dan Obati Langsung TBC) Inovasi berupa metode deteksi penyakit menular TB yang mendeteksi gejala TB dengan merata dan menyeluruh serta dapat ditangani dengan cepat sehingga meminimalisir penularan penyakit TB
- 4) Aplikasi Digital Analisis Z-Score Status Gizi dan Kontrol Stunting adalah sebuah platform inovasi yang dirancang untuk mendukung para kader posyandu di Kecamatan Pekalongan Utara dalam memantau dan mengelola data status gizi anak secara lebih akurat dan efisien. Aplikasi ini bertujuan untuk memonitor status gizi dalam upaya penurunan angka stunting melalui teknologi aplikasi yang mempermudah pengumpulan, analisis, dan pelaporan data gizi anak.
- 5) MAS CANTING singkatan dari Remaja Sehat Cegah Stunting, merupakan program yang diinisiasi oleh DINSOSP2KB Kota Pekalongan sebagai bagian dari upaya mendukung prioritas nasional dalam penurunan angka stunting. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesehatan remaja, terutama dalam mencegah anemia dan kekurangan gizi yang dapat menjadi faktor risiko stunting di masa depan. Dengan menyasar remaja usia 12–23 tahun, Mas Canting berupaya menciptakan generasi muda yang sehat secara fisik dan mental, sehingga siap menghadapi tantangan masa depan.
- 6) Inovasi kebijakan kesehatan di puskesmas sebagai faskes tingkat pertama sebagai berikut.

Tabel II-54
Inovasi Daerah Bidang Kesehatan

No.	Nama Inovasi	Puskesmas
1	DIMENSI PEKA	Dinas Kesehatan
2	SISARASA	RSUD BENDAN
3	CENDOL TBC	Puskesmas Tondano
4	Aplikasi Digital Analisis Z-Score Status Gizi dan Kontrol Stunting	Kecamatan Pekalongan Utara
5	MAS CANTING	Dinsos P2KB

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

c. Inovasi pada urusan perumahan dan permukiman

- 1) Untuk menangani kawasan kumuh di Kota Pekalongan, khususnya Kampung Bugisan, pemerintah meluncurkan Program MAPAN MENAWAN (Maju, Adaptif, Partisipatif untuk Aksi Nyata Menata Kawasan). Program ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat guna menata lingkungan secara berkelanjutan. Kampung Bugisan dipilih sebagai lokasi prioritas tahun 2024 karena telah terdampak banjir dan rob selama lebih dari tujuh tahun, menyebabkan kerusakan lingkungan, infrastruktur, dan penurunan kualitas hidup. Masalah di wilayah ini mencakup

aspek fisik dan sosial ekonomi, seperti kondisi bangunan yang buruk, minimnya akses air bersih, serta rendahnya kesadaran menjaga lingkungan.

- 2) Jabang Tetuko (Jejaring Mbangun Omah Tetulung Kanca Warga) adalah inovasi yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Skemanya, warga membeli tanah, lalu Pemerintah Kota Pekalongan membantu membangunkan rumah di atasnya. Inovasi ini diterapkan di Kelurahan Klego dan Kampung Bugisan, dengan dukungan DAK dari Pemerintah Pusat, untuk meningkatkan kepemilikan rumah bagi warga kurang mampu..
 - 3) Inovasi daerah “Motor Kawanku” mempermudah pengumpulan dan perhitungan data kawasan kumuh secara efektif dan efisien melalui aplikasi berbasis web. Data tersimpan otomatis di server, menghindari input dan hitung ulang. Hasilnya menjadi dasar pemetaan luasan kumuh tiap tahun dan acuan strategi untuk mewujudkan Kota Pekalongan bebas kumuh.
- d. Inovasi pada urusan kelautan dan perikanan

Permasalahan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kota Pekalongan yang diakibatkan oleh banjir rob sangatlah kompleks. Menghadapi hal tersebut Pemerintah Kota Pekalongan dan stakeholder perikanan berupaya mencari solusi. Berbagai pihak terus dirangkul dan dikolaborasikan dalam satu komitmen bersama untuk mengembalikan Kejayaan Kota Pekalongan. Pihak-pihak tersebut tidak hanya pemerintah (Kota Pekalongan, Provinsi dan Pusat), tetapi juga memerlukan keterlibatan legislative, masyarakat (pengusaha kapal, nelayan, pembudidaya, buruh dll), industri kecil dan umkm, akademisi dan pihak terkait lainnya. Dengan latar belakang pemikiran ini, pemerintah Kota Pekalongan meluncurkan program Kolaboratif dengan nama “KAKAP Emas-KembALikan Kejayaan perAiran Pekalongan bagi Ekonomi dan kesejahteraan MASyarakat”. Inovasi – inovasi dalam program KAKAP Emas berikut diharapkan mampu mengangkat Kembali kejayaan perikanan Kota Pekalongan.

Tabel II-55
Inovasi Daerah Bidang Perikanan

No.	Nama Inovasi	Keterangan
1	Sistem Informasi Aplikasi Perikanan (SIAPKAN)	Sistem informasi terkait pengelolaan perikanan dan data perikanan, serta memuat aplikasi layanan berusaha dan berkegiatan di sector perikanan.
2	FISH Apartement	Rumah ikan merupakan tempat pengasuhan benih di laut menggunakan terumbu karang buatan
3	JALABU (Jaring Jala Bubu)	merupakan inovasi yang mengadaptasi kebutuhan resiliensi masyarakat degayu yang terdampak banjir dan rob.
4	APUNGKU (Program Jaring APUNG Untuk Pembudidaya Kreatif dan Unggul)	Adaptasi pemanfaatan Jaring Apung untuk budidaya ikan pada kawasan terdampak banjir dan rob
5	Perahu Nelayan Tangguh	Pemberian bantuan kapal bermotor kepada masyarakat Degayu terdampak rob yang alih profesi dari petani sawah menjadi nelayan

No.	Nama Inovasi	Keterangan
6	Budi Mantap(Budidaya Karamba Jaring Tancap)	Pemberian bantuan jaring tancap pada petambak yang kondisi dampak banjir dan rob belum terlalu tinggi seperti di Bandengan dan Degayu.
7	PINTU BERDAYA (Progam Pintu Bersama Untuk Perikanan Budidaya)	Pembuatan pintu air payau dari Kali Banger ke tambak pembudidaya yang ada di Slamaran, Krapyak (di ujung sungai).
8	TPI LUNAS	Manajemen pembayaran lelang ikan yang selesai pada hari yang sama, sehingga penerimaan pendapatan nelayan tidak tertunda
9	PELITA (Pekalongan Lelang Ikan Transparan Dan Amanah)	Inovasi berupa opsi 3 (tiga) jenis pelelangan ikan, yakni <ul style="list-style-type: none"> - Lelang terbuka, merupakan lelang konvensional - Lelang terbuka dengan sampel, dimana hanya sampel yang digelar - Lelang terbatas, lelang ikan yang dibeli oleh pemilik sendiri karena tidak ada kesepakatan harga sehingga disimpan di cold storage.
10	Gerai Oleh-Oleh Bersama	
11	OLIK (Aneka Olahan Ikan)	Peningkatan nilai tambah olahan ikan melalui penambahan sarana prasarana pemasaran
12	TAMBAK MILENIAL (Budidaya udang Vaname dengan Kolam Bundar)	Budidaya tambak udang vaname dengan kolam bundar
13	GRANIT (Program Nila Gratis)	Pemanfaatan lahan tergenang rob dengan Nila Salina, yakni ikan Nila yang dapat hidup pada air payau.
14	SLBB (Sekolah Lapangan Budidaya Bandeng)	Sekolah Lapang Budidaya Bandeng merupakan kolaborasi Mercy Corps Indonesia dan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah usaha budidaya Bandeng
15	WANA MINA (Program Budidaya Ikan Berdampingan Mangrove)	Budidaya Ikan Bandeng, Nila dan Kepiting yang berdampingan mangrove
16	Jajan Ikan (Jajan Olahan Perikanan)	Pembinaan dan pelatihan pengolah ikan pemula pada teknopark perikanan
17	KOBILTU (Program Kolam Bundar Ikan Lele Terpadu)	Budidaya lele pada kolam dengan bentuk bundar sebagai upaya perbaikan sirkulasi air dan ketahanan terhadap banjir rob
18	ITU HOKI (Ikan Bermutu dan Harga Oke Sekali)	Perluasan dan perlengkapan cold storage

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan berbagai inovasi yang bermanfaat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang rutin diadakan setiap tahun. Pada tahun 2024, Lomba Krenova dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pelajar dan kategori umum. Dari masing-masing kategori tersebut, dipilih tiga pemenang utama, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-56
Inovasi Daerah Lainnya

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
Kategori Umum			
Juara 1	Pirolisis Mudikal	M. Husni Cholil	SMK Muhammadiyah Pekalongan membuat sebuah terobosan dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi BBM dengan menggunakan metode pirolisis, yang konstruksinya sederhana ekonomis, terjangkau dan mudah digunakan
Juara 2	Corn Silk Tea (Teh Rambut Jagung)	Fitri Arini	Rambut jagung merupakan limbah dari industri pangan buah jagung. Rambut jagung mengandung zat antioksidan seperti saponin, zat samak, flavonoid, betakaroten, minyak atsiri, minyak lemak, alantoin, dan zat pahit. Zat antioksidan merupakan suatu zat yang dapat menghambat reaksi oksidasi. Didalam tubuh antioksidan dapat melindungi sel dari bahaya radikal bebas oksigen reaktif. Teh rambut jagung sangat bermanfaat dan mudah untuk dibuat.
Juara 3	Mie Oatmeal Pelangi Full Gizi	Fatmah Attamimi, dkk	Mie umumnya mengandung kalori, natrium, gluten, dan MSG tinggi yang berisiko menyebabkan obesitas, hipertensi, dan gangguan jantung. Mie Oatmeal Pelangi Full Gizi hadir sebagai inovasi sehat yang cocok dikonsumsi semua kalangan, termasuk anak-anak. Terbuat dari oatmeal bergizi yang terjangkau, mie ini menawarkan rasa enak, praktis, dan kaya serat, sehingga menjadi pilihan lezat tanpa rasa khawatir terhadap kesehatan
Kategori Pelajar			
Juara 1	Oesodo tea	Rizatul safitri	Gaya hidup masyarakat modern yang cenderung tidak sehat turut meningkatkan kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, kolesterol tinggi, dan asam urat. Untuk mengatasi masalah tersebut, semakin

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
Kategori Umum			
			<p>banyak masyarakat yang beralih ke pengobatan alami dengan memanfaatkan tanaman obat. Salah satu inovasi yang dihasilkan adalah “Oesodo Tea”, teh celup yang terbuat dari tiga bahan alami, yaitu alang-alang, jahe putih, dan seledri, yang dipercaya mampu membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan. Kemasan Oesodo Tea pun ramah lingkungan, terbuat dari pelapah pisang atau batang pohon pisang yang diolah..</p>
Juara 2	Pasta Gigi dari Ekstrak Belimbing Wuluh (Aveehoa Bilimbi L.) dan Ekstrak Daun Stevia (Stevia rebaudiana) Sebagai Antibakteri Streptococcus Mutans	Akhadil Alya Safina, Tsania Ulfia Turrosidah, Yumna Asrilia Syafarah	<p>Inovasi Delisa (Dental Averrhoa Bilimbi L - stevia rebaudiana) atau pasta gigi herbal menggunakan ekstrak belimbing wuluh sebagai bahan aktif dan ekstrak daun Stevia sebagai pemanis alami. Delisa merupakan pasta gigi herbal dengan bahan aktif alami untuk membersihkan dan menjaga gigi, bahan bahannya yang mampu menjaga kesehatan dan kesegaran mulut dapat menjadi pasta gigi herbal yang aman untuk digunakan secara umum.</p>
Juara 3	Pembersih Sepatu dari Ekstrak Kulit Pisang	Klp. La Familia (M. Wildan Purnama, dkk)	<p>Produk pembersih sepatu menggunakan bahan utama dari ekstrak kulit pisang. Produk ini bertujuan memberikan alternatif ramah lingkungan serta efektif dalam membersihkan sepatu tanpa merusak bahan atau mengiritasi kulit pengguna. Kulit pisang dipilih karena sifat pembersih alami yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Dalam perbandingan dengan produk sejenis, produk ini menonjol karena bahan alami yang ramah lingkungan dan kemampuan membersihkan tanpa merusak. Ekstrak kulit pisang juga memberikan kelembaban dan nutrisi tambahan untuk kulit sepatu.</p>

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dimaksud, perlu adanya akselerasi langkah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang selaras dengan tema

perencanaan pembangunan serta dapat membangun langkah-langkah strategis yang menempatkan science-based policy yakni aktivitas riset sebagai basis pengambilan kebijakan yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang muncul di Kota Pekalongan.

Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Riset Unggulan Daerah (RUD) dan fasilitasi Riset Bersama (Risber). RUD merupakan kegiatan fasilitasi pembiayaan riset yang mengarah kepada isu aktual dan strategis Kota Pekalongan, sedangkan fasilitasi Riset Bersama merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian.

Tabel II-57
Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

No.	Judul	Institusi Pelaksana
1	Penentuan Prioritas Produk Unggulan Daerah Dan Pengembangannya di Kota Pekalongan Menggunakan Metode Multi Attribute Utility Theory (Maut)	Universitas Pekalongan
2	Pengembangan Model Dan Materi Pembelajaran Adaptasi Lingkungan Berbasis Teknologi di Kota Pekalongan	STAI KI AGENG PEKALONGAN
3	Metode Etnoinformatika Untuk Strategi Pengembangan Dan Promosi Kuliner Di Pasar Sugihwaras Kabupaten Pekalongan	FISIPOL UGM
4	Strategi Tata Kelola Kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah Dan Rentan Anak Tidak Sekolah di Kota Pekalongan	Pusat Studi Pancasila UGM
5	Pemetaan Sumber Daya Lokal Kota Pekalongan Untuk Mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang	Fakultas Teknik UGM

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

Riset Bersama dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian melalui penunjukan langsung. Tema yang diusung dalam riset bersama berdasarkan usulan dari OPD atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel II-58
Riset Bersama Kota Pekalongan Tahun 2024

No.	Judul	Institusi Pelaksana
1	Penyusunan Strategi Pengelolaan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Pekalongan	Universitas Terbuka
2	Visioning Transformasi Kawasan Pesisir Kota Pekalongan: Studi Kasus Kawasan Degayu dan Slamaran	Institut Teknologi Bandung

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

Dalam pelaksanaan riset unggulan tidak terdapat kendala yang berarti, namun demikian perlu dilakukan pemetaan kebutuhan riset yang sistematis serta publikasi yang lebih luas untuk mendapatkan penelitian yang lebih tepat sasaran. Penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama Bapperida dengan Perguruan Tinggi di sekitar Kota Pekalongan, Perguruan Tinggi Nasional ataupun dengan Badan Riset Inovasi Nasional.

RUD dan Riset Bersama yang dilakukan dalam kerangka menjembatani penelitian terhadap kebijakan (*bridging knowledge to policy*) di wilayah Kota Pekalongan. Tema RUD dan Riset Bersama yang dilakukan didasarkan atas isu strategis pembangunan, yaitu isu strategis RKPd Kota Pekalongan. Seleksi pelaksana RUD dan Riset Bersama didasarkan atas inovasi yang akan dikembangkan oleh pelaksana terhadap isu strategis pembangunan. RUD dan Riset Bersama memiliki sasaran merumuskan kebijakan pembangunan, sebagai inovasi pembangunan, dalam kerangka pembangunan Kota Pekalongan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pemangku kepentingan pembangunan serta memiliki kemampuan yang dapat dioptimalkan dan diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Di sisi lain, tantangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah bagaimana terus meningkatkan peran perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan untuk semakin besar berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan lebih memahami permasalahan maupun isu strategis pembangunan, sehingga diharapkan memiliki penguasaan permasalahan yang lebih baik, dalam pengembangan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan.

4. Daya Dukung Inovasi Daerah

Dalam mengembangkan inovasi daerah, tidak hanya Pemerintah yang berperan, tetapi juga dibutuhkan *stakeholder* lain untuk mendorong percepatan inovasi. Salah satu hal yang paling mendasar lahirnya inovasi daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itulah dibutuhkan peran perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan sekaligus pengembang inovasi.

Di Kota Pekalongan, terdapat perguruan tinggi antara lain Universitas Pekalongan (Unikal), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Program Studi Keperawatan di Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan, Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan Program Studi Diluar Kampus Utama Politeknik Negeri Jakarta (PSDKU PNJ) dengan total lebih dari 1.000 (seribu) orang yang lulus setiap tahunnya, baik lulusan Diploma, Sarjana maupun Magister.

Tabel II-59
Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No.	Nama Perguruan Tinggi	Periode Wisuda	Jumlah Lulusan (orang)			Jumlah
			D3	S1	S2	
1.	Universitas Pekalongan	Tahun 2023	90	1141	-	1231
2.	STMIK Widya Pratama	Tahun 2023	33	195	-	228
3.	Akbid Harapan Ibu	Tahun 2023	17	-	-	17
4.	PSDKU PNJ	Oktober 2023	-	-	-	-

Sumber: Berbagai sumber (diolah), 2024

Selain berperan menciptakan SDM yang berdaya saing, perguruan tinggi juga didorong untuk menciptakan inovasi. Oleh karena itu beberapa perguruan tinggi di Kota Pekalongan membangun pusat inovasi sebagaimana disajikan dalam Tabel II-60 berikut.

Tabel II-60
Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No	Perguruan Tinggi	Nama Pusat Inovasi
1.	Universitas Pekalongan	Pusat Inovasi dan Teknologi (PIT)
2.	STIMIK Widya Pratama	Tidak Ada
3.	IAIN Pekalongan	Tidak Ada
4.	Poltekkes Semarang Prodi Keperawatan	Tidak Ada
5.	AKBID Harapan Ibu	Tidak Ada

Sumber: Berbagai sumber (diolah), 2024

2.3.2.2. Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD

Rasio Kewirausahaan Daerah – IUP

Rasio kewirausahaan sebagai perbandingan status pekerjaan utama dengan jenis angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Rasio kewirausahaan Kota Pekalongan meskipun lebih tinggi dari pada rasio kewirausahaan Provinsi Jawa Tengah namun bergerak melambat. Hal tersebut terlihat dari sejak tahun 2020 dengan rasio sebesar 5,8% dan selama 4 (empat) tahun berikutnya yaitu tahun 2023 sebesar 5,7%. Rasio kewirausahaan Kota Pekalongan dan Jawa Tengah dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-61
Rasio kewirausahaan Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Rasio Kewirausahaan		2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	9.178	8.635	9.755	10.302
	Angkatan Kerja	157.260	181.210	169.940	180.597
	Rasio Kewirausahaan (persen)	5,8	4,8	5,7	5,7
Jawa Tengah	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	552.390	552.291	556.838	591.544
	Angkatan Kerja	18.751.277	18.963.993	19.474.934	21.069.135
	Rasio Kewirausahaan (persen)	2,9	2,9	2,8	2,8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

Hubungan antara berusaha dibantu buruh tetap dengan angkatan kerja secara sederhana menggambarkan sebuah usaha dimana pemilik tidak hanya menjalankan usahanya sendiri tetapi juga memiliki karyawan dengan status tetap yang menerima upah/gaji teratur dan membantu operasional usaha tersebut. Melambatnya rasio kewirausahaan merupakan salah satu indikator melambatnya perekonomian suatu wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berkembangnya penduduk usia produktif yang memilih untuk menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri dan juga tenaga kerja atau buruh dengan status karyawan tetap untuk bekerja di lapangan pekerjaannya tersebut. Implikasi dari berusaha dibantu buruh tetap yaitu adanya perkembangan usaha karena cenderung berskala besar dibandingkan usaha mikro atau usaha yang hanya melibatkan pemiliknya saja. Selain itu juga, pengusaha memiliki tanggung jawab hukum dan keuangan terhadap buruh tetap termasuk pembayaran gaji/upah, jaminan sosial, kesehatan, dan hak-hak pekerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rasio kewirausahaan di Kota Pekalongan bergerak cenderung melambat selama 4 (empat) tahun dari tahun 2020 hingga 2024. Hal tersebut mengindikasikan adanya stagnasi

atau kurangnya pertumbuhan dalam ekosistem kewirausahaan di Kota Pekalongan. Implikasi hal tersebut berakibat pada potensi pertumbuhan ekonomi terhambat karena kewirausahaan merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui inovasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas. Kurangnya inovasi dan peluang pasar baru dapat menjadi penyebab melambatnya rasio kewirausahaan, jika tidak ada perkembangan teknologi atau identifikasi peluang pasar baru yang menarik maka potensi untuk munculnya usaha baru juga akan terbatas. Kualitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang kurang efektif menghasilkan lulusan dengan mentalitas dan keterampilan berwirausaha kurang memadai. Budaya dan persepsi masyarakat yang kurang mendukung dalam berwirausaha.

Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB – IUP

Rasio volume usaha koperasi di Kota Pekalongan mengalami tren yang menurun. Hal ini dapat terlihat sejak tahun 2020 sebesar 47,06% kemudian mengalami penurunan tiap tahunnya yaitu 46,76% di tahun 2021 hingga menjadi 32,40% di tahun 2024. Meskipun nilai PDRB mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024, namun nilai atau volume usaha koperasi cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2024. Volume usaha koperasi sempat mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 namun mengalami penurunan lagi sejak tahun 2023 hingga 2024. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kota Pekalongan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-62
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

KRITERIA	2020	2021	2022	2023	2024
Volume Usaha Koperasi (dalam milyar rupiah)	5.106,08	5.356,30	5.903,98	5.546,39	4.785,36
PDRB (ADHB) (dalam milyar rupiah)	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,22	14.766,95
Rasio (persen)	47,06	46,76	46,89	40,35	32,40

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dindagkop&UKM, 2025

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar kontribusi nilai usaha (omzet atau volume usaha) seluruh koperasi dalam suatu wilayah terhadap PDRB wilayah tersebut dalam suatu periode waktu tertentu. Secara sederhananya, rasio ini menggambarkan seberapa penting peran sektor koperasi dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi suatu wilayah. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa sektor koperasi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian suatu wilayah. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa kontribusi sektor koperasi terhadap perekonomian suatu wilayah masih kecil dibandingkan dengan sektor lain. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa koperasi belum dimanfaatkan secara maksimal atau koperasi menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usahanya.

Penurunan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kota Pekalongan selama 5 tahun (2020 s.d 2024) merupakan indikasi adanya penurunan kontribusi sektor koperasi terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Koperasi seringkali memiliki tujuan ganda yaitu ekonomi dan sosial. Penurunan volume usaha dapat mengurangi dampak positif koperasi dalam hal pemberdayaan anggota, penciptaan lapangan kerja serta pemerataan ekonomi di tingkat lokal. Kontribusi koperasi dalam menghasilkan nilai ekonomi dan menggerakkan aktivitas bisnis di Kota Pekalongan menjadi semakin tidak signifikan dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Kurang optimalnya manajemen maupun daya saing produk dan layanan koperasi yang ditawarkan dalam hal kualitas, harga maupun inovasi dibandingkan dengan pesaing lainnya.

Return on Asset (ROA) BUMD – IUP

Return On Asset (ROA) pada BUMD Kota Pekalongan yaitu PT. BPR Bank Pekalongan, PT. BPR BKK Kota Pekalongan, PT. BPR BKK Jateng, Perumda Tirtayasa menunjukkan persentase yang fluktuatif. Terjadi kenaikan dari tahun 2020 sebesar 1,6% menjadi 2,2% di tahun 2021 sebagai dampak positif dari kenaikan laba bersih. Namun kemudian terjadi penurunan hingga tahun 2024 sebesar 1,4% sebagai akibat dari penurunan laba bersih. *Return On Asset* BUMD Kota Pekalongan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-63
Return On Asset BUMD Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

BUMD	2020	2021	2022	2023	2024
Aset (dalam jutaan)	2.472.499,36	2.713.275,57	2.778.063,16	2.656.821,14	2.698.666,54
Laba Bersih (dalam jutaan)	40.388,77	59.472,41	49.877,34	48.976,24	38.785,37
ROA (persen)	1,6	2,2	1,8	1,8	1,4

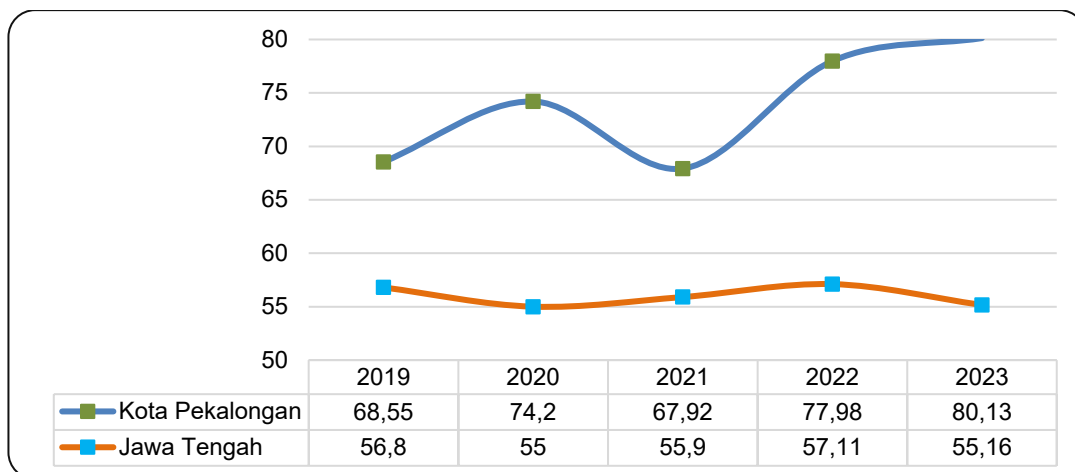
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah.

Naik atau turunnya persentase ROA BUMD Kota Pekalongan selama periode 5 tahun (2020 s.d 2024) mengindikasikan adanya kurang optimalnya efisiensi dan profitabilitas dalam pengelolaan aset BUMD. *Return On Asset (ROA)* mengukur seberapa efektif 4 (empat) BUMD menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. Fluktuatifnya ROA BUMD terjadi karena naik atau turunnya laba bersih dan aset. Laba bersih dipengaruhi oleh pendapatan, biaya operasional, beban bunga serta kerugian lainnya. Sedangkan aset dipengaruhi oleh investasi baru baik yang sudah menghasilkan maupun belum menghasilkan, akumulasi aset tidak produktif, piutang tak tertagih serta revaluasi aset.

2.3.2.3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 80,13 juta rupiah meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 77,98 juta rupiah, meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya aktivitas ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di Kota Pekalongan menunjukkan kemampuan tenaga kerja yang semakin optimal dalam menghasilkan produk yang menjadi sumber keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau daerah, serta memungkinkan perusahaan menghasilkan lebih banyak output dengan jumlah tenaga kerja yang sama, sehingga keuntungan perusahaan lebih besar. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, produktivitas tenaga kerja Kota Pekalongan masih relatif baik.

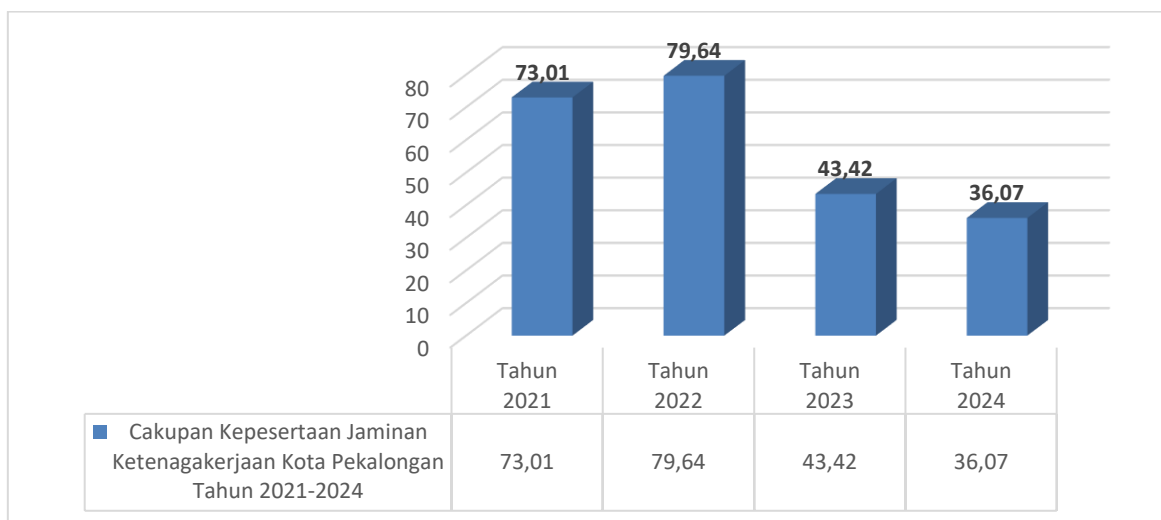


Gambar II-40
Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Pekalongan
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Sumber: www.jateng.bps.go.id (diolah), 2024

Cakupan kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan – IUP

Cakupan kepesertaan Jamsostek di Kota Pekalongan menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 2021 hingga 2024. Faktor utama yang mungkin memengaruhi adalah kondisi ekonomi lokal, kepatuhan perusahaan, dan efektivitas sosialisasi program. Faktor penyebab masih rendahnya cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan antara lain ketidaktahuan kalangan pekerja sektor informal akan program ini. Diperlukan upaya lebih intensif dalam edukasi, pengawasan kepatuhan, dan dukungan untuk sektor informal di Pekalongan. Berikut Gambaran cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan di Kota Pekalongan tahun 2021-2024:



Gambar II-41
Cakupan Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

Sumber: BPJS Ketenakerjaan Kota Pekalongan, 2025

2.3.2.4. Pariwisata

Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara – IUP

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kota Pekalongan dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuatif. Kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak di tahun

2023 yaitu 296 wisatawan dan paling sedikit di tahun 2021 sebanyak 1 wisatawan. Museum Batik merupakan objek wisata yang paling digemari wisatawan mancanegara yang mencatat kunjungan sebanyak 236 di tahun 2023 meskipun sempat hanya dikunjungi oleh 1 wisatawan di tahun 2021. Kondisi hal tersebut sedikit berbeda dengan sektor pariwisata Jawa Tengah yang mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat sejak tahun 2020 dimana pertumbuhan PDRB sektor pariwisata sebesar 2,99% menjadi 3,56% di tahun 2024. Pertumbuhan sektor pariwisata Jawa Tengah salah satunya disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kota Pekalongan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-64
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

No	OBJEK WISATA	KUNJUNGAN WISMAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pantai Pasir Kencana	-	-	-	-	-
2.	Pantai Slamaran	-	-	-	-	-
3.	Museum Batik	138	1	85	236	200
4.	Wisata Bahari PPNP	5	-	-	-	-
5.	Pim	6	-	-	-	-
6.	Grosir Setono	34	-	-	-	-
7.	Dreams Big Park	5	-	-	-	-
8.	Dupan Water Park	-	-	-	-	-
9.	Kampung Wisata Religi Sapuro	3	-	-	56	-
10.	Kampung ATBM Medono	-	-	-	-	-
11.	Kampung Batik Kauman	7	-	-	-	-
12.	Kampung Batik Pesindon	2	-	-	-	-
13.	Kampung Canting Landungsari	-	-	-	-	-
14.	Festival dan Seni Budaya	6	-	4	4	6
	Jumlah	206	1	89	296	206

Sumber: Dinparbudpora, 2024

Tahun 2024 mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara jika dibandingkan dengan tahun 2023, hal tersebut terlihat dari kunjungan di Museum Batik dan Kampung Wisata Religi Sapuro. Namun demikian, adanya peningkatan kunjungan di festival dan seni budaya dari tahun 2023 sebanyak 4 wisman menjadi 6 wisman di tahun 2024. Penurunan kunjungan baik di Museum Batik maupun di Kampung Wisata Religi Sapuro disinyalir disebabkan oleh pemasaran pariwisata yang belum efektif dan sinergi untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu juga peran sumber daya manusia dalam mensinergikan semua pihak untuk pengembangan wisata belum berjalan optimal. Infrastruktur dan fasilitas pariwisata seperti transportasi wisata yang nyaman, aman dan terintegrasi serta fasilitas pendukung lainnya seperti toilet bersih masih perlu untuk ditingkatkan keberadaannya. Aglomerasi Petanglong yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi masih belum didukung penuh oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

2.3.2.5. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar

kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 35,32 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 45,99 juta rupiah pada tahun 2024. Kenaikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh faktor inflasi yang mendorong peningkatan harga barang dan jasa, sehingga meskipun nilai nominal PDRB per kapita meningkat, daya beli masyarakat belum tentu mengalami peningkatan secara riil. Inflasi yang terjadi selama periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan akibat gangguan rantai pasok, penyesuaian tarif energi, serta peningkatan upah minimum yang turut memperbesar biaya produksi.

Selain faktor inflasi, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 juga menjadi faktor kunci yang mendorong kenaikan PDRB per kapita. Berbagai kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif pajak, bantuan sosial, dan stimulus untuk UMKM berhasil meningkatkan konsumsi masyarakat dan investasi di berbagai sektor. Sektor perdagangan dan industri pengolahan, yang menjadi penyumbang terbesar PDRB, menunjukkan peningkatan produktivitas seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi. Terjaminnya pasokan bahan baku serta stabilitas operasional industri turut memperkuat peran kedua sektor ini.

Keberhasilan pembangunan Tanggul dan Bendung Gerak Loji Banger serta rencana operasionalisasi Pasar Banjarsari memberikan dampak positif yang signifikan. Pembangunan bendung berhasil mengatasi masalah banjir rob yang selama ini menghambat aktivitas perdagangan dan industri di wilayah pesisir. Dengan berkurangnya risiko banjir, distribusi barang menjadi lebih lancar dan efisien, meningkatkan produktivitas sektor perdagangan yang berkontribusi sebesar 20,76 persen terhadap PDRB pada tahun 2024. Di sisi lain, rencana operasionalisasi Pasar Banjarsari sebagai pusat perdagangan modern diharapkan dapat memperluas pasar bagi produk-produk lokal serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama bagi pelaku UMKM. Fasilitas yang lebih baik serta integrasi dengan sistem transportasi modern diproyeksikan mampu memperkuat peran sektor perdagangan dan memperbesar kontribusinya terhadap PDRB.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan peningkatan PDRB per kapita. Ketimpangan pendapatan masih menjadi isu serius, di mana peningkatan PDRB per kapita secara nominal belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada sektor perdagangan membuat perekonomian Kota Pekalongan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Tekanan inflasi yang cukup tinggi juga berpotensi menggerus daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan kebijakan pengendalian harga yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu fokus pada diversifikasi sektor ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, transportasi, dan jasa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri juga menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, pengendalian inflasi yang lebih efektif diperlukan agar peningkatan PDRB per kapita tidak hanya bersifat nominal tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara riil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peningkatan PDRB per kapita dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih merata bagi perekonomian Kota Pekalongan.

Tabel II-65
Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita
Kota Pekalongan tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,22	14.766,95
- ADHK (Miliar Rp)	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55	8.928,80
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	35,32	37,17	40,12	43,29	45,99
- ADHK (Juta Rp)	23,89	24,66	25,61	26,70	27,81
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	-0,25	5,24	7,92	6,48	6,25
- ADHK (persen)	-1,88	3,20	3,89	2,85	4,16

Sumber: BPS Kota Pekalongan (diolah), 2025

Perekonomian Kota Pekalongan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2020-2024, sebagaimana terlihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp10.848,87 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp14.766,95 miliar pada tahun 2024, sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) juga mengalami kenaikan dari Rp7.337,83 miliar menjadi Rp8.928,80 miliar dalam periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19.

PDRB per kapita ADHB menunjukkan peningkatan dari Rp35,32 juta pada tahun 2020 menjadi Rp45,99 juta pada tahun 2024, sementara PDRB per kapita ADHK naik dari Rp23,89 juta menjadi Rp27,81 juta, mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara riil. Dari sisi pertumbuhan, tahun 2020 mencatat kontraksi sebesar -0,25% untuk ADHB dan -1,88% untuk ADHK, namun pemulihan mulai terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,24% dan 3,20%. Pertumbuhan ekonomi terus berlanjut hingga 2024 dengan laju pertumbuhan yang cukup stabil di kisaran 6-7% untuk ADHB dan sekitar 3-4% untuk ADHK. Meskipun demikian, tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dan merata di seluruh sektor, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Pekalongan.

2.3.2.6. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2020-2024. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2024, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,76 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,86 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,84 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel II-66 berikut.

Tabel II-66
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,09	4,79	4,71	4,48	4,57
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,34	21,15	20,83	20,44	19,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi	14,54	15,46	15,12	15,64	15,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,38	21,59	21,10	21,05	20,76
H	Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,06	7,28	7,79	7,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,31	5,36	5,57	5,84	6,38
J	Informasi dan Komunikasi	5,13	5,07	4,75	4,74	4,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,21	6,22	6,15	5,93	5,69
L	Real Estat	2,73	2,66	2,58	2,54	2,55
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,42	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,49	4,17	3,94	3,72	3,66
P	Jasa Pendidikan	4,72	4,54	4,16	4,06	4,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,44	1,40	1,33	1,30	1,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,90	1,83	1,82	1,80	1,88
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2024, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4,57 persen.

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan relatif stagnan dikarenakan Kota Pekalongan berkembang dalam pelayanan ke wilayah sekitarnya dan kecenderungan perkembangan perkotaan bahwa sektor primer tidak dapat berkembang optimal, terutama sub sektor pertanian, diakibatkan keterbatasan lahan pertanian karena untuk penggunaan kegiatan yang dianggap lebih produktif dan sebagian wilayah Kota Pekalongan terdampak rob. Nilai produksi sub sektor perikanan jika dibandingkan dengan masa kejayaan perikanan Kota Pekalongan yang lalu, cukup kecil dan belum berkembang sesuai harapan, terutama produksi perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan kendala teknis sedimentasi termasuk pengelolaannya sehingga semakin sedikit kapal perikanan yang membongkar hasil tangkapannya di Kota Pekalongan. Dengan kondisi tersebut maka lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai produksi barang dan jasa yang relatif stagnan.

Meskipun kontribusi sektor ini relatif kecil, yaitu sekitar 4,57 persen, dampak positif dari pembangunan bendung sangat terasa pada sub-sektor perikanan. Sebelum adanya bendung, sektor perikanan mengalami penurunan produktivitas akibat sedimentasi dan banjir rob yang merusak tambak dan mengurangi hasil tangkap ikan. Rencana operasionalisasi Pasar Banjarsari juga diharapkan dapat membantu pemasaran hasil perikanan dan pertanian lokal. Dengan adanya pusat distribusi yang lebih baik, nelayan dan petani dapat memasarkan hasil panennya secara langsung dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan bagi petani dan nelayan serta memperkuat kontribusi sektor primer terhadap PDRB.

Industri Pengolahan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Industri Pengolahan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 19,86 persen pada tahun 2024.

Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 21,34 persen. Selanjutnya, pada tahun 2021 melemah menjadi 21,15 persen dan melemah kembali menjadi 20,83 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023 peranannya kembali melemah menjadi 20,44 persen. Pada tahun 2024 melemah diangka 19,86 persen.

Industri pengolahan menyumbang 19,86 persen terhadap PDRB pada tahun 2024. Sebelumnya, industri tekstil, makanan, dan perikanan mengalami kendala akibat banjir yang sering kali merusak bahan baku dan memperlambat proses produksi. Dengan adanya bendung dan tanggul, kawasan industri yang berada di pesisir mendapatkan perlindungan yang lebih baik, sehingga produktivitas dapat meningkat dan potensi kerugian berkurang.

Rencana operasionalisasi Pasar Banjarsari juga akan mendukung sektor industri pengolahan, terutama dalam memasarkan produk olahan lokal. Dengan adanya fasilitas distribusi yang lebih modern dan terstruktur, industri pengolahan akan lebih mudah menyalurkan produknya langsung ke konsumen. Hal ini membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk meningkatkan skala produksinya serta memperluas jangkauan pasar hingga ke wilayah lain di Jawa Tengah.

Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,15 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2024 dan 2023, meningkat dibanding tahun 2022 yaitu 0,14 persen. Peran kategori ini dalam struktur perekonomian cenderung stagnan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan cenderung stagnan selama 2020-2024 yaitu sebesar 0,12 persen pada tahun 2020 dan 2021, menurun menjadi 0,11 persen pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Konstruksi

Secara umum, peranan lapangan usaha Konstruksi terhadap perekonomian Kota Pekalongan berfluktuatif. Peranan lapangan usaha ini pada perekonomian cenderung meningkat yaitu tahun 2020 sebesar 14,54 persen, tahun 2021 menurun menjadi sebesar 15,46 persen dan menurun lagi sebesar 15,12 persen di tahun 2022 dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 yaitu sebesar 15,64 persen, serta kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 15,84 persen.

Pembangunan Tanggul dan Bendung Gerak Loji Banger sendiri merupakan salah satu proyek konstruksi besar yang menyerap tenaga kerja dan investasi yang cukup tinggi. Selain itu, pembangunan Pasar Banjarsari juga memberikan dampak positif terhadap sektor konstruksi. Proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan gedung pasar, tetapi juga infrastruktur pendukung seperti area parkir, jalan akses, dan fasilitas pengelolaan limbah. Adanya proyek-proyek konstruksi baru ini meningkatkan permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi serta memperkuat kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Pekalongan.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peranan terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya, terhadap PDRB Kota Pekalongan. Peranan lapangan usaha ini selalu lebih dari 20 persen.

Lapangan usaha ini menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kota Pekalongan dengan kontribusi sebesar 20,76 persen pada tahun 2024. Keberhasilan Bendung Gerak Loji Banger memberikan dampak positif pada kelancaran distribusi barang. Sebelum adanya bendung, banjir rob seringkali mengganggu operasional pusat perdagangan dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi pelaku usaha. Dengan teratasinya masalah banjir, aktivitas distribusi barang menjadi lebih lancar dan efisien.

Rencana operasionalisasi Pasar Banjarsari akan semakin memperkuat sektor ini. Pasar Banjarsari yang direncanakan sebagai pusat grosir modern dan tradisional dapat menjadi penggerak utama peningkatan transaksi perdagangan. Selain menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi pedagang, pasar ini juga akan terintegrasi dengan sistem transportasi yang lebih efisien, sehingga mempercepat arus barang dan meningkatkan volume transaksi. Pasar ini diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan pedagang kecil serta UMKM yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan, dan perdagangan ritel.

Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kota Pekalongan memiliki

posisi strategis dalam kerangka lalu lintas Pulau Jawa sehingga lapangan usaha ini merupakan salah satu sektor yang strategis.

Lapangan usaha ini memiliki peranan yang berfluktuatif pada tahun 2020-2024 yaitu berturut-turut sebesar 5,02 persen di tahun 2020. Perlahan menguat menjadi 5,06 persen di tahun 2021 sampai 7,89 persen pada tahun 2024, peranan lapangan usaha ini turun drastis sebagai dampak pandemi *COVID-19* karena sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang cukup terkena dampak pandemi. Namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 peranan lapangan usaha ini meningkat tajam menjadi sebesar 7,28 persen dan 7,79 persen.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Perkembangan lapangan usaha ini selama lima tahun terakhir cenderung stagnan di kisaran 5 persen. Peranan tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan yang meningkat secara perlahan. Peranan tahun 2020 sebesar 5,31 persen, pada tahun 2021 dan 2022 peranannya meningkat menjadi 5,36 persen dan 5,57 persen dan kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 5,84 persen. Pada tahun 2024 meningkat sebesar 6,38 persen. Dari perkembangan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa lapangan usaha ini menunjukkan peranannya yang menguat, namun sangat terdampak pandemi *COVID-19* pada tahun 2020, akibat sektor ini global sangat terpengaruh. Dengan berkurangnya risiko banjir, sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Pekalongan dapat beroperasi lebih optimal.

Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang perekonomian. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi.

Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan secara umum menurun dari tahun 2020-2024. Tahun 2020 peranan lapangan usaha ini sebesar 5,13 persen, tahun 2021 sebesar 5,07 persen dan tahun 2022 sebesar 4,75 persen. Selama tiga tahun tersebut menunjukkan penurunan persentase secara perlahan. Penurunan pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi, dimana lapangan usaha ini tetap berkembang, sementara lapangan usaha lainnya mengalami penurunan. Setelah menguatnya lapangan usaha lainnya maka perananan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 menurun menjadi 4,74 persen dan 4,73 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Secara umum, selama lima tahun terakhir peranan lapangan usaha ini pada perekonomian Kota Pekalongan cenderung menurun. Peranan lapangan usaha ini, tahun 2020 sebesar 6,21 persen, tahun 2021 meningkat sebesar 6,22 persen, dan tahun 2022-2024 berturut-turut melemah menjadi sebesar 6,15 persen, 5,93 persen dan 5,69 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil serta adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap investasi yang lebih aman selama masa ketidakpastian ekonomi.

Real Estate

Lapangan usaha Real Estate memiliki peranan yang cenderung menurun terhadap PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir. Peranan lapangan usaha ini pada tahun 2020 sebesar 2,73 persen, menurun menjadi 2,66 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022-2023 semakin melemah menjadi 2,58 persen dan 2,54 persen. Meningkat pada tahun 2024 sebesar 2,55 persen.

Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, peranan dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan, lapangan usaha Jasa Perusahaan cenderung stagnan di kisaran 0,4 persen. Peranan lapangan

usaha ini tahun 2020 sebesar 0,43 persen, tahun 2021 dan 2022 menurun sebesar 0,42 persen, tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,43 persen. Dan meningkat kembali sebesar 0,44 di tahun 2024. Dibandingkan lapangan usaha lainnya, lapangan usaha ini memiliki peranan yang paling kecil dari tahun ke tahun.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2020-2024 peranan lapangan usaha menunjukkan kecenderungan yang menurun. Perananan pada tahun 2020 menjadi sebesar 4,49 persen. Kemudian menurun tajam di tahun 2021-2024 masing-masing menjadi sebesar sebesar 4,17 persen, 3,94 persen, 3,72 persen dan 3,66 persen. Menguatnya peranan lapangan usaha ini pada tahun 2020 dimungkinkan karena menurunnya peranan lapangan usaha lain sebagai dampak pandemi *COVID-19*. Setelah perekonomian meningkat kembali pada tahun 2021 maka peranan lapangan usaha ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan.

Jasa Pendidikan

Secara umum peranan lapangan usaha Jasa Pendidikan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, peranan lapangan usaha ini sebesar 4,72 persen dan di tahun 2021 menurun menjadi sebesar 4,54 persen. Tahun 2022 peranannya menurun menjadi sebesar 4,16 persen, menurun kembali menjadi sebesar 4,06 persen pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan menjadi 4,20 persen di tahun 2024. Kedua sektor ini menunjukkan tren menurun selama periode 2020-2024. Untuk jasa pendidikan, penurunan ini disebabkan oleh perubahan pola pendidikan selama pandemi, seperti pembelajaran daring yang mengurangi biaya operasional lembaga pendidikan.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Dalam periode tahun 2020-2024 peranan lapangan usaha ini cenderung menurun. Pada tahun 2020 peranannya 1,44 persen. Menurun di tahun 2021 sebesar 1,40 persen dan kembali menurun pada tahun 2022-2024 yaitu sebesar 1,33 persen, 1,30 persen dan 1,29 persen. Untuk jasa kesehatan menunjukkan penurunan kontribusi setelah masa puncak pandemi berakhir dan berkurangnya layanan kesehatan terkait penanganan *COVID-19*.

Jasa lainnya

Peranan lapangan usaha Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Peranan lapangan usaha ini tahun 2020 sebesar 1,90 persen, dan tahun 2021-2023 turun sebesar 1,83 persen, 1,82 persen dan 1,80 persen. Pada tahun 2024 meningkat sebesar 1,88 persen.

2.3.2.7. Rumah Tangga dengan Akses Internet

Kondisi Kota Pekalongan yang berada pada dataran rendah dengan luas wilayah hanya 46 km² dan bentangan terjauh hanya 9 km sangat memungkinkan terjangkaunya akses pada radius jangkauan operator seluler ataupun operator internet. Disamping itu hampir semua aktifitas kehidupan saat ini memanfaatkan internet sebagai jaringan layanan utama. Hal ini dapat dilihat pada data persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet berikut.

Tabel II-67
Rumah Tangga dengan Akses Internet Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Rumah Tangga	Rumah Tangga dengan Akses Internet (persen)
2020	76.788	100
2021	77.078	100
2022	77.436	100
2023	79.381	100
2024	80.274	100

Sumber: data diolah, 2025

2.3.2.8.. Konsumsi Rumah Tangga

Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB – IKU

Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2020 nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB adalah Rp 7355,26 Milyar maka pada tahun 2024 sebesar Rp 9.701,22 Milyar atau mengalami peningkatan sebesar Rp 2.345,96 Milyar selama lima tahun ini atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 6,38%. Jika dicermati maka peningkatan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB rata-rata per tahun lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan setiap tahun. Kontribusi nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB juga relatif cukup besar dibandingkan komponen lainnya, maka nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB berimplikasi sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Angka pertumbuhan rata-rata nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB ADHB per tahun disebabkan karena daya beli masyarakat Kota Pekalongan yang masih terjaga serta inflasi yang masih terkendali.

Tabel II-68
Nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam PDRB ADHB
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Tahun	Nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam PDRB ADHB
2020	7355,26
2021	7585,83
2022	8292,36
2023	9009,78
2024	9701,22

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, data diolah, 2025

Di era sekarang, rumah tangga kelas menengah menjadi bagian yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya dari sisi jumlah yang terus meningkat akan tetapi perubahan gaya hidup mendorong konsumsi rumah tangga kelompok masyarakat ini mengalami peningkatan. Didukung lagi dengan melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik, sehingga memicu meningkatnya konsumsi. Selain itu, konsumsi tersebut juga didorong oleh populasi kaum muda yang terus bertambah hingga meningkatkan penggunaan belanja online. Meski isu menurunnya daya beli kalangan menengah, namun dari sisi konsumsi rumah tangga tetap solid di kisaran angka pertumbuhan 5 persen.

2.3.2.9. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (IUP)

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kota Pekalongan masih menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu berkisar antara 20% s.d. 22%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kota Pekalongan memiliki ketimpangan rendah. Pada tahun 2023 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Provinsi Jawa Tengah adalah 18,74% (juga memiliki ketimpangan rendah) maka Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kota Pekalongan relatif lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Pekalongan memiliki ketimpangan rendah yang lebih bermakna dibandingkan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II-69
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
Kota Pekalongan Tahun 2020-2023

Tahun	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (persen)
2020	21
2021	20
2022	21
2023	22

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.2.10. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terdistribusi berdasarkan atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran, dimana pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 67,89% merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sebesar 38,69% merupakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), sebesar 7,53% merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah, sebesar 1,23% merupakan pengeluaran konsumsi LNPR, sebesar 0,44% merupakan perubahan inventori, serta sebesar -15,78% merupakan net ekspor barang dan jasa. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan persediaan merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cara mengetahui informasi tentang PMTB dan persediaan, tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan suatu wilayah atau negara dari tahun ke tahun. Bergeraknya perekonomian suatu wilayah atau negara ditentukan oleh faktor kapital dan tenaga kerja. Kedua faktor tersebut merupakan penggerak utama suatu perekonomian yang mengubah input menjadi output berupa barang dan jasa. Investasi diperlukan sebagai suatu bagian penting dalam suatu perekonomian, serta mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi, berarti kapasitas produksi juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan output, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel II-70
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

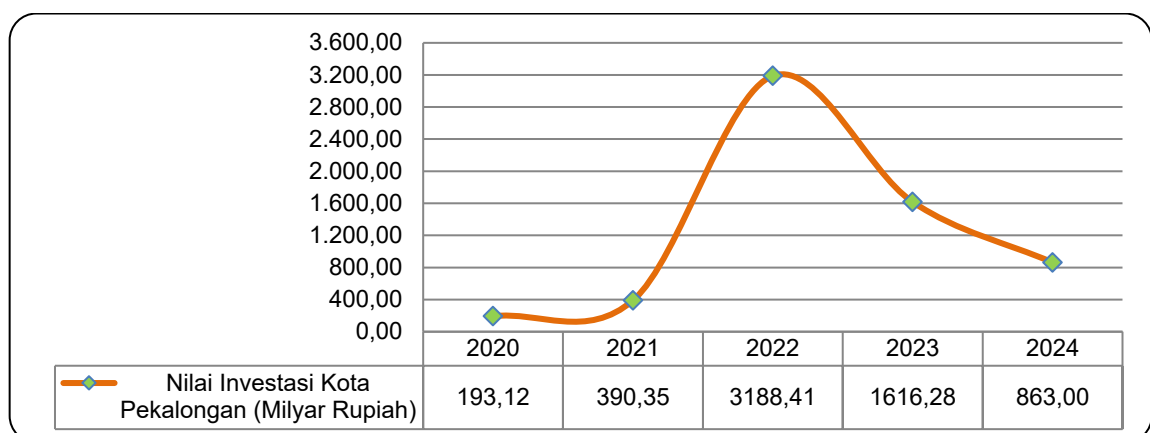
Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen)
2020	38,08
2021	39,03
2022	37,53
2023	37,45
2024	39,15

Sumber: data diolah, 2025

PMTB Kota Pekalongan menunjukkan nilai yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dan nilai PMTB tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 39,15%. Jika dibandingkan dengan PMTB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 maka PMTB Kota Pekalongan relatif lebih tinggi karena PMTB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 31,01% dan pada tahun 2024 sebesar 30,53%. PMTB Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan nilai berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PMTB berfluktuasi, PMTB dalam bentuk bangunan memberikan proporsi lebih besar dibanding non-bangunan dalam PMTB. Rata-rata perbandingan antara kedua komponen ini adalah sekitar 85 persen untuk PMTB bangunan dan 15 persen untuk non-bangunan. Pertumbuhan PMTB bangunan cenderung lebih stabil dibandingkan non bangunan setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan PMTB tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, seperti infrastruktur jalan, jembatan, sarana perhubungan, energi dan sebagainya. Peningkatan infrastruktur dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta dapat meningkatkan daya saing di tengah persaingan global.

2.3.2.11. Nilai Investasi

Pemerintah Kota Pekalongan terus mendukung upaya pencapaian realisasi investasi dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan dan aturan. Dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, Kota Pekalongan juga berusaha menciptakan kondisi daerah yang pro investasi yaitu dengan menguatkan perekonomian di sektor jasa dan perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Pekalongan. Dan berikut disajikan data perkembangan investasi di Kota Pekalongan.



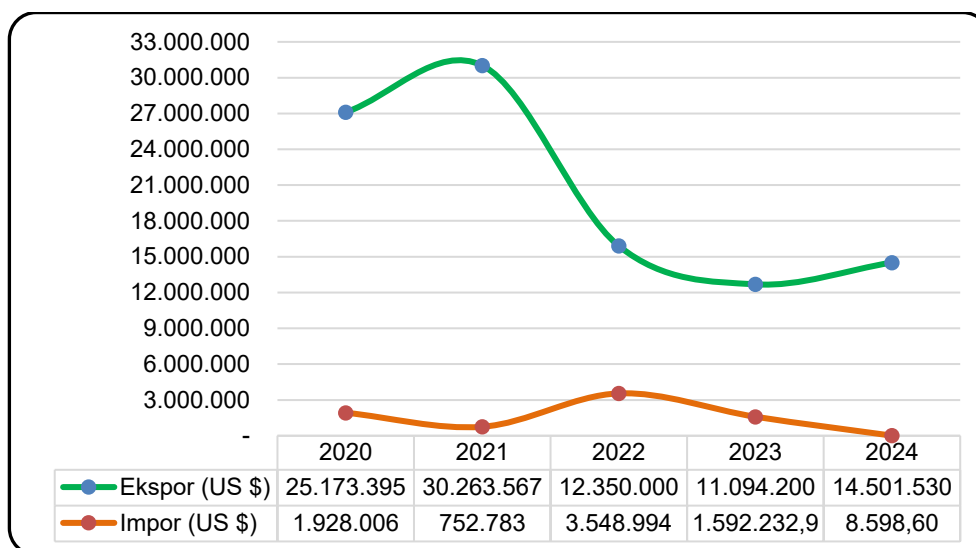
Gambar II-42
Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2025

2.3.2.12. Nilai Ekspor

Nilai ekspor tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan keadaan perdagangan luar negeri yang mengalami penurunan, dimana nilai ekspor perdagangan mengalami penurunan. Penurunan nilai ekspor perdagangan ini salah satunya disebabkan oleh terjadinya resesi global di tahun 2023. Adanya resesi global di tahun 2023 ini terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi dan kondisi perekonomian yang mulai lesu.

Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami kenaikan cukup signifikan pasca pandemi, dinilai cukup kuat untuk bertahan menghadapi ancaman terjadinya resesi global. Namun perlu untuk diwaspadai bahwa resesi ekonomi global yang terjadi terdapat ancaman yang akan berdampak salah satunya yaitu, permintaan ekspor untuk produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan akan menurun terutama dari Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok. Dimana komoditas utama yang dihasilkan oleh Kota Pekalongan untuk di ekspor adalah tekstil dan kerajinan serta negara tujuan yang di tuju adalah Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok dan negara lainnya. Dengan demikian, adanya perkiraan resesi global ini ternyata sudah mulai terjadi dan berdampak nyata pada nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan yang mulai mengalami penurunan. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar II-43 berikut.



Gambar II-43
Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2025

2.3.3. Infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas

2.3.3.1. Sarana Prasarana Perkotaan Dalam Kondisi Baik

1. Jalan

Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik Pemerintah Pusat dan jalan milik Pemerintah Kota. Kurun waktu 2020-2024, kondisi jalan di Kota Pekalongan mengalami perubahan. Pada tahun 2020 sepanjang 9,420 Km dengan kondisi baik 67,40 persen, kondisi sedang 20,16 persen dan kondisi rusak 12,42 persen. Di tahun 2021, panjang jalan Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 96,42 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 3,58 persen. Pada tahun 2022 panjang jalan Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 100,00 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 0,00 persen dan pada tahun 2023

panjang jalan negara menjadi 10,210 Km dengan kondisi baik 31,24 persen, kondisi sedang 63,85 persen dan kondisi rusak 4,89 persen. Sedangkan pada tahun 2024 panjang jalan negara 10,240 km dengan kondisi baik 16,60 persen, kondisi sedang 68,61 persen dan kondisi rusak 11,24 persen.

Tabel II-71
Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jalan Negara						
	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2020	9,420	6,350	1,900	1,170	67,40	20,16	12,42
2021	10,240	9,874	0	0,366	96,42	0	3,58
2022	10,240	10,240	0	0	100,00	0	0
2023	10,210	3,190	6,520	0,50	31,24	63,85	4,89
2024	10,240	1,700	7,030	1,150	16,60	68,61	11,24

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DIY dan DPUPR Kota Pekalongan, 2025

Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota

Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2020 sampai 2021 tidak terdapat perubahan maupun penambahan ruas panjang jalan kota yaitu 153,41 km. Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan Nomor 600.1/0414 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dan Jembatan Di Kota Pekalongan mengubah total Panjang jalan menjadi 150,274 km. Jalan dalam kondisi baik perkotaan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 sepanjang 92,51 km. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-72
Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Panjang Jalan Kota (km)	Jalan Kota							
		Panjang Jalan dengan kondisi baik		Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)		Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)		Panjang Jalan dengan kondisi permukaan mantap	
		(km)	(persen)	(km)	(persen)	(km)	(persen)	(km)	(persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2020	153,41	104,71	68,25	18,27	19,83	30,43	19,83	122,98	80,16
2021	153,41	96,37	62,82	27,25	19,42	29,79	19,42	123,62	80,58
2022	153,61	105,35	68,58	24,11	15,72	24,15	15,72	129,46	84,28
2023	150,27	118,60	78,92	4,86	17,84	26,81	17,84	123,46	82,16
2024	150,27	92,51	61,56	34,47	15,50	23,29	15,50	126,98	84,50

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2025

Infrastruktur jalan merupakan salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah. Hal tersebut bertujuan agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan, dan pemerataan pembangunan antar daerah, peningkatan

perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan disebutkan bahwa jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan kota meliputi jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil, antarpersil, antar pusat permukiman yang berada di dalam kota, dan jalan poros kelurahan dalam wilayah kota. Penyelenggaraan, pengaturan, dan pembinaan jalan kota merupakan kewenangan Pemerintah Kota.

Kota Pekalongan memiliki kewenangan untuk jalan kota sepanjang 153,41 km dari tahun 2020 sampai 2021. Pada tahun tersebut tidak terdapat perubahan maupun penambahan ruas panjang jalan kota. Pada tahun 2022 terdapat penambahan ruas jalan sepanjang 200 meter dan pada tahun 2023 terdapat pengurangan total panjang menjadi 150,274 km dan ditetapkan melalui SK Wali Kota Pekalongan Nomor 600.1/0414 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dan Jembatan Di Kota Pekalongan. Kondisi jalan merupakan salah satu kriteria dalam standar pelayanan minimal ruas jalan yang harus dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun panjang jalan kondisi permukaan mantap yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan.

Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan Kabupaten/ Kota di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 memiliki nilai yang fluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi banjir rob yang menggenangi beberapa ruas jalan di Kota Pekalongan, sehingga menyebabkan ruas jalan tersebut mengalami kerusakan yang signifikan. Dalam upaya mengembalikan kondisi permukaan dengan pelayanan mantap diperlukan pemeliharaan rutin maupun rehabilitasi jalan dengan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan tersebut.

2. Transportasi

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur sektor perhubungan. Lokasinya yang strategis juga digunakan sebagai tempat istirahat maupun sekedar transit untuk melanjutkan perjalanan ke daerah atau tempat selanjutnya. Saat ini terdapat dua jalur yang dapat dilalui kendaraan untuk melintasi Kota Pekalongan yaitu perlintasan Pantai Utara (Pantura) dan perlintasan Jalan Tol Transjawa yang semenjak tahun 2018 telah difungsikan. Dua jalur ini membagi kepadatan yang sebelumnya dibebankan pada satu jalur yaitu Jalur Pantura sehingga saat ini kepadatan yang terjadi akibat kendaraan besar yaitu truk dan bus berkurang.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia berdampak terhadap hampir semua sendi kehidupan, salah satunya yaitu adanya kebijakan pembatasan mobilitas. Dengan adanya kebijakan ini, arus lalu lintas menurun drastis yang mengakibatkan penurunan VC ratio menjadi 0,36. Meskipun demikian, mobilitas darat tetap dapat dilakukan. Pada tahun 2021, sudah masuk era new normal dimana PPKM sudah mulai longgar dan pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali dan bermunculan yang baru. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjunginya sehingga mobilitas di perkotaan cenderung ramai kembali. Pada tahun 2021, VC Ratio mengalami peningkatan menjadi 0,49, menunjukkan adanya peningkatan volume lalu lintas dibandingkan kapasitas jalan yang tersedia. Namun, pada tahun 2022, VC Ratio menurun menjadi 0,39, yang mengindikasikan perbaikan dalam tingkat kelancaran lalu lintas. Pada tahun 2023, VC Ratio kembali mengalami peningkatan menjadi 0,44, dan bertahan di angka yang sama pada tahun 2024, yaitu 0,44. Stabilitas

angka tersebut menunjukkan adanya konsistensi dalam kinerja lalu lintas, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan demi mencegah terjadinya kemacetan di masa mendatang.

Range nilai VC ratio ditakegorikan ke dalam 6 (enam) tingkat pelayanan jalan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

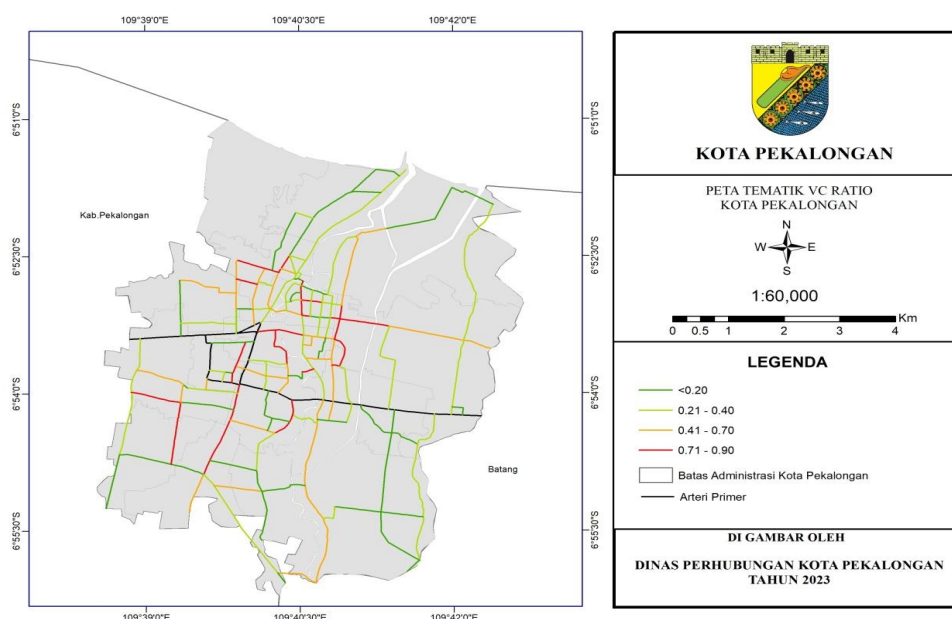
Tabel II-73
Kategori Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	V/C Rasio
A	0,0 - 0,20
B	0,21 - 0,44
C	0,45 - 0,74
D	0,75 - 0,84
E	0,85 - 1, 00
F	>1, 00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Dari tabel Tingkat Pelayanan diatas, jalan – jalan yang memiliki tingkat pelayanan A, pada ruas tersebut kendaraan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan B, kendaraan dapat memilih kecepatannya namun kecepatan tersebut sedikit terbatas oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan C kecepatannya dibatasi oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan D arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah, volume lalu lintas mendekati kapasitas ruas jalan yang ada. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan E, kecepatannya rendah volume sudah hampir sama dengan kapasitas yang ada, pada tingkat pelayanan ini ruas jalan bisa dikatan mengalami kemacetan. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan F, arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Peta V/C Ratio ruas jalan di Kota Pekalongan disajikan dalam gambar berikut.



Gambar II-44
Peta V/C Ratio Ruas Jalan di Kota Pekalongan

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat peta kinerja ruas jalan di Kota Pekalongan. Persebaran lalu lintas yang tidak merata terjadi di Kota Pekalongan, hal itu terjadi karena pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas (seperti pusat bisnis, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, acara khusus, objek pariwisata, dan lainnya) di Kota Pekalongan tidak merata pula. Sehingga terjadi kemacetan pada beberapa titik ruas di Kota Pekalongan kerana pada lokasi terdapat pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas, sehingga pola pergerakan lalu lintas warga kota pekalongan hanya pada ruas – ruas jalan di sekitar lokasi tersebut.

Oleh karena itu pengembangan Kawasan Pekalongan Baru sebagai pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas yang baru dapat mengurangi kemacetan kendaraan serta pola pergerakan lalu lintas di kota pekalongan akan menjadi merata sehingga kemacetan akan berkurang.

Pengembangan Kawasan Pekalongan Baru dapat menjadikan persebaran lalu lintas yang merata. Serta dalam pengembangannya akan menimbulkan akses jalan baru guna kelancaan lalu lintas di Kawasan Pekalongan Baru. Kajian Lalu Lintas Kawasan Pekalongan Baru diperlukan untuk dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi yang efektif dalam penentuan kebijakan penataan Manajemen Lalu Lintas di Kawasan Pekalongan Baru. Tingkat pelayanan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-74
Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan
yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D	Tingkat Pelayanan E
Jl. Sriwijaya	Jl. Imam Bonjol	Jl. Karya Bhakti	Jl. Dr. Cipto	Jl. Seruni
Jl. Diponegoro	Jl. Supriyadi	Jl. Gajah Mada	Jl. Urip Sumoharjo	Jl. Hayam Wuruk
Jl. Asem Binatur	Jl. Trikora	Jl. Untung Suropati	Jl.	Jl. Sultan Agung
Jl. Mataram	Jl. Veteran	Jl. Saelan	Jl. Bandung	Jl. K.H. Mas Mansyur
Jl. Jawa	Jl. Kurinci	Jl. Pattimura	Jl. Urip Sumoharjo	Jl. Teratai
Jl. Angkatan 45	Jl. R.A. Kartini	Jl. Jendral Sudirman	Jl. Dr. Cipto	-
Jl. Cempaka	Jl. Semarang	Jl. Dr. Sutomo	-	-
Jl. Otto Iskandar Dinata	Jl. Wahid Hasyim	Jl. P. Kemerdekaa	-	-
Jl. Jeruk	Jl. K.H. Ahmad Dahlan	Jl. Merdeka	-	-
Jl. Tritura	Jl. W.R. Supratman	Jl. Tondano	-	-
Jl. Majapahit	Jl. Progo	Jl. Pelita II	-	-
Jl. Kutilang	Jl. Truntum	Jl. Ki Mangun Sarkoro	-	-
Jl. Surabaya	Cendrawasih	Jl. Jlamprang	-	-
Jl. KH. Hasyim Asyari	Jl. Bahagia	Jl. Sumatera	-	-
Jl. Labuan	Jl. Slamet	Jl. Sunan Ampel	-	-
Jl. Melati	Jl. Ahmad Yani	Jl. Dharma Bhakti	-	-
Jl. Kenanga	Jl. Jetayu	Jl. Sulawesi	-	-
Jl. Achmad Alf Arslan Djunaid	Jl. Patriot	Jl. Hos Cokroaminoto	-	-
-	Jl. Pramuka	Jl.H.Agus Salim	-	-
-	Jl. Irian	Jl. Pemuda	-	-

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D	Tingkat Pelayanan E
-	Jl. Kalimantan	Jl. Manggis	-	-
-	Jl. Merak	Jl. Angkatan 66	-	-
-	-	Jl. Salak	-	-
-	-	Jl. Argopuro	-	-
-	-	Jl. Kemakmuran	-	-
-	-	Jl. Gatoto Subroto	-	-
-	-	Jl. Hasanudin	-	-
-	-	Jl. Maninjau	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Hingga saat ini selain persebaran pola pergerakan kendaraan yang tidak merata, kepadatan lalu lintas dipengaruhi oleh lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa.

Kepadatan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekalongan saat ini bercampur antara arus lalu lintas menerus dan arus lalu lintas lokal. Hal itu menyebabkan bercampurnya kendaraan-kendaraan angkutan barang yang bermuatan berat dan kendaraan penumpang dengan kendaraan-kendaraan warga lokal Kota Pekalongan sehingga menyebabkan kemacetan. Terutama pada ruas Jl. KH Mas Mansyur yang merupakan Jalur Pantura yang berpotongan dengan perlintasan kereta api double track. Pada saat kereta melintas maka akan terjadi antrian dan tundaan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun, jika selanjutnya terdapat Jalan Lingkar Petanglong, maka arus lalu lintas akan terurai, jadi arus lalu lintas dapat terbagi menjadi 3 yaitu Perlintasan Pantura, Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Lingkar Petanglong.

Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keselamatan, keamanan, ketertiban pengguna jalan, serta kebersihan dan kenyamanan kota terutama pada tata ruang kota. Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Akibat lalu lintas yang bercampur, terutama kendaraan berdimensi besar, sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Salah satu sektor andalan Kota Pekalongan adalah perdagangan dan jasa. Dengan terbatasnya luas wilayah serta kawasan perdagangan dan jasa, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kesulitan dalam mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di lokasi lain. Jika kawasan perdagangan dan jasa tidak bisa berkembang optimal tentunya akan berdampak juga bagi upaya-upaya pengembangan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya Jalan Lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Petanglong, yang berpusat di Perkotaan Petanglong, merupakan salah satu wilayah Pengembangan di Jawa Tengah. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Petanglong merupakan salah satu kawasan strategis di Jawa Tengah. Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota,

serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, di wilayah Kota Pekalongan khususnya, dan Kawasan Perkotaan Petanglong pada umumnya.

Diperlukan kajian Lalu Lintas terkait pembangunan jalan lingkar Petanglong dan sekaligus menjadi tanggul rob. Kajian Lalu Lintas pembangunan Jalan Lingkar Petanglong tersebut juga dapat menjadi acuan/ dasar untuk pengambilan kebijakan - Kebijakan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan serta manajemen lalu lintas seperti contohnya pembatasan kendaraan angkutan barang, peningkatan sistem transportasi umum, penerapan teknologi lalu lintas yang cerdas, dan lainnya.

Dalam dimensi yang lain, mencontoh kasus di daerah lain, pembangunan jalan lingkar di Kota Petanglong dan/atau Kawasan Perkotaan Petanglong dapat dilakukan dengan konstruksi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Jika jalan lingkar tersebut dapat terwujud diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan wilayah Kota Pekalongan dan kawasan sekitarnya.

Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten / kota - IUP

Perlengkapan jalan merupakan salah satu persyaratan teknis jalan yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Hal tersebut seperti halnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 22 yang menyebutkan bahwa jalan perlu dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan menyebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, serta fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan. Penyediaan perlengkapan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

Dalam upaya mewujudkan peranan penting jalan untuk mendorong perkembangan kehidupan masyarakat Kota Pekalongan dan memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan serta keselamatan dalam menggunakan jalan, maka Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melengkapi jalan dengan perlengkapan jalan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan. Berikut merupakan data persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten / kota di Kota Pekalongan.

Tabel II-75
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Ruas Jalan Kota	Jumlah Ruas Jalan kota yang telah terpasang perlengkapan jalan	Kelengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal
2020	217 Ruas Jalan	92 Ruas Jalan	42,40%

Tahun	Jumlah Ruas Jalan Kota	Jumlah Ruas Jalan kota yang telah terpasang perlengkapan jalan	Kelengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal
2021	217 Ruas Jalan	92 Ruas Jalan	42,40%
2022	224 Ruas Jalan	98 Ruas Jalan	43,75%
2023	224 Ruas Jalan	98 Ruas Jalan	43,75%
2024	224 Ruas Jalan	98 Ruas Jalan	43,75%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa kemajuan kelengkapan jalan di Kota Pekalongan berlangsung sangat lambat, selama lima tahun hanya terdapat peningkatan sebesar 1,35%. Oleh karena itu, masih terdapat 56,25% ruas jalan yang masih harus dilengkapi. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan beberapa upaya yang dapat meningkatkan presentase kelengkapan jalan secara bertahap antara lain mengupayakan pendanaan yang bersumber dari Non APBD, memprioritaskan ruas jalan dengan risiko tinggi kecelakaan atau arus lalu lintas padat, menetapkan target penambahan kelengkapan jalan per tahun, melakukan evaluasi terhadap kelengkapan jalan dengan membuat klasifikasi kondisi eksisting dan tingkat urgensinya.

2.3.3.2. Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah Layak Huni (RLH), salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Tahun 201-2022 rasio rumah tidak layak huni semakin menurun yaitu dari 3,11 persen menjadi 2,10 persen. Hal tersebut berarti bahwa perkembangan RLH di Kota Pekalongan semakin membaik atau bertambah seiring dengan berkurangnya RTLH. Pada tahun. Perkembangan RTLH dan RLH di Kota Pekalongan pada tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-76
Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan
Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (persen)	Jumlah (unit)	Rasio (persen)
2020	76.603	1.966	2,57	74.637	97,43
2021	73.357	1.585	2,17	71.772	97,83
2022*	60.815	1.280	2,10	59.535	97,90
2023*	62.100	24.094	38,80	38.006	61,19
2024*	68.699	18.727	27,26	49.972	72,74

* Hasil sementara pendataan lengkap rumah (Omahe Ndewe)

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2024

2.3.3.3. Sanitasi

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sanitasi merupakan hal mendasar bagi pembangunan manusia. Akses terhadap sanitasi yang layak dan aman dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan pembuangan urine dan feses manusia yang aman. Sanitasi yang tidak memadai merupakan penyebab utama vektor penyakit dan peningkatan sanitasi diketahui memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Akses sanitasi dikategorikan aman apabila fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga itu sendiri dengan menggunakan jenis kloset leher angsa. Selain itu juga dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah atau tangki septik sebagai unit pengolahannya yang secara rutin disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun. Pengolahannya dapat dilakukan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), atau disambungkan ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Pemerintah Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan telah berkomitmen untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dengan menetapkan target 100% akses air bersih dan 70% sanitasi aman di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi akses sanitasi aman di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2024 masih berada pada angka 12% dari target sebesar 30%. Berdasarkan data BPS menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2024 persentase rumah tangga di Jawa Tengah yang menggunakan layanan sanitasi dengan pengelolaan secara aman masih tergolong rendah yaitu 10,84%, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan data lima tahun terakhir yaitu 10,51% pada tahun 2020. Kondisi tersebut menjadi tantangan berat bagi pemerintah dalam upaya menurunkan pencemaran lingkungan.

Kota Pekalongan merupakan salah satu di Provinsi Jawa Tengah yang masih memiliki capaian akses sanitasi aman dengan nilai rendah. Akses sanitasi aman Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah 0,58% berdasarkan pengolahan data Omahe Ndewe dan pelanggan layanan sedot tinja di Kota Pekalongan. Rendahnya akses sanitasi aman tersebut disebabkan karena belum ada sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan belum pemisahan antara peran regulator dan operator dalam sistem operasionalnya, semua masih berada di Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Pekalongan.

Tabel II-77
Data Jumlah Pelanggan Layanan Sedot Tinja di Kota Pekalongan

Tahun	Jumlah (unit)	Volume (m3)
2022	264	438
2023	175	379
2024	184	392

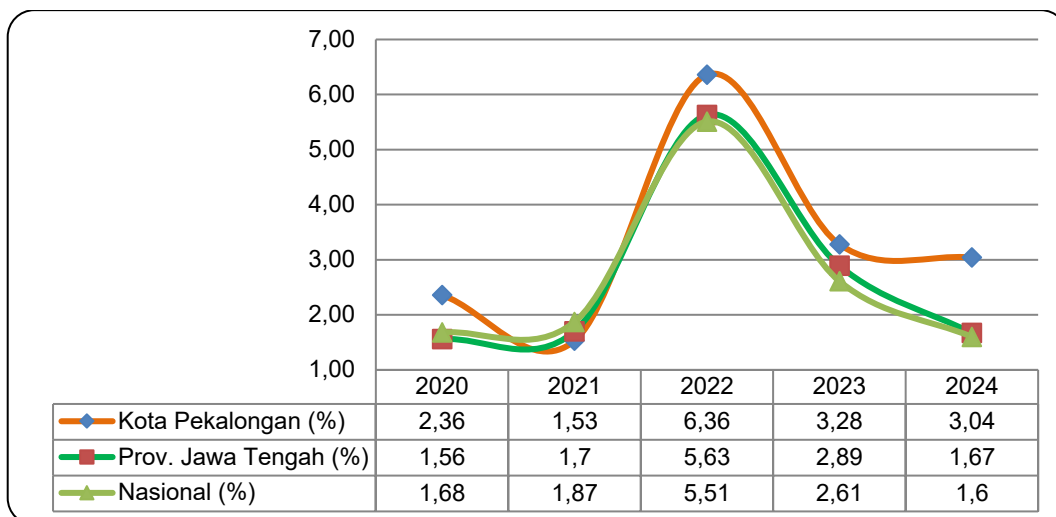
Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2025

2.3.4. Kondisi Fiskal Daerah

2.3.4.1. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2020-2024, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

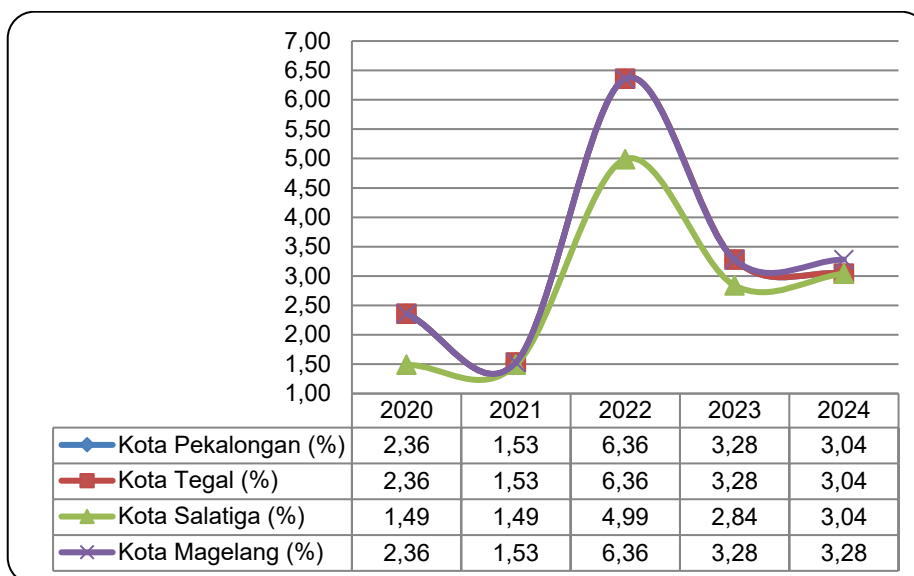
Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar II-45 berikut.



Gambar II-45
Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: www.bps.go.id, 2025

Mulai tahun 2020 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



Gambar II-46
Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan
dengan Daerah Setara Tahun 2020-2024

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2025

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun 2020 sama dengan Kota Tegal, berada di urutan tertinggi yaitu 2,36%. dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 1,49%. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun di tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36%, dan Kota Salatiga menjadi 4,99%. Pada tahun 2023 laju inflasi kembali menurun menjadi 3,28% untuk Kota

Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang, serta 2,84% untuk Kota Salatiga. Pada tahun 2024 turun Kota Pekalongan dan Kota Tegal turun menjadi 3,04%, Kota salatiga naik menjadi 3,04% dan kota magelang masih stagnan di 3,28%.

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Pendidikan, serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Faktor penyumbang terjadinya inflasi tertinggi pada 2024 lalu adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok terutama komoditi beras, cabai merah, dan bawang merah. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-78 berikut.

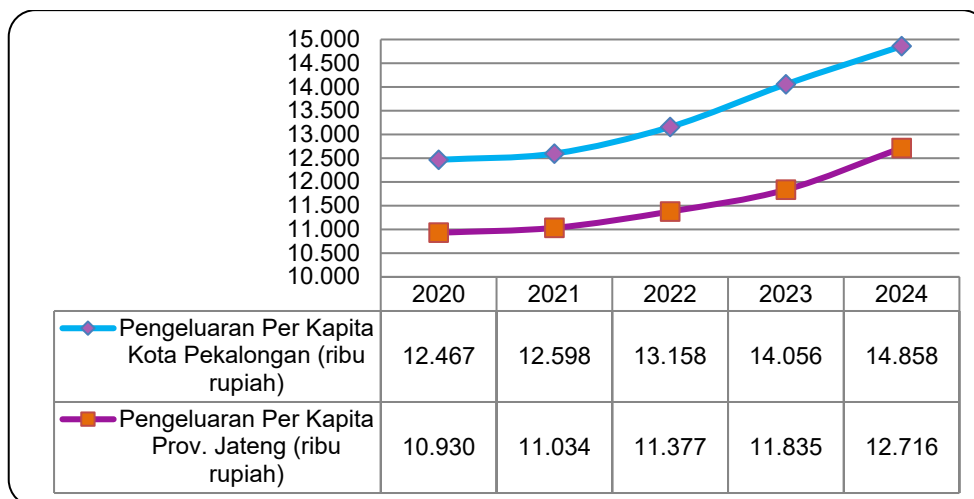
Tabel II-78
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96	7,89	2,19
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45	0,51	2,99
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47	1,30	0,34
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89	0,40	1,45
Kesehatan	2,87	0,55	2,50	2,78	0,60
Transportasi	1,36	1,01	16,42	-0,69	1,18
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74	0,03	1,18
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50	0,74	-0,90
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21	5,50	0,28
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81	1,01	5,46
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64	3,39	0,27
Umum	2,32	1,53	6,31	3,04	5,51

Sumber: BPS Jawa Tengah dan Kota Tegal Dalam Angka 2025, diolah, 2025

2.3.4.2. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.



Gambar II-47
Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng
Tahun 2020-2024

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2020-2024. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita sebesar Rp.12.267.000, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp.12.467.000 pada tahun 2020. Di tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 12.598.000, dan di tahun 2022 meningkat menjadi Rp.13.158.000. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita Kota Pekalongan meningkat menjadi sebesar Rp.14.056.000. meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi Rp.14.858.00.

Disparitas Harga – IUP

Disparitas harga bahan pokok merupakan perbedaan harga barang-barang kebutuhan dasar yang terdiri dari 13 (tiga belas) jenis bahan pokok. Disparitas harga bahan pokok Kota Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-79
Disparitas harga bahan pokok Kota Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024

No	Komoditas	2024		
		Kota Pekalongan	Prov. Jateng	Disparitas Harga (persen)
1	Beras Medium	13.963	13.441	3,88
2	Gula Pasir Curah	16.843	16.920	0,45
3	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	16.191	15.848	2,16
4	Daging Sapi Paha Belakang	125.911	131.413	4,19
5	Daging Ayam Ras	38.467	36.288	6
6	Telur Ayam Ras	27.029	27.403	1,36
7	Tepung Terigu	11.782	11.277	4,48
8	Kedelai Impor	11.356	11.907	4,63

No	Komoditas	2024		
		Kota Pekalongan	Prov. Jateng	Disparitas Harga (persen)
9	Cabai Merah Keriting	38.160	34.990	9.06
10	Cabai Rawit Merah	44.200	40.539	9,03
11	Bawang Merah	36.893	33.598	9,81
12	Bawang Putih Impor Kating	42.342	40.995	3,28
13	Ikan Kembung	30.000	31.135	3,64

Sumber: Dindagkop UKM Kota Pekalongan

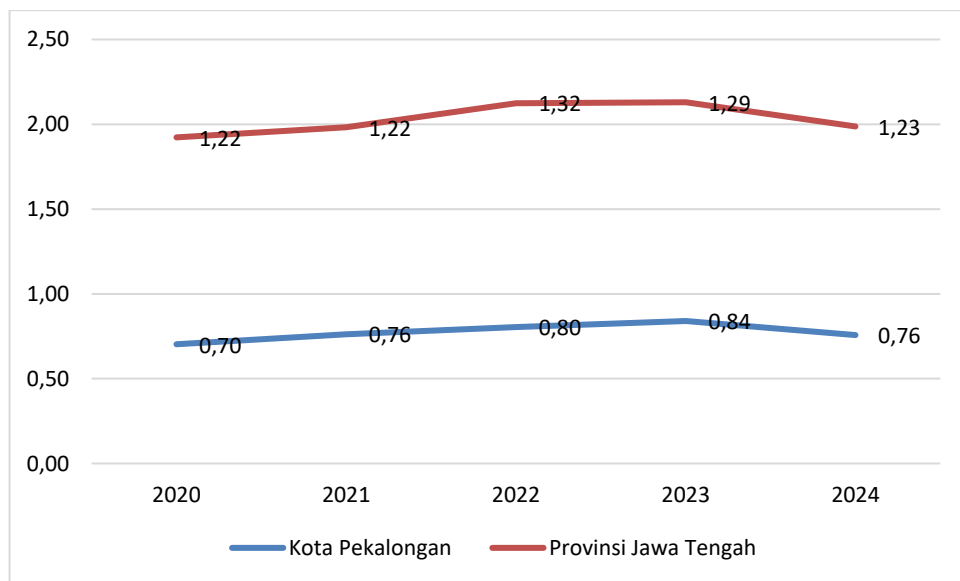
Disparitas harga seringkali mencerminkan ketidakseimbangan dalam distribusi barang, biaya transportasi, ketersediaan pasokan, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Semakin kecil disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas Kab/Kota dengan harga di Provinsi Jateng untuk komoditas yang sama. Disparitas harga bahan pokok Kota Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 beragam namun tidak ada yang melebihi 10 persen. Berdasarkan tabel diatas, nilai disparitas terkecil adalah komoditas Gula Pasir Curah yaitu sebesar 0,45%. Kecilnya nilai disparitas komoditas Gula Pasir curah berarti adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah and menurunnya kesenjangan harga komoditas Gula Pasir Curah. Harga komoditas yang tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya yaitu Bawang Merah sebesar 9,81%. Besarnya nilai disparitas komoditas Bawang Merah berarti belum optimalnya perbaikan maupun efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah and terjadi kesenjangan harga komoditas Bawang Merah

2.3.4.3. Kondisi Fiskal dalam Perekonomian Daerah

Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (IUP)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Pekalongan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,70 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi. Seiring pemulihan ekonomi, rasio meningkat menjadi 0,76 di tahun 2021 dan terus naik menjadi 0,80 pada 2022. Puncaknya terjadi pada 2023 dengan capaian rasio tertinggi sebesar 0,84, mencerminkan peningkatan efektivitas pemungutan pajak serta membaiknya kondisi ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2024 rasio kembali menurun ke angka 0,76. Penurunan ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan PDRB lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, rasio Kota Pekalongan masih berada jauh di bawah rata-rata provinsi, yang berkisar antara 1,22 hingga 1,32 selama periode yang sama. Meskipun pola pergerakan keduanya relatif searah, capaian Kota Pekalongan menunjukkan adanya ruang yang cukup besar untuk peningkatan kinerja fiskal daerah. Kondisi ini menandakan perlunya optimalisasi strategi perpajakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta digitalisasi layanan pajak agar kontribusi pajak terhadap PDRB tetap terjaga dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.



Gambar II-48
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB

Total dana pihak ketiga mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Persentase dana pihak ketiga per PDRB pun mengalami penurunan tiap tahunnya. Terjadi rasio penurunan sejak tahun 2020 sebesar 22,7% turun menjadi 14,3% di tahun 2024. Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kota Pekalongan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-80
Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

TAHUN	DANA PIHAK KETIGA	PDRB	%
2020	2.463.652.873.384	10.848.872.870.000	22,7
2021	2.267.773.453.465	11.460.582.990.000	19,8
2022	2.267.747.087.455	12.590.983.420.000	18,0
2023	2.085.309.657.175	13.744.224.050.000	15,2
2024	2.116.888.733.263	14.766.950.000.000	14,3

Sumber: Bag. Perekonomian&SDA Setda, 2020-2024

Dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS). Total dana pihak ketiga pada bank milik kab/kota per PDRB adalah rasio total dana pihak ketiga perbankan milik kab/kota di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu dalam satuan persen. Hal ini dapat menggambarkan tingkat pendalaman keuangan suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan.

Dana pihak ketiga pada bank milik Kota Pekalongan adalah simpanan berupa tabungan dan deposito pada PT. BPR Bank Pekalongan, PT. BPR BKK Kota Pekalongan serta PT. BPR BKK Jateng. Rasio total dana pihak ketiga per PDRB Kota Pekalongan sejak tahun 2021 hingga 2024 mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan simpanan masyarakat di sektor keuangan (BPR BKK milik Kota Pekalongan) yang mengarah pada kurang dalamnya sektor keuangan di Kota Pekalongan. Penurunan rasio dana pihak ketiga pada bank milik Kota Pekalongan terhadap PDRB menjadi indikator berbagai faktor seperti tingkat preferensi investasi masyarakat Kota Pekalongan, kepercayaan masyarakat Kota Pekalongan terhadap Bank milik Kota Pekalongan hingga kondisi ekonomi di Kota Pekalongan.

Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB (IUP)

Total kredit pada bank milik Kota Pekalongan mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2020 hingga 2024. Meskipun demikian, persentase kredit pada bank milik Kota Peaklongan per PDRB Kota Pekalongan mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun yaitu dari 13,1% di tahun 2020 menjadi 12,0% di tahun 2024. Total Kredit pada Bank Milik Kota Pekalongan per PDRB Kota Pekalongan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-81
Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Kredit	PDRB	persen
2020	1.423.343.263.107	10.848.872.870.000	13,1
2021	1.571.773.847.508	11.460.582.990.000	13,7
2022	1.685.150.977.170	12.590.983.420.000	13,4
2023	1.701.636.307.705	13.744.224.050.000	12,4
2024	1.772.058.384.253	14.766.950.000.000	12,0

Sumber: Bag. Perekonomian&SDA Setda, 2020-2024

Total kredit pada bank milik kab/kota adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan milik kab/kota. Total kredit pada bank milik kab/kota per PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan milik kab/kota terhadap PDRB pada suatu waktu tertentu. Hal tersebut menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai persentasenya maka semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah.

Persentase total kredit pada bank milik Kota Pekalongan yaitu PT. BPR Bank Pekalongan, PT. BPR BKK Kota Pekalongan serta PT. BPR BKK Jateng terhadap PDRB Kota Pekalongan menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa bank milik Kota Pekalongan berfungsi kurang optimal sebagai lembaga penghimpun maupun penyalur dana. Kecenderungan menurun persentase/ratio tersebut secara ekonomi makro terjadi karena perlambatan pertumbuhan ekonomi karena berhubungan dengan permintaan kredit dari berbagai sektor usaha dan masyarakat yang cenderung menurun sehingga akan menurunkan total penyaluran kredit oleh bank milik Kota Pekalongan. Suku bunga juga dapat menjadi penyebab kecenderungan menurunnya persentase tersebut. Faktor lainnya dari sisi perbankan yaitu kualitas layanan dan produk yang dihasilkan atau ditawarkan kurang kompetitif dan kurang inovatif. Namun, penurunan total kredit pada bank terhadap PDRB tidak selalu berarti negatif. Bisa jadi, penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit yang menunjukkan peningkatan efisiensi ekonomi.

2.3.5. Fokus Fasilitas Wilayah

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan. Kondisi transportasi di Kota Pekalongan menunjukkan jumlah kendaraan cukup fluktuatif (baik kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat/lebih), dimana sepanjang tahun 2020 sampai 2024 jumlahnya naik turun. Adapun penambahan panjang jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Namun demikian rasionya tidak berubah signifikan. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 0,0004. Kondisi selengkapnya disajikan dalam Tabel II-82.

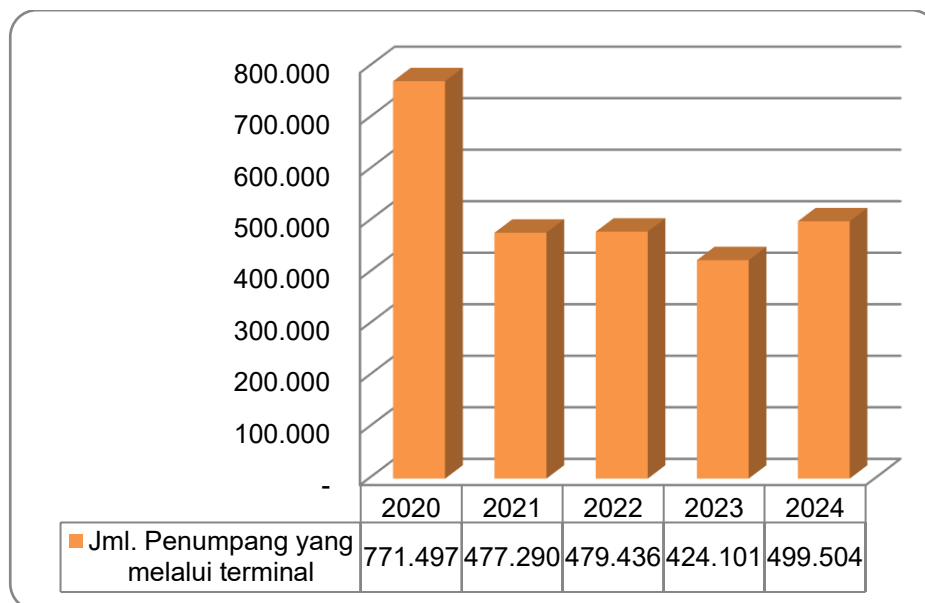
Tabel II-82
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2020	153,41	173.114	0,0009
2021	153,41	122.590	0,0013
2022	153,41	572.435	0,0003
2023	150,27	612.019	0,0002
2024	150,27	328.861	0.0004

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2025 dan Dinas Perhubungan Kota pekalongan, 2025

2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun

Terminal tipe A terdapat di Kota Pekalongan yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bus antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas Terminal Type A ada di Pemerintah Pusat. Jumlah penumpang yang melalui terminal Kota Pekalongan dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 terdapat 771.497 penumpang yang melalui terminal kota Pekalongan, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis menjadi 477.436 penumpang yang melalui terminal kota Pekalongan, pada tahun 2022 jumlah penumpang yang melalui terminal kota pekalongan mengalami peningkatan menjadi 479.436 penumpang, kemudian pada tahun 2023 jumlah penumpang yang melalui terminal kota Pekalongan mengalami penurunan menjadi 424.101 penumpang dan pada 2024 mengalami peningkatan jumlah penumpang yang melalui terminal kota Pekalongan menjadi 499.504 penumpang. Perkembangannya disajikan dalam Gambar II-49 berikut.

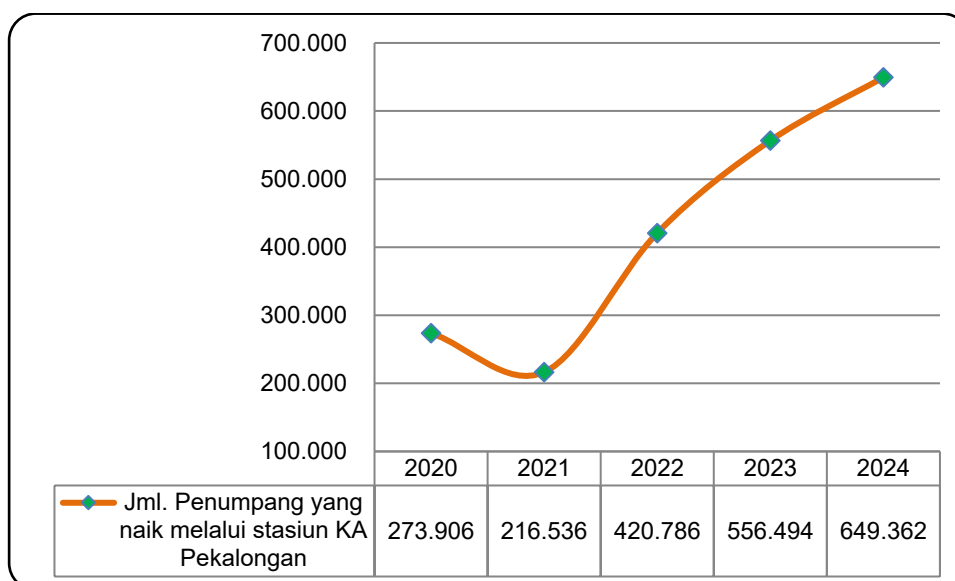


Gambar II-49
Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 dan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

3. Jumlah Penumpang yang Naik Melalui Stasiun Kereta Api

Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.



Gambar II-50
Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

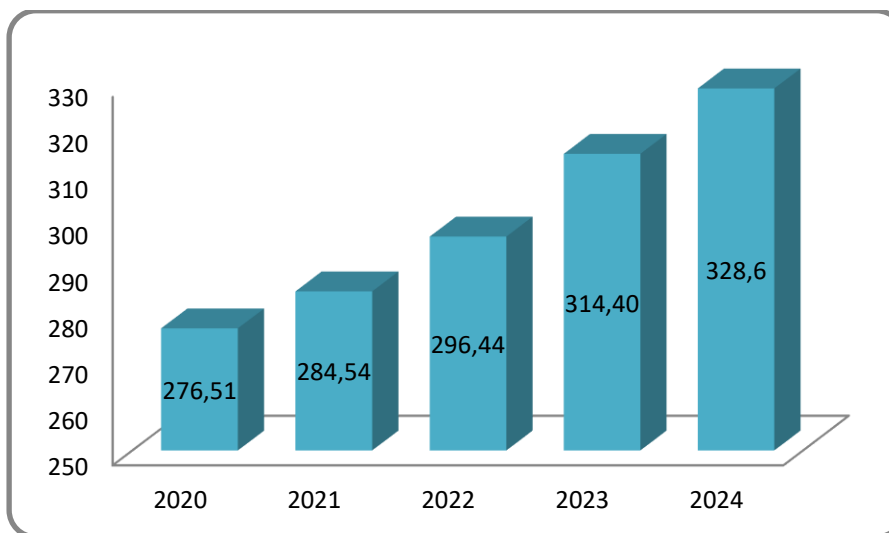
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2025

Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan sangat fluktuatif setiap tahunnya seperti yang disajikan dalam Gambar II-50. Tahun 2020 jumlah orang yang naik melalui stasiun sebanyak 273.906 penumpang. Namun jumlah penumpang mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 216.536 penumpang. Hal ini disebabkan adanya larangan bepergian keluar daerah karena adanya pandemi *COVID-19*. Kemudian pada tahun 2022 hingga tahun 2024 pandemi *COVID-19* sudah berangsur-angsur mereda dan masyarakat kembali beraktivitas secara normal kembali sehingga jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan mengalami peningkatan menjadi 420.786 penumpang pada 2022 dan 556.494 penumpang pada 2023, serta 649.362 penumpang pada 2024.

Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang akan menuju maupun dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bus. Pengembangan moda transportasi bus agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bus, apalagi di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang mulai tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun berfluktuasi. Konsumsi listrik selama tiga tahun terus meningkat. Pemakaian listrik tahun 2020 sebesar 276,51 MWh, maka pada akhir tahun 2024 sebesar 328,60 MWh. Berikut gambaran kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2020-2024.



Gambar II-51
Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

5. Persentase Pengguna Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bertambah sepanjang tahun 2020-2024 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah pengguna listrik berdasarkan data BPS selama lima tahun terakhir menunjukkan bertambahnya jumlah pelanggan PLN, terdiri dari pelanggan rumah tangga dan pelanggan non rumah tangga seperti kantor, badan usaha atau pelanggan lain. Persentase jumlah pelanggan

PLN pada tahun 2020 sebesar 113,07 persen. Jumlah tersebut menurun 101,50 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami kenaikan dari 113,25 persen di tahun 2022, 130,94 persen di tahun 2023 dan 131,55 persen di tahun 2024. Secara lengkap disajikan dalam Tabel II-83 berikut.

Tabel II-83
Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pengguna Listrik	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2020	95.313	84.296	113,07
2021	97.567	96.121	101,50
2022	99.388	87.758	113,25
2023	101.186	77.275	130,94
2024	103.250	78.488	131,55

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2025, 2025

6. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Jumlah hotel di Kota Pekalongan saat ini cukup memadai. Tingkat okupansi tahun 2020 sebesar 75 persen, sangat memadai sebagai daerah tujuan wisata bagi Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020-2024 jumlah hotel berbintang, baik bintang 1, 2, 3, dan 4 sebanyak 10 (sepuluh) hotel. Sedangkan hotel melati berjumlah 20 (dua puluh) hotel pada tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2023 hotel non berbintang bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) hotel. Pada tahun 2024 hotel berbintang bertambah menjadi 12 (dua belas) hotel dan hotel non berbintang bertambah menjadi 28 (dua puluh delapan) hotel. Tersedianya berbagai pilihan hotel maka berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Hal yang menjadi tantangan kepariwisataan, di samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang memadai salah satunya yakni hotel.

Tabel II-84
Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Akomodasi	2020	2021	2022	2023	2024
Hotel Berbintang	10	10	10	10	12
Hotel Non Berbintang	25	25	25	26	28

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2025 dan Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

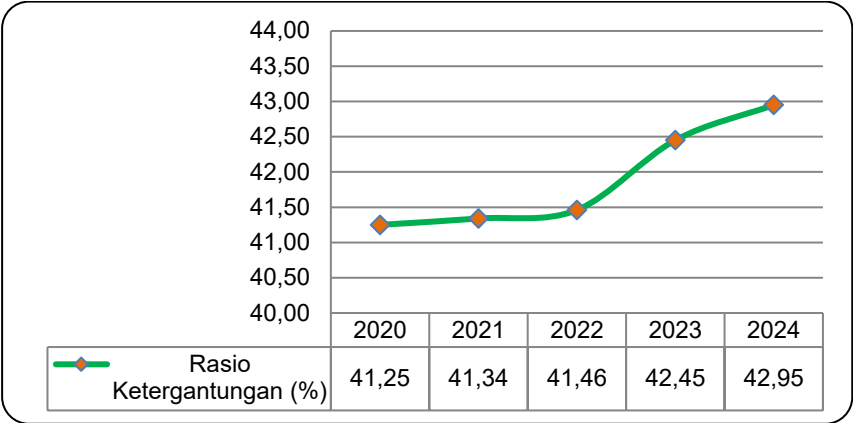
2.3.6. Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2020-2024, rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus meningkat. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan penduduk di Kota Pekalongan sebesar 41,25 dan pada tahun 2021 menjadi 41,34. Namun meningkat di tahun 2022 menjadi 41,46, lalu mengalami peningkatan pesat di tahun 2023 menjadi 42,45 dan 2024 meningkat menjadi 42,95.

Dengan kecenderungan angka yang semakin meningkat menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin tinggi. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku

kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci disajikan dalam Gambar II-52 berikut.



Gambar II-52
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2024 (diolah), 2025

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1. Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu indeks pelayanan publik (IPP) dan indeks kepuasan masyarakat (IKM). IPP fokus pada kinerja dan kualitas pelayanan publik secara objektif, dilihat dari berbagai aspek seperti kebijakan, profesionalisme SDM, sarana-prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi dari unit penyelenggara pelayanan. Sedangkan IKM fokus pada persepsi dan perasaan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mereka terima.

Hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB menunjukkan IPP Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2024 IPP Kota Pekalongan adalah 4,59 dengan kategori A, lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,53. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Kota di Jawa Tengah, capaian IPP Kota Pekalongan menempati urutan keempat, sehingga masih diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jika dilihat dari indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan pada 77 unit pelayanan publik di Kota Pekalongan, rata-rata IKM Kota Pekalongan memiliki kategori sangat baik dengan skor 91,37. Namun demikian masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.4.1.2. Reformasi Birokrasi

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ada perubahan dalam komponen penilaian. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, indeks Reformasi Birokrasi di Pemkot Kota Pekalongan tahun 2022 adalah 71,04 dengan kategori “BB” dengan rincian hasil evaluasi disajikan dalam Tabel II-85 berikut.

Tabel II-85
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi
Kota Pekalongan Tahun 2021-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,39	12,79
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,03	6,81
	III. Reform	30,00	18,86	19,13
Total Komponen Pengungkit		60,00	36,28	38,73
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,11	8,13
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,36	7,69
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,20	8,09
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,71	8,40
Total Komponen Hasil		40,00	33,38	32,31
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	69,66	71,04

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, ada perubahan dalam komponen penilaian. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2024 adalah 87,31 dengan kategori “A”, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian hasil evaluasi disajikan dalam Tabel II-86 berikut.

Tabel II-86
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi
Kota Pekalongan Tahun 2023-2024

No	Penilaian	Bobot	Nilai	
			2023	2024
A	RB General	100	65,08	77,80
B	RB Tematik	20	12,04	9,51
C	Indeks RB	120	77,12	87,31
			BB	A

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, 2025

2.4.1.3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2018 mengalami lompatan 2 peringkat dari C menjadi BB.

Pada Tahun 2022 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai 73,31 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian SAKIP disajikan dalam Tabel II-87 berikut.

Tabel II-87
Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2018-2021

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	24,42	24,53	24,70	24,32
2	Pengukuran Kinerja	25	17,07	17,54	17,92	18,18
3	Pelaporan Kinerja	15	10,46	11,09	11,17	11,45
4	Evaluasi Internal	10	7,24	7,29	7,39	7,44
5	Capaian Kinerja	20	11,69	12,14	11,89	11,77
	Nilai SAKIP	100	70,88	72,59	73,07	73,16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	CC	BB	BB

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2024

Hasil Evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan bahwa nilai sebesar 73,02 dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel II-88
Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2022-2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,38	23,24	23,30
2	Pengukuran Kinerja	30	19,50	20,04	20,09
3	Pelaporan Kinerja	15	11,48	11,52	11,59
4	Evaluasi Internal	25	17,95	18,03	18,04
	Nilai SAKIP	100	73,31	72,83	73,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan dan Inspektorat Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 77 UPP telah menyampaikan laporannya. Dari total 79 UPP UPP di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mulai dari Perangkat Daerah sampai dengan Unit Teknis Perangkat Daerah atau Unit Kerja terkecil dibawah Perangkat Daerah masih terdapat 2 UPP yang tidak melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada Semester I tahun 2024 karena adanya kendala tertentu yaitu UPT Puskesmas Kramatsari yang tidak dapat melaksanakan SKM dikarenakan gedung puskesmas terendam banjir sehingga focus pelayanan terganggu karena harus menggunakan gedung sekolah sebagai gedung puskesmas. UPP lain yang tidak melaksanakan SKM adalah Kelurahan Bendan Kergon yang karena adanya perubahan pejabat dari tingkat lurah sampai dengan pejabat struktural lainnya sehingga informasi terkait pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tidak dapat terjalin dengan optimal. Total responden yang terkumpul selama periode Januari s.d Mei 2023 berjumlah 13.286 orang responden. Hasil Survei Kepuasan

Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Semester I Tahun 2024 disajikan dalam Tabel II-89 berikut.

Tabel II-89
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di
Kota Pekalongan Semester 2 Tahun 2024

	Nama OPD	Nilai IKM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	91,04	Sangat Baik
2	Dinas Kesehatan	82,79	Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	98,53	Sangat Baik
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	85,50	Baik
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	85,78	Baik
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan	89,68	Sangat Baik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92,42	Sangat Baik
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	83,40	Baik
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan KB	92,78	Sangat Baik
10	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	90,52	Sangat Baik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak	98,13	Sangat Baik
12	Dinas Pertanian Dan Pangan	87,51	Baik
13	Dinas Lingkungan Hidup	96,24	Sangat Baik
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	90,79	Sangat Baik
15	Dinas Perhubungan	94,12	Sangat Baik
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	89,62	Sangat Baik
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	99,08	Sangat Baik
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	91,04	Sangat Baik
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	86,01	Baik
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	94,73	Sangat Baik
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	83,97	Baik
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	99,28	Sangat Baik
23	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	85,18	Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	84,79	Baik
25	Sekretariat DPRD	93,50	Sangat Baik
26	Inspektorat	92,26	Sangat Baik
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	87,25	Baik
28	Bagian Protokol dan Korpim Setda	97,04	Sangat Baik
29	Bagian Organisasi Setda	88,37	Sangat Baik
30	Bagian Umum Setda	92,62	Sangat Baik
31	Bagian Hukum Setda	93,48	Sangat Baik
32	Bagian PBJ dan Minbang Setda	94,75	Sangat Baik

	Nama OPD	Nilai IKM	Keterangan
33	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	89,65	Sangat Baik
34	Bagian Pemerintahan Setda	88,05	Baik
35	Kecamatan Pekalongan Utara	89,69	Sangat Baik
36	Kelurahan Kandang Panjang	94,71	Sangat Baik
37	Kelurahan Panjang Wetan	95,25	Sangat Baik
38	Kelurahan Panjang Baru	100	Sangat Baik
39	Kelurahan Krpyak	97,96	Sangat Baik
40	Kelurahan Padukuhan Kraton	97,15	Sangat Baik
41	Kelurahan Degayu	91,48	Sangat Baik
42	Kelurahan Bandengan	99,65	Sangat Baik
43	Kecamatan Pekalongan Selatan	84,95	Baik
44	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	99,63	Sangat Baik
45	Kelurahan Kuripan Yosorejo	89,69	Sangat Baik
46	Kelurahan Jenggot	95,10	Sangat Baik
47	Kelurahan Buaran Kradenan	85,62	Baik
48	Kelurahan Banyurip	89,43	Sangat Baik
49	Kelurahan Soko Duwet	86,28	Baik
50	Kecamatan Pekalongan Barat	86,16	Baik
51	Kelurahan Medono	84,57	Baik
52	Kelurahan Podosugih	89,75	Baik
53	Kelurahan Pasirkratonkramat	98,90	Sangat Baik
54	Kelurahan Tirto	92,70	Sangat Baik
55	Kelurahan Sapuro Kebulen	94,27	Sangat Baik
56	Kelurahan Bendan Kergon	85,58	Baik
57	Kelurahan Pringrejo	90,82	Sangat Baik
58	Kecamatan Pekalongan Timur	99,82	Sangat Baik
59	Kelurahan Kauman	99,95	Sangat Baik
60	Kelurahan Poncol	99,77	Sangat Baik
61	Kelurahan Klego	97,75	Sangat Baik
62	Kelurahan Gamer	81,84	Baik
63	Kelurahan Noyontaansari	99,99	Sangat Baik
64	Kelurahan Setono	98,08	Sangat Baik
65	Kelurahan Kalibaros	97,37	Sangat Baik
66	UPT Puskesmas Krpyak Kidul	88,30	Baik
67	UPT Puskesmas Tondano	88,17	Baik
68	UPT Puskesmas Tirto	89,87	Sangat Baik
69	UPT Puskesmas Buaran	90,07	Sangat Baik
70	UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	81,51	Baik
71	UPT Puskesmas Medono	88,76	Sangat Baik
72	UPT Puskesmas Klego	81,01	Baik
73	UPT Puskesmas Noyontaan	92,13	Sangat Baik
74	UPT Puskesmas Sokorejo	86,21	Baik
75	UPT Puskesmas Kramatsari	88,96	Sangat Baik

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
76	UPT Puskesmas Bendan	84,91	Baik
77	UPT Puskesmas Jenggot	89,68	Sangat Baik
78	UPT Puskesmas Dukuh	89,63	Sangat Baik
79	UPT Puskesmas Pekalongan Selatan	85,16	Baik
Rata-rata IKM Kota Pekalongan		91,37	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2025

2.4.1.4. Penguatan Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah Kota Pekalongan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini tercermin dari keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama sembilan tahun berturut-turut, yaitu sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 hingga 2023. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

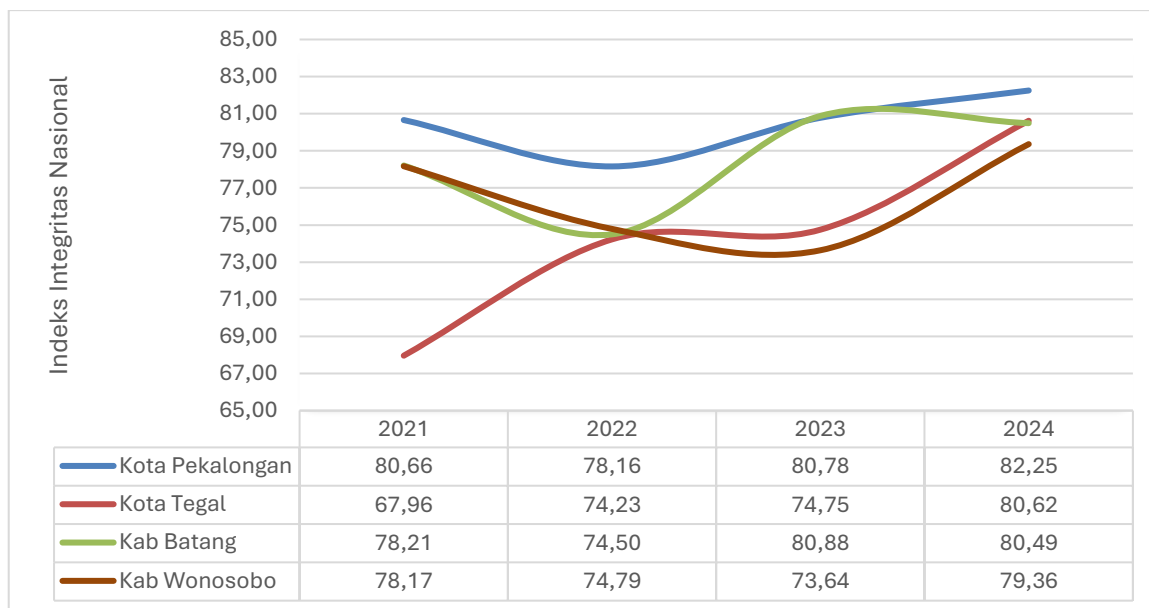
Keberhasilan meraih opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah mampu menjaga stabilitas sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, serta melakukan pengelolaan anggaran secara efisien dan tepat sasaran. Hal ini menjadi dasar penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus menjadi landasan yang kokoh dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat. Namun, tantangan ke depan adalah mempertahankan capaian ini melalui peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan sistem informasi keuangan daerah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran.

2.4.1.5. Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi merupakan pondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk menjaga dari perilaku korupsi, maka integritas baik individu dan organisasi menjadi penting untuk diperhatikan. Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) atau indeks integritas nasional (IIN) digunakan untuk menunjukkan tingkat Integritas Individu dan Organisasi Pemerintah.

Capaian nilai SPI / IIN Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2021-2024 berfluktuasi namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2021 sebesar 80,66 dan tahun 2024 meningkat menjadi 82,25 dengan kategori TERJAGA karena lebih dari 78,00. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 79,47, capaian IIN Kota Pekalongan lebih tinggi.

Sementara jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, capaian IIN Kota Pekalongan merupakan yang terbaik di Jawa Tengah, disusul oleh Kota Tegal (80,62), Kabupaten Batang (80,49) dan Kabupaten Wonosobo (79,36). Bahkan untuk tipe kota kecil, IIN Kota Pekalongan menempati posisi terbaik tingkat nasional.



Gambar II-53
Perolehan Indeks Integritas Nasional (IIN) Kab/Kota Tertinggi di Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Sumber: www.jaga.id (diolah), 2025

2.4.1.6. Reformasi Hukum

Reformasi hukum pemerintah daerah, yang diukur dengan Indeks Reformasi Hukum (IRH) dilakukan sebagai instrumen menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Walaupun lebih rendah jika dibandingkan capaian IRH Provinsi Jawa Tengah sebesar 98,28 (Istimewa), capaian IRH Kota Pekalongan pada tahun 2024 sebesar 96,76 (Istimewa) mendapatkan apresiasi dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan capaian IRH daerah sekitar, IRH Kota Pekalongan lebih baik dibandingkan IRH Kabupaten Batang sebesar 87,58 (Sangat Baik) dan IRH Kabupaten Pemalang sebesar 96,72 (istimewa), namun di bawah IRH Kabupaten Pekalongan sebesar 98,42 (istimewa).

Walaupun nilai IRH Kota Pekalongan mendapatkan kategori AA atau istimewa, namun masih terdapat rekomendasi perbaikan yaitu masih diperlukan komitmen pimpinan dan pengelola JDIH untuk membenahi pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, serta memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja JDIH.

2.4.1.7. Manajemen ASN

Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pekalongan berbasis sistem merit secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Sistem Merit merupakan manajemen ASN berdasarkan kemampuan, kinerja, dan prestasi, bukan berdasarkan faktor-faktor lain seperti afiliasi politik, hubungan pribadi, atau latar belakang sosial.

Capaian indeks merit Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 178.50, melonjak signifikan pada tahun 2022 dengan nilai indeks merit 264.50. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam upaya penerapan sistem merit secara lebih menyeluruh di setiap aspek. Selanjutnya, nilai Indeks Sistem Merit terus meningkat mencapai 327 pada tahun 2024. Penerapan sistem merit yang semakin baik diharapkan berpotensi mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperbaiki transparansi, serta menciptakan birokrasi yang lebih adil dan akuntabel.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota nilai Indeks Sistem Merit kategori Sangat Baik untuk 2 Kabupaten/kota (Kota Magelang dan Kota Pekalongan), kategori Baik untuk 30 Kabupaten/kota dan sisanya 3 Kabupaten/kota kategori Kurang.

2.4.2. Ketentraman dan ketertiban umum

2.4.2.1. Penegakan Perda

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2020-2024 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2020 dengan rasio sebesar 0,88 atau 27 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan rasio menjadi 0,84 atau 26 personel untuk setiap 10.000 penduduk di tahun 2021. Sampai dengan tahun 2024, rasio Polisi Pamong Praja (PNS) terus menurun menjadi 0,72 atau 23 personil untuk setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Banpol Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Pada tahun 2020, rasio sebesar 3,91 atau 120 personil untuk setiap 10.000 penduduk. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,99 atau 123 personil setiap 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2022 rasio kembali mengalami penurunan menjadi 3,97 atau 123 personil dan pada tahun 2023 rasio mengalami penurunan menjadi 3,68 atau 117 personil setiap 10.000 penduduk. Sementara itu pada tahun 2024 rasio mengalami kenaikan yaitu 3,73 atau 119 personil setiap 10.000 penduduk.

Jika Polisi PP PNS dan Banpol Non PNS dijumlahkan, maka rasio pada tahun 2020 sebesar 4,79 atau 147 personil per 10.000 penduduk. Pada tahun 2021 meningkat jumlahnya dibandingkan tahun 2020 yaitu 149 personil. Pada tahun 2022 naik menjadi 153 personil. Tahun 2023 dan 2024 jumlah Polisi PP PNS dan Banpol Non PNS sebanyak 142 personil.

Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP dan Banpol dalam kurun waktu 2020-2024.

Tabel II-90
Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP
(Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2020-2024

Tahun	Jumlah Polisi PP (PNS)	Persentase Jumlah Polisi PP (PNS)	Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Jumlah Polisi PP (PNS dan Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (PNS dan Banpol Non PNS)	Jumlah Penduduk
2020	27	0,88	120	3,91	147	4,79	307.150
2021	26	0,84	123	3,99	149	4,83	308.310
2022	30	0,97	123	3,97	153	4,94	309.742
2023	25	0,79	117	3,68	142	4,47	317.524
2024	23	0,72	119	3,73	142	4,46	318.182

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2025

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, pelanggaran Perda sebanyak 1.782 kasus, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 3.586 kasus. Namun tahun 2022 jumlah pelanggaran Perda menurun menjadi 2.410 kasus. Tahun 2023 naik menjadi 2.555 kasus dan turun lagi pada tahun 2024 sebanyak 1.835. Meskipun demikian, Satpol P3KP Kota Pekalongan terus berusaha melakukan penyelesaian atas pelanggaran Perda yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan persentase penyelesaian atas pelanggaran Perda yang berada diatas 90 persen mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel II-91
Penyelesaian Pelanggaran Perda
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
2020	1.782	1.759	98,71
2021	3.586	3.586	100,00
2022	2.410	2.410	100,00
2023	2.555	2.555	100,00
2024	1.835	4.335	100,00

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2025

2.4.2.2. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2020-2024 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib. Pada tahun 2024 masih terjadi gangguan keamanan antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Jumlah kasus yang naik yaitu penganiayaan, pencurian, penipuan, dan kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Oleh karenanya diperlukan koordinasi kewaspadaan dini dan pembinaan ketahanan ekonomi di masyarakat Kota Pekalongan, juga sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan psikotropika kepada masyarakat Kota Pekalongan. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-92
Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tindak Kejahatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pembunuhan	2	0	0	0	0
Pemeriksaan	0	2	0	0	0
Penganiayaan	3	2	13	6	7
Pencurian	33	59	81	72	93
Penipuan	18	2	31	6	9
Penadahan	0	0	0	0	0
Narkoba dan Psikotropika	64	46	39	49	56

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2025

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2020-2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel II-93
Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Konflik Sosial	1	2	0	0	0

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka tindakan preventif agar tidak muncul konflik sosial. Pengelolaan potensi konflik sosial dilakukan melalui Program Kemitraan dan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan, antara lain dengan kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Dan Mahasiswa, Pembinaan Karakter Dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur, Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda, Pengawasan Orang Asing, Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial, dan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah.

2.4.2.3. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, masih mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan disebabkan kombinasi dari penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) dan dinamika air laut (*pasang surut, kenaikan muka air laut dan gelombang el nino serta la nina*). Para ilmuwan telah mengamati perubahan-perubahan pada indikator-indikator iklim di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, dan secara bersamaan membuat proyeksi menggunakan model AR-4 IPCC untuk menilai perubahan-perubahan masa depan dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Kenaikan suhu permukaan rata-rata akan mencapai 0,8 ° C-1 ° C hingga tahun 2020-2050 dibandingkan dengan periode iklim akhir pada abad ke-20.
- Peningkatan suhu permukaan laut akan mencapai 1-1,2 ° C pada 2050 dibandingkan pada 2000.
- Pada periode 2001-2100, akan terjadi perubahan-perubahan yang berarti (terutama pada periode 2080-an) dengan kecenderungan meningkatnya curah hujan pada musim hujan dan penurunan pada bulan pancaroba.
- Kenaikan permukaan laut (SLR) diproyeksikan mencapai 35 - 40 cm pada 2050 dibandingkan dengan pada 2000. SLR maksimum dapat mencapai 175 cm pada 2100.

Dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai tertinggi sebagai kota percontohan RAN-API dengan nilai 5. Kota Pekalongan masuk dalam wilayah rentan terhadap perubahan iklim dalam RAN-API meliputi banjir, rob, air bersih, sanitasi, dan kekeringan.

Genangan akibat banjir rob terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan, bahkan sudah meluas sampai ke wilayah bagian Barat dan Timur Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan, sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta *stakeholder* lain untuk menangani permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden nomor 79 Tahun 2019, antara lain:

- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Loji / Pekalongan / Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN),
- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN),
- Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN),
- Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN),

- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong sistem Kali Boyo untuk melayani Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan kapasitas rencana sebesar 450 liter / detik.

Pemerintah berbagai tingkatan telah melaksanakan Pembangunan Pengendali Banjir dan Rob Sistem Loji - Banger, antara lain berupa: Tanggul Pantai, Tanggul/ Parapet Sungai, dan *Regulator Gate* di Kota Pekalongan. Pembangunan ini merupakan hasil kerja sama Pusat melalui Kementerian PUPR c.q. BBWS Pemali Juana yang membiayai konstruksi fisiknya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas PUSDATARU menyiapkan kajian DED-nya, dan Pemerintah Kota Pekalongan berkontribusi melalui penyediaan lahan dan penanggulungan aspek ekonominya.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menyusun Revisi *Masterplan* Drainase Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penataan sistem drainase kota yang lebih terarah. Pihak lain non pemerintah seperti akademisi di antaranya Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor banyak terlibat dalam berbagai kajian/studi. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir melibatkan Pemerintah Belanda melalui Program *Blue Deal*.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut terlibat dalam penanganan banjir rob di Kota Pekalongan melalui penyusunan berbagai kajian, peningkatan kapasitas masyarakat dan ASN, dan pembangunan infrastruktur. Beberapa LSM tersebut, antara lain Yayasan Kemitraan melalui Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dengan pendekatan 3S yaitu *Safekeeping – Surviving – Sustaining* (Melindungi – Mempertahankan – Melestarikan). Mercy Corps Indonesia melalui kegiatan Zurich Flood Resilient Alliance (ZFTA) yang untuk tahap berikutnya akan diperluas menjadi Zurich Climate Resilient Alliance (ZCRA).

Selain itu Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) Belanda melalui Witteveen Bos juga telah membuat kajian tentang Pekalongan Coastal Zone, Coastal Erosion and Flooding in the city of Pekalongan yang dibiayai oleh HHSK Belanda tahun 2016.

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, amblesan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landscape pesisir.

Kota Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Kota Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Kota Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang surutnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Kota Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan beresiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Barat, yaitu bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kawasan kumuh (*slum area*) yang terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini. Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi risiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah *alluvial*, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu wilayah yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB). Indikator ini digunakan oleh BNPB sejak tahun 2013 dan dihitung berdasarkan komponen penyusun bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah daerah. IRB dibatasi pada bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup 9 (sembilan) jenis ancaman yaitu: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrem dan abrasi. IRB Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang menurun tiap tahunnya dan pada tahun 2023 memiliki skor 122,75 atau dalam kategori sedang.

Tabel II-94
Tabel Perkembangan Indeks Risiko Bencana
Kota Pekalongan Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Skor	Kelas Risiko
1	2018	147,60	Sedang
2	2019	147,60	Sedang
3	2020	138,13	Sedang
4	2021	138,13	Sedang
5	2022	138,13	Sedang
6	2023	122,75	Sedang

Sumber: BNPB, 2025

Indeks Risiko Bencana Kota Pekalongan mengalami penurunan dari 138,17 pada tahun 2020 menjadi 122,75 pada tahun 2023. Sementara itu Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan penurunan yang lebih signifikan yakni dari 132,99 pada tahun 2020 menjadi 99,61 pada tahun 2024. Meskipun sama-sama mengalami penurunan di kedua wilayah, namun angka penurunan di Kota Pekalongan masih jauh dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. hal ini menunjukkan bahwa risiko bencana di kota Pekalongan tersebut lebih besar dibandingkan dengan rata-rata risiko bencana di tingkat provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2023, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Pekalongan tercatat sebesar 122,75. Penurunan angka IRB ini merupakan hasil dari peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang mencerminkan bahwa program-program penanggulangan bencana di Kota Pekalongan telah berjalan secara efektif. Meskipun penurunan IRB menunjukkan

perkembangan yang positif, Pemerintah Kota tetap perlu melanjutkan dan memperkuat upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar IRB Kota Pekalongan dapat mencapai atau bahkan berada di bawah rata-rata IRB Provinsi Jawa Tengah, dengan tetap mengedepankan peningkatan kewaspadaan, inovasi, serta adaptasi sebagai bagian dari strategi ketahanan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kontribusi Penurunan Emisi GRK – IUP

Pemerintah menyadari bahwa perubahan iklim merupakan persoalan krusial, berdampak luas pada berbagai sendi kehidupan serta dapat mempengaruhi capaian pembangunan nasional atas dasar itu persoalan perubahan iklim memerlukan respon yang cepat, tepat, dan terintegrasi. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk turut serta dalam penanggulangan permasalahan perubahan iklim global yang juga diungkapkan pada saat COP 21 Paris pada bulan Desember 2015. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan Skenario Fair atau menggunakan kemampuan sendiri dan sebesar 41% jika menggunakan Skenario Ambisius atau apabila ada dukungan pendanaan internasional.

Pada tahun 2024, secara nasional nilai kumulatif potensi penurunan emisi yang tercapai adalah 5,69 Giga Ton Co2eq dengan nilai intensitas emisi adalah 166 Ton CO2eq per milyar Rupiah (PDB konstan 2010). Nilai kumulatif potensi penurunan emisi tersebut diperoleh berdasarkan data kegiatan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang masuk dari periode 2020 – sekarang. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan 4.481 Kegiatan Aksi PRK Perubahan Iklim yang telah dilaksanakan diperoleh total potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 2968.669 juta Ton CO2EQ dengan nilai intensitas emisi adalah 1.74 Ton CO2EQ / Milyar Rupiah.

Kota Pekalongan memiliki total potensi penurunan emisi kumulatif pada tahun 2024 sebesar 4,76 Ton CO2EQ dengan nilai intensitas emisi Provinsi Jawa Tengah adalah 1,74 Ton CO2EQ / Milyar Rupiah. Nilai tersebut masih belum maksimal dikarenakan masih perlu identifikasi lebih detail terhadap upaya atau kegiatan aksi perubahan iklim yang telah dilaksanakan. Alokasi anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah untuk penanganan perubahan iklim di Kota Pekalongan sebesar 2 Milyar Rupiah.

Tabel II-95
Tabel Kegiatan Aksi Perubahan Iklim di Kota Pekalongan
Kota Pekalongan Tahun 2024

No.	Nama Kegiatan	Sektor Mitigasi	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Potensi Penurunan Emisi	OPD Pelaksana
1.	Pembangunan TPS 3R	Pengelolaan Limbah	1 unit	400.000.000,-	282.4766 Ton CO2EQ	DLH
2.	Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Energi	4168 KBWU (Kendaraan Bermotor Wajib Uji)	796.600.000,-	0.01 Ton CO2EQ	DINHUB
3.	Fasilitasi ATCS	Energi	12 bulan	417.920.000,-	71.00283 Ton CO2EQ	DINHUB

Sumber: Aplikasi Aksara, 2025

2.4.2.4 Angka Kriminalitas yang Ditangani

Angka Kriminalitas (AK) di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, yang mencerminkan dinamika keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Pada 2020, angka kriminalitas tercatat sebesar 3,91 per 10.000 penduduk dan menurun menjadi 3,60 pada 2021. Penurunan tajam terjadi pada 2022, di mana angka kriminalitas hanya mencapai

1,47, yang bisa menjadi indikasi keberhasilan aparat dalam menjaga ketertiban serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada 2023 dengan angka kriminalitas naik hingga 4,91, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, mobilitas masyarakat, atau perubahan situasi keamanan. Pada 2024, angka ini kembali menurun menjadi 2,92, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian kejahatan.

Tabel II-96
Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Kriminalitas
2020	3,91
2021	3,60
2022	1,47
2023	4,91
2024	2,92

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2025

Dinamika angka kriminalitas ini menunjukkan bahwa kondusivitas wilayah berperan penting dalam menciptakan keamanan yang stabil dan berkelanjutan. Upaya pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga tren positif dalam menekan angka kriminalitas. Program peningkatan keamanan berbasis masyarakat, penerapan teknologi dalam pengawasan, serta pendekatan preventif terhadap potensi tindak kriminal menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga Kota Pekalongan. Dengan stabilitas keamanan yang baik, pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

2.4.3. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah a

2.4.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut.

a. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu tahun 2020-2024, ketersediaan jumlah SD/MI cenderung menurun, dimana pada tahun 2020 sebanyak 146 sekolah dan di tahun 2024 sebanyak 147 sekolah. Sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs cenderung meningkat yaitu 38 sekolah di tahun 2020 menjadi 42 sekolah di tahun 2024. Untuk jumlah penduduk usia

7-12 tahun dan usia 13-15 tahun, secara umum cenderung fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-97 berikut.

Tabel II-97
Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SD/MI	146	147	147	147	147
Jumlah SMP/MTs	38	38	40	41	42
Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	31.581	31.724	31.694	31.876	31.470
Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	15.067	15.109	15.425	15.277	15.723

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan data diatas maka rasio ketersediaan sekolah untuk usia sekolah pendidikan dasar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-98 berikut.

Tabel II-98
Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn
2020	39,44
2021	39,50
2022	39,69
2023	39,87
2024	40,05

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

b. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu tahun 2020-2024, rasio ketersediaan guru pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 rasio sebesar 579,51, kemudian mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2024 menjadi 606,31 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-99 berikut.

Tabel II-99
Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	1.841	1.787	1.818	1.756	1.861
	Jumlah Murid	31.752	31.007	31.069	30.610	30.579
2	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	932	936	936	915	915
	Jumlah Murid	15.539	14.973	14.973	15.051	15.206
	Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)	2.773	2.723	2.754	2.671	2.776
	Jumlah Murid (SD.MI+SMP/MTS)	47.851	47.291	46.042	45.661	45.785

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk	579,51	585,37	598,15	584,96	606,31

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

c. Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2020-2024, dan berakhir naik di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-100
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah guru pendidikan dasar*)	Jumlah kelas pendidikan dasar*)	Jumlah guru sekolah per kelas*)	Murid Pendidikan dasar*)	Rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap 10.000 anak usia sekolah
2020	2.801	1.770	1,58	47.882	0,330
2021	2.723	1.773	1,54	46.320	0,332
2022	2.754	1.775	1,55	46.042	0,337
2023	2.671	1.767	1,51	45.661	0,331
2024	2.776	1.788	1.55	45.785	0,339

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

*) data pertengahan tahun ajaran

Sementara itu rasio guru dan murid jenjang SD/MI di Kota Pekalongan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 juga mengalami fluktuasi. Mulai dari 0,46 di tahun 2020, mengalami naik turun sampai tahun 2024 dengan kondisi terakhir di angka 0,47 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-101
Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Karakteristik	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Guru SD/MI*)	1.856	1.787	1.818	1.756	1.861
Rombongan Kelas*)	1.265	1.274	1.277	1.274	1.288
Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*)	1,47	1,40	1,42	1,38	1,44
Murid SD/MI*)	31.995	31.007	31.069	30.610	30.579
Rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	0,46	0,45	0,46	0,45	0,47

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

*) data pertengahan tahun ajaran

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2020-2024. Selama lima tahun terakhir, rasio tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 berada di angka 1,18, kemudian naik di tahun 2021 di angka 1,22 dan meningkat di tahun 2022. Turun di tahun 2023 dan 2024 menjadi 1,24 dan 1,20. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-102 berikut.

Tabel II-102
Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Karakteristik	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Guru SMP/MTs*)	945	936	936	915	915
Rombongan Kelas*)	505	499	498	493	500
Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*)	1,87	1,88	1,88	1,86	1,83
Murid SMP/MTs*)	15.887	15.313	14.973	15.051	15.206
Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	1,18	1,22	1,26	1,24	1,20

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

*) data pertengahan tahun ajaran

d. Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kondisi bangunan SD/setara dan SMP/setara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020-2024 kondisi bangunan SD/setara cenderung menurun, namun meningkat lagi berturut-turut di 2022 dan 2023 di angka 95,91 persen dan 97,11 persen, terjadi penurunan sedikit pada tahun 2024 di angka 96,77. Kondisi bangunan SMP/setara pada tahun 2020 sebesar 68,95 persen dan meningkat lagi secara berturut-turut di tahun 2021, 2022 dan 2023 di angka 79,36 persen, 94,71 persen dan 98,70 persen. Terjadi penurunan sedikit pada tahun 2024 di angka 98,34. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-103 berikut.

Tabel II-103
Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan
Dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024

Jenjang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI (persen)	73,30	72,50	95,91	97,11	96,77
SMP/MTs (persen)	68,95	79,36	94,71	98,70	98,34

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

e. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran

orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis.

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 sebesar 0,29 persen dan pada tahun 2021 turun menjadi 0,10 persen, kemudian menurun lagi di tahun 2022 sebesar 0,09 persen dan terakhir turun secara berturut-turut di tahun 2023 dan 2024 menjadi 0,05 dan 0,02. Sama halnya dengan jenjang SD/MI, jenjang SMP/MTs juga mengalami penurunan. Sampai pada tahun 2024 angka putus sekolah jenjang SMP/MTs mencapai angka 0 persen. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-104 berikut.

Tabel II-104
Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
di Kota Pekalongan 2020-2024

Jenjang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI (persen)	0,29	0,10	0,09	0,05	0,02
SMP/MTs (persen)	0,97	0,26	0,10	0,04	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

f. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/setara, sepanjang tahun 2020-2024 mencapai tingkat kelulusan sebesar 100 persen. Untuk angka kelulusan sekolah SMP/ sederajat selama kurun waktu 2020-2024 juga dapat mencapai 100 persen. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-105 berikut.

Tabel II-105
Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Jenjang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

g. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/setara ke jenjang SMP/setara tahun 2021 turun dari tahun 2020 yaitu diangka 97,82 dan naik secara bertahap sampai dengan tahun 2024 mencapai angka 100,23 persen. Hal yang sama terjadi pada angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SMP/setara ke SMA/setara sepanjang tahun 2020-2024 sempat berada di bawah 100 persen di tahun 2021. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-106 berikut.

Tabel II-106
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2020-2024

Jenjang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	102,79	97,82	98,79	99,66	100,23
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	102,44	96,45	101,20	102,80	103,86

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

h. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas pendidik dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 atau D4 terus ditingkatkan, baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Meskipun pada kenyataannya selalu mengalami fluktuasi seperti yang disajikan dalam Tabel II-107 berikut.

Tabel II-107
Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Jenjang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV	93,53	93,73	94,17	94,36	94,90
Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV	95,66	94,87	95,30	95,52	95,63

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

i. Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A

Mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Pada jenjang TK/RA persentase sekolah terakreditasi A cenderung fluktuatif. Tahun 2020 di angka 16,36 % menjadi 22,41 pada tahun 2024. Sedangkan jenjang SD/MI dan SMP/MTs persentase sekolah terakreditasi A cenderung fluktuatif. Secara menyeluruh persentase sekolah terakreditasi A pada jenjang TK-SMP dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Tabel II-108 menunjukkan sekolah jenjang TK sampai SMP yang memperoleh akreditasi A.

Tabel II-108
Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jenjang TK/RA					
- Sekolah Terakreditasi A	18	38	25	26	26
- Jumlah Sekolah	110	111	113	116	116
- Persen	16,36	34,23	22,12	31,03	22,41
Jenjang SD/MI					
- Sekolah Terakreditasi A	99	99	99	99	93
- Jumlah Sekolah	146	147	147	147	147
- Persen	67,81	67,35	67,35	67,35	63,27
Jenjang SMP/MTs					
- Sekolah Terakreditasi A	26	24	24	24	27
- Jumlah Sekolah	38	38	40	41	42
- Persen	68,42	63,16	60	58,54	64,29
Jenjang TK-SMP					
- Sekolah Terakreditasi A	143	161	148	159	146
- Jumlah Sekolah	294	296	300	304	305
- Persen	48,64	54,39	49,33	52,30	57,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2025

2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Tabel II-109
Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah balita	Rasio Posyandu /Balita
2020	414	23.008	17,99
2021	413	21.584	19,13
2022	414	21.354	19,39
2023	416	21218	19,61
2024	418	19222	21,75
Rata-rata			19,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

Jumlah Posyandu dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan Rasio Posyandu per 1000 balita tidak terlalu banyak mengalami perubahan, dengan asumsi pertambahan Posyandu jumlahnya hampir sama dengan jumlah per 1000 Balita. Rata-rata Rasio pos pelayanan terpadu per 1000 Balita selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 adalah 19,57 yang berarti setiap seribu

balita yang ada dilayani oleh 19 posyandu atau setiap posyandu melayani sebanyak 51 balita yang ada di wilayah tersebut.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 berdasarkan data pada Tabel II-110 , secara agregat, jumlah puskesmas, puskesmas pembantu tidak mengalami perubahan jumlah. Sedangkan untuk Rumah Sakit, dengan berkurang 1 (satu) Rumah Sakit Bhakti Waluyo yang dialih fungsikan menjadi klinik, maka ada perubahan rasio. Rasio tersebut, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Rumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

Tabel II-110
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Pustu		Poliklinik		Rumah Sakit	
		Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
2020	307.150	14	0,046	26	0.085	11	0.036	9	0.029
2021	316.216	14	0,044	27	0,085	12	0,038	9	0,028
2022	309.742	14	0,044	22	0,071	25	0,081	8	0,026
2023	317.958	14	0,044	23	0,072	32	0,010	8	0,025
2024	318.182	14	0,044	23	0.072	32	0,010	8	0,025

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

b. Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

Akreditasi merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap manajemen RS karena telah memenuhi standar yang ditentukan. Data rumah sakit di Kota Pekalongan yang telah terakreditasi secara rinci disajikan dalam Tabel II-111 berikut.

Tabel II-111
Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi	9	9	8	8	8
Jumlah seluruh rumah sakit	9	9	8	8	8
Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

c. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat dalam menjalani aktifitas kehidupan. Kurun waktu 2020-2024, rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis

dan dokter gigi. Menurut Standar Target Rasio Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014, tahun 2019 dan tahun 2025 dalam Kepmenkes Bidang Kesra No.54 Tahun 2013, rasio dokter spesialis sudah mencapai target sebesar 57 per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah sudah memenuhi standar dan target rasio Kebutuhan SDM Kesehatan yaitu 77 dokter per 100.000 penduduk. Untuk Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah untuk tahun 2024 sudah mencapai target rasio Kebutuhan SDM Kesehatan yaitu 13 dokter gigi per 100.000 penduduk. Secara umum rasio dokter per satuan penduduk meningkat dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Data perkembangan rasio dokter disajikan dalam Tabel II-112 berikut.

Tabel II-112
Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter Spesialis	0,42	0,41	0,57	0,43	0,46
Dokter Umum	0,66	0,76	0,62	0,77	0,80
Dokter Gigi	0,12	0,13	0,10	0,13	0,14
Rasio Dokter per satuan penduduk	1,2	1,3	1,29	1,33	1,39

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian perlu terus ditambah agar tercapai rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga paramedis.

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2020-2024 semakin membaik. Secara rinci disajikan dalam Tabel II-113 berikut.

Tabel II-113
Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Perawat	2,71	2,71	2,56	2,76	2,94
Rasio Bidan	1,09	1,15	0,99	1,23	1,26
Rasio Farmasi	0,90	1,01	0,59	1,11	1,24
Perawat	832	857	810	876	935
Bidan	335	365	313	391	400
Tenaga Farmasi	276	320	188	354	396

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

d. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya utama dalam pembangunan kesehatan. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tenaga kesehatan harus mempunyai ijin, kecuali tenaga kesehatan masyarakat. Tujuan dari perijinan ini selain melindungi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga melindungi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Mulai Tahun 2019 DPMPTSP Kota Pekalongan telah mengeluarkan izin

bagi tenaga kesehatan di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan. Secara rinci disajikan dalam Tabel II-114 berikut.

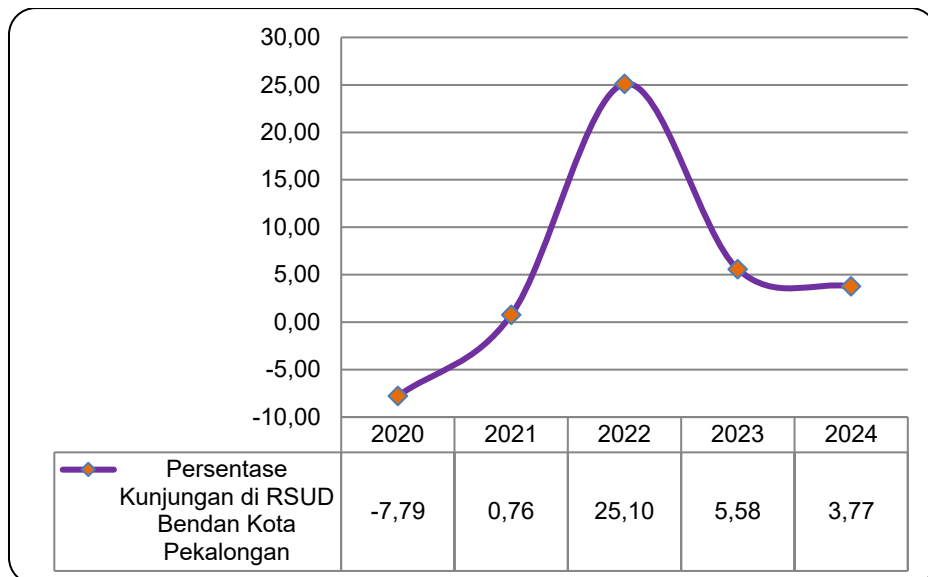
Tabel II-114
Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (yang dikeluarkan DPMPTSP)	698	863	2504	2639	1768
Jumlah tenaga kesehatan yang berkewajiban memiliki Surat Ijin Praktek	2.498	2.472	2844	2919	1665
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	27,94	34,91	88,05	90,59	94,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

e. Jumlah Kunjungan di RSUD Bendan

Pandemi *COVID-19* telah memengaruhi operasional rumah sakit. Wabah virus corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non *COVID-19*. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat okupansi. Rasio Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan menunjukkan tren yang negatif pada tahun 2020 yaitu sebesar -7,79 persen. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 0,76 persen dan 25,10 persen di tahun 2022. Secara rinci disajikan dalam Gambar II-54 berikut.



Gambar II-54
Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan
Periode Tahun 2020-2024

Sumber: RSUD Bendan, 2025

Terdapat kenaikan sebesar 5,58% dari tahun 2022 dimana jumlah kunjungan pada tahun 2022 sejumlah 136.361 menjadi 143.968 di tahun 2023. Hal ini salah satunya disebabkan oleh perbaikan kualitas pelayanan yang terus menerus dilakukan dan adanya pengembangan-pengembangan pelayanan diantaranya poliklinik sore.

f. Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Secara rinci sarana farmasi di Kota Pekalongan yang telah memenuhi standar disajikan dalam Tabel II-115 berikut.

Tabel II-115
Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Sarana Farmasi yang memenuhi standar	61	64	75	105	72
Sarana Farmasi yang dilakukan pengawasan	68	71	75	105	72
Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar	89,71	90,14	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

g. Persentase Balita Usia <6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Pemberian makanan bayi yang terbaik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif (usia 0-6 bulan), dengan ASI Eksklusif dan dilanjutkan sampai dengan usia 24 bulan. Sedangkan makanan pendamping ASI dapat diberikan sejak usia bayi 6 bulan. ASI, yang sangat bermanfaat bagi bayi, merupakan makanan yang sempurna dan terbaik karena mengandung unsur-unsur yang bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas, pada tahun 2024 presentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif adalah 77,54 persen meningkat 19,41% dibandingkan tahun 2023. Untuk terus meningkatkan persentase ini maka dilakukan sosialisasi dan kampanye pemberian ASI eksklusif di puskesmas dan posyandu di Kota Pekalongan menyadarkan para ibu-ibu. Presentase Balita (usia 0-6 bulan) yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 5 tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam Tabel II-116 berikut.

Tabel II-116
Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif	Cakupan (persen)
2020	4.524	2.416	53,40
2021	4.448	2.440	54,86
2022	4.513	2.620	58,05
2023	5.120	2.976	58,13
2024	1.991	1.544	77,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

h. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase balita gizi buruk di Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan, mulai 0,16% pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,30% di akhir tahun 2023, namun pada tahun 2024

turun menjadi 0,17%. Secara umum jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun juga mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan jumlah balita gizi buruk yang signifikan dari tahun 2020 sebanyak 35 kasus menjadi 63 kasus pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 32 kasus balita gizi buruk. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-117 berikut.

Tabel II-117
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk
2020	35	22.506	0,16
2021	38	21.584	0,18
2022	59	21.354	0,28
2023	63	21.218	0,30
2024	32	19.222	0,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

i. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Berikut kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (2020-2024) disajikan dalam Tabel II-118 berikut.

Tabel II-118
Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (persen)	CFR TB per 100.000 penduduk	CNR TB per 100.000 penduduk	HIV/AIDS	
					HIV	AIDS
2020	26,89	7,06	1,27	171,14	118	1
2021	12,33	2,56	3,14	170,45	112	27
2022	40	1,58	1,82	259,89	65	55
2023	22	4,35	4,86	310,73	79	62
2024	40,17	2,36	3,82	312,71	67	49

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

j. Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan / atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan daya saing Industri Rumah Tangga (IRT) atau yang sering dikenal dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan IRTP serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan

tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Upaya Dinas Kesehatan dalam pengawasan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan sampling terhadap produk olahan pangan industry rumah tangga. Secara rinci disajikan dalam Tabel II-119 berikut.

Tabel II-119
Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sample produk pangan olahan industry rumah tangga yang bebas dari cemaran (mikro biologi, fisika, kimia)	648	396	40	40	35
Jumlah sample produk pangan olahan produk rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan	654	447	40	40	36
Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	99,08	88,59	100	100	97,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

k. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) terdiri dari rumah makan / restoran, jasa boga / catering, penjaja makanan, depot air minum dan kantin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka upaya preventif dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melakukan pembinaan dan pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan untuk menjaga keamanan makanan yang beredar di masyarakat. Data rinci Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat disajikan dalam Tabel II-120 berikut.

Tabel II-120
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	609	639	662	603	749
Seluruh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	664	662	662	640	677
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	91,72	96,53	100	94,22	95,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

l. Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Jamkesmas / Jamkesda

Berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2021. Namun kembali menurun pada tahun 2022 sebanyak 21.810 orang dan 2023 sebanyak 21.360 orang.

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2023 adalah PBI APBN sebanyak 120.203 jiwa, menurun 0,73 persen jika dibandingkan dengan jumlah PBI APBN tahun 2022. Sedangkan jumlah penerima Jamkesda tahun 2023 sebanyak 80.803 jiwa, meningkat 10,05 persen dibandingkan jumlah penerima Jamkesda tahun 2022. Secara lengkap data penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024) disajikan dalam Tabel II-121 berikut.

Tabel II-121
Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Penerima Jamkesmas / Jamkesda di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Jamkesmas	Persentase Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda	Persentase Penerima Jamkesda
2020	307.150	22.160	88.685	28,87	70.307	22,89
2021	308.310	23.490	84.966	27,56	62.375	20,23
2022	309.742	21.810	119.751	38,66	47.813	15,44
2023	317.524	21.360	120.203	37,93	80.803	25,45
2024	321.095	21.160	116.985	36,77	86.323	26,88

Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

m. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Program Indonesia Sehat dilakukan melalui pendekatan keluarga, yang ditujukan untuk pencapaian keluarga sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat. Ada 12 Indikator Keluarga Sehat Menurut Kemenkes RI, yaitu:

- 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
- 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
- 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
- 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
- 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
- 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
- 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
- 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;

12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan Program Percepatan Indikator Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Dari hasil pendataan tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan bahwa angka IKS Kota Pekalongan masih sangat rendah. Angka IKS 2020 baru mencapai 0,17 persen mengalami sedikit peningkatan hingga tahun 2021 dengan angka IKS sebesar 0,18 persen. Peningkatan terus terjadi dari tahun 2022 sampai 2024 sebesar 0,28 persen, 0,31 persen dan 0,38 persen. Sedangkan angka ideal IKS sebesar 0,8 persen dari jumlah data. Secara rinci capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan dalam Tabel II-122 berikut.

Tabel II-122
Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Keluarga Sehat
2020	0,17
2021	0,18
2022	0,28
2023	0,31
2024	0,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

n. Rumah Tangga Sehat

Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga, terdiri dari persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI Eksklusif, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari serta tidak merokok di dalam rumah. Penerapan 10 indikator PHBS di tingkat rumah tangga sangat tergantung dengan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Sebab upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat secara berkelanjutan.

Cakupan rumah tangga sehat di Kota Pekalongan tahun 2024 meningkat cukup signifikan. Dari target 90 persen di tahun 2021, terealisasi 95,75 persen, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 dengan realisasi 98,65 persen. Terjadi penurunan pada tahun 2024 dengan realisasi 97,22 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-123 berikut.

Tabel II-123
Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Cakupan Rumah Tangga Sehat (persen)
2020	96,78
2021	95,75
2022	98,04
2023	98,65
2024	97,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, pengendalian banjir serta penataan ruang.

a. Jalan

Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik Pemerintah Pusat dan jalan milik Pemerintah Kota. Kurun waktu 2020-2024, kondisi jalan di Kota Pekalongan mengalami perubahan. Pada tahun 2020 sepanjang 9,420 Km dengan kondisi baik 67,40 persen, kondisi sedang 20,16 persen dan kondisi rusak 12,42 persen. Di tahun 2021, panjang jalan Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 96,42 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 3,58 persen. Pada tahun 2022 panjang jalan Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 100,00 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 0,00 persen dan pada tahun 2023 panjang jalan negara menjadi 10,210 Km dengan kondisi baik 31,24 persen, kondisi sedang 63,85 persen dan kondisi rusak 4,89 persen. Sedangkan pada tahun 2024 panjang jalan negara 10,240 km dengan kondisi baik 16,60 persen, kondisi sedang 68,61 persen dan kondisi rusak 11,24 persen.

Tabel II-124
Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jalan Negara						
	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2020	9,420	6,350	1,900	1,170	67,40	20,16	12,42
2021	10,240	9,874	0	0,366	96,42	0	3,58
2022	10,240	10,240	0	0	100,00	0	0
2023	10,210	3,190	6,520	0,50	31,24	63,85	4,89
2024	10,240	1,700	7,030	1,150	16,60	68,61	11,24

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DIY dan DPUPR Kota Pekalongan, 2025

Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2020 sampai 2021 tidak terdapat perubahan maupun penambahan ruas panjang jalan kota yaitu 153,41 km. Berdasarkan SK Walikota Pekalongan Nomor 600.1/0414 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dan Jembatan Di Kota Pekalongan mengubah total Panjang jalan menjadi 150,274 km. Jalan dalam kondisi baik perkotaan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 sepanjang 92,51 km. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-125 berikut.

Tabel II-125
Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jalan Kota						
	Panjang Jalan Kota (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2020	153,41	104,71	18,27	30,43	68,25	11,90	19,83
2021	153,41	96,37	27,25	29,79	62,82	17,77	19,42
2022	153,61	105,35	24,11	24,15	68,58	15,70	15,72
2023	150,27	118,60	4,86	26,81	78,92	3,24	17,84
2024	150,27	92,51	34,47	23,29	61,56	22,94	15,50

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2025

Dengan rincian kondisi ruas jalan sebagai berikut:

Tabel II-126
Data Dasar Prasarana Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2024

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kec. yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				Akses ke jalan N/P/K
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						Km	Km	Km	Km	
1	001	Argopuro	Pekl. Barat	0,171	5,00	0,171				N
2	002	Asem Binatur	Pekl. Barat	1,013	4,20-4,50	-	1,013			K
3	003	Bahagia	Pekl. Barat	0,792	5,00-10,00	0,600	0,192			N
4	004	Binagriya Raya	Pekl. Barat	0,965	10,00	0,600	0,265	0,100		K
5	005	Budi Bakti	Pekl. Timur	0,407	4,00	-	0,200	0,207		K
6	006	Dharma Bakti	Pekl. Barat	0,816	5,00	0,816				N
7	007	Dwikora	Pekl. Selatan	0,832	4,00	0,100	0,300	0,432		K
8	008	Irian	Pekl. Barat	0,649	6,00	0,349	0,300			K
9	009	Jawa	Pekl. Barat	0,700	5,00	0,700				N
10	010	Jaya Bakti	Pekl. Barat	0,270	5,00	-	0,170	0,100		K
11	011	Kalimantan	Pekl. Barat	0,578	5,00	0,578				N
12	012	Karya Bakti	Pekl. Barat	0,843	5,00	0,743		0,100		K
13	013	Kemakmuran	Pekl. Barat	0,308	7,50	0,108	0,200			K
14	014	KH. Ahmad Dahlan	Pekl. Barat	2,396	4,50-6,00	2,200	0,100	0,096		N

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kec. yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				Akses ke jalan N/P/K
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						Km	Km	Km	Km	
15	015	KH. Samanhuji	Pekl. Barat	1,446	4,50	1,446				N
16	017	Kurinci	Pekl. Barat	0,858	8,00	0,458	0,400			N
17	018	Lombo Batang	Pekl. Barat	0,270	4,50	0,100	0,100	0,070		K
18	019	Madura	Pekl. Barat	0,597	4,00-8,00	0,397	0,200			N
19	020	Majapahit	Pekl. Barat	0,280	12,00	0,280				N
20	021	Mataram	Pekl. Barat	0,191	12,00	-	0,191			N
21	025	Molek Permai	Pekl. Barat	0,826	4,50	-	0,400	0,426		K
22	027	Parkit/Merpati	Pekl. Barat	1,263	4,50	0,700	0,363	0,200		K
23	028	Pelita II	Pekl. Selatan	0,615	3,00-5,50	-	0,615			K
24	029	Pelita IV	Pekl. Selatan	1,341	4,50-12,50	0,300	1,041			K
25	030	Pembangunan	Pekl. Barat	0,223	5,00-6,00	0,123		0,100		N
26	031	Perintis Kemerdekaan	Pekl. Barat	1,480	5,50-13,00	0,600	0,780	0,100		N
27	032	Resimen 17	Pekl. Barat	0,144	9,00	0,100	0,044			N
28	033	Rinjani	Pekl. Barat	0,233	5,00	-	0,133	0,100		K
29	034	Angkatan 45	Pekl. Barat	0,317	7,00-13,50	-	0,317			N
30	036	Setia Bakti	Pekl. Barat	0,979	5,00	0,100	0,779	0,100		N
31	037	Singasari	Pekl. Barat	0,338	4,00	-	0,338			K
32	038	Slamet	Pekl. Barat	0,765	7,00	0,500	0,265			K
33	040	Sulawesi	Pekl. Barat	0,827	5,00	-	0,827			K
34	041	Sumatra	Pekl. Barat	0,802	4,80	-	0,802			N
35	042	Supriyadi	Pekl. Barat	1,252	5,00	1,252				K
36	043	Sutan Syahrir	Pekl. Barat	1,350	4,20-4,40	1,150	0,200			N
37	044	Tangkuban Perahu	Pekl. Barat	0,075	4,00	-			0,075	K
38	045	Teuku Umar	Pekl. Barat	0,759	4,50	0,659			0,100	N

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kec. yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				Akses ke jalan N/P/K
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						Km	Km	Km	Km	
39	046	Untung Suropati	Pekl. Barat	0,906	5,00	0,906				K
40	047	Urip Sumoharjo	Pekl. Barat	1,940	11,00-14,40	1,840	0,100			N
41	049	Yos Sudarso	Pekl. Utara	0,637	7,00	-	0,337	0,300		K
42	050	Yudha Bakti	Pekl. Barat	0,496	5,00	0,096	0,400			N
43	052	Ampera	Pekl. Selatan	1,945	4,50	1,945				K
44	053	H. Mochamad Chaeron	Pekl. Selatan	2,400	4,00-5,30	-	2,400			K
45	054	Gatot Subroto	Pekl. Selatan	0,782	11,00-17,50	-	0,782			K
46	055	Kapitan Pattimura	Pekl. Timur	1,520	4,50-6,50	0,600	0,700	0,220		N
47	056	Letjen Suprpto	Pekl. Selatan	0,947	6,00	0,947				K
48	057	Pelita I	Pekl. Selatan	0,863	4,50	-	0,863			K
49	058	Pelita III	Pekl. Selatan	0,868	4,00	0,700	0,168			K
50	059	Pelita V	Pekl. Selatan	2,400	4,50	-	2,200	0,200		K
51	060	Tritura	Pekl. Selatan	1,367	4,50	-	1,300	0,067		K
52	061	Aloon-Aloon	Pekl. Timur	0,151	14,00	0,151				K
53	062	P. Antasari	Pekl. Timur	0,620	4,50	-	0,620			K
54	063	A. Yani	Pekl. Timur	0,820	5,90-10,30	-	0,820			N
55	064	Bandung	Pekl. Timur	0,141	8,50-9,00	0,141				K
56	065	Blimbing	Pekl. Timur	0,730	6,70-7,70	0,530	0,100	0,100		K
57	066	Cempaka	Pekl. Timur	0,959	4,50-5,70	0,859		0,100		K
58	067	Dr. Koesoemah Atmadja	Pekl. Selatan	0,738	4,20-6,00	0,738				K
59	068	Hasanudin	Pekl. Timur	0,380	12,70	0,380				K
60	069	Hos Cokroaminoto	Pekl. Selatan	3,875	8,00	3,475	0,400			N
61	070	H. Agus Salim	Pekl. Timur	0,880	10,40	0,880				K

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kec. yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				Akses ke jalan N/P/K
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						Km	Km	Km	Km	
62	071	Ir. Sutami	Pekl. Timur	1,381	4,00	1,100	0,181	0,100		N
63	072	Jeruk	Pekl. Timur	0,295	6,00-7,00	0,295				K
64	073	Kenanga	Pekl. Timur	0,452	6,00	0,252		0,200		K
65	074	KH. Hasyim Ashari	Pekl. Timur	1,903	4,00-4,50	1,903				N
66	075	KH. Wahid Hasyim	Pekl. Timur	0,598	13,50	0,598				K
67	076	Ki Hajar Dewantoro	Pekl. Timur	0,592	4,00	0,592				N
68	077	Kintamani	Pekl. Timur	0,384	4,00	0,184	0,100	0,100		K
69	078	Mangga	Pekl. Timur	0,272	6,40-7,00	0,272				K
70	079	Manggis	Pekl. Timur	0,299	7,00-20,00	-		0,299		K
71	080	Maninjau	Pekl. Timur	0,417	5,00	0,200		0,217		K
72	081	Melati	Pekl. Timur	0,176	12,4-19,35	0,176				K
73	082	Nanas	Pekl. Timur	0,045	7,00-17,00	0,045				K
74	083	Nusantara	Pekl. Timur	0,336	8,00	0,336				K
75	084	Oto Iskandar di Nata	Pekl. Selatan	3,159	4,50	3,059		0,100		N
76	085	Patiunus	Pekl. Timur	0,501	9,00-24,00	-	0,501			K
77	086	Rambutan	Pekl. Timur	0,103	6,00	0,103				K
78	087	R.A. Kartini	Pekl. Timur	0,800	10,00-11,00	0,700	0,100			N
79	088	Salak	Pekl. Timur	0,301	8,50	0,301				K
80	089	Semarang	Pekl. Timur	0,390	6,00	0,390				K
81	090	Seruni	Pekl. Timur	0,807	7,00	0,707		0,100		K
82	091	Singkarak	Pekl. Timur	0,158	4,00	0,158				K
83	092	Sorogenen	Pekl. Timur	0,169	5,00	-		0,169		K
84	093	Sultan Agung	Pekl. Timur	0,610	12,00-13,00	0,610				K
85	094	Surabaya	Pekl. Timur	0,209	6,00	0,209				K

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kec. yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				Akses ke jalan N/P/K
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						Km	Km	Km	Km	
86	095	Truntum	Pekl. Utara	1,334	6,00	1,000		0,334		K
87	096	Tentara Pelajar	Pekl. Utara	0,649	7,00-11,00	0,649				K
88	097	Terate	Pekl. Timur	0,970	5,00-6,00	0,970				K
89	098	Toba	Pekl. Timur	0,575	4,00	-	0,575			K
90	099	Tondano	Pekl. Timur	0,757	5,30-5,70	0,757				K
91	100	Trikora	Pekl. Selatan	0,826	4,00-7,00	0,826				N
92	101	Barito	Pekl. Utara	0,160	6,30-8,00	0,060		0,100		K
93	102	Cendrawasih	Pekl. Utara	0,240	6,30-6,90	0,240				K
94	103	Damar Raya	Pekl. Utara	0,225	4,00	-			0,225	K
95	104	Indragiri	Pekl. Utara	0,303	4,50	0,100	0,203			K
96	105	Jetayu	Pekl. Utara	0,494	6,50-13,40	0,394	0,100			K
97	106	Jlamprang	Pekl. Utara	2,180	5,00-8,50	2,180				K
98	108	Kepodang	Pekl. Utara	0,215	4,00	-			0,215	K
99	109	Ki Mangun Sarkoro	Pekl. Timur	2,251	7,00	2,151		0,100		K
100	110	Kusumabangsana	Pekl. Utara	2,272	7,30-8,00	2,272				K
101	111	Kutilang	Pekl. Utara	0,316	5,50-9,20	0,116	0,100	0,100		K
102	112	Labuan	Pekl. Utara	2,979	4,00-4,50	-	2,979			K
103	113	Labuan I	Pekl. Utara	1,057	4,00-4,50	0,600		0,100	0,357	K
104	114	Joko Tingkir	Pekl. Utara	0,681	4,00	0,281	0,400			K
105	116	Manunggal	Pekl. Utara	0,381	5,00	-	0,381			K
106	117	Merak	Pekl. Utara	0,375	5,50	-	0,275	0,100		K
107	118	Merpati Selatan	Pekl. Utara	0,078	11,70	0,078				K
108	119	Merpati Utara	Pekl. Utara	0,088	9,60	0,088				K
109	120	Pantaidewi	Pekl. Utara	0,779	4,50	0,779				K

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kec. yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				Akses ke jalan N/P/K
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						Km	Km	Km	Km	
110	121	Pantaisari	Pekl. Utara	1,099	5,50-6,50	1,099				K
111	122	Pantaisari I	Pekl. Utara	0,546	5,00	0,400		0,146		K
112	123	Pantaisari II	Pekl. Utara	0,565	5,00	0,565				K
113	124	Patriot	Pekl. Utara	0,643	6,00	0,643				K
114	125	Pelabuhan Ratu	Pekl. Utara	0,832	4,00-6,00	0,832				K
115	126	Pramuka	Pekl. Utara	1,183	4,50	0,900		0,200	0,083	K
116	127	Progo	Pekl. Utara	0,750	9,50	0,650		0,100		K
117	128	Raden Salih	Pekl. Utara	0,156	7,60-16,50	-	0,056	0,100		K
118	129	Rajawali Barat	Pekl. Utara	0,156	4,00	-		0,156		K
119	130	Rajawali Selatan	Pekl. Utara	0,156	4,00	-			0,156	K
120	131	Rajawali Timur	Pekl. Utara	0,138	4,00-4,50	-	0,100	0,038		K
121	132	Rajawali Utara	Pekl. Utara	0,253	4,00	-	0,100	0,153		K
122	133	Samudra	Pekl. Utara	2,899	5,00	2,200	0,699			K
123	134	Samudra Pasai	Pekl. Utara	0,395	6,00	0,395				K
124	135	Selat Karimata	Pekl. Utara	1,268	4,00-4,50	0,600	0,168	0,500		K
125	136	Selat Lombok	Pekl. Utara	0,408	4,00	-	0,300	0,108		K
126	137	Selat Selayar	Pekl. Utara	0,406	4,00	-	0,406			K
127	138	Serayu	Pekl. Utara	0,125	5,60	0,100	0,025			K
128	139	Slambaran Raya	Pekl. Utara	0,795	4,50-7,00	-	0,795			K
129	140	Veteran	Pekl. Utara	0,857	12,00	0,857				K
130	141	Angkatan 66	Pekl. Barat	1,020	5,00	1,020				K
131	142	KH. Hasyim	Pekl. Selatan	0,813	4,00	-	0,813			K
132	143	Sekembang	Pekl. Barat	0,767	4,00	0,467		0,300		N
133	144	Sengon	Pekl. Barat	0,330	4,00	0,330				K

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kec. yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				Akses ke jalan N/P/K
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						Km	Km	Km	Km	
134	145	Amd Kramatsari	Pekl. Barat	0,745	4,50	0,400		0,345		K
135	146	Terminal	Pekl. Timur	0,462	7,00-14,00	0,462				N
136	147	Sidomukti Raya	Pekl. Utara	0,567	4,00-10,00	0,367		0,200		K
137	148	Yudhistira	Pekl. Utara	0,453	4,00	0,453				K
138	149	Pantaisari III	Pekl. Utara	0,261	5,00	0,161		0,100		K
139	150	KH. Bukhori	Pekl. Utara	1,011	4,5-5,00	1,011				K
140	151	Syubah Asa	Pekl. Barat	0,251	4,00	0,251				N
141	153	Permata	Pekl. Barat	0,287	4,50	0,287				N
142	154	KH. Saelan	Pekl. Barat	0,536	4,00	0,536				K
143	155	KH. Syafii	Pekl. Selatan	0,621	4,00	0,521		0,100		K
144	156	Ki Surontoko	Pekl. Timur	0,760	4,00	0,460	0,300			N
145	158	Kalisari	Pekl. Timur	1,676	4,00	-			2,029	N
146	159	Kasmoeri	Pekl. Timur	3,360	4,00	1,273	0,100		#REF!	K
147	160	Umar Saleh Al-Jufri	Pekl. Utara	2,051	4,00	0,851			1,200	K
148	161	Banger Hilir	Pekl. Utara	2,114	4,00	1,714	0,100	0,300		K
149	163	Pesona Raya	Pekl. Barat	0,390	9,00	0,100		0,290		K
150	164	Hayam Wuruk	Pekl. Timur	0,850	14,00	0,850				N
151	165	Dr. Cipto	Pekl. Timur	0,558	14,00	0,558				K
152	166	Dr. Wahidin	Pekl. Timur	1,250	13,50	1,150		0,100		N
153	167	P. Antasari I	Pekl. Timur	0,376	4,00-6,00	0,276		0,100		K
154	168	Labuan III	Pekl. Utara	0,800	4,00	-	0,200		0,600	K
155	169	Limas Raya	Pekl. Utara	0,365	8,00-12,50	-	0,365			K
156	184	Rasamala Raya	Pekl. Utara	0,653	4,00	-	0,653			K
157	185	Binagriya I	Pekl. Barat	0,295	6,00	0,295				K

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kec. yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				Akses ke jalan N/P/K
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						Km	Km	Km	Km	
158	188	Anggrek	Pekl. Barat	0,119	5,00	0,119				K
159	189	Tunas	Pekl. Barat	0,417	4,00-5,00	0,100	0,317			N
160	190	Palapa Raya	Pekl. Utara	0,364	10,00	0,264		0,100		K
161	191	Darkat	Pekl. Utara	0,205	4,0-4,5	0,205				K
162	192	Teknopolita n Raya	Pekl. Selatan	0,341	11,00	-		0,341		K
163	193	Teknopolita n I	Pekl. Selatan	0,307	6,00	-	0,100	0,207		K
164	194	Teknopolita n II	Pekl. Selatan	0,399	6,00	0,399				K
165	195	KH. Siroj	Pekl. Barat	0,264	5,00	0,264				K
166	196	KH. Muhamma d Ilyas	Pekl. Barat	0,070	6,00	-	0,070			K
167	199	Boyongsari	Pekl. Utara	1,016	4,00	0,516		0,500		K
168	200	Singasari I	Pekl. Barat	0,283	4,00	-	0,283			N
169	201	Kramatsari I	Pekl. Barat	0,287	4,00	0,287				N
170	202	Kramatsari II	Pekl. Barat	0,301	4,00	0,301				N
171	203	Kramatsari III	Pekl. Barat	0,331	4,00	0,331				N
172	204	Bumirejo Damai Raya I	Pekl. Barat	1,100	6,00	0,600			0,500	K
173	205	Bumirejo Damai Raya II	Pekl. Barat	1,076	6,00	-			1,076	K
174	206	Jenggala	Pekl. Barat	0,439	8,00	0,439				K
175	207	Kartosuro	Pekl. Barat	0,218	4,00	0,218				K
176	208	Achmad Alf Arslan Djunaid	Pekl. Selatan	3,360	15,00	3,360				N
177	209	R. Soempeno	Pekl. Selatan	1,778	5,00	0,200	0,500	0,700	0,378	K
178	213	Darkat I	Pekl. Utara	0,113	4,0-4,5	0,113				K
179	214	KH. Syabrawi	Pekl. Selatan	0,573	4,00-6,00	0,573				K

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kec. yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				Akses ke jalan N/P/K
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						Km	Km	Km	Km	
180	215	Imam Bonjol	Pekl. Barat	0,299	15,00	-		0,299		N
181	216	P. Diponegoro	Pekl. Utara	0,758	13,00	0,200		0,558		K
182	217	Wr. Supratman	Pekl. Utara	2,870	13,00	2,870				K
183	218	Jaksa Agung R. Soeprapto	Pekl. Barat	0,130	12,00	0,130				K
184	219	Industri	Pekl. Timur	0,553	5,00	0,253	0,100		0,200	K
185	220	Randu Jajar	Pekl. Barat	0,794	5,00	0,081				K
186	221	H. Bahtiar Amin	Pekl. Barat	0,913	4,00	0,513		0,400		K
187	222	H. Achmad Djunaid	Pekl. Selatan	0,943	3,00-5,50	0,943				K
188	223	Abdullah Hamid Al Hinduan	Pekl. Timur	0,309	6,00	0,300		0,009		K
189	224	KH. Abdul Ghaffar Ismail	Pekl. Timur	0,172	8,50-9,00	0,172				K
190	225	Matana	Pekl. Timur	0,379	4,00	0,279		0,100		K
191	226	Sriwedari	Pekl. Timur	1,270	5,00-6,00	0,200		0,600	0,470	K
192	227	Sengkuyung	Pekl. Timur	0,363	3,50	-	0,300	0,063		K
193	228	Kyai Ageng Pekalongan	Pekl. Selatan	1,030	4,00	0,200		0,100	0,730	K
A. Total Panjang Jalan (Km)				150,2740		92,5130	34,4700	12,550	10,741	
B. Presentase Jalan (%)						61,56%	22,94%	8,35%	7,15%	

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2025

b. Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2020-2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 26,58 persen. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-127 berikut.

Tabel II-127
Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Jaringan Irigasi (persen)	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2025

Senada dengan rasio jaringan irigasi, luas irigasi yang tercatat dalam kondisi baik pada tahun 2020 66,14 persen, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 79,62 persen, stagnan hingga tahun 2022. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 82,57 persen, meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 83,39 persen. sebagaimana disajikan dalam Tabel II-128 berikut.

Tabel II-128
Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Luas irigasi kota dalam kondisi baik (persen)	66,14	79,62	79,62	82,57	83,39

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2025

Pantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan selama periode 2020-2024, pemanfaatan sempadan sungai sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi maupun tempat tinggal tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 25 persen. Perkembangan kondisi sempadan sungai yang dipakai bangunan liar disajikan dalam Tabel II-129 berikut.

Tabel II-129
Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai
Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (persen)	25	25	25	25	25

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2025

c. Drainase

Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

- 1) Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Bremini, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan
- 2) Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama
- 3) Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase terdiri dari 8 buah yaitu Sub sistem Bremini, Sub sistem Bandengan, Sub sistem Pabean, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di Kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut: Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur dan Saluran Sekunder Podo Timur. Secara keseluruhan, terdapat 53 saluran drainase yang terletak di jalan utama Kota dengan konstruksi batu belah dan saluran tanah, jenis saluran terbuka, tertutup dan gorong-gorong, dengan kondisi baik sepanjang 180.841,14 meter, kondisi sedang sepanjang 62.772,98 meter dan kondisi rusak sepanjang 16.663,87 meter.

Tabel II-130
Data Saluran Drainase Sekunder di Wilayah Kota Pekalongan
Tahun 2024

Kondisi	Panjang (meter)	Persentase
Baik	180.841,14	69,48 %
Sedang	62.772,98	24,12 %
Rusak	16.663,87	6,40 %
Total	260.277,98	100.00 %

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2025

d. Pengendalian Banjir

Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-8 persen. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan saluran drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Data genangan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-131 berikut.

Tabel II-131
Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Luas Wilayah Kota Pekalongan (Ha)	Luas Genangan (Ha)	Persentase
2020	4.525	1.892,88	41,83
2021	4.642	1.730	37,27
2022	4.642	980,13	21,11
2023	4.642	880,83	18,97
2024	4.642	379,02	8,17

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, <https://seksama.pekalongankota.go.id/>, 2025

Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut:

- Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut
- Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5 persen
- Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa
- Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga
- Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir

Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul revetment yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan

telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain berupa penguatan revetment pantai yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2015. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan peninggian serta perkuatan.

Selain oleh Pemerintah Kota Pekalongan, peninggian dan perkuatan revetment juga dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, saat ini sedang mengerjakan pembangunan tanggul pantai di sisi timur Kali Loji sampai dengan muara Kali Gabus. Upaya yang masih belum sempurna sebagai akibat adanya industri docking dan galangan tersebut, nantinya diharapkan akan mengatasi banjir dan rob di wilayah Panjang Wetan, Krapyak, dan Degayu. Selain itu, BBWS Pemali Juana juga sedang meninggikan tanggul di utara Bandengan. Tanggul yang selesai pada tahun 2019 tersebut saat ini sudah mulai limpas pada saat terjadi pasang naik tinggi. Dengan adanya peninggian tersebut, diharapkan akan mengurangi dampak rob di area Pabean, Bandengan, dan Kandang Panjang.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas PUSDATARU juga melakukan peninggian dan perkuatan revetment pantai di sisi barat Muara Sungai Loji sampai dengan Krematorium serta perkuatan parapet di Jl. Kunti Utara. Upaya ini, khususnya perkuatan parapet di Jl. Kunti Utara masih menyisakan kekosongan sekira 100 meter antara pintu gerbang PIM (Pusat Informasi Mangrove) sampai dengan krematorium. Area ini rawan menjadi limpasan air laut pada saat terjadi pasang naik yang tinggi.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan tersebut, maka pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan mempunyai pekerjaan bersama yang harus dilakukan di waktu-waktu yang akan datang, yaitu:

1. Menghitung kembali kebutuhan pompa dan kolam-kolam retensi ataupun area *storage* (cadangan penempatan air) yang lebih memadai.
2. Memelihara tanggul secara bersama-sama, antara lain:
 - a. Masyarakat harus menghindari dan mencegah aktivitas-aktivitas yang berpotensi merusak tanggul;
 - b. Masyarakat ikut aktif melaporkan kepada Pemerintah jika terjadi hal-hal yang berpotensi terhadap terjadinya kerusakan badan tanggul;
 - c. Pemerintah Kota Pekalongan harus mempunyai alokasi sumber daya yang cukup untuk operasional dan pemeliharaan tanggul;
3. Membangun stasiun pompa secara lebih memadai karena ketinggian sebagian wilayah sudah berada di bawah level permukaan air laut.
4. Membangun, memperbaiki dan memelihara sistem drainase agar berfungsi optimal dengan menghubungkan ke drainase-drainase primer ataupun *long storage* yang ada.
5. Masyarakat ikut menjaga dan memelihara kebersihan drainase dari sampah yang akan mengganggu aliran air ataupun potensi mengganggu operasionalisasi pompa.
6. Melanjutkan bangunan pengaman pantai di sebelah barat krematorium untuk melindungi kawasan konservasi mangrove.

e. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Sehingga dalam penataan ruang terkandung

proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dibawah bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan pemelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah melakukan revisi melalui Perda Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi:

- a) Peningkatan peran kota sebagai PKW;
- b) Peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
- c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
- d) Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
- e) Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
- f) Pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
- g) Pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang religius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan
- h) Pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, rencana pola ruang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, yang terdiri dari Kawasan lindung setempat; Kawasan cagar budaya; ruang terbuka hijau RTH kota dan kawasan ekosistem mangrove, serta kawasan budidaya, yang terdiri dari Kawasan pertanian; Kawasan permukiman; Kawasan peruntukan industri; Kawasan pariwisata dan Kawasan pertahanan keamanan. Pengawasan perlu dilakukan sejak ijin pemanfaatan ruang sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang telah direncanakan dalam RTRW serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mendukung operasional RTRW Kota dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, Kota Pekalongan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pada tahun 2014 Kota Pekalongan telah Menyusun RDTR untuk 4 (empat) kecamatan dan sudah mendapat persetujuan dari DPRD namun saat mengajukan persetujuan substansi ke Provinsi bersamaan dengan mulai direvisinya RTRW Kota Pekalongan tahun 2009-2029. Sehingga proses penyusunan RDTR dihentikan, menunggu hasil revisi RTRW. Pada tahun 2020 telah tersusun revisi RTRW Kota Pekalongan yang disahkan dalam Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Setelah adanya revisi RTRW, maka Dokumen RDTR disusun mulai tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, yaitu RDTR untuk 4 kecamatan di Kota Pekalongan. Pada tahun 2023 dilanjutkan penyusunan dokumen dan diharapkan selesai dan disahkan menjadi Peraturan Walikota pada tahun 2024.

Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan Wali Kota nomor 21 Tahun 2024 tentang **Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan Tahun 2024-2044** sebagai instrumen penting dalam pembangunan di suatu wilayah. Penetapan ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pembangunan yang lebih tertib, terarah, dan berkelanjutan. Dengan ditetapkannya RDTR, memberikan kemudahan dalam investasi serta sebagai alat pengendali pembangunan sehingga dapat terwujudnya tertib tata ruang kota. Investasi dapat tumbuh lebih cepat dan pembangunan dapat dikendalikan sesuai rencana. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendukung terwujudnya kota yang lebih tertata, berdaya saing, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Capaian indikator kinerja Urusan Penataan Ruang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (tahun 2020-2024) disajikan dalam Tabel II-132.

Tabel II-132
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (persen)	0,17	1,97	n/a	n/a	n/a
2.	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	-	-	16,95	17,34	17,38
3.	Ketaatan terhadap RTRW (persen)	98	99	99	99	99,45

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2025

Capaian indikator kinerja urusan Penataan Ruang terdiri dari 3 (tiga) indikator, sebagai berikut: Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan nilai fluktuatif sepanjang tahun 2020-2024 dari 0,17 pada tahun 2020 menjadi 1,97 pada tahun 2021. Capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan yang menandakan makin besarnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan bangunan Gedung dan pengurusan perijinan, terutama dalam izin mendirikan bangunan/IMB serta peningkatan dalam pengawasan bangunan Gedung oleh perangkat daerah terkait. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) (halaman 101) telah mengubah ketentuan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUGB) pada Pasal 7 yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan

Gedung (IMB). Perubahan tersebut menjadikan terminologi IMB sebagai persyaratan yang harus dimiliki sebelum seseorang melaksanakan konstruksi Bangunan Gedung tidak ada lagi. Sebagai penggantinya, UU Cipta Kerja mempersyaratkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi setiap orang yang hendak melakukan konstruksi Bangunan Gedung. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka telah dilakukan update pendataan bangunan yang wajib ber-PBG dengan hasil capaian, bangunan yang ber-PBG sampai tahun 2022 sejumlah 15.095 sedangkan untuk jumlah keseluruhan bangunan sejumlah 89.669. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang cenderung meningkat sepanjang 2020-2024, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan meningkatnya pengawasan dari Perangkat Daerah terkait dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam hal pembinaan pengembangan jasa konstruksi, telah dilaksanakan beberapa pelatihan dan sertifikasi ketrampilan teknis bagi tenaga konstruksi. Adapun jumlah penyedia jasa konstruksi di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi sebagai berikut:

Tabel II-133
Perkembangan Jasa Konstruksi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa Konstruksi	147	175	161	156	147

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR). Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha; Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Selain penerbitan KKPR, pelaksanaan pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR). Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. SPPR berbentuk dokumen yang berisi sinkronisasi program perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan, baik jangka menengah (5 tahun) dan jangka tahunan.

Selanjutnya untuk kesesuaian pemanfaatan ruang disajikan dalam Tabel II-134 berikut.

Tabel II-134
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 9/2020 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
A	Kawasan Lindung			

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 9/2020 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
1.	Kawasan Perlindungan Setempat			
	a. Sempadan Sungai	±24 Ha	5,5	18
	b. Sempadan Pantai	±26 Ha	1	25
	c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	±15 Ha	0	15
2.	Kawasan Cagar Budaya	9 Ha	0	9
3.	RTH Kota (Publik)	335 Ha	8	327
4.	Kawasan Ekosistem Mangrove	88 Ha	0	88
B	Kawasan Budidaya			
1.	Kawasan Pertanian	521 Ha	11	510
2.	Kawasan Perikanan			
	a. Kawasan Perikanan Tangkap	38 Ha	0	38
	b. Kawasan Perikanan Budidaya	173 Ha	0	173
3.	Kawasan Perumahan	2.430 Ha	0	2430
4.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	386 Ha	0	386
5.	Kawasan Perkantoran	51 Ha	0	51
6.	Kawasan Peribadatan	10 Ha	0	10
7.	Kawasan Pendidikan	94 Ha	0	94
8.	Kawasan Kesehatan	16 Ha	0	16
9.	Kawasan Olah raga	6 Ha	0	6
10.	Kawasan Transportasi	9 Ha	0	9
11.	Kawasan Peruntukan Industri	4 Ha	0	4
12.	Kawasan Pariwisata Alam	189 Ha	0	189
13.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	11 Ha	0	11
	Luas Total (Ha)	7 Ha	0	7
		4.443 Ha	25	4.418

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2025

Dalam penataan ruang, setelah adanya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang maka perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pengendalian pemanfaatan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang dan dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Berdasarkan hasil penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang, kesesuaian perwujudan struktur ruang Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2023 sebesar 73,20% (belum terwujud) sedangkan untuk kesesuaian perwujudan pola ruang Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2023 sebesar 89% (sudah terwujud).

Pengendalian pemanfaatan ruang lainnya terkait insentif dan disinsentif, pemberian sanksi dan penyelesaian sengketa, beberapa telah dilakukan di Kota Pekalongan. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang telah dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada Perda RTRW Kota Pekalongan, yaitu pemberiang sanksi administratif. Sedangkan untuk pemberian insentif dan disinsentif belum diberlakukan di Kota Pekalongan, walaupun secara aturan penentuan insentif dan disinsentif ini telah termuat dalam RTRW Kota Pekalongan. Namun perlu adanya perangkat hukum operasional dalam pelaksanaannya.

f. Air Minum

Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun ke tahun mengalami fluktuatif, Hal tersebut disebabkan karena adanya imigrasi atau pemasangan baru / pelanggan baru pada PDAM maupun PAMSIMAS maupun sebaliknya. Serta ada juga yang beralih ke sumur pribadi (sumur dangkal).

Tabel II-135
Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Bersih (jiwa)	264.330	267.880	207.245	168.030	106.110
Jumlah Penduduk (jiwa)	307.150	308.310	309.742	317.524	318.180
Persentase Penduduk yang Terlayani Air Bersih	86,06	86,89	66,90	52,91	33,34

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan (diolah), 2025

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pemanfaat air bersih yang diakses secara aman (akses melalui perpipaan) belum optimal dan lebih condong menurun setiap tahun. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, faktor pengali jiwa yang awalnya 1 SR melayani 5 jiwa berubah menjadi 1 SR melayani 4,03 Jiwa (hasil audit BPKP atas kinerja Perumda Tirtayasa tahun 2023), faktor ekonomi (masyarakat berpenghasilan rendah), Kota Pekalongan belum memiliki sumber air baku (air permukaan) sendiri, maupun secara infrastruktur jaringan perpipaan yang belum memadai.

Kota Pekalongan pada saat ini konsentrasi untuk mengatasi penurunan permukaan tanah yang turun dari tahun ke tahun, rata-rata penurunan permukaan tanah di Kota Pekalongan sebesar 8cm-10cm (sumber : data Bapperida), dan salah satu faktor penurunan tersebut yaitu pemakaian air bawah tanah (ABT) yang berlebihan / eksploitasi ABT, oleh sebab itu Kota Pekalongan terus mendorong masyarakat agar beralih dari pemakaian ABT (PAMSIMAS) ke pemakaian air permukaan (PDAM).

Untuk memenuhi kebutuhan Kota Pekalongan, PDAM memiliki beberapa sumber air yang didistribusikan ke Kota Pekalongan yang salah satunya yaitu SPAM Regional Petanglong yang dibagi menjadi 2 Tahap (Jambangan, dan Kaliboyo), Kota Pekalongan dalam hal ini PDAM sudah berkontrak dengan Perusahaan Daerah Tirta Utama dan mendapatkan 150 ltr/dtk pada tahap 1, dan masih memiliki idle 10 lt/dtk, oleh karena itu diharapkan pada tahun 2024 idle tersebut dapat digunakan.

Sejalan dengan upaya pencapaian indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan pada Rankhir RPJPD 2025-2045 yang berupa Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, maka dapat dilihat kondisi persentase akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kota

Pekalongan. Pada tahun 2023, Jumlah rumah tangga dengan akses air siap minum Jaringan Perpipaan PDAM yang telah aman atau diuji sesuai Permenkes pada SR atau sampel setiap Jaringan Distribusi Bagi (JDB)/ Jaringan Distribusi Langsung (JDL) sebesar 7,2%.

g. Jamban Layak (Sanitasi Dasar)

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal.

Dinas Kesehatan bersama OPD terkait melakukan pendataan sanitasi dasar yaitu fasilitas sanitasi yang digunakan dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah penggunaan jenis kloset leher angsa.

Tabel II-136
Rasio Jamban Layak di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Jamban Layak	59.129	68.276	64.489	64.489	102.628
Jumlah Rumah yang didata	59.551	68.489	64.489	64.489	103.476
Rasio Rumah Bersanitasi Dasar	99,29	99,69	100,00	100	99.18

Sumber: Dinkes Kota Pekalongan, 2025

Jika dilihat pada tabel tersebut, perkembangan sanitasi dasar di Kota Pekalongan sudah sangat baik, yaitu 99,18 persen.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah Layak Huni (RLH), salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Tahun 201-2022 rasio rumah tidak layak huni semakin menurun yaitu dari 3,11 persen menjadi 2,10 persen. Hal tersebut berarti bahwa perkembangan RLH di Kota Pekalongan semakin membaik atau bertambah seiring dengan berkurangnya RTLH. Pada tahun. Perkembangan RTLH dan RLH di Kota Pekalongan pada tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel II-137 berikut.

Tabel II-137
Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (persen)	Jumlah (unit)	Rasio (persen)
2020	76.603	1.966	2,57	74.637	97,43
2021	73.357	1.585	2,17	71.772	97,83
2022*	60.815	1.280	2,10	59.535	97,90

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (persen)	Jumlah (unit)	Rasio (persen)
2023*	62.100	24.094	38,80	38.006	61,19
2024*	68.699	18.727	27,26	49.972	72,74

* Hasil sementara pendataan lengkap rumah (Omahe Ndewe)

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2025

b. Pengguna Listrik

Pelanggan listrik di Kota Pekalongan dari tahun 2020-2025 terus mengalami peningkatan. Persentase pengguna listrik mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 sebesar 113,07 persen, dan angka tersebut naik menjadi 113,29 persen pada tahun 2021 lalu turun menjadi 113,25 pada tahun 2022. Namun persentase pengguna listrik meningkat cukup pesat di tahun 2023 menjadi 130,94 persen dan naik kembali menjadi 131,55 persen di tahun 2024. Persentase pengguna listrik yang mencapai di atas 100 persen disebabkan adanya rumah tangga yang memiliki sambungan listrik lebih dari 1 sambungan listrik.

Tabel II-138
Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2020	95.313	84.296	113,07
2021	97.567	86.121	113,29
2022	99.388	87.758	113,25
2023	101.186	77.275	130,94
2024	103.250	78.488	131,55

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2025 (diolah), 2025

c. Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase kawasan permukiman kumuh yang dimaksud dalam indikator ini adalah perbandingan antara sisa kawasan kumuh berdasarkan luas kawasan kumuh dalam SK Wali Kota Pekalongan Tahun 2014 (yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2017) dibandingkan dengan luas kota Pekalongan.

Berdasarkan penetapan SK Wali Kota Tahun 2014 dan verifikasi di Tahun 2017, Luas kawasan kumuh adalah sebesar 195,59 hektar. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Pekalongan melalui berbagai program dan kegiatan telah menangani kekumuhan pada kawasan tersebut. Luas kawasan yang tertangani sampai dengan Tahun 2024 telah mencapai 288,67 hektar.

Merujuk data tersebut, maka sisa luasan kawasan kumuh pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 210,10 hektar. Berikut rincian penanganan kawasan kumuh sejak tahun 2020-2024.

Tabel II-139
Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2024

No	Nama Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Luas Pengurangan Kumuh (Ha)					Total Penanganan Sd 2024 (Ha)	Sisa Kumuh Sd 2024 (Ha)
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Medono	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0.94	0.00
2	Podosugih	12,21	0,00	2,70	0,00	1,27	0,00	3.97	8.24
3	Tirto	33,98	0,00	16,99	3,44	2,81	1,196	24.44	9.54
4	Pringrejo	52,40	0,00	30,78	3,80	3,03	1,514	39.12	13.28
5	Bendan Kergon	3,10	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0.72	2.38
6	Pasirkratonkrat	85,98	0,00	2,71	17,85	4,80	2,712	28.07	57.91
7	Sapuro Kebulen	10,01	0,00	2,51	2,66	0,00	0,503	5.67	4.34
8	Jenggot	11,18	0,00	5,48	1,52	1,56	0,00	8.56	2.62
9	Kuripan Yosorejo	9,85	0,00	3,17	3,25	3,43	0,00	9.85	0.00
10	Sokoduwet	5,49	0,00	1,37	1,39	0,00	0,00	2.76	2.73
11	Kuripan Kertoharjo	4,64	0,00	1,42	1,56	1,66	0,00	4.64	0.00
12	Buaran Kradenan	4,54	0,00	1,30	1,40	0,00	0,00	2.70	1.84
13	Banyurip	11,56	0,00	3,35	3,54	2,29	0,00	9.18	2.38
14	Klego	9,61	0,00	0,00	3,39	2,44	0,00	5.83	3.78
15	Poncol	18,64	0,00	1,79	1,62	1,66	0,871	5.94	12.70
16	Gamer	3,05	0,00	0,00	1,29	0,95	0,00	2.24	0.81
17	Kauman	13,73	0,00	0,00	2,96	1,25	0,695	4.90	8.83
18	Noyontaansari	7,36	0,00	0,00	0,64	6,72	0,00	7.36	0.00
19	Kali Baros	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,983	0.98	2.90
20	Setono	3,03	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	1.86	1.17
21	Bandengan	29,16	0,00	9,03	3,39	4,61	2,941	19.98	9.18
22	Degayu	27,44	0,00	2,25	5,12	4,03	0,00	11.40	16.04
23	Kandangpanjan	2,95	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1.10	1.85
24	Panjang Wetan	59,69	1,69	25,73	3,34	1,57	3,000	35.33	24.36
25	Panjang Baru	34,65	0,00	10,31	12,37	0,91	0,00	23.59	11.06
26	Padukuhan Kraton	24,22	0,00	0,70	3,52	4,80	3,031	12.05	12.17
27	Krapyak	15,48	0,45	15,03	0,00	0,00	0,00	15.48	0.00
		498,77	2,14	136,62	79,91	52,55	17,45	288,67	210,10

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan penetapan SK Wali Kota Nomor 600.1.14/0336 Tahun 2024 yang menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan

Permukiman Kumuh. Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Pekalongan yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi sejumlah 22 (Dua Puluh Dua) lokasi, di 4 (Empat) Kecamatan, dengan luas total sebesar 143,769 hektar. Dimana dari lokasi kumuh tersebut pada tahun 2024 telah dilakukan penanganan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-140
Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2024

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh Luas (Ha)	Sisa Kekumuhan		
							Nilai	Tingkat		Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
1	Kawasan Bendan Kergon 1,88 Ha	Pemerintah Kota	Rt003-Rw011	Bendan Kergon	Pekalongan Barat	1.0923	20	Kumuh Ringan	0.000	1.0923	20	Kumuh Ringan
2			Rt004-Rw018	Bendan Kergon	Pekalongan Barat	0.5443	20	Kumuh Ringan	0.000	0.5443	20	Kumuh Ringan
3			Rt006-Rw018	Bendan Kergon	Pekalongan Barat	0.2468	18	Kumuh Ringan	0.000	0.2468	18	Kumuh Ringan
Jumlah						1.8835			0.000	1.8835		
4	Kawasan Pabean 50,83 Ha	Pemerintah Pusat	Rt001- Rw001	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.2705	27	Kumuh Ringan	0.000	0.2705	27	Kumuh Ringan
5			Rt001- Rw002	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.7236	18	Kumuh Ringan	0.000	0.7236	18	Kumuh Ringan
6			Rt001- Rw003	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.7489	45	Kumuh Sedang	0.000	0.7489	45	Kumuh Sedang
7			Rt001- Rw005	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.6813	36	Kumuh Ringan	0.000	0.6813	36	Kumuh Ringan
8			Rt001- Rw007	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	1.9208	29	Kumuh Ringan	0.000	1.9208	29	Kumuh Ringan
9			Rt001- Rw008	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.7718	19	Kumuh Ringan	0.000	0.7718	19	Kumuh Ringan
10			Rt001- Rw009	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	1.0863	19	Kumuh Ringan	0.000	1.0863	19	Kumuh Ringan
11			Rt001- Rw010	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.4440	24	Kumuh Ringan	0.000	0.4440	24	Kumuh Ringan
12			Rt001- Rw011	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.7783	30	Kumuh Ringan	0.000	0.7783	30	Kumuh Ringan
13			Rt001- Rw012	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.4367	22	Kumuh Ringan	0.000	0.4367	22	Kumuh Ringan
14			Rt001- Rw013	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.6873	21	Kumuh Ringan	0.000	0.6873	21	Kumuh Ringan

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh Luas (Ha)	Sisa Kekumuhan		
							Nilai	Tingkat		Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
15			Rt001- Rw014	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.3801	27	Kumuh Ringan	0.000	0.3801	27	Kumuh Ringan
16			Rt001- Rw015	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	1.1146	20	Kumuh Ringan	1.1146	0.000	15	Tidak Kumuh
17			Rt001- Rw016	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.1346	25	Kumuh Ringan	0.000	0.1346	25	Kumuh Ringan
18			Rt002- Rw001	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.3131	41	Kumuh Sedang	0.000	0.3131	41	Kumuh Sedang
19			Rt002- Rw002	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.7768	41	Kumuh Sedang	0.000	0.7768	41	Kumuh Sedang
20			Rt002- Rw003	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.2507	33	Kumuh Ringan	0.000	0.2507	33	Kumuh Ringan
21			Rt002- Rw004	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.5305	43	Kumuh Sedang	0.000	0.5305	30	Kumuh Ringan
22			Rt002- Rw005	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.4426	27	Kumuh Ringan	0.000	0.4426	27	Kumuh Ringan
23			Rt002- Rw006	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.3566	28	Kumuh Ringan	0.000	0.3566	28	Kumuh Ringan
24			Rt002- Rw007	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.9065	23	Kumuh Ringan	0.000	0.9065	17	Kumuh Ringan
25			Rt002- Rw008	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.5190	22	Kumuh Ringan	0.000	0.5190	22	Kumuh Ringan
26			Rt002- Rw009	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.5753	42	Kumuh Sedang	0.000	0.5753	42	Kumuh Sedang
27			Rt002- Rw010	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.2758	21	Kumuh Ringan	0.000	0.2758	21	Kumuh Ringan
28			Rt002- Rw013	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.5297	33	Kumuh Ringan	0.000	0.5297	33	Kumuh Ringan
29			Rt002- Rw015	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.3413	20	Kumuh Ringan	0.000	0.3413	20	Kumuh Ringan
30			Rt002- Rw016	Pasirkraonkramat	Pekalongan Barat	0.0984	25	Kumuh Ringan	0.000	0.0984	25	Kumuh Ringan

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh Luas (Ha)	Sisa Kekumuhan		
							Nilai	Tingkat		Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
31			Rt003- Rw001	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.4454	39	Kumuh Sedang	0.000	0.4454	31	Kumuh Ringan
32			Rt003- Rw002	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.6358	46	Kumuh Sedang	0.000	0.6358	46	Kumuh Sedang
33			Rt003- Rw003	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.3129	40	Kumuh Sedang	0.000	0.3129	40	Kumuh Sedang
34			Rt003- Rw004	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.5534	23	Kumuh Ringan	0.000	0.5534	23	Kumuh Ringan
35			Rt003- Rw005	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.7368	40	Kumuh Sedang	0.000	0.7368	25	Kumuh Ringan
36			Rt003- Rw006	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	1.1210	31	Kumuh Ringan	0.000	1.1210	23	Kumuh Ringan
37			Rt003- Rw007	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	1.5979	24	Kumuh Ringan	1.5979	0.000	10	Tidak Kumuh
38			Rt003- Rw008	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.4988	22	Kumuh Ringan	0.000	0.4988	22	Kumuh Ringan
39			Rt003- Rw009	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.3285	41	Kumuh Sedang	0.000	0.3285	32	Kumuh Ringan
40			Rt003- Rw010	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.3635	28	Kumuh Ringan	0.000	0.3635	28	Kumuh Ringan
41			Rt003- Rw011	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.2619	19	Kumuh Ringan	0.000	0.2619	19	Kumuh Ringan
42			Rt003- Rw012	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.6489	27	Kumuh Ringan	0.000	0.6489	27	Kumuh Ringan
43			Rt003- Rw013	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.4838	22	Kumuh Ringan	0.000	0.4838	22	Kumuh Ringan
44			Rt003- Rw014	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.4072	27	Kumuh Ringan	0.000	0.4072	27	Kumuh Ringan
45			Rt003- Rw015	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	2.5773	21	Kumuh Ringan	0.000	2.5773	21	Kumuh Ringan
46			Rt003- Rw016	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.4207	16	Kumuh Ringan	0.000	0.4207	16	Kumuh Ringan

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh Luas (Ha)	Sisa Kekumuhan		
							Nilai	Tingkat		Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
47			Rt004- Rw001	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.5669	24	Kumuh Ringan	0.000	0.5669	24	Kumuh Ringan
48			Rt004- Rw002	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.3652	46	Kumuh Sedang	0.000	0.3652	46	Kumuh Sedang
49			Rt004- Rw003	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.3940	24	Kumuh Ringan	0.000	0.3940	16	Kumuh Ringan
50			Rt004- Rw004	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.4245	33	Kumuh Ringan	0.000	0.4245	33	Kumuh Ringan
51			Rt004- Rw006	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.9358	21	Kumuh Ringan	0.000	0.9358	21	Kumuh Ringan
52			Rt004- Rw008	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.2206	34	Kumuh Ringan	0.000	0.2206	34	Kumuh Ringan
53			Rt004- Rw009	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.3715	25	Kumuh Ringan	0.000	0.3715	25	Kumuh Ringan
54			Rt004- Rw010	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.4613	30	Kumuh Ringan	0.000	0.4613	30	Kumuh Ringan
55			Rt004- Rw012	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.3431	19	Kumuh Ringan	0.000	0.3431	19	Kumuh Ringan
56			Rt004- Rw013	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.7237	39	Kumuh Sedang	0.000	0.7237	39	Kumuh Sedang
57			Rt004- Rw015	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.7280	29	Kumuh Ringan	0.000	0.7280	29	Kumuh Ringan
58			Rt004- Rw016	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.1511	22	Kumuh Ringan	0.000	0.1511	22	Kumuh Ringan
59			Rt005- Rw002	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.5628	42	Kumuh Sedang	0.000	0.5628	42	Kumuh Sedang
60			Rt005- Rw003	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.4678	40	Kumuh Sedang	0.000	0.4678	40	Kumuh Sedang
61			Rt005- Rw004	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.2883	35	Kumuh Ringan	0.000	0.2883	35	Kumuh Ringan
62			Rt005- Rw005	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.4264	26	Kumuh Ringan	0.000	0.4264	21	Kumuh Ringan

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh Luas (Ha)	Sisa Kekumuhan		
							Nilai	Tingkat		Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
63			Rt005- Rw006	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.8747	30	Kumuh Ringan	0.000	0.8747	28	Kumuh Ringan
64			Rt005- Rw008	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	1.1733	43	Kumuh Sedang	0.000	1.1733	43	Kumuh Sedang
65			Rt005- Rw011	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.8216	20	Kumuh Ringan	0.000	0.8216	20	Kumuh Ringan
66			Rt005- Rw013	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.5414	19	Kumuh Ringan	0.000	0.5414	19	Kumuh Ringan
67			Rt005- Rw016	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.2959	23	Kumuh Ringan	0.000	0.2959	23	Kumuh Ringan
68			Rt006- Rw002	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.4561	48	Kumuh Sedang	0.000	0.4561	48	Kumuh Sedang
69			Rt006- Rw003	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.1800	39	Kumuh Sedang	0.000	0.1800	39	Kumuh Sedang
70			Rt006- Rw004	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.6192	26	Kumuh Ringan	0.000	0.6192	26	Kumuh Ringan
71			Rt006- Rw006	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.8520	26	Kumuh Ringan	0.000	0.8520	21	Kumuh Ringan
72			Rt006- Rw016	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.1220	24	Kumuh Ringan	0.000	0.1220	24	Kumuh Ringan
73			Rt007- Rw004	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.5832	43	Kumuh Sedang	0.000	0.5832	30	Kumuh Ringan
74			Rt008- Rw004	Pasirkratonkramat	Pekalongan Barat	0.5716	20	Kumuh Ringan	0.000	0.5716	20	Kumuh Ringan
75			Rt001- Rw012	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.1656	16	Kumuh Ringan	0.000	0.1656	16	Kumuh Ringan
76			Rt001- Rw013	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.4452	18	Kumuh Ringan	0.4452	0.000	13	Tidak Kumuh
77			Rt001- Rw014	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.5150	20	Kumuh Ringan	0.5150	0.000	15	Kumuh Ringan
78			Rt001- Rw015	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.1830	31	Kumuh Ringan	0.000	0.1830	26	Tidak Kumuh

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh	Sisa Kekumuhan		
						(Ha)	Nilai	Tingkat	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
79			Rt002- Rw013	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.6236	24	Kumuh Ringan	0.000	0.6236	19	Kumuh Ringan
80			Rt002- Rw014	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.4313	26	Kumuh Ringan	0.000	0.4313	21	Kumuh Ringan
81			Rt003- Rw012	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.6742	17	Kumuh Ringan	0.000	0.6742	17	Kumuh Ringan
82			Rt003- Rw013	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.5408	24	Kumuh Ringan	0.000	0.5408	19	Kumuh Ringan
83			Rt003- Rw015	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.6584	33	Kumuh Ringan	0.000	0.6584	28	Kumuh Ringan
84			Rt005- Rw015	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.7924	26	Kumuh Ringan	0.000	0.7924	21	Kumuh Ringan
85			Rt006- Rw012	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.3230	18	Kumuh Ringan	0.3230	0.000	13	Tidak Kumuh
86			Rt006- Rw014	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.4841	24	Kumuh Ringan	0.000	0.4841	19	Kumuh Ringan
87			Rt007- Rw012	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.4159	18	Kumuh Ringan	0.4159	0.000	13	Tidak Kumuh
88			Rt007- Rw015	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.2437	28	Kumuh Ringan	0.000	0.2437	23	Kumuh Ringan
89			Rt008- Rw001	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	1.0809	17	Kumuh Ringan	1.0809	0.000	12	Tidak Kumuh
90			Rt008- Rw012	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.2509	17	Kumuh Ringan	0.2509	0.000	12	Tidak Kumuh
91			Rt008- Rw014	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.4768	23	Kumuh Ringan	0.000	0.4768	18	Kumuh Ringan
92			Rt008- Rw015	Padukuhan Kraton	Pekalongan Barat	0.5179	24	Kumuh Ringan	0.000	0.5179	19	Kumuh Ringan
Jumlah						50.8338			5.7435	45.0903		
93	Kawasan Podosugih 4,98 Ha	Pemerintah Kota	Rt002- Rw002	Podosugih	Pekalongan Barat	0.5699	18	Kumuh Ringan	0.000	0.5699	18	Kumuh Ringan
94			Rt002- Rw006	Podosugih	Pekalongan	1.0782	16	Kumuh Ringan	0.000	1.0782	16	Kumuh

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh Luas (Ha)	Sisa Kekumuhan		
							Nilai	Tingkat		Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
					Barat							Ringan
95			Rt003- Rw003	Podosugih	Pekalongan Barat	0.7417	22	Kumuh Ringan	0.000	0.7417	22	Kumuh Ringan
96			Rt005- Rw002	Podosugih	Pekalongan Barat	0.8571	22	Kumuh Ringan	0.000	0.8571	22	Kumuh Ringan
97			Rt005- Rw006	Podosugih	Pekalongan Barat	1.7292	17	Kumuh Ringan	0.000	1.7292	17	Kumuh Ringan
Jumlah						4.9761			0.000	4.9761		
98	Kawasan Bremi 17,90 Ha	Pemerintah Pusat	Rt001- Rw005	Pringrejo	Pekalongan Barat	1.2809	26	Kumuh Ringan	0.000	1.2809	26	Kumuh Ringan
99			Rt001- Rw011	Pringrejo	Pekalongan Barat	1.7424	24	Kumuh Ringan	0.000	1.7424	24	Kumuh Ringan
100			Rt002- Rw007	Pringrejo	Pekalongan Barat	1.5140	26	Kumuh Ringan	1.5140	0.000	15	Tidak Kumuh
101			Rt002- Rw008	Pringrejo	Pekalongan Barat	1.2573	34	Kumuh Ringan	0.000	1.2573	34	Kumuh Ringan
102			Rt003- Rw018	Pringrejo	Pekalongan Barat	0.3939	20	Kumuh Ringan	0.000	0.3939	20	Kumuh Ringan
103			Rt003- Rw019	Pringrejo	Pekalongan Barat	0.4052	23	Kumuh Ringan	0.000	0.4052	23	Kumuh Ringan
104			Rt004- Rw019	Pringrejo	Pekalongan Barat	0.7163	22	Kumuh Ringan	0.000	0.7163	22	Kumuh Ringan
105			Rt005- Rw018	Pringrejo	Pekalongan Barat	0.5119	21	Kumuh Ringan	0.000	0.5119	21	Kumuh Ringan
106			Rt005- Rw019	Pringrejo	Pekalongan Barat	0.4246	20	Kumuh Ringan	0.000	0.4246	20	Kumuh Ringan
107			Rt006- Rw018	Pringrejo	Pekalongan Barat	0.7209	23	Kumuh Ringan	0.000	0.7209	23	Kumuh Ringan
108			Rt006- Rw019	Pringrejo	Pekalongan Barat	0.3500	21	Kumuh Ringan	0.000	0.3500	21	Kumuh Ringan
109			Rt007- Rw018	Pringrejo	Pekalongan Barat	0.4395	19	Kumuh Ringan	0.000	0.4395	19	Kumuh Ringan

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh	Sisa Kekumuhan		
						(Ha)	Nilai	Tingkat	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
110			Rt001- Rw001	Tirto	Pekalongan Barat	0.8067	16	Kumuh Ringan	0.8067	0.000	9	Tidak Kumuh
111			Rt002- Rw001	Tirto	Pekalongan Barat	1.1510	44	Kumuh Sedang	0.000	1.1510	44	Kumuh Sedang
112			Rt002- Rw002	Tirto	Pekalongan Barat	1.0540	42	Kumuh Sedang	0.000	1.0540	42	Kumuh Sedang
113			Rt003- Rw008	Tirto	Pekalongan Barat	1.3613	42	Kumuh Sedang	0.000	1.3613	42	Kumuh Sedang
114			Rt004- Rw001	Tirto	Pekalongan Barat	0.5129	28	Kumuh Ringan	0.000	0.5129	28	Kumuh Ringan
115			Rt004- Rw008	Tirto	Pekalongan Barat	0.3678	42	Kumuh Sedang	0.000	0.3678	35	Kumuh Ringan
116			Rt005- Rw001	Tirto	Pekalongan Barat	0.7262	42	Kumuh Sedang	0.000	0.7262	32	Kumuh Ringan
117			Rt005- Rw002	Tirto	Pekalongan Barat	0.9544	23	Kumuh Ringan	0.000	0.9544	23	Kumuh Ringan
118			Rt006- Rw001	Tirto	Pekalongan Barat	0.8224	41	Kumuh Sedang	0.000	0.8224	41	Kumuh Sedang
119			Rt006- Rw002	Tirto	Pekalongan Barat	0.3895	19	Kumuh Ringan	0.3895	0.000	13	Tidak Kumuh
Jumlah						17.9032			2.7102	15.1930		
120	Kawasan Sapuro Kebulen 3,47 Ha	Pemerintah Kota	Rt001- Rw011	Sapuro Kebulen	Pekalongan Barat	0.5250	22	Kumuh Ringan	0.000	0.5250	22	Kumuh Ringan
121			Rt002- Rw003	Sapuro Kebulen	Pekalongan Barat	0.8630	26	Kumuh Ringan	0.000	0.8630	21	Kumuh Ringan
122			Rt002- Rw004	Sapuro Kebulen	Pekalongan Barat	0.2985	20	Kumuh Ringan	0.000	0.2985	20	Kumuh Ringan
123			Rt002- Rw010	Sapuro Kebulen	Pekalongan Barat	0.4191	20	Kumuh Ringan	0.000	0.4191	20	Kumuh Ringan
124			Rt002- Rw011	Sapuro Kebulen	Pekalongan Barat	0.5368	26	Kumuh Ringan	0.000	0.5368	21	Kumuh Ringan
125			Rt003- Rw011	Sapuro Kebulen	Pekalongan	0.3223	23	Kumuh Ringan	0.000	0.3223	23	Kumuh

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh	Sisa Kekumuhan		
						(Ha)	Nilai	Tingkat	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
	126				Barat							Ringan
			Rt004- Rw010	Sapuro Kebulen	Pekalongan Barat	0.5025	19	Kumuh Ringan	0.5025	0.000	14	Tidak Kumuh
Jumlah						3.4672			0.5025	2.9647		
127	Kawasan Kalibaros 1,81 Ha	Pemerintah Kota	Rt001- Rw001	Kalibaros	Pekalongan Timur	0.7099	31	Kumuh Ringan	0.000	0.7099	31	Kumuh Ringan
128			Rt002- Rw001	Kalibaros	Pekalongan Timur	0.1184	26	Kumuh Ringan	0.000	0.1184	26	Kumuh Ringan
129			Rt003- Rw001	Kalibaros	Pekalongan Timur	0.9834	19	Kumuh Ringan	0.9834	0.000	11	Tidak Kumuh
Jumlah						1.8117			0.9834	0.8283		
130	Kawasan Banger Lama 16,40 Ha	Pemerintah Pusat	Rt001- Rw008	Kauman	Pekalongan Timur	0.1768	24	Kumuh Ringan	0.000	0.1768	22	Kumuh Ringan
131			Rt001- Rw014	Kauman	Pekalongan Timur	0.6386	23	Kumuh Ringan	0.000	0.6386	23	Kumuh Ringan
132			Rt001- Rw015	Kauman	Pekalongan Timur	0.3491	26	Kumuh Ringan	0.000	0.3491	16	Kumuh Ringan
133			Rt001- Rw016	Kauman	Pekalongan Timur	0.6947	16	Kumuh Ringan	0.6947	0.000	11	Tidak Kumuh
134			Rt002- Rw006	Kauman	Pekalongan Timur	0.6139	24	Kumuh Ringan	0.000	0.6139	24	Kumuh Ringan
135			Rt002- Rw009	Kauman	Pekalongan Timur	0.6338	20	Kumuh Ringan	0.000	0.6338	20	Kumuh Ringan
136			Rt003- Rw015	Kauman	Pekalongan Timur	0.4517	22	Kumuh Ringan	0.000	0.4517	17	Kumuh Ringan
137			Rt004- Rw008	Kauman	Pekalongan Timur	0.2764	30	Kumuh Ringan	0.000	0.2764	25	Kumuh Ringan
138			Rt005- Rw008	Kauman	Pekalongan Timur	0.4718	27	Kumuh Ringan	0.000	0.4718	22	Kumuh Ringan
139			Rt006- Rw008	Kauman	Pekalongan Timur	0.4829	27	Kumuh Ringan	0.000	0.4829	27	Kumuh Ringan
140			Rt002- Rw002	Klego	Pekalongan	0.2740	27	Kumuh Ringan	0.000	0.2740	27	Kumuh

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh Luas (Ha)	Sisa Kekumuhan		
							Nilai	Tingkat		Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
					Timur							Ringan
141			Rt003- Rw001	Klego	Pekalongan Timur	0.3224	23	Kumuh Ringan	0.000	0.3224	23	Kumuh Ringan
142			Rt003- Rw002	Klego	Pekalongan Timur	0.4890	21	Kumuh Ringan	0.000	0.4890	21	Kumuh Ringan
143			Rt004- Rw002	Klego	Pekalongan Timur	0.3050	25	Kumuh Ringan	0.000	0.3050	25	Kumuh Ringan
144			Rt005- Rw001	Klego	Pekalongan Timur	0.2860	26	Kumuh Ringan	0.000	0.2860	26	Kumuh Ringan
145			Rt007- Rw001	Klego	Pekalongan Timur	0.5353	29	Kumuh Ringan	0.000	0.5353	29	Kumuh Ringan
146			Rt001- Rw008	Klego	Pekalongan Timur	0.2285	36	Kumuh Ringan	0.000	0.2285	36	Kumuh Ringan
147			Rt001- Rw010	Klego	Pekalongan Timur	0.8664	30	Kumuh Ringan	0.000	0.8664	30	Kumuh Ringan
148			Rt001- Rw012	Klego	Pekalongan Timur	0.9705	18	Kumuh Ringan	0.000	0.9705	18	Kumuh Ringan
149			Rt001- Rw013	Klego	Pekalongan Timur	0.7481	20	Kumuh Ringan	0.000	0.7481	20	Kumuh Ringan
150			Rt001- Rw013	Klego	Pekalongan Timur	0.1210	26	Kumuh Ringan	0.000	0.1210	26	Kumuh Ringan
151			Rt002- Rw001	Klego	Pekalongan Timur	0.7585	20	Kumuh Ringan	0.000	0.7585	20	Kumuh Ringan
152			Rt002- Rw013	Klego	Pekalongan Timur	0.4188	17	Kumuh Ringan	0.000	0.4188	17	Kumuh Ringan
153			Rt003- Rw005	Klego	Pekalongan Timur	0.7752	24	Kumuh Ringan	0.000	0.7752	24	Kumuh Ringan
154			Rt003- Rw006	Klego	Pekalongan Timur	0.7526	24	Kumuh Ringan	0.000	0.7526	24	Kumuh Ringan
155			Rt003- Rw011	Klego	Pekalongan Timur	0.2416	27	Kumuh Ringan	0.000	0.2416	27	Kumuh Ringan
156			Rt003- Rw013	Klego	Pekalongan	0.5005	24	Kumuh Ringan	0.000	0.5005	24	Kumuh

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh Luas (Ha)	Sisa Kekumuhan		
							Nilai	Tingkat		Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
					Timur							Ringan
157			Rt004- Rw001	Klego	Pekalongan Timur	0.4518	21	Kumuh Ringan	0.000	0.4518	21	Kumuh Ringan
158			Rt004- Rw006	Klego	Pekalongan Timur	0.1678	25	Kumuh Ringan	0.000	0.1678	25	Kumuh Ringan
159			Rt004- Rw009	Klego	Pekalongan Timur	0.6473	29	Kumuh Ringan	0.000	0.6473	29	Kumuh Ringan
160			Rt004- Rw013	Klego	Pekalongan Timur	0.4055	29	Kumuh Ringan	0.000	0.4055	29	Kumuh Ringan
161			Rt005- Rw012	Klego	Pekalongan Timur	0.8711	24	Kumuh Ringan	0.8711	0.000	12	Tidak Kumuh
162			Rt006- Rw011	Klego	Pekalongan Timur	0.4688	24	Kumuh Ringan	0.000	0.4688	24	Kumuh Ringan
Jumlah						16.3955			1.5658	14.8297		
163	Setono 1,11 Ha	Pemerintah Kota	Rt002- Rw015	Setono	Pekalongan Timur	1.1068	19	Kumuh Ringan	0.000	1.1068	19	Kumuh Ringan
Jumlah						1.1068				1.1068		
164	Kawasan Bandengan 7,88 Ha	Pemerintah Kota	Rt001- Rw003	Bandengan	Pekalongan Utara	0.6915	16	Kumuh Ringan	0.000	0.6915	16	Kumuh Ringan
165			Rt001- Rw005	Bandengan	Pekalongan Utara	0.6887	18	Kumuh Ringan	0.000	0.6887	18	Kumuh Ringan
166			Rt002- Rw002	Bandengan	Pekalongan Utara	0.9910	22	Kumuh Ringan	0.000	0.9910	22	Kumuh Ringan
167			Rt002- Rw003	Bandengan	Pekalongan Utara	0.5040	21	Kumuh Ringan	0.5040	0.000	15	Tidak Kumuh
168			Rt002- Rw005	Bandengan	Pekalongan Utara	0.6915	16	Kumuh Ringan	0.000	0.2188	23	Kumuh Ringan
169			Rt003- Rw001	Bandengan	Pekalongan Utara	0.9540	19	Kumuh Ringan	0.9540	0.000	14	Tidak Kumuh
170			Rt004- Rw001	Bandengan	Pekalongan Utara	0.8055	16	Kumuh Ringan	0.8055	0.000	15	Tidak Kumuh
171			Rt004- Rw002	Bandengan	Pekalongan	0.3833	20	Kumuh Ringan	0.3833	0.000	14	Tidak

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh Luas (Ha)	Sisa Kekumuhan		
							Nilai	Tingkat		Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
					Utara							Kumuh
172			Rt004- Rw003	Bandengan	Pekalongan Utara	0.6095	24	Kumuh Ringan	0.000	0.6095	16	Kumuh Ringan
173			Rt004- Rw005	Bandengan	Pekalongan Utara	0.4615	16	Kumuh Ringan	0.000	0.4615	16	Kumuh Ringan
174			Rt005- Rw003	Bandengan	Pekalongan Utara	0.2998	18	Kumuh Ringan	0.2998	0.000	10	Tidak Kumuh
175			Rt002- Rw006	Kandang Panjang	Pekalongan Utara	0.3834	31	Kumuh Ringan	0.000	0.3834	31	Kumuh Ringan
176			Rt003- Rw006	Kandang Panjang	Pekalongan Utara	0.4373	24	Kumuh Ringan	0.000	0.4373	24	Kumuh Ringan
177			Rt004- Rw006	Kandang Panjang	Pekalongan Utara	0.4524	28	Kumuh Ringan	0.000	0.454	28	Kumuh Ringan
Jumlah						7.8807			2.9466	4.9341		
178			Rt001- Rw007	Degayu	Pekalongan Utara	0.6393	43	Kumuh Sedang	0.000	0.6393	43	Kumuh Sedang
179			Rt001- Rw008	Degayu	Pekalongan Utara	0.6036	49	Kumuh Sedang	0.000	0.6036	38	Kumuh Sedang
180			Rt001- Rw009	Degayu	Pekalongan Utara	0.9057	45	Kumuh Sedang	0.000	0.9057	45	Kumuh Sedang
181			Rt002- Rw003	Degayu	Pekalongan Utara	1.1785	25	Kumuh Ringan	0.000	1.1785	25	Kumuh Ringan
182			Rt002- Rw007	Degayu	Pekalongan Utara	0.8043	45	Kumuh Sedang	0.000	0.8043	45	Kumuh Sedang
183			Rt002- Rw008	Degayu	Pekalongan Utara	0.4059	46	Kumuh Sedang	0.000	0.4059	42	Kumuh Sedang
184			Rt002- Rw009	Degayu	Pekalongan Utara	0.6826	48	Kumuh Sedang	0.000	0.6826	36	Kumuh Ringan
185			Rt003- Rw004	Degayu	Pekalongan Utara	0.6521	24	Kumuh Ringan	0.000	0.6521	24	Kumuh Ringan
186			Rt003- Rw007	Degayu	Pekalongan Utara	0.6416	50	Kumuh Sedang	0.000	0.6416	50	Kumuh Sedang

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh Luas (Ha)	Sisa Kekumuhan		
							Nilai	Tingkat		Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
187			Rt003- Rw008	Degayu	Pekalongan Utara	0.7305	48	Kumuh Sedang	0.000	0.7305	41	Kumuh Sedang
188			Rt003- Rw009	Degayu	Pekalongan Utara	0.1696	32	Kumuh Ringan	0.000	0.1696	27	Kumuh Ringan
189			Rt004- Rw004	Degayu	Pekalongan Utara	0.6216	28	Kumuh Ringan	0.000	0.6216	28	Kumuh Ringan
190			Rt004- Rw008	Degayu	Pekalongan Utara	0.5801	47	Kumuh Sedang	0.000	0.5801	47	Kumuh Sedang
191			Rt004- Rw007	Degayu	Pekalongan Utara	0.9262	47	Kumuh Sedang	0.000	0.9262	38	Kumuh Sedang
192			Rt005- Rw007	Degayu	Pekalongan Utara	0.7699	44	Kumuh Sedang	0.000	0.7699	44	Kumuh Sedang
193			Rt005- Rw008	Degayu	Pekalongan Utara	0.6123	51	Kumuh Sedang	0.000	0.6123	38	Kumuh Sedang
194			Rt006- Rw007	Degayu	Pekalongan Utara	0.7739	51	Kumuh Sedang	0.000	0.7739	51	Kumuh Sedang
195			Rt006- Rw008	Degayu	Pekalongan Utara	0.4663	49	Kumuh Sedang	0.000	0.4663	42	Kumuh Sedang
196			Rt003- Rw002	Gamer	Pekalongan Timur	0.4976	27	Kumuh Ringan	0.000	0.4976	27	Kumuh Ringan
Jumlah						12.6618			0.000	12.6618		
197	Kawasan Loji 18,33 Ha	Pemerintah Pusat	Rt001- Rw005	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.7021	28	Kumuh Ringan	0.000	0.7021	28	Kumuh Ringan
198			Rt001- Rw007	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.0297	22	Kumuh Ringan	0.000	0.0297	22	Kumuh Ringan
199			Rt002- Rw004	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.7692	23	Kumuh Ringan	0.000	0.7692	23	Kumuh Ringan
200			Rt002- Rw005	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.3289	17	Kumuh Ringan	0.000	0.3289	17	Kumuh Ringan
201			Rt002- Rw007	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.0956	23	Kumuh Ringan	0.000	0.0956	23	Kumuh Ringan
202			Rt003- Rw004	Panjang Baru	Pekalongan	0.6122	16	Kumuh Ringan	0.000	0.6122	16	Kumuh

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh Luas (Ha)	Sisa Kekumuhan		
							Nilai	Tingkat		Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
					Utara							Ringan
203			Rt003- Rw005	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.6986	25	Kumuh Ringan	0.000	0.6986	25	Kumuh Ringan
204			Rt003- Rw007	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.0600	21	Kumuh Ringan	0.000	0.0600	21	Kumuh Ringan
205			Rt003- Rw010	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.4249	36	Kumuh Ringan	0.000	0.4249	36	Kumuh Ringan
206			Rt004- Rw005	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.3581	20	Kumuh Ringan	0.000	0.3581	20	Kumuh Ringan
207			Rt004- Rw006	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.1788	18	Kumuh Ringan	0.000	0.1788	18	Kumuh Ringan
208			Rt004- Rw007	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.0812	31	Kumuh Ringan	0.000	0.0812	26	Kumuh Ringan
209			Rt004- Rw010	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.4733	36	Kumuh Ringan	0.000	0.4733	36	Kumuh Ringan
210			Rt006- Rw010	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.3632	30	Kumuh Ringan	0.000	0.3632	30	Kumuh Ringan
211			Rt007- Rw005	Panjang Baru	Pekalongan Utara	0.2655	16	Kumuh Ringan	0.000	0.2655	16	Kumuh Ringan
212			Rt001- Rw001	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.4653	48	Kumuh Sedang	0.4653	0.000	13	Tidak Kumuh
213			Rt001- Rw005	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.9418	32	Kumuh Ringan	0.000	0.9418	32	Kumuh Ringan
214			Rt001- Rw010	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.9840	23	Kumuh Ringan	0.000	0.9840	23	Kumuh Ringan
215			Rt001- Rw011	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.6080	21	Kumuh Ringan	0.000	0.6080	21	Kumuh Ringan
216			Rt002- Rw001	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.5459	43	Kumuh Sedang	0.5459	0.000	0	Tidak Kumuh
217			Rt002- Rw002	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.5381	21	Kumuh Ringan	0.000	0.5381	21	Kumuh Ringan
218			Rt002- Rw006	Panjang Wetan	Pekalongan	0.1080	48	Kumuh Sedang	0.000	0.1080	48	Kumuh

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh Luas (Ha)	Sisa Kekumuhan		
							Nilai	Tingkat		Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
					Utara							Sedang
219			Rt002- Rw010	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.7514	29	Kumuh Ringan	0.000	0.7514	29	Kumuh Ringan
220			Rt003- Rw001	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.6137	41	Kumuh Sedang	0.6137	0.000	0	Tidak Kumuh
221			Rt003- Rw002	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.1939	18	Kumuh Ringan	0.000	0.1939	18	Kumuh Ringan
222			Rt003- Rw008	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.4799	38	Kumuh Sedang	0.000	0.4799	29	Kumuh Ringan
223			Rt003- Rw010	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	1.1332	22	Kumuh Ringan	0.000	1.1332	22	Kumuh Ringan
224			Rt004- Rw001	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.3220	47	Kumuh Sedang	0.3220	0.000	0	Tidak Kumuh
225			Rt004- Rw005	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.2929	20	Kumuh Ringan	0.2929	0.000	15	Tidak Kumuh
226			Rt004- Rw007	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.4688	25	Kumuh Ringan	0.000	0.4688	25	Kumuh Ringan
227			Rt004- Rw008	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.2607	21	Kumuh Ringan	0.000	0.2607	21	Kumuh Ringan
228			Rt005- Rw001	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.7597	46	Kumuh Sedang	0.7597	0.000	0	Tidak Kumuh
229			Rt005- Rw003	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.2056	20	Kumuh Ringan	0.000	0.2056	20	Kumuh Ringan
230			Rt005- Rw011	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.6556	43	Kumuh Sedang	0.000	0.6556	43	Kumuh Sedang
231			Rt005- Rw012	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.3833	16	Kumuh Ringan	0.000	0.3833	16	Kumuh Ringan
232			Rt006- Rw003	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.2483	23	Kumuh Ringan	0.000	0.2483	23	Kumuh Ringan
233			Rt006- Rw004	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.3752	17	Kumuh Ringan	0.000	0.3752	17	Kumuh Ringan
234			Rt006- Rw012	Panjang Wetan	Pekalongan	0.5570	26	Kumuh Ringan	0.000	0.5570	26	Kumuh

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan No. 600.1.14/0336 Tahun 2024			Penanganan Kumuh Tahun 2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh	Sisa Kekumuhan		
						(Ha)	Nilai	Tingkat	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
					Utara							Ringan
235			Rt007- Rw008	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.4321	42	Kumuh Sedang	0.000	0.4321	42	Kumuh Sedang
236			Rt008- Rw013	Panjang Wetan	Pekalongan Utara	0.5689	26	Kumuh Ringan	0.000	0.5689	26	Kumuh Ringan
Jumlah						18.3348			2.9995	15.3352		
237	Kawasan Buaran 3,64 Ha	Pemerintah Kota	Rt003- Rw001	Banyurip	Pekalongan Selatan	1.6560	24	Kumuh Ringan	0.000	1.6560	24	Kumuh Ringan
238			Rt003- Rw004	Banyurip	Pekalongan Selatan	0.5042	36	Kumuh Ringan	0.000	0.5042	36	Kumuh Ringan
239			Rt002- Rw005	Buaran Kradenan	Pekalongan Selatan	1.4841	27	Kumuh Ringan	0.000	1.4841	27	Kumuh Ringan
Jumlah						3.6444			0.000	3.6444		
240	Kawasan Buaran 1,73 Ha	Pemerintah Provinsi	Rt001- Rw002	Jenggot	Pekalongan Selatan	1.1409	28	Kumuh Ringan	0.000	1.1409	28	Kumuh Ringan
241			Rt003- Rw010	Jenggot	Pekalongan Selatan	0.5904	27	Kumuh Ringan	0.000	0.5904	27	Kumuh Ringan
Jumlah						1.7312			0.000	1.7312		
242	Sokoduwet 1,14 Ha	Pemerintah Kota	Rt002- Rw012	Sokoduwet	Pekalongan Selatan	1.1386	39	Kumuh Sedang	0.000	1.1386	39	Kumuh Sedang
Jumlah						1.1386			0.000			
	Luasan Kumuh Kewenangan Pusat											
	Luasan Kumuh Kewenangan Provinsi											
	Luasan Kumuh Kewenangan Kabupaten											
	Total Luasan Kumuh					143.7692			17.4515	126.3177		

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2025

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibus

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2020-2024 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2020 dengan rasio sebesar 0,88 atau 27 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan rasio menjadi 0,84 atau 26 personel untuk setiap 10.000 penduduk di tahun 2021. Sampai dengan tahun 2024, rasio Polisi Pamong Praja (PNS) terus menurun menjadi 0,72 atau 23 personil untuk setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Banpol Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Pada tahun 2020, rasio sebesar 3,91 atau 120 personil untuk setiap 10.000 penduduk. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,99 atau 123 personil setiap 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2022 rasio kembali mengalami penurunan menjadi 3,97 atau 123 personil dan pada tahun 2023 rasio mengalami penurunan menjadi 3,68 atau 117 personil setiap 10.000 penduduk. Sementara itu pada tahun 2024 rasio mengalami kenaikan yaitu 3,73 atau 119 personil setiap 10.000 penduduk.

Jika Polisi PP PNS dan Banpol Non PNS dijumlahkan, maka rasio pada tahun 2020 sebesar 4,79 atau 147 personil per 10.000 penduduk. Pada tahun 2021 meningkat jumlahnya dibandingkan tahun 2020 yaitu 149 personil. Pada tahun 2022 naik menjadi 153 personil. Tahun 2023 dan 2024 jumlah Polisi PP PNS dan Banpol Non PNS sebanyak 142 personil.

Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP dan Banpol dalam kurun waktu 2020-2024.

Tabel II-141
Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP
(Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2020-2024

Tahun	Jumlah Polisi PP (PNS)	Persentase Jumlah Polisi PP (PNS)	Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Jumlah Polisi PP (PNS dan Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (PNS dan Banpol Non PNS)	Jumlah Penduduk
2020	27	0,88	120	3,91	147	4,79	307.150
2021	26	0,84	123	3,99	149	4,83	308.310
2022	30	0,97	123	3,97	153	4,94	309.742
2023	25	0,79	117	3,68	142	4,47	317.524
2024	23	0.72	119	3.73	142	4.46	318.182

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2025

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, pelanggaran Perda sebanyak 1.782 kasus, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 3.586 kasus. Namun tahun 2022 jumlah pelanggaran Perda menurun menjadi 2.410 kasus. Tahun 2023 naik menjadi 2.555 kasus dan turun lagi pada tahun 2024 sebanyak 1.835. Meskipun demikian, Satpol P3KP Kota Pekalongan terus berusaha melakukan penyelesaian atas pelanggaran Perda yang terjadi. Hal ini

dibuktikan dengan persentase penyelesaian atas pelanggaran Perda yang berada diatas 90 persen mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel II-142
Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
2020	1.782	1.759	98,71
2021	3.586	3.586	100,00
2022	2.410	2.410	100,00
2023	2.555	2.555	100,00
2024	1.835	4.335	100,00

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2025

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk (Ton Inti) menunjukkan rasio yang fluktuatif, dimana rasio pada tahun 2020 adalah 47,27 atau 1.452 personil dan pada tahun 2024 menurun menjadi 39,08 atau 1.246 personil.

Untuk jumlah Linmas Kecamatan dan Kelurahan tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dengan rasio sebesar 1,14 atau 35 personil. Kemudian pada tahun 2024 terjadi penurunan rasio sebesar 0,62 atau 20 personil per 10.000 penduduk.

Tabel II-143
**Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan)
Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Linmas (Ton Inti)	Rasio	Jumlah Penduduk	Jumlah Linmas (Kec. dan Kel.)	Rasio
2020	1.452	47,27	307.150	35	1,14
2021	2.102	68,17	308.310	35	1,14
2022	2.102	67,86	309.742	35	1,13
2023	2.152	67,77	317.524	28	0,88
2024	1.246	39,08	321.095	20	0.62

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2025, 2025

Pada tahun 2020 jumlah pos siskamling adalah 441 buah dan menurun menjadi 275 buah pada tahun 2021. Sedangkan jumlah pos siskamling pada tahun 2022 s.d. 2024 berjumlah konstan yaitu 308 buah. Oleh karena itu, rasio pos siskamling per jumlah kelurahan memiliki angka yang konstan pada tahun 2022 s.d. 2024 yaitu sebesar 11,40%. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 16,00% dan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 10,19%. Rasio tertinggi ada tahun 2020 karena pada saat itu keaktifan warga masih cukup tinggi karena belum terjadinya pandemi covid-19. Pada tahun 2021 rasio menurun signifikan karena terjadinya pandemi covid-19. Sedangkan tahun 2022 s.d. 2024 rasionya konstan karena terjadi titik keseimbangan baru akibat pandemi covid-19.

Tabel II-144
Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jml Pos Siskamling	Jml Kelurahan	Rasio
2020	441	27	16
2021	275	27	10,19
2022	308	27	11,40
2023	308	27	11,40
2024	308	27	11,40

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2025

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan termasuk pelanggaran terhadap Perda dan Perwal, Satpol P3KP Kota Pekalongan dibantu oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sampai dengan tahun 2023 ini Kota Pekalongan telah memiliki 2 orang PNS yang telah bersertifikat sebagai PPNS.

6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya dikaitkan dengan panti asuhan. Kepemilikan panti ini dapat oleh pemerintah daerah maupun swasta. Jumlah Panti Asuhan pada tahun 2023 sebanyak 194 panti meningkat dibanding jumlah panti asuhan di tahun 2022. Sedangkan jumlah anak yang diasuh meningkat dibandingkan tahun 2022. Secara lengkap jumlah Panti Asuhan dan jumlah anak yang diasuh selama 5 tahun terakhir (2020-2024) disajikan dalam Tabel II-145 berikut.

Tabel II-145
Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Jumlah Anak yang Diasuh
2020	20	1.052
2021	15	1.037
2022	23	251
2023	36	1.667
2024	46	711

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, Kota Pekalongan dalam Angka 2025, 2025

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Pada tahun 2023 jumlah PMKS adalah 24.875 jiwa, dengan jumlah tertinggi adalah fakir miskin sebesar 21.932 jiwa. Data selengkapnya selama 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024) disajikan dalam Tabel II-146 berikut.

Tabel II-146
Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra	-	-	-	-	-
Keluarga Penyandang Sosial Psikologi	-	-	-	-	3
Anak Terlantar/Gelandangan	-	158	1	5	1
Usia Lanjut/Jompo/Terlantar	145	140	135	149	122
Wanita Rawan Sosial	8	9	15	12	13
Keluarga yang Kondisi/ Perumahan, Lingkungan Tidak Layak	-	-	-		
Anak Nakal	98	158	-	0	33
Korban Penyalahgunaan Narkoba	-	-	1	0	1
Penyandang Cacat:	1.354	481	638		470
1. Tubuh	234	267	214	9	147
2. Netra	107	112	109	25	29
3. Mental	429	365	216	112	244
4. Ganda	484	457	-	0	27
5. Wicara	100	102	99	4	23
Bekas Penyandang Penyakit Kronis	-	-	-		3
Gelandangan	3	3	3	16	13
Tuna Susila	-	-	-	0	0
Waria	-	-	-	0	0
Bekas Narapidana	1	1	-	0	2
Bencana Alam	3107	14.000	834	2.611	0
Fakir Miskin	22.683	184.235	22.672	21.932	19907
Jumlah	27.499	200.488	24.937	24.875	20.568

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2025

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2023, untuk perintis/pejuang kemerdekaan berjumlah 235 orang, karang taruna berjumlah 32 organisasi, WKKS (Wanita Kader Kepemimpinan Sosial) sebanyak 5 orang dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sebanyak 63 orang. Pada tahun 2024 jumlah WKKS (Wanita Kader Kepemimpinan Sosial) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berjumlah 0. Selanjutnya disajikan dalam Tabel II-147 berikut.

Tabel II-147
Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Perintis / Pejuang Kemerdekaan	0	0	235	235	235
Wanita Kader Kepemimpinan Sosial	5	5	5	5	0
Pekerja Sosial Masyarakat	63	63	63	63	0
Karang Taruna	32	32	32	32	32
Organisasi Sosial	20	0	0	0	0

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2025

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan *up to date*. Untuk mendapatkan data yang *up to date* tersebut, perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dengan didukung oleh Pemerintah Daerah mendapatkan mandat untuk merumuskan kebijakan tentang verifikasi, validasi data dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis teknologi informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan *Social Next Generation* (SIKS-NG). Selanjutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan dalam menjalankan program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini memuat informasi status sosial ekonomi rumah tangga 40 persen terendah, keluarga dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset dan kepesertaan program bantuan sosial/subsidi.

Berikut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekalongan selama Tahun 2020-2024.

Tabel II-148
Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Rumah Tangga Sasaran	Anggota Rumah Tangga Sasaran
2020	29.282	108.436
2021	61.421	184.247
2022	61.330	188.455
2023	59.588	180.355
2024	60.211	173.513

Sumber: Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan, 2025

Dari Tabel II-148 dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebanyak 623 RTS jika dibandingkan dengan tahun 2023. Jumlah Anggota Rumah Tangga Sasaran Tahun 2023 juga mengalami penurunan sebanyak 6.842 jiwa dibandingkan jumlah Anggota Rumah Tangga Sasaran tahun 2023.

2.4.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

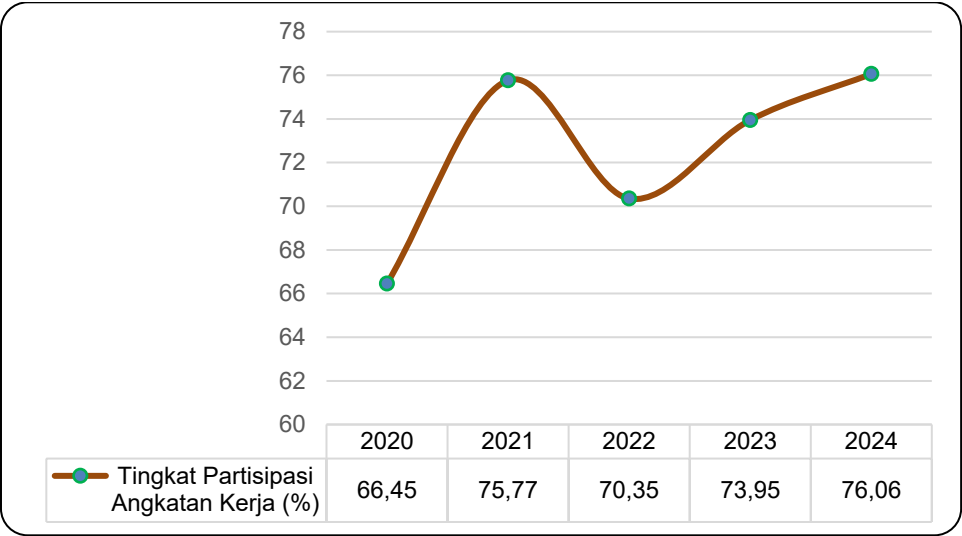
Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Jumlah Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2020 s.d. 2024 disajikan dalam Tabel II-149 berikut.

Tabel II-149
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
1	2020	157.260	66,45
2	2021	181.210	75,77
3	2022	169.940	70,35
4	2023	171.522	73,95
5	2024	188.194	76,06

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2024 dan www.jateng.bps.go.id, 2024

Pada tahun 2020 sampai tahun 2024 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan berfluktuasi dari 66,45 persen di tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 75,77 persen, menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 70,35 persen dan kembali meningkat menjadi 73,95 persen di tahun 2023 dan 76,06 di tahun 2024. Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023 tercatat sekitar 171.522 orang. Persentase angkatan kerja 2023 meningkat 3,6 poin dari tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) mengalami penurunan.



Gambar II-55
Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sepanjang lima tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja tergolong tidak banyak, masih di bawah 30 (tiga puluh) kasus dari sekitar 400-500 perusahaan. Meskipun jumlah dan persentase sengketa masih berfluktuasi untuk itu persengketaan ini harus tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-150 berikut.

Tabel II-150
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Persentase Sengketa
2020	28	484	5,79
2021	11	484	2,27
2022	8	484	1,65
2023	8	492	1,62
2024	7	492	1,42

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana kondisi bulan Agustus tahun 2024 sebesar 76,06 persen. Pencari kerja ada yang ditempatkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sepanjang lima tahun terakhir jumlah AKL dan AKAN dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk AKAD cenderung menurun dari tahun 2020 sampai 2024. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-151 berikut.

Tabel II-151
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024

Tahun	Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2020	3	0	24
2021	164	0	13
2022	179	0	146
2023	0	0	103
2024	122	0	108

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

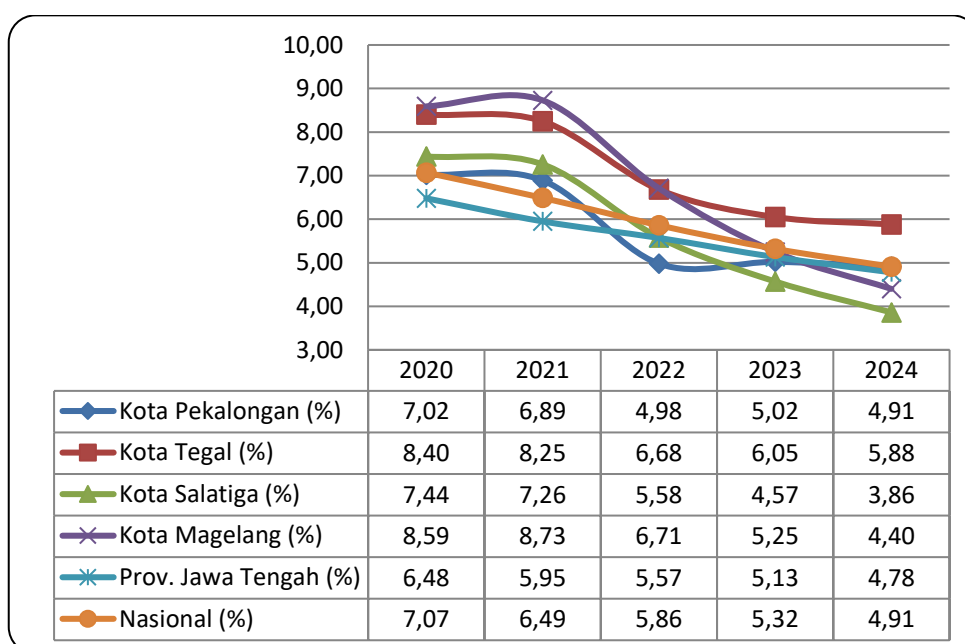
d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan tahun 2024 sebesar 4,91 persen atau turun 0,11 poin dari tahun 2023, artinya, pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 11 orang yang benar-benar menganggur.

Faktor yang menyebabkan TPT tidak bisa turun signifikan antara lain beberapa musibah seperti kebakaran pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan yang berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Pada tahun 2023 TPT Kota Pekalongan berada di bawah TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Artinya, jumlah pengangguran di Kota Pekalongan lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan Kota lain di Jawa Tengah, TPT Kota Pekalongan terendah kedua setelah Kota Salatiga.

Tantangan ke depan adalah bagaimana upaya terintegrasi untuk menurunkan TPT secara optimal. Meskipun dibandingkan daerah lain setara, TPT Kota Pekalongan lebih bagus, namun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan harus berupaya lebih keras lagi untuk mengoptimalkan capaian TPT-nya.



Gambar II-56
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2020- 2024

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2024

Salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan adalah pelatihan tenaga kerja. Berdasarkan analisis korelasi yang dilakukan antara data jumlah pelatihan yang dilaksanakan dengan TPT tahun 2011-2020 maka korelasi antara kedua variabel tersebut sangat lemah atau tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan belum berdampak signifikan bagi penurunan TPT. Strategi pelaksanaan pelatihan harus dilakukan penyesuaian, termasuk pemilihan peserta pelatihan, sehingga diharapkan pelatihan dapat tepat sasaran, meningkatkan kesempatan dan peluang kerja, dan pada akhirnya dapat berdampak bagi penurunan TPT. Upaya bersama yang harus dilakukan adalah

integrasi kebijakan berbagai sektor sehingga dapat saling mendukung atau melengkapi sehingga berdampak bagi penurunan TPT secara optimal.

e. Keselamatan dan Perlindungan

Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan. Di tahun 2021 hingga 2024 semua perusahaan telah menerapkan K3 di lingkungan kerjanya. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-152 berikut.

Tabel II-152
Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
2020	360	484	74,38
2021	484	484	100,00
2022	484	484	100,00
2023	492	492	100,00
2024	492	492	100,00

Sumber: Diperinaker Kota Pekalongan, 2025

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah indikator yang diukur dengan membandingkan jumlah ASN perempuan Pemerintah Kota Pekalongan tahun N dengan seluruh pekerja perempuan (ASN perempuan dan pekerja perempuan di perusahaan formal) Tahun N. Tahun 2024 ASN perempuan di Pemerintah Kota Pekalongan sejumlah 1.824 orang, sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 78.370 orang.

Tabel II-153
Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	1.616	1.564	1.695	1.581	1.825
Jumlah pekerja perempuan (orang)	66.690	77.848	67.496	74.015	78.370
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	2,42	2,01	2,51	2,14	2,33

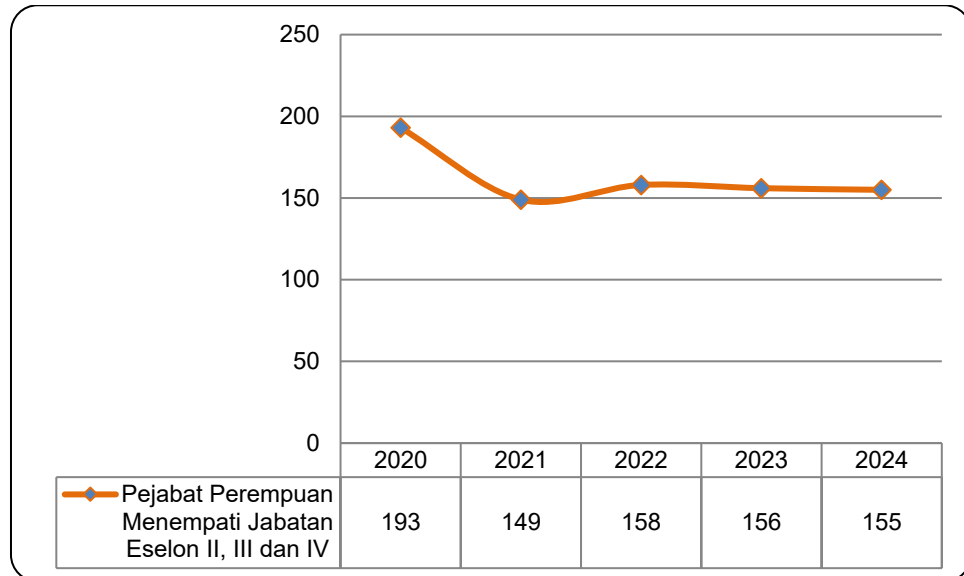
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2025 (diolah), 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah bertambah, semula 1.581 orang pada tahun 2023 menjadi 1.824 orang pada tahun 2024.

b. Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN

Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Pada tahun 2020 pejabat perempuan yang

menduduki eselon II, III dan IV dibandingkan seluruh jabatan yang terisi sebanyak 193 orang. Jumlah tersebut terus menurun sampai pada jumlah 149 orang di tahun 2021 dan baru meningkat lagi pada tahun 2022 yaitu sebesar 158 orang dan 156 orang di tahun 2023. Pada tahun 2024 menurun menjadi 155 orang pejabat perempuan. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar II-57 berikut.

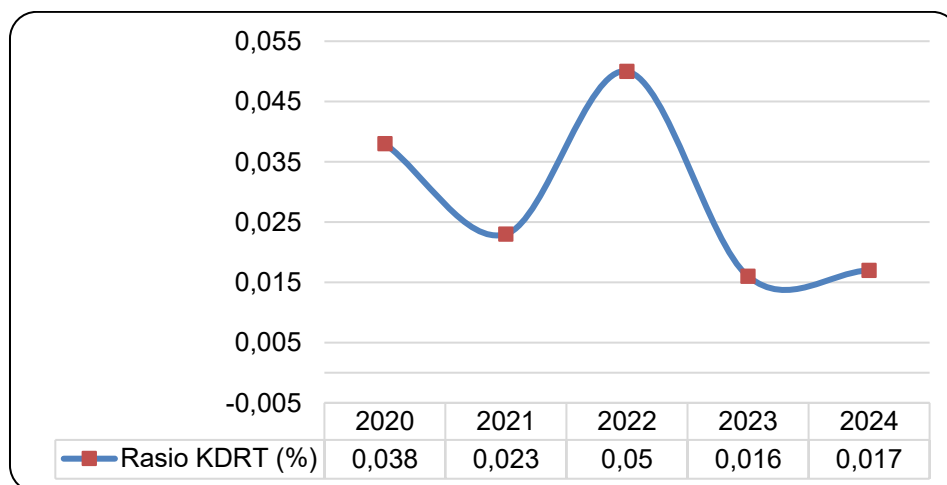


Gambar II-57
Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025 (diolah), 2025

c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2020-2024 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Semakin kecil rasio KDRT menunjukkan indikasi yang semakin baik. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2023 dengan angka rasio 0,016 persen. Pada tahun 2024 persentase naik 0.001% dengan jumlah 13 Kasus KDRT.

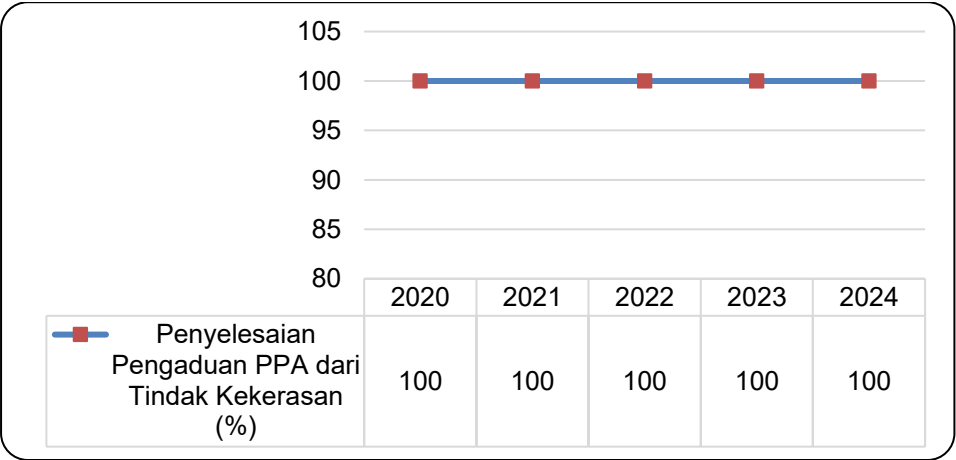


Gambar II-58
Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

d. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan prestasi yang baik. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 seluruh kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dapat diselesaikan. Pada tahun 2024 terdapat 39 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdiri dari 21 orang perempuan dan 18 orang anak. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan yaitu berupa sosialisasi, advokasi baik berupa aturan-aturan hukum perundang-undangan tentang tindak kekerasan maupun kesadaran/kepedulian masyarakat akan tindak kekerasan dan Memberikan pelayanan pengaduan serta pendampingan terhadap korban kekerasan. Salah satu faktor keberhasilan atas prestasi tersebut dikarenakan adanya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA).



Gambar II-59
Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

e. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) didefinisikan sebagai Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ada 24 indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kluster, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; (5) perlindungan khusus.

Pada tahun 2020, Kota Pekalongan meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya. Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya di Tahun 2022, Kota Pekalongan telah mendeklarasikan bebas pekerja anak, advokasi dan peresmian sejumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekalongan, kegiatan Konvensi Hak Anak (KHA) kepada semua guru di Kota Pekalongan baik di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, serta SMA secara mandiri dan bersinergi kepada Pemkot Pekalongan. Upaya lain juga dilakukan untuk memenuhi indikator dan klaster KLA. Hasilnya, pada tahun 2023 Kota

Pekalongan kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya dengan nilai 769,80.

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam ketahanan pangan yang merupakan suatu sistem, mencakup empat sub sistem yaitu: (a) ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Di Kota Pekalongan ketersediaan pangan dalam kurun 5 (lima) tahun (2020-2024) disajikan dalam Tabel II-154. Dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan pada tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan dari tahun 2020, menjadi 5.738.290 dari sebelumnya 4.769.190, pada tahun 2022 dan 2023 kembali menurun menjadi 5.179.300 dan 4.235.430. pada tahun 2024 ketersediaan pangan naik menjadi 4.830.960. Rasio ketersediaan pangan secara otomatis juga sebanding dengan fluktuasi ketersediaan pangan.

Tabel II-154
Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Rasio
2020	4.769.190	307.150	15,53
2021	5.738.290	308.310	18,61
2022	5.179.300	309.742	16,72
2023	4.235.430	317.520	13,34
2024	4.830.960	321.095	15,05

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2025

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Skor PPH selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) disajikan dalam Tabel II-155.

Tabel II-155
Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Skor PPH Kota Pekalongan
2020	92,01
2021	87,10
2022	81,20
2023	93,70
2024	92,12

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2025

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan skor Pola Pangan Harapan antara lain dengan: penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya; penyediaan cadangan pangan daerah; penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; meningkatkan ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar.

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, secara umum dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) jenis kelompok pangan. Pada Tabel II-156. disajikan capaian kelompok konsumsi pangan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kelompok pangan yang juga dapat dikatakan cukup tinggi dalam konsumsi dibanding yang lain adalah sayur dan buah yaitu 68,0 kg per kapita/tahun. Walaupun tiap tahunnya mengalami fluktuasi naik turun. Konsumsi kelompok pangan selanjutnya adalah kelompok pangan hewani yaitu 38,4 kg per kapita/tahun. Konsumsi pangan lain-lain berada di urutan selanjutnya (36,6 kg/kapita/tahun tahun 2024) diikuti dengan kacang-kacangan, umbi-umbian, minyak dan lemak, gula, serta buah/biji berminyak. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-156 berikut.

Tabel II-156
Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-padian	Kg/Kap/th	108,7	114,0	110,9	124,1	113,9
Umbi-umbian	Kg/Kap/th	7,9	12,4	8,8	7,4	6,4
Pangan Hewani	Kg/Kap/th	36,8	35,0	37,0	35,9	38,4
Minyak dan Lemak	Kg/Kap/th	6,6	6,7	7,6	6,7	6,4
Buah/biji berminyak	Kg/Kap/th	0,8	0,8	0,9	0,6	0,9
Kacang-kacangan	Kg/Kap/th	8,4	7,7	7,7	7,4	9,7
Gula	Kg/Kap/th	7,7	8,1	8,1	7,0	6,0
Sayur & Buah	Kg/Kap/th	70,0	64,6	63,7	67,0	68,0
lain-lain	Kg/Kap/th	44,1	37,9	33,4	35,7	36,6

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2025

Dari segi konsumsi energi yang diukur dari kilo kalori (kkal) per kapita/tahun. Konsumsi beras selalu menempati posisi pertama dan secara umum cenderung meningkat tiap tahunnya, dengan jumlah 1.251,5 kkal/kapita/tahun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 1.275,9 kkal/kapita/tahun pada tahun 2021, walaupun pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan dari 1.270 kkal/kapita/tahun pada 2021 menjadi 1.178,1 kkal/kapita/tahun. Urutan berikutnya adalah kelompok pangan hewani, yang pada tahun 2024 meningkat menjadi 290,1 kkal/kapita/tahun dari tahun 2023 sebesar 275,1 kkal/kapita/tahun. Selanjutnya urutan kelompok pangan selalu berubah jenisnya. Pada tahun 2024, setelah padi-padian dan pangan hewani, kelompok pangan selanjutnya adalah minyak dan lemak (156,5 kkal/kapita/tahun), sayur dan buah (141,1 kkal/kapita/tahun), kacang-kacangan, gula, dan kelompok pangan lainnya. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-157 berikut.

Tabel II-157
Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-padian	Kkal/Kg/Kap/th	1251,5	1275,9	1.270,4	1.242,9	1.178,1
Umbi-umbian	Kkal/Kg/Kap/th	24,7	39,8	26,8	23,4	20,0
Pangan Hewani	Kkal/Kg/Kap/th	272,5	258,9	274,6	275,1	290,1
Minyak dan Lemak	Kkal/Kg/Kap/th	160,7	164,5	186,1	165,8	156,5
Buah/biji berminyak	Kkal/Kg/Kap/th	12,7	12,7	13,4	9,8	13,2
Kacang-kacangan	Kkal/Kg/Kap/th	53,8	49,5	49,4	86,6	75,0
Gula	Kkal/Kg/Kap/th	77,5	81,6	81,4	70,5	61,1
Sayur dan Buah	Kkal/Kg/Kap/th	97,3	87,5	84,6	143,7	141,1
Lain-lain	Kkal/Kg/Kap/th	56,1	50,0	50,4	53,0	50,5

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2025

Secara umum, selama lima tahun terakhir, PPH Kota Pekalongan cenderung menurun. Capaian konsumsi kelompok pangan karbohidrat cenderung meningkat, sementara kelompok pangan yang lain cenderung menurun. Hal ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, sebagai hal yang harus diwaspadai bersama.

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi tiap kelompok pangan dari suatu pola ketersediaan dan konsumsi pangan. Pola pangan harapan ini dapat dipahami sebagai komposisi keseimbangan pangan dan kecukupan gizi yang dijadikan sebuah angka penilaian sebuah daya serap komponen-komponen makanan di suatu wilayah sudah mencukupi atau belum. Pola pangan harapan ini harus memenuhi dalam segi kuantitas, kualitas, keragamannya serta memperhatikan aspek sosial budaya, daya terima masyarakat, ekonomi, agama, citarasa, daya cerna, kecukupan gizi dan keseimbangan gizi.

Setiap individu membutuhkan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Energi tersebut bisa kita dapatkan dari makanan yang dikonsumsi. Setiap produk pangan memiliki berbagai komponen gizi yang terkandung di dalamnya. Komponen gizi tersebut dibutuhkan oleh tubuh setiap individu dalam jumlah tertentu. Karena kebutuhan tubuh setiap individu akan komponen gizi berbeda, maka sekarang kita mengenal istilah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pangan beragam dan bergizi artinya terdapat lebih dari satu macam jenis pangan dalam piring sekali makan sehingga dapat memenuhi komponen gizi secara lengkap. Seimbang artinya pangan mengandung komponen-komponen yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral) yang diperlukan tubuh. Terakhir, komponen yang tidak kalah penting dari produk pangan adalah aspek keamanannya. Suatu produk pangan yang aman harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi. Keamanan dari setiap makanan yang dikonsumsi perlu diperhatikan agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan suatu produk pangan. Konsep Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman juga memiliki kelebihan yakni implementasinya dapat memanfaatkan potensi produk pangan yang dihasilkan oleh daerah. Misalnya jika suatu daerah merupakan sentra penghasil jagung, maka jagung tersebut dapat menggantikan beras sebagai bahan pangan sumber karbohidrat.

Kota Pekalongan sangat segera membutuhkan pangan B2SA bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini didasarkan fakta bahwa stunting, AKI, AKB dan AKABA merupakan wujud dari permasalahan kesehatan, di samping permasalahan kesehatan lainnya. Dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa asupan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan dan konsumsi terhadap pangan B2SA sangat mendesak dibutuhkan Kota Pekalongan, terutama untuk mewujudkan generasi Kota Pekalongan yang lebih unggul di masa mendatang. Upaya untuk membumikan penyediaan dan konsumsi pangan B2SA, adalah dengan mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi seluruh pemangku kepentingan. Kampanye pentingnya pangan B2SA harus terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami bahwa pangan B2SA sangat dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat, termasuk janin di dalam kandungan, agar terwujud generasi masa depan yang lebih sehat dan unggul.

Strategi agar skor pola pangan harapan (PPH) dapat mengalami kenaikan di tengah pandemi seperti ini ialah kemudahan masyarakat mengakses pangan yang tersedia beragam. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar kondisi tersebut dapat diwujudkan.

4. Pertanian

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanian kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanian, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dalam pelaksanaan reforma agraria yang merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu Perencanaan Reforma Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pada tahun 2021 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan menyelesaikan 95 % target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kantor Pertanahan Kota Pekalongan mendapat target dari BPN Pusat untuk mensertipikat 3.145 bidang tanah. Saat ini BPN Kota Pekalongan sudah terealisasi 95 persen dari target dan sertipikatnya akan diserahkan secara bertahap. Jumlah realisasi adalah 2.104 sertifikat yang terdiri dari 650 aset pemkot, wakaf 6 bidang, dan milik warga masyarakat (perorangan) sebanyak 1.448.

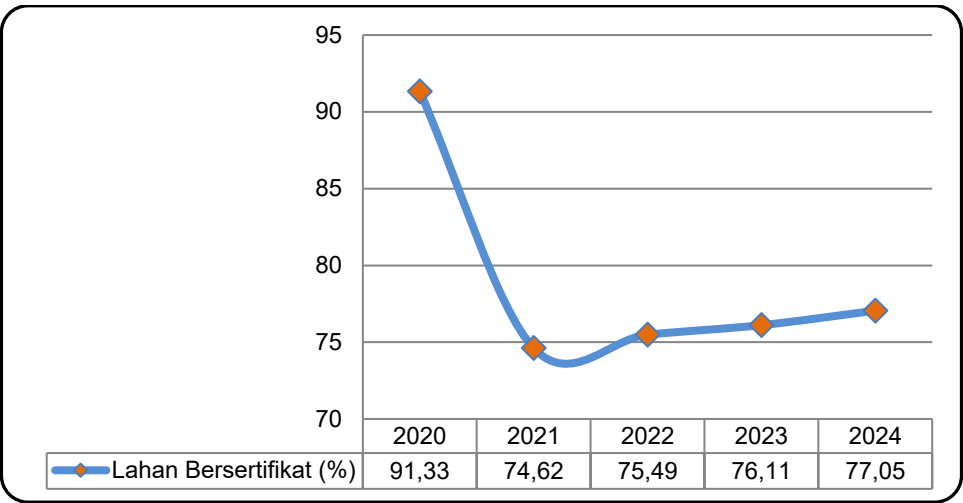
Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, Pada tahun 2020 terjadi perubahan/koreksi luasan wilayah kota Pekalongan, yang semula 4.525 ha terkoreksi menjadi 4.642 ha. Adanya perubahan luasan wilayah mengakibatkan persentase lahan bersertifikat mengalami perubahan. Pada tahun 2020 menjadi 91,33 persen dengan luasan seluas 4.239,02, menjadi menurun persentasenya bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang masih menggunakan luas total wilayah lama (4.525 ha). Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir 2020-2024, disajikan dalam Tabel II-158 berikut.

Tabel II-158
Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas wilayah	4.642	4.642	4.642,00	4.642,00	4.642,00
Luas tanah bersertifikat	4.239,50	3.463,64	3.504,19	3.532,79	3.576,68
Hak Milik	3.360,02	2.590,47	2.549,51	2.592,29	2.614,46
HGB	322,95	212,77	198,64	195,15	203,79
Hak Guna Usaha	6,76	12,11	11,28	11,28	11,89
Hak Pakai	481,01	596,26	635,70	659,72	669,71
Hak Pengelolaan	5,00	31,82	31,82	26,31	27,08
Hak Wakaf	63,76	20,22	32,23	48,02	49,51
Lahan Bersertifikat (persen)	91,33	74,62	75,49	76,11	77,05

Sumber: BPN Kota Pekalongan (diolah), 2024 dan pusaka.pekalongankota.go.id, 2025

Kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. pada tahun 2020 jumlah lahan di Kota Pekalongan yang sudah bersertifikat menurun menjadi 91,33 dan tahun 2021 semakin menurun menjadi 74,62 persen. Hal ini dikarenakan adanya koreksi total luas lahan Kota Pekalongan. lahan bersertifikat di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir 2020-2024, lahan yang bersertifikat terus mengalami kenaikan dari tahun 2022-2024 diangka 75,49 persen, 76,11 persen dan 77,05 persen. Semakin meningkatnya persentase tersebut menjadi salah satu indikasi kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan Secara lengkap disajikan dalam grafik berikut:



Gambar II-60
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

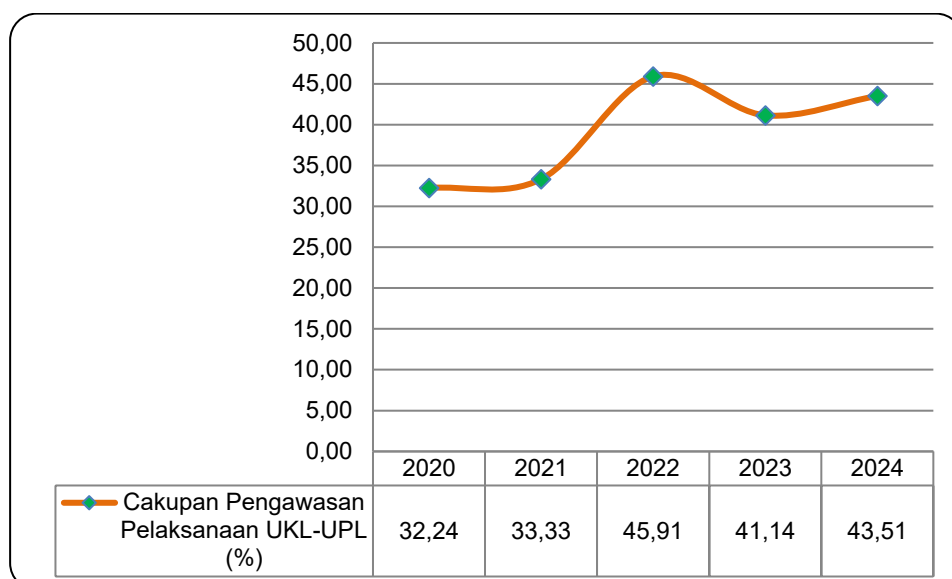
Sumber: BPN Kota Pekalongan (diolah), 2025

Dalam rangka mendukung kegiatan reforma agraria, dalam hal ini terkait penataan akses, dimana dapat memberikan program dukungan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya yang berbasis pada pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan koordinasi dengan Kantah ATR/BPN. Bentuk dukungan yang telah dilakukan meliputi:

1. Koordinasi dalam penyusunan rencana tata ruang, baik RTRW maupun RDTR oleh Bapperida dan DPUPR;
2. Koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain fasilitasi Forum Penataan Ruang (FPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh DPUPR;
3. Koordinasi penataan kawasan kumuh melalui konsolidasi tanah oleh Dinperkim;
4. Penyusunan blok PBB di semua Kecamatan oleh BPKAD; dan
5. Inventarisasi Tanah Pemerintah (Intip) oleh Kantah ATR/BPN dengan dana dari Pemkot Pekalongan oleh BPKAD.
6. Penataan daerah sempadan Loji dengan merelokasi warga dengan menyertakan di Program "Tuku Lemah, Entuk Omah" oleh Dinperkim Kota Pekalongan dengan Disperakim Prov Jateng.
7. Pengembangan Usahan dan Fasilitasi Akses Pemasaran oleh Kantah ATR/ BPN dengan DKP Kota Pekalongan.

5. Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.



Gambar II-61
Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2020-2024

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2025

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2020-2024, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL terus mengalami peningkatan sebagaimana disajikan dalam Gambar II-61.

Pada tahun 2020 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL sebesar 32,24 persen. Pada tahun 2021 sampai dengan 2022, cakupan pengawasan pelaksanaan UKP-UPL mengalami peningkatan bertahap yaitu 33,33 persen pada tahun 2021, 45,91 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL menurun menjadi 41,14 persen, naik kembali pada tahun 2024 mencapai 43,51 persen.

Terdapat peningkatan jumlah pemilik dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) seiring dengan peningkatan jumlah usaha di Kota Pekalongan. Peningkatan ini juga didorong oleh perijinan usaha yang mempersyaratkan disusunnya dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa UKL/UPL maupun amdal bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tingkat pelaporan monitoring UKL/UPL dan amdal juga cenderung meningkat, hal ini menunjukkan naiknya tingkat kesadaran pengusaha dalam pengelolaan lingkungan. Perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran pelaporan diantaranya dengan melakukan pengawasan dan pemberian insentif /disinsentif bagi usaha dan/atau kegiatan yang menaati tertib hukum lingkungan.

Peningkatan persentase tertib hukum lingkungan hidup pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Terutama pada tahun 2023, terdapat peningkatan yang signifikan mencapai 43,04%, baik pada jumlah yang usaha melaporkan UKL-UPL/AMDAL maupun jumlah UKP-UPL/AMDAL. Pada tahun 2020 jumlah yang usaha melaporkan UKL-UPL/AMDAL sebanyak 12, meningkat pada tahun 2021 sebanyak 23, tahun 2022 sebanyak 41, dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 68. Pada tahun 2024 menurun menjadi 34 jumlah usaha yang melaporkan UKL-UPL/AMDAL. Persentase tertib hukum lingkungan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-159 berikut.

Tabel II-159
Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tertib Hukum Lingkungan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha yang melaporkan UKL-UPL/AMDAL	12	23	41	68	34
Jumlah UKL-UPL/AMDAL	158	201	159	158	154
Persentase Tertib Hukum Lingkungan	7,59	11,44	25,81	43,04	39,61

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2024

Usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki rekomendasi persetujuan teknis dan persetujuan teknis PPLH di Kota Pekalongan tidaklah terlalu banyak, hal ini karena jumlah kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memiliki persetujuan teknis tersebut ditujukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan AMDAL, sedangkan di Kota Pekalongan mayoritas hanya wajib SPPL.

Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga

keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2020-2024 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal di Kota Pekalongan tiap tahunnya mengalami penambahan, baik dalam jumlah industri maupun jumlah limbah yang dihasilkan. Namun untuk IPAL Jenggot dan IPAL Industri Besar mengalami penurunan. Pada IPAL Jenggot dengan jumlah industri yang sama pada tahun 2020 (80 industri) jumlah limbah yang dihasilkan menurun dari 700m³ menjadi 600m³. Sedangkan di tahun 2021 dan 2022 tetap sama dengan 2020, dan ditahun 2023 mengalami penurunan yang cukup besar sehingga hanya menyisakan 150m³ saja. Pada IPAL industri besar, dengan berkurangnya jumlah industri pada tahun 2020 (3 industri) maka jumlah limbah berkurang menjadi 500m³. Jumlah ini sama dengan jumlah di tahun 2021 dan 2022. Beberapa usaha yang belum memiliki pengolahan limbah B3 pada umumnya adalah industri kecil. Untuk IPAL Biogas ternak, sejak tahun 2020 sudah tidak ada limbah karena sudah tidak ada industri yang menghasilkan limbah tersebut. Terjadi anomali jumlah limbah pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan cara perhitungan jumlah limbah pada tahun 2020-2023. Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal disajikan dalam Tabel II-160 berikut.

Namun demikian masih terdapat daerah yang merupakan sentra industri kecil yang menghasilkan limbah dan belum terdapat layanan IPAL komunal, yaitu: Pringlangu, Bendan Kergon, Pasir Kraton Kramat, Krapyak, Kelgo, Medono, Kuripan Kertoharjo, sebagian wilayah Jenggot dan sebagian wilayah Banyurip.

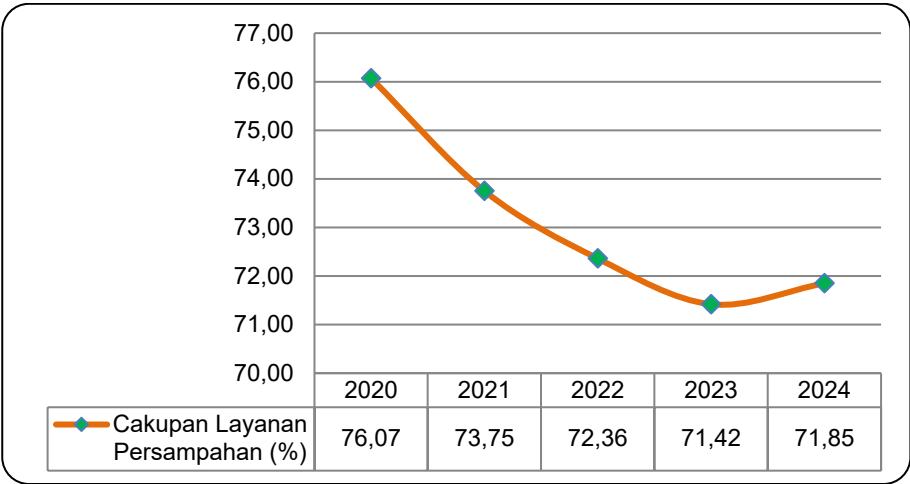
Tabel II-160
Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

IPAL	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)
Kauman	20	125	20	150	19	150	19	200	19	200
Jenggot	80	600	80	600	80	600	80	150	80	150
Industri Kecil	73	426	75	430	75	430	-	-	75	1.998
IPAL Bersama	2	700	2	700	2	700	2	500	2	300
Industri Besar	3	500	3	500	3	500	6	190	8	190
IPAL Biogas Duwet	30	70	30	70	30	70	4	150	4	-
IPAL Biogas Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPAL Pringrejo	25	60	25	75	-	-	-	-	-	-
IPAL Banyurip	55	125	60	150	60	150	-	-	83	250
JUMLAH	288	2.606	295	2.675	269	2.600	171	1440	152	172.800

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2025

Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekalongan. Cakupan pelayanan

persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung turun seperti disajikan dalam Gambar II-62.



Gambar II-62
Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2025

Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2020-2024 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R selama tahun 2020-2024 pengelolaannya setiap hari semakin menurun, namun pada tahun 2022 mulai membaik. Sedangkan jumlah sampah yang terangkut ke TPA mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 sebanyak 65.237,15 ton, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 67.969,68 ton, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 56.118,62 ton dan pada tahun 2023 mejadi 54.627,79 ton. Pada tahun 2024 meningkat sebanyak 55.313,59 ton. Penanganan sampah di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel II-161 berikut.

Tabel II-161
Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Data Sampah per Hari	2020		2021		2022		2023		2024	
	%	(ton)	%	(ton)	%	(ton)	%	(ton)	%	(ton)
Timbulan sampah		78.679,74		79.143,87		59.292,29		59.187,88		59.767,93
Sampah Terkelola	82,91	65.237,15	85,88	67.969,68	94,65	56.118,62	92,30	54.627,79	92,55	55.313,59
Pengurangan		9.554,67		12.907,14		9.625,82		10.463,23		10.067,34
Penanganan Sampah		55.682,48		55.062,54		46.492,80		44.164,56		45.426,25
Sampah Tidak Terkelola	17,09	13.442,59	14,12	11.174,19	5,35	3.173,67	7,70	4.560,09	7,45	4.454,34

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2020-2024 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah. Baik yang terolah di TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah maupun yang terangkut ke TPA. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah semakin menurun disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Sedangkan

pada tahun 2024 jumlah sampah tidak terkelola sebanyak 4.454,34 ton sedikit menurun dari tahun 2023 di angka 4.560,09 ton.

TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Pengoperasian TPA Degayu tersebut merupakan control *landfill*. Jarak TPA terhadap permukiman adalah 0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km.

Permasalahan sampah di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun seperti tidak ada habisnya. Pemerintah Kota Pekalongan tidak dapat menggantungkan sepenuhnya pembuangan sampah ke TPA Degayu. Potensi timbunan sampah di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun juga selalu meningkat. TPA Degayu juga diperkirakan tidak bisa lagi menjadi tempat penampung sampah untuk jangka waktu panjang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan upaya optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R antara lain dengan mengembangkan TPS3R di kelurahan yang belum terjangkau pengolahan sampah secara bertahap dan mengaktifkan kembali TPS3R yang tidak beroperasi dengan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, merevitalisasi TPS3R yang rusak berat dan mengoperasikan kembali TPS3R yang selama ini tidak beroperasi dan merencanakan kebutuhan dan pemenuhan secara bertahap atas sarana prasarana pengumpulan sampah dengan memperhatikan keterjangkauan, volume sampah, jumlah penduduk, dan lokasi TPS. Serta melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan upaya, antara lain DLH telah memiliki perencanaan dalam mencanangkan program OOPS MAMI sebagai strategi pengelolaan persampahan berbasis ekonomi berkelanjutan di Kota Pekalongan dalam pengolahan sampah di kawasan permukiman melalui unit TPS3R. Program OOPS MAMI tersebut digambarkan melalui sistem pengolahan sampah berbasis ekonomi kemasyarakatan secara berkelanjutan dimulai dari proses pemilahan sampah menggunakan mesin yang berfungsi sebagai pemilah sampah non-organik/plastik sekaligus penghancur sampah organik menjadi bubur sampah yang akan diolah menjadi media budidaya untuk larva/maggot BSF (Black Soldier Fly) dan dari proses biokonversi kemudian menghasilkan kasgot yang bernilai jual tinggi sebagai pupuk organik.

Penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat dilakukan yang dalam rangka mengatasi persoalan sampah tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi diperlukan sinergitas yang berkelanjutan antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi kian penting mengingat masyarakat merupakan salah satu pelaku aktif penyumbang sampah. Dengan melibatkan masyarakat akan menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan secara langsung. Sehingga demikian penanganan sampah di Kota Pekalongan semakin efektif dan efisien.

Kesadaran akan pentingnya pengentasan masalah sampah di benak masyarakat tidak akan muncul begitu saja. Diperlukan adanya pendekatan terukur berupa pemberian pemahaman atau pengetahuan akan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, perlu penekanan akan pentingnya literasi sampah di masyarakat. Sampai saat ini, kita belum melihat penekanan literatur yang spesifik terhadap pengolahan sampah.

Belum ada gerakan literasi khusus yang dilakukan dengan serius. Penguatan literasi sampah di Kota Pekalongan, dimulai dengan literatur yang paling sederhana baik di dunia pendidikan maupun kepada masyarakat umum secara langsung.

Dimulai dari penguatan slogan atau tagline seputar sampah. Misalnya, mengubah tagline yang selama ini kita kenal “buanglah sampah pada tempatnya” menjadi “sampahmu tanggung jawabmu”, atau “sampahmu cerminan dirimu”. Dengan meningkatkan literasi sampah, masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan melakukan tindakan yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil IKLH Kota Pekalongan pada tahun 2020-2024 yang disajikan dalam Tabel II-162 berikut.

Tabel II-162
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2020	35,33	79,96	23,60	50,84
2021	45,00	80,21	22,40	54,31
2022	45,33	79,29	23,77	54,36
2023	48,86	80,33	24,39	56,24
2024	50,56	84,98	26,14	59,15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami tren naik setiap tahunnya. Jika dilihat masing-masing komponen maka IKU merupakan komponen yang berkontribusi baik terhadap IKLH, sementara dua komponen lainnya yaitu IKA dan IKTL nilainya masih sangat rendah.

Pada tahun 2023 berdasarkan Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023 bahwa terdapat perubahan perhitungan IKLH yaitu : a) Metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru Metode IKA INA mengacu pada NSF-WQI (National Sanitation Foundation Water Quality Index), b) Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu Particulate Matter 2.5 mikron (PM 2.5), dan c) Rumus perhitungan IKL mengalami perubahan yaitu, semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL. Sehingga pada tahun 2023 nilai IKLH menjadi 63,80.

Rendahnya IKA di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, DO, dan Fecal Coliform. Parameter tersebut merupakan karakteristik dari limbah cair domestik yang bersumber dari pemukiman berupa grey water yang merupakan hasil dari cucian dapur, cucian pakaian dan kamar mandi, dan sekitar 60-85 persen dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair domestik. Karakteristik dari limbah domestik (*grey water*) yaitu mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan potasium, unsur tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Tingginya kadar organik dalam perairan akan berdampak pada tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya konsentrasi DO. Adanya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan merupakan salah satu potensi terhadap tingginya pencemaran air di Kota Pekalongan.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Metode perhitungan IKTL yang mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami Sementara itu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pekalongan dari tahun 2018-2022 masih sama, dengan nilai IKTL yang kecil. Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kota Pekalongan lebih didominasi oleh pemukiman/kawasan terbangun, sedangkan persentase tutupan lahannya masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya upaya dalam memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Pekalongan terutama di kawasan mangrove.

Kualitas tutupan lahan dapat diukur dengan berbagai parameter seperti keragaman jenis vegetasi, kepadatan vegetasi, keberadaan dan kondisi habitat satwa liar, serta kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh tutupan lahan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan lingkungan kota, seperti menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati dan menyerap polusi udara. Oleh karena itu, RTH menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan.

Persentase tersedianya luasan RTH publik di Kota Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,89 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 18,6 persen. Hal ini disebabkan adanya revisi RTRW pada tahun 2020 sehingga dilakukan pendataan ulang untuk luasan RTH serta adanya perubahan perhitungan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Persentase luasan RTH dari tahun 2021 sampai dengan 2023 terus meningkat, sebagaimana disajikan pada Tabel II-163 berikut.

Tabel II-163
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik (persen)	18,60	2,89	2,90	2,94	2,94

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2025

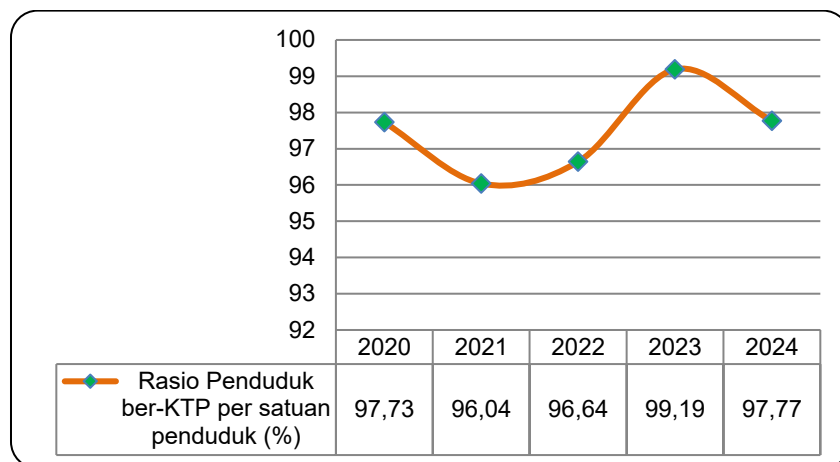
Kegiatan edukasi peduli Lingkungan hidup dilakukan melalui media sosial dan media elektronik yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat dan komunitas secara luas. Pengaduan masyarakat terkait kasus lingkungan ditindaklanjuti dengan cara mediasi antara pihak pengadu dan pihak yang diadukan, akan tetapi ketika kemudian rekomendasi yang didapatkan tidak dilaksanakan oleh pihak yang diadukan maka terkesan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Tetapi pengaduan yang sifatnya permohonan pemotongan pohon tetap kita hubungi pengadu tetapi kita kaji dahulu apakah perlu dipotong atau tidak.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga pada tahun 2024 mencatat kepemilikan KTP-el sebanyak 97,77 persen. Angka tersebut turun dari capaian tahun 2023 sebanyak 99,19 persen.



Gambar II-63
Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2025

b. Persentase Penduduk ber-NIK

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Dalam lima tahun terakhir (tahun 2020-2024), semua penduduk di Kota Pekalongan telah memiliki NIK sebagaimana disajikan dalam Tabel II-164 berikut.

Tabel II-164
Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100

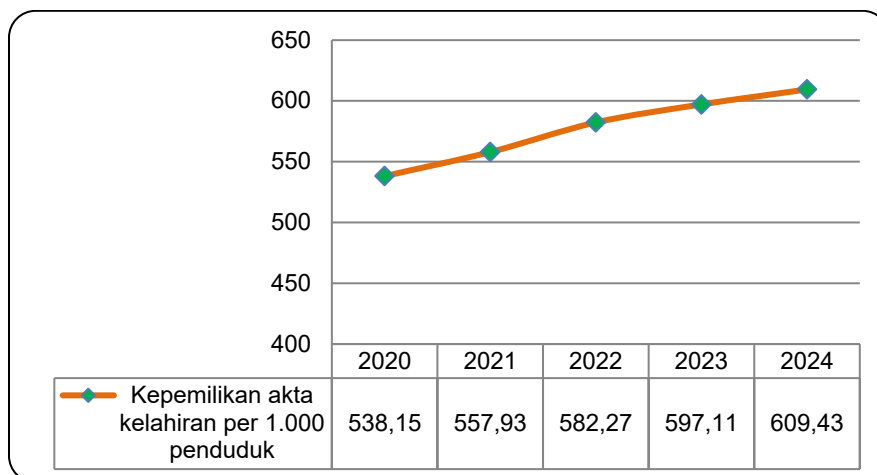
Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2025

c. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk.

Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Semula sebanyak 538,15 per 1.000 penduduk di tahun 2020, menjadi 609,43 per 1.000

penduduk di tahun 2024. Secara lengkap, data kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan dalam Gambar II-64 berikut.



Gambar II-64
Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan (diolah), 2025

d. Penerbitan Akta kematian

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian.

Dalam lima tahun terakhir, penerbitan akta kematian terus meningkat. Pada tahun 2020 diterbitkan sebanyak 3.220 akta, pada tahun 2021 diterbitkan sebanyak 3.970, pada tahun 2022 menurun menjadi 3.020 akta. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan hingga diterbitkan 4.053 akta dan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 3.650 akta yang diterbitkan. Sebagaimana disajikan dalam Tabel II-165 berikut.

Tabel II-165
Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Akta Kematian
2020	3.220
2021	3.970
2022	3.020
2023	4.053
2024	3.650

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2025

e. Penerbitan Akta Nikah

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Di Kota Pekalongan, akta nikah hanya diterbitkan bagi penduduk non

Islam. Sepanjang lima tahun terakhir, akta nikah yang diterbitkan tidak banyak, sekitar 41-55 lembar per tahunnya.

Tabel II-166
Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Akta Nikah
2020	45
2021	50
2022	52
2023	55
2024	41

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2025

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. Jenis LKK paling sedikit meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada tahun pertama dari periode 2013-2017 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini berkurang menjadi 27 LPM pada tahun 2014 hingga sekarang, seiring dengan penggabungan kelurahan dari 47 menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-167 berikut.

Tabel II-167
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah LPM
2020	27
2021	27
2022	27

Tahun	Jumlah LPM
2023	27
2024	27

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah dalam memberdayakan peran ibu-ibu di Kota Pekalongan. Jumlah PKK aktif tahun 2020 sampai dengan 2024 sebanyak 32 PKK, terdiri dari 27 PKK kelurahan, 4 PKK kecamatan dan 1 PKK tingkat kota.

Tabel II-168
PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah PKK Aktif
2020	32
2021	32
2022	32
2023	32
2024	32

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Pada tahun 2020-2021 jumlah Posyandu aktif sebanyak 413, per Januari tahun 2022 data posyandu aktif bertambah 1, dan di tahun 2023 jumlah posyandu kembali bertambah menjadi 416. Pada tahun 2024 jumlah posyandu aktif bertambah menjadi 418. Jumlah ini bertambah karena adanya pemekaran yang disebabkan jumlah sasaran yang terlalu banyak dan adanya komunitas perumahan baru. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-169 berikut.

Tabel II-169
Posyandu Aktif di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Posyandu Aktif
2020	413
2021	413
2022	414
2023	416
2024	418

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan & BPS
Kota Pekalongan, 2025

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Artinya, jumlah akseptor KB semakin menurun. Namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 73,19 dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 64,41. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel II-170 berikut.

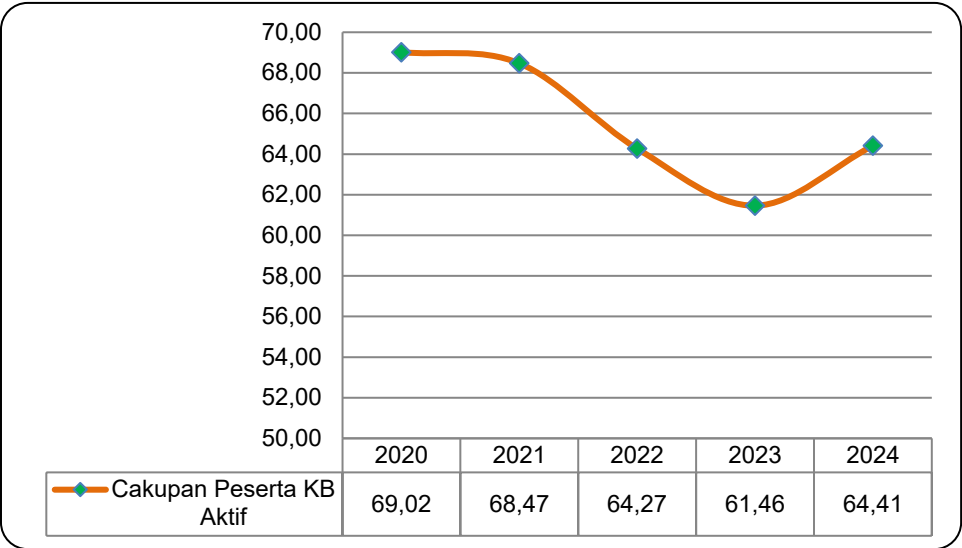
Tabel II-170
Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio
2020	45.836	31.636	69,02
2021	47.444	32.483	68,47
2022	27.868	43.359	64,27
2023	42.001	30.743	73,19
2024	43.242	27.892	64,41

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur. Cakupan peserta KB Aktif dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2024 cenderung berfluktuasi sebagaimana disajikan dalam Gambar II-65 berikut.



Gambar II-65
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

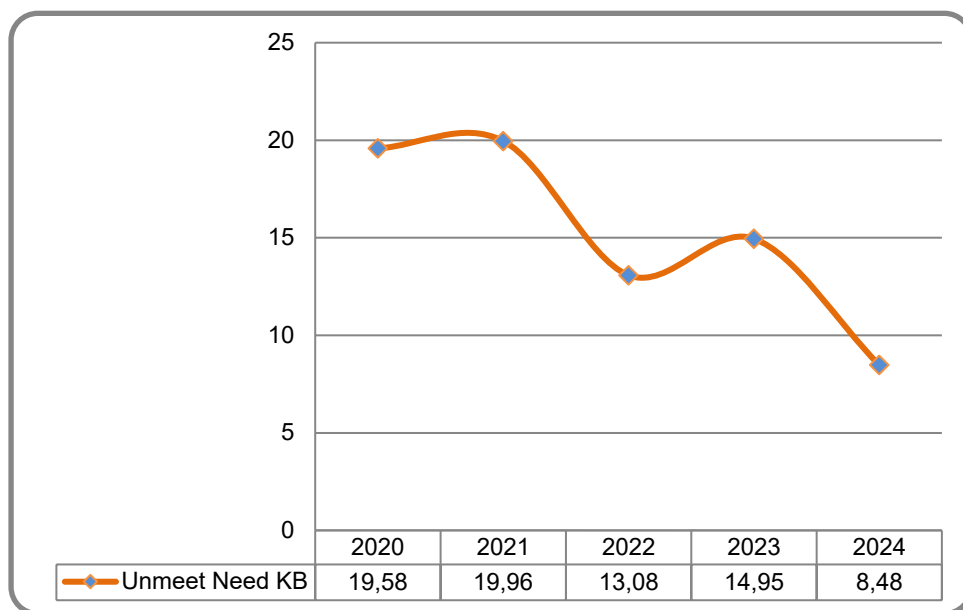
c. Cakupan Unmet Need KB

Unmet need KB didefinisikan sebagai persentase perempuan usia subur yang tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan namun tidak menggunakan kontrasepsi seperti IUD, PIL, suntik, implant, obat vaginal, dan kontrasepsi mantap untuk dirinya atau untuk suaminya atau wanita yang sedang hamil

dan terjadinya kehamilan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang dikehendaki dan sebelum hamil tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Cakupan Unmet Need KB Kota Pekalongan dari Tahun 2020 sampai dengan 2021 cenderung mengalami peningkatan, terutama pada saat terjadinya pandemi pada tahun 2020-2021 yaitu sebesar 19,5 di tahun 2020 meningkat cukup signifikan menjadi 19,96 di tahun 2021. Hal ini disebabkan pada masa pandemi kegiatan pelayanan KB tidak dilaksanakan. Namun menjelang akhir tahun 2021 kegiatan pelayanan KB mulai dilaksanakan dengan menerapkan protokoler kesehatan secara ketat sehingga cakupan Unmet Need bisa diturunkan menjadi 13,08 persen pada tahun 2022. Namun cakupan Unmet Need KB kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 14,95 persen. Cakupan Unmet Need KB turun kembali pada tahun 2024 menjadi 8,48 persen.

Cakupan Unmet Need KB dapat dilihat pada Gambar II-66 sebagai berikut.



Gambar II-66
Cakupan Unmet Need KB di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

9. Perhubungan

a. Kepadatan Lalu Lintas

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur sektor perhubungan. Lokasinya yang strategis juga digunakan sebagai tempat istirahat maupun sekedar transit untuk melanjutkan perjalanan ke daerah atau tempat selanjutnya. Saat ini terdapat dua jalur yang dapat dilalui kendaraan untuk melintasi Kota Pekalongan yaitu perlintasan Pantai Utara (Pantura) dan perlintasan Jalan Tol Transjawa yang semenjak tahun 2018 telah difungsikan. Dua jalur ini membagi kepadatan yang sebelumnya dibebankan pada satu jalur yaitu Jalur Pantura sehingga saat ini kepadatan yang terjadi akibat kendaraan besar yaitu truk dan bus berkurang.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia berdampak terhadap hampir semua sendi kehidupan, salah satunya yaitu adanya kebijakan pembatasan mobilitas. Dengan adanya kebijakan ini, arus lalu lintas menurun drastis yang mengakibatkan penurunan VC ratio menjadi 0,36. Meskipun demikian, mobilitas darat tetap dapat dilakukan. Pada tahun 2021, sudah masuk era new normal dimana PPKM sudah mulai longgar dan pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali

dan bermunculan yang baru. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjunginya sehingga mobilitas di perkotaan cenderung ramai kembali. Pada tahun 2021 VC ratio meningkat menjadi 0,49. Dan pada tahun 2022 VC Ratio menurun menjadi 0,39. Pada tahun 2023 VC ratio meningkat menjadi 0,44. Hal ini disebabkan arus lalu lintas yang semakin meningkat pada seluruh ruas jalan di seluruh jalan kota sehingga menyebabkan nilai VC Ratio juga meningkat, dimana artinya pada tahun 2023 terdapat kepadatan kendaraan pada ruas jalan-jalan kota.

Range nilai VC ratio ditakegorikan ke dalam 6 (enam) tingkat pelayanan jalan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-171 berikut.

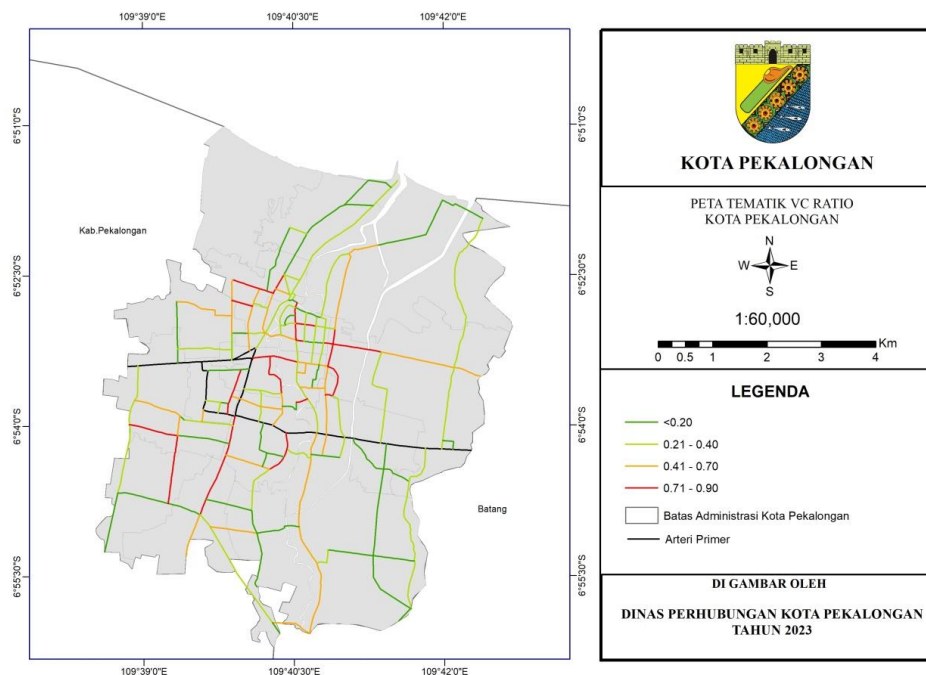
Tabel II-171
Kategori Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	V/C Rasio
A	0,0-0,20
B	0,21-0,44
C	0,45-0,74
D	0,75-0,84
E	0,85-1, 00
F	>1, 00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

Dari tabel Tingkat Pelayanan diatas, jalan-jalan yang memiliki tingkat pelayanan A, pada ruas tersebut kendaraan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan B, kendaraan dapat memilih kecepatannya namun kecepatan tersebut sedikit terbatas oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan C kecepatannya dibatasi oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan D arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah, volume lalu lintas mendekati kapasitas ruas jalan yang ada. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan E, kecepatannya rendah volume sudah hampir sama dengan kapasitas yang ada, pada tingkat pelayanan ini ruas jalan bisa dikatakan mengalami kemacetan. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan F, arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Peta V/C Ratio ruas jalan di Kota Pekalongan disajikan dalam Gambar II-67 berikut.



Gambar II-67
Peta V/C Ratio Ruas Jalan di Kota Pekalongan

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan Gambar II-67 diatas, dapat dilihat peta kinerja ruas jalan di Kota Pekalongan. Persebaran lalu lintas yang tidak merata terjadi di Kota Pekalongan, hal itu terjadi karena pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas (seperti pusat bisnis, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, acara khusus, objek pariwisata, dan lainnya) di Kota Pekalongan tidak merata pula. Sehingga terjadi kemacetan pada beberapa titik ruas di Kota Pekalongan kerana pada lokasi terdapat pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas, sehingga pola pergerakan lalu lintas warga kota pekalongan hanya pada ruas-ruas jalan di sekitar lokasi tersebut.

Oleh karena itu pengembangan Kawasan Pekalongan Baru sebagai pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas yang baru dapat mengurangi kemacetan kendaraan serta pola pergerakan lalu lintas di kota pekalongan akan menjadi merata sehingga kemacetan akan berkurang.

Pengembangan Kawasan Pekalongan Baru dapat menjadikan persebaran lalu lintas yang merata. Serta dalam pengembangannya akan menimbulkan akses jalan baru guna kelancaan lalu lintas di Kawasan Pekalongan Baru.

Kajian Lalu Lintas Kawasan Pekalongan Baru diperlukan untuk dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi yang efektif dalam penentuan kebijakan penataan Manajemen Lalu Lintas di Kawasan Pekalongan Baru. Tingkat pelayanan disajikan dalam Tabel II-172 berikut.

Tabel II-172
Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D	Tingkat Pelayanan E
Jl. Sriwijaya	Jl. Imam Bonjol	Jl. Karya Bhakti	Jl. Dr. Cipto	Jl. Seruni
Jl. Diponegoro	Jl. Supriyadi	Jl. Gajah Mada	Jl. Urip Sumoharjo	Jl. Hayam Wuruk

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D	Tingkat Pelayanan E
Jl. Asem Binatur	Jl. Trikora	Jl. Untung Suropati	Jl.	Jl. Sultan Agung
Jl. Mataram	Jl. Veteran	Jl. Saelan	Jl. Bandung	Jl. K.H. Mas Mansyur
Jl. Jawa	Jl. Kurinci	Jl. Pattimura	Jl. Urip Sumoharjo	Jl. Teratai
Jl. Angkatan 45	Jl. R.A. Kartini	Jl. Jendral Sudirman	Jl. Dr. Cipto	-
Jl. Cempaka	Jl. Semarang	Jl. Dr. Sutomo	-	-
Jl. Otto Iskandar Dinata	Jl. Wahid Hasyim	Jl. P. Kemerdekaa	-	-
Jl. Jeruk	Jl. K.H. Ahmad Dahlan	Jl. Merdeka	-	-
Jl. Tritura	Jl. W.R. Supratman	Jl. Tondano	-	-
Jl. Majapahit	Jl. Progo	Jl. Pelita II	-	-
Jl. Kutilang	Jl. Truntum	Jl. Ki Mangun Sarkoro	-	-
Jl. Surabaya	Cendrawasih	Jl. Jlamprang	-	-
Jl. KH. Hasyim Asyari	Jl. Bahagia	Jl. Sumatera	-	-
Jl. Labuan	Jl. Slamet	Jl. Sunan Ampel	-	-
Jl. Melati	Jl. Ahmad Yani	Jl. Dharma Bhakti	-	-
Jl. Kenanga	Jl. Jetayu	Jl. Sulawesi	-	-
Jl. Achmad Alf Arslan Djunaid	Jl. Patriot	Jl. Hos Cokroaminoto	-	-
-	Jl. Pramuka	Jl.H.Agus Salim	-	-
-	Jl. Irian	Jl. Pemuda	-	-
-	Jl. Kalimantan	Jl. Manggis	-	-
-	Jl. Merak	Jl. Angkatan 66	-	-
-	-	Jl. Salak	-	-
-	-	Jl. Argopuro	-	-
-	-	Jl. Kemakmuran	-	-
-	-	Jl. Gatoto Subroto	-	-
-	-	Jl. Hasanudin	-	-
-	-	Jl. Maninjau	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Hingga saat ini selain persebaran pola pergerakan kendaraan yang tidak merata, kepadatan lalu lintas dipengaruhi oleh lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa.

Kepadatan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekalongan saat ini bercampur antara arus lalu lintas menerus dan arus lalu lintas lokal. Hal itu menyebabkan bercampurnya kendaraan-kendaraan angkutan barang yang bermuatan berat dan kendaraan penumpang dengan kendaraan-kendaraan warga lokal Kota Pekalongan sehingga menyebabkan kemacetan. Terutama pada ruas Jl. KH Mas Mansyur yang merupakan Jalur Pantura yang berpotongan dengan perlintasan kereta api double track. Pada saat

kereta melintas maka akan terjadi antrian dan tundaan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun, jika selanjutnya terdapat Jalan Lingkar Petanglong, maka arus lalu lintas akan terurai, jadi arus lalu lintas dapat terbagi menjadi 3 yaitu Perlintasan Pantura, Jalan Tol Trans Jawa dan Jalur Lingkar Petanglong.

Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keselamatan, keamanan, ketertiban pengguna jalan, serta kebersihan dan kenyamanan kota terutama pada tata ruang kota. Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Akibat lalu lintas yang bercampur, terutama kendaraan berdimensi besar, sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Salah satu sektor andalan Kota Pekalongan adalah perdagangan dan jasa. Dengan terbatasnya luas wilayah serta kawasan perdagangan dan jasa, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kesulitan dalam mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di lokasi lain. Jika kawasan perdagangan dan jasa tidak bisa berkembang optimal tentunya akan berdampak juga bagi upaya-upaya pengembangan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya Jalan Lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Petanglong, yang berpusat di Perkotaan Petanglong, merupakan salah satu wilayah Pengembangan di Jawa Tengah. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Petanglong merupakan salah satu kawasan strategis di Jawa Tengah. Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, di wilayah Kota Pekalongan khususnya, dan Kawasan Perkotaan Petanglong pada umumnya.

Diperlukan kajian Lalu Lintas terkait pembangunan jalan lingkar Petanglong dan sekaligus menjadi tanggul rob. Kajian Lalu Lintas pembangunan Jalan Lingkar Petanglong tersebut juga dapat menjadi acuan/ dasar untuk pengambilan kebijakan-Kebijakan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan serta manajemen lalu lintas seperti contohnya pembatasan kendaraan angkutan barang, peningkatan sistem transportasi umum, penerapan teknologi lalu lintas yang cerdas, dan lainnya.

Dalam dimensi yang lain, mencontoh kasus di daerah lain, pembangunan jalan lingkar di Kota Petanglong dan/atau Kawasan Perkotaan Petanglong dapat dilakukan dengan konstruksi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Jika jalan lingkar tersebut dapat terwujud diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan wilayah Kota Pekalongan dan kawasan sekitarnya.

b. Angkutan Umum

Jumlah izin trayek yang dikeluarkan di Kota Pekalongan mengalami tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, sementara jumlah penduduk terus meningkat. Rasio izin trayek terhadap jumlah penduduk juga mengalami penurunan signifikan, dari 0,00024 pada tahun 2020 menjadi 0,00007 pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan beberapa faktor, seperti berkurangnya minat atau kebutuhan akan angkutan umum berizin, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, atau adanya regulasi yang lebih ketat dalam penerbitan izin trayek. Dampak dari penurunan izin trayek ini perlu dianalisis lebih lanjut, terutama terkait ketersediaan transportasi umum yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Tabel II-173
Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2020	73	307.150	0,00024
2021	73	308.310	0,00012
2022	30	309.742	0,00009
2023	30	317.535	0,00009
2024	23	321.095	0,00007

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta angkutan regional, Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) terminal tipe A yaitu Terminal Bus Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo, dimana tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang.

Berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat No: SK.687/AJ/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur Faktor muat (Load Factor) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang dinyatakan dalam persen. Sedangkan standar yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1993, untuk nilai Load Factor antara 70 persen-110 persen. Jika nilai Load Factor lebih dari 110 persen maka penumpang akan merasakan kurang nyaman dalam menggunakan angkutan umum tersebut, jika nilai Load Factor kurang dari 70 persen menggambarkan bahwa angkutan umum tersebut kurang optimal dalam melayani pergerakan penumpang. Sedangkan standar nilai Load Factor yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002 adalah sebesar 70 persen. Di Kota Pekalongan Load Factor angkutan kota yang berkapasitas kurang lebih 12 penumpang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berada dikisaran 35 persen sampai dengan 41 persen. Kurang optimalnya angkutan kota dalam melayani pergerakan penumpang dikarenakan masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi terlebih lagi adanya angkutan online, sehingga load faktor angkutan kota kurang dari 70 persen.

Penurunan Load Factor angkutan tahun 2020-2024 dari 41% (2020-2021), 37% (2022), 35% (2023), dan 33% (2024). Hal ini disebabkan oleh penurunan minat Masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, Adapun langkah strategis yaitu dengan memperbaiki prasarana angkutan umum sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum sehingga diharapkan minat Masyarakat dapat meningkat dengan meningkatnya minat Masyarakat dalam menggunakan angkutan umum maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya load factor angkutan umum.

Tabel II-174
Faktor Muat (*Load Factor*) Angkutan Kota di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Faktor Muat (<i>Load Factor</i>) (persen)	41	41	37	35	33

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, pembangunan terminal penumpang Tipe C direncanakan akan dibangun secara bertahap mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Adapun lokasi yang akan dibangun terminal penumpang Tipe C berada di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Untuk saat ini belum terlealisasinya Implementasi konkrit realisasi pembangunan Terminal Tipe C disebabkan lokasi yang direncanakan sebagai terminal Tipe C masih digunakan sebagai pasar darurat.

Dari tahun 2020 hingga 2021 jumlah penumpang yang melalui terminal mengalami penurunan yaitu, dari 771.497 orang di tahun 2020 dan menurun sebanyak 482.290 orang di tahun 2021. Penurunan ini selain karena banyaknya masyarakat yang memilih bepergian menggunakan kendaraan pribadi, juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 jumlah penumpang yang melalui terminal meningkat signifikan sebanyak 916.888 orang dan tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah sebesar 819.398. Sedangkan otobis AKAP dan AKDP mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2023. Kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 104.286. Hal tersebut berarti bahwa dapat dikatakan persentase AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan mengalami naik turun, sebagaimana disajikan dalam Tabel II-175 berikut ini.

Tabel II-175
Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Otobis AKAP AKDP	125.162	73.150	130.090	68.172	104.286
Jumlah Penumpang yang melalui terminal	771.497	482.290	916.888	819.398	499.504
Persentase Angkutan Darat	16,2	15,1	14,1	12,01	20,87

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

c. Kendaraan Laik Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Pekalongan dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 107 kendaraan, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 115 kendaraan dan meningkat menjadi 126 kendaraan di tahun 2022. Pada

tahun 2023, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum menurun menjadi 102 kendaraan dan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 104.

Kendaraan wajib uji yang melakukan KIR di Kota Pekalongan dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan KIR sebanyak 844 kendaraan, kemudian menurun di tahun 2021 menjadi 617 kendaraan, dan mengalami peningkatan menjadi 806 kendaraan di tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan KIR mengalami penurunan menjadi 716 kendaraan dan pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 706.

Tabel II-176
Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	107	115	126	102	104
Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang melakukan Uji Kir	844	617	806	716	706
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	12,67	13,62	15,63	14,24	14,73

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum dalam berkendara ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (Smoke Tester) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan Pit Lift dan Play Detector; uji lampu utama; uji side slip; uji axle load; dan speedometer tester. Dalam proses pelayanan uji kelayakan kendaraan terdapat beberapa jenis pelayanan seperti uji pertama, uji berkala, numpang uji masuk, numpang uji keluar, mutasi masuk, maupun mutasi keluar. Dan masing-masing proses pelayanan uji kelayakan kendaraan tersebut terdapat persyaratan yang harus dilampirkan ketika pelaksanaan begitu juga dengan lamanya proses uji kelayakan kendaraan umum disajikan dalam Tabel II-177 berikut.

Tabel II-177
Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR)
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lama Pengujian (Menit)	30	30	30	30	30

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR kendaraan bermotor. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum pada tahun 2020 hingga 2023 yaitu Rp 75.000,00. Kemudian pada tahun 2024 biaya pengujian kelayakan angkutan umum ditiadakan atau gratis.

Tabel II-178
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum
di Kota Pekalongan 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	75.000	75.000	75.000	75.000	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

d. Perparkiran

Dishub Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 415 titik parkir yang tersebar di Kota Pekalongan yang didominasi di Jalan Urip Sumoharjo dimana setiap titik parkir disesuaikan berdasarkan surat tugas oleh juru parkir yang ditunjuk yang difasilitasi dengan perlengkapan seperti rompi petugas, peluit, bendera dan sebagainya. Adapun titik parkir yang berpotensi penarikan retribusi terbesar di Kota Pekalongan yang mampu mendorong capaian retribusi parkir diantaranya berada di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hasanudin, Jalan Sultan Agung, Kawasan Sorogenen, serta Alun-Alun yang mampu menyumbang hingga 60 persen. selain mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum (*on street*), Dishub Kota Pekalongan juga melakukan penarikan retribusi parkir *off street* (di luar badan jalan) seperti di Jalan Veteran depan RSUD Kraton dan trayek terminal serta parkir insidentil (biasanya saat digelar sebuah *event* kegiatan). Dalam mencapai target yang ditetapkan, Dishub Kota Pekalongan telah membentuk tim pembinaan dan pengawasan parkir yang terdiri dari unsur Subdenpom, Polres, Kejaksaan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Data penyelenggaraan parkir di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-179 berikut.

Tabel II-179
Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin
di Kota Pekalongan 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah parkir yang berizin	419	381	376	425	415
Jumlah potensi parkir yang belum berizin	15	13	12	10	9
Jumlah seluruh parkir	434	394	388	435	424
Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin	96,54	96,70	96,91	97,70	97,87

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

e. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan (pengendara maupun para pejalan kaki). Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan. Pemenuhan kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Pekalongan terakut dengan banyaknya kerusakan fasilitas lalu lintas di lapangan serta banyaknya permintaan dari warga terkait permintaan fasilitas lalu lintas sehingga diperlukan penggantian fasilitas lalu lintas dilaksanakan

secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Tabel II-180
Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemasangan Rambu lalu lintas Pada Tahun n	33	16	10	19	16
Jumlah Rambu lalu lintas yang Seharusnya Tersedia	100	30	22	20	12
Persentase Pemasangan Rambu lalu lintas	33,00	53,33	45,45	95	133,3
Jumlah Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) Pada Tahun n	0	0	0	0	0
Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) yang Seharusnya Tersedia	10	10	0	0	0
Persentase Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)	0,00	0,00	0,00	0	0
Jumlah Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pada Tahun n	0	0	0	0	0
Jumlah Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang Seharusnya Tersedia	2	1	0	0	0
Persentase Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	0,00	0,00	0,00	0	0
Jumlah Pemasangan guardrail Pada Tahun n	0	0	0	0	0
Jumlah guardrail yang Seharusnya Tersedia	10	0	0	0	0
Persentase Pemasangan guardrail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan marka jalan Pada Tahun n	12 lokasi	10 lokasi	8 lokasi	0	16 lokasi
Jumlah marka jalan yang Seharusnya Tersedia	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	0	150 ruas jalan
Persentase Pemasangan marka jalan	8,00	6,67	5,33	0	10,6

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

f. Perkeretaapian

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Barat. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana disajikan dalam Tabel II-181 mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 jumlah

penumpang yang menaiki kereta api melalui Stasiun Pekalongan sebanyak 271.920 penumpang. Kemudian 335.956 penumpang pada tahun 2021, 420.786 penumpang pada tahun 2022, 556.494 penumpang pada tahun 2023, dan 623.903 penumpang pada tahun 2024. mengalami peningkatan menjadi 335.956 penumpang Namun terjadi penurunan drastis jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa layanan kereta api pada tahun 2020 menjadi 271.920 orang, dan meningkat di tahun 2021 menjadi 335.956 orang. Hal tersebut karena karena pandemi COVID-19 membuat adanya larangan bepergian ke luar daerah di tahun 2020 dan era new normal yang membolehkannya kembali bepergian ke luar daerah dengan batasan-batasan tertentu.

Tabel II-181
Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui
Stasiun KA Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan
2020	271.920
2021	335.956
2022	420.786
2023	556.494
2024	623.903

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan Dalam Angka tahun 2025, 2025

Kota Pekalongan berada dibawah daerah operasi PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang. Panjang jalur operasional kereta api DAOP 4 Semarang adalah sepanjang 656 km, dimana jalur kereta sepanjang 6,85 km berada di wilayah Kota Pekalongan, dengan jumlah perlintasan sebidang sebanyak 10 perlintasan.

Kota Pekalongan memiliki 10 Perlintasan Sebidang Kereta Api yang semua lokasinya sudah tersedia palang pintu kereta api. Pengelolaan Palang pintu kereta api Kota Pekalongan yaitu oleh Dinas perhubungan kota Pekalongan dan PT. Kereta Api Indonesia, Disnas Perhubungan Kota Pekalongan mengelola 4 pos perlintasan sebidang dimana 4 titik perlintasan sebidang tersebut sudah memiliki pos petugas jalur lintasan kereta api dan palang pintu. Yang terdiri dari Pos Gamer, Pos Dekoro, Pos Pusri dan Pos Polisi Militer. Untuk 6 pos perlintasan sebidang selanjutnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia. Terdiri dari Pos Tirto, Pos Bendan, Pos Sapuro, Pos Keputran, Pos Noyotaan dan Tondano. Dimana 6 titik sudah memiliki palang pintu, dan 5 titik sudah terdapat Pos petugas jalur lintasan kereta api.

Tabel II-182
Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Rel Kereta Api	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km
Jumlah Perlintasan Rel dengan jalan	10	10	10	10	10
Perlintasan Sebidang	10	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Sebidang	-	-	-	-	-
Perlintasan Resmi	10	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Resmi	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

g. Keselamatan Lalu Lintas

Angka kecelakaan secara umum menggambarkan kecelakaan total yang terjadi. Di dalam angka kecelakaan terdapat angka kematian yang menggambarkan kecelakaan yang korbannya sampai meninggal dunia. Meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya perkembangan kota, meningkatnya aktivitas masyarakat baik, ekonomi, sosial dan budaya, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya jumlah kendaraan pada sistem lalu lintas jalan tak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Data kecelakaan yang terjadi di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-183 berikut.

Tabel II-183
Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan	153,41	153,41	152,60	150,27	150,27
Jumlah Kejadian Kecelakaan	116	93	119	180	138
Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun	0,76	0,61	0,77	0,83	0,91

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan tabel diatas frekuensi atau rata-rata kejadian kecelakaan per kilometer di Kota Pekalongan adalah 1 kejadian per tahunnya.

Tabel II-184
Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Korban Kecelakaan	142	111	163	180	138
Luka-luka	117	93	130	166	132
Meninggal Dunia	25	18	33	44	36
Jumlah Penduduk	307.150	315.997	309.742	317.535	321.095
Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk	8,14	5,7	10,65	13,85	11,21

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2025

10. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi

Publik Perangkat Daerah di Kota Pekalongan tahun 2024 disajikan dalam Tabel II-185 berikut.

Tabel II-185
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah
Kota Pekalongan di Tahun 2024

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
1	RSUD BENDAN	97,63	Informatif
2	DLH	96,74	Informatif
3	DPUPR	96,60	Informatif
4	Dinparbudpora	95,25	Informatif
5	Dinsos P2KB	93,71	Informatif
6	Dinhub	92,63	Informatif
7	BKPSDM	90,75	Informatif
8	Bapperida	88,47	Menuju Informatif
9	DKP	87,54	Menuju Informatif
10	Dindik	86,18	Menuju Informatif
11	DPMPTSP	85,55	Menuju Informatif
12	Dinperinaker	85,10	Menuju Informatif
13	Dinkes	84,61	Menuju Informatif
14	Dinperpa	83,62	Menuju Informatif
15	Kecamatan Pekalongan Utara	83,33	Menuju Informatif
16	Setda	82,87	Menuju Informatif
17	Dinarpus	82,80	Menuju Informatif
18	Dinperkim	82,42	Menuju Informatif
19	DPMPPA	82,20	Menuju Informatif
20	Sekretariat DPRD	80,76	Menuju Informatif
21	Inspektorat	80,71	Menuju Informatif
22	BPKAD	80,38	Menuju Informatif
23	Dindagkop UKM	78,48	Cukup Informatif
24	Satpol P3KP	77,81	Cukup Informatif
25	Bakesbangpol	73,68	Cukup Informatif
26	BPBD	73,37	Cukup Informatif
27	Dindukcapil	72,48	Cukup Informatif
28	Kecamatan Pekalongan Timur	71,30	Cukup Informatif
29	Kecamatan Pekalongan Selatan	66,55	Cukup Informatif
30	Kecamatan Pekalongan Barat	66,48	Cukup Informatif

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2025

Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki web dengan portal <http://pekalongankota.go.id>. Berbagai Sistem Informasi Manajemen juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana disajikan dalam Tabel II-186 berikut.

Tabel II-186
Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SIM	107	179	199	160	168

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2025

Setiap tahun Dinas Kominfo membangun dan mengembangkan SIM/aplikasi, baik yang digunakan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun masyarakat. Salah satu SIM/aplikasi yang dibangun adalah SIM/aplikasi satu data terpadu yang diberi nama PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Batik) dengan alamat <http://pusaka.pekalongankota.go.id>. SIM/aplikasi ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan data yang bersifat *single data* sehingga dapat dijadikan pedoman.

Berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, telah dilakukan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan intensif pada komunitas BKR, Wirausaha/Pelaku Usaha, KNPI, BKM, LPM, Guru TIK/BTIK/SMP/MTs, Blogger, Pecinta Internet Hebat, Animator, Vlog Kota PKL, Robotik, Puskomas, Pengelola Web Sekolah, Karang Taruna, Anti Hoax, Film, Himpaudi, Telecenter, MGMP Multipedia, Explore Pekalongan, Relawan TIK, KIM, dan Dewan TIK.

Dalam hal infrastruktur, dibutuhkan jaringan komunikasi sebagai media penyebar luasan data dan informasi. Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Adapun jaringan telepon genggam antara lain Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G. Jumlah menara yang terdaftar sampai akhir tahun 2022 di Kota Pekalongan sebanyak 100 menara. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan disajikan dalam Tabel II-187 berikut.

Tabel II-187
Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jaringan telepon genggam	7	7	7	9	13
Stasioner	80	84	100	57	104
Rasio jaringan komunikasi	0,09	0,08	0,07	0,16	0,13

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan dan DPUPR Kota Pekalongan, 2025

Keterangan: jaringan telepon genggam terdiri dari PT. Protelindo, PT. IBS, PT. iForte, PT. Mitratel, PT. Telkomsel, PT. Era Bangun Powerindo, PT. Bali Towerindo, PT. STP, PT. Tower Bersama

Perkembangan surat kabar cetak di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan. Surat kabar yang terbit setiap pagi hari adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar yang beredar di Kota Pekalongan yang bekerja sama dengan dinkominfo kota pekalongan antara lain suara merdeka, radar pekalongan, joglo jateng,

jawa pos radar pekalongan, trust news, dan tabloid cakra. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-188 berikut.

Tabel II-188
Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Surat Kabar	15	15	12	12	6

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio di Kota Pekalongan berasal dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Adapun penyiaran televisi berasal dari Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Perkembangan penyiaran radio dan televisi disajikan dalam Tabel II-189 berikut.

Tabel II-189
Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penyiaran Radio	8	7	7	14	17
Jumlah Penyiaran TV	20	3	6	25	0

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2025

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Kota Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Adapun jumlah satuan sambungan telepon sepanjang tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 11.254 pelanggan. Jumlah tersebut cenderung meningkat sampai tahun 2022 dengan jumlah pelanggan sebanyak 18.505 pelanggan. Terjadi penurunan di tahun 2023 sebanyak 12.535 pelanggan dan meningkat pada tahun 2024 sebanyak 17.233 pelanggan. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-190 berikut.

Tabel II-190
Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap
di Kota Pekalongan 2020-2024

Tahun	Jumlah Pelanggan Telepon Tetap	Jumlah RT	Persentase Pelanggan Telepon Tetap (persen)
2020	11.254	84.296	13,35
2021	11.532	100.947	11.42
2022	18.503	87.758	21,08
2023	12.535	77.275	16,22
2024	17.233	78.488	21,96

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2025 dan Dinas Kominfo Kota Pekalongan , 2025

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi: Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Pada tahun 2020 Kota Pekalongan tidak menjadi lokus survei dari Kemenpan RB sehingga tidak dilakukan penilaian. Pada tahun 2021 kembali dilakukan penilaian dan mencapai indeks SPBE sebesar 2,82 (predikat Baik) dengan 4 domain yang menjadi komponen penilaian yaitu Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Layanan dan Domain Manajemen. Pada tahun 2022 Kemenpan RB tidak melakukan penilaian SPBE Kota Pekalongan dikarenakan nilai 2,82 sudah masuk kategori “baik”, sehingga Kota Pekalongan melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) dengan nilai sebesar 3,02 (predikat Baik). Tahun 2023 Kota Pekalongan dapat mencapai indeks 3,29 (predikat Baik), indeks ini naik dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2024 indeks SPBE naik mencapai nilai 3,76 (predikat sangat baik), capaian ini didapat dengan meningkatkan aspek penerapan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Penyelenggara SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Hasil penilaian SPBE tahun 2021-2024 secara detil pada setiap domain disajikan dalam Tabel II-191 berikut.

Tabel II-191
Nilai Domain SPBE Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

No.	Domain SPBE	2021	2022	2023	2024
1	Kebijakan	2,80	2,80	3,50	4,40
2	Tata Kelola	2,10	2,40	3,20	3,30
3	Layanan	3,75	3,76	3,82	4,27
4	Manajemen	1,36	2,09	1,82	2,55
Indeks SPBE		2,82	3,02	3,29	3,76

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2024

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinkominfo Kota Pekalongan melakukan penilaian mandiri atau *self assessment* evaluasi SPBE tahun 2022. Pada tahun 2023 Kemenpan RB kembali melaksanakan evaluasi SPBE, dan indeks hasil evaluasi SPBE untuk Kota Pekalongan adalah 3,29 dengan predikat baik. Pada tahun 2024 indeks hasil evaluasi SPBE Kota pekalongan adalah 3,76 dengan predikat sangat baik.

Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki layanan penyelenggara SPBE yang sangat baik (4), Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sangat baik (3.9) dan layanan publik berbasis elektronik (4.83). Hanya saja terdapat aspek yang masih kurang yaitu Penerapan Manajemen SPBE (2.63), sedangkan aspek audit TIK masih tergolong kategori cukup (2.33). Penerapan manajemen SPBE dan audit TIK masih kurang dan perlu mendapat perhatian besar. Dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kota Pekalongan diperoleh predikat yang sangat baik dalam penerapan SPBE (3.76) dengan beberapa keunggulan dan kelemahan yang ada.

Adapun yang menjadi keunggulan dalam penerapan SPBE di Kota Pekalongan ini terletak pada aspek penerapan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (4.4), aspek Layanan Penyelenggara SPBE (4), aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (3.9), dan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik (4.83). Hal ini merupakan signal baik juga karena Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan aplikasi untuk layanan Keuangan, kinerja pegawai, layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta layanan kepegawaian dan layanan kearsipan dinamis berada pada level 4.

Adapun yang menjadi kelemahan dari penerapan SPBE di Kota Pekalongan ini terletak pada aspek Penerapan Manajemen SPBE (2,63) dan aspek audit TIK (2.33). capaian tersebut sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi perlu adanya peningkatan dari kedua aspek ini untuk mendorong adanya penerapan SPBE yang lebih baik di masa mendatang.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan tahun 2024 secara detil pada setiap indikator disajikan dalam Tabel II-192 berikut.

Tabel II-192
Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator Evaluasi SPBE Tahun 2024

No.	Indikator	Nilai
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Tik	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana Dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2

No.	Indikator	Nilai
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat kematangan layanan publik sektor 1	5
46	Tingkat kematangan layanan publik sektor 2	5
47	Tingkat kematangan layanan publik sektor 3	5

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kota Pekalongan 2024, Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2025

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi di Kota Pekalongan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi dan Petunjuk Teknis Deputi Perkoperasian No. 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) . Sebagai upaya untuk meningkatkan peran Koperasi dan UMKM, pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi yang tidak aktif agar menjadi aktif kembali, pelatihan terhadap sumberdaya koperasi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku terus gencar dilaksanakan. Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi yang dilaksanakan terhadap koperasi diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan yang kerap timbul dalam pengurus internal koperasi, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia yang berazaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Tabel II-193 menunjukkan data koperasi di Kota Pekalongan tahun 2020-2024. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah seluruh koperasi di Kota Pekalongan mengalami kenaikan sejumlah 1 Koperasi dan jumlah koperasi aktif meningkat sebanyak 3

Koperasi. Hal ini merupakan hasil dari penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tabel II-193
Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah seluruh Koperasi	Persentase koperasi aktif
2020	272	303	89,77
2021	141	277	50,90
2022	148	282	52,48
2023	152	285	53,33
2024	155	286	54,20

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2025

b. Jumlah UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Tabel II-194 merupakan tabel jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2020-2024. Berdasarkan data tersebut jumlah UMKM di Kota Pekalongan terus mengalami kenaikan. Peningkatan pada jumlah data Perdagangan (SIUP) tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari kesadaran masyarakat untuk memilik legalitas dan perizinan atas usaha yang dimiliki.

Tabel II-194
Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Komponen UMKM				Jumlah
	Perdagangan (SIUP)	Industri Kecil Menengah	Pedagang Pasar	Pedagang Kaki Lima	
2020	9.115	6.594	6.610	914	23.233
2021	9.916	6.215	6.610	914	23.655
2022	9.900	6.235	6.700	975	23.810
2023	10.395	6.366	6.338	852	23.951
2024	14.472	3.307	5.924	856	24.559

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2025

12. Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama lima tahun berturut-turut. Sepanjang tahun 2020-2024, investasi terbesar terjadi pada tahun 2022, dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.188,411 Miliar, dengan jumlah investor sebanyak 2002 investor, jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 17.714 orang dan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 8,84. Berdasarkan kecenderungan yang terjadi maka nilai investasi sepanjang lima tahun terakhir berkecenderungan fluktuatif. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan sehingga nilai investasi tahun 2020 menurun tajam di angka Rp. 193,116 Miliar dan meningkat kembali pada tahun 2021, menjadi sebesar Rp. 390,348 Miliar. Pandemi yang berangsur pulih berdampak positif pada investasi. Pada tahun 2022 sebanyak 2002 investor masuk di Kota Pekalongan dan jumlah nilai investasi naik sebesar Rp. 3.188,411 Miliar dengan menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 17.714 orang, lalu mengalami penurunan signifikan di tahun 2023 menjadi Rp.1.616.28 Miliar dan kembali

mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp.741.985 Miliar. Jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama 5 (lima) tahun disajikan dalam Tabel II-195 berikut.

Tabel II-195
Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada PMDN
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Investor	181	181	2002	4662	4603
Jumlah Nilai Investasi (Rp. Miliar)	193,116	390,348	3.188,411	1.616,280	741,985
Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan	2.349	2.044	17.714	18.156	13.124
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	12,98	11,29	8.84	3.89	2,85

Sumber: DPMPSTSP Kota Pekalongan, 2025

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Pekalongan tahun 2020-2024 dapat dikatakan fluktuatif tiap tahunnya. Realisasi PMDN tertinggi tercapai di tahun 2022 sebesar Rp.3.078,505 Miliar dan mengalami penurunan signifikan di tahun 2023 menjadi Rp.1.616,280 Miliar. Pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi PMDN menjadi sebesar Rp.741 Miliar.

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp. 109,905 Miliar setelah lima tahun lampau tidak ada realisasi PMA dan pada tahun 2023 tercatat Rp. 110,696 Miliar . Untuk tahun 2024 Realisasi penanaman Modal sektor PMA Rp. 121 Miliar. Realisasi PMDN dan PMA tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel II-196 berikut.

Tabel II-196
Realisasi PMDN dan PMA di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Miliar)	193,116	390,348	3.078,505	1.616,280	741,00
Realisasi PMA Tahun Evaluasi (Rp. Miliar)	0	0	109,905	110,696	121,00

Sumber: DPMPSTSP Kota Pekalongan, 2025

Tantangan penanaman modal di Kota Pekalongan ke depan, terutama terkait dengan kondisi geografis wilayah yaitu keterbatasan lahan. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km². Dari data genangan banjir dan rob tahun 2021, luas wilayah yang terkena dampak banjir dan rob adalah sebesar 1.730 Ha atau 37,27%. Selain itu, luas lahan yang dialokasikan untuk kawasan pertanian (yaitu tanaman pangan) adalah 521 hektar. Lahan yang dialokasikan untuk kawasan perdagangan dan jasa seluas 386 Ha serta kawasan peruntukan industri adalah seluas 189 Ha. Berdasarkan data tersebut maka luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman modal semakin terbatas, karena kecenderungan penanaman modal di wilayah Kota Pekalongan terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa, sektor industri pengolahan, sektor perumahan dan kawasan permukiman, sektor perikanan, serta sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Salah satu upaya yang dilakukan dan akan terus diperkuat untuk menarik penanaman modal adalah optimalisasi kemudahan perizinan dan non perizinan di wilayah Kota Pekalongan. Apalagi, seluruh daerah telah berlomba untuk menarik investor untuk menanamkan modal di daerahnya.

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan PLTU Batang harus dimanfaatkan wilayah Kota Pekalongan sebagai peluang untuk melakukan sinergi agar Kota Pekalongan dapat menerima manfaat dari pengembangan kawasan di wilayah Kabupaten Batang. Termasuk juga kerjasama dengan wilayah sekitar yaitu Kabupaten Pekalongan harus diperkuat karena interaksi ekonomi yang kuat selama ini dalam berbagai bidang.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah organisasi pemuda yaitu 24 organisasi. Pada tahun 2022 menurun menjadi 16 organisasi pemuda serta meningkat kembali menjadi 40 organisasi pada tahun 2023 sampai 2024. Sementara itu jumlah kegiatan kepemudaan yang semula 8 kegiatan pada tahun 2020, meningkat di tahun 2021 menjadi 10 kegiatan dan 16 kegiatan di tahun 2022, lalu meningkat kembali menjadi 20 kegiatan di tahun 2023 sampai tahun 2024.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2020-2024 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan, seperti disajikan dalam Tabel II-197 berikut.

Tabel II-197
Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Kepemudaan	24	24	16	40	40
Jumlah kegiatan Kepemudaan	8	10	16	20	20
Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan tahun 2020 telah terbentuk 31 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Ada penambahan jumlah organisasi olahraga pada tahun 2021 hingga tahun 2024 menjadi 34 organisasi. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah kegiatan olahraga pada kisaran 8 sampai 15 kegiatan. Sedangkan jumlah lapangan olahraga masih tetap 55 lapangan selama tahun 2020-2024 dan perlu ditingkatkan.

Tabel II-198
Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Olahraga	31	34	34	34	34

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kegiatan Olahraga	8	10	15	15	15
Jumlah Lapangan Olahraga	55	55	55	55	55

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

14. Statistik

Kebutuhan akan menentukan keputusan merupakan hal yang sangat penting dengan harapan sajian data terkumpul, terkelola dan termanfaatkan secara akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah terakses dan dibagipakaikan. Akan tetapi kondisi yang ada saat penyajian data sendiri-sendiri sehingga akan menjadi data tidak sempurna dan bias dalam memutuskan karena tidak saling terintegrasi. Mengintegrasikan data-data yang sudah adapun sangat sulit karena penyajiannya yang berbeda menjadi tumpang tindih yang sulit dipadukan dan merasa punya data dan saling menutup sendiri. maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang mendasari perubahan-perubahan dalam pengelolaan penyajian

Perubahan melalui pasal 37 ayat 6 disebutkan bahwa akses data di portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata selaku pengguna data pada instansi pusat dan daerah. Dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar instansi pusat dan daerah.

Di masa transisi saat ini penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Daerah selain rutinitas cetakan masih berkelanjutan menjadi kegiatan tersendiri juga sudah mengelola data terpadu dalam bentuk PDA (Pekalongan Dalam Angka) juga menyajikan data sektoral beralamatkan pusaka.pekalongankota.go.id yang masih proses dengan berpedoman pada pasal 37 ayat 6 tentang Admin data (pejabat pengelola informasi yang bertanggungjawab) dan Walidata selaku pengguna data. Kedepan isian oleh OPD yang menyajikan sebagai admin dan data akan disajikan sesuai kebutuhan.

15. Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Persandian merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren yakni Urusan Wajib Pemerintah Daerah ,dalam kelompok Non Pelayanan Dasar. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan Persandian satu rumpun bersama dengan urusan Komunikasi dan Informatika dan urusan Statistik. Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada bagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga mempunyai menyangkut keamanan informasi.

Arah Perubahan Paradigma Penyelenggaraan Persandian di Daerah:

- Melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian;
- Layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi;
- Penyediaan layanan keamanan e-government;
- Tidak hanya dilakukan oleh Sandiman;
- Secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

- Tidak hanya sekedar kirim terima berita;
- Tidak hanya melayani Kepala Daerah, namun juga perangkat daerah termasuk staf;
- Tidak hanya terbatas pada informasi rahasia.

Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah, pelaksanaan persandian di Daerah meliputi 2 (dua) ruang lingkup, yakni:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota melalui:
 - a. Penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
 - b. Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
 - c. Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik;
 - d. Penyediaan layanan Keamanan Informasi.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten / kota.

16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, dalam kurun waktu 2020-2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung tetap, tetapi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya justru semakin meningkat. Semula berjumlah 4 *event* pada tahun 2021, menjadi 6 *event* di tahun 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan seni dan budaya serta minat masyarakat terhadap penyelenggaraan *event* tersebut. *Event* yang diselenggarakan di tahun 2024 antara lain Hayam Wuruk Festival, Karnaval Batik, Kauman Festival, Festival Pintu Dalam, Pajang Jimat dan Pekalongan Art Festival.

Selain seni dan budaya, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pengelolaan cagar budaya. Proses penetapan cagar budaya dilakukan dengan melakukan identifikasi dan pendataan cagar budaya sebanyak 282 Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB), yang nantinya dapat ditetapkan menjadi obyek cagar budaya (OCB) melalui proses penetapan dengan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Dengan telah dibentuknya TACB di Kota Pekalongan pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2024 telah menetapkan sebanyak 11 OCB yang ditetapkan melalui Surat keputusan Wali Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan terus memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti disajikan dalam Tabel II-199 berikut.

Tabel II-199
Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	4	4	4	6
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	4

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	282	282	282	282	282

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Kota Pekalongan merupakan kota dengan tiga corak kebudayaan, yaitu budaya maritim, budaya agraris, dan budaya perniagaan. Banyaknya kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan dapat dilihat dari jumlah data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di Kota Pekalongan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II-200
Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kota Pekalongan

Jenis OPK	Jumlah	
	2023	2024
Manuskrip	4	0
Tradisi Lisan	2	1
Adat Istiadat	3	4
Pengetahuan Tradisional	9	0
Teknologi Tradisional	10	0
Seni	65	8
Bahasa	1	0
Permainan Rakyat	6	6
Olahraga Tradisional	1	0
Cagar Budaya	29	15

Sumber: Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pekalongan, 2025.

Dalam upaya pelestarian budaya dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai destinasi wisata, telah dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan festival/seni untuk menciptakan *brand image* Kota Pekalongan sebagai *world city of batik* dan salah satu kota kreatif dunia. Di samping itu, seni budaya Pekalongan juga terus dilakukan pembinaan untuk dapat berkembang di masyarakat. Pada tahun 2020, dikarenakan pandemi *COVID-19* Pemerintah Kota Pekalongan hanya menyelenggarakan beberapa even seni dan budaya dengan total 6 *event*. Bahkan pada tahun 2021 tidak ada penyelenggaraan festival/pentas seni/*event*. Tahun 2022 kembali diadakan event seni dan budaya sebanyak 4 *event*. Pada tahun 2023 diselenggarakan sebanyak 6 *event* dan pada Tahun 2024 diselenggarakan sebanyak 6 *event* yaitu Hayam Wuruk Festival, Karnaval Batik, Kauman Festival, Festival Pintu Dalam, Pajang Jimat dan Pekalongan Art Festival. sebagaimana disajikan dalam Tabel II-201 berikut.

Tabel II-201
Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penyelenggaraan	6	0	4	6	6

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat berupaya melestarikan semua seni budaya yang ada dengan cara melakukan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan event seni budaya. Pada tahun 2020 dikelompokkan terdapat 17 jenis seni budaya, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 12 jenis seni budaya. dikarenakan selama masa pandemi banyak event seni budaya yang tidak diselenggarakan dan kembali meningkat pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebanyak 19 jenis seni. Tahun 2024 kembali meningkat menjadi 20 Jenis seni budaya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-202
Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Simtuduror	Seni Lukis	Simtuduror	Simtuduror	Simtuduror
2	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik
3	Sanggar Teater	Sanggar Teater	Ketoprak	Ketoprak	Ketoprak
4	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari
5	Seni Rakyat	Seni Rakyat	Sintren	Sintren	Sintren
6	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan
7	Perfilman	Perfilman	Rampak	Rampak	Rampak
8	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat	Band	Band	Band
9	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)
10	Samroh	Dekorasi	Samroh	Samroh	Samroh
11	Terbang Genjring/Jawan	Sastra	Terbang/Genjring/Jawan	Terbang/Genjring/Jawan	Terbang/Genjring/Jawan
12	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong
13	Reklame		Gendukan	Gendukan	Gendukan
14	Dekorasi		Wayang	Wayang	Wayang
15	Seni Lukis		Seni Lukis	Seni Lukis	Seni Lukis
16	Kerajinan		Kerajinan	Kerajinan	Kerajinan
17	Sastra		Reog	Reog	Reog
18			Kuntulan	Kuntulan	Kuntulan
19			Barongan	Barongan	Barongan
20					Teater

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Kota Pekalongan, yang terkenal dengan sebutan "Kota Batik," tidak hanya memiliki kekayaan budaya berupa seni batik, tetapi juga warisan sejarah berupa cagar budaya yang telah diakui dan teregister secara nasional. Cagar budaya ini mencerminkan perjalanan panjang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendahulu, serta menjadi aset berharga bagi identitas lokal dan nasional. Pelestarian cagar budaya di Kota Pekalongan tidak hanya bertujuan untuk menjaga warisan sejarah, tetapi juga untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya. Dengan menjaga keaslian dan keberlanjutan cagar budaya, generasi mendatang akan tetap dapat menikmati dan mempelajari nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal yang terkandung di dalamnya.

Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat terus berupaya untuk merawat dan melestarikan cagar budaya ini melalui berbagai program, seperti restorasi bangunan, edukasi sejarah, dan pengembangan kawasan wisata budaya. Dengan adanya cagar budaya yang telah teregister secara nasional, Kota Pekalongan semakin memperkuat posisinya sebagai kota yang kaya akan warisan sejarah dan budaya

Tabel II-203
Cagar Budaya di Kota Pekalongan Register Nasional Tahun 2024

No.	No. Inventaris Registrasi Nasional	Kelompok Cagar Budaya	Nama Obyek Cagar Budaya	Alamat	Status Pemilik	Fungsi Sekarang
1.	PO2019111500009	Bangunan	SMPN 6 Pekalongan	Jl. Kartini No. 36	Pemkot Pekalongan	SMPN 6 Pekalongan
2.	PO2015052700248	Bangunan	Gedung Eks Pendopo Kabupaten Pekalongan	Jl. Nusantara No. 1 Pekalongan	Pemkab Pekalongan	Kosong/Digunakan jika ada event
3.	PO2014102300096	Bangunan	Gedung Museum Batik Pekalongan	Jl. Jetayu No.1	Pemkot Pekalongan	Museum Batik Pekalongan
4.	PO2015050800049	Bangunan	Rumah Pangeran Keputran	Jl. Maninjau 16	Milik Masyarakat	Kosong
5.	PO2015050800051	Bangunan	Masjid Ja'ami Kauman	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 10/32	Milik Masyarakat	Masjid
6.	PO2015052700140	Struktur	Makam Mbah Demung	Pasir Sari	Milik Masyarakat	Makam
7.	PO2015052700192	Bangunan	Kantor Pembantu Gubernur/ Bakorwil Pekalongan	Jl. Pemuda No. 50	Provinsi Jawa Tengah	Kantor Satuan Pengawas Tenaga Kerja
8.	PO2015052700219	Bangunan	Gedung KPBS Setono Pekalongan	Karangmalang	Milik Koperasi Batik	Kantor Administrasi KPBS Setono
9.	PO2014102300130	Bangunan	Gedung TV Batik	Jl. Jetayu No. 5 Kota Pekalongan	Pemkot Pekalongan	TV Batik Studio
10.	PO2015052700027	Bangunan	Gedung Kantor Pos Kota Pekalongan	Jl. Cenderawasih No. 1	BUMN	Kantor Pos
11.	PO2014102300173	Bangunan	Gedung Eks Rumah Dinas Pembantu Gubernur Bakorwil III	Jl. Diponegoro No. 1 Pekalongan	Provinsi Jawa Tengah	Kosong
12.	PO2015050800020	Bangunan	Gedung SMP Negeri 1 Pekalongan	Jalan W.R. Supratman no 8	Pemkot Pekalongan	Gedung SMP Negeri 1 Pekalongan
13.	PO2015050800013	Bangunan	Gedung Kantor PT. Pertani/ Sang Hyang Seri	Jl. Jetayu No. 9	BUMN	Kosong

No.	No. Inventaris Registrasi Nasional	Kelompok Cagar Budaya	Nama Obyek Cagar Budaya	Alamat	Status Pemilik	Fungsi Sekarang
14.	PO2015050800028	Bangunan	Gedung SMP Negeri 13 Pekalongan	Jl. Jend Sudirman No. 26	Pemkot Pekalongan	Gedung SMP Negeri 13 Pekalongan
15.	PO2015050800029	Bangunan	Gedung SMA Negeri 1 Pekalongan	Jl. Kartini no 39	Provinsi Jawa Tengah	Gedung SMA Negeri 1 Pekalongan
16.	PO2015050800030	Bangunan	Gedung Pendidikan Satya Wiguna	Jalan Salak no. 12	Milik Yayasan Pendidikan	Gedung Pendidikan Satya Wiguna
17.	PO2015050800033	Bangunan	Gedung LP kelas II A Pekalongan	Jl. W.R. Supratman No.106	Kemenkum HAM	Lapas
18.	PO2015050800046	Bangunan	Gedung Rumah Tahanan Negara	Jl. Rajawali No. 1	Kemenkum HAM	Rutan
19.	PO2015050800053	Bangunan	Masjid Kuno Sapuro	Kompleks makam Sapuro	Milik Masyarakat	Masjid
20.	PO2015052700135	Struktur	Makam Mbah Wayah	Krapyak Gang 8	Milik Masyarakat	Makam
21.	PO2015052700149	Struktur	Makam Habib Ahmad bin Tholib Al-Atas	Sapuro	Milik Masyarakat	Makam
22.	PO2015052700164	Struktur	Makam Ki Suratman	Pesindon	Milik Masyarakat	Makam
23.	PO2015052700199	Bangunan	Klenteng Po An Thian	Jl. Blimbing Kota Pekalongan	Milik Masyarakat	Klenteng
24.	PO2015052700211	Bangunan	Stasiun Kereta Api Pekalongan	Jl. Gajah Mada Pekalongan	Milik Masyarakat	Stasiun Kereta Api Pekalongan
25.	PO2015052700235	Struktur	Kerkhoff/ Makam Belanda	Panjang Wetan	Milik Masyarakat	Makam Nasrani
26.		Bangunan	Perusahaan Limun Oriental	Jl. Rajawali, Belakang Museum Batik	Milik Perorangan	Cafe dan pabrik limun
27.		Benda	Mijlpaal	Kawasan Jetayu	Milik Pemkot Pekalongan	Penanda titik 0 km kota
28.		Benda	Koleksi Museum Batik Pekalongan No. MBP/ 0126/B/PK/06/ 082	Jln. Jetayu No.1	Milik Pemkot Pekalongan	Koleksi Museum Batik Pekalongan
29.		Benda	Koleksi Museum Batik Pekalongan	Jln. Jetayu No.1	Milik Pemkot Pekalongan	Koleksi Museum Batik Pekalongan

No.	No. Inventaris Registrasi Nasional	Kelompok Cagar Budaya	Nama Obyek Cagar Budaya	Alamat	Status Pemilik	Fungsi Sekarang
			No. MBP/0157/B/PK/06/103			
30.		Benda	Arca Ganesha (Eks Rumah Residen Pekalongan)	Jln. Jetayu No.1	Milik Pemkot Pekalongan	Koleksi di Museum Batik Pekalongan
31.		Benda	Arca Wisnu (Eks Kantor Residen Pekalongan)	Jln. Jetayu No.1	Milik Pemkot Pekalongan	Koleksi di Museum Batik Pekalongan
32.		Benda	Penetapan Arca Ganeśa (Eks Kantor Residen Pekalongan)	Jln. Jetayu No.1	Milik Pemkot Pekalongan	Koleksi di Museum Batik Pekalongan
33.		Benda	Arca Durgamahīṣās uramardhini (Eks Kantor Residen Pekalongan) Kota Pekalongan	Jln. Jetayu No.1	Milik Pemkot Pekalongan	Koleksi di Museum Batik Pekalongan

17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi masih diminati oleh berbagai kalangan, terutama oleh pelajar. Di Kota Pekalongan, jumlah pengunjung perpustakaan terbilang cukup tinggi dengan kenaikan di tiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 39.885 pada kondisi pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 dengan diadakannya berbagai macam kegiatan, jumlah pengunjung perpustakaan mulai meningkat dengan jumlah 64.527 orang kemudian pada 2022 terdapat kenaikan juga dengan jumlah kunjungan 66.204 orang. Pada tahun 2023 jumlah pengunjung perpustakaan meningkat cukup drastis sebanyak 119.226 pengunjung dan pada 2024 meningkat cukup drastis juga sebanyak 163.580 pengunjung. Berikut jumlah pengunjung perpustakaan mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tabel II-204
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang Harus Dilayani	Rasio
2020	39.885	266.472	0,15
2021	64.527	266.840	0,24
2022	66.204	267.418	0,25
2023	119.226	271.343	0,44
2024	163.580	257.657	0.63

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2025

Sementara itu jumlah perpustakaan di Kota Pekalongan mengalami penurunan. Perpustakaan RW pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari 90 dan pada tahun 2022 dan 2024 berkurang lagi menjadi 86. Hal ini disebabkan banyak perpustakaan RW yang tidak aktif karena berbagai faktor, diantaranya terkena dampak rob di wilayah utara dan di wilayah lain juga pengelola perpustakaan yang tidak aktif. Namun demikian, pada perpustakaan SD/MI, perpustakaan SLTP, perpustakaan SLTA mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Kenaikan tertinggi terjadi pada perpustakaan SD/MI yang di tahun 2020-2022 sejumlah 77 menjadi 175 pada tahun 2023. Lalu pada tahun 2024 terjadi penurunan pada perpustakaan SD/MI menjadi 142 perpustakaan dan pada perpustakaan SLTP terjadi penurunan menjadi 35 perpustakaan. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-205 berikut.

Tabel II-205
Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian Data	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perpustakaan Umum Kota Pekalongan	1	1	1	1	1
Perpustakaan Keliling	4	4	4	4	4
Perpustakaan RW	90	90	86	86	86
Perpustakaan SD/MI	77	77	77	175	142
Perpustakaan SLTP	34	34	34	55	35
Perpustakaan SLTA	23	23	23	29	29
Perpustakaan Perguruan Tinggi	6	6	6	6	6

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2025

18. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2020-2024 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Pada tahun 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupaya melakukan percepatan, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada PD sehingga dapat meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, pada tahun 2020-2021 diangka 49 PD dengan jumlah total 66 PD yang mengelola arsip secara baku, lalu pada tahun 2022 jumlah PD yang mengelola arsip secara baku menjadi 24 dari total 30 PD dan terus meningkat pada tahun 2023 di angka 26 seperti disajikan dalam Tabel II-206. Adanya perubahan jumlah Perangkat Daerah dari 66 PD menjadi 30 PD didasari pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pekalongan. Dimana terdapat 3 tipe Perangkat Daerah, yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Pada tahun 2024, Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku sebanyak 30 PD dari total 30 PD, atau sekitar 100%.

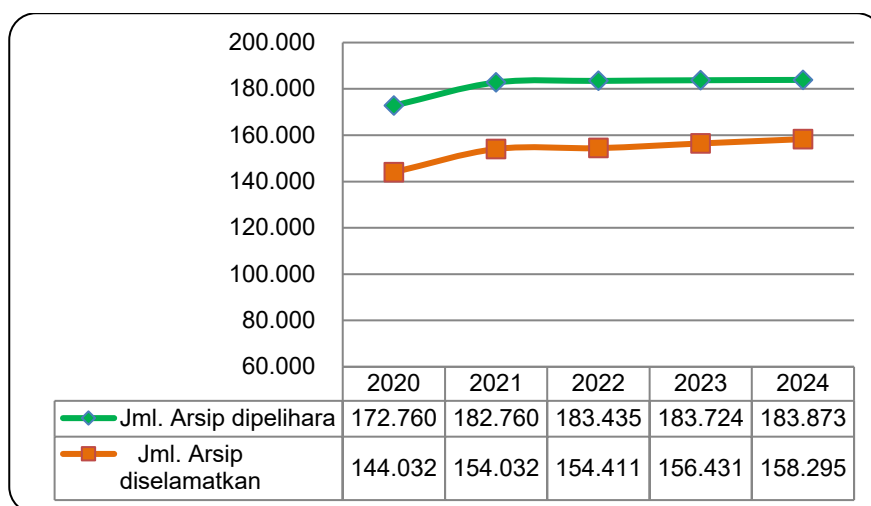
Tabel II-206
Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
2020	66	49	74,24
2021	66	49	74,24
2022	30	24	80,00
2023	30	26	86,67

Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
2024	30	30	100

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2025

Selain pengelolaan, penyelamatan arsip juga sama pentingnya. Tindakan ini dilakukan untuk menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Jumlah arsip yang dipelihara dan diselamatkan disajikan dalam Gambar II-68 berikut.



Gambar II-68
Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2025

Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik. Grafik diatas menunjukkan bahwa arsip yang diselamatkan selama kurun waktu lima tahun terakhir yakni 2020-2024 mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen penting layak diarsipkan.

Salah satu jenis arsip yang dikelola yaitu arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari suatu organisasi tetapi arsip tetap harus disimpan dan dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada dengan mempertimbangkan nilai guna arsip. Tidak banyak orang yang memanfaatkan arsip statis. Pada tahun 2020, jumlah orang yang memanfaatkan arsip statis sebanyak 50 orang dan pada tahun 2021 meningkat sebanyak 66 orang, kenaikan tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang mencari arsip IMB. Namun pada tahun 2022 menurun menjadi 23 orang. Pada tahun 2023 meningkat sebanyak 25 orang dan tahun 2024 lagi sebanyak 32 orang.

Tabel II-207
Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pengguna Arsip (orang)			Total (Orang)
	Masyarakat	Mahasiswa/Pelajar	Peneliti	
2020	7	42	1	50
2021	19	46	1	66
2022	2	10	11	23
2023	4	12	9	25
2024	11	20	1	32

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2025

Dalam mengelola arsip, dibutuhkan sumber daya manusia kearsipan yang memiliki nilai kelayakan dan kualitas dalam profesionalisme dan kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Seiring dengan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya meningkatkan jumlah arsiparis untuk mengelola kearsipan. Tercatat di tahun 2020 terdapat 7 orang arsiparis. Dari ketujuh orang arsiparis tersebut, 1 orang tidak perlu uji kompetensi karena masih menggunakan aturan lama, 1 orang tidak dapat mengikuti uji kompetensi karena berpendidikan SMA (untuk dapat mengikuti uji kompetensi, minimal berpendidikan D3), dan 5 orang belum memiliki sertifikat. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 15 orang karena adanya penambahan 5 orang arsiparis dari formasi PPPK dan pada tahun 2024 jumlah arsiparis masih berjumlah 15 orang.

Tabel II-208
Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Arsiparis (orang)	Sertifikasi Kompetensi	Persentase
2020	7	0	0
2021	7	0	0
2022	7	0	0
2023	15	0	0
2024	15	0	0

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2025

2.4.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan masih merupakan potensi yang diandalkan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan tangkap Kota Pekalongan memiliki potensi ekonomi strategis karena adanya fasilitas sebagai pusat pendaratan ikan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat representatif.

Jumlah produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 9847 Ton hingga tahun 2024 sebesar 12.647,43 Ton, namun belum mampu menyamai produksi di tahun 2020 sebesar 14.696 Ton. Pencapaian target budidaya ikan payau sebesar 1.200 ton juga tidak terpenuhi, dengan realisasi sebesar 384,06 ton (32 persen). Pencapaian produksi ikan air tawar meningkat pada tahun 2024 sebesar 138,86 ton dari target sebesar 83 ton, atau tercapai 167,3 persen. Perkembangan produksi ikan tangkap mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024.

Secara lengkap Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun (tahun 2020-2024) disajikan dalam Tabel II-209 berikut.

Tabel II-209
Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (ton)

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ikan Tangkap					
a. Jumlah Produksi Ikan	13.887	9.924	10.033	9.584	12.124,51
b. Target Daerah	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Persentase Produksi	90,76	64,86	65,58	62,64	79,24
Ikan Budidaya Air Payau					
a. Jumlah Produksi Ikan	717,31	541,02	409,36	409,77	384,06
b. Target Daerah	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Persentase Produksi	59,78	45,09	34,11	34,14	32
Ikan Budidaya Air Tawar					
a. Jumlah Produksi Ikan	91,70	71,64	93,1	130,52	138,86
b. Target Daerah	83	83	83	83	83
Persentase Produksi	110,48	86,31	112,17	157,25	167,22
Jumlah Produksi (ton)	14.696	9.847	10.535	10.124	12.647,43
Target Produksi	16.583	16.583	16.583	16.583	16.583

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2025

Berbagai permasalahan perikanan tangkap di Kota Pekalongan antara lain sedimentasi yang tinggi di muara yang menyebabkan kapal ikan besar > 30 GT tidak bisa masuk, TPI yang terendam banjir saat terjadi air laut pasang, keterbatasan fasilitas *docking* (antrian *docking* sampai dengan 3 bulan), padahal umumnya kapal sekaligus akan melakukan *docking* setelah bongkar/lelang setahun sekali. Pemerintah Kota pekalongan juga belum memiliki TPI hingga saat ini masih menyewa pada Perum Perindo. Selain itu banyak instansi yang memiliki kewenangan di lokasi Pelabuhan Perikanan di Kota Pekalongan yaitu fungsi pokok Pelabuhan dibawah kewenangan PPNP, alur pelabuhan (muara Kali Loji) dibawah kewenangan Provinsi Jawa tengah dan fasilitas komersial (TPI, lahan, perkantoran) dibawah kewenangan Perum Perindo. Ke depan, akan dibangun pelabuhan perikanan *on shore* yang bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan JICA, sebagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan dari tahun 2020 hingga tahun 2023 secara kuantitas per kapita cenderung fluktuatif. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 konsumsi ikan mencapai target yang ditentukan. Persentase konsumsi ikan pada tahun 2020 sebesar 108,80 % dan pada tahun 2021 menurun sebesar 105,87 %. Namun demikian terjadi peningkatan persentase konsumsi ikan yang terjadi di tahun 2022 yaitu 108,71 % meskipun telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 31 kg/perkapita/tahun. Kemudian di tahun 2023 persentase konsumsi ikan mengalami kenaikan menjadi 115,58 %. Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-210 berikut.

Tabel II-210
Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (kg/kapita/tahun)

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan	Target Daerah	Persentase Konsumsi Ikan
2020	32,64	30	108,80
2021	32,82	31	105,87
2022	33,7	31	108,71
2023	35,83	31	115,58

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan	Target Daerah	Persentase Konsumsi Ikan
2024	n/a	31	Belum Rilis menunggu validasi dari KKP

**) Data Dasar/baku dari BPS Provinsi Jateng belum dirilis*

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2025

Saat ini terdapat 6 (enam) kelompok nelayan yang telah berbadan hukum, yang kemudian pada tahun 2017 ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa pemberian bantuan/hibah. Namun demikian pemberian bantuan/hibah harus mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (6), dimana hibah diberikan dengan persyaratan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Pekalongan memberikan bantuan pada tahun 2020 terdapat 4 kelompok nelayan, tahun 2021 sebanyak 2 kelompok, bertambah menjadi 5 kelompok pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan jumlah kelompok nelayan menjadi 4 kelompok, sedangkan pada tahun 2024 Pemerintah Kota Pekalongan tidak memberikan bantuan kepada kelompok nelayan.

Tabel II-211
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kelompok Nelayan Mendapatkan Bantuan Pemda	Jumlah Kelompok Nelayan	Persentase Cakupan Bina Nelayan (%)
2020	4	36	11,11
2021	2	38	5,3
2022	5	40	12,5
2023	4	33	12,12
2024	0	19	0

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2024

2. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Jumlah hotel di wilayah Kota Pekalongan pada tahun 2020 berjumlah 30 hotel dan pada tahun 2022 bertambah 5 hotel sehingga jumlahnya menjadi 35 hotel. Pada tahun 2024 bertambah 5 hotel menjadi 40 hotel. Kelas hotel di Kota Pekalongan pun beragam, mulai dari kelas melati, bintang 1 sampai bintang 4.

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner. Kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan makanan nasional juga menyediakan makanan internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan dan perekonomian di Kota Pekalongan. Jumlah restoran yang semula hanya 150 di tahun 2020, sekarang telah berkembang menjadi 523 restoran di tahun 2024. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisata mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021 kunjungan wisata sudah mulai meningkat seiring dengan meredanya pandemi Covid 19 di Kota Pekalongan sehingga masyarakat sudah mulai berkunjung ke tempat-tempat wisata. Pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisata mengalami mencapai angka tertinggi selama periode ini dikarenakan sudah mulai

beroperasinya wisata Pantai Pasir Kencana. Jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan pada tahun 2024.

Tabel II-212
Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Jumlah Kunjungan Wisata
2020	30	150	283.882
2021	30	178	316.440
2022	35	234	1.038.509
2023	35	483	1.629.463
2024	40	523	1.272.664

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Perkembangan pariwisata juga dapat dilihat dari tingkat okupansi hotel, dimana tahun 2019 hingga 2021 tingkat okupansinya tidak signifikan. Untuk hotel kelas melati mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 26,23 persen menjadi 27,91 persen di tahun 2020 dan menurun menjadi 25,65 persen di tahun 2021. Rata-rata okupansi hotel bintang 1 hingga hotel bintang 3 tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu dikisaran 24 persen hingga 26 persen untuk hotel bintang 1, kisaran 30 persen untuk hotel bintang 2, serta sebesar 54 persen hingga 64 persen untuk hotel bintang 3. pada tahun 2022 hotel non bintang dan bintang 3+ mengalami peningkatan sedangkan hotel bintang 2 dan 3 mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-213 berikut.

Tabel II-213
Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun / Kelas Hotel	2019			2020			2021			2022			2023		
	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata2 Okupansi (%)	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata2 Okupansi (%)	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata2 Okupansi (%)	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata2 Okupansi (%)	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata2 Okupansi (%)
Non Bintang/ Melati	25	518	26,23	15	524	27,91	25	504	25,65	25	504	31,94	27	575	26,29
Bintang 1	1	65	24,22	1	56	26,11	1	56	45,57	1	56	28,81	1	65	22,38
Bintang 2	1	47	32,14	1	46	31,71	1	46	49,92	1	46	25,67	1	46	
Bintang 3	8	738	64,30	8	741	54,36	8	748	61,22	6	557	63,50	6	478	59,99
Bintang 4										2	191		2	191	
Jml	35	1.368		35	1.367		35	1.354		35	1354		37	1355	

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya disajikan dalam Tabel II-214 berikut.

Tabel II-214
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	0	4	4	6

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Daya tarik lain yang ditawarkan Kota Pekalongan adalah obyek wisata. Meskipun tidak memiliki banyak obyek wisata, namun cukup banyak pengunjung yang berwisata di Kota Pekalongan. Obyek wisata yang ada di Kota Pekalongan antara lain pantai Slamaran Indah, Museum Batik, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon, Kampung Canting Landungsari, wisata belanja Pasar Batik Grosir Setono, Gapura Nusantara serta menata kawasan Alun-alun untuk menambah daya tarik wisata. Obyek wisata terbaru yang telah dibangun pada tahun 2021 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 2022 yaitu Taman Wisata Laut Pasir Kencana.

Jumlah kunjungan di Museum Batik Pada tahun 2024 cenderung meningkat, kunjungan wisatawan dari mancanegara di tahun 2024 cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat wisatawan terhadap budaya batik Pekalongan masih cukup tinggi. Tetapi tidak demikian dengan kolam renang Tirta Sari, sejak tahun 2016 resmi ditutup karena tidak layak operasional.

Tabel II-215
Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Objek Wisata	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasir Kencana					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	7.429	0	243.084	94.366	85.261
	B. Pendapatan (Rp.)	39.449.750	0	4.529.926.500	1.805.250.500	1.556.319.500
2	Slamaran Indah					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	10.426	13.628	15.980	5.242	8.633
	B. Pendapatan (Rp.)	33.759.750	38.038.500	84.010.500	31.415.250	48.543.250
3	Museum Batik					
	Pengunjung					
	1). Wisman	138	0	85	236	327
	2). Wisnus	9.982	6.194	24.612	40.697	44.205
	B. Pendapatan (Rp.)	31.447.000	25.734.000	116.084.000	183.543.000	205.774.000

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2025

Selain daya tarik wisata dan penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata, keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata

mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (*employment*). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

3. Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Puncak produktifitas padi terjadi pada tahun 2024 sebesar 7,23 ton per hektar. Produktivitas padi di Kota Pekalongan disajikan secara lengkap dalam Tabel II-216 berikut.

Tabel II-216
Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi tanaman padi (ton)	4.769,19	7.151,00	7.684,00	8.619,9	10.170,60
Luas areal tanaman padi (Ha)	1.631,53	1.428,00	1.351,00	1.053,6	1.407
Produktifitas padi per hektar (ton/Ha)	2,92	5,01	5,69	5,89	7,23

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

Untuk meningkatkan produksi pertanian, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan dari Pemkot pada tahun 2020 sejumlah 40 kelompok tani, 18 kelompok tani di tahun 2021 dan 8 kelompok tani di tahun 2022. Kelompok tani ini terdiri dari KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), kelompok tani dan kelompok ternak.

Tabel II-217
Data Pengurangan Luas Lahan Kota Pekalongan Tahun 2024

Kecamatan / Kelurahan	Luas Lahan Akhir 2023	Pengurangan Luas Lahan			Penambahan Lahan (Ha)	Luas Lahan Awal 2025 (Ha)
		Alih Fungsi Lahan (Ha)	Banjir/ Rob (Ha)	Lainnya (Ha)		
Pekalongan Barat	54,00	-	4,00	-	0,67	50,67
Pringrejo	50,00	-	-	-	0,67	50,67
Tirto	2,00	-	2,00	-	-	-
Medono	2,00	-	2,00	-	-	-
Pekalongan Timur	228,70	-	1,94	-	7,61	234,37
Gamer	66,40	-	-	-	7,25	73,65
Kali Baros	99,90	-	1,94	-	-	97,96
Setono	62,40	-	-	-	0,36	62,76
Pekalongan Utara	31,00	-	-	-	18,18	49,18
Degayu	-	-	-	-	10,74	10,74
Krapyak	31,00	-	-	-	7,44	38,44

Kecamatan / Kelurahan	Luas Lahan Akhir 2023	Pengurangan Luas Lahan			Penambahan Lahan (Ha)	Luas Lahan Awal 2025 (Ha)
		Alih Fungsi Lahan (Ha)	Banjir/ Rob (Ha)	Lainnya (Ha)		
Pekalongan Selatan	406,90	-	-	1,71	1,76	406,95
Sokoduwet	137,10	-	-	0,07	-	137,03
Kuripan Yosorejo	105,17	-	-	-	0,92	106,09
Kuripan Kertoharjo	89,60	-	-	0,70	-	88,90
Banyurip	65,07	-	-	-	0,84	65,91
Buaran Kradenan	9,96	-	-	0,94	-	9,02
Total	720,60	-	5,94	1,71		741,17

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2025

Pengurangan luas lahan pertanian di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk diantaranya banjir/rob dan alih fungsi lahan. Banjir/rob yang disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut akan merusak tanah pertanian dengan merendamnya dan meningkatkan salinitas, sehingga menurunkan kualitas dan produktivitas lahan. Sementara itu, alih fungsi lahan yang melibatkan konversi lahan pertanian menjadi perumahan, industri, atau infrastruktur, secara langsung mengurangi area yang tersedia untuk pertanian. Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanggulangan pengurangan lahan pertanian, diantaranya:

1. Menyeleksi dengan ketat pengajuan rekomendasi alih fungsi lahan.
2. Bekerjasama dengan Kodim 0710 Pekalongan mengolah lahan yang sudah lama terendam rob untuk dijadikan uji coba padi biosalin.

Tabel II-218
Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kelompok tani mendapat bantuan Pemda	40	18	8	0	0
Jumlah kelompok tani	88	88	88	40	40
Cakupan bina kelompok petani (persen)	45,45	20,45	9,09	0	0

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2025

Dengan mencermati data tersebut di atas, ternyata jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani tidak berdampak langsung atau tidak memiliki korelasi yang nyata dengan produktivitas padi per hektar. Jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani yang meningkat tidak diikuti peningkatan produktivitas padi per hektar secara langsung, justru produktivitas padi per hektar cenderung menurun. Produktivitas padi per hektar yang meningkat kembali tahun 2022, diharapkan merupakan dampak dari meningkatnya jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani tahun-tahun sebelumnya.

Aspek lain yang sangat berdampak terhadap produktivitas padi per hektar adalah semakin meluasnya banjir dan rob di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan luas wilayah terdampak banjir dan rob, serta frekuensi dan lama terjadi banjir dan rob, tentunya berimplikasi terhadap produktivitas padi per hektar pada kawasan terdampak. Banjir dan rob berimplikasi terhadap kondisi tanah atau unsur hara sehingga akan berdampak terhadap produktivitas padi per hektar. Atas hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan menyusun kajian mitigasi dampak banjir dan rob terhadap lahan pertanian sebagai upaya untuk mengantisipasi penurunan produksi sektor pertanian di masa yang akan datang.

Selain itu, permasalahan irigasi juga menjadi penyebab menurunnya produktivitas padi per hektar. Kondisi geografis wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar, berimplikasi terhadap sedimentasi yang cukup tinggi. Sedimentasi yang tinggi tersebut, menyebabkan aliran air irigasi seringkali mengalami kendala. Di samping itu, luas lahan yang dialokasikan untuk kawasan pertanian (yaitu tanaman pangan) dalam RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 adalah 521 hektar. Perkembangan kawasan terbangun (*built-up area*) yang cukup tinggi, seperti untuk perumahan dan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan serta alokasi luas lahan yang menurun menyebabkan beberapa saluran irigasi tidak berfungsi. Kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap menurunnya produktivitas padi per hektar.

Dalam hal upaya menambah nilai produk pertanian, dilakukan pendampingan pengembangan Kampung Tempe di Kertoharjo dan Kampung Tahu di Sokoduwet.

4. Perdagangan

Aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan, juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Sektor perdagangan dan koperasi sangat memberikan kontribusi secara agregat yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan produk unggulan Kota Pekalongan diantaranya batik, ikan, tenun, konveksi dan aneka kerajinan lainnya berkembang dengan penuh inovasi dan kreativitas. Upaya Pemerintah dalam memfasilitasi dan menguatkan aktivitas usaha UMKM tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan kepastian usaha UMKM, sehingga aktivitas bisnis UMKM Kota Pekalongan tetap terjaga dan mampu memenuhi pasar lokal, regional, nasional dan internasional.

Di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti disajikan dalam Tabel II-219 berikut.

Tabel II-219
Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

JenisPasar / Toko	2020	2021	2022	2023	2024
Sentra Perdagangan Batik	3	3	3	3	3
PasarTradisional	11	10	11	11	11
- Toko	74	74	74	74	216
- Kios	555	555	555	555	1383
Toko diluar Pasar Tradisonal	2.726	2.757	4.729	4.729	4.729
Toko Modern:					
- Minimarket	53	77	64	82	90
- Supermarket	5	4	4	6	6
- Department store	4	2	2	3	3
- Hypermarket	1	1	1	1	1
- Perkulakan	0	0	0	0	0

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2025

Aktivitas perdagangan juga mencakup pedagang/usaha informal yang tidak kalah banyak dengan usaha formal. Pada tahun 2024, pedagang/usaha informal sebanyak 852 pedagang yang tersebar di titik-titik strategis di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-220 berikut.

Tabel II-220
Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan
Tahun 2024

No.	Lokasi	Jumlah	
1	Jl. Sultan Agung	36	36
2	Jl. Hasanudin	10	10
3	Jl. Urip Sumoharjo	24	24
4	Jl. Gatot Subroto	39	39
5	Jl. Kurinci	11	11
6	Jl. Kusuma Bangsa	34	34
7	Jl. Merak *	1	1
8	Jl. WR. Supratman	10	10
9	Jl. Progo	9	9
10	Jl. Merpati	16	16
11	Jl. Mawar	18	18
12	Jl. Melati	38	38
13	Jl. Pembangunan	13	13
14	Jl. Mataram	50	50
15	Alun-alun timur	9	9
16	Alun-alun utara	12	12
17	Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras	261	261
18	Tentara Pelajar	31	31
19	Jl. Veteran	51	51
20	Jl. Angkatan 45	4	4
21	Resimen	4	4
22	Gajah Mada	8	8
23	Jl. HOS cokroaminoto	43	43
24	Jl. RA Kartini	13	13
25	Jl. Wahid Hasyim	27	27
26	Jl. RA Kartini	13	13
27	Jl. Wahid Hasyim	27	27
28	Jl. Dr. Wahidin	17	17
29	Jl. Cendrawasih	27	27
	Total	852	852

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan (diolah), 2025

Dari sisi perdagangan, kontribusi di sektor perdagangan atas harga cenderung meningkat dalam periode 5 tahun kebelakang. Pada tahun 2020 sebesar Rp.2,319 triliun dan naik sampai di angka Rp.3,065 triliun di tahun 2024 dengan kontribusi ADHB sektor perdagangan tahun 2024 sebesar 20,76 persen. Begitu pula dengan kontribusi sektor perdagangan atas harga konstan yang cenderung meningkat, mulai dari Rp.1,578 triliun di tahun 2020 menjadi Rp.1,875 triliun di tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 21 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-221 berikut.

Tabel II-221
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Keterangan		2020	2021	2022	2023	2024
1	ADHB	PDRB Total (Rp. Milyar)	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,22	14.766,95
		PDRB Perdagangan (Rp. Milyar)	2.319,49	2.474,77	2.656,28	2.893,07	3.065,49
		Kontribusi	21,38	21,59	21,10	21,05	20,76
2	ADHK 2010	PDRB Total	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55	8.928,80
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.578,46	1.664,63	1.719,40	1.807,55	1.875,07
		Kontribusi	21,51	21,90	21,39	21,32	21,00

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.

a. Kondisi Umum Industri

Jumlah industri di Kota Pekalongan sejak Tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami perkembangan. pada tahun 2020 terdapat 8 unit industri, di tahun 2021 meningkat menjadi 58 unit industri, dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 353 unit industri. Pada tahun 2023 dikarenakan ketersediaan data sudah cukup baik dibantu dengan menggunakan aplikasi SIINas (Sistem Industri Nasional), OSS (*Online Single Submission*), dan Sistem Informasi Industri Kota Pekalongan, jumlah industri yang terdata sejumlah 10.446 unit industri. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 12.449 unit. Secara keseluruhan jumlah industri di Kota Pekalongan dari tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel II-222 berikut.

Tabel II-222
Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Klasifikasi Industri	Jumlah Unit Industri				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	4	8	26	1.403	1.639
Industri Aneka (IA)	3	45	326	8.047	9.788
Industri Hasil Pertanian (IHP)	1	5	1	996	1.072
JUMLAH	8	58	353	10.446	12.449

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

Jika dilihat dari nilai investasinya, industri di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik seperti disajikan dalam Tabel II-223 berikut.

Tabel II-223
Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

KLASIFIKASI INDUSTRI	INVESTASI (Rp Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	955,00	3.108,90	6.275,31	11.277,66	13.080,53
Industri Aneka (IA)	7.184,00	11.271,27	44.579,27	50.091,30	57.574,17
Industri Hasil Pertanian (IHP)	1.450,00	740,00	100,00	1244,00	0
JUMLAH	9.589,00	15.120,17	50.954,58	73.276,45	73.276,45

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

b. Industri Unggulan

Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik, pakaian jadi dari tekstil dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Pada tahun 2024 terjadi penurunan pada industri batik menjadi 1.796 dan Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya menjadi 28. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.

Tabel II-224
Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Jenis industri	2020	2021	2022	2023	2024
Batik	1.457	1.882	1.832	2.021	1.796
Pakaian jadi dari tekstil	941	1.067	1.146	1.335	1.439
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	26	45	77	38	40
Penggaraman/Pengeringan Ikan	38	102	51	33	21
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	88	87	82	204	28
Pengolahan Teh dan Kopi	31	36	38	37	55
Pertenunan	33	46	47	55	58

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

Tabel II-225
Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Jenis industri	2020	2021	2022	2023	2024
Batik	7.964	11.263	11.358	12.458	10.377
Pakaian jadi dari tekstil	6.600	7.958	8.650	9.774	7.102
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	52	62	154	53	61
Penggaraman/Pengeringan Ikan	190	228	136	119	148
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	227	664	606	1.585	30
Pengolahan Teh dan Kopi	1.834	2.531	2.774	2.534	2.757
Pertenunan	466	407	425	620	943

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

Tabel II-226
Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Jenis industri	2020	2021	2022	2023	2024
Batik	10.041	17.610	1.786	10.365,3	18.408,4
Pakaian jadi dari tekstil	2.098	524	13.514	8.816,6	33.449,1
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	14,2	7,5	n/a	25	83,7
Penggaraman/Pengeringan Ikan	135	16,8	n/a	12,7	590,90
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	72.15	80,4	n/a	44,7	96,9
Pengolahan Teh dan Kopi	3.550	n/a	n/a	n/a	32.305,5
Pertenunan	n/a	n/a	648	145,7	3.780,5

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

c. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sepanjang 2020-2024 cenderung fluktuatif berdasarkan ADHB. Pada tahun 2020 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sebesar 21,34 persen dari total PDRB. Kondisi tersebut terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 19,86 persen dari total PDRB. Peningkatan kinerja sektor perindustrian mampu menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan selain sektor perdagangan. Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB disajikan dalam Tabel II-227 berikut.

Tabel II-227
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Keterangan		2020	2021	2022	2023	2024
ADHB	PDRB Total (Rp. Milyar)	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,22	14.766,95
	PDRB Perindustrian (Rp. Milyar)	2.315,37	2.423,91	2.623,11	2.809,45	2.932,71
	Kontribusi	21,34	21,15	20,83	20,44	19,86
ADHK (2010)	PDRB Total (Rp. Milyar)	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55	8.928,80
	PDRB Perindustrian (Rp. Milyar)	1.542,95	1.579,67	1.647,00	1.684,88	1.698,23
	Kontribusi	21,03	20,78	20,49	19,88	19,01

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

2.4.3.4 Unsur Penunjang

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unit yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan

simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dengan unit kerja di bawahnya maupun dengan instansi lain sesuai tugasnya dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP Kota, Nilai SAKIP OPD dan Persentase Capaian Kinerja Pembangunan.

a. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi. Capaian pada tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023 karena terdapat 9 naskah kerja sama terkait Mall Pelayanan Terpadu. Kerja sama tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan di MPP.

Tabel II-228
Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	93	68	70	21	26

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda, 2025

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2022, terdapat 12 Peraturan daerah yang ditetapkan, dengan status 10 Perda sudah aktif dan 2 Perda Masih dalam proses evaluasi dan permohonan nomor registrasi di provinsi, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- d. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- e. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
- f. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- g. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing;
- h. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- i. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV;
- j. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- k. Raperda Kota Pekalongan tentang Garis Sempadan;
- l. Raperda Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.4.3.5 Unsur Pendukung

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, Bapperda Kota Pekalongan selalu berupaya tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahkan selalu berupaya melakukan percepatan-percepatan dari jadwal yang telah ditentukan.

Sebagai bentuk sinergitas dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan disusun dengan memperhatikan RPJP, RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RKPD Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

2. Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *updating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil, dimana pada tahun 2015 s/d 2023 secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3. Kepegawaian

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II (Pemerintah Kab/Kota), serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Jumlah ASN pada Pemerintah Kota Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebanyak 3.139 orang, dari tahun 2023 sebanyak 3.177. Penurunan ini antara lain adalah karena adanya pegawai purna tugas yang cukup banyak pada tahun 2024 serta adapula yang meninggal dunia.

Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel II-229 berikut.

Tabel II-229
Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan
Tahun 2022-2024

Jabatan	2022			2023			2024		
	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
Eselon II	25	3	28	23	2	25	24	4	28
Eselon III	66	42	108	67	44	111	69	43	112
Eselon IV	124	107	231	130	110	240	122	108	230
Fungsional Umum	594	613	1.207	443	313	756	380	208	588
Fungsional Tertentu	607	1.080	1.687	68	1.358	2.045	719	1.462	2.181
Jumlah Total	1.416	1.845	3.261	1.265	1.827	3.177	1.314	1.825	3.139

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2024, 2025

Sedangkan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel II-230 berikut.

Tabel II-230
Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan
Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022-2024

Jabatan	2022			2023			2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	45	-	45	33	-	33	29	0	29
SMP/Sederajat	81	7	88	70	7	77	63	6	69
SMA/Sederajat	269	131	400	231	105	336	204	78	282
Diploma I,II/Akta I,II	13	6	19	11	5	16	3	1	4
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	165	323	488	151	302	453	151	310	461
Diploma IV	26	67	93	29	69	98	32	66	98
Sarjana S1	703	1.233	1.936	691	1.250	1.941	695	1.272	1.967
Sarjana S2	111	78	189	131	89	220	134	91	225
Sarjana S3	3	-	3	3	-	3	3	1	4
Jumlah Total	1.416	1.695	3.261	1.350	1.827	3.177	1.314	1.825	3.139

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2025, 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ASN Pemerintah Kota Pekalongan atau sekitar 69,95 persen berpendidikan sarjana (Strata 1 sampai dengan Strata 3/doktor). Hal ini menunjukkan SDM yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Hal ini dapat mendukung bila nantinya dilakukan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit.

Dengan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari Sistem Merit antara lain:

- a. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan;
- b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;
- c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
- d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
- e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
- f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
- g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
- h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
- j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
- k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
- l. Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN tiap tahunnya dengan 9 (Sembilan) indikator seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020. Adapun nilai dan kategori dalam Indeks Sistem Merit adalah: nilai 100-174 kategori Buruk, 175-249 Kategori Kurang, 250-324 kategori Baik dan 325-400 kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2022, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan mencapai nilai 264,5 dengan kategori Baik. Sedangkan untuk tahun 2023, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan memperoleh nilai sebesar 327, melebihi target yang telah ditetapkan RPJMD dan capaian tahun-tahun sebelumnya. Untuk Provinsi Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota nilai Indeks Sistem Merit kategori Sangat Baik untuk 2 Kabupaten/kota (Kota Magelang dan Kota Pekalongan), kategori Baik untuk 30 Kabupaten/kota dan sisanya 3 Kabupaten/kota kategori Kurang.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detail disajikan dalam Tabel II-231 berikut.

Tabel II-231
Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Diklat	2020	2021	2022	2023	2024
Teknis	151	172	472	327	285
Fungsional	75	13	21	7	9
Kepemimpinan	1	3	2	45	16
Prajabatan	0	200	319	2	0
Orientasi PPPK	-	-	190	146	136

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan diklat di Kota Pekalongan sangat fluktuatif disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Diklat Teknis, Fungsional, Kepemimpinan, Prajabatan dan orientasi PPPK pada tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan porsi / kuota yang disediakan penyelenggara Diklat. Sehingga jumlah peserta diklat tiap tahunnya tidak dapat diprediksi jumlahnya, walaupun BKPSDM secara teratur selalu mengajukan calon peserta diklat baik ke Pemprov Jateng maupun Lembaga/instansi/ kemeterian terkait. Selain itu BKPSDM juga selalu mengisi pengajuan peserta diklat melalui Aplikasi SI JARI ON AKD milik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk diklat prajabatan pada tahun 2024 dilaksanakan untuk orientasi PPPK untuk 136 orang.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (general check-up). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Jumlah ASN yang melakukan general check-up jumlahnya fluktuatif, berdasarkan jumlah ASN yang memerlukan cek Kesehatan (mengalami sakit) ataupun CPNS yang akan diangkat menjadi PNS. Pada tahun 2024 terdapat 58 orang yang mengikuti General Check Up. Diklat purna tugas sudah tidak dilaksanakan dari tahun 2021 sampai sekarang ditahun 2024.

Jumlah Aparatur yang melakukan general check up dan mengikuti Diklat purna tugas pada tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel II-232 berikut.

Tabel II-232
Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Jenis Pembinaan Memasuki Masa Pensiun	2020	2021	2022	2023	2024
General Check-Up	11	206	16	388	58
Diklat Purna Tugas	60	0	0	0	0

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, 2025

5. Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dimaksud, perlu adanya akselerasi langkah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang selaras dengan tema perencanaan pembangunan serta dapat membangun langkah-langkah strategis yang menempatkan science-based policy yakni aktivitas riset sebagai basis pengambilan kebijakan yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang muncul di Kota Pekalongan.

Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Riset Unggulan Daerah (RUD) dan fasilitasi Riset Bersama (Risber). RUD merupakan kegiatan fasilitasi pembiayaan riset yang mengarah kepada isu aktual dan strategis Kota Pekalongan, sedangkan fasilitasi Riset Bersama merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian

Tabel II-233
Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
1	2019	Adopsi Inovasi Media Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) untuk Memperkuat Industri Kreatif Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	STMIK Widya Pratama Pekalongan
2	2020	Studi Potensi dan Penentuan Sumur Resapan sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis	Universitas Diponegoro
3	2020	Strategi Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19: Optimalisasi Peran Pentahelix di Kota Pekalongan Berdasar Pendekatan Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah	Universitas Pekalongan
4	2020	Meningkatkan Peranan Aparatur Pemerintah Tingkat RT dan RW dalam Dashboard Eksekutif untuk Memudahkan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Mengkoordinasi dan Memonitoring	STMIK Widya Pratama Pekalongan
5	2020	Desain Pendidikan Agama dalam Keluarga guna Membangun Kemampuan Problem Solving Anak	Universitas Selamat Sri
6	2020	Edukasi dan Mitigasi Bencana Banjir untuk Siaga Bencana di Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan
7	2021	Efektivitas Aplikasi Deteksi Risiko Kehamilan (ADRK) Mandiri Berbasis Android di Kota Pekalongan Tahun 2021	UMPP
8	2021	Video Teaser Batik Edu-Tourism sebagai Primadona Inovasi Daya Saing Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan
9	2021	Implementasi Penguatan Destinasi Pariwisata Daerah Kota Pekalongan Melalui Analisis Strata Produk Unggulan dan Analisis Pesaing	Balitbang Kota Magelang
10	2022	Pemetaan Jaringan Drainase Berbasis Spasial di Kota Pekalongan	Institut Teknologi Bandung
11	2022	Studi Penanganan Genangan dan Banjir di Wilayah Kota Pekalongan Barat	Universitas Semarang
12	2022	Studi Penyusunan Zona Risiko Kerentanan Air Tanah terhadap Pencemaran Menggunakan Metode <i>Groundwater Occurance, Overlaying Lithology Depth of Groundwater (GOD)</i> sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan	Universitas Diponegoro
13	2022	Pengolahan Limbah Batik Menggunakan Bakteri <i>Indigenous</i> sebagai Upaya Pemulihan Indeks Kualitas Air di Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan
14	2022	Penerapan Konsep <i>Water Sensitive Urban Design</i> untuk Mewujudkan Permukiman Pesisir Kota Pekalongan yang Tangguh	Universitas Diponegoro

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
15	2023	Analisis Lingkungan Hidup dan Pola Asuh sebagai Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Balita Usia 6 Sampai 60 bulan di Kota Pekalongan Tahun 2023	Universitas Negeri Semarang
16	2023	Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Rob di Kota Pekalongan dalam Perspektif Masyarakat	Universitas Terbuka
17	2023	Kajian Social Responsibility Empowerment Para Pelaku Usaha Batik dalam Pengelolaan Limbah dan Penggunaan Air Bawah Tanah di Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan
18	2023	Land Value Capture sebagai Inovasi Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah di Kota Pekalongan	Tim Peneliti UNDIP
19	2023	Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dan Konservasi Air Tanah Di Kota Pekalongan	Pusat Pusat Riset Koperasi, Korporasi Dan Ekonomi Kerakyatan – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
20	2024	Penentuan Prioritas Produk Unggulan Daerah Dan Pengembangannya di Kota Pekalongan Menggunakan Metode Multi Attribute Utility Theory (Maut)	Universitas Pekalongan
21	2024	Pengembangan Model Dan Materi Pembelajaran Adaptasi Lingkungan Berbasis Teknologi di Kota Pekalongan	STAI KI AGENG PEKALONGAN
22	2024	Metode Etnoinformatika Untuk Strategi Pengembangan Dan Promosi Kuliner Di Pasar Sugihwaras Kabupaten Pekalongan	FISIPOL UGM
23	2024	Strategi Tata Kelola Kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah Dan Rentan Anak Tidak Sekolah di Kota Pekalongan	Pusat Studi Pancasila UGM
24	2024	Pemetaan Sumber Daya Lokal Kota Pekalongan Untuk Mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang	Fakultas Teknik UGM

Sumber: jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2024

Riset Bersama dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian melalui penunjukan langsung. Tema yang diusung dalam riset bersama berdasarkan usulan dari OPD atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel II-234
Riset Bersama Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
1	2019	Megono Kaleng Kuliner Tradisional Kota Pekalongan	Tim Peneliti Poltekkes
2	2019	Studi Konsep Pengembangan Pekalongan Baru	CV. Monalisa Art
3	2019	Road Map Percepatan Pengembangan Pariwisata Kota Pekalongan	CV. Tunas

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
4	2019	Penelitian Analisis Investasi Penyertaan Modal Perumda Tirtayasa	CV. Pijar Mulya Wasesa
5	2019	Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Exit Jalan Tol	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
6	2019	Strategi Penurunan Angka Pengangguran	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
7	2020	Analisis Strategi Recovery Kepariwisata Kota Pekalongan pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru	DRD Kota Pekalongan
8	2020	Analisis Kebutuhan Masyarakat Terdampak Banjir Rob: Studi Kasus Kota Pekalongan	DRD Kota Pekalongan
9	2021	Efektivitas Penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
10	2021	Pengembangan Dashboard Eksekutif untuk Sistem Monitoring Filariasis Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan
11	2022	Mitigasi Dampak Banjir dan Rob terhadap Lahan Pertanian di Kota Pekalongan	Universitas Gadjah Mada
12	2023	Penelitian Penerapan Teknologi Pertanian pada Produk Tempe Di Kampung Tempe Kota Pekalongan	Universitas Gadjah Mada
13	2023	Studi Antropologi: Konstruksi Sosial pada Kemiskinan di Kota Pekalongan	Lingkar Kajian Kota Pekalongan (LKPP)

Sumber: jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2024

Dalam pelaksanaan riset unggulan tidak terdapat kendala yang berarti, namun demikian perlu dilakukan pemetaan kebutuhan riset yang sistematis serta publikasi yang lebih luas untuk mendapatkan penelitian yang lebih tepat sasaran. Penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama Bapperida dengan Perguruan Tinggi di sekitar Kota Pekalongan, Perguruan Tinggi Nasional ataupun dengan Badan Riset Inovasi Nasional.

RUD dan Riset Bersama yang dilakukan dalam kerangka menjembatani penelitian terhadap kebijakan (*bridging knowledge to policy*) di wilayah Kota Pekalongan. Tema RUD dan Riset Bersama yang dilakukan didasarkan atas isu strategis pembangunan, yaitu isu strategis RKPD Kota Pekalongan. Seleksi pelaksana RUD dan Riset Bersama didasarkan atas inovasi yang akan dikembangkan oleh pelaksana terhadap isu strategis pembangunan. RUD dan Riset Bersama memiliki sasaran merumuskan kebijakan pembangunan, sebagai inovasi pembangunan, dalam kerangka pembangunan Kota Pekalongan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pemangku kepentingan pembangunan serta memiliki kemampuan yang dapat dioptimalkan dan diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Di sisi lain, tantangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah bagaimana terus meningkatkan peran perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan untuk semakin besar berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan lebih memahami permasalahan maupun isu strategis pembangunan, sehingga diharapkan memiliki penguasaan permasalahan yang lebih baik, dalam pengembangan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan.

2.4.3.6 Unsur Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah:

- (1) Menyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
- (2) Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- (3) Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Pengawasan umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap tugas dan fungsi organisasi.

APIP melakukan penilaian kematangan/maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Dalam Maturitas SPIP terkandung unsur Manajemen Resiko Indeks/MRI, yaitu Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Sasaran Program terkait Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko yaitu Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021 Kota Pekalongan telah melakukan penilaian terhadap MRI.

Tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan dari tahun 2020 sampai 2024 terus meningkat, diawali dengan level 3 penuh, turun di tahun 2021 menjadi level 2 dengan skor : 2,812 dan meningkat kembali menjadi level 3 di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan target kinerja akhir maturitas 5. Capaian nilai level 3 dalam arti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilakukan namun belum sepenuhnya efektif. Penurunan tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan antara lain adanya perubahan dalam Uraian Indikator Karakteristik Pengendalian dan belum optimalnya penerapan SPIP. Penguatan APIP diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan. 3 (tiga) area penguatan pengawasan APIP Inspektorat Kota Pekalongan adalah: Aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi para APIP; Aspek Sumber Daya (Sumber daya anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan Sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis) dan Aspek Tata Kelola (Pelaporan pengawasan berindikasi KKN, Standar Pengawasan, dan Penjaminan Mutu).

Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-235 berikut.

Tabel II-235
Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tingkat Maturitas SPIP	2020	2021	2022	2023	2024
Level	Level 3 Penuh	Level 2 2,812	Level 3 3,022	Level 3 3,002	Level 3 3,005

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2025

2.4.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2020-2024 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib. Pada tahun 2024 masih terjadi gangguan keamanan antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Jumlah kasus yang naik yaitu penganiayaan, pencurian, penipuan, dan kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Oleh karenanya diperlukan koordinasi kewaspadaan dini dan pembinaan ketahanan ekonomi di masyarakat Kota Pekalongan, juga sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan psikotropika kepada masyarakat Kota Pekalongan. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-236 berikut.

Tabel II-236
Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tindak Kejahatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pembunuhan	2	0	0	0	0
Pemerksaan	0	2	0	0	0
Penganiayaan	3	2	13	6	7
Pencurian	33	59	81	72	93
Penipuan	18	2	31	6	9
Penadahan	0	0	0	0	0
Narkoba dan Psikotropika	64	46	39	49	56

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2025

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Tabel II-237 menunjukkan data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2020-2024.

Tabel II-237
Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Konflik Sosial	1	2	0	0	0

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2025

Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka tindakan preventif agar tidak muncul konflik sosial. Pengelolaan potensi konflik sosial dilakukan melalui Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, antara lain dengan kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, Pembinaan Wawasan

Kebangsaan Bagi Pelajar Dan Mahasiswa, Pembinaan Karakter Dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur, Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda, Pengawasan Orang Asing, Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial, dan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah.

2. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik dilakukan setiap akan diselenggarakan pemilihan umum.

Tabel II-238
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

Kegiatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan pembinaan Politik Daerah	38	36	34	48	34

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2025

Tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Wali Kota) dan Pemilu Legislatif. Pada tahun 2024 telah diadakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan dengan tingkat partisipasi di Kota Pekalongan sebesar 75,78 persen (175.859 orang pemilih), Pemilihan gubernur 75,99 persen (175.859 orang pemilih), Pemilihan Presiden sebesar 86,94 persen (200.512 orang pemilih) dan Pemilu legislatif sebanyak 86,58 persen (199.677 orang pemilih).

Tabel II-239
Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024

JENIS PEMILIHAN UMUM	2020	2021	2022	2023	2024
Pemilu Kepala Daerah (Wali Kota) (persen)	79,35	-	-	-	75,78
Pemilu Kepala Daerah (Gubernur) (persen)	-	-	-	-	75,99
Pemilu Presiden (persen)	-	-	-	-	86,94
Pemilu Legislatif (persen)	-	-	-	-	86,58

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2025

3. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2017-2021 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut diupayakan terus meningkat, dimana pada tahun 2020 sebanyak 3 kali, tahun 2021 sebanyak 7 kali dan tahun 2022 sebanyak 2 kali, tahun 2023 sebanyak 7 kali dan tahun 2024 sebanyak 11 kali.

Tabel II-240
Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2020-2024

Kegiatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3	7	2	7	11

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2025

2.5. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 306 Ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2024 yang terdiri atas hasil evaluasi Indikator RPJMD, hasil evaluasi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hasil evaluasi indikator Sustainable Development Goals (SDG's).

2.5.1 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Tahun 2024

Evaluasi capaian indikator kinerja daerah ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terdiri atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi terbagi dalam 3 kategori, yaitu tercapai, tidak tercapai dan belum tersedia data. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 di tahun 2024 dari 101 indikator sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024
 - Tercapai : 65 Indikator (64,36%)
 - Tidak Tercapai : 34 Indikator (33,66%)
 - Belum Tersedia Data : 2 Indikator (1,98%)
2. Evaluasi terhadap Target Akhir RPJMD
 - Tercapai : 65 Indikator (64,36%)
 - Tidak Tercapai : 34 Indikator (33,66%)
 - Belum Tersedia Data : 2 Indikator (1,98%)

Tabel II-241
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d TW IV Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.66	74.44	74.60	74.57	74.79	100.30	Tercapai	74.79	100.17	Tercapai
2	Angka Kemiskinan	Persen	5.89	7.59	6.81	6.29	6.71	93.74	Tidak Tercapai	6.71	87.78	Tidak Tercapai
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.03	75.40	76.71	75.71	77.21	101.98	Tercapai	77.21	101.55	Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.99	6.89	5.02	6.31	4.91	128.51	Tercapai	4.91	122.00	Tercapai
5	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	Persen	100.00	55.56	70.37	77.78	90.91	116.88	Tercapai	90.91	90.91	Tidak Tercapai
6	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	Persen	12.17	37.27	18.98	19.58	8.17	239.66	Tercapai	8.17	148.96	Tercapai
7	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Persen	91.04	n/a	90.48	90.48	91.95	101.62	Tercapai	91.95	100.10	Tercapai
8	PDRB Perkapita	Rp. Juta/Jiwa / Tahun	40.65	n/a	43.29	37.82	45.99	121.60	Tercapai	45.99	113.14	Tercapai
9	Jumlah konflik sosial	Kasus	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Tercapai	0.00	100.00	Tercapai
10	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.50	n/a	0.35	0.35	0.38	108.57	Tercapai	0.38	76.00	Tidak Tercapai
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	80.01	188.23	122.77	104.14	129.70	80.29	Tidak Tercapai	129.70	61.69	Tidak Tercapai
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7.00	8.90	13.71	7.60	10.12	75.10	Tidak Tercapai	10.12	69.17	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d TW IV Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	9.00	10.27	18.42	9.61	16.08	59.76	Tidak Tercapai	16.08	55.97	Tidak Tercapai
14	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	11.89	n/a	4.40	2.50	5.69	227.60	Tercapai	5.69	47.86	Tidak Tercapai
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61.00	57.87	65.31	65.31	65.10	99.68	Tidak Tercapai	65.10	106.72	Tercapai
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71.34	75.77	73.95	74.22	76.06	102.48	Tercapai	76.06	106.62	Tercapai
17	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	100.00	n/a	95.09	96.24	94.12	97.80	Tidak Tercapai	94.12	94.12	Tidak Tercapai
18	Luas Genangan Banjir dan Rob	Hektar	565.00	1730.00	880.83	880.83	379.02	232.40	Tercapai	379.02	149.07	Tercapai
19	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
20	Persentase pelayanan sampah	Persen	73.12	73.75	71.45	71.12	71.85	101.03	Tercapai	71.85	98.26	Tidak Tercapai
21	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4.55	3.59	5.44	3.32	5.34	160.84	Tercapai	5.34	117.36	Tercapai
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Pelayanan Umum												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Urusan Pendidikan												
1	Persentase capaian SPM pendidikan serta kecukupan pendidik	Persen	100.00	59.51	99.67	100.00	99.12	99.12	Tidak Tercapai	99.12	99.12	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d TW IV Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan tenaga kependidikan											
2	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Kesehatan												
3	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100.00	n/a	106.85	100.00	97.52	97.52	Tidak Tercapai	97.52	97.52	Tidak Tercapai
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang												
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	Persen	99.40	n/a	100.00	100.00	74.13	74.13	Tidak Tercapai	74.13	74.58	Tidak Tercapai
5	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	87.83	n/a	77.88	80.42	91.83	114.19	Tercapai	91.83	104.55	Tercapai
6	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	92.115	n/a	100.00	100.00	100.00	111.53	Tercapai	100.00	108.56	Tercapai
7	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Persen	1.09	n/a	2.19	2.19	2.85	130.14	Tercapai	2.85	261.47	Tercapai
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Regulasi	96.251	n/a	99.89	99.89	99.45	99.56	Tidak Tercapai	99.45	103.32	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d TW IV Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Pengembangan Sarana Persampahan	Persen	100.00	n/a	20.00	60.00	60.00	100.00	Tercapai	60.00	60.00	Tidak Tercapai
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman												
10	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	95.58	97.93	98.76	98.90	72.75	73.56	Tidak Tercapai	72.75	76.11	Tidak Tercapai
Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum Dan Linmas												
11	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	100.00	n/a	82.41	85.00	90.74	106.75	Tercapai	90.74	90.74	Tidak Tercapai
12	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100.00	11.77	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
13	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Sosial												
14	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	3.82	n/a	17.64	4.00	16.68	417.00	Tercapai	16.68	436.65	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Urusan Tenaga Kerja												
15	Persentase Tenaga Siap Pakai yang ditempatkan	Persen	52.36	68.00	49.26	52.29	56.82	108.66	Tercapai	56.82	108.52	Tercapai
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												
16	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28.53	28.21	28.56	28.56	28.31	99.12	Tidak Tercapai	28.31	99.23	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d TW IV Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Skor Kota Layak Anak	Skor	636.00	602.00	769.80	769.80	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Pangan												
18	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Pertanahan												
19	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100.00	n/a	n/a	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Lingkungan Hidup												
20	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60.00	n/a	51.43	42.86	54.29	78.95	Tidak Tercapai	54.29	110.52	Tercapai
21	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0.34	0.00	1.31	0.24	0.11	45.83	Tidak Tercapai	0.11	32.35	Tidak Tercapai
22	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	69.91	n/a	95.20	70.68	92.55	130.94	Tercapai	92.55	132.38	Tercapai
23	Tertib Hukum Lingkungan	Persen	60.10	20.00	43.04	43.00	43.51	101.19	Tercapai	43.51	72.40	Tidak Tercapai
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												
24	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	91.38	82.37	83.56	89.50	89.28	99.75	Tidak Tercapai	89.28	97.70	Tidak Tercapai
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												
25	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10.00	n/a	8.45	9.02	9.51	105.43	Tercapai	9.51	95.10	Tidak Tercapai
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d TW IV Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67.65	n/a	61.46	67.55	64.41	95.35	Tidak Tercapai	64.41	95.21	Tidak Tercapai
Urusan Perhubungan												
27	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persen	28.00	n/a	24.69	28.00	23.53	84.04	Tidak Tercapai	23.53	84.04	Tidak Tercapai
Urusan Komunikasi Dan Informatika												
28	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.25	n/a	3.29	3.30	3.30	100.00	Tercapai	3.30	101.54	Tercapai
29	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88.31 – 100)	n/a	96.62	Sangat Baik (Nilai 88.31 – 100.00)	96.03	96.03	Tercapai	96.03	96.03	Tercapai
Urusan Koperasi dan UKM												
30	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	9.02	n/a	11.46	8.42	10.33	122.68	Tercapai	10.33	114.52	Tercapai
Urusan Penanaman Modal												
31	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	216.78	410.60	765.82	212.54	171.08	80.49	Tidak Tercapai	171.08	78.92	Tidak Tercapai
Urusan Kebudayaan												
32	Persentase Peningkatan Kelompok Budaya	Persen	1.46	47.20	1.53	1.50	1.50	100.00	Tercapai	1.50	100.00	Tercapai
Urusan Perpustakaan												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d TW IV Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	Indeks	20.73	n/a	19.25	20.32	50.90	250.49	Tercapai	50.90	245.54	Tercapai
Urusan Kearsipan												
34	Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	Indeks	74.40	87.59	91.02	91.04	91.39	100.38	Tercapai	91.39	122.84	Tercapai
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga												
35	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1.37	n/a	1.39	1.39	2.75	197.84	Tercapai	2.75	200.73	Tercapai
36	Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	15.00	4.00	6.00	14.00	14.00	100.00	Tercapai	14.00	93.33	Tidak Tercapai
Urusan Statistik												
37	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	80.00	n/a	77.73	98.50	97.87	99.36	Tidak Tercapai	97.87	122.34	Tercapai
Urusan Persandian												
38	Indeks Tata Kelola KAMI	Tingkat	2	n/a	II	II	III+	> 100.00	Tercapai	III+	> 100.00	Tercapai
URUSAN PILIHAN												
Urusan Kelautan dan Perikanan												
39	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15,600.00	n/a	10,123.79	15,293.00	12,656.43	82.76	Tidak Tercapai	12,656.43	81.13	Tidak Tercapai
Urusan Pariwisata												
40	Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	625,000	316,440	1,258,597	1,000,000	1,130,104	113.01	Tercapai	1,130,104	180.82	Tercapai
Urusan Pertanian												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d TW IV Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Nilai produksi tanaman pangan. hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	259,492,900	n/a	637,811,340	251,474,390	334,022.55	132.83	Tercapai	334,022.55	128.72	Tercapai
Urusan Perindustrian												
42	Pertumbuhan Industri	Persen	0.07	2.38	2.30	2.30	0.79	34.35	Tidak Tercapai	0.79	1,128.57	Tercapai
Urusan Perdagangan												
43	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	27.51	n/a	11.09	26.97	14.50	53.76	Tidak Tercapai	14.50	52.71	Tidak Tercapai
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Sekretariat Daerah												
44	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	94.00	n/a	96.38	96.50	94.30	97.72	Tidak Tercapai	94.30	100.32	Tercapai
Sekretariat DPRD												
45	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Perencanaan												
46	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100.00	97.33	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Keuangan												
47	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
48	Rasio PAD	Persen	2.06	n/a	2.26	2.01	1.84	91.54	Tidak Tercapai	1.84	89.32	Tidak Tercapai
Kepegawaian												
49	Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	90.00	n/a	98.90	90.00	99.97	111.07	Tercapai	99.97	111.07	Tercapai
Pendidikan dan Pelatihan												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d TW IV Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Persen	40.00	n/a	34.37	40.00	75.18	187.95	Tercapai	75.18	187.95	Tercapai
Penelitian dan Pengembangan												
51	Persentase Laporan Hasil Litbang	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
Inspektorat Daerah												
52	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Persen	100.00	n/a	66.67	77.42	73.33	94.72	Tidak Tercapai	73.33	73.33	Tidak Tercapai
53	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	16.00	n/a	14.00	14.00	26.00	185.72	Tercapai	26.00	162.50	Tercapai
URUSAN KEWILAYAHAN												
Kecamatan												
54	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec.Pekalongan Utara)	Persen	100.00	n/a	99.84	100.00	103.33	103.33	Tercapai	103.33	103.33	Tercapai
55	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum	Persen	100.00	n/a	99.87	100.00	100.05	100.05	Tercapai	100.05	100.05	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d TW IV Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(Kec. Pekalongan Selatan)											
56	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100.00	n/a	99.73	100.00	102.31	102.31	Tercapai	102.31	102.31	Tercapai
57	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	113.13	113.13	Tercapai	113.13	113.13	Tercapai
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
Kesatuan Bangsa dan Politik												
58	Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
59	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d TW IV Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aspek Daya Saing												
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50.90	54.31	56.24	64.11	59.15	92.26	Tidak Tercapai	59.15	116.21	Tercapai
2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75.69	69.66	77.12	73.69	87.31	118.48	Tercapai	87.31	115.35	Tercapai
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.92	9.18	9.29	9.59	9.34	97.39	Tidak Tercapai	9.34	94.15	Tidak Tercapai
5	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
6	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Nindya	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
7	Indeks Kualitas Air	Indeks	35.39	13.29	48.86	59.37	50.56	85.16	Tidak Tercapai	50.56	142.87	Tercapai
8	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	23.61	5.17	24.39	37.64	26.14	69.45	Tidak Tercapai	26.14	110.72	Tercapai
9	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Regulasi	7.00	n/a	2.00	7.00	3.00	42.86	Tidak Tercapai	3.00	42.86	Tidak Tercapai
10	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	C	B	B	B	100.00	Tercapai	B	100.00	Tercapai
11	Persentase keterhubungan jalan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
12	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persen	100.00	n/a	111.11	122.00	146.67	120.22	Tercapai	146.67	146.67	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d TW IV Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Perub RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Indeks SPBE	Indeks	3.25	n/a	3.29	3.32	3.76	113.25	Tercapai	3.76	115.69	Tercapai
14	IKM Kota	Persen	84.09	80.83	90.69	83.79	90.77	108.33	Tercapai	90.77	107.94	Tercapai
15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97.50	n/a	96.62	97.00	96.03	99.00	Tidak Tercapai	96.03	98.49	Tidak Tercapai
16	Indeks Merit System	Indeks	260.00	n/a	327.00	327.00	327.00	100.00	Tercapai	327.00	125.77	Tercapai
17	Nilai SAKIP Kota	Skor	76.07	73.16	72.83	75.07	73.02	97.27	Tidak Tercapai	73.02	95.99	Tidak Tercapai
18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	Tercapai	WTP	100.00	Tercapai
19	Maturitas SPIP	Nilai	4.00	3.00	3.002	3.60	3.005	83.47	Tidak Tercapai	3.005	75.13	Tidak Tercapai
20	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	8.00	n/a	3.00	6.00	3.00	50.00	Tidak Tercapai	3.00	37.50	Tidak Tercapai

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2025

2.5.2 Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2024

Tabel II-242
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekalongan Sampai Dengan Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	103.01	100.00	100.07	100.07	100.07	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100.00	100.00	106.75	106.75	106.75	Tercapai
1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan										
1	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	100	76.37	99.67	89.50	99.12	99.12	99.12	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase capaian SPM pendidikan tidak memenuhi target dikarenakan ada beberapa capaian indikator mutu pada SPM yang belum mencapai target, yaitu APS 5-6 tahun, APM, APS 7-12 tahun, Indeks Iklim Inklusivitas SD, APS 13-15 tahun, Kemampuan Numerasi SMP, dan APS 7-18 tahun.										
1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum										
1	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.01.04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan										
1	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100	100	56.11	100.00	60.00	60.00	60.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan tidak memenuhi target dikarenakan keterbatasan alokasi kuota peserta sertifikasi pendidik yang disediakan oleh pemerintah pusat.										
1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	99.90	99.90	99.90	Tidak Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	92.56	92.56	92.56	Tidak Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	158.33	158.33	158.33	Tercapai
1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
1	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	Persen	92.00	88.00	18.00	91.00	13.52	13.52	14.70	Tidak tercapai
Capaian indikator Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah kunjungan penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota rendah menunjukkan derajat kesehatan masyarakatnya baik.										
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	Persen	90.00	70.00	72.00	85.00	79.45	79.45	88.28	Tidak Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar tidak memenuhi target dikarenakan ketersediaan sarana, prasarana, dan alkes sedang dalam proses pemenuhan yang sesuai standar. Mulai tahun 2024 pengadaan alkes melalui Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) - sistemnya adalah dropping dari pusat, dan rencana untuk alkes lima tahun kedepan akan dipenuhi melalui SOPHI ini.										
4	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	72.50	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	137.93	Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar jauh melebihi target dikarenakan Pengembangan Pelayanan dan Inovasi di RSUD Bendan dalam pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Tipe C)										
1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan										
1	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	Persen	95.50	93.00	90.59	94.50	94.17	94.17	98.61	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek tidak memenuhi target dikarenakan: 1. Nakes punya STR tp tidak pelayanan 2. Nakes tidak mengurus SIP 3. Nakes sedang proses pengurusan/telat perpanjangn jd di sistem terbaca tidak punya SIP										
2	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	60.00	35.00	100.00	100.00	100.00	100.00	166.67	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan jauh melebihi target dikarenakan adanya UU Nomor 17 tahun 2023 dimana diwajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR dan SIP, sehingga pada saat ini semua tenaga kesehatan RSUD yang masuk dan bekerja di RSUD telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan										
1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman										
1	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	Persen	100.00	92.00	100.00	98.00	97.22	97.22	97.22	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran tidak memenuhi target dikarenakan terdapat 1 sampel produk olahan kerupuk yang terdeteksi tidak bebas dari cemaran.										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
3	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	Persen	97.00	95.00	94.22	96.00	95.80	95.80	98.76	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah TPM (jasa boga/ catering, restoran, depot air minum, rumah makan) hasil pendataan tahun 2024 meningkat. Dengan meningkatnya jumlah industri boga baru yang masih awam akan syarat2 higiene sanitasi, maka dinkes akan meningkatkan pembinaan dengan memberikan pelatihan HSP bagi tempat pengelilaan pangan, dan meningkatkan monev di TPP.										
1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan										
1	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	95	90	98.65	93.00	97.22	97.22	102.34	Tercapai
1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.28	100.00	98.21	98.21	98.21	Tidak Tercapai
3	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)										
1	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	Persen	93.10	82.76	100.00	93.10	100.00	100.00	107.41	Tercapai
1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum										
1	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	Persen	92.11	85.77	67.42	89.66	53.15	53.15	57.70	Tidak Tercapai
Capaian indikator Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah tidak memenuhi target dikarenakan Adanya perubahan data dukung, yang semula menggunakan data Dinas Kesehatan berubah menggunakan data Omahe Dewe (Dinperkim). DPUPR sudah dan akan berupaya untuk mengusulkan fasilitasi terkait sarpras Air Minum Kepada Pemerintah Pusat.										
1.03.04. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
1	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	100.00	0.00	20.00	60.00	60.00	60.00	60.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional tidak memenuhi target dikarenakan target Jumlah penambahan komponen prasarana persampahan kondisi baik (TPS3R, TPA) sampai dengan tahun N = 9 (komponen 2023 dan 2024 TW IV) / 15 (Jumlah seluruh Komponen 2022-2026). Capaian hingga akhir tahun 2024 adalah 9 komponen (2023 = 3 komponen (TPS3R Kelurahan Pringrejo); 2024 = 6 komponen (TPS3R Kelurahan Bugisan 3 Komponen, dan TPST di Kelurahan Kuripan Kertoharjo 3 Komponen).										
1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah										
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	12.87	9.87	17.68	11.67	17.96	17.96	139.53	Tercapai
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan terdapat penambahan jumlah KK yang terlayani IPLT dikarenakan adanya tambahan pengadaan dari Organisasi Non Pemerintah (seperti kemitraan), pendanaannya di luar APBD untuk pembangunan MCK dan lain-lain.										
1.03.06. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase										
1	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	71.49	66.45	68.58	69.48	69.48	69.48	97.19	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase drainase dalam kondisi baik tidak memenuhi target dikarenakan Terkait drainase masih dalam proses penanganan hingga tahun 2026										
1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung										
1	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	18.74	17.24	17.34	18.14	17.38	17.38	92.74	Tidak Tercapai
Capaian indikator Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota tidak memenuhi target dikarenakan Prosedur pengajuan PBG menggunakan aplikasi SIM-BG yang membutuhkan persyaratan lebih rumit sehingga banyak pemohon yang tidak dapat memenuhi persyaratan kelengkapannya										
1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan										
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	86.57	81.12	83.77	84.39	84.50	84.50	97.61	Tidak Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Target tahun 2026, tingkat kemantapan jalan adalah sebesar 86,57% atau sepanjang 130,092 km. Sedangkan target tahun 2024 adalah sepanjang 126,98 km. Sehingga walaupun target tahun 2024 tercapai 100%, tapi tetap akan kurang 3,112 km dari target tahun 2026. Oleh karena itu, dalam mencapai target tahun 2026, Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPUPR pada tahun 2025 akan melakukan pekerjaan Rekonstruksi Jalan yang meliputi 10 paket pekerjaan dengan perkiraan output jalan mantap sepanjang 2,7 km dan										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
Rehabilitasi Jalan meliputi 4 paket pekerjaan dengan perkiraan output jalan mantap sepanjang 0,25 km. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan pada tahun 2026 sedang dalam proses pengusulan penanganan										
1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi										
1	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	21.20	7.87	7.61	15.87	8.79	8.79	41.46	Tidak Tercapai
Capaian indikator Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi tidak memenuhi target dikarenakan dari kuota fasilitasi pelatihan 40 orang yang hadir mengikuti pelatihan hanya 36 orang.										
1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
1	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100.00	0.00	45.24	100.00	73.81	73.81	73.81	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota tidak memenuhi target dikarenakan materi teknis penyusunan Raperda Bangunan Gedung baru selesai pada triwulan III 2024 sehingga tidak memungkinkan penetapan di tahun 2024 sehingga target berubah menjadi pada triwulan I tahun 2025 dan sudah dikoordinasikan pada bagian Hukum Setda Kota Pekalongan. Perwal Penataan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik 2024 dan Perwal Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 2024 akan ditetapkan pada Tahun 2025 Triwulan II										
1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	99.17	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	105.95	105.95	105.95	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.04.02. Program Pengembangan Perumahan										
1	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	92.35	0.00	100.00	91.68	68.78	68.78	74.48	Tidak Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni tidak memenuhi target dikarenakan Data RTLH 2024 (berdasarkan data OMAHE NDEWE) = 18727 Data rumah se-kota (berdasarkan data OMAHE NDEWE, pendataan masih 89%) = 68699 Rasio RTLH = 27,25 Catatan: (1) Pendataan tahun 2024 baru mencapai 89% (2) Adanya pertumbuhan Rumah Tidak Layak Huni baru										
1.04.03. Program Kawasan Permukiman										
1	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	0.00	498.47	227.55	174.47	126.32	126.32	0.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Luas kawasan permukiman kumuh tidak memenuhi target dikarenakan 1. Kegiatan Teknis (fisik) tidak berada dilokasi SK Kumuh 2. Road Map penanganan kumuh yang tertuang dalam dokumen RP2KPKP belum menjadi acuan 3. Dengan munculnya Update SK Kumuh 2024 maka perlu dilakukan review dokumen RP2KPKP 4. Koordinasi Pokja PKP untuk penyusunan rencana penanganan infrastruktur dilokasi kumuh mengacu pada dokumen hasil Update dok RP2KPKP										
1.04.04. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh										
1	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	2147.88	1649.41	1,920.55	1,973.41	2.021.56	2.021,56	94.12	Tidak Tercapai
Capaian indikator Luas kawasan permukiman tidak kumuh tidak memenuhi target dikarenakan berdasarkan SK kumuh Tahun 2024 terdapat penambahan daerah kumuh, yaitu di kelurahan : Panjang Wetan, Tirto, Degayu, dan Pasir Kraton Kramat, dan akan terus diupayakan untuk pengurangan luasan kumuh Kota Pekalongan.										
1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu)										
1	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	14.55	14.44	15.86	54.83	345.71	54.83	376.84	Tercapai
Capaian Indikator Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan sesuai kesepakatan Dinperkim, bag. Pemerintahan, dan inspektorat untuk data laporan LPPD pembagiannya menggunakan jumlah rumah yg ada di perumahan bukan jumlah unit rumah se kota										
1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.17	100.17	100.17	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum										
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Persen	70.00	60.00	80.00	66.00	80.00	80.00	114.29	Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan dari 20 perda prioritas selama tahun 2024 pelaksanaan penegakan perda baik secara rutin maupun berdasarkan laporan dari masyarakat terkaitnya hanya di 16 perda (1. Perda No. 12 Tahun 2011 ttg Pajak Reklame, 2. Perda No. 5 Tahun 2019 ttg Perubahan atas Perda No. 5 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum , 3. Perda No. 2 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan Reklame, 4. Perda No. 13 Tahun 2000 ttg Pengawasan dan Larangan Minuman Beralkohol, 5. Perda No. 16 Tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Usaha Warung Internet , 6. Perda No. 04 Tahun 2009 ttg Perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan No. 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan, 7. Perda No. 7 Tahun 2013 ttg Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya, 8. Perda No. 12 Tahun 2014 ttg Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 9. Perda No. 1 Tahun 2018 ttg Izin Usaha Industri, 10. Perda No. 12 Tahun 2018 ttg Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, 11. Perda No. 16 Tahun 2011 ttg Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan, 12. Perda No. 1 Tahun 2019 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah, 13. Perda No. 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, 14. Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah, 15. Perda No. 15 Tahun 2011 Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan, 16. Perda No. 35 Tahun 2011 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga capaiannya 80 persen.										
1.05.03. Program Penanggulangan Bencana										
1	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	100.13	100.13	100.13	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial										
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75	42	65.41	67.00	100.00	100.00	133.33	Tercapai
Capaian indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan jauh melebihi target dikarenakan sharing kegiatan dari Dinas sosial provinsi jawa tengah diselesaikan pada TW 4 dan semua PSKS mengikuti kegiatan dengan rincian Surat Tanda Daftar = 19 LKS dan ber-SK Kemenhumham = 41 LKS										
1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persen	100	100	100.00	100.00	126.14	126.14	126.14	Tercapai
Capaian indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan banyaknya kelayan yang terlayani berasal dari luar kota pekalongan baik itu disabilitas terlantar, lansia terlantar, dan gepeng										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial										
1	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Persen	52.49	60.45	57.38	55.12	27.64	27.64	52.66	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial tidak memenuhi target dikarenakan perbandingan jumlah penerima sembako (BPNT) dan PKH jauh lebih sedikit daripada jumlah DTKS pada Kota Pekalongan, meskipun ada upaya update verval data.										
1.06.06. Program Penanganan Bencana										
1	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan										
1	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja										
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	persen	0.55	0.33	1.09	0.46	1.41	1.41	256.36	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan - Hingga Tw IV Tahun 2024 (persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi) adalah 1,41% dan target akhir RPJMD adalah 0,5% sehingga capaiannya adalah 256,84%. - Melebihi target karena adanya penambahan peserta yang bersertifikasi dari beberapa LPKS yang ada di Kota Pekalongan sebanyak 802 peserta.										
2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja										
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	29.93	19.93	16.70	25.93	33.81	33.81	112.96	Tercapai
Capaian indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan pasar kerja.										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
2.07.05. Program Hubungan Industrial										
1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	49.02	45.33	49.93	47.51	50.93	50.93	103.90	Tercapai
2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan										
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	11.09	1.85	5.98	7.39	19.09	19.09	172.14	Tercapai
Capaian indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender jauh melebihi target dikarenakan (1). Komitmen OPD terhadap pangarusutamaan gender semakin meningkat; (2) Terdapat beberapa OPD yang menyusun lebih dari target yaitu masing-masing OPD dua sub kegiatan.										
2.08.03. Program Perlindungan Perempuan										
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	Persen	23.99	23.99	15.01	23.99	4.60	4.60	521.19	Tercapai
Capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Adanya faktor yang mendukung ketercapaian : (1). adanya sosialisasi, advokasi dan edukasi hukum terkait perlindungan perempuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melapor dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan; (2). terbentuknya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) tingkat kecamatan dan kelurahan dan kader SAPA (Sahabat Peduli Perempuan dan Anak) kecamatan dan kelurahan; (3). pendampingan dan advokasi langsung oleh PATBM dan SAPA tingkat kecamatan dan kelurahan; (4). bintek terhadap tim PATBM dan kelurahan, (4) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan.										
2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (pha)										
1	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	Persen	55.56	25.93	33.33	40.74	40.74	40.74	73.33	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) tidak memenuhi target dikarenakan Capaian indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) tidak memenuhi target dikarenakan Dekela (desa/kelurahan layak anak) sampai dengan akhir periode rpjmd ditargetkan 15 kelurahan dari 27 kelurahan se Kota Pekalongan Data awal tahun 2021 Dekela sejumlah 7 kelurahan Tahun 2022 ditargetkan 8 kelurahan atau 29.63% (bertambah 1 kelurahan) Tahun 2023 ditargetkan 9 kelurahan atau 33..33% (bertambah 1 kelurahan) Tahun 2024 ditargetkan 11 kelurahan atau 40.74% (bertambah 4 kelurahan) Tahun										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
2025 ditargetkan 13 kelurahan atau 48.14% (bertambah 2 kelurahan) Tahun 2026 ditargetkan 15 kelurahan atau 55.56% (bertambah 2 kelurahan) sehingga pada tahun 2024 secara target yang direncanakan/ditetapkan sudah tercapai.										
2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak										
1	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat										
1	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4.8	3.8	4.45	4.60	5.58	5.58	116.15	Tercapai
<p>Capaian indikator Persentase cadangan pangan daerah jauh melebihi target dikarenakan Kebutuhan Cadangan Pangan Kota Pekalongan berdasarkan perhitungan sesuai Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah yaitu sebanyak 22,06 Ton. Jumlah Cadangan Pangan Beras yang teranggarkan Tahun 2024 sebanyak 10 Ton (memenuhi 45,33% dari kebutuhan yang seharusnya dianggarkan pemerintah daerah). Mengingat keterbatasan anggaran yang ada di daerah (rata-rata baru mencapai 41% dari perhitungan sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional) dan dalam rangka penguatan cadangan pangan di daerah, kemudian diterbitkan SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 526/0002817 tanggal 4 April 2024 tentang Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bahwa Pemda secara wajib memenuhi minimal persentase cadangan pangan dengan tahapan sebagai berikut : 1) Tahun 2024 sebesar 50% dari perhitungan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 dan 2). Tahun 2025 sebesar 50-75% dari perhitungan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023. Sehingga capaian cadangan pangan Kota Pekalongan (jika dibandingkan dengan kebutuhan cadangan pangan hasil perhitungan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023) = 10 Ton /22,06 Ton *100% = 45,33% dan capaian cadangan pangan Kota Pekalongan (jika berdasarkan kewajiban yang termuat dalam SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 526/0002817) adalah : 10 Ton / (50%*22,06) *100 = 90,66 % (belum tercapai). Adapun Target 4,6 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, karena penentuan target 4,6 tersebut masih berdasarkan perhitungan yang lama yaitu berdasarkan Peraturan menteri Pertanian RI Nomor : 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Hasil perhitungan pada saat penentuan target bahwa kebutuhan cadangan pangan beras Kota Pekalongan sebanyak 115.680 kg, sementara cadangan pangan yang mampu teranggarkan pada saat itu hanya sebanyak maksimal 5.000 Kg (baru memenuhi : 5.000kg / 115.680 kg *100% = 4,32 %.</p>										
2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan										
1	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan										
1	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	88	80	91.73	84.80	98.53	98.53	111.97	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
Capaian indikator Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan jauh melebihi target dikarenakan Jumlah pangan segar aman yang ditemukan / Jumlah pangan segar yang dijadikan bahan uji*100% = 67 sampel/ 68 sampel* 100%. Pada tahun 2024 pengujian pangan segar aman asal tumbuhan dilakukan pada 68 sampel dan ditemukan 1 sampel pangan segar asal tumbuhan yang tidak aman.										
2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.05. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan										
1	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.10.06. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee										
1	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	50	0	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee tidak memenuhi target dikarenakan tidak ada tanah yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan Objek Redistribusi Tanah (tidak ada kegiatan redistribusi tanah pada tahun 2024)										
2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	103.06	100.00	102.76	102.76	102.76	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
1	Persentase limbah yang diolah	persen	49.01	33.37	92.65	45.02	108.23	108.23	220.83	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
Capaian indikator Persentase limbah yang diolah jauh melebihi target dikarenakan Limbah dihasilkan dalam 1 tahun 1.263.456 m3 dan limbah yang diolah dalam 1 tahun 341.856 m3 Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tidak ada pembangunan IPAL baru ataupun revitalisasi IPAL sehingga jumlah limbah yang dapat diolah, masih tetap sesuai dengan kemampuan IPAL eksisting.										
2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)										
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2.95	2.89	2.94	2.93	2.37	2.37	80.40	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau tidak memenuhi target dikarenakan Luasan RTH di Akhir tahun 2024 adalah 110.062 Ha. Atau 2,37% dari luasan kota Pekalongan. Pada tahun 2024 terdapat penambahan RTH Publik baru seluas 0,12 Ha dari pengalihan lahan eks bengkok di Kelurahan Klego (Seruni Green Park).										
2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)										
1	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	100.00	31.12	57.78	13.33	13.33	71.11	71.11	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2021 s.d 2026 dengan target 45 perusahaan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah tercapai 71,11 persen (32 perusahaan).										
2.11.06. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)										
1	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	100.00	16.67	40.67	16.67	7.67	48.33	48.33	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH tidak memenuhi target dikarenakan Sejak keluar peraturan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH maka semua perizinan lingkungan khususnya usaha menengah ke bawah (wajib SPPL) pengurusannya melalui OSS RBA dan terbit otomatis										
2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	200.00	Tercapai
Capaian indikator Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup jauh melebihi target dikarenakan Komunitas selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan DLH dalam rangka memperingati Hari Besar Lingkungan Hidup atau untuk kegiatan penghijauan, pembersihan lingkungan, dan lain-lain, diantaranya : Komunitas Sapu Lidi, WCD (World Cleanup Day), Komunitas Peduli Kali Loji, KOBAR, Green Generation.										
2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
1	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	100.00	133.33	Tercapai
Capaian indikator Persentase perolehan penghargaan bidang LH jauh melebihi target dikarenakan Kegiatan di DLH ada 4 penghargaan yang diselenggarakan: CSAP, CSAN/CSAM, CSAK, dan Proper. Pada tahun 2024 ke-4 penghargaan tersebut berhasil diraih oleh Kota Pekalongan.										
2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup										
1	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan										
1	Persentase pengelolaan sampah	persen	0.31	2.19	0.31	0.29	0.30	0.30	98.23	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase pengelolaan sampah tidak memenuhi target dikarenakan Timbulan sampah tahun 2024 lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas pengelolaan yang dimiliki oleh Kota Pekalongan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas dengan penambahan fasilitas pengelolaan atau pemberlakuan sistem yang dapat mengurangi timbulan sampah.										
2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.46	100.00	109.53	109.53	109.53	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	77.78	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	88.75	80.00	86.69	85.30	88.97	88.97	100.25	Tercapai
2.12.03. Program Pencatatan Sipil										
1		persen	94.00	93.25	80.43	93.70	89.58	89.58	95.30	Tidak Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil									
Capaian indikator Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil tidak memenuhi target dikarenakan Belum adanya akumulasi data agregat kependudukan dari Dirjen Dukcapil terkait dokumen kependudukan (akta kematian, perkawinan dan perceraian) lama sehingga sejak tahun 2022 dilakukan perhitungan manual yang mana menyebabkan adanya akumulasi pada jumlah keseluruhan (penyebut)										
2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	14.00	5.00	9.00	10.00	10.00	10.00	71.43	Belum Tercapai
Capaian indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Proses pengajuan terkendala adanya Persyaratan sertifikasi ISO keamanan data yang belum bisa dipenuhi oleh OPD. Upaya untuk mendongkrak capaian program ini adalah dengan merubah klausul dalam PKS untuk pemanfaatan data (data agregat) tanpa akses ke dalam sistem data										
2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	101.77	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.13.03. Program Peningkatan Kerja Sama Desa										
1	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	Persen	100.00	16.67	50.00	66.67	72.22	72.22	72.22	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan TMMD dilaksanakan tiap tahun dengan target untuk memfasilitasi 3 Kelurahan tiap tahunnya hingga akhir tahun RPJMD, sampai dengan triwulan IV tahun 2024 ada 19 kelurahan dari target 18 kelurahan yang difasilitasi.										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa										
1	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	Persen	70.37	51.85	81.48	62.96	88.89	88.89	126.32	Tercapai
Capaian indikator Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang* jauh melebihi target dikarenakan (1) Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala; (2) Adanya pendampingan dari OPD kepada kelurahan ; (3) Kelurahan aktif menginput data pada aplikasi Epdeskel yang dijadikan acuan penilaian										
2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat										
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	96.92	95.97	97.64	96.54	97.68	97.68	100.78	Tercapai
2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.02. Program Pengendalian Penduduk										
1	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100.00	100.00	70.28	100.00	82.60	82.60	82.60	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga tidak memenuhi target dikarenakan pada kegiatan pendataan dilaksanakan dengan cara pengambilan data secara sampling dari jumlah seluruh rumah tangga sekota Pekalongan.										
2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)										
1	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7.20	8.20	14.44	7.60	11.28	11.28	63.85	Tidak Tercapai
Capaian indikator Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun tidak memenuhi target dikarenakan meningkatnya angka perkawinan dibawah 21 tahun sebagai dampak dari adanya kemiskinan dan kenaikan jumlah anak tidak sekolah.										
2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)										
1	Unmeet need KB	Persen	12.00	17.00	14.95	14.00	8.48	8.48	141.58	Tercapai
Capaian indikator Unmeet need KB jauh melebihi target dikarenakan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Pekalongan untuk ber-KB semakin baik.										
2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.12	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj)										
1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	100.00	87.00	164.69	95.00	103.28	103.28	103.28	Tercapai
2	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0.44	0.35	0.44	0.44	0.44	0.44	100.00	Tercapai
3	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	0.74	17.94	-9.90	0.75	-8.33	-8.33	- 1,125.05	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala tidak memenuhi target dikarenakan Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang untuk melakukan kewajiban uji berkala, untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan barang, Dinas Perhubungan melakukan upaya mengingatkan dengan via SMS Gateway kepada pemilik kendaraan bermotor dan melaksanakan operasi laik jalan. Pada tahun 2024 ini pelaksanaan uji berkala sudah tidak berbayar dengan adanya UJI KIR gratis diharapkan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji dapat meningkat dari tahun ke tahun.										
2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.52	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	103.17	103.17	103.17	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
2.16.02. Program Informasi Dan Komunikasi Publik										
1	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.16.03. Program Aplikasi Informatika										
1	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3.30	2.80	3.00	3.10	3.25	3.25	98.48	Tidak Tercapai
Capaian indikator Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak memenuhi target dikarenakan Walaupun target belum tercapai, peningkatan nilai indeks yang konsisten setiap tahun mencerminkan upaya perbaikan yang terus dilakukan dan berkelanjutan. Penerapan SPBE, khususnya TIK sesuai kebijakan, tata kelola dan manajemen masih terus diupayakan peningkatan level maturitasnya, sehingga nilai indeks aspek ini dapat mencapai nilai 3,30 sesuai target akhir RPJMD. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki beberapa indikator, antara lain Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dan Sistem Penghubung Layanan. Untuk meningkatkan indeks aspek TIK sesuai dengan target RPJMD (3,30), perlu dilakukan upaya peningkatan tingkat kematangan pada setiap indikator tersebut sehingga indeks aspek TIK dapat mencapai target yang telah ditetapkan.										
2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.03. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi										
1	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	33.23	24.59	29.70	31.49	30.77	30.77	92.60	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Terkendalanya koperasi untuk melakukan RAT karena adanya keterbatasan pengurus dalam menyajikan laporan keuangan.										
2.17.05. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian										
1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	59.68	38.36	97.20	58.77	88.32	88.32	147.99	Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota jauh melebihi target dikarenakan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan juknis DAK PK2UMK yang mengakomodir untuk Koperasi dan UMKM.										
2.17.08. Program Pengembangan Umkm										
1	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	12.37	11.85	11.38	12.16	25.56	25.56	206.65	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
Capaian indikator Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi UMKM dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan juga didukung oleh kolaborasi yang dilakukan dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional. Sehingga fasilitasi terhadap UMKM dapat dilaksanakan di Kota Pekalongan dan memiliki dampak meluas yang berimbas pada meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha.										
2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	103.58	100.00	100.87	100.87	100.87	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	105.72	105.72	105.72	Tercapai
2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal										
1	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6.00	1.00	3.00	1.00	6.00	6.00	100.00	Tercapai
2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal										
1	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal										
1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	2500.00	2500.00	4,878.00	2,500.00	5,038.00	5,038.00	201.52	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
Capaian indikator Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal jauh melebihi target dikarenakan 1. Melebihi target karena kesadaran dari masyarakat mengajukan izin meningkat 2. dengan penggunaan OSS RBA yang memudahkan pelaku usaha dalam pengajuan izin 3. Karena digunakan untuk persyaratan pinjaman modal										
2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal										
1	Nilai Invetasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	40.514.00	6.42.00	229.10	6.82	191.34	191.34	472.28	Tercapai
Capaian indikator Nilai Invetasi Baru pertahun jauh melebihi target dikarenakan Investor yang masuk melebihi target dengan upaya dari jajaran DPMPTSP senantiasa melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap keberlangsungan izin usaha di Kota Pekalongan agar para pelaku usaha ini selalu patuh dan taat mengurus izin maupun laporan penanaman modal usahanya.										
2.18.06. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal										
1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA										
2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	95.24	91.95	95.24	94.31	125.00	125.00	131.25	Tercapai
Capaian indikator Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina jauh melebihi target dikarenakan Banyaknya kegiatan anggota dewan (pokir) yang melibatkan pemuda dan organisasi kepemudaan										
2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan										
1	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	42.86	11.43	55.00	34.29	52.38	52.38	122.21	Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor jauh melebihi target dikarenakan ketersediaan sarpras olahraga telah memenuhi target dari 21 cabor ada 11 cabor yang difasilitasi sarprasnya.										
2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral										
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	100.00	66.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi										
1	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	Persen	3.74	0.93	2.80	2.80	2.80	2.80	74.97	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan tidak memenuhi target dikarenakan Pengujian sistem elektronik ditargetkan tiap tahun sekitar 3 atau 4 sistem hingga akhir RPJMD. Sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan sampai tahun 2024 mencapai 2,8% dan masih terus ditingkatkan menjadi 3,74% pada akhir RPJMD yaitu tahun 2025										
2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan										
1	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional										
1	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.22.04. Program Pembinaan Sejarah										
1	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.22.05. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya										
1	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	Persen	97.52	88.65	91.67	93.97	111.67	111.67	114.51	Tercapai
Capaian indikator Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Karenana data bersifat akumulasi dari tahun sebelumnya. dan pada tahin ini ditetapkan 4 cagar budaya dari target 3										
2.22.06. Program Pengelolaan Permuseuman										
1	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4.80	4.55	8.29	4.71	3.96	3.96	82.50	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase pengunjung museum batik tidak memenuhi target dikarenakan karena jumlah kunjungan wisatawan nusantara di objek wisata yang dikelola masyarakat sangat tinggi sedangkan jumlah pengunjung ke musium tidak naik secara signifikan sehingga prosentase pengunjung museum tidak memenuhi target.										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan										
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Indeks	16.58	15.77	27.96	16.25	30.96	30.96	186.75	Tercapai
Capaian indikator Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) jauh melebihi target dikarenakan jumlah kunjungan meningkat dikarenakan adanya kegiatan promosi perpustakaan dan literasi (Roadshow bunda literasi, Kunjungan dr sekolah2 sinergis kurikulum merdeka, Fungsi sbg destinasi wisata anak-anak, festival literasi dan lain-lain); Adanya pembinaan perpustakaan (pusling, perpusmas dan TBM); Petugas yang menguasai /kompeten dlm pelayanan; Memfasilitasi /MoU kegiatan dg sektor lain; Mobilisasi memperkenalkan perpustakaan baru										
2.23.03. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno										
2	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	Regulasi	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Tercapai
2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2.24.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.35	100.00	109.25	109.25	109.25	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.85	100.85	100.85	Tercapai
2.24.02. Program Pengelolaan Arsip										
1	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	Persen	66.67	33.33	96.67	53.33	100.00	100.00	149.99	Tercapai
Capaian indikator Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik jauh melebihi target dikarenakan seluruh OPD sudah bernilai baik pada pelaksanaan pengawasan kearsipan internal tahun 2024										
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti	Indeks	52.50	40.00	75.00	47.50	87.69	87.69	167.03	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
	yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)									
Capaian indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan arsip aktif dann inaktif sudah memiliki daftar arsip, dan arsip-arsip sudah dimasukkan/diupload di SIKN dan JIKN.										
2.24.03. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip										
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	66.67	100.00	66.67	66.67	66.67	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Dalam rumus perhitungan terdapat kategori g yaitu tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan atau dibubarkan dengan NSPK, sedangkan di Kota Pekalongan tidak ada Dinas/OPD/Kelurahan yang dibubarkan dan atau digabung.										
2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip										
1	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK tidak memenuhi target dikarenakan Belum Tercapai dikarenakan tidak adanya pengajuan permohonan penggunaan arsip yang bersifat tertutup										
3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.89	100.00	100.38	100.38	100.38	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	131.83	131.83	131.83	Tercapai
3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap										
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	6.07	1.00	-0.04	1.00	26.51	26.51	436.81	Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI jauh melebihi target dikarenakan jumlah produksi meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin dikarenakan jumlah kapal yang meningkat, dimana Intensitas kapal Arek Ragan (Rembang) yang bersandar, bongkar dan lelang di TPI Kota pekalongan.										
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	6.15	1.00	-0.15	1.00	-2.04	-2.04	-33.11	Tidak Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah pendapatan daerah menurun dibandingkan dengan tahun kemarin dikarenakan menyesuaikan penerapan retribusi layanan baru yang menyamaratakan jenis dan kualitas ikan . Sesuai dengan Perda atas dasar Peraturan Pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan retribusi dengan tahun sebelumnya yang mengenakan retribusi sebesar 3% dari nilai produksi										
3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya										
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	6.15	1.00	7.53	1.00	-0.32	-0.32	-5.23	Tidak Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tidak memenuhi target dikarenakan terjadi penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan karena pada triwulan 4 khususnya produksi udang vaname mengalami gagal panen dikarenakan adanya penyakit pada budidaya udang. Untuk komoditas lain seperti ikan bandeng, ikan lele dan ikan nila mengalami kenaikan, namun belum bisa mencapai target produksi tahun 2024.										
3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan										
1	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12.20	12.20	26.73	12.20	37.75	37.75	309.46	Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan jauh melebihi target dikarenakan Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran yang dibina : 155 orang; Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran adalah 345 orang. Adanya Pelaksanaan pembinaan oleh penyuluh secara rutin dalam setiap bulannya dan pembinaan ke lapangan langsung oleh petugas.										
2	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	12.00	2.00	6.00	2.00	3.00	3.00	25.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) tidak memenuhi target dikarenakan proses pencapaian target bertahap hingga akhir periode RPJMD. dimana target setiap tahun adalah 2 Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant). Pada Tahun 2024 2 Pelaku										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
usaha UMKM pemula di bidang perikanan yang mengikuti pembinaan Anisah Nur, dan Zahrotun serta terdapat tambahan pelaku usaha dengan nama Eta Retno Suwaryani. total 3 UMKM pemula di bidang perikanan yang mengikuti pembinaan										
3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	116.67	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata										
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	Persen	12.50	10.00	12.82	11.50	12.24	12.24	97.90	Tidak Tercapai
Capaian indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan kondisi perekonomian yang melemah turut andil dalam kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.										
3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	Persen	46.98	21.98	243.53	36.98	70.89	70.89	150.89	Tercapai
Capaian indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Acara acara keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat Kota Pekalongan menarik minat WNA untuk ikut menghadirinya. Demikian juga acara keagamaan diluar Kota Pekalongan yang menghadirkan WNA kemudian WNA tersebut mampir ke pekalongan untuk berziarah.										
3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	persen	59.52	0.00	71.33	41.67	73.83	73.83	124.05	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi jauh melebihi target dikarenakan Masifnya informasi yang disampaikan terkait acara ekraf yang berlangsung memdbuat animo masyarakat untuk ikut serta meningkat.										
3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	100.00	0.00	296.73	60.00	306.73	306.73	306.73	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar jauh melebihi target dikarenakan Masifnya informasi yang disampaikan terkait acara ekraf yang berlangsung memdbuat anaimo masyarakat untuk ikut serta meningkat										
3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3.27.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian										
1	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55.84	55.56	59.29	55.73	60.27	60.27	107.93	Tercapai
2	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	203.65	184.46	259.61	195.75	273.75	273.75	134.42	Tercapai
Capaian indikator Nilai produksi peternakan pertahun jauh melebihi target dikarenakan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, peternak, dan berbagai pihak terkait dalam menciptakan ekosistem peternakan yang lebih produktif, berkelanjutan, dan inovatif.										
3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	5.00	5.00	98.40	5.00	32.26	32.26	645.16	Tercapai
Capaian indikator Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular jauh melebihi target dikarenakan Angka kesakitan hewan ternak menurun.										
3.27.05. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.27.06. Program Perizinan Usaha Pertanian										
1	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	100.00	0.00	54.32	75.00	41.98	41.98	41.98	Tidak Tercapai
Capaian indikator persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin tidak memenuhi target dikarenakan Tahun 2024 tidak ada penambahan usaha yang terbit ijinnya. Upaya yang telah dilakukan Dinperpa antara lain dengan : 1.Melaksanakan pengawasan dan monev kepada pelaku usaha poultry shop, pasar tradisional dan pasar modern; 2.Melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha agar bisa melakukan izin usaha lewat oss (Online Single Submission), oss adalah sistem perijinan yang terintegrasi secara elektronik di Indonesia; 3.Memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha daging atau bahan pangan asal hewan untuk mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam hal ini yang mengeluarkan NKV adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah dan Dinperpa tetap mengawal sampai terbitnya NKV apabila ada yang memerlukan;										
3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian										
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	5.00	5.00	8.70	5.00	4.76	4.76	95.24	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun tidak memenuhi target dikarenakan Kelompok tani yang mengalami peningkatan masih di kelas yang sama.										
3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,	persen	100.00	100.00	101.66	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
	administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah									
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	93.19	93.19	93.19	Tidak Tercapai
3.30.02. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan										
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	77.70	73.93	81.07	76.17	86.86	86.86	111.79	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai perizinan dan legalitas dalam usaha, serta didukung dengan adanya kemudahan dalam mengakses perizinan										
3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan										
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	100.00	75.00	68.75	93.75	75.00	75.00	75.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya tidak memenuhi target dikarenakan Pembangunan pada Pasar Kecamatan dialihkan guna mendukung Pembangunan Pasar Banjarsari berupa DED Pagar Pasar Banjarsari.										
3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting										
1	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	100.00	80.00	100.00	92.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.30.05. Program Pengembangan Ekspor										
1	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	8.19	7.24	-0.04	7.79	7.50	7.50	91.54	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase peningkatan volume ekspor tidak memenuhi target dikarenakan Peningkatan capaian ekspor belum mencapai target karena adanya penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor. Namun, apabila dibandingkan dengan capaian Ekspor pada Tahun 2023, capaian ekspor tahun 2024										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
mengalami kenaikan sebesar 3,72%. Pemerintah Kota Pekalongan terus berusaha terus untuk melakukan upaya peningkatan ekspor produk unggulan salah satunya melalui keikutsertaan dalam pameran produk unggulan										
3.30.06. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen										
1	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	83.99	73.99	59.02	79.99	87.20	87.20	103.82	Tercapai
3.30.07. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri										
1	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	7.50	2.09	0.96	5.34	2.05	2.05	27.33	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) tidak memenuhi target dikarenakan Keterbatasan dalam penyediaan pemasaran berupa pameran sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh UMKM untuk mendapatkan fasilitasi pemasaran tersebut.										
3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.30	100.00	99.25	99.25	99.25	Tidak Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	118.77	118.77	118.77	Tercapai
3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri										
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	21.04	20.59	75.34	20.75	82.71	82.71	393.11	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
Capaian indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan (1) pertumbuhan jumlah industri yang cukup tinggi, dengan cepatnya laju perekonomian di sektor perdagangan melalui media offline maupun online turut membuat laju pertumbuhan industri di pekalongan semakin meningkat, (2). besarnya nilai investasi, pertumbuhan jumlah industri tentunya diikuti oleh pertumbuhan nilai investasi selain itu dengan adanya sistem OSS yang berperan dalam hal kemudahan perizinan berusaha berperan besar dalam pencatatan nilai investasi yang semakin rapi.										
3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota										
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	26.00	23.00	9.04	25.00	25.03	25.03	96.27	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Ijin usaha industri kecil dan menengah sejak diberlakukan OSS tidak diperlukan verifikasi dari OPD terkait, sehingga ijin usaha yg terbit jumlahnya besar, sedangkan sumber daya yang ada jumlahnya sedikit. Kondisi ini menyebabkan pemantauan dan pengawasan ijin dari instansi terkait tidak mengikuti. Sehingga target akhir RPJMD tidak tercapai										
3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional										
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.01. SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	166.67	166.67	166.67	Tercapai
2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	99.71	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum,dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100.00	100.00	103.65	100.00	99.86	99.86	99.86	Tidak Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
4	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	97.62	97.62	97.62	Tidak Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persen	100.00	100.00	75.00	100.00	70.84	70.84	70.84	Tidak Tercapai
6	Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.01.02. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat										
1	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100.00	100	90.00	100.00	122.22	122.22	122.22	Tercapai
Capaian indikator Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif jauh melebihi target dikarenakan Karena adanya penambahan pembuatan Perda Perubahan tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada BUMD dan APBD Tahun 2025.										
3	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.01.03. Program Perekonomian Dan Pembangunan										
1	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	6.00	7	3.62	6.00	5.70	5.70	100.00	Tercapai
3	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	100.00	100	97.50	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
4.02. SEKRETARIAT DPRD										
4.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.02	100.00	102.84	102.84	102.84	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD										
1	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100.00	100.00	75.00	100.00	64.71	64.71	64.71	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda yang ditetapkan tidak memenuhi target dikarenakan panjangnya proses pembahasan Raperda, sehingga masih ada 6 Raperda yang belum selesai pembahasannya dan akan dilanjutkan proses pembahasannya di tahun 2025, yaitu : (1). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen; (2). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik; (3). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Peningkatan Guru Ngaji Al Qur'an (Propemperda Tahun 2023); (4). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Pekalongan (Propemperda Tahun 2023); (5). Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; (6). Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Propemperda Tahun 2023)										
2	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.01. PERENCANAAN										
5.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.08	100.00	100.34	100.34	100.34	Tercapai
3	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.02. KEUANGAN										
5.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,	persen	100.00	100.00	100.46	100.00	100.68	100.68	100.68	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
	administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah									
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	102.39	102.39	102.39	Tercapai
5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah										
1	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	7.26	11.91	5.79	7.66	5.06	5.06	143.44	Tercapai
<p>Capaian indikator Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya (N-1), rasio antara sisa anggaran terhadap total belanja anggaran mencapai 5,06%. Nilai ini diperoleh dari perhitungan rasio antara realisasi SiLPA sebesar Rp53.925.975.806 dengan total belanja anggaran yang terealisasi sebesar Rp1.065.447.392.000.</p> <p>Perhitungan ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan anggaran belanja yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun tersebut. Rasio ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan anggaran, termasuk kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah secara optimal. Sisa lebih perhitungan anggaran dapat menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran, namun juga dapat menjadi indikator adanya potensi pengelolaan yang perlu ditingkatkan, seperti percepatan pelaksanaan program atau optimalisasi penganggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Dengan rasio sebesar 5,06%, penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi strategi pengelolaan anggaran guna mendukung pencapaian target pembangunan secara lebih optimal. Atas capaian tersebut Pemerintah Kota Pekalongan menjadi 5 kota terbaik se-Indonesia bersama Kota Probolinggo, Kota Jambi, Kota Blitar dan Kota Malang yang menerima anugerah APBD Award 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kategori Realisasi Belanja Tertinggi.</p>										
5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah										
1	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	5.00	5.00	4.80	5.00	0.30	0.30	100.00	Tercapai
5.03. KEPEGAWAIAN										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
5.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	102.13	102.13	102.13	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.03.02. Program Kepegawaian Daerah										
1	Persentase PNS berkembang karier	persen	50.00	50.00	66.67	50.00	106.67	106.67	213.33	Tercapai
Capaian indikator Persentase PNS berkembang karier jauh melebihi target dikarenakan SE Menpan RB Nomor 28 th 2021 dan Peraturan Wali Kota Pekalongan 27 tahun 2023 yang memberikan kemudahan pns dalam meningkatkan kompetensi mll jalur pendidikan antara lain: 1. ijin tugas belajar utk prodi dg Status akreditasi C atau Baik dapat diberikan selama ada rekomendasi dari Kementerian PAN RB 2. Pembelajaran jarak jauh, kelas khusus maupun kelas jauh dapat diberikan selama ada ijin dari dirjen dikti.										
2	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100.00	100.00	98.90	100.00	99.97	99.97	99.97	Tidak Tercapai
Capaian indikator Tingkat Pelaporan Kinerja ASN tidak memenuhi target dikarenakan Satu orang ASN tidak bersedia menyusun SKP karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas										
3	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90.00	90.00	97.41	90.00	95.61	95.61	107.95	Tercapai
4	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	80.00	80.00	64.35	80.00	48.14	48.14	60.18	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Keterpenuhan Formasi ASN tidak memenuhi target dikarenakan Formasi tidak terpenuhi 100% dikarenakan moratorium penerimaan CPNS berlangsung selama 5 tahun dari tahun 2015 sd 2019 Jumlah formasi yang ada juga termasuk formasi tampungan bagi ASN yang akan naik jabatan.										
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										
1	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100.00	100.00	149.29	100.00	107.99	107.99	107.99	Tercapai
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
5.05.02. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah										
1	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	76.00	70.93	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) tidak memenuhi target dikarenakan Indikator kinerja skor capaian nilai RIDA (SIDA) data tidak tersedia, dikarenakan tidak dilakukan pengukuran RIDA Kota Pekalongan oleh BRIN. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pengukuran Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) saat ini telah bertransformasi menjadi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fasilitas Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah Tahun 2023-2025 (R-SIDA) akan dilakukan dengan penyeselarasan pengukuran IDSD..										
3	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6.01. INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	107.60	107.60	107.60	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	112.00	112.00	112.00	Tercapai
6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan										
1	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85.00	85.00	52.94	85.00	87.04	87.04	102.40	Tercapai
6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi										
1	Level Kapabilitas APIP	Persen	3.00	3.00	3.09	3.00	3.00	3.00	100.00	Tercapai
7.01. KECAMATAN										
7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.24	100.00	101.99	101.99	101.99	Tercapai
3	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	96.67	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	97.84	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
9	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
10	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
11	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
12	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
1	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum										
1	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.33	100.00	102.95	102.95	102.95	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan										
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100.00	100.00	100.74	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik										
1	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	Tercapai
8.01.04. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
1	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100.00	100.00	90.48	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.05. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi s.d. TW IV 2024			
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial										
1	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2025

2.5.3 Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada tahapan pengumpulan data, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan; dan
2. Mengidentifikasi jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana, dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Ketersediaan tersebut dapat diperoleh dari pihak BUMN, BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya.
4. Perangkat Daerah menghitung jumlah warga negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu, dikarenakan:
 - miskin atau tidak mampu;
 - sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - kondisi bencana; dan/atau
 - kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima Pelayanan dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD,
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Bapperida memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan dasar diimut dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

4. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
 5. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
- Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:
1. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
 2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
 3. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
 - memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya

Pada tahun 2023 Kota Pekalongan telah menerapkan seluruh tahapan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengalokasikan anggaran atas penerapan Standar Pelayanan Minimal sejak proses perencanaan, yang dimulai dari RPJMD sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2023.

2.5.4.1 Urusan Pendidikan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan kedua aturan tersebut, capaian atas Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan rapat Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa rapat Pendidikan tahun 2024 sampai dengan saat ini belum terbit, sehingga data yang digunakan adalah rapat Pendidikan tahun 2023. Sedangkan untuk pelaporan terkait anggaran menggunakan dasar pelaksanaan anggaran tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

. Pada tahun 2024 Capaian SPM Pendidikan secara keseluruhan adalah 99,12% atau termasuk kategori **TUNTAS UTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar usia dini dengan capaian sebesar 98,69%;
2. Pendidikan dasar dengan capaian sebesar 99,87%;
3. Pendidikan kesetaraan dengan capaian sebesar 98,81%;

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 dalam mencapai SPM bidang pendidikan, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel:

Tabel II-243
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024
(Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023)

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	10.220	1 Tahun	1. Angka Partisipasi Sekolah	100.00	1 Tahun	1.912.123.000
					2. Angka Partisipasi Murni	100.00		
					3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	83.75		
					4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	84.70		
					5. Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD	1.00		
					6. Kecukupan Formasi Guru ASN	38.14		
					7. Indeks Distribusi Guru	0.33		
					8. Proporsi PTK Bersertifikat	54.46		
					9. Proporsi PTK Penggerak*	1.09		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	47.193	1 Tahun				9.778.385.000
Sekolah Dasar (SD)								
					1. Angka Partisipasi Kasar	100.00	1 Tahun	
					2. Angka Partisipasi Sekolah	100.00		
					3. Kemampuan Literasi	59.29		
					4. Kemampuan Numerasi	42.68		
					5. Perbedaan Skor Literasi	4.78		
					6. Perbedaan Skor Numerasi	1.45		
					7. Indeks Iklim Keamanan	71.89		
					8. Indeks Iklim Kebhinekaan	72.31		
					9. Indeks Iklim Inklusivitas	57.93		
					10. Kecukupan Formasi Guru ASN	38.15		
					11. Indeks Distribusi Guru	0.45		
					12. Proporsi PTK Bersertifikat	45.51		
					13. Proporsi PTK Pengerak	0.00		
Sekolah Menengah Pertama (SMP)								

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1. Angka Partisipasi Kasar	100.00	1 tahun	
					2. Angka Partisipasi Sekolah	100.00		
					3. Kemampuan Literasi	72.88		
					4. Kemampuan Numerasi	72.19		
					5. Perbedaan Skor Literasi	6.33		
					6. Perbedaan Skor Numerasi	4.26		
					7. Indeks Iklim Keamanan	72.47		
					8. Indeks Iklim Kebhinekaan	71.09		
					9. Indeks Iklim Inklusivitas	58.90		
					10. Kecukupan Formasi Guru ASN	9.47		
					11. Indeks Distribusi Guru	0.35		
					12. Proporsi PTK Bersertifikat	48.56		
					13. Proporsi PTK Pengerak	0.00		
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi	1.364	1 Tahun	1. Angka Partisipasi Kasar	0	1 Tahun	1.301.922.000
					2. Angka Partisipasi Sekolah	100		
					3. Kemampuan Literasi	65,3		
					4. Kemampuan Numerasi	59,12		
					5. Perbedaan Skor Literasi	3,03		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dalam Pendidikan Kesenjangan			6. Perbedaan Skor Numerasi	6,01		
					7. Indeks Iklim Keamanan	71,37		
					8. Indeks Iklim Kebhinekaan	63,38		
					9. Indeks Iklim Inklusivitas	55,92		
					10. Kecukupan Formasi Guru ASN	0		
					11. Indeks Distribusi Guru	0		
					12. Proporsi PTK Bersertifikat	0		
					13. Proporsi PTK Pengerak	0		

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target pelayanan SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Target Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD adalah sebanyak 10.220 orang, dengan anggaran sebesar Rp1.912.123.000,00;
- Target Pelayanan Pendidikan Dasar yaitu jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SPM/MTs) adalah sebanyak 47.193 orang, dengan anggaran sebesar Rp9.778.385.000,00;
- Target Pelayanan Pendidikan Kesenjangan yaitu jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesenjangan adalah sebanyak 1.364 orang, dengan anggaran sebesar Rp1.301.922.000,00.

Hasil Capaian

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 baik dari anggaran maupun penerima layanan SPM Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-244
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	10.220	10.373	100%	1.912.123.000	1.905.401.814	99.65%
2.	Pendidikan Dasar	47.193	48.045	100%	9.778.385.000	9.558.255.312	97.75%
3.	Pendidikan Kesetaraan	1.364	1.577	100%	1.301.922.000	1.298.334.674	99.72%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- Realisasi penerima layanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini yaitu jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD adalah sebanyak dengan target sebanyak 10.220 siswa dan realisasi sebanyak 10.373 siswa atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Realisasi penerima layanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini melebihi target yang ditetapkan. Kegiatan tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.912.123.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.905.401.814,00 atau 99,65%.
- Realisasi penerima layanan dasar Pendidikan Dasar yaitu jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SPM/MTs) dengan target sebanyak 47.193 siswa dan realisasi sebanyak 48.045 siswa atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Realisasi penerima layanan dasar Pendidikan Dasar melebihi target yang ditetapkan. Adapun dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.778.385.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp9.558.255.312,00 atau 97,75%.
- Realisasi penerima layanan dasar Pendidikan Kesetaraan yaitu jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan dengan target sebanyak 1.364 siswa dan realisasi sebanyak 1.577 siswa atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Realisasi penerima layanan dasar Pendidikan Kesetaraan melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp1.301.922.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.298.334.674,00 atau 99,72%.

Sedangkan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-245
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5 x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	10.220	10.373	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini				18.69%
	1. Angka Partisipasi Sekolah	100,00	93,56	93.56%	
	2. Angka Partisipasi Murni	100,00	47,29	47.29%	
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	83,75	83,90	100.00%	
	4. Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	84,70	87,78	100.00%	
	5. Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD	1,00	1,00	100%	
	6. Kecukupan Formasi ASN	38,14	38,14	100%	
	7. Indeks Distribusi Guru	0,33	0,33	100%	
	8. Proporsi PTK Bersertifikat	54,46	54,46	100%	
	9. Proporsi PTK Penggerak*	1,09	1,09	100%	
2.	Pendidikan Dasar	47.193	48.045	100.00	80.00
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar				19.87%
	Sekolah Dasar (SD)				
	1. Angka Partisipasi Kasar	100,00	101,13	100.00%	
	2. Angka Partisipasi Sekolah	100,00	99,98	99.98%	
	3. Kemampuan Literasi	59,29	64,12	100.00%	
	4. Kemampuan Numerasi	42,68	48,17	100.00%	
	5. Perbedaan Skor Literasi	4,78	4,78	100.00%	
	6. Perbedaan Skor Numerasi	1,45	1,45	100.00%	
	7. Indeks Iklim Keamanan	71,89	71,89	100.00%	
	8. Indeks Iklim Kebhinekaan	72,31	74,57	100.00%	
	9. Indeks Iklim Inklusivitas	57,93	55,39	95.62%	
	10. Kecukupan Formasi Guru ASN	38,15	38,15	100.00%	
	11. Indeks Distribusi Guru	0,45	0,45	100.00%	
	12. Proporsi PTK Bersertifikat	45,51	45,51	100.00%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4 : 3 x 100%	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5 x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	13. Proporsi PTK Pengerak*	0.00	0.00	100.00%	
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	1. Angka partisipasi kasar	100	107,13	100%	
	2. Angka partisipasi sekolah	100	96,72	96,72%	
	3. Kemampuan literasi	72,88	76,56	100%	
	4. Kemampuan numerasi	72,19	65,43	90,64%	
	5. Perbedaan skor literasi	6,33	6,33	100%	
	6. Perbedaan skor numerasi	4,26	4,26	100%	
	7. Indeks iklim keamanan	72,47	73,2	100%	
	8. Indeks iklim kebhinekaan	71,09	75,98	100%	
	9. Indeks iklim inklusivitas	58,9	60,53	100%	
	10. Kecukupan formasi guru ASN	9,47	9,47	100%	
	11. Indeks distribusi guru	0,35	0,35	100%	
	12. Proporsi PTK bersertifikat	48,56	48,56	100%	
	13. Proporsi PTK penggerak	0	0	100%	
3	Pendidikan Kesetaraan	1.364	1.577	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				18,81%
	1. Angka partisipasi kasar	0	0	100%	
	2. Angka partisipasi sekolah	100	22,76	22,76%	
	3. Kemampuan literasi	65,3	65,3	100%	
	4. Kemampuan numerasi	59,12	59,12	100%	
	5. Perbedaan skor literasi	3,03	3,03	100%	
	6. Perbedaan skor numerasi	6,01	6,01	100%	
	7. Indeks iklim keamanan	71,37	71,37	100%	
	8. Indeks iklim kebhinekaan	63,38	63,38	100%	
	9. Indeks iklim inklusif	55,92	55,92	100%	
	10. Kecukupan formasi guru ASN	0	0	100%	
	11. Indeks distribusi guru	0	0	100%	
	12. Proporsi PTK bersertifikat	0	0	100%	
	13. Proporsi PTK peggerak	0	0	100%	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Persentase Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini yaitu sebesar 18,69%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu sebesar 98,69%.
- b. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar yaitu sebesar 19,87%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan Pendidikan Dasar yaitu sebesar 99,87%.
- c. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan yaitu sebesar 18,81%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan yaitu sebesar 98,81%.

berikut Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 disajikan dalam Tabel II-246 berikut.

Tabel II-246
Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Pengumpulan data dari Sekolah yang lambat disebabkan adanya permasalahan administrasi perpindahan data maupun kendala sistem sebagai akibat banyaknya operator sekolah yang mengakses aplikasi dapodik maupun emis dalam waktu yang bersamaan, sehingga waktu proses menjadi lebih lambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses update data pada aplikasi Dapodik maupun EMIS oleh Operator sekolah dilaksanakan di awal waktu sehingga terhindar dari permasalahan sistem akibat over kapasitas pengakses aplikasi menjelang <i>cut off</i> 2. Mengintensifkan penguatan kelembagaan disatuan pendidikan terutama disiplin dalam menjalankan administrasi sekolah.
	Kesulitan dalam memperoleh data siswa pendidikan menengah, yang kewenangannya berada di Provinsi	Meningkatkan koordinasi dengan Operator Sistem Dinas Pendidikan Provinsi dan admin Dapodik di tingkat pusat agar kebutuhan data terpenuhi.
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Tim yang bertugas melakukan perhitungan kebutuhan perlu waktu untuk verifikasi dan validasi siswa miskin calon penerima bantuan perlengkapan belajar maupun biaya personil	Meningkatkan koordinasi dengan tim verifikator dari sekolah terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi siswa miskin sehingga dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu.
	Tidak tersedianya data BNBA pada data penduduk, sehingga kesulitan dalam menentukan kebutuhan jumlah penerima layanan SPM berdasarkan asal siswa.	Melakukan koordinasi dengan Dindikcapil agar mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	

No.	Permasalahan	Solusi
	Keterbatasan anggaran yang tersedia menghambat pemenuhan kebutuhan dalam rangka pencapaian SPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan agar hasilnya lebih optimal dan tepat sasaran. 2. Melakukan advokasi penganggaran pemenuhan SPM di Badan Anggaran agar penetapannya sesuai dengan yang telah direncanakan.
4.	Pelaksanaan	
	Tidak ada	-
5,	Lain-lain	
	Rapor pendidikan yang dirilis terlambat sehingga menyulitkan dalam Menyusun pelaporan tahun N karena data yang disandingkan tidak padan	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.
	Rapor pendidikan hanya menyajikan hasil akhir tanpa menyertakan nilai variable perhitungannya, sehingga menyulitkan pada saat pengisian form tahapan penerapan SPM	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

2.5.4.2 Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Pada tahun 2024 Capaian SPM Kesehatan secara keseluruhan adalah 97,97% atau kategori **TUNTAS UTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 100,00%;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian 99,92%;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 99,59%;

4. Pelayanan kesehatan balita dengan capaian 100,00%;
5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar dengan capaian 100,00%;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 92,18%;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian 98,89%;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian 85,04%;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dengan capaian 100,00%;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguam jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 100%;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan capaian 100%;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) dengan capaian 100%

Tabel II-247
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	43051	Tahun	1. vaksin Tetanus Difteri (Td)	43051	Tahun	125.000.000	
					2. Tablet tambah darah (180 tabletxjumlah ibu hamil)	774.900			
					3. Alat deteksi resiko ibu hamil : test kehamilan	4305			
					4. Alat deteksi resiko ibu hamil : Pemeriksaan HB	4305			
					5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	4305			
					6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaaan 15% dari jumlah ibu hamil)	4305			
					7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	4305			
					8. Kartu ibu/ rekam medis ibu	4305			
					9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4305			
					10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	287		
					2. Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	271		
					3. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	935		
					4. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	400		
					5. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396		
					6. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
					7. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	4305		
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	3874	1 Tahun	1. Formulir Partograf	3874	1 Tahun	32.813.000
					2. Kartu ibu/ rekam medis ibu	3874		
					3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	3874		
					4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					5. Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	271		
					6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	400		
					7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	935		
					8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396		
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	3855	1 tahun	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	3855	1 tahun	196.795.000
					2. Vitamin K1 injeksi	3855		
					3. Salep/tetes mata antibiotik	3855		
					4. Formulir bayi baru lahir	3855		
					5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	3855		
					6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3855		
					7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70		
					8. Tenaga medis : Dokter/ Dokter Spesialis Anak	270		
					9. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					10. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396		
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi	54		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kesehatan dan Ilmu Perilaku			
					13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
					14. Kader Kesehatan	2200		
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	16.048	1 tahun	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	16.048	1 tahun	156.413.000
					2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	16.048		
					3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	16.048		
					4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	16.048		
					5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	16.048		
					6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	16.048		
					7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	16.048		
					8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	16.048		
					9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	16.048		
					10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	16.048		
					11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib	16.048		
					12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	16.048		
					13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	16.048		
					14. Peralatan Anafilaktik	14		
					15. Formula Terapi Gizi Buruk	31		
					16. Tenaga medis : Dokter	253		
					17. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					18. Tenaga kesehatan : Perawat	935		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
					20. Guru PAUD	1.083		
					21. Kader kesehatan	2.220		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	45.000	1 tahun	1. Form pencatatan/ buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	45.000	1 tahun	99.142.000
					2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	45.000		
					3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	45.000		
					4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	45.000		
					5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	45.000		
					6. Tablet Tambah Darah pada remaja putrikelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri	16.801		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 table dan mempertimban gkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)			
					7. Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	14		
					8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	2.500		
					9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	70		
					10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	45.000		
					11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	299		
					12. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					13. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
					15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396		
					16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	24		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	2.671		
					18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dok ter kecil/peer conselor	2.220		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	210.465	1 tahun	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	1 tahun	163.173.000
					2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	28		
					3. Alat : Tensimeter	28		
					4. Alat : Glukometer	28		
					5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	14		
					6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alcohol	210.465		
					7. Alat : KIT IVA Tes	14		
					8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	14		
					9. Kit Opthalmologi Komunitas	28		
					10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	28		
					11. Alat Pelayanan KB	42		
					12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	14		
					13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	66.000		
					14. Tenaga medis : Dokter	253		
					15. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					16. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	54		
					19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	84		
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	35.444	1 tahun	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	28	1 tahun	27.053.000
					2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	28		
					3. Alat pemeriksaan kolesterol	28		
					4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	35.444		
					5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	14		
					6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	14		
					7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70		
					8. Tenaga medis : Dokter	253		
					9. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					10. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	24		
					13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	2.220		
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	76.872	1 tahun	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	70	1 tahun	6.576.000
					2. Obat Hipertensi	76.872		
					3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	28		
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	14		
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	28		
					6. Tenaga medis : Dokter	253		
					7. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					8. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
					10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	54		
					11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	396		
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	54		
9.			14.148	1 tahun	1. Obat Diabetes Melitus	14.148	1 tahun	6.291.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan			2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	28		
					3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	14.148		
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	14		
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	70		
					6. Tenaga medis : Dokter	253		
					7. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					8. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396		
					10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	54		
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	133		
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang terlayani kesehatan	1.013	1 tahun	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik) 2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/m edikasi) 3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver) 4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan) 5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 6. Tenaga kesehatan : Dokter 7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih) 8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	14 14 14 28 253 14 4	1 tahun	11.520.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					9. Tenaga profesional lainnya	2		
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosi s	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosi s	9976	1 tahun	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	1 tahun	62.734.000
					2. Reagen Zn TB	44		
					3. Masker bedah dan Masker N95	9.976		
					4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	13.672		
					5. Katrid tes cepat molekuler	6.836		
					6. Formulir pencatatan dan pelaporan	14		
					7. Pedoman/ Standar Operasional Prosedur (SOP)	22		
					8. Tuberkulin	271		
					9. Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	277		
					10. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396		
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	54		
					13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	133		
					14. Tenaga kesehatan : Radiografer	41		
					15. Kader Kesehatan	2.220		
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi	17.542	1 tahun	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	1 tahun	73.286.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus)	virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan			2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	17.542		
					3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	17.542		
					4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	17.542		
					5. Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	280		
					6. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					7. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	133		
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	54		
					10. Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	1		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target pelayanan SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Target Pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 4.305 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00.

- b. Target Pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 3.874 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.813.000,00.
- c. Target Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yaitu jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 3.855 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp196.795.000,00.
- d. Target Pelayanan kesehatan balita yaitu jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 16.048 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp156.413.000,00.
- e. Target Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yaitu jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 45.000 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.142.000,00.
- f. Target Pelayanan kesehatan pada usia produktif yaitu jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 210.465 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp163.173.000,00.
- g. Target Pelayanan kesehatan pada usia lanjut yaitu jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 35.444 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.053.000,00.
- h. Target Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 76.872 orang, atau seluruh warga Kota Pekalongan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.576.000,00.
- i. Target Pelayanan kesehatan penderita *diabetes militus* yaitu jumlah warga negara penderita *diabetes militus* yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 14.148 orang, atau seluruh warga Kota Pekalongan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.291.000,00.
- j. Target Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yaitu jumlah warga negara Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang terlayani kesehatan adalah sebanyak 1.013 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.520.000,00.
- k. Target Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis yaitu jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 9.976 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp62.734.000,00.
- l. Target Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency virus*) yaitu Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency virus*) yang mendapatkan Layanan Kesehatan adalah sebanyak 17.542 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.286.000,00.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 disajikan dalam Tabel II-248 berikut.

Tabel II-248
Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Tidak ada	-

No.	Permasalahan	Solusi
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Tidak ada	-
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Tidak ada	-
4.	Pelaksanaan	
	1. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut: a. Belum semua lansia mengakses pelayanan kesehatan, akses ke faskes maupun posyandu terkendala tidak ada yang mengantar karena satu rumah keluarga bekerja atau dengan alasan lainnya. b. Kurangnya dukungan keluarga dalam pendampingan lansia. Kurangnya dukungan anggaran kegiatan kunjungan rumah pada sasaran lansia. c. Perlu peningkatan kapasitas petugas dan penggalangan komitmen pelayanan lansia sesuai dengan standart terkait Skrining kesehatan. Usia Produktif Belum semua usia produktif melakukan pemeriksaan skrining PTM minimal 1 tahun sekali. 2. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Belum semua penderita hipertensi melakukan pemeriksaaan 12 kali dalam setahun	Akan meningkatkan kegiatan sosialisasi / kampanye terkait upaya promosi kesehatan terhadap masyarakat
5.	Lain-lain	
	Tidak ada	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

2.5.4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Permukiman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar Pekerjaan Umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Pada tahun 2024 Capaian SPM Pekerjaan Umum secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian 100%;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 100%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-249 berikut.

Tabel II-249
Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Pengumpulan data memerlukan support dan dukungan dengan pihak eksternal OPD, yang terkadang sulit dikendalikan kesiapan dan keberadaan datanya	Koordinasi dengan pihak eksternal OPD terkait pengumpulan data yang dibutuhkan
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Untuk penyediaan air bersih penghitungan kebutuhan membutuhkan koordinasi dengan pihak eksternal OPD (PDAM)	Koordinasi dengan pihak eksternal OPD (PDAM) terkait penghitungan kebutuhan
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Membutuhkan kerjasama secara aktif dengan CSR agar dapat meningkatkan mutu SPM	Inventarisasi dan koordinasi dengan badan usaha yang memiliki potensi meningkatkan mutu SPM melalui CSR
4.	Pelaksanaan	
	Kurang tersedianya lahan yang strategis untuk pembangunan SPALDT, SPALDS dan IPLT	Pertimbangkan Pembangunan infrastruktur secara regional
5.	Lain-lain	
	Pada mutu layanan penyediaan pengolahan limbah domestik hanya ada untuk kawasan pedesaan yang tidak bisa dilakukan tutup mutu, karena OPD kami berada di kawasan perkotaan, sehingga menurunkan capaian SPM kami	Dilakukan pengisian akses layak limbah domestik wilayah perkotaan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

2.5.4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Permukiman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2024 Capaian SPM urusan Perumahan dan Permukiman secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 100%;

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%.

Kendala yang dihadapi daerah dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 disajikan dalam Tabel II-250 berikut.

Tabel II-250
Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Kesulitan dalam melengkapi BNBA secara detail sesuai dengan isian form, baik itu RT/RW, NIK, jumlah anggota keluarga, luas bangunan, luas tanah. Serta pemetaan lokasi rawan bencana di Kota Pekalongan.	Melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan pemangku wilayah (RT/RW) setempat agar mendapat data yang valid Pemetaan daerah rawan bencana harus berkoordinasi dengan BPBD.
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Kesulitan dalam menghitung kebutuhan Pembangunan rumah bagi korban bencana dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana karena kegiatan kebencanaan dan lokasi yang terjadi bencana alam sifatnya insidental.	Penganggaran berdasarkan kebutuhan penghitungan rata-rata standar pembangunan rumah untuk korban bencana
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Tidak ada	-
4.	PELAKSANAAN	
	Tidak ada	-
5.	LAIN-LAIN	
	Tidak ada	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

2.5.4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pada tahun 2024 Capaian SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan adalah 99,98% atau termasuk kategori **TUNTAS UTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dengan capaian 100,00%;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian 100,00%;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian 100,00%;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 99,94%;

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 disajikan dalam Tabel II-251 berikut.

Tabel II-251
Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Belum adanya data penduduk yang memuat nama dan alamat sehingga kesulitan untuk melakukan pengumpulan data secara detail	Adanya koordinasi di tingkat Pusat, sehingga aturan terkait data penduduk yang memuat nama dan alamat dapat diperoleh dengan mudah oleh daerah.
	Belum terintegrasinya data pilah kependudukan dengan data geospasial sehingga tidak bisa melakukan pengumpulan data secara akurat	Dilakukan integrasi data pilah kependudukan dengan data geospasial.
	Pengumpulan data kurang detail seperti data NIK, No.KK, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir warga negara yang berada dalam radius 0-50 Meter dilokasi Penegakan Perda dan Perkada, saat dilokasi penegakan perda dan perkada, petugas kesulitan mendapatkan data tersebut karena merupakan data pribadi yang bisa saja disalahgunakan ketika data itu diinput.	Perlu adanya pembinaan lebih lanjut kepada masyarakat dalam data yang dikumpulkan saat penegakan Perda serta kurangnya kepercayaan masyarakat dalam keamanan privasi data yang diberikan, sehingga perlu adanya penjaminan keamanan data yang diberikan oleh Kemendagri.
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Pengumpulan data yang kurang detail berdampak pada penghitungan kebutuhan yang mungkin berbeda dengan kebutuhan faktual	Pengumpulan data dilakukan lebih detail.
	Perubahan cuaca yang sulit diprediksi secara akurat mengakibatkan prediksi kejadian bencana berbeda dengan kejadian sesungguhnya. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan pelayanan akan berbeda dengan kebutuhan lapangan.	Lebih cermat dalam memprediksi perubahan cuaca yang terjadi.
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Ketersediaan data yang minim membuat perencanaan dan penganggaran tidak bisa dilakukan dengan akurat sesuai dengan kebutuhan real	Penyediaan data yang lebih baik.

No.	Permasalahan	Solusi
4.	<p>PELAKSANAAN</p> <p>Prediksi cuaca yang tidak akurat menyebabkan peningkatan kejadian bencana pada waktu yang tidak biasanya. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan penanganan secara optimal.</p> <p>Sepanjang Tahun 2024 dari total 56 kejadian kebakaran, 55 diantaranya dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal waktu tanggap 15 menit, waktu tanggap tersebut dihitung sejak diterimanya laporan hingga Pemadam Kebakaran tiba di lokasi kejadian dan siap melakukan pemadaman api. Terdapat 1 kejadian yang dicapai dalam waktu 17 menit sehingga tidak dapat memenuhi SPM yang dipersyaratkan, hal tersebut dikarenakan pada saat kejadian tersebut terjadi kebakaran yang cukup besar di waktu yang hampir bersamaan dan armada truk Damkar sedang mengisi ulang tangki air serta kemudian terdapat Kereta Api yang melintas sehingga menghambat perjalanan menuju ke lokasi kejadian kebakaran yang akan ditangani.</p> <p>Dengan melihat data dan fakta diatas dapat dikatakan permasalahan utama pemenuhan SPM sub Urusan Kebakaran di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lokasi Mako/Pos Damkar yang hanya 1 terletak di sisi utara rel Kereta Api (Jl. Tentara Pelajar No.1) sehingga sewaktu- waktu apabila terjadi kebakaran di sisi selatan rel Kereta Api dapat terhambat penanganannya, ditambah lokasi sumber air yang hanya terdapat di Kantor PDAM juga terletak di sisi utara rel Kereta Api sehingga apabila hendak mengisi ulang tangki air armada Truk Damkar juga cukup jauh jaraknya ditambah kendala yang sama apabila terdapat kereta api yang melintas akan menghambat untuk kembali menuju lokasi kejadian kebakaran. Dengan demikian perlu adanya tambahan minimal 1 Mako/Pos Damkar untuk menjangkau/menangani kejadian kebakaran yang terjadi di sisi selatan rel Kereta Api.</p>	<p>Lebih cermat dan akurat dalam memprediksi cuaca yang terjadi.</p> <p>Perlu adanya penambahan pos Damkar di sisi selatan rel Kereta Api agar tidak terkendala oleh Kereta Api yang melintas pada saat terjadi kebakaran karena kondisi saat ini Mako Damkar Kota Pekalongan berada di Jl. Tentara Pelajar No.1 yang berada di sisi utara rel Kereta Api, disamping itu berdasarkan data yang kami miliki intensitas kejadian kebakaran yang terjadi mayoritas berada di sisi selatan rel Kereta Api mengingat di wilayah Kota Pekalongan bagian selatan banyak ditemui industri rumahan seperti produksi batik, tempe, tahu, mebel, dll yang memiliki potensi bahaya kebakaran cukup tinggi ditambah dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan akses jalan yang sempit.</p> <p>Perlu adanya penambahan pos Damkar di sisi selatan rel Kereta Api agar tidak terkendala oleh Kereta Api yang melintas pada saat terjadi kebakaran karena kondisi saat ini Mako Damkar Kota Pekalongan berada di Jl. Tentara Pelajar No.1 yang berada di sisi utara rel Kereta Api, disamping itu berdasarkan data yang kami miliki intensitas kejadian kebakaran yang terjadi mayoritas berada di sisi selatan rel Kereta Api mengingat di wilayah Kota Pekalongan bagian selatan banyak ditemui industri rumahan seperti produksi batik, tempe, tahu, mebel, dll yang memiliki potensi bahaya kebakaran cukup tinggi ditambah dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan akses jalan yang sempit.</p>
5.	LAIN-LAIN	

No.	Permasalahan	Solusi
	Permasalahan lain terkait penerapan SPM sub Urusan Kebakaran di Kota Pekalongan adalah jumlah kerugian material yang masih cukup tinggi meskipun bila melihat waktu tanggap sebagian besar telah dapat dicapai maksimal dalam 15 menit, hal tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya sarpras yang tersedia baik selang, nozzle, APD petugas, dan peralatan lain yang diperlukan untuk menangani kejadian kebakaran dengan maksimal sehingga dapat menekan jumlah kerugian aset maupun kemungkinan adanya korban jiwa	Perlu peningkatan kualitas/peremajaan sarana prasarana pemadaman kebakaran yang ada agar dapat lebih maksimal dalam melakukan kegiatan pemadaman, hal tersebut dikarenakan peralatan yang ada telah cukup berumur sehingga kurang maksimal untuk digunakan dalam memadamkan api seperti selang yang bocor, nozzle yang macet, armada yang telah cukup berumur. Hal tersebut menyebabkan kerugian material masih tinggi atau tidak maksimal untuk menyelamatkan aset yang ada pada saat terjadi kebakaran. Dapat dikatakan meskipun dapat cepat sampai di lokasi pada saat terjadi kebakaran namun untuk proses pemadaman belum maksimal karena permasalahan tersebut.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

2.5.4.6 Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana daerah kota.

Pada tahun 2024 Capaian SPM urusan Sosial secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA**.

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan capaian 100%;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan capaian 100%;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan capaian 100%;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan capaian 100%;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana daerah kota dengan capaian 100%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024 disajikan dalam Tabel II-252 berikut.

Tabel II-252
Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Biodata dari kelayan yang tidak mempunyai identitas lengkap seperti KTP	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya dapat dibantu perekaman identitas penerima manfaat
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Kesulitan dalam memprediksi kebutuhan dalam korban bencana	Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab Lokasi pengungsi agar dilakukan asesmen kebutuhan kepada pengungsi
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Perencanaan kebutuhan dasar yang masih belum tercapai	Merencanakan dengan baik kebutuhan anggaran yang diperlukan kemudian mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4.	PELAKSANAAN	
	Ada beberapa kecil penerima manfaat berasal dari luar daerah kota pekalongan	Melakukan asesmen kepada penerima manfaat terkait asal usul, kemudian menghubungkan dengan Dinas Sosial sesuai asal daerah
		Merujuk penerima manfaat ke panti milik pemerintah
5.	LAIN-LAIN	
	Kapasitas tempat yang belum memadai	Merencanakan kebutuhan untuk tempat hunian sementara penerima manfaat kemudian mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar dapat melakukan rehab tempat

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024, 2025

2.5.4 Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2024

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

2.2.4.1 Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 39 target dan 85 indikator tercapai, 16 indikator tidak tercapai dan 30 indikator dengan data tidak tersedia. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-253 berikut.

Tabel II-253
Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN									
1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional									
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	persen	6,29	6,71	Tidak tercapai
1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
2	1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	DINKES	persen	98,00	98,32	Tercapai
3	1.3.1. (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	DINPERINAKER	persen	PM	95,46	Tercapai
4	1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas miskin	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	DINSOS P2KB	persen	PM	33,62	Tercapai
5	1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	DINSOS P2KB	KPM	PM	14378	Tercapai
1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									
6	1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100,00	100,00	Tercapai
7	1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	DINKES	persen	100,00	82,36	Tidak tercapai
8	1.4.1. (c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINSOS P2KB	persen	67,55	64,41	Tidak tercapai
9	1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang	Persentase rumah tangga yang	Persentase rumah tangga yang	DPU-PR	persen	100,00	100,00	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan					
10	1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	DPU-PR	persen	100,00	100,00	Tercapai
11	1.4.1. (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	DINPERKIM	persen	60,24	60,24	Tercapai
12	1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	DINDIK	persen	PM	96,65	Tercapai
13	1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	DINDIK	persen	PM	77,76	Tercapai
14	1.4.1. (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	BPS	persen	PM	64,96	Tercapai
15	1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	DINDUKAPIL	persen	PM	99,35	Tercapai
16	1.4.1. (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	BPS	persen	PM	100,00	Tercapai
1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana									
17	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100000 orang	BPBD	orang	PM	455,97	Tercapai
18	1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	BPBD	Kelurahan	PM	26	Tercapai
19	1.5.1. (b)	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu)	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu)	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu)	DINSOS P2KB	jiwa	577	577	Tercapai
20	1.5.1. (c)	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu)	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial	DINSOS P2KB	jiwa	577	577	Tercapai
21	1.5.1. (d)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100)	BPBD		PM	0,00	Tercapai
22	1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD	%	PM	0,96	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pertumbuhan yang berisiko tinggi							
23	1.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Rupiah	PM	100.668.370.236	Tercapai
24	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	BPBD	Dokumen	PM	28	Tercapai
1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi									
25	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	BAPPEDA, BPKAD	persen	PM	21,13	Tercapai
26	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	DINDIK, DINKES, DINSOS		PM	NA	Data tidak tersedia
TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun									
27	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	DINPERPA	ton	10	10	Tercapai
28	2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	DINKES	persen	12,00	14,59	Tidak tercapai
29	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	DINPERPA	persen	100	100	Tercapai
30	2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	DINKES	persen	2,10	4,12	Tidak Tercapai
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula									
31	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balitaPrevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balitaPrevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balitaPrevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINKES	persen	<14%	7,34	Tercapai
32	2.2.1. (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DINKES	persen	PM	5,50	Tercapai
33	2.2.2*	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia	Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada	DINKES	persen	7,00	8,43	Tidak tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)		usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)					
34	2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	DINKES	kasus	PM	11,59	Tercapai
35	2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	DINKES	persen	80,00	72,07	Tidak tercapai
36	2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERPA	skor	81,00	92,12	Tercapai
2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian									
37	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100000 kelahiran hidup									
38	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	DINKES	Per 100000 KH	104,14	129,70	Tidak tercapai
39	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	DINKES	persen	100,00	100,00	Tercapai
40	3.1.2. (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	DINKES	persen	100,00	100,00	Tercapai
3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000									
41	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1000 KH	9,61	16,86	Tidak tercapai
42	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1000 KH	PM	4,67	Tercapai
43	3.2.2. (a)	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1000 KH	7,60	10,89	Tidak tercapai
44	3.2.2. (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Cakupan UCI desa	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	DINKES	persen	100,00	96,30	Tidak tercapai
45	3.3.1. (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Prevalensi HIV-AIDS	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	DINKES	orang	PM	0,67	Tercapai
46	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100000 penduduk	Jumlah Insiden TB	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100000 penduduk	DINKES	per 100000 penduduk	PM	321,47	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
47	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Kejadian Malaria per 1000 orang	Kejadian Malaria per 1000 orang	DINKES		PM	0,00	Tercapai
3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya									
48	3.3.3. (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria	Angka Kesakitan Malaria	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria	DINKES	per 1000 penduduk beresiko	PM	0,00	Tercapai
49	3.3.4. (a)	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Jumlah Kasus Hepatitis B	DINKES	kasus	PM	22	Tercapai
50	3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)	Angka penemuan kasus baru kusta	Jumlah kasus baru penyakit tropis yang diobati a(foliariasis dan b) kusta	DINKES	per 100000 penduduk	PM	43	Tercapai
51	3.3.5. (a)			Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	DINKES		PM	N/A	Data tidak tersedia
52	3.3.5. (b)	Jumlah kab/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap 1)	Angka kasus filaria yang ditangani	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (NCDR) per 100000 penduduk	DINKES	per 100000 penduduk	PM	N/A	Data tidak tersedia
3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan									
53	3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
54	3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Proporsi kasus hipertensi di fasyankes	Presentase kasus hipertensi yang mendapat pelayanan pengobatan	DINKES	persen	100,00	81,68	Tidak tercapai
55	3.4.1. (c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	DINKES	persen	100,00	2,49	Tidak tercapai
56	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	POLRES		PM	N/A	Data tidak tersedia
57	3.4.2. (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	DINKES	persen	100,00	100,00	Tercapai
3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan									
58	3.5.1. (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	KESBANGPOL	orang	PM	2,00	Tercapai
59	3.5.1. (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	KESBANGPOL	orang	PM	2,00	Tercapai
60	3.5.1. (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	KESBANGPOL	orang	PM	0	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				sesuai standar pelayanan					
61	3.5.1. (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	KESBANGPOL	Rumah sakit	PM	0,00	Tercapai
62	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	KESBANGPOL	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
63	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional									
64	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	DINSOS P2KB	persen	PM	72,67	Tercapai
65	3.7.1. (a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINSOS P2KB	persen	67,55	64,41	Tidak tercapai
66	3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	DINSOS P2KB	persen	20,40	23,10	Tercapai
67	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DINSOS P2KB	persen	8,73	0,34	Tercapai
68	3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	DINSOS P2KB	persen	2,16	2,19	Tercapai
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang									
69	3.8.1. (a)	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Unmeet Need	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
70	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINKES	persen	98,00	98,32	Tercapai
71	3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINKES	persen	98,00	98,32	Tercapai
3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah									
72	3.9.3. (a)	Proporsi kematian akibat keracunan	Proporsi kematian akibat keracunan	Proporsi kematian akibat keracunan	DINKES		PM	N/A	Data tidak tersedia
3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat									
73	3.a.1*	Persentase merokok pada	Persentase merokok pada	Persentase merokok pada	BPS	persen	PM	25,04	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penduduk umur ≥15 tahun	penduduk umur ≥15 tahun	penduduk umur ≥15 tahun					
3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas AspekAspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua									
74	3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	DINKES	persen	80,00	100,00	Tercapai
3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil									
75	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	DINKES	persen	PM	12,38	Tercapai
TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT									
4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif									
76	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	DINDIK		NA	N/A	Data tidak tersedia
77	4.1.1. (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi A (2020) 2021: Persentase SD/MI berakreditasi B	DINDIK	persen	PM	98,64	Tercapai
78	4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi B	DINDIK	persen	PM	95,24	Tercapai
79	4.1.1. (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	DINDIK	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
80	4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	DINDIK	persen	PM	105,75	Tercapai
81	4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	DINDIK	persen	PM	103, 7	Tercapai
82	4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	persen	PM	84,08	Tercapai
83	4.1.1. (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	DINDIK	Tahun	9,59	9,34	Tidak tercapai
4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar									
84	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINDIK	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas									
85	4.3.1.(a)	Persentase APK SMA/SMK/MA/ sederajat	Persentase APK SMA/SMK/MA/ sederajat	Persentase APK SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	persen	PM	84,08	Tercapai
86	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan									

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
87	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan									
88	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Rasio APM pada tingkat: 1) APM SD/MI/ sederajat 2) APM SMP/MTs/ Sederajat	DINDIK	persen	PM PM	(1) 0,971 (2) 0,90	Tercapai
4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi									
89	4.6.1. (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka melek huruf	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	persen	PM	97,31	Tercapai
90	4.6.1. (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	BPS	persen	PM	umur 15-24 tahun = 100% umur 15-59 tahun = 99,45%	Tercapai
4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua									
91	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))	% Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	Persentase Ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan	DINDIK	persen	PM	97,23	Tercapai
4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil									
92	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Persentase pendidik SMA/SMALB/MA/S MK bersertifikat pendidik	Persentase pendidik TK-SD- SMP bersertifikat pendidik	Dindik	persen	PM	53,47	Tercapai
TUJUAN 5: MENCAIPI KESETERAHAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun									
93	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DPMPPA		PM	2 (SK Walikota Pokja PUG, SK Pelaksana Tim PPRG)	Tercapai
5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya									

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
94	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	DPMPPA	persen	PM	0,01	Tercapai
95	5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	DPMPPA	persen	PM	0,09	Tercapai
96	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DPMPPA		PM	0,01	Tercapai
97	5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terlayani	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terlayani	DPMPPA	persen	PM	100	Tercapai
5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan									
96	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	DINSOS P2KB	persen	PM	13,99	Tercapai
97	5.3.1. (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	DINSOS P2KB	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
98	5.3.1. (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DINSOS P2KB	persen	8,73	0,34	Tercapai
99	5.3.1. (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	BPS	persen	PM	84,08	Tercapai
55 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat									
100	5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Setwan	persen	PM	14,29	Tercapai
101	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	BKPSDM	Persen	PM	58,14	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumendokumen hasil revidu dari konferensi-konferensi tersebut									
102	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	DINSOS P2KB	Persen	67,55	64,41	Tidak tercapai
103	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Unmet need KB	DINSOS P2KB	persen	14	8,48	Tercapai
104	5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	DINSOS P2KB		100	100	Tercapai
5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan									
105	5.b.1*	-	-	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	BPS	persen	PM	81,67	Tercapai
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
61 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
106	6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DPU-PR	Persen	100	100	Tercapai
107	6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Prasarana air baku	Kapasitas Prasarana air baku	DPU-PR	m3	PM	N/A	Data tidak tersedia
108	6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	DINKES	Persen	PM	37,14	Tercapai
6.2. Pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan									
109	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	DINKES	Persen	75	86,12	Tercapai
110	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	Cakupan pelayanan sanitasi	DPU-PR	Persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
111	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINKES	Kelurahan	27	27	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
112	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES	Kelurahan	27	27	Tercapai
113	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusatskala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah IPAL yang terbangun dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	DLH	Persen	PM	4	Tercapai
114	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	CIPTA KARYA	NA	PM	N/A	Data tidak tersedia
115	6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DLH		PM	1	Tercapai
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global									
116	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DLH		PM	0,00	Tercapai
117	6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Kualitas air danau	Kualitas air danau	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
118	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air									
119	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	DLH	Perusahaan	NA	N/A	Data tidak tersedia
120	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	DINPERPA		PM	N/A	Data tidak tersedia
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan									
121	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	BAPPEDA PSDAIW		PM	N/A	Data tidak tersedia
122	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	BPBD		PM	N/A	Data tidak tersedia
123	6.5.1.(C)	Luas pengembangan	Luas pengembangan	Luas pengembangan	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS					
124	6.5.1. (e)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	DKP		PM	2	Tercapai
125	6.5.1. (f)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	DKP		PM	2	Tercapai
126	6.5.1. (g)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
127	6.5.1. (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau									
128	6.6.1. (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
129	6.6.1. (e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

2.2.4.2 Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 tujuan 27 target 30 indikator tercapai, indikator tidak tercapai dan 36 indikator dengan data tidak tersedia. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-254 berikut.

Tabel II-254
Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA									
7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern									
130	7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	BPS	persen	PM	100	Tercapai
131	7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	BPS	Kwh/ Kapita	PM	N/A	Data tidak tersedia
132	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	BPS		PM	0	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		jaringan gas rumah tangga							
133	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
7.2. Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global									
134	7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
7.3. Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat									
135	7.3.1*	Intensitas energi primer	Intensitas energi primer	Intensitas energi primer	ESDM		PM	N/A	Data tidak tersedia
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA									
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
136	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB	Laju pertumbuhan PDRB	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
136	8.1.1.(a)	PDRB per kapita	PDRB per kapita	PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	PM	N/A	Data tidak tersedia
8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya									
137	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan									
138	8.3.1*	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
139	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
140	8.3.1.(c)	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya									
141	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rupiah	PM	N/A	Data tidak tersedia
142	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	persen	PM	4,91	Tercapai
143	8.5.2.(a)	Tingkat setengah penangguran	Tingkat setengah penangguran	Tingkat setengah penangguran	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan									
144	8.6.1*	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	DINPERINA KER/BPS	orang	69	69	Tercapai
8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal									
145	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinparbudp ora	persen	11,50	12,24	Tercapai
146	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinparbudp ora	orang	PM	499	Tercapai
147	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinparbudp ora	orang	1.000.000	1.130.104	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
148	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Jumlah devisa sektor pariwisata	Jumlah devisa sektor pariwisata	Dinparbudpora	orang	11,50	12,24	Tercapai
149	8.9.2*			Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Dinparbudpora	orang	PM	N/A	Data tidak tersedia
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua									
150	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100000 penduduk dewasa	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
151	8.10.1. (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
152	8.10.1.(b)			Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	DINDAGKOP UKM	%	PM	N/A	Data tidak tersedia
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI									
9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua									
153	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi jalan baik	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	DPU-PR	%	84,39	84,50	Tercapai
154	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	Panjang pembangunan jalan tol	Panjang pembangunan jalan tol	DPU-PR		PM	N/A	Data tidak tersedia
155	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Panjang jalur kereta api	Panjang jalur kereta api	DPU-PR		PM	N/A	Data tidak tersedia
156	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	DINHUB		PM	N/A	Data tidak tersedia
157	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	DKP		PM	1	Tercapai
9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang									
158	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
159	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur pengolahan	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
160	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar									
161	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
162	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	BPS	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
94 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing									
163	9.4.1*.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		industri manufaktur		industri manufaktur					
9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan									
164	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	BAPPEDA	persen	PM	0,069	Tercapai
165	9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	BPS	Persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
166	9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS	Persen	PM	81,67	Tercapai
167	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS	Persen	PM	77,30	Tercapai
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA									
10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional									
168	10.1.1*	Pertumbuhan pengeluaran atau pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40 persen dan terhadap total penduduk	Koefisien Gini	Koefisien Gini	BPS, BAPPEDA	-	PM	0,379	Tercapai
169	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	BPS	persen	6,29	6,71	Tercapai
170	10.A.1			Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	DPMPPA		PM	N/A	Data tidak tersedia
171	10.A.2			Jumlah Desa Tertinggal	DPMPPA		PM	N/A	Data tidak tersedia
172	10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	DPMPPA		PM	N/A	Data tidak tersedia
10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya									
173	10.2.1*			Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	DINSOS P2KB		PM	N/A	Data tidak tersedia
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut									
174	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
175	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	DPMPPA/ POLRES		PM	Total 1 tahun : 38 orang Gender = 21 (Lk : 0, Pr : 21) Anak = 18 (Lk : 7, Pr : 11)	Tercapai
176	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia	DPMPPA		PM	21 Perempuan	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	(HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	(HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan					
177	10.3.1.(d)			Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	BAGIAN HUKUM	-	PM	N/A	Data tidak tersedia
10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar									
178	10.4.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan ketenagakerjaan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	DINPERINA KER	Persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
107 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik									
179	10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	DINPERINA KER	kegiatan	247 Orang	283 Orang	Tercapai
TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya									
231	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BPKAD	persen	pm	PAD 204 Semester I Rp271121330 933,-Hibah 2024 Semester II : Rp0 PDRB 2024 : menunggu rilis dari BPS	Tercapai
232	17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPKAD	persen	PM	Realisasi Pajak 2024 semester II : Rp111866942 211,- PDRB 2024 menunggu rilis dari BPS Kota Pekalongan	Tercapai
17.2. Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 07 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/ GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang									
233	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	BPKAD	persen	9,98	11,04	Tercapai
17.6. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global									
234	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	BPS/ DINKOMINFO		PM	N/A	Data tidak tersedia
235	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
17.8. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi									

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
236	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS		PM	77,30	Tercapai
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama									
237	17.17.1 (a)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	PBJ DAN MINBANG		NA	N/A	Data tidak tersedia
238	17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	BAPPEDA		PM	#####	Tercapai
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional									
239	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	BPS	persen	PM	100	Tercapai
240	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	BPS	persen	PM	100	Tercapai
241	17.18.1.(c)			Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	BPS		PM	47	Tercapai
242	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	BAPPEDA	indikator	PM	145	Tercapai
17.19. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang									
243	17.19.2.(b)			Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DINDUKCA PIL	orang	PM	8602	Tercapai
244	17.19.2.(c)			Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	BPS	persen	PM	9,315	Tercapai
245	17.19.2.(d)			Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan	BPS	persen	PM	100	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pusat Statistik (BPS)					

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2025

2.2.4.3 Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 5 tujuan 25 target dengan 25 indikator tercapai, 1 indikator tidak tercapai dan 26 indikator data tidak tersedia. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-255 berikut.

Tabel II-255
Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
106	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DPU-PR	Persen	100	100	Tercapai
107	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Prasarana air baku	Kapasitas Prasarana air baku	DPU-PR	m3	PM	N/A	Data tidak tersedia
108	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	DINKES	Persen	PM	37,14	Tercapai
6.2. Pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan									
109	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	DINKES	Persen	75	86,12	Tercapai
110	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	Cakupan pelayanan sanitasi	DPU-PR	Persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
111	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINKES	Kelurahan	27	27	Tercapai
112	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES	Kelurahan	27	27	Tercapai
113	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah IPAL yang terbangun dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	DLH	Persen	PM	4	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
114	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	CIPTA KARYA	NA	PM	N/A	Data tidak tersedia
115	6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DLH		PM	1	Tercapai
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global									
116	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DLH		PM	0,00	Tercapai
117	6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Kualitas air danau	Kualitas air danau	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
118	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air									
119	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	DLH	Perusahaan	NA	N/A	Data tidak tersedia
120	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	DINPERPA		PM	N/A	Data tidak tersedia
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan									
121	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	BAPPEDA PSDAIW		PM	N/A	Data tidak tersedia
122	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	BPBD		PM	N/A	Data tidak tersedia
123	6.5.1.(C)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
124	6.5.1.(e)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	DKP		PM	2	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
125	6.5.1.(f)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	DKP		PM	2	Tercapai
126	6.5.1.(g)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
127	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
66 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau									
128	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
129	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh									
180	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki hunian yang layak dan terjangkau	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	DINPERKIM	Persen	62,17%	62,17%	Tercapai
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua									
182	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	DINHUB		PM	548,755	Tercapai
115 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan									
183	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100000 orang	BPBD	Orang	PM	455,97	Tercapai
184	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD		PM	N/A	Data tidak tersedia
185	11.5.1.(b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	BPBD		PM	0,96	Tercapai
186	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD		PM	N/A	Data tidak tersedia
187	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD		PM	##### ##	Tercapai
11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota									
188	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	Persen	70,68	92,55	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
189	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Jumlah bank sampah skala kota dan kelurahan	DLH		PM	29	Tercapai
117 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas									
190	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Persen	2,919	2,370	Tidak tercapai
11b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 20152030									
191	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD	dokumen	PM	28	Tercapai
200	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	BPBD	dokumen	PM	28	Tercapai
TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKENAJUTAN									
12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan									
201	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	DLH	buah	PM	2	Tercapai
202	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	DLH	Ton/tahun	PM	236,72	Tercapai
12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali									
203	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	%	PM	N/A	Data tidak tersedia
12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktekpraktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka									
204	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
12.7. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional									
12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam									
205	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	BAGIAN ORGANISASI	OPD	3	3	Tercapai
TUJUAN 13: MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
206	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	BPBD	Dokumen	PM	28	Tercapai
207	13.1.2*	Jumlah korban meninggal,	Jumlah korban meninggal,	Jumlah korban meninggal, hilang,	BPBD	orang	PM	455,97	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		hilang dan terkena dampak bencana per 100000 orang	hilang dan terkena dampak bencana per 100000 orang	dan terkena dampak bencana per 100000 orang					
13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional									
208	13.2.1.(a)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
TUJUAN 14: MELAKUKAN KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDERA DAN MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN									
14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia									
209	14.5.1*	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	DKP		PM	N/A	Data tidak tersedia
14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)									
210	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha	DPMPTSP	Persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar									
211	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	jumlah nelayan yang terlindungi (asuransi)	DKP		PM	N/A	Data tidak tersedia
TUJUAN 15: PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN									
15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional									
212	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	DLH		109,67	110,02	Tercapai
15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global									
213	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
214	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
215	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia
15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi									
216	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	DLH		PM	N/A	Data tidak tersedia

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.2.4.4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 tujuan 8 target dan 16 indikator tercapai, 2 indikator tidak tercapai dan 6 indikator dengan data tidak tersedia. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-256 berikut.

Tabel II-256
Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
di Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH									
16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun									
217	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	KESBANGPOL		PM	0,00	Tercapai
218	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100000 penduduk	POLRES		PM	0,00	Tercapai
219	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	KESBANGPOL		PM	0,02	Tercapai
220	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS		PM	N/A	Data tidak tersedia
162 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiiksaan terhadap anak									
211	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	DPMPPA		PM	N/A	Data tidak tersedia
212	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	DPMPPA	Anak	PM	0,02	Tercapai
213	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	DPMPPA	persen	PM	0,00	Tercapai
163 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua									
214	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	POLRES	persen	PM	N/A	Data tidak tersedia
215	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Bagian Hukum	Perkara	3,00	3,00	Tercapai
165 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya									
216	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	INSPEKTORAT		PM	N/A	Data tidak tersedia
166 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat									
217	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	BPKAD	persen	PM	94,30% APBD Rp107423 1528000,- Realisasi Rp101299 1724934,-	Tercapai
218	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	BPKAD	Persen	100	N/A	Data tidak tersedia

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)		Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)					
219	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kota Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI	Indeks	75,07(BB)	73,02(BB)	Tidak tercapai
220	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (SIRUP)	BAGIAN PBJ dan Minbang	%	100,00	94,63	Tidak tercapai
221	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI	Indeks	73,69 (BB)	n/a (Nilai muncul di triwulan I tahun 2025)	Data tidak tersedia
222	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik	BAGIAN ORGANISASI	Indeks (Zona Merah/ Kuning/ Hijau)	97,74 (Kategori A, Kualitas Tertinggi)	97,74 (Kategori A, Kualitas Tertinggi)	Tercapai
167 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan									
223	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	SETWAN	Persen	PM	14,29	Tercapai
224	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II	BKPSDM	Persen	PM	14,29	Tercapai
169 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran									
225	16.9.1.*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DINDUKCAPIL	persen	PM	99,95	Tercapai
226	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	DINDUKCAPIL DAN DINSOS	persen	PM	57,9439	Tercapai
227	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DINDUKCAPIL	Persen	PM	99,35	Tercapai
1610 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional									
228	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	DPMPA	kasus	PM	21 orang perempuan	Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Tahun 2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
229	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, stautori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	DINKOMINFO	Persen	100,00	100,00	Tercapai
230	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	DINKOMINFO	Persen	27,58	27,58	Tercapai

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.2.4.5 Fokus Iklim Investasi

1. Lama Proses Perijinan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggara PTSP di Kota Pekalongan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang bertujuan untuk: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan penerbitan izin dan lama proses permohonan izin, berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya. Sampai dengan tahun 2023, telah dibuka layanan perizinan untuk Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan/ atau Persetujuan Pemerintah, dan Pelayanan Non Perizinan. Dimana lama proses perizinan bervariasi antara rentang waktu 1-30 hari. Dengan adanya SOP lamanya proses perizinan, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memberikan jaminan kepastian waktu proses perizinan.

2. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 23 Perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut, sebagaimana disajikan dalam Tabel II-257 berikut.

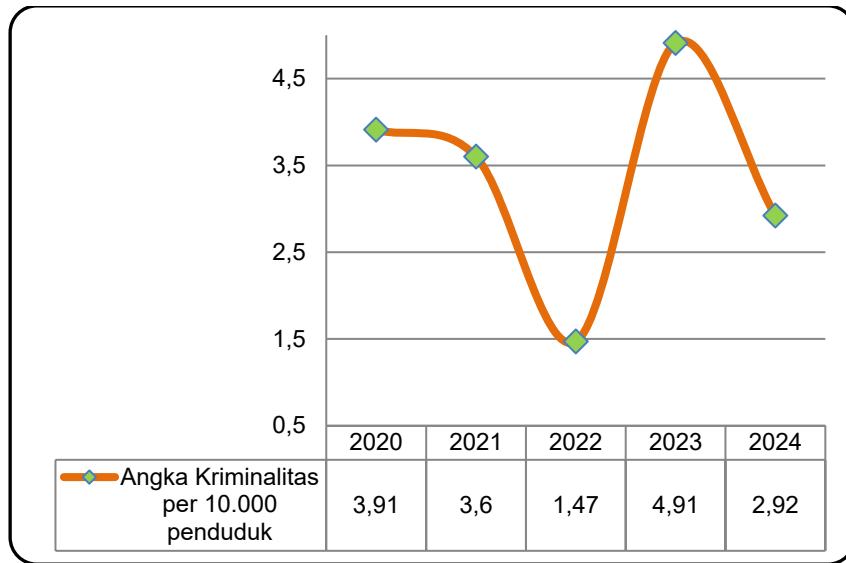
Tabel II-257
Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
1	2	3	4
1	3	2009	Bangunan Gedung
2	30	2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
3	3	2012	Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
4	12	2012	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
5	13	2012	Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6	20	2012	Perizinan Dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
7	10	2015	Penyelenggaraan Kepariwisata
8	15	2015	Penyelenggaraan Rumah Kos
9	13	2015	Penyelenggaraan Perhubungan
10	16	2015	Penyelenggaraan Usaha Warung Internet
11	11	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
12	13	2018	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	7	2018	Penyelenggaraan Pendidikan
14	4	2019	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
15	1	2020	Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040
16	9	2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
17	9	2022	Penyelenggaraan Penanaman Modal
18	12	2022	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
19	5	2023	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	6	2023	Tanda Daftar Gudang
21	7	2023	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
22	8	2023	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
23	2	2024	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2025

4. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana secara garis besar angka kriminalitas di Kota Pekalongan bersifat fluktuatif, mengalami naik turun sepanjang lima tahun terakhir seperti yang disajikan dalam Gambar II-69 berikut.



Gambar II-69
Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2025

Meskipun demikian, kondusivitas di Kota Pekalongan masih terkendali sehingga masih menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi.

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan daerah didasarkan pada sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya dikaitkan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2026 disajikan dalam Tabel II-258 berikut.

Tabel II-258
Permasalahan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
Nilai SAKIP Kota	Belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	
Indeks Pelayanan Publik (IPP) (IUP)	
Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP)	
Opini BPK atas laporan keuangan	
Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan religius
Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun	
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	
Nilai realisasi investasi tahun N	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Belum optimalnya kemandirian ekonomi daerah
Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan	
Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	
Persentase populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP)	
Indeks Ketimpangan Gender	
Kategori Kota Layak Anak	

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Selanjutnya, permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel II-259 berikut.

Tabel II-259
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
1	2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>	Belum optimalnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan.
	Belum optimalnya pemenuhan SPM khususnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
	Belum optimalnya implementasi kurikulum mulok yang mengembangkan pendidikan karakter dan keagamaan
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i>	Belum optimalnya peyediaan sarpras kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar
	Belum optimalnya validitas data penerima jaminan kesehatan nasional
	Belum optimalnya upaya penanganan kasus tuberkolosis
	Belum optimalnya kompetensi tenaga kesehatan yang sesuai persyaratan
	Belum optimalnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang baik.
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>	Belum optimalnya kualitas dan kondisi jalan kota
	Belum optimalnya penyediaan air minum, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas
	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sanitasi domestik
	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana persampahan
	Belum optimalnya kualitas sarpras pengendali banjir dan drainase kota

URUSAN	PERMASALAHAN
1	2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi warga
	Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan
	Belum penanganan kawasan kumuh
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masih adanya pelanggaran perda di masyarakat
	Belum optimalnya perencanaan dan antisipasi risiko bencana daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Belum optimalnya upaya rehabilitasi sosial bagi PPKS
	Belum optimalnya upaya perlindungan sosial bagi korban bencana
	Belum optimalnya upaya jaminan sosial bagi PPKS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja yang akan bekerja
	Belum optimalnya upaya penempatan calon tenaga kerja kepada pemberi kerja
	Belum optimalnya upaya mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dsb)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum optimalnya upaya advokasi kepada lembaga kemasyarakatan
	Belum optimalnya pelayanan pengaduan kasus perempuan dan permasalahan keluarga
	Belum optimalnya penanganan dan pelayanan kasus anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Belum optimalnya kualitas konsumsi pangan daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Belum optimalnya tertib administrasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum optimalnya penanganan limbah cair
	Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau
	Belum optimalnya upaya pengurangan sampah dari hulu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan yaitu layanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan administrasi kependudukan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belum optimalnya upaya pembinaan LKK dalam pemberdayaan masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum optimalnya upaya pengendalian jumlah penduduk
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Belum optimalnya kondisi sarpras transportasi dan penanganan kemacetan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya implementasi SPBE pada domain tata kelola
	Belum optimalnya pemenuhan permohonan informasi publik

URUSAN	PERMASALAHAN
1	2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Belum optimalnya peran koperasi dalam mensejahterakan anggotanya Terbatasnya skala usaha mikro
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum optimalnya penyediaan dan implementasi peraturan dalam penanaman modal Belum optimalnya promosi investasi Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kemajuan Penanaman Modal (LKPM). Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Belum optimalnya partisipasi kader pemuda dalam pembangunan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral perangkat daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum optimalnya tata kelola keamanan informasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum optimalnya pembinaan stakeholder budaya dalam sinergi pelestarian budaya lokal Belum optimalnya upaya pelestarian cagar budaya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana meningkatkan tingkat literasi masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Belum optimalnya kualitas tata kelola kearsipan daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kurangnya daya saing produk unggulan daerah (perikanan) berbasis masyarakat/ kelompok dalam menembus pasar global
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Belum optimalnya upaya promosi pariwisata daerah Belum optimalnya kualitas dan kuantitas obyek wisata daerah Terbatasnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Keterbatasan lahan pertanian dalam upaya ketahanan pangan daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Belum optimalnya nilai ekspor daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kurangnya daya saing produk unggulan daerah (batik) dalam menembus pasar global Ketergantungan import terutama bahan baku dan bahan penolong industri batik sangat tinggi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	Belum optimalnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa Belum optimalnya serapan anggaran pada OPD
SEKRETARIAT DPRD	Belum optimalnya fasilitasi dalam penyusunan peraturan perundangan tepat waktu
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	

URUSAN	PERMASALAHAN
1	2
PERENCANAAN	Belum optimalnya konsistensi dan keselarasan dalam perencanaan pembangunan
KEUANGAN	Belum optimalnya pengendalian waktu dalam tahapan penyusunan dokumen anggaran.
	Belum optimalnya pemahaman bendaharawan atas regulasi pengelolaan keuangan daerah
	Belum optimalnya pengendalian waktu dalam tahapan penyusunan dokumen laporan keuangan daerah.
	Data potensi pendapatan belum dimutakhirkan dengan baik
	Belum optimalnya implementasi penatausahaan barang milik daerah
KEPEGAWAIAN	Belum optimalnya pengembangan pola karir, peningkatan profesionalisme, dan interoperabilitas sistem database kepegawaian
	Belum optimalnya tingkat pendidikan ASN
	Belum optimalnya keterisian jabatan ASN
	Belum optimalnya pelaporan kinerja ASN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional ASN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Belum optimalnya kualitas riset dalam mendukung arah kebijakan daerah
	Belum optimalnya kematangan inovasi dalam mendukung indeks inovasi daerah
	Belum optimalnya partisipasi OPD dalam inovasi daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan dengan tujuan tertentu
	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, dan pemeriksaan BPK dan APIP
	Belum optimalnya pemenuhan kebijakan teknis pengawasan
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
	Belum optimalnya kinerja pelayanan, pemberdayaan dan trantibum di tingkat kecamatan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Masih adanya konflik di masyarakat
Non Urusan	
Non Urusan	Belum optimalnya kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, sarpras dan kompetensi pelayan dalam pelayanan masyarakat.

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2024

2.7. Isu Strategis

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah serta isu strategis dokumen perencanaan Kota Pekalongan maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-260 berikut.

Tabel II-260
Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif	Tata kelola pemerintahan
Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan religius	Kualitas sumber daya manusia
Belum optimalnya kemandirian ekonomi daerah	Perekonomian daerah yang berdaya saing
	Infrastruktur perkotaan dan permukiman
	Kondusivitas wilayah
	Kelestarian budaya lokal
Belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat.	Kesejahteraan masyarakat

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Selanjutnya penjelasan isu strategis sebagai berikut:

2.7.1. Tata Kelola Pemerintahan

Tuntutan tata kelola pemerintahan dalam era global adalah mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan menembus batas. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan, sehingga pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa masyarakat ke dalam jurang *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk

jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.

Isu strategis tata kelola pemerintahan didasarkan pada kondisi bahwa tata kelola pemerintahan Kota Pekalongan menunjukkan belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Pekalongan secara konsisten terus melaksanakan reformasi birokrasi. Pada dasarnya, reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Commission on Human Rights*) mengidentifikasi beberapa prinsip yakni transparansi, pertanggungjawaban (*responsibility*), akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan (*responsiveness*) sebagai prinsip kunci *good governance*.

Dari berbagai definisi dan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, indikator penilaian di dalam dokumen ini mengambil prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi sebagai faktor kunci penilaian. Keempat prinsip kunci inilah kemudian digunakan sebagai dasar penilaian yang dilihat dari sisi landasan hukum, aktor dan implementasinya. Pemilihan keempat prinsip *good governance* dalam indikator bukan untuk tujuan simplifikasi, melainkan untuk memudahkan identifikasi persoalan melalui pengelompokan indikator-indikator berdasarkan prinsip minimum tercapainya tata kelola yang baik.

Pertama, **Transparansi**, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun

instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan.

Kedua, **Partisipasi (inklusifitas)**, adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

Ketiga, **Akuntabilitas**, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (*access to justice*) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.

Keempat, **Koordinasi**, adalah mekanisme yang memastikan sejauhmana pihak-pihak lain (khususnya institusi pemerintah) yang memiliki kepentingan dan memiliki kesamaan tujuan yang tercermin di dalam program kerjanya, umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisiensi dan efektifnya tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan kajian teoritik dan permasalahan pembangunan, isu strategis tata kelola pemerintahan menjadi pilihan tepat karena dengan perwujudan tata pemerintahan yang baik maka akan dapat semakin menjamin terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Kota Pekalongan tahun 2045. Urgensi isu strategis tata kelola pemerintahan, didasarkan atas belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dapat didasarkan atas identifikasi masalah yang dihadapi selama ini, meliputi: 1). Belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah; 2). Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; 3). Belum optimalnya penguatan integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih; dan 4). Belum optimalnya pelayanan publik pemerintahan baik pada tingkat Kota ataupun tingkat Perangkat Daerah.

1. Belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP Kota Pekalongan tahun 2019-2023 yang belum optimal. Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Nilai SAKIP Kota Pekalongan adalah 72,59, meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2023 menjadi 72,83, dengan predikat BB. Capaian tersebut harus dioptimalkan agar dapat mencapai

predikat yang lebih baik, yaitu ditandai dengan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja secara optimal.

2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil, dimana pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Meskipun demikian, capaian tersebut harus dilakukan optimalisasi.
3. Belum optimalnya penguatan integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih diukur dengan indeks integritas nasional. Walaupun capaian nilai SPI / IIN Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2024 sebesar 82,25 dengan kategori TERJAGA, lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 79,47, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan bahkan untuk tipe kota kecil, IIN Kota Pekalongan menempati posisi terbaik tingkat nasional, namun upaya menjaga integritas tetap harus dilakukan. Upaya mewujudkan Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, pelayanan publik yang prima menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi isu penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Belum optimalnya pelayanan publik pemerintahan baik pada tingkat Kota ataupun tingkat Perangkat Daerah, pada umumnya ditandai dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Pelayanan Publik (IPP) alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia. IPP Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2024 sebesar 4,59 lebih tinggi dari IPP Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,53.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Data IKM menunjukkan bahwa hingga saat ini nilai IKM OPD belum semuanya memiliki status “baik sekali”.

Dalam RPJPN, transformasi tata kelola ini merupakan landasan untuk transformasi Indonesia. Artinya, optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik merupakan salah satu landasan atau prasyarat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dikaitkan dengan isu global, Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

2.7.2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Di era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Dengan pengembangan sumber daya manusia, suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukung penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan ditengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Indonesia dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Isu strategis kualitas sumber daya manusia selaras dengan isu global pembangunan berkelanjutan, yaitu 1) menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata; 2) meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta 3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Isu strategis kualitas sumber daya manusia harus didorong karena dapat menjadi pengungkit dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Pekalongan secara berkelanjutan.

Isu strategis kualitas sumber daya manusia menjadi sangat relevan untuk diangkat karena berbagai pertimbangan tersebut di atas. Kota Pekalongan yang merupakan salah satu anggota Jejaring Kota Kreatif Dunia dan perekonomian daerah sangat ditopang oleh budaya batik maka sangat membutuhkan pembangunan sumber daya manusia ini. Isu kualitas sumber daya manusia didasarkan atas beberapa permasalahan, meliputi: 1) belum optimalnya akses dan mutu pendidikan; 2) belum optimalnya pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan; serta 3) belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat.

Kualitas hidup manusia pada umumnya diukur dengan pendekatan 3 (tiga) kriteria: **Pertama**, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan sebagai mahluk hidup hayati, **Kedua**, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi, dan **Ketiga**, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memilih. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia itu dianggap berkualitas apabila kebutuhan pangan, sandang dan pangan dapat terpenuhi, kebutuhan kesehatan, pendidikan juga terpenuhi, hingga kebutuhan rekreasi dan aktualisasi juga terpenuhi.

Kualitas hidup adalah persepsi individu tentang posisi mereka dalam kehidupan di konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup, dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar mereka dan kekhawatiran. Terdapat banyak faktor yang dapat menentukan kualitas hidup manusia, salah satunya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar tentu akan membutuhkan kecukupan pangan, sandang, dan papan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Demikian juga kebutuhan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya. Dalam konteks ini, tidak akan ada masalah bila dukungan lingkungan dan sumber daya alam memadai. Tetapi apabila jumlah penduduk terus bertambah dan sumber daya alam tidak lagi mampu mendukung kehidupannya, maka akan menjadi masalah yang serius bagi penduduk yang bersangkutan.

Karena bisa jadi akan terjadi bencana kelaparan atau kekurangan sandang, papan dan lainnya yang menyebabkan kualitas kehidupan penduduk tersebut terus menurun. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi.

Kondisi tenteram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniiah.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Dalam buku Indonesia *Macroeconomic Outlook* (2009), masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan. Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau. Selain itu, memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat, serta senantiasa memiliki mitra dalam menjaga keberlanjutan.

Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang dicita-citakan setiap negara maupun daerah. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang menandakan bahwa pembangunan nasional maupun pembangunan daerah berhasil. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan kehidupan keseharian keberhasilan pembangunan, yang sifatnya bukan bangunan megah menjulang tinggi dan kokoh, tetapi terimplementasi dalam keseharian masyarakatnya. Implementasinya dapat berwujud masyarakat yang aman, nyaman, makmur, berpendidikan dan sehat. Oleh karena itu, Kota Pekalongan merumuskan bahwa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang optimal menjadi isu strategis pembangunan.

Berdasarkan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2045, visi pembangunan kependudukan Kota Pekalongan adalah “terwujudnya masyarakat kota pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religius”. Selanjutnya visi ini dijabarkan ke dalam beberapa arah kebijakan yaitu: 1). Meningkatkan kualitas penduduk atau kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya dan penguatan karakter Masyarakat; 2). Mengelola pengendalian kuantitas penduduk untuk menekan laju pertumbuhan penduduk secara seimbang dan terkendali, dengan cara mengatur kelahiran, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; 3). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja, peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan desa; 4). Meningkatkan kualitas, kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam rangka pembangunan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan; 5). Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara

lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan upaya pendekatan pembangunan secara merata secara kewilayahan dan regional; 6). Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi dalam satu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan secara *valid*.

Sedangkan tujuan pembangunan kependudukan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: 1). tercapainya kualitas penduduk yang tinggi untuk mencapai Kota Pekalongan yang maju, mandiri, adil, sejahtera, berkelanjutan, dan berbudaya; 2). terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (*valid*) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; 3). terwujudnya tertib administrasi sesuai dengan ketentuan/pedoman; 4). terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan koordinasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan di bidang administrasi kependudukan; dan 5). terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

Pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan belum mencapai hasil yang optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan. Akses pendidikan yang belum merata ditandai dengan kesempatan pendidikan belum merata dirasakan seluruh masyarakat Kota Pekalongan, hal ini dikarenakan masing-masing memiliki kesempatan yang berbeda terhadap pendidikan. Kesempatan yang berbeda tersebut diakibatkan pemahaman pentingnya pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Kesempatan pendidikan yang belum merata ini, dapat diukur dengan APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/ sederajat Kota Pekalongan yang tertinggal dibandingkan APK Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Untuk APK SD/MI/ sederajat relatif sama antara Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sebagai pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, pun belum memiliki capaian yang optimal. Capaian Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pada akhirnya mencerminkan kondisi kualitas pendidikan yang belum merata dan partisipasi stakeholder pendidikan yang belum optimal. Pada dasarnya, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, sekolah maupun masyarakat dan orang tua. Selama ini, berkembang pemahaman bahwa pendidikan hanyalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan sekolah semata.

Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, berimplikasi terhadap penyebaran data dan informasi serba cepat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masyarakat di belahan dunia manapun. Derasnya arus informasi tersebut sangat berpengaruh terhadap tatanan sosial budaya yang selama ini telah menjadi patron. Perubahan sikap, cara pandang, maupun perilaku yang menuju terhadap hal-hal yang berkonotasi negatif, diakibatkan oleh karakter masyarakat yang belum kuat. Tentunya hal ini, salah satunya disebabkan oleh lemahnya pendidikan karakter. Data sekolah di Kota Pekalongan yang mengimplementasikan pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter telah mencapai 100% namun lemahnya pendidikan karakter ini masih menjadi tantangan pembangunan yang harus diselesaikan ke depan.

Di samping permasalahan pendidikan, Kota Pekalongan juga masih memiliki permasalahan kesehatan yang mendasar, yaitu masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat. Perwujudan dari masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat tersebut meliputi: 1) AKB, angka kematian bayi, yang masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022 masih memiliki 8,81 per 1.000 kelahiran hidup; 2) AKABA, angka kematian balita, yang masih berfluktuasi dan belum menurun secara optimal dan pada tahun

2022 adalah 10,84 per kelahiran hidup serta angka yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah; 3) AKI, angka kematian ibu, yang masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022 masih bernilai 152,41 per 100.000 kelahiran hidup; 4) Angka kesakitan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022 memiliki angka 12,89%; dan 5) Prevalensi balita stunting yang masih berfluktuasi, cenderung meningkat dan pada tahun 2022 masih memiliki angka 9,42%. Dari data indeks keluarga sehat (IKS) pun, angka yang dicapai Kota Pekalongan masih sangat jauh. Ideal IKS adalah 0,8 dan capaian IKS Kota Pekalongan pada tahun 2022 adalah 0,31. Tantangan pengembangan IKS ke depan masih sangat besar.

2.7.3. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing

Melihat berbagai permasalahan dalam perekonomian daerah, isu-isu global, nasional, regional dan telaah dokumen perencanaan Kota Pekalongan, isu yang diangkat adalah Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing. *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan. TPB merupakan komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan. TPB memiliki tiga prinsip utama yaitu universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal atau no one left behind. Di dalam SDGs terdapat 17 tujuan dengan 169 target. Masing-masing tujuan memiliki makna dan target yang diharapkan dapat tercapai pada 2030. Tujuan ke-8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-targetnya meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi; menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; penciptaan lapangan kerja layak; mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM); mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET, *Not in Education, Employment, or Training*); mempromosikan pariwisata berkelanjutan; memperkuat lembaga keuangan. Isu strategis peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah memiliki kaitan yang sangat erat dengan TPB dan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan ke-8 TPB tersebut.

Isu strategis perekonomian daerah yang berdaya saing juga selaras dengan isu global perkembangan teknologi informasi, Misi ke-2 RPJPN berkaitan dengan Transformasi Ekonomi dengan arah kebijakan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Digital serta Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Provinsi Jawa Tengah juga menempatkan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai isu strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Kota Pekalongan sangat berkepentingan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing, karena menjadi salah satu pengungkit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi peningkatan PDRB perkapita, penurunan tingkat pengangguran terbuka serta penurunan angka kemiskinan. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah membangun sistem penanaman modal yang kondusif dan berkelanjutan. Namun demikian, terdapat beberapa masalah yang juga menjadi penyebab pentingnya perekonomian daerah yang berdaya saing, meliputi: 1) Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah; 2) Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha perdagangan; 3) Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha industri pengolahan; serta 4) Belum optimalnya laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum.

Isu strategis perekonomian daerah yang berdaya saing merupakan upaya berkesinambungan dalam mewujudkan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah. Isu strategis ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk unggulan Kota Pekalongan secara optimal. Latar belakang penetapan isu strategis adalah permasalahan belum optimalnya daya saing dan produktifitas perekonomian daerah khususnya belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam memperkuat nilai tambah sektor industri, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan produk unggulan daerah.

Kota Pekalongan yang terkenal dengan kerajinan batiknya, telah dinobatkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai Kota Kreatif Dunia dari total 28 kota kreatif di berbagai penjuru dunia, untuk kategori Kerajinan dan Kesenian Rakyat (*Craft & Folk Arts*) pada tanggal 1 Desember 2014. Kota Pekalongan terletak di pesisir Laut Jawa, juga dikenal sebagai penghasil perikanan, meskipun pada saat ini terus menurun dibandingkan pada tahun 1990-an sebagai akibat pendangkalan di sisi muara serta semakin tingginya intensitas dan frekuensi genangan rob. Kota Pekalongan pun memiliki potensi kepariwisataan yang cukup besar, meskipun hanya memiliki luas wilayah dan sumberdaya alam yang relatif terbatas. Potensi kepariwisataan yang dimiliki terutama adalah yang berbasis budaya. Kota Pekalongan juga merupakan salah satu PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) di Jawa Tengah. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Potensi dan peran yang dimiliki Kota Pekalongan tersebut cukup besar, apalagi Kota Pekalongan terletak pada median antara Kota Surabaya dan DKI Jakarta, sehingga menambah potensi dan keunggulan Kota Pekalongan.

Namun demikian, potensi dan peran yang dimiliki Kota Pekalongan tersebut, belum dapat memacu secara optimal pertumbuhan atau perkembangan perekonomian wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya (pertumbuhan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto). PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Oleh karena nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian tidak bertambah optimal, sehingga pertumbuhan ekonominya belum optimal. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, dua dekade ini pada kisaran angka 5% per tahun (kecuali pada saat pandemi Covid-19) dan lebih bagus dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, namun belum optimal. Akibat pertumbuhan ekonomi yang belum optimal maka salah satunya berdampak terhadap pertumbuhan PDRB per kapita Kota Pekalongan yang belum optimal juga, sehingga memiliki nilai di bawah Provinsi Jawa tengah, apalagi nasional. Sebagai gambaran bahwa PDRB per kapita tahun 2022 Kota Pekalongan adalah Rp 40,68 juta, Provinsi Jawa Tengah adalah Rp 42,1 juta, nasional sebesar Rp 71 juta. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka salah sasarnya adalah pendapatan per kapita nasional adalah setara dengan pendapatan negara maju yaitu PDRB per kapita yaitu minimal Rp 205,48 juta. Sebagai daerah yang memiliki potensi dan peran yang cukup strategis, ke depan khususnya dari sisi PDRB per kapita, Kota Pekalongan seharusnya tidak lagi menjadi beban Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan optimalisasi peningkatan nilai tambah produk unggulan, sehingga dapat meningkatkan PDRB dan perekonomian Kota Pekalongan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020), tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “terwujudnya kota kreatif yang didukung perdagangan dan jasa, industri, dan perikanan, yang nyaman, aman, produktif, serta berkelanjutan”. Dalam rangka pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, kebijakan yang disusun adalah pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong. Kebijakan ini diwujudkan dengan beberapa

strategi sebagai berikut: 1). mengembangkan kawasan perdagangan di kawasan pusat pelayanan kota dan kawasan sub pusat pelayanan kota; 2). mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pengembangan wisata belanja; 3). menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan sistem jaringan jalan; 4). meningkatkan integrasi sistem antar moda; dan 5). mengembangkan fasilitas TOD (*Transit Oriented Development*). Pada RTRW Kota Pekalongan telah dialokasikan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi serta kawasan perdagangan dan jasa pada beberapa koridor jalan utama di Kota Pekalongan seluas 386 hektar. Namun demikian, alokasi lahan tersebut belum dapat optimal mendukung perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan khususnya melalui sektor perdagangan dan jasa.

Apabila diidentifikasi lebih mendalam, maka masalah tersebut memiliki akar masalah sebagai berikut: 1) masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan; 2) belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi; 3) belum optimalnya upaya untuk mendorong sektor perikanan, khususnya pasca pembangunan konstruksi pengendali banjir dan rob; 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata; 5) Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya; 6) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya); 7) belum optimalnya penataan pasar tradisional.

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekalongan tahun 2013 – 2028 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 18 Tahun 2013, visi pembangunan kepariwisataan Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Pekalongan Sebagai Destinasi Pariwisata Utama”. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kota Pekalongan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Daerah dengan mengembangkan: 1). destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah; 2). pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; 3). industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; dan 4). organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata di Kota Pekalongan yang belum optimal menyebabkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan ke Kota Pekalongan belum optimal. Jumlah dan lama kunjungan yang belum optimal berimplikasi terhadap perkembangan perekonomian atau nilai tambah yang belum optimal juga. Jika dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah wisatawan 784.254 orang maka pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisata meningkat menjadi 1.038.509 orang. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah kunjungan wisata, kecuali pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021, namun masih belum optimal peningkatannya, dibandingkan potensi dan peran yang dimiliki Kota Pekalongan. Fasilitas akomodasi di Kota Pekalongan cukup tersedia, yaitu selama beberapa tahun terakhir berjumlah 35 hotel. Optimalisasi harus dilakukan, khususnya terhadap kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata. Misalkan, Taman Wisata Laut (TWL) yang menjadi salah satu ikon destinasi wisata baru di Kota Pekalongan, mengalami tantangan pengembangan karena aksesibilitas menuju TWL yang kurang memadai, yaitu seringkali tergenang banjir dan rob sehingga wisatawan mengalami kesulitan akses untuk mencapainya. Beberapa destinasi wisata lainnya pun juga

memiliki sarpras pendukung yang tidak memadai, seperti keterbatasan kualitas dan kuantitas toilet, tempat parkir, kuliner dll.

Pelestarian dan pemanfaatan budaya di Kota Pekalongan pun belum optimal. Jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan selama beberapa tahun ini stagnan, yaitu berjumlah 162 kelompok dan jumlah gedung kesenian 4 buah. Yang terlibat di dalam kelompok kesenian pun adalah individu lama, generasi muda masih sangat terbatas di dalam kelompok kesenian. Gedung kesenian pun berjumlah tetap, sehingga menyebabkan terbatasnya sarana publik untuk latihan maupun pentas kesenian. Oleh karena itu, pelestarian dan pemanfaatan budaya belum optimal. Padahal, pelestarian dan pemanfaatan budaya yang optimal, dapat diparalelkan dengan pengembangan perekonomian, khususnya pengembangan kepariwisataan.

Akar masalah lain adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya). Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan yang cukup signifikan pada segala aspek, termasuk perekonomian, khususnya di dalam dunia usaha. Beberapa wirausahawan muda Kota Pekalongan beberapa waktu lalu, ketika pandemi Covid-19, telah sukses mengembangkan usaha batik, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun demikian, cerita sukses tersebut hanya dilakukan sekelompok kecil masyarakat dan belum dilakukan sebagian besar wirausahawan di Kota Pekalongan. Padahal, penguasaan teknologi informasi akan sangat menentukan keberhasilan pengembangan perekonomian, khususnya dalam pengelolaan dunia usaha.

Berdasarkan visi Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan tahun 2020 – 2040 yang disahkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2020, visi pembangunan industri Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Industri Kota Pekalongan yang Maju Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Lokal”. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Industri Kota Pekalongan, disusun 6 (enam) misi yaitu: 1). meningkatkan peran industri Kota Pekalongan sebagai pilar dan penggerak perekonomian Kota Pekalongan; 2).memperkuat dan memperdalam struktur industri Kota Pekalongan; 3). mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis produk unggulan dan kearifan lokal; 4). menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5). membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan 6). mengoptimalkan potensi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah yang tidak optimal juga disebabkan oleh masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan. Kota Pekalongan memiliki luas wilayah yang terbatas dan memiliki keterbatasan sumberdaya sehingga akan sangat tergantung kepada daerah atau negara lain terhadap bahan baku untuk proses produksinya. Sebagai contoh adalah industri batik, dimana sebagian besar bahan bakunya berasal dari daerah lain/negara lain. Termasuk juga industri tahu dan tempe maka Kota Pekalongan akan sangat tergantung bahan baku kedelai, dengan daerah lain atau negara lain. Kondisi ini menyebabkan Kota Pekalongan sangat tergantung bahan baku dari luar dan kestabilan harga. Beberapa upaya telah dilakukan untuk melindungi ketersediaan dan kestabilan harga, diantaranya adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketersediaan Bahan Baku Batik. Namun demikian implementasi Perda tersebut belum optimal. Belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan juga menyebabkan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah yang tidak optimal. Promosi terhadap produk/komoditi unggulan selama ini sudah dilakukan, tetapi harus terus dilakukan dan

ditingkatkan, agar masyarakat luas, nasional dan internasional, memahami produk unggulan Kota Pekalongan, yaitu batik.

Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah yang belum optimalnya juga disebabkan belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi. Selama ini, Pemerintah Kota Pekalongan telah mendukung dan menciptakan ekosistem inovasi dan kreativitas yang mampu mendukung daya saing ekonomi. Namun demikian, upaya tersebut belum dapat mendukung terwujudnya optimalisasi peningkatan daya saing. Ke depan, ekosistem inovasi dan kreativitas harus terus didorong dan diberdayakan untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah yang optimal. Peningkatan daya saing ekonomi ke depan dilakukan juga dengan memanfaatkan kebijakan nasional tentang pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Kota Pekalongan yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah Kabupaten Batang dapat memanfaatkan potensi jasa dan penyediaan tenaga kerja. Di samping itu, juga dikembangkan keterkaitan produk-produk di Kota Pekalongan dengan KITB.

Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan jasa Kota Pekalongan dilakukan dengan semakin memperkuat fungsi pelayanan regional wilayah Petanglong dan daerah sekitarnya dengan pembangunan kembali pasar Banjarsari. Diharapkan pasar Banjarsari dapat memperkuat perekonomian dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan, baik secara *online* maupun *offline*.

Disamping upaya untuk peningkatan sektor unggulan, Kota Pekalongan sangat berkepentingan dalam rangka menjawab ketahanan pangan daerah karena isu ketahanan pangan merupakan isu strategis Provinsi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Kota Pekalongan merupakan kawasan perkotaan, Dimana kawasan perkotaan merupakan kawasan yang fungsi utamanya adalah non pertanian. Namun demikian, guna mendukung ketahanan pangan di Kota Pekalongan masih terdapat LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), sesuai RTRW Kota Pekalongan. Ketahanan Pangan tidak hanya berfokus pada lahan pertanian, tapi juga perikanan. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi perikanan tangkap (penanaman terumbu/rumah ikan, bantuan kapal dan jaring nelayan), perikanan budidaya (bandeng, nila, udang), dan juga pengolahan hasil perikanan (cold storage, surimi, HPI, frozen food, pengalengan, pengasapan).

Tantangan Kota Pekalongan ke depan adalah peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah agar perekonomian Kota Pekalongan terus bertumbuh dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat 13 rantai industri batik yang diidentifikasi. Dari ketiga belas rantai tersebut, ditengarai bahwa nilai tambah industri batik, sebagian besar dinikmati oleh masyarakat di luar wilayah Kota Pekalongan. Pelaku usaha dan tenaga kerja industri batik di wilayah Kota Pekalongan hanya menerima sebagian kecil dari nilai tambah industri batiknya. Upaya untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan nilai tambah industri batik agar sebagian besar dapat diterima oleh masyarakat Kota Pekalongan.

Di sektor perikanan Kota Pekalongan memiliki beberapa potensi antara lain: 1) Fasilitas strategis skala nasional yaitu PPN Pekalongan; 2) Industri pengolahan perikanan (PT. Mayafood Industries, PT. Blue Sea Industries, PT. CNL); 3) Sarana prasarana perikanan tangkap (16 cold storage, 12 galangan dan docking kapal, 2 SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), 390-an unit kapal di atas 30 GT dengan pemilik berdomisili dan berpangkalan di PPN Pekalongan, 4.700-an orang, industri rumah tangga perbaikan jaring (tukang kiteng)). Kota Pekalongan juga pernah mengalami kejayaan perikanan tangkap pada tahun 1990-an.

Saat ini Kota Pekalongan masih berupaya untuk mengusulkan pembangunan pelabuhan perikanan *On Shore* untuk mengembalikan kejayaan perikanan tersebut.

2.7.4. Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman

Infrastruktur yang kuat dan andal adalah tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akses terhadap infrastruktur berkualitas tinggi, seperti transportasi, komunikasi, energi, dan air bersih, memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. *Sustainable Development Goals* (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 9, menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tahan lama, mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung inovasi.

Berdasarkan analisis permasalahan, belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan merupakan salah satu permasalahan yang mengakibatkan belum optimalnya kemandirian ekonomi daerah. Infrastruktur perkotaan dan permukiman harus didorong menjadi isu strategis karena perannya yang sangat penting sebagai faktor pengungkit daya tarik kota, keamanan kota, kenyamanan kota, produktivitas kota maupun keberlanjutan kota. Jika dianalisis lebih dalam, maka sebagai faktor penyebab infrastruktur perkotaan dan permukiman ditetapkan sebagai salah satu isu strategis, meliputi: 1) belum optimalnya kualitas dan kondisi jalan kota; 2) belum optimalnya penyediaan air minum, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas; 3) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sanitasi domestik; 4) belum optimalnya penyediaan sarana prasarana persampahan; 5) belum optimalnya kualitas sarpras pengendali banjir dan drainase kota; serta 6) belum optimalnya kondisi sarpras transportasi dan penanganan kemacetan.

Kota Pekalongan, seperti daerah maupun kawasan perkotaan lainnya, terus berkembang mengalami urbansasi (proses pengkotaan) akibat pertambahan jumlah penduduk maupun semakin tingginya fungsi pelayanan yang harus diembannya. Kota Pekalongan yang terletak pada posisi strategis dan peran sebagai PKW (pusat kegiatan wilayah) berimplikasi terhadap kebutuhan penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman yang semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang memadai, sangat berpengaruh terhadap peran pelayanan kota yang dijalankan. Penyediaan kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman di Kota Pekalongan selama ini masih dirasakan belum optimal karena kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman sangat menentukan kenyamanan warganya maupun menjadi daya tarik suatu kota. Berdasarkan penilaian Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) melalui penyusunan MLCI (*Most Livable City Index*). MLCI adalah sebuah penelitian terkait kota layak huni yang dikeluarkan oleh IAP. Berdasarkan MLCI tahun 2022, Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori yang memiliki skor rata-rata, di bawah Kota Tegal. Kota yang paling layak huni adalah Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Magelang dan Semarang.

Isu strategis infrastruktur perkotaan dan permukiman didasarkan dari data capaian, permasalahan, telaahan dokumen perencanaan, isu global, isu nasional, dan isu regional. Dari data capaian, pemenuhan penduduk yang terlayani air bersih masih rendah. Dari RTRW Kota Pekalongan diketahui permasalahan banjir masih menjadi pekerjaan yang secara terus menerus perlu dicarikan solusi. Dari analisis permasalahan ditemukan beberapa permasalahan seperti tingkat kemacetan, air bersih, sanitasi, drainase, *land subsidence*, dan rumah yang kurang layak. Isu strategis juga selaras dengan isu global yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; serta

Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Isu strategis juga selaras dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020), dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman disusun kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana. Kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa strategi sebagai berikut: 1). meningkatkan kualitas sistem dan sarana prasarana transportasi; 2). meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan energi listrik; 3). meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel; 4). meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air; 5). meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air minum; 6). meningkatkan kapasitas dan pelayanan sistem persampahan; 7). meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air limbah; dan 8). meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan drainase.

Rumusan isu strategis tersebut juga didasarkan atas penilaian kondisi bahwa berkembangnya perekonomian daerah juga didasarkan atas kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman. Kuantitas dan kualitas yang memadai, akan menjadi magnet daya tarik bagi kunjungan masyarakat dari daerah lain, semakin banyak kunjungan akan berimplikasi terhadap semakin berputarnya pergerakan ekonomi suatu daerah. Pada akhirnya, ketersediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang optimal dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi Kota Pekalongan, memiliki peran sebagai kota jasa maupun kota yang memiliki posisi strategis karena berada pada median Kota Surabaya dan DKI Jakarta, sehingga harus memanfaatkan keunggulan komparatifnya tersebut, yaitu dengan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman secara optimal.

Masalah daerah yaitu belum optimalnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman, jika diidentifikasi maka memiliki enam akar masalah, yaitu 1) belum adanya jalan lingkar sehingga menyebabkan bercampurnya kendaraan lokal dan regional; 2) cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan; 3) masih rendahnya kualitas sanitasi; 4) belum optimalnya sistem drainase kota, tingginya laju penurunan tanah (Land Subsidence), sarpras pengendali banjir dan rob kurang optimal (khususnya pada sisi Barat yaitu sistem Bremsi-Meduri); 5) masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung di lingkungan permukiman; dan 6) masih adanya kondisi rumah yang kurang layak. Wilayah Kota Pekalongan sangat dirasakan memiliki permasalahan lalu lintas yang sangat fundamental, yaitu bercampurnya lalu lintas lokal dan regional serta banyaknya perlintasan sebidang kereta api. Hingga saat ini, lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa. Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keselamatan, keamanan, ketertiban pengguna jalan, serta kebersihan dan kenyamanan kota terutama pada aspek tata ruang kota.

Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Dampak lainnya, terutama karena kendaraan berdimensi besar, maka sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya Jalan

Lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, utamanya kawasan perdagangan dan jasa. Optimalisasi kawasan perdagangan dan jasa diharapkan dapat semakin memperkuat peran sektor perdagangan dan jasa bagi perkembangan perekonomian Kota Pekalongan. Upaya memperkuat perekonomian juga dilakukan dengan membangun pusat pertumbuhan baru di wilayah kota Pekalongan, misalnya kawasan Pekalongan Baru. Diharapkan kawasan Pekalongan baru dapat berkembang menjadi kawasan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Akses pelayanan air minum juga belum optimal. Cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan. Jika pada tahun 2018, cakupan pelayanan air bersih sebesar 87,18%, maka terus menurun dan pada tahun 2022, cakupan pelayanan menjadi 66,90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pelayanan air minum belum optimal, bahkan mengalami penurunan cakupan. Tidak optimalnya cakupan pelayanan disebabkan keterbatasan air baku di wilayah Kota Pekalongan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomi masyarakat sehingga tidak mampu mengakses pelayanan air perpipaan (JP, jaringan perpipaan). Tantangan ke depan adalah bagaimana cakupan pelayanan ini dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Pekalongan dan dengan kualitas atau standar yang dipersyaratkan. Pemerintah Kota Pekalongan harus berkolaborasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah sekitar.

Sanitasi perkotaan yang berkualitas dapat berdampak secara langsung terhadap wajah suatu wilayah. Kota Pekalongan masih memiliki permasalahan terkait rendahnya kualitas sanitasi. Sesuai dengan ketentuan, cakupan sanitasi meliputi air limbah domestik, pengelolaan sampah dan drainase lingkungan. Ketercapaian ODF Kota Pekalongan tahun 2022 mencapai 100%. *Open Defecation Free* (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Namun demikian, untuk mencapai akses aman limbah domestik, masih dilakukan upaya yang signifikan.

Pengelolaan sampah di Kota Pekalongan masih menghadapi tantangan yang sangat berat, karena cakupannya dalam beberapa tahun terakhir justru semakin menurun dan pada tahun 2022 cakupannya hanya 72,36%. Kondisi ini diakibatkan produksi sampah yang semakin meningkat, namun kapasitas pengelolaan yang semakin menurun.

Kondisi drainase lingkungan pun juga masih membutuhkan upaya signifikan untuk merehabilitasi. Drainase sekunder hanya 57,41% yang memiliki kondisi baik pada tahun 2022. Kondisi ini berimplikasi tidak terkelolanya limpasan air hujan (*run off*) dengan baik, sehingga memiliki risiko sangat tinggi terjadinya banjir maupun genangan air. Secara umum sistem drainase dan sarpras pengendali banjir masih membutuhkan upaya yang sangat signifikan, tentunya dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan wilayah yang masih memiliki risiko tergenang banjir dan rob adalah 21,11% pada tahun 2022. Ancaman banjir dan rob, masih sangat tinggi karena proses penurunan tanah (*land subsidence*) yang masif. Dari beberapa lokasi titik kontrol pengukuran, ancaman penurunan tanah di Kota Pekalongan masih sangat serius. Dibutuhkan upaya yang signifikan dan membutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kota Pekalongan.

Pengendalian banjir dan rob sampai dengan 2024 telah tertangani pada sisi timur Kota Pekalongan (sungai Loji dan sungai Banger). Sedangkan pada sisi barat perlu penanganan untuk menanggulangi permasalahan banjir dan rob pada wilayah sepanjang sungai Bremsi dan

sungai Meduri yang dampaknya sudah meluas pada sisi selatan jalan Pantura. Sesuai *detail engineering design* (DED) yang telah dibuat oleh Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, pada muara sungai Brengi dan Meduri perlu ditutup dan dibangun pintu pengendali banjir, tanggul sungai dan stasiun pompa sehingga akan mengurangi dampak banjir dan rob secara signifikan pada sisi barat Kota Pekalongan. Kemudian pada tahun 2023, AMDAL disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wajah Kota Pekalongan bertambah berat karena masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung di lingkungan permukiman. Seperti di sepanjang sempadan sungai masih terbentuk tata letak bangunan yang mengikuti sempadan. Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (persen) pada tahun 2021 hanya mencapai 1,97%. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya prasarana lingkungan yang berkualitas, seperti jalan dan drainase lingkungan yang buruk.

Permasalahan lain yang dihadapi Kota Pekalongan adalah masih adanya kondisi rumah yang kurang / tidak layak huni. Pada tahun 2023 menunjukkan masih terdapat 1,24% rumah tidak layak huni. Kekurangan penyediaan perumahan dan permukiman pun juga masih signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah KK di Pekalongan Tahun 2022 yaitu 77.940 KK, *backlog* kepemilikan tahun 2022 sejumlah 22.699 KK.

Kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang tinggi menjadi tantangan pembangunan ke depan yang sangat signifikan. Kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang handal sangat berdampak terhadap kinerja aspek lainnya dalam pengelolaan kota. Wajah kota yang menarik dapat menjadi daya tarik suatu kota sehingga menjadi *pull factor* kunjungan dari wilayah lain, sehingga dapat mempercepat pergerakan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, penataan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman menjadi kebutuhan nyata bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan.

2.7.5. Kondusivitas Wilayah

Berdasarkan analisis permasalahan, kondusivitas wilayah Kota Pekalongan belum berperan optimal dalam mendukung investasi. Investasi berperan penting dalam perwujudan kemandirian ekonomi daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan lain, kondusivitas wilayah didorong menjadi salah satu isu strategis daerah karena sangat berpotensi mendorong terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum, yaitu mewujudkan keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat. Fakta di lapangan menyatakan urgensi kondusivitas wilayah karena masih adanya konflik di masyarakat serta masih adanya pelanggaran Perda di masyarakat.

Suasana nyaman dan kondusif menjadi syarat utama dalam kemajuan pembangunan di suatu daerah, karena menjadi syarat untuk investasi swasta masuk dan ikut memajukan perekonomian. Dalam membangun daerah dibutuhkan suasana yang aman nyaman. Konflik sosial dan kejahatan akan menyebabkan investor enggan berinvestasi. Oleh karena itu, kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting pembangunan. Pemerintah tidak akan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan tanpa adanya kerjasama yang sinergis antara semua *stakeholder* (pemangku kepentingan).

Pengelolaan potensi konflik sosial dan kejahatan harus terus dilakukan melalui berbagai program dengan melibatkan sinergi stakeholder. Upaya preventif salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan keagamaan dan pengembangan kebiasaan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Pendekatan keagamaan sering kali menjadi titik fokus untuk meredakan konflik. Pemimpin agama dan kelompok keagamaan menjadi media pemersatu perbedaan dan mengajak masyarakat untuk hidup harmonis. Agama menjadi landasan moral dan etika

yang mengarahkan masyarakat untuk berperilaku baik dan berkontribusi positif dalam pembangunan. Sementara itu, pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis agar dapat memfilter dan mengevaluasi informasi dari media maupun yang beredar di masyarakat juga merupakan upaya preventif dalam mewujudkan kondisivitas wilayah.

Penataan pedagang kaki lima yang belum optimal, karena munculnya pasar musiman (pasar tiban) di beberapa tempat membutuhkan kebijakan yang saling menguntungkan, antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Penegakan hukum yang bersifat persuasif dalam penataan pedagang kaki lima sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

Dikaitkan dengan isu nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dalam Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, khususnya pada arah kebijakan ke-13 yaitu “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju”, isu kerukunan umat beragama menjadi isu nasional yang harus terus menjadi perhatian.

6 Isu strategis kualitas lingkungan hidup harus didorong karena merupakan salah satu faktor yang menentukan belum optimalnya kemandirian ekonomi daerah. Berdasarkan analisis permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang dianggap penting bagi perkembangan perekonomian Kota Pekalongan. Dengan kata lain bahwa lingkungan hidup memiliki korelasi yang signifikan dengan perkembangan perekonomian daerah. Urgensi isu strategis kualitas lingkungan hidup didasarkan atas beberapa fakta, meliputi: 1) belum optimalnya penanganan limbah cair; 2) terbatasnya lahan ruang terbuka hijau; 3) belum optimalnya upaya pengurangan sampah dari hulu; serta 4) belum optimalnya perencanaan dan antisipasi risiko bencana daerah.

Isu strategis kualitas lingkungan hidup dirumuskan didasarkan atas fakta bahwa kualitas lingkungan hidup, sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting dan merupakan kebutuhan pokok masyarakatnya. Urgensi perumusan isu strategis ini adalah karena kondisi menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Lingkungan hidup adalah sebuah sistem yang harus mendukung sistem yang lain, yaitu sistem ekonomi, sistem sosial budaya maupun sistem lainnya. Menjadi kebutuhan bagi proses sistem lainnya, sistem lingkungan hidup harus mampu mendukung proses sistem yang lain. Proses produksi, yang merupakan bagian dari sistem perekonomian, membutuhkan faktor produksi, termasuk ketersediaan sumberdaya alam, termasuk lingkungan hidup. Jika kualitas lingkungan hidup rendah, dapat berimplikasi tidak dapat mendukung proses produksi maupun sistem-sistem yang lain. Oleh karena itu, pembangunan mutlak membutuhkan lingkungan hidup yang berkualitas agar mendukung terwujudnya visi pembangunan.

Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah melakukan berbagai upaya, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, agar kualitas lingkungan hidup tidak semakin menurun. Dari sisi ukuran kualitas lingkungan hidup, yaitu IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), capaian beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 memiliki capaian 54,36. Namun demikian, capaian tersebut belum menunjukkan kualitas lingkungan hidup yang mampu menopang daya dukung yang optimal. Perumusan isu strategis peningkatan kualitas lingkungan hidup, didasarkan atas masalah pembangunan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup. Masalah penurunan kualitas lingkungan hidup, dapat diidentifikasi lebih lanjut akar masalahnya, meliputi: 1) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup; 2) masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair; 3) overloadnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari

sumbernya; 4) rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan 5) rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020), dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup disusun kebijakan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung. Kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu: 1). menetapkan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan yang berfungsi lindung; 2). menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana; 3). Melestarikan kawasan cagar budaya; dan 4). mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota termasuk menata alun-alun dan taman kota lainnya.. Kebijakan lain yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung Kawasan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui beberapa strategi yaitu: 1). mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2). mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian untuk mendukung kelestarian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; 3). mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan permukiman di koridor-koridor utama kota; 4). mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal; 5). mengembangkan kawasan pantai yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perwujudan kawasan minapolitan; dan 6). mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.

Keberlanjutan lingkungan hidup menentukan keberlanjutan pembangunan maupun perikehidupan manusia. Lingkungan hidup memiliki kemampuan daya dukung maupun daya tampung terhadap seluruh kehidupan makhluk hidup di atasnya. Dalam beberapa proses KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang telah dilakukan terhadap proses penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang, sebagian besar aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah dilampauinya. Kondisi tersebut tidak disadari oleh sebagian masyarakat, masih ada anggapan bahwa lingkungan hidup masih baik-baik saja sehingga proses produksi maupun perikehidupan lainnya, tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan lingkungan hidup memiliki batas toleransi.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup masih banyak ditemui. Masyarakat masih banyak ditemui membuang sampah pada badan air ataupun tempat yang tidak semestinya. Mengambil air tanah tanpa izin. Termasuk juga sebagian besar industri masih membuang limbah langsung ke alam, tanpa melakukan proses pengolahan limbah. Wujud dari kesadaran yang masih rendah tersebut adalah masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair di Kota Pekalongan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya pencemaran tersebut tidak bersumber semuanya dari Kota Pekalongan, tetapi juga berasal dari wilayah lain.

Wujud lain kesadaran masyarakat dan pengelolaan yang belum optimal adalah overloadnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya. Capaian sampah terkelola di TPS3R, bank sampah dan sodaqoh sampah pada tahun 2022 adalah sebesar 17,55% sehingga persentase sampah yang terangkut ke TPA masih cukup tinggi, yaitu 75,17%. Dengan semakin tingginya volume sampah yang diangkut ke TPA maka TPA Degayu mengalami overload. Upaya sistemik untuk merubah sistem pengelolaan sampah adalah dengan mengefektifkan olah dan pilah sampah, serta meningkatkan ekonomi sirkular sampah.

Akar masalah lainnya yang sangat mendasar dan dapat diidentifikasi adalah rendahnya luasan ruang terbuka hijau (RTH). Dari gambaran citra satelit wilayah Kota Pekalongan, dapat diidentifikasi bahwa tutupan lahan wilayah Kota Pekalongan sangat rendah. Dari identifikasi langsung lapangan, dapat diketahui bahwa masih terbatas tutupan lahan maupun vegetasi di wilayah Kota Pekalongan. Dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, RTH (rencana tata ruang) eksisting sesuai RTRW saat ini adalah 4,73% dari luas wilayah. Sesuai RTRW, sampai 2029 RTH yang harus dialokasikan adalah sebesar 13,04%. Idealnya sebuah kota memiliki 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Tantangan untuk menambah RTH cukup berat karena keterbatasan lahan, padahal RTH sangat dibutuhkan. RTH berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH dapat menyerap karbondioksida (CO₂), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air.

Penyebab kualitas lingkungan hidup yang rendah lainnya adalah rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan. Rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan adalah akibat proses produksi dan kegiatan domestik (rumah tangga) yang tidak memperhatikan lingkungan hidup. Pada umumnya limbah proses produksi dan limbah domestik dibuang ke alam, tanpa melalui proses pengolahan. Dalam kadar tertentu, alam mampu menetralkan berbagai limbah tersebut, namun ketika melampaui daya dukung dan daya tampungnya, maka limbah proses produksi maupun limbah domestik tersebut membebani lingkungan hidup, terjadilah pencemaran lingkungan hidup, serta wujudnya dapat berupa rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan. Tanpa diikuti dengan kesadaran masyarakat, jika limbah proses produksi maupun limbah domestik semakin besar maka akan berdampak kualitas air tanah dan air permukaan yang semakin memburuk. Apalagi kondisi geologi/tanah merupakan hasil sedimentasi sehingga memiliki sifat yang berbeda. Tantangan untuk mengembalikan kualitas lingkungan hidup, khususnya kualitas air tanah dan air permukaan, membutuhkan upaya sistemik, partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta membutuhkan proses yang lama dan kontinyu karena lingkungan hidup memiliki sifat ireversibel, yaitu tidak dapat diubah atau membutuhkan waktu yang relatif sangat lama.

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan landasan untuk pengembangan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang lebih berkualitas. Tatanan masyarakat yang aman, nyaman dan sehat tidak bisa diwujudkan tanpa dilandasi kualitas lingkungan hidup yang optimal. Menjadi pekerjaan rumah besar Kota Pekalongan ke depan, adalah bagaimana menjaga agar kualitas lingkungan hidup tidak bertambah turun, padahal di sisi sistem ekonomi harus mewujudkan perwujudan nilai tambah yang optimal. Oleh karena itu, karena adanya timbal balik tersebut, pengembangan sistem ekonomi ke depan harus disesuaikan dengan upaya untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan. Beberapa pilihannya adalah pengembangan ekonomi hijau berbasis potensi lokal Kota Pekalongan.

Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai kewajiban untuk mendukung kebijakan nasional berupa pengembangan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dengan melihat potensi sinar matahari sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat dikembangkan pada stasiun pompa pengendali banjir yang berada di sisi utara dan barat Kota Pekalongan, perkantoran, penerangan jalan umum dan ruang terbuka.

2.7.6. Kelestarian budaya lokal

Berdasarkan analisis permasalahan yang dilakukan maka belum optimalnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal berimplikasi terhadap belum optimalnya kemandirian ekonomi daerah. Terdapat hubungan yang signifikan bahwa kelestarian

budaya lokal harus diangkat menjadi isu strategis karena pelestarian dan pengembangan budaya lokal Kota Pekalongan memiliki korelasi yang signifikan dengan kemandirian atau perkembangan ekonomi daerah, sehingga juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal Kota Pekalongan, didasarkan atas fakta bahwa; 1) belum optimalnya pembinaan stakeholder budaya dalam sinergi pelestarian budaya lokal; serta 2) Belum optimalnya upaya pelestarian cagar budaya.

Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal tersebut bisa berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Melestarikan budaya lokal menjadi penting untuk mencegah hilangnya identitas dan kekayaan budaya yang tak ternilai. Budaya lokal merupakan sumber daya berharga bagi pembangunan berkelanjutan, karena menawarkan solusi berbasis kearifan lokal. Isu strategis kelestarian budaya lokal didasarkan pada permasalahan belum optimalnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Kota Pekalongan dikenal sebagai salah satu pusat batik terbesar di Indonesia, dengan warisan budaya yang kaya dan beragam. Budaya Pekalongan tidak hanya tercermin dalam seni batik, tetapi juga dalam tradisi, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sejarah batik di Pekalongan dimulai sejak zaman kerajaan, di mana batik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Batik Pekalongan memiliki ciri khas yang membedakannya dari batik daerah lain, yaitu motif yang lebih beragam dan warna yang cerah. Misalnya, batik “Kawung” dan “Mega Mendung” adalah contoh motif yang sangat terkenal. Masyarakat Pekalongan terus melestarikan seni batik ini dengan mengajarkan keterampilan membatik kepada generasi muda, sehingga tradisi ini tetap hidup hingga sekarang. Setiap tahun, Kota Pekalongan mengadakan berbagai festival budaya dan kesenian untuk merayakan kekayaan budaya lokal. Salah satu festival yang paling dinantikan adalah Festival Batik. Masyarakat Pekalongan memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Komunitas di Kota Pekalongan memainkan peran penting dalam pelestarian budaya. Banyak kelompok seni dan komunitas batik yang aktif mengadakan pelatihan dan workshop untuk masyarakat. Sekolah dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan telah memasukkan pembelajaran batik ke dalam kurikulum mereka. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap budaya lokal sejak dini kepada anak-anak. Dengan adanya dukungan dari komunitas, budaya Pekalongan dapat terus berkembang dan dikenali oleh generasi berikutnya.

Namun demikian, seluruh hal yang telah dilakukan tersebut di atas, belum mampu melestarikan dan mengembangkan budaya lokal lebih optimal. Dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam rangka pelestarian budaya lokal Pekalongan. Salah satu hal yang akan terus dikembangkan yaitu melakukan harmonisasi agar upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.7.7. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi gambaran dari keberhasilan pemerintah dalam membangun perekonomian sebuah negara. Perekonomian suatu negara sejatinya selalu mengalami perubahan di setiap tahunnya karena adanya kegiatan perekonomian yang berlangsung serta diupayakan semakin meningkat dari periode sebelumnya. Keberhasilan suatu negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dilihat dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh yang digambarkan dari laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Semakin besar pendapatan yang diperoleh juga akan menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat pendapatan suatu negara juga akan menunjukkan bagaimana kondisi serta tingkat pertumbuhan ekonominya. Pada dasarnya, manfaat dari adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selamanya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia kerap mengalami berbagai masalah dari ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi seperti adanya kesenjangan pendapatan yang tinggi antar masyarakatnya yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat sehingga akan berpengaruh pula pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Isu strategis kesejahteraan masyarakat harus diangkat karena merupakan upaya sistematis yang ditujukan agar kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan dapat meningkat terus menerus secara optimal. Beberapa permasalahan, urgensi perlu didorongnya isu strategis kesejahteraan masyarakat ini, meliputi: 1) masih tingginya populasi PPKS fakir miskin; 2) belum optimalnya upaya penurunan angka pengangguran terbuka; 3) belum optimalnya pemenuhan layanan berperspektif gender termasuk pada warga masyarakat berkebutuhan khusus; serta 4) belum optimalnya jaminan hak dan perlindungan anak.

Upaya peningkatan kesejahteraan, khususnya kemiskinan perlu dilakukan melalui berbagai sektor, seperti pendidikan (berupa peningkatan rata-rata sekolah), sektor kesehatan (berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat), ataupun melalui sektor ekonomi (berupa peningkatan keterampilan bekerja dan berusaha, ataupun akses permodalan usaha).

Isu strategis kesejahteraan masyarakat selaras dengan isu global pembangunan berkelanjutan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender, memberdayakan kaum perempuan dan pemenuhan hak anak.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya perwujudan GESI (*Gender Equity Social Inclusion*). Kesetaraan gender dan inklusi sosial merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan. Jika kita ingin memastikan bahwa prosesnya adil dan manfaatnya menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan, proses pembangunan harus didasari oleh suara-suara yang beragam. Salah satu ukuran yang digunakan adalah IDG dan IPG. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2021, nilai IDG Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2018, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 68,82, kemudian terus menurun sampai tahun 2021 menjadi 57,87. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat hingga di angka 61,37. IDG Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan IDG Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian

kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG. Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2018-2021 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,32 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Tantangan ke depan adalah mengoptimalkan IDG dan terwujudnya inklusi sosial yang lebih bermakna. Pembangunan tidak hanya ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya, tetapi juga kelompok-kelompok marginal, sehingga pembangunan ditujukan untuk seluruh masyarakat.

Akar masalah lainnya, penyebab kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang belum optimal adalah belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan dan pengangguran (TPT, tingkat pengangguran terbuka) adalah dua dari enam indikator kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah. Angka kemiskinan Kota Pekalongan sudah menunjukkan kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun, kecuali pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021. Angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2023 adalah 6,81%. Namun demikian penurunan angka kemiskinan tersebut belum optimal. Penurunan angka kemiskinan pada angka satu digit akan mengalami tantangan yang lebih besar karena harus berhadapan dengan kemiskinan struktural, apalagi angka kemiskinan telah mencapai 6,81%. Upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat strategi-strategi yang selama ini telah dilakukan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial budaya masyarakat, cara pandang maupun perilaku masyarakat miskin. Sementara TPT Kota Pekalongan juga belum menunjukkan kecenderungan penurunan, masih berfluktuasi, serta tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan angka pertumbuhan ekonomi. Secara teori, pertumbuhan ekonomi akan berdampak bagi penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, sehingga pada gilirannya akan menurunkan TPT. Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, seperti halnya penanganan kemiskinan, upaya optimalisasi penurunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kota Pekalongan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan dinamika perekonomian global, ekonomi Indonesia triwulan III-2024 mampu tumbuh sebesar 4,95 persen (y-on-y). Pertumbuhan tersebut lebih rendah jika dibandingkan pada triwulan III-2023 sebesar 5,04 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 11,69 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen; Komponen PMTB sebesar 5,15 persen; Komponen PK-RT sebesar 4,91 persen; dan Komponen PK-P sebesar 4,62 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 11,47 persen. Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 mencatat kelompok provinsi di Pulau Jawa masih dominan dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 56,84 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,30 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen, Pulau Sulawesi sebesar 7,23 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,82 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,66 persen.

Kinerja ekonomi yang solid hingga triwulan III-2024 ditandai dengan pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% dengan kontribusi 53,08% PDB. Konsumsi masih tumbuh kuat seiring implementasi bauran kebijakan untuk menjaga daya beli. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5,15% dengan kontribusi sebesar 29,75%, didorong investasi pemerintah dan swasta khususnya lewat pembangunan infrastruktur. Beberapa sektor usaha tumbuh pesat seperti sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai 8,64% sejalan peningkatan jumlah penumpang dan pengiriman barang, serta sektor makanan dan minuman 8,33% seiring meningkatnya aktivitas wisata dan bisnis. Pertumbuhan ekonomi juga diiringi dengan berkurangnya tingkat pengangguran. Tercatat jumlah penduduk yang bekerja bertambah 4,79 juta menjadi 144,64 juta orang dibandingkan Agustus tahun 2023. Sementara angka pengangguran berkurang 0,39 juta orang menjadi 7,47 juta orang.

Situasi ekonomi global juga memengaruhi ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen, pertumbuhan ini sama dengan capaian triwulan III-2023 yang juga tumbuh sebesar 4,93 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,23 persen; Jasa Pendidikan sebesar 8,97 persen; Konstruksi sebesar 8,81 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 8,63 persen. Selanjutnya, lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 2,72 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 2,06 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,30 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif relatif besar diantaranya Transportasi dan Pergudangan

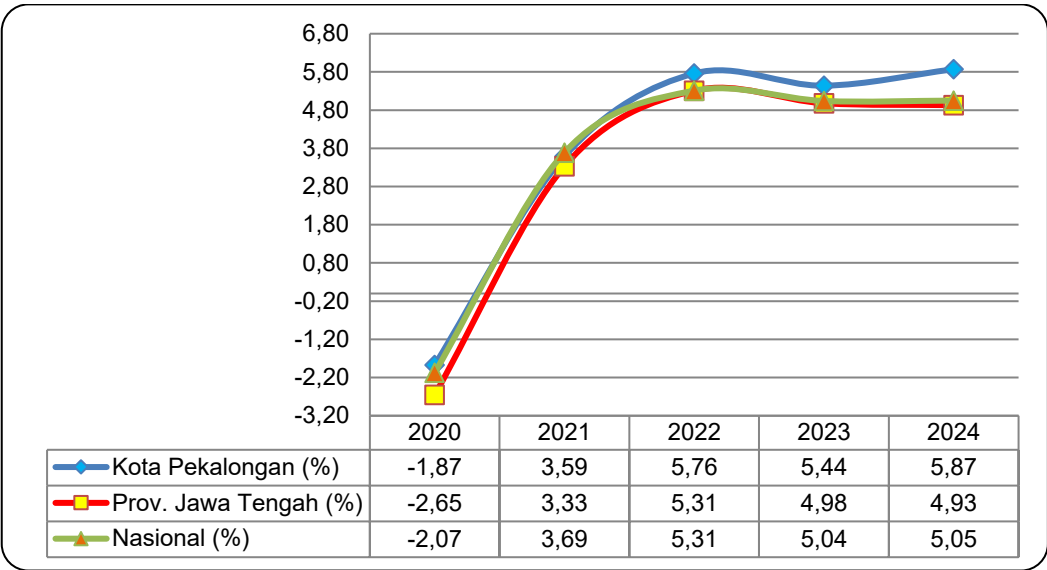
sebesar 8,49 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,17 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,02 persen; Jasa Lainnya sebesar 7,36 persen.

Kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut memengaruhi kondisi ekonomi Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu COVID-19 yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami perlambatan sehingga menjadi 5,44 persen dan tumbuh kembali menjadi 5,87 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh.

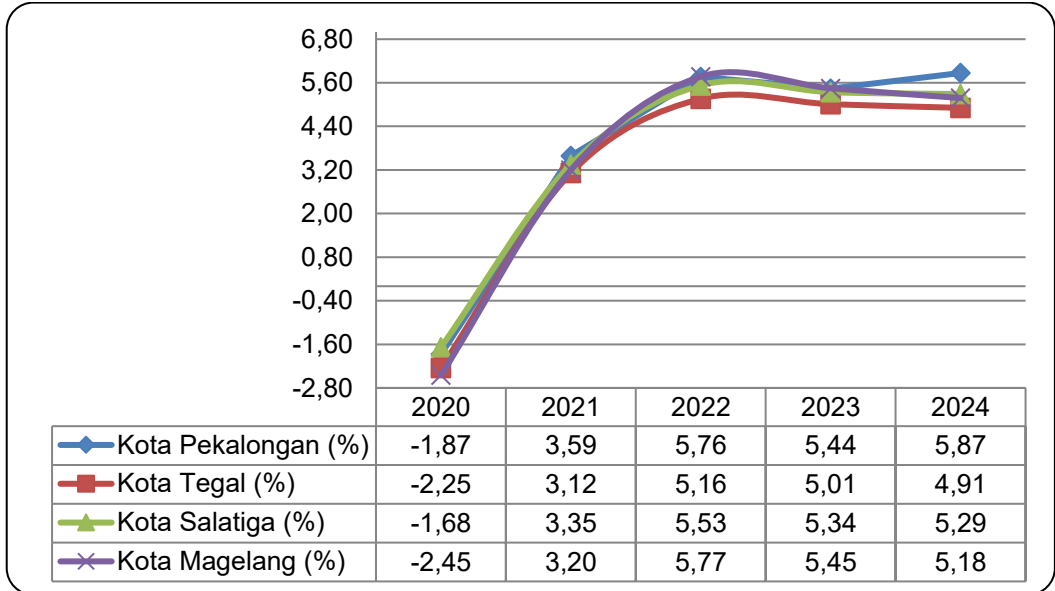


Gambar III-1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan
Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: www.jateng.bps.go.id (diolah), 2025

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan

ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan Kota Tegal dan Kota Salatiga, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang. Sementara pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan dengan kota setara. Selengkapnya disajikan dalam Gambar III-2 berikut.



Gambar III-2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2020-2024

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2025

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2019-2023. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2024, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,76 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,86 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,84 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel III-1 berikut.

Tabel III-1
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan
Tahun 2020-2024 (persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,09	4,79	4,71	4,48	4,57
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,34	21,15	20,83	20,44	19,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi	14,54	15,46	15,12	15,64	15,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,38	21,59	21,10	21,05	20,76
H	Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,06	7,28	7,79	7,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,31	5,36	5,57	5,84	6,38
J	Informasi dan Komunikasi	5,13	5,07	4,75	4,74	4,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,21	6,22	6,15	5,93	5,69
L	Real Estat	2,73	2,66	2,58	2,54	2,55
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,42	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,49	4,17	3,94	3,72	3,66
P	Jasa Pendidikan	4,72	4,54	4,16	4,06	4,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,44	1,40	1,33	1,30	1,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,90	1,83	1,82	1,80	1,88
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2025, 2025

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2020 hingga 2024 cenderung meningkat. Pada Tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,32 juta rupiah. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 37,17 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 40,65 juta rupiah pada tahun 2022, 43,29 juta rupiah pada tahun 2023 dan 45,99 juta rupiah di tahun 2024. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel III-2
Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita
Kota Pekalongan tahun 2020-2024

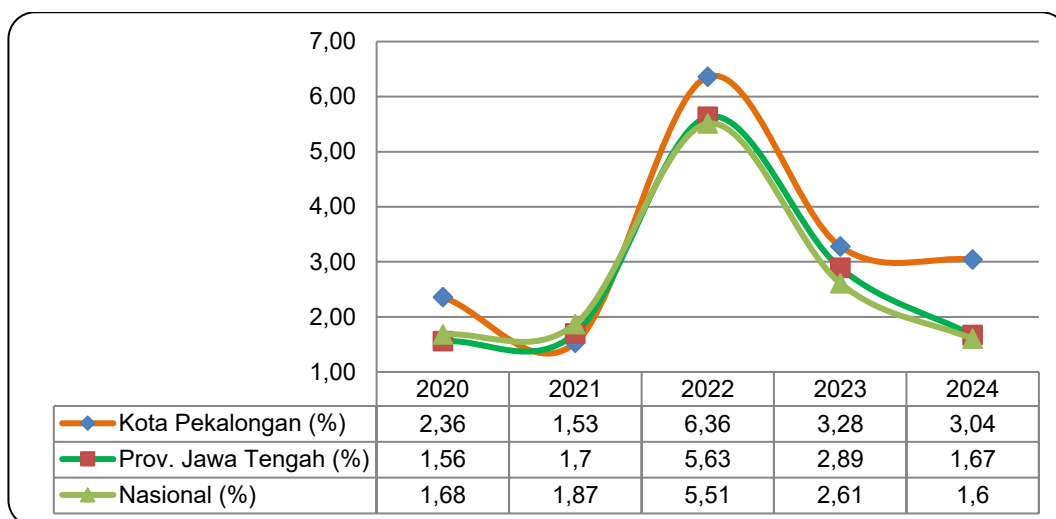
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,05	14.766,95
- ADHK (Miliar Rp)	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55	8.928,80
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	35,32	37,17	40,65	43,29	45,99
- ADHK (Juta Rp)	23,89	24,66	25,96	26,70	27,81
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	-0,25	5,24	9,43	6,48	6,25
- ADHK (persen)	-1,88	3,20	5,27	2,85	4,16

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2025

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2020-2024, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

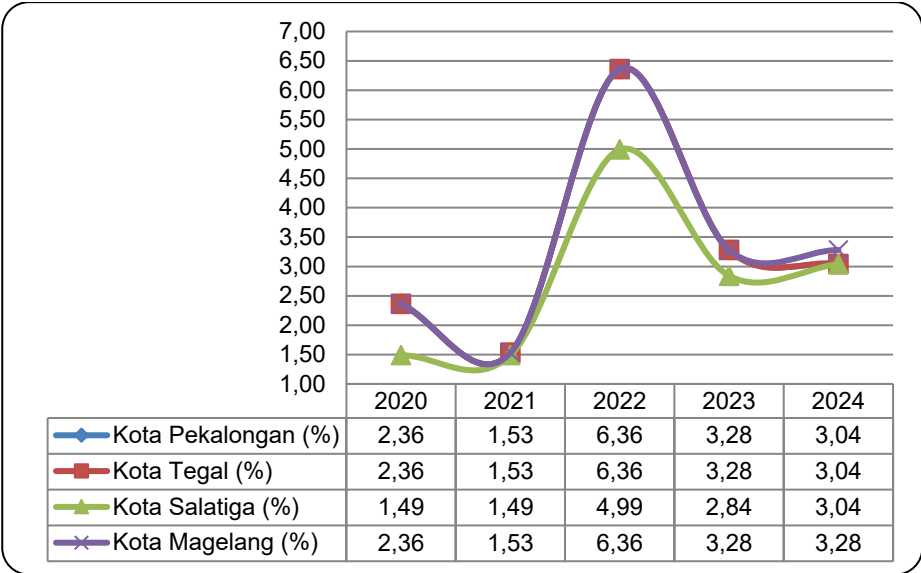
Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar III-3 berikut.



Gambar III-3
Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional
Tahun 2020-2024

Sumber: www.bps.go.id, 2025

Mulai tahun 2019 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap dan Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



Gambar III-4
Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara
Tahun 2020-2024

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2025

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun 2020 sama dengan Kota Tegal dan Magelang, berada di urutan tertinggi yaitu 2,36%. dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 1,49%. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36%, dan Kota Salatiga menjadi 4,99%. Pada tahun 2023 laju inflasi kembali menurun menjadi 3,28% untuk Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang, serta 2,84% untuk Kota Salatiga. Tahun 2024 Kota Pekalongan dan Kota Tegal kembali turun diangka 3,04, Kota Salatiga naik menjadi 3,04 dan Kota Magelang Stagnan diangka 3,28.

Menurut kelompok pengeluaran, Inflasi tahun 2024 di Kota Pekalongan memperlihatkan tekanan terbesar pada sektor jasa makanan, kelompok pengeluaran umum, dan sandang. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran mencatat inflasi tertinggi pada 2024, melonjak dari 1,01% pada 2023 menjadi 5,46%. Fenomena ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi turut mendorong permintaan di sektor ini, namun juga menjadi perhatian karena dapat menambah beban pengeluaran masyarakat kelas menengah dan bawah. Kelompok pengeluaran umum mengalami kenaikan yang sangat mencolok dari 3,04% pada 2023 menjadi 5,51% pada 2024, hal ini mengindikasikan adanya kenaikan harga pada berbagai kebutuhan dasar dan jasa yang tidak termasuk dalam kategori spesifik lain. Selengkapnya Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III-3
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96	7,89	2,19
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45	0,51	2,99
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47	1,30	0,34
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89	0,40	1,45
Kesehatan	2,87	0,55	2,50	2,78	0,60
Transportasi	1,36	1,01	16,42	-0,69	1,18
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74	0,03	1,18
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50	0,74	-0,90
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21	5,50	0,28
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81	1,01	5,46
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64	3,39	0,27
Umum	2,32	1,53	6,31	3,04	5,51

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 4,7-5,5%, turun dari estimasi awal 4,8-5,6%. Ada tiga faktor utama yang memengaruhi proyeksi tersebut. *Pertama*, kinerja ekspor melemah. Permintaan dari negara mitra dagang utama, kecuali Amerika Serikat, mengalami penurunan. *Kedua*, konsumsi rumah tangga melemah. Konsumsi rumah tangga, terutama dari golongan menengah ke bawah, masih tertekan akibat rendahnya ekspektasi penghasilan dan terbatasnya lapangan kerja. *Ketiga*, investasi swasta belum optimal. Kapasitas produksi yang masih mencukupi kebutuhan domestik dan ekspor membuat dorongan investasi swasta belum signifikan.

Prospek pertumbuhan ekonomi global saat ini dibayangi ketidakpastian. Dalam World Economic Forum (WEO) bulan April 2025, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,8% pada 2025 dan 3,0% pada 2026. Proyeksi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan proyeksi pada Januari 2025. Proyeksi angka pertumbuhan ekonomi turun 0,5 poin pada 2025 dan 0,3 poin pada 2026.

Perlambatan ekonomi yang melanda negara-negara maju seperti Amerika Serikat, kawasan Eropa, dan Tiongkok menjadi sorotan utama dalam dinamika ekonomi global saat ini. Pertumbuhan yang melemah di negara-negara tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai

dari kebijakan moneter ketat, ketegangan geopolitik yang berkepanjangan, hingga gangguan rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Perlambatan ekonomi di negara-negara maju tersebut memiliki potensi untuk memberikan dampak terhadap negara berkembang melalui beberapa jalur utama.

Pertama, penurunan permintaan dari negara maju dapat mengurangi volume ekspor Indonesia, yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kedua, sentimen global yang memburuk dan meningkatnya risiko dapat mengurangi aliran investasi asing langsung dan investasi portofolio ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketiga, volatilitas pasar keuangan global dapat meningkat, yang dapat mempengaruhi nilai tukar Rupiah dan stabilitas sistem keuangan domestik. (sumber : <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/strategi-jitu-pemerintah-jaga-ekonomi-di-tengah-guncangan-global-2025>)

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

- 1) Ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 5,02 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2024, diantaranya ditopang oleh inflasi dan tingkat suku bunga yang tetap terkendali. Kinerja ekonomi yang solid hingga triwulan III-2024 ditandai dengan pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% dengan kontribusi 53,08% PDB. Konsumsi masih tumbuh kuat seiring implementasi bauran kebijakan untuk menjaga daya beli. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5,15% dengan kontribusi sebesar 29,75%, didorong investasi pemerintah dan swasta khususnya lewat pembangunan infrastruktur.
- 2) Kinerja APBN 2024 menunjukkan stabilitas makro Kinerja APBN 2024 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di 5 persen, defisit APBN yang terjaga dan pendapatan negara yang mencapai target. Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 mencapai 5% (YoY) atau lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi 2024 terdiri dari: pada kuartal I/2024 mencapai 5,11%, kuartal II/2024 mencapai 5,05%, kuartal III mencapai 4,95%, dan kuartal IV diestimasikan ada di sekitar 5%. Sehingga untuk keseluruhan tahun, pertumbuhan Indonesia diperkirakan masih di 5%. Defisit APBN sepanjang 2024 mencapai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari capaian tahun sebelumnya atau 2023 yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB. Sejak awal, defisit APBN 2024 memang didesain 2,29% terhadap PDB. Defisit APBN masih sesuai target dan di bawah batas maksimal 3%. Sempat terdapat risiko pelebaran defisit mendekati batas maksimal, tetapi risikonya mereda pada paruh kedua tahun 2024. Pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun selama 2024. Realisasi tersebut setara 101,4% dari asumsi APBN 2024 dan outlook Laporan Semester I/2024 yaitu sebesar Rp2.802,5 triliun. Jika dibandingkan dengan pendapatan negara 2023 sebesar Rp2.783,9 triliun maka realisasi 2024 tumbuh sebesar 2,1%. Pendapatan negara tersebut berasal dari tiga sumber. Pertama, penerimaan perpajakan yang terdiri dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Untuk realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun atau hanya mencapai 97,2% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun. Realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,2 triliun atau hanya mencapai 93,5% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp321 triliun. Kedua, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp579,5 triliun atau setara 117,8% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp492 triliun. Ketiga, realisasi hibah yang mencapai Rp34,9 triliun atau setara 7.033,5% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp 0,4 triliun. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara bisa mencapai asumsi APBN 2024 karena realisasi PNBP dan hibah yang melebihi target. Sementara itu, meski

penerimaan perpajakan memberi kontribusi terbesar, tetapi tidak mencapai target asumsi APBN 2024.

- 3) Pada awal 2025 ini, Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) ke level 5,75%. Keputusan menurunkan BI rate 5,75% ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Sasaran lainnya adalah terjaganya nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental untuk pengendalian inflasi dengan sasarannya dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. BI akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya, serta menstabilkan nilai tukar sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi baik global maupun nasional. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, melalui penguatan strategi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.
- 4) Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 berada di rentang 4,7-5,5 persen, sedikit di bawah proyeksi sebelumnya 4,8-5,6 persen, namun tetap menggambarkan prospek yang cerah bagi ekonomi nasional. Perkiraan ini didasarkan pertimbangan bahwa ekspor juga diprediksi lebih rendah sehubungan dengan permintaan negara-negara mitra dagang utama yang melambat, kecuali Amerika Serikat (AS). Selain itu, konsumsi rumah tangga juga masih lemah, terutama golongan menengah ke bawah, karena ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja belum kuat. Pada saat yang sama, dorongan investasi swasta turut belum kuat mengingat masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan domestik maupun ekspor. Dalam kaitan ini, BI, katanya, terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah. Bank Indonesia mendukung penuh implementasi program-program pemerintah dalam Astacita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.
- 5) BI akan terus menambah likuiditas perbankan mengingat proyeksi pertumbuhan kredit yang masih tinggi. BI akan terus menyediakan kebijakan insentif likuiditas, terutama bagi bank yang menyalurkan kredit di sektor-sektor prioritas. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) pada Desember 2024 juga masih tinggi, yaitu mencapai 25,59%, menunjukkan bahwa perbankan mampu menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit yang sehat.
- 6) Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2024 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi IHK Desember 2024 sebesar 0,44% (mtm) sehingga secara tahunan inflasi IHK 2024 menjadi 1,57% (yoy). Inflasi domestik menunjukkan tren penurunan dan masih berada pada rentang target inflasi nasional 2024. Pada tahun 2025, inflasi dipatok dan optimis masih pada rentang 2,5% ± 1%.

- 7) Perjalanan internasional global terus menunjukkan kinerja yang positif, didorong oleh pemulihan perjalanan yang kuat di sebagian besar wilayah di dunia. Indonesia menerima kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 11,67 juta orang sepanjang tahun 2023. Ini merupakan peningkatan 98,2% dari tahun 2022, tetapi masih lebih rendah dari total kunjungan sebelum pandemi pada tahun 2019, yang mencapai 16,11 juta kunjungan. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbarunya mencatat, pada November 2024 jumlah kunjungan wisman mencapai 1,09 juta kunjungan. Jika ditotal sepanjang Januari hingga November 2024, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 12,66 juta kunjungan atau naik 20,17 persen dibanding periode yang sama pada 2023. Laporan yang dimuat laman *Euronews* terdapat beberapa perilaku baru yang diyakini akan menjadi tren para pelancong di tahun mendatang. Salah satunya adalah soal gender pelaku perjalanan. Diprediksi, jumlah solo pelancong pria akan meningkat hingga 30%. Jumlah tersebut lebih tinggi ketimbang pelaku perjalanan tunggu wanita yang diprediksi sekitar 23%. Sementara itu terkait dengan perilaku dan tujuan wisata, kalau selama ini wisatawan lebih cenderung pelesir karena FOMO (*fear of missing out*) ke tempat-tempat yang viral, tahun depan diprediksi sebaliknya. Mereka akan lebih memilih untuk mengunjungi destinasi yang lebih sepi dan menawarkan ketenangan, atau JOMO (*joy of missing out*). Selain dari sisi wisatawan, para pelaku usaha juga diperkirakan akan berubah, khususnya hotel dan restoran. Wisatawan tak lagi sekadar memesan kamar, namun mencicip pengalaman menyantap makanan di restoran yang tersedia di hotel.
- 8) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan setidaknya terdapat tiga tren ekonomi kreatif pada 2025 yang mencerminkan dinamika inovasi dengan menggabungkan nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri. Tren tersebut diharapkan dapat memenuhi target-target yang akan dicapai. PDB Ekraf pada 2029 sebesar 8,37 persen sesuai yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional). Dengan indikator pertumbuhan ekspor ekraf sebesar 5,96 persen, penyerapan tenaga kerja ekraf sebanyak 27.66 juta orang, dan pertumbuhan investasi ekraf sebesar 8,08 persen. Salah satu tren yang diprediksi akan mengemuka adalah konsep "Local is the New Luxury", yang menonjolkan kebanggaan terhadap produk dan budaya nusantara dengan standar kualitas dunia. Konsep itu tidak hanya menekankan pada nilai estetika, tetapi juga pada kualitas produk lokal yang memenuhi kebutuhan pasar global, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional. Kami percaya bahwa produk dan budaya Indonesia, dengan kualitas yang terus ditingkatkan, akan menjadi daya tarik global di pasar internasional. Tren kedua adalah "*Experiential Experience Kuliner*", yang menawarkan sensasi baru dalam menjelajahi cita rasa kuliner khas nusantara. Pengalaman kuliner yang tak hanya melibatkan rasa, tetapi juga mencakup pengalaman budaya, cerita, dan cara penyajian yang unik akan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Konsep ini bertujuan untuk memadukan kuliner tradisional dengan konsep modern yang memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi konsumen. Tren ketiga adalah "Revolusi Mode", yang menekankan pada keberlanjutan dan visi masa depan industri mode yang ramah lingkungan. Tren ini mencakup penggunaan bahan-bahan dari serat alami yang lebih ramah lingkungan, serta penerapan desain yang mendukung keberlanjutan dalam produksi. Industri mode di Indonesia diproyeksikan akan semakin mengedepankan prinsip-prinsip eco-fashion sebagai bagian dari strategi global menuju keberlanjutan. Industri mode Indonesia akan semakin berfokus pada keberlanjutan, dengan memanfaatkan bahan-bahan alami dan proses produksi yang ramah lingkungan. Sejumlah tren tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pencapaian target

yang telah ditetapkan Kemenekraf dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tren-tren ekonomi kreatif ini tidak hanya akan memacu inovasi di dalam negeri, tetapi juga memperluas jangkauan Indonesia di pasar internasional, dengan membawa produk lokal yang memiliki daya saing global. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri untuk mempercepat perkembangan sektor ekonomi kreatif Indonesia.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

- a. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 adalah 3,2% atau lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,1%. Pertumbuhan tersebut dikerek naik meski di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia yang melebar dan ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2025 diperkirakan lebih tinggi menjadi 3,2% karena sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan AS, sementara negara lain mengalami perlambatan. Negara-negara di dunia masih akan mengalami risiko perlambatan.
- b. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Ketidakpastian ekonomi dan politik diperkirakan akan semakin kencang menghantui dunia dan Indonesia tahun 2025. Dari dalam negeri, banyak kekhawatiran juga belum reda. Pelemahan daya beli, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta melemahnya harga komoditas menjadi alasan pesimisme.
- c. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
- d. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan *Inflation Reduction Act* (IRA) di Amerika Serikat dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) di Uni Eropa.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk mengoptimalkan sektor perdagangan dan jasa, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pengembangan ekonomi kreatif serta pembangunan pariwisata.
- b. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dapat terselenggara dengan baik.
- d. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- e. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui peningkatan keterampilan (pelatihan) dan kewirausahaan dalam masyarakat dalam menghadapi kecepatan perkembangan teknologi digital.
- f. Mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dalam

rangka penanganan rumah tidak layak huni kawasan permukiman kumuh Krapyak, Pemkot Pekalongan menggandeng TJSLBU/CSR PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang membantu secara komprehensif berupa dana hibah kepada 16 (enam belas) warga terdampak program relokasi untuk penyediaan hunian cluster yang layak.

- g. Penguatan SDM aparatur pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- h. Peningkatan kerjasama antar daerah, khususnya dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang dalam rangka peningkatan investasi daerah.
- i. Terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif karena peluang dari perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dan global, didasarkan atas potensi lokal Kota Pekalongan.
- j. Mendorong riset dan inovasi dalam rangka menuju pengembangan ekonomi sirkuler bagi industri dan UMKM.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2025. Upaya peningkatan ekonomi terus didorong dengan menggerakkan berbagai sektor usaha dan melibatkan berbagai pihak termasuk investor.

Di tahun 2024, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen. Hal ini senada dengan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, dimana mengalami pertumbuhan sebesar 5,44 persen pada tahun 2023 dan pertumbuhan sebesar 5,87 persen pada tahun 2024.

Dengan asumsi optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam Tabel III-4 berikut.

Tabel III-4
Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Proyeksi RPJMD 2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,44	5,87	5,44 - 6,00	5,70 - 6,20	5,7 - 6,00

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2024

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2024 bergerak naik dari 76,71 di tahun 2023, menjadi 77,21 di tahun 2024. Capaian di tahun 2024 telah melebihi angka yang ditargetkan yaitu 75,71. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IPM sebagaimana disajikan dalam Tabel III-5 berikut.

Tabel III-5
Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Proyeksi RPJMD 2027
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,71	77,21	77,39	78,21	78,38

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2024

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 65,31 di tahun 2023 dan menurun menjadi 65,10 di tahun 2024. Angka tersebut sudah melampaui target yang diharapkan yaitu 59,59. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IDG sebagaimana disajikan dalam Tabel III-6 berikut.

Tabel III-6
Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Proyeksi RPJMD 2027
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31	65,10	59,59	60,28	61,00

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2024

d. Tingkat Kemiskinan

Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 terus didorong dengan berbagai upaya. Tren menurunnya angka kemiskinan sejak pandemi sampai dengan data terakhir tahun 2024 tidak lain karena sokongan bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin. Sebut saja di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Gaji, dan subsidi listrik.

Tingkat kemiskinan tahun 2024 mencapai 6,71 persen, jauh dari target yang diharapkan yaitu 6,29 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan dalam Tabel III-7 berikut.

Tabel III-7
Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2023	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target RKPD 2026	Proyeksi RPJMD 2027
Tingkat kemiskinan (persen)	6,81	6,71	6,27 - 6,70	6,50 - 6,14	5,65 - 6,49

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi di Kota Pekalongan, penyerapan tenaga kerja juga turut membaik, namun hal ini belum berlangsung secara konsisten. Hal ini terlihat dari meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 5,02 persen di

tahun 2023 menjadi 4,91 persen di tahun 2024 atau menurun sebesar 0,11 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana disajikan dalam Tabel III-8 berikut.

Tabel III-8
Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Proyeksi RPJMD 2027
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,02	4,91	5,05 - 4,47	4,91-4,40	4,98 - 4,24

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2024

f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3 ± 1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi pada tahun 2022 berada di atas range tersebut yaitu 6,36 persen dan pada tahun 2023 inflasi dapat terkendali dengan capaian 3,28 persen sehingga berada pada range target yang ditentukan. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebagaimana disajikan dalam Tabel III-9 berikut.

Tabel III-9
Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Proyeksi RPJMD 2027
Inflasi (persen)	6,36	3,28	3,04	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan (diolah), 2024

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagai pelaksanaan tahun kelima agenda RPJMD Tahun 2021-2026 dan sekaligus akan menjadi periode pertama dari RPJMD Tahun 2025-2029, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk belanja daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer. Belanja operasi sebagaimana dimaksud, dirinci atas jenis: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja bunga; d) belanja subsidi; e) belanja hibah; dan f) belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal meliputi: a) belanja modal tanah; b) belanja modal peralatan dan mesin; c) belanja modal bangunan dan Gedung; d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; e) belanja modal aset tetap lainnya; dan f) belanja modal aset lainnya. Untuk belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Dan untuk belanja transfer dirinci atas jenis: a) belanja bagi hasil; dan b) belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Konsekuensi atas terbitnya regulasi tersebut, struktur APBD mengalami perubahan untuk nomenklatur Pajak Daerah dan nomenklatur Retribusi Daerah. Pada struktur APBD, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat nomenklatur Pajak Daerah baru yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis Pajak Daerah yang berbasis pada konsumsi yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan. Selain perubahan nomenklatur Pajak Daerah, terdapat jenis Pajak Daerah baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu dari pokok pajak terutang yang dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen (Pajak PKB, dan BBNKB). Sedangkan untuk Retribusi Daerah, terdapat

beberapa Retribusi Daerah yang sudah tidak dipungut antara lain: Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Dengan tidak dipungutnya kembali Retribusi Daerah tersebut dan penurunan beberapa tarif Pajak Daerah dapat berpotensi menurunkan PAD sehingga diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dilakukan melalui peningkatan pelayanan, penanganan piutang, optimalisasi Retribusi Daerah, peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pemanfaatan Aset, dan peningkatan dana insentif fiskal.

Dalam struktur APBD Kota Pekalongan komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026, perencanaan pendapatan daerah mengacu pada pagu indikatif tahun 2026 pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan tahun 2026 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah;
5. Peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan dana insentif fiskal.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Kedua peraturan tersebut diterapkan mulai tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2026 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

1. Sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;

2. Evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Sinergisitas antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang teknis pungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi;
6. Penyusunan buku Potensi PAD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (*tapping box* dan sejenisnya);
8. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD;
9. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran);
10. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
11. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
12. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
13. Pelayanan PBB *Online* dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah;
14. Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data Simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
17. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
18. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
19. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
20. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID;
21. Menyusun Rencana Aksi untuk peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan Dana Insentif;
22. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2025. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan BBNKB Kota Pekalongan selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah

diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan realisasi bagi hasil PKB dan BBNKB tahun 2025. Dalam upaya tersebut, sinergitas antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan dalam bentuk kegiatan:

1. Pendataan Objek Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Opsen PKB dan BBNKB;
3. Penyampaian Informasi Tunggakan dan Penagihan;
4. Sosialisasi Opsen PKB dan BBNKB.

Perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun formulasi kegiatan sekaligus berkolaborasi dalam pelaksanaan optimalisasi opsen PKB dan BBNKB tahun 2026 serta evaluasi atas implementasi opsen PKB dan BBNKB pada tahun pertama

Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), proyeksi kenaikan PAD diasumsikan sebagai berikut:

- a. Perkiraan potensi pajak dan retribusi dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang mengacu pada atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Kemungkinan realisasi penagihan piutang pajak dan retribusi;
- c. Perkiraan investasi di Kota Pekalongan tahun 2026 berupa pembangunan beberapa hotel dan restoran/ cafe baru.
- d. Mempertimbangkan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah selama 2 tahun terakhir;
- e. Perkiraan suku bunga BI (Bank Indonesia);
- f. Potensi BMD yang disewakan;
- g. Estimasi perhitungan BMD yang akan dilelang;
- h. Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.
- i. Estimasi perolehan laba dari BUMD di tahun 2025.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2022-2027 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III-10
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2022-2027

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RKPD 2026	Proyeksi 2027
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN	989.013.074.926	1.028.430.783.474	1.016.321.692.109	1.042.817.436.000	1.032.375.837.000	1.026.696.774.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	263.475.949.166	263.355.736.830	271.121.330.933	304.505.199.000	298.540.254.000	295.600.935.000
Pajak Daerah	101.303.223.640	115.437.057.778	111.866.942.211	148.200.000.000	141.000.000.000	137.267.000.000
Retribusi Daerah	19.088.524.378	16.704.861.471	146.661.802.644	144.355.743.000	145.046.320.000	148.337.594.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.434.311.659	7.117.204.338	7.197.597.251	7.226.934.000	7.226.934.000	6.381.341.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	136.649.889.489	124.096.613.243	5.394.988.827	4.722.522.000	5.267.000.000	3.615.000.000

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RKPD 2026	Proyeksi 2027
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN TRANSFER	725.537.125.760	763.287.046.644	745.200.361.176	738.312.237.000	733.835.583.000	731.095.839.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	618.566.266.760	667.941.862.118	650.085.108.490	687.345.367.000	681.822.828.000	680.128.969.000
Bagi Hasil Pajak	33.880.707.425	31.492.855.139	29.999.410.000	42.623.769.000	42.623.769.000	42.623.769.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0	1.950.238.830	1.401.595.000	994.808.000	994.808.000	994.808.000
Dana Alokasi Umum	424.427.248.179	451.200.064.000	476.430.586.000	488.347.066.000	485.041.025.000	488.347.066.000
Dana Alokasi Khusus	155.562.051.156	162.020.125.149	136.213.405.490	148.163.226.000	148.163.226.000	148.163.326.000
Dana Insentif Fiskal	4.696.260.000	21.278.579.000	6.040.112.000	7.216.498.000	5.000.000.000	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.970.859.000	95.345.184.526	95.115.252.686	50.966.870.000	52.012.755.000	50.966.870.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	72.380.352.000	72.883.759.926	74.727.559.186	50.966.870.000	52.012.755.000	50.966.870.000
Bantuan Keuangan Provinsi	34.590.507.000	22.461.424.600	20.387.693.500	0	0	0
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	1.788.000.000	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.788.000.000	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bapperida dan BPKAD Kota Pekalongan (diolah), 2025

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah tahun 2026 pada RKPD mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi serta percepatan pencapaian target pembangunan, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian, peningkatan kompetensi dan literasi digital ASN, internalisasi nilai-nilai integritas serta penguatan SDM perencana dan keuangan dalam perencanaan, pengukuran, pengelolaan keuangan, pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis outcome.
2. Peningkatan SDM pendidikan yang memenuhi kualifikasi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius.
3. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan, serta pemenuhan hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan.
4. Peningkatan kualitas SDM dan koordinasi perwujudan tujuan rencana tata ruang, sarpas perkotaan dan manajemen rekayasa lalu lintas
5. Sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan data tunggal dan pilah gender serta identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka.
6. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
7. Peningkatan peran stakeholder budaya dalam pelestarian Budaya Lokal
8. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan
9. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu.

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2022-2027 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III-11
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2022-2027

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RKPD 2026	Proyeksi 2027
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA	1.031.090.188.444	1.031.847.572.704	1.012.991.724.934	1.051.367.436.000	1.045.375.837.000	1.072.112.501.000
BELANJA OPERASI	830.611.301.706	858.205.172.245	891.029.007.820	941.824.019.000	949.291.042.924	941.008.060.000
Belanja Pegawai	375.774.559.810	380.545.140.291	403.864.630.837	436.968.612.000	435.576.508.000	433.254.233.000
Belanja Barang dan Jasa	413.865.972.418	431.075.384.481	444.343.004.432	460.104.668.000	480.141.091.924	464.717.217.000
Belanja Hibah	37.814.800.008	44.257.036.973	41.171.575.629	43.286.089.000	32.427.343.000	41.571.960.000
Belanja Bantuan Sosial	3.155.969.470	2.327.610.500	1.649.796.922	1.464.650.000	1.146.100.000	1.464.650.000
BELANJA MODAL	196.569.439.074	170.653.380.598	119.315.357.114	107.059.417.000	92.597.794.076	128.620.441.000
Belanja Modal Tanah	4.442.465.169	3.036.176.608	479.100.343	518.740.000	703.380.000	

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RKPD 2026	Proyeksi 2027
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.027.762.176	38.881.456.772	25.882.047.648	23.675.679.000	26.895.939.934	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.349.620.557	54.122.619.156	22.491.212.461	31.290.646.000	21.423.795.710	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.405.993.613	72.047.095.943	68.057.605.746	51.327.557.000	43.361.019.432	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.343.597.559	2.566.032.119	2.357.002.700	104.295.000	166.788.000	
Belanja Aset Lainnya	0	0	48.388.216	142.500.000	46.871.000	
BELANJA TAK TERDUGA	3.909.447.664	2.989.019.861	2.647.360.000	2.484.000.000	3.487.000.000	2.484.000.000
Belanja Tak Terduga	3.909.447.664	2.989.019.861	2.647.360.000	2.484.000.000	3.487.000.000	2.484.000.000
BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0	0
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bapperida dan BPKAD Kota Pekalongan, 2025

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari SiLPA. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2026 di Kota Pekalongan antara lain diarahkan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian. Rincian pembiayaan daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III-12
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2022-2027

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RKPD 2026	Proyeksi 2027
1	2	3	4	5	6	7
PEMBIAYAAN	105.197.663.093	57.355.904.236	63.101.426.272	8.550.000.000	13.000.000.000	45.415.727.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.339.443.911	68.808.505.766	63.101.426.272	15.000.000.000	18.000.000.000	52.865.727.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	115.326.671.183	63.120.549.575	53.939.115.006	15.000.000.000	18.000.000.000	52.865.727.000
Pencairan Dana Cadangan	0	5.680.000.000	9.126.382.348	0	0	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	12.772.728	7.956.191	35.928.918	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.141.780.818	11.452.601.530	0	6.450.000.000	5.000.000.000	7.450.000.000

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	RKPD 2026	Proyeksi 2027
1	2	3	4	5	6	7
Pembentukan Dana Cadangan	7.141.780.818	6.664.601.530	0	4.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	4.788.000.000	0	2.450.000.000	1.000.000.000	2.450.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bapperida dan BPKAD Kota Pekalongan, 2025

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2025-2029, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah :

“Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

4.1.1 Gambaran Kota Pekalongan Dalam Visi Tahun 2025-2029

Kota Pekalongan lahir pada tanggal 1 April 1906. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pekalongan. Dalam konsiderannya dinyatakan secara sadar tentang arti penting Hari Jadi bagi warga Kota Pekalongan untuk memperkokoh jati diri sekaligus untuk meningkatkan motivasi, rasa kecintaan, kebanggaan dan rasa handarbeni (memiliki) terhadap daerahnya.

Kota Pekalongan memiliki logo berupa perisai berwarna kuning dengan komponen yang menonjol berupa canting, ikan, melati, dan benteng. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan disebutkan bahwa desain Logo Daerah Kota Pekalongan mempunyai 4 elemen yang terkandung dalam logo Kota Pekalongan tersebut, yaitu warna dasar kuning emas muda melambangkan kesejahteraan berisi lukisan canting berwarna merah sebagai lambang hidup dan tangkainya berwarna hijau daun padi yang sedang tumbuh sebagai lambang tumbuh kesejahteraan, kemudian motif batik Jlamprang sebagai motif asli Kota Pekalongan, warna dasar biru menggambarkan laut berisi tiga ikan putih perak menggambarkan trias politika di dalam jaring hitam yang menggambarkan sejarah pertumbuhan asal mulanya Kota Pekalongan (A--Pek--Alongan). Terakhir adalah Perisai bertajuk lukisan benteng berwarna hitam batu dengan lima menara yang melambangkan Pancasila dan kekuatan. Kemudian, pada bagian tengah berupa pintu gerbang dan sedikit lebih tinggi dari yang lain, menggambarkan adanya satu sila dari Pancasila yang menonjol yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti penduduknya beribadah. Dengan demikian, baik hari jadi maupun logo, keduanya telah menjadi pemersatu dan pengikat dinamika hidup dan kehidupan Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan berada di titik tengah pantai utara Pulau Jawa. Dalam jalur perekonomian regional maupun nasional, posisi ini sangat menguntungkan karena menjadi jalur utama perekonomian antar berbagai kota di pantai utara Jawa. Distribusi barang, baik

untuk keperluan industri dan produksi ataupun untuk keperluan konsumsi antar kota di pantai utara Pulau Jawa, dipastikan akan melalui Kota Pekalongan. Selain distribusi barang, Kota Pekalongan juga dilalui jalur kereta api, dimana semua kereta penumpang berhenti di Stasiun Besar Pekalongan.

Kondisi geografis yang cenderung memberikan keuntungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kondisinya sedikit berbeda dengan kondisi geologi Kota Pekalongan. Karakteristik batuan muda yang cenderung mampat serta ditambah dengan aktivitas manusia di atas hamparan Kota Pekalongan telah menyebabkan fenomena land subsidence (amblesan tanah) yang cukup serius. Saat ini, di beberapa wilayah Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian daratan yang berada di bawah permukaan air laut (under sea level). Di sisi lain, fenomena kenaikan permukaan air laut sebagai akibat pemanasan global telah memperburuk posisi daratan Kota Pekalongan dibandingkan secara relatif dengan permukaan air laut. Oleh karena itu, berbagai bangunan tanggul pantai dan sungai, serta operasionalisasi stasiun pompa untuk mendukung fungsi sistem drainase akan menjadi salah satu wujud Kota Pekalongan di tahun-tahun yang akan datang.

Upaya untuk melindungi Kota Pekalongan dengan berbagai bangunan infrastruktur tersebut akan memberikan ruang bagi penduduk Kota Pekalongan dalam menjalankan aktivitasnya, baik sosial, ekonomi, ataupun aktivitas lainnya. Jumlah penduduk Kota Pekalongan saat ini adalah 321.095 jiwa (tahun 2024). Jumlah ini diprediksikan akan menjadi 340.250 jiwa pada tahun 2030. Ini berarti Kota Pekalongan akan memiliki kepadatan 6.917,17 jiwa / km². Jumlah tersebut, terdiri dari 224.626 jiwa (69,96%) penduduk usia produktif, dan 96.469 jiwa (30,04%) usia tidak produktif, atau dengan kata lain memiliki angka ketergantungan 42,95. Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikannya, diprediksikan penduduk Kota Pekalongan akan memiliki tingkat pendidikan minimal SLTA Kelas 2 pada tahun 2030.

Kondisi penduduk dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi tersebut, akan sangat mendukung pondasi ekonomi Kota Pekalongan yang meletakkan pondasinya pada industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa, dengan produk unggulan bertumpu pada batik, perikanan, wisata belanja, serta kuliner.

Hal lain yang tetap akan terjaga adalah karakteristik religius dengan tetap mengedepankan kerukunan antar umat beragama. Aspek akhlaqul karimah, dijaga untuk terus terbangun dari berbagai aspek tata kehidupan masyarakat.

1. Lebih Maju

Beroperasinya Pasar Banjarsari akan menjadi momentum baru dalam menumbuhkan perdagangan konvensional dan menyasar langsung ke UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian juga dengan Taman Sorogenen yang semula menjadi lokasi pasar darurat pasca terbakarnya Pasar Banjarsari, akan dibangun menjadi fasilitas olahraga, taman, kuliner, dan pasar burung malam, juga akan menjadi pendukung majunya aktivitas perdagangan di Kota Pekalongan.

Selain perdagangan konvensional, masyarakat Kota Pekalongan, terutama yang berada dalam link value perdagangan produk batik, juga terus meningkatkan aktivitasnya melalui format “*e-market place*”.

Pada sektor lain, yaitu perikanan, juga diharapkan akan mendapatkan momentum baru dalam bertumbuh kembang di waktu yang akan datang. Rencana pembangunan pelabuhan perikanan on shore melalui *Project Sector Loan for Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase I* yang bersumber dari pembiayaan JICA, diharapkan akan menjadi pendorong yang cukup kuat bagi upaya memajukan perikanan di

Kota Pekalongan. Momentum ini juga akan menjadi bangkitan ekonomi baru pada titik dan jalur distribusi perikanan dari dan ke pelabuhan perikanan tersebut.

Kemajuan lain yang nantinya akan terwujud adalah penataan ruang-ruang terbuka publik, jalan kota, air bersih, sanitasi dan persampahan, serta pengembangan infrastruktur pengendali banjir dan rob yang merata di kawasan rawan bencana banjir dan rob. Penataan Taman Sorogenen setelah berpindahnya aktivitas pasar darurat akan memecahkan keramaian di alun-alun yang sudah sangat padat dan sangat mengurangi kenyamanan pengunjung. Penataan alun-alun juga nantinya akan didukung dengan adanya pembangunan pusat kuliner di eks pendopo oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Peningkatan kualitas jalan kota juga secara bertahap dan berkelanjutan terus dilakukan dalam mendukung layanan mobilitas penduduk. Hal yang mungkin akan menjadi tantangan ke depan adalah penanganan terintegrasi atas persimpangan sebidang dengan rel kereta api. Dengan semangat Pemerintah Pusat untuk mendorong kolaborasi dan sinergi antar level pemerintahan ataupun antar pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi peluang bagi penataan persimpangan sebidang tersebut.

Infrastruktur pelayanan publik lain yang diharapkan akan dapat diwujudkan adalah peningkatan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan. Dorongan untuk terus mengembangkan SPAMREG PETANGLONG, serta adanya berbagai rekayasa ilmu pengetahuan khususnya dalam pengelolaan air payau menjadi air bersih akan dapat mendukung percepatan pemenuhan layanan air bersih dari sumber air baku permukaan. Sementara itu, untuk layanan sanitasi dan persampahan, Pemerintah Kota Pekalongan akan terus mendorong peran serta masyarakat secara aktif mengingat kedua hal tersebut dirasakan akan sangat bergantung pada peran masyarakat. Disamping itu, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan Pembangunan TPST Regional Pekalongan-Batang ke dalam Program Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2024-2029. Tentu saja, kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan persampahan di Kota Pekalongan.

Dan yang terakhir adalah infrastruktur pengendali banjir dan rob, dimana kebijakan ini akan bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah menetapkan Peningkatan Ketahanan Banjir Perkotaan Pekalongan dan Pembangunan Pengaman Pantai Pesisir Pekalongan - Batang dalam Program Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2024-2029.

Kemajuan lain yang akan diwujudkan adalah kualitas layanan publik dengan akan terus meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Layanan tersebut, tidak hanya bersifat operasionalisasi internal birokrasi pemerintahan, tetapi juga layanan untuk aktivitas bisnis, ataupun layanan kesejahteraan masyarakat.

2. Lebih Sejahtera

Berbagai upaya pembangunan yang akan dilakukan, mulai dari infrastruktur (pengendalian banjir dan rob beserta sistem drainase perkotaannya, jaringan jalan, listrik, layanan telekomunikasi, air bersih, sanitasi dan persampahan), sarana dan prasarana produksi batik dan perikanan beserta jaringan distribusi perdagangannya, serta penataan taman kota untuk menjadikan kondisi kota yang nyaman, diharapkan akan sejalan dengan penyerapan tenaga kerja di Kota Pekalongan. Disamping itu, perkembangan lingkungan eksternal Kota Pekalongan, baik di regional Jawa Tengah ataupun lingkungan nasional dan global, diharapkan akan semakin mampu memberikan pengaruh positif dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Berkurangnya pengangguran, baik karena bekerja ataupun melakukan wirausaha sebagai dampak banyaknya aktivitas pembangunan yang akan membuka lapangan kerja

dan lapangan usaha, diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Kondisi tersebut juga diharapkan akan terdukung oleh dampak positif dari program strategis nasional, berupa Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah. Mekanisme Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan UMKM, baik di sisi produksi ataupun pasokan bahan makanan, setidaknya akan memberikan dampak berupa terdistribusikannya aliran uang UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Jika ini berjalan, maka bukan tidak mungkin selain akan meningkatkan pendapatan per kapita, juga akan menurunkan kesenjangan pendapatan (Gini Ratio).

Saat ini, gini ratio Kota Pekalongan berada di angka 0,330. Dengan adanya distribusi pendapatan melalui kebijakan pemerintah yang mendorong peran UMKM seperti halnya Makan Bergizi Gratis, maka gini ratio Kota Pekalongan diharapkan akan berada di bawah angka 0,3 di akhir RPJMD tahun 2030.

Dampak ikutan lain sebagai akibat kondisi di atas adalah menurunnya angka kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di Kota Pekalongan masih di angka 6,81. Berbagai alokasi anggaran telah diluncurkan secara kolaboratif oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota Pekalongan, dan juga peran dunia usaha melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya (TJSL) atau CSR. Alokasi anggaran tersebut dikemas dengan berbagai program, seperti program menurunkan beban pengeluaran penduduk miskin, program peningkatan ketrampilan bekerja dan berusaha, ataupun juga program stimulan modal usaha. Gayung bersambut dengan berbagai implementasi program tersebut adalah upaya Pemerintah Pusat yang telah menyatukan data sasaran program penanggulangan kemiskinan, yaitu DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional). Dengan adanya integrasi data-data tersebut, diharapkan berbagai program yang dilaksanakan akan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, angka kemiskinan di Kota Pekalongan diharapkan akan turun di bawah 5,02 - 6,27% pada tahun 2030.

Rangkaian dari menurunnya angka kemiskinan ini nantinya adalah semakin baiknya kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat Kota Pekalongan. Kondisi Pendidikan yang akan mencerminkan membaiknya pendidikan masyarakat dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Saat ini, rata-rata lama sekolah Kota Pekalongan adalah 9,34 tahun, sedangkan harapan lama sekolah adalah 12,89 tahun. Pada tahun 2030, kondisi ini diharapkan akan mencapai angka di atas 11 tahun untuk rata-rata lama sekolah, dan mencapai angka di atas 14 tahun untuk harapan lama sekolah. Sedangkan untuk Kesehatan yang akan diukur dengan Indeks Keluarga Sehat, dimana saat ini telah mencapai 0,38 maka di tahun 2030 diharapkan akan dapat mencapai angka 0,42.

3. Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam konteks Kota Pekalongan, pembangunan berkelanjutan setidaknya mencakup aspek Sumber Daya Manusia yang dilihat dari kesejahteraan (kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan juga pangan), kemudian aspek lingkungan seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah dan sampah, serta tidak kalahnya pentingnya aspek ekonomi dimana Kota Pekalongan sangat bertumpu pada industri pengolahan dan sektor perdagangan dengan produk unggulan berupa batik, perikanan, dan wisata (belanja dan religi).

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dari aspek Sumber Daya Manusia, pada tahun 2030 nanti diharapkan Kota Pekalongan akan memiliki penduduk dengan tingkat kemiskinan 5,02 - 6,27%, rata-rata lama pendidikan 9,87 tahun, indeks kesehatan 0.42 (indeks keluarga sehat) dan Pola Pangan Harapan 95,12. Dengan kondisi ini, maka keberlanjutan pembangunan menuju pada kondisi yang lebih maju dan sejahtera akan dapat terus dilakukan di masa-masa yang akan datang.

Sementara itu, jika dilihat dari aspek lingkungan, kondisi Kota Pekalongan pada tahun 2030 diharapkan akan dapat terwujudkan pemenuhan cakupan layanan air bersih dari sumber air baku permukaan sebanyak 34,58%, cakupan layanan sanitasi mencapai 12%, layanan persampahan 92,59%, dan pengelolaan limbah dapat mencapai 1,35% terselesaikan dari sisi hulu. Kondisi seperti ini diharapkan akan dapat memberikan jaminan ketersediaan daya dukung lingkungan yang akan dapat digunakan sebagai sumber daya pembangunan oleh generasi yang akan datang.

4. Belandaskan Akhlaqul Karimah

Pembangunan Kota Pekalongan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan harus berpijak pada nilai-nilai moral yang kuat. "Berlandaskan Akhlaqul Karimah" menegaskan bahwa setiap kebijakan, program, dan interaksi sosial dalam pemerintahan serta masyarakat harus mencerminkan akhlak yang mulia. Akhlaqul Karimah bukan sekadar aspek spiritual, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun etos kerja yang jujur, amanah, dan profesional di segala bidang kehidupan. Dengan nilai ini, Pekalongan tidak hanya berkembang dalam aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dalam karakter masyarakatnya yang beradab dan harmonis.

Dalam tata kelola pemerintahan, Akhlaqul Karimah menjadi prinsip utama dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap pemimpin dan aparatur pemerintah diharapkan menjunjung tinggi integritas, mengedepankan keadilan, dan menghindari praktik korupsi. Dengan kepemimpinan yang berakhlak, masyarakat akan semakin percaya pada pemerintahan, yang pada akhirnya memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan kota.

Pada aspek sosial dan budaya, penerapan Akhlaqul Karimah berarti membangun masyarakat yang saling menghormati, peduli, dan memiliki semangat gotong royong. Kota Pekalongan harus menjadi tempat di mana keberagaman budaya dan agama dapat hidup berdampingan dengan harmonis, serta nilai-nilai luhur seperti tolong-menolong, kejujuran, dan rasa tanggung jawab ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial.

Dalam bidang ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, prinsip Akhlaqul Karimah menuntun dunia usaha dan industri agar beroperasi secara etis, adil, dan berwawasan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan sosial atau merusak lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan usaha berbasis syariah, bisnis yang bertanggung jawab, serta praktik industri yang ramah lingkungan harus terus diperkuat agar kemajuan Pekalongan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Berlandaskan Akhlaqul Karimah" bukan hanya semboyan, tetapi menjadi pedoman dalam membangun Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam setiap aspek kehidupan, Pekalongan dapat tumbuh menjadi kota yang tidak hanya unggul dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam kualitas moral dan kebahagiaan warganya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026 yaitu “**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius**”, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, RPJMD ini merumuskan 9 (sembilan) misi yang menjawab isu strategis daerah. Misi ini akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Kesembilan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Fondasi utama dalam mencapai Kota Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan Akhlaqul Karimah adalah pemerintahan yang berlandaskan hukum yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan menjunjung tinggi hukum, pemerintah Kota Pekalongan dapat membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan rasa aman, serta menegakkan keadilan sosial di semua aspek kehidupan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam menciptakan sistem birokrasi yang bersih dan responsif. Setiap kebijakan harus dibuat secara terbuka, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dapat ditekan, sehingga pembangunan berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Prinsip kolaborasi dan sinergi dalam pemerintahan juga sangat penting untuk mewujudkan Pekalongan yang lebih maju dan berkelanjutan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun kota, tetapi harus menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media, guna menciptakan solusi yang inovatif dan tepat sasaran. Melalui pendekatan sinergis, setiap kebijakan yang dibuat dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mengatasi berbagai tantangan pembangunan secara efektif.

Dengan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Pekalongan dapat mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan serta pembangunan yang inklusif bagi seluruh warganya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip Akhlaqul Karimah, di mana nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, misi ini menjadi landasan kokoh dalam mencapai visi Kota Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan dalam bingkai nilai-nilai luhur dan hukum yang berkeadilan.

2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata

Misi ini menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan, tanpa terkecuali. Pendidikan yang baik adalah kunci

untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan memiliki karakter berlandaskan Akhlaqul Karimah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Peningkatan kualitas pendidikan mencakup penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain itu, sinergi antara sekolah, dunia usaha, dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar pendidikan di Pekalongan tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan industri.

Pemerintah juga harus mendorong inovasi dalam sistem pendidikan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses belajar. Pendidikan berbasis karakter dan kearifan lokal juga harus dikembangkan untuk memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Akhlaqul Karimah.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan kota. Pendidikan yang merata dan berkualitas akan menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kualitas kesehatan mencakup penguatan layanan di puskesmas, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan lainnya agar lebih responsif dan efisien dalam menangani kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, seperti rekam medis elektronik dan layanan telemedicine, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses dan efektivitas layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah dengan akses terbatas.

Selain itu, aspek preventif harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan. Program edukasi mengenai pola hidup sehat, peningkatan gizi, pencegahan penyakit menular, serta promosi kesehatan mental harus diperluas agar masyarakat lebih sadar dan proaktif dalam menjaga kesehatannya. Pemerintah juga perlu memperkuat jaminan kesehatan bagi seluruh warga, baik melalui optimalisasi BPJS maupun program subsidi bagi masyarakat kurang mampu, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan hak kesehatan mereka.

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Pekalongan dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan. Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga dan menjadi faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif serta sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan, memperbaiki sistem layanan, serta memastikan tersedianya tenaga medis yang profesional dan merata di seluruh wilayah kota. Dengan misi ini, Kota Pekalongan akan menjadi kota yang lebih sehat, di mana setiap warganya memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Peningkatan kualitas kesehatan dan jaminan layanan yang merata akan mendukung pencapaian visi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan, berlandaskan nilai-nilai Akhlaqul Karimah.

4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Misi ini menegaskan komitmen Kota Pekalongan dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya mempertimbangkan fungsi, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Infrastruktur yang baik menjadi pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan kota yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karena itu, setiap pembangunan harus dirancang dengan prinsip efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta pemanfaatan teknologi hijau agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Pembangunan yang berkelanjutan berarti memastikan bahwa infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dibangun dengan perencanaan yang matang dan tahan terhadap tantangan lingkungan. Salah satu prioritas utama adalah mengatasi permasalahan banjir rob yang sering terjadi di Pekalongan dengan membangun sistem pengendalian air yang lebih baik, termasuk peningkatan kapasitas drainase, serta pengelolaan tata air yang berbasis ekosistem.

Melalui misi ini, Kota Pekalongan tidak hanya berfokus pada kemajuan infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa setiap pembangunan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, kota ini akan menjadi lebih layak huni, lebih tangguh menghadapi perubahan iklim, serta selaras dengan visi untuk menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berlandaskan Akhlaqul Karimah.

5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh warga, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu, mendapatkan akses terhadap layanan sosial yang memadai. Hal ini mencakup penyediaan bantuan sosial, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas untuk menciptakan kemandirian dan mengurangi kesenjangan sosial.

Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan menjadi prioritas dalam menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan sejahtera. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang melindungi hak-hak anak, termasuk mencegah eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan anak. Selain itu, perempuan harus diberikan kesempatan yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, dengan menyediakan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program kewirausahaan yang mendorong kemandirian.

Peningkatan keswadayaan masyarakat juga menjadi strategi utama dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan membangun sistem layanan yang partisipatif dan berbasis komunitas, masyarakat akan semakin aktif dalam merancang dan menjalankan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas layanan publik, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan gotong royong di antara warga Kota Pekalongan.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem layanan sosial yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai Akhlaqul Karimah. Dengan pelayanan yang lebih baik, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pembangunan, sehingga kesejahteraan yang diidamkan dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan.

6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

Misi ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi Kota Pekalongan dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya lokal, terutama sektor unggulan seperti batik dan perikanan. Sebagai kota yang dikenal sebagai pusat batik nasional, Pekalongan memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing industri kreatifnya melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, serta perluasan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Dukungan terhadap para pengrajin dan pelaku usaha batik perlu diperkuat melalui pelatihan, fasilitasi permodalan, serta pengembangan teknologi yang ramah lingkungan agar industri ini tetap berkelanjutan dan semakin berkembang.

Di sektor perikanan, Kota Pekalongan memiliki potensi besar dalam perikanan tangkap maupun budidaya. Penguatan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas pengolahan hasil laut akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Selain itu, penerapan teknologi modern dalam budidaya perikanan serta diversifikasi produk olahan perikanan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan lokal.

Selain batik dan perikanan, sektor ekonomi kreatif, UMKM, serta pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal juga harus dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan kebijakan yang mendukung kewirausahaan, akses pasar, serta digitalisasi usaha agar pelaku ekonomi lokal mampu bersaing di era globalisasi.

Dengan membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi daerah, Kota Pekalongan akan semakin maju dan sejahtera. Keberlanjutan ekonomi ini harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan nilai-nilai Akhlaqul Karimah agar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan generasi mendatang.

7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal

Pelestarian dan pengembangan budaya lokal menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Pekalongan serta menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kota Pekalongan memiliki kekayaan budaya yang khas, baik dari seni, tradisi, maupun warisan sejarah, yang harus dijaga agar tidak hilang oleh arus modernisasi. Upaya pelestarian budaya dilakukan secara sistematis melalui edukasi, dokumentasi, serta pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda agar tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.

Salah satu strategi utama dalam pelestarian budaya adalah dengan mengembangkan program pagelaran dan festival budaya tahunan. Acara ini tidak hanya menjadi ajang ekspresi seni dan budaya lokal, tetapi juga menjadi sarana promosi wisata budaya yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Festival-festival ini dapat mencakup pertunjukan seni tradisional, pameran batik, kuliner khas, serta berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya yang menjadi kebanggaan masyarakat Pekalongan. Dokumentasi dan inventarisasi seni budaya daerah dilakukan agar kekayaan budaya daerah tercatat dengan baik dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Upaya ini juga harus diiringi dengan mendorong pengakuan budaya daerah sebagai warisan budaya tak benda, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga semakin memperkuat posisi Pekalongan sebagai kota yang kaya akan budaya.

Penyediaan ruang publik yang dapat menjadi wadah bagi komunitas seni dan budaya juga merupakan langkah penting dalam mendukung kreativitas masyarakat. Ruang-ruang ini harus didesain sebagai tempat interaksi, pembelajaran, dan pengembangan bakat seni, sehingga budaya lokal dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya.

Misi ini tidak hanya berusaha melestarikan budaya warisan leluhur, tetapi juga mengembangkannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Budaya yang terjaga dengan baik akan menjadi bagian dari identitas masyarakat serta berkontribusi dalam menciptakan kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan, berlandaskan nilai-nilai Akhlaqul Karimah.

8. Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah.

Keamanan dan ketertiban adalah kunci pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan warga. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan stabilitas sosial. Kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang keamanan diperkuat melalui koordinasi intensif dan pemanfaatan teknologi. Peran tokoh agama dan masyarakat juga penting dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ketertiban serta memperkuat nilai kebersamaan.

Selain itu, menjaga kerukunan umat beragama dan semangat gotong royong menjadi prioritas dalam menciptakan harmoni sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam keamanan lingkungan, seperti ronda malam dan sistem keamanan lingkungan (siskamling), akan didorong agar ketertiban semakin terjaga. Dengan misi ini, Kota Pekalongan berkomitmen mewujudkan keamanan wilayah yang didukung oleh kebersamaan, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan visi kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan Akhlaqul Karimah.

9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi kunci dalam menghadapi tantangan seperti pencemaran, perubahan iklim, dan pengelolaan sampah yang efektif. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kota melalui program edukasi, kampanye lingkungan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan pengurangan limbah plastik juga menjadi prioritas untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain itu, Kota Pekalongan akan mendorong penggunaan energi terbarukan, pelestarian ruang hijau, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak agar pembangunan berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan komunitas lingkungan, akan diperkuat untuk menciptakan inovasi dalam menjaga kelestarian alam. Dengan misi ini, Kota Pekalongan bertekad menjadi kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan, selaras dengan visi pembangunan yang maju, sejahtera, dan berlandaskan Akhlaqul Karimah

4.1.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan RPJMD merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran

RPJMD juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2025-2029, uraian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dilakukan dalam rangka mewujudkan misi 1 yaitu; Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan RPJMD ini akan diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran RPJMD adalah : **Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital.**

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Kota, Opini BPK atas laporan keuangan, Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota, dan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berlandaskan Akhlakul Karimah

Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan akhlakul karimah dilakukan dalam rangka mewujudkan misi 2 dan Misi 3 yaitu; Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata dan Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat. Tujuan RPJMD ini akan diukur dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM).

Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran RPJMD adalah:

a. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter.

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Rata-rata Lama Sekolah penduduk di atas 15 tahun, dan Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Keagamaan.

b. Meningkatnya derajat kesehatan.

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran; Usia Harapan Hidup.

Tujuan 3 : Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal Yang Berkelanjutan.

Tujuan Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan dilakukan dalam rangka mewujudkan misi 4, 6, 7, 8 dan 9 yaitu; Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan; Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal; Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal; Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah; dan Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan.

Tujuan RPJMD ini akan diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran RPJMD adalah:

a. Meningkatnya investasi daerah.

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran nilai realisasi investasi tahun berkenaan.

b. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa.

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan; dan pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tujuan 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dilakukan dalam rangka mewujudkan misi 5 yaitu; Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan RPJMD ini akan diukur dengan indikator Tingkat kemiskinan. Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran RPJMD adalah:

a. Menurunnya populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Persentase populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

b. Menurunnya angka pengangguran.

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

c. Optimalnya pengarusutamaan gender.

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Indeks Ketimpangan Gender dan Kategori Kota Layak Anak.

Gambaran konsep implementasi pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar IV-1
Konsep Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029. Selanjutnya Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025– 2029 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel IV-1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Visi
RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025– 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	87,31	87,31	87,33	87,34	87,35	87,36	87,37	87,37
		Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Nilai SAKIP Kota	Nilai	73,02	74,41	75,81	77,21	78,60	80,00	81,40	81,40
			Opini BPK atas laporan keuangan	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP)	nilai	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	indeks	91,37	91,38	91,39	91,40	91,41	91,42	91,43	91,43
			Indeks Pelayanan Publik (IPP) (IUP)	indeks	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan akhlakul karimah		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,21	77,39	77,88	78,38	78,87	79,36	79,85	79,85
		Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter	Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun	tahun	9,62	9,68	9,74	9,80	9,86	9,92	9,98	9,98
		Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	tahun	74,79	74,86	75,08	75,30	75,51	75,73	75,95	75,95

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	persen		5,34	5,44 - 6,00	5,7 - 6,00	5,7 - 6,00	5,7 - 6,00	5,7 - 6,00	5,7 - 6,00	5,7 - 6,00
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi tahun N	Rp Milyar	238,05	170,00	170,68	171,36	172,05	172,74	173,43	173,43
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	persen	4,84	4,68	5,00	5,30	5,30	5,30	5,50	5,50
			Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan	persen	3,45	3,10	3,20	3,30	3,50	3,90	4,00	4,00
			Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	persen	9,26	9,89	10,00	11,00	11,50	12,00	13,00	13,00
4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (IUP)	persen		6,71	6,27 - 6,70	5,96 - 6,59	5,65 - 6,49	5,33 - 6,38	5,02 - 6,27	4,71 - 6,16	4,71 - 6,16
		Menurunnya populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	persen	7,52	7,32	7,22	6,97	6,77	6,52	6,32	6,32
		Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP)	persen	4,91	5,05 - 4,47	5,01 - 4,35	4,98 - 4,24	4,94 - 4,12	4,90 - 4,00	4,86 - 3,88	4,86 - 3,88
		Optimalnya pengarusutamaan gender	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,18	0,20 - 0,18	0,2 - 0,18	0,19 - 0,18	0,19 - 0,17	0,18 - 0,17	0,18 - 0,17	0,18 - 0,17
			Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, 2025

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja ‘*impact*’ yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Wali Kota Pekalongan pada tahun 2026. Berikut ini disajikan Tabel IV-2 keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Pekalongan.

Tabel IV-2
Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	URUSAN
1	2	3	4	5	6
1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945					
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Nilai SAKIP Kota	Rata-rata skor perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja tingkat kota	Perencanaan
				Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan-Sub Kegiatan Renja-Renstra, serta nilai pengukuran kinerja)	
				Rata-rata skor pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Sekretariat Daerah
				Persentase OPD dengan pelaporan kinerja sangat baik	
				Rata-rata capaian standar pelayanan minimal	
				Indeks pengawasan kearsipan tingkat kota (ANRI)	Kearsipan
				Persentase OPD dengan nilai pengawasan kearsipan kategori serendah rendahnya memuaskan	
				Nilai SAKIP OPD	Semua Urusan
			Opini BPK atas laporan keuangan	Indeks pengelolaan keuangan daerah dimensi kualitas anggaran belanja, transparansi pengelolaan keuangan, dan penyerapan anggaran	BPKAD
				Persentase peningkatan PAD	
				Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian laporan BMD	
			Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP)	Kapabilitas APIP	Inspektorat
			Indeks Kepuasan	Indeks kualitas pelayanan publik OPD	Semua Urusan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	URUSAN
1	2	3	4	5	6
			Masyarakat (IKM) Kota		
			Indeks Pelayanan Publik (IPP) (IUP)	Indeks sistem manajemen aparatur sipil negara (merit sistem)	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Rata-rata skor nilai merit sistem komponen manajemen ASN	
				Rata-rata skor nilai sistem merit komponen pengembangan kompetensi ASN	
				Indeks SPBE	Komunikasi dan Informatika
				Indeks domain tata kelola SPBE	
				Nilai keterbukaan informasi publik	
				Kinerja unit pelayanan informasi publik	Persandian
				Indeks keamanan informasi (KAMI)	
				Indeks tata kelola KAMI	Statistik
				Indeks pembangunan statistik (IPS)	
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Penelitian dan Pengembangan
				Indeks inovasi daerah	
				Rata-rata kinerja Riset dan Inovasi (Kinerja Riset: Persentase riset sesuai arah Kebijakan RPJMD. Kinerja Inovasi: Persentase OPD yang memiliki inovasi daerah tahun n-1 dan n-2)	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan
				Rata-rata capaian program layanan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum	
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase LKK yang aktif dalam pembangunan	
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata					
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter	Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)	Pendidikan
				Indeks SPM pendidikan	
				Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM)	Perpustakaan
				Tingkat pemanfaatan perpustakaan	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	URUSAN
1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase satuan pendidikan yang memiliki dokumen kurikulum operasional sekolah (KOS) untuk pengembangan karakter dan keagamaan	Pendidikan
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat					
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	Indeks SPM kesehatan Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota Persentase pemenuhan sarpras dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Kesehatan Perumahan dan Permukiman
4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan					
Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi tahun N	Persentase sarpras perkotaan dalam kondisi baik Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten / kota Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Rumah tangga dengan akses sanitas aman Persentase pemenuhan prasarana persampahan Persentase wilayah kota yang bebas dari genangan banjir / rob Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap ijin yang diberikan sesuai rencana tata ruang dan memenuhi persyaratan teknis bangunan Persentase pengawasan penataan ruang, bangunan gedung dan jasa konstruksi Tingkat pelayanan jalan (level of service) Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi jalan pada jalan kabupaten / kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan
5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.					
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (IUP)	Menurunnya populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase populasi PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Sosial

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	URUSAN
1	2	3	4	5	6
				Persentase populasi PPKS fakir miskin	Keluarga Berencana
				Indeks pembangunan keluarga (Ibangga)	
				Total Fertility Rate	
		Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP)	Persentase calon tenaga kerja siap pakai yang ditempatkan	Tenaga Kerja
				Persentase calon tenaga kerja jasil pelatihan yang bersertifikat kompetensi	
		Optimalnya pengarusutamaan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Persentase kasus perempuan yang ditangani	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
			Kategori Kota Layak Anak	Persentase pemenuhan hak anak (kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus)	
		6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal			
Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi tahun N	Nilai investasi baru tahun N	Penanaman Modal
				Persentase capaian kinerja pembangunan tingkat kota	Sekretariat Daerah
				Persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa	
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Koperasi - UKM
				Persentase koperasi berkualitas	
				Rasio kewirausahaan	
				Pertumbuhan UMKM	
				Persentase produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Pertanian
				Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	
				Nilai produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Perikanan
				Realisasi produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	
				Disparitas harga	Perdagangan
				Stabilitas harga barang kebutuhan pokok	
				Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	
				Nilai ekspor perdagangan	
			Pertumbuhan PDRB lapangan	Rasio PDRB industri pengolahan	Perindustrian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	URUSAN
1	2	3	4	5	6
			usaha industri pengolahan	Pertumbuhan industri pengolahan	Pangan
				Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)	
				Indeks ketahanan pangan (IKP)	
7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal					
Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Rasio PDRB Akomodasi makan dan Minum	Pariwisata
				Tingkat kunjungan wisata	Kebudayaan
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal	
				Persentase kelompok budaya yang aktif terlibat / mengadakan aktivitas budaya dalam 1 tahun terakhir	
8. . Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah					
Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi tahun N	Indeks harmoni indonesia (IHA)	Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase konflik SARA yang terselesaikan	
				Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	
				Indeks risiko bencana	
				Indeks ketahanan daerah	
9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan					
Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi tahun N	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Lingkungan Hidup
				Indeks kualitas air (IKA)	
				Indeks kualitas lahan (IKL)	
				Tertib hukum lingkungan	
				Persentase sampah yang terkelola	
				Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, 2025

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan pada tiap Misi RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel IV-3 berikut.

Tabel IV-3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Visi: “ Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaql Karimah”			
TUJUAN	SASARAN	MISI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang	1. Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif,	1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata	1. Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan

Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”			
TUJUAN	SASARAN	MISI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945	dan pelayanan publik berbasis digital	Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945	pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan akhlakul karimah	2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter	2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata	2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan yang inklusif, serta berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan
	3. Meningkatnya derajat kesehatan	3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan	4. Meningkatnya investasi daerah	4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan
		6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal	6. Peningkatan realisasi investasi daerah melalui penguatan daya saing produk unggulan, implementasi ekonomi sirkular, menurunkan ketergantungan impor, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi serta mendorong pertumbuhan PDRB pada sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi
		8. Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah	8. Perwujudan kondusifitas wilayah yang mendukung investasi melalui pencegahan konflik SARA dan pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama
		9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan	9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan disertai penguatan Fondasi kerjasama daerah
	5. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan,	7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal	7. Penguatan nilai-nilai budaya masyarakat dan pelestarian budaya lokal untuk mendukung sektor pariwisata

Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”			
TUJUAN	SASARAN	MISI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	perdagangan, dan jasa		
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	6. Menurunnya populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	5. Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, optimalisasi upaya menurunkan angka pengangguran terbuka, serta peningkatan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif
	7. Menurunnya angka pengangguran		
	8. Optimalnya pengarusutamaan gender		

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2026 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2026 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rangka menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada tema Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu **Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk “**Penguatan Landasan Pembangunan Daerah**” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis:
 - a. pelayanan publik yang merata dan inklusif;
 - b. penguatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset;
 - c. penguatan meritokrasi melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
 - d. penguatan pengembangan kompetensi dan integritas melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
 - e. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal akan menjadi prioritas serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi serta peningkatan kapabilitas APIP;

- f. pelaksanaan analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan produk hukum serta penguatan jaringan dokumentasi informasi hukum;
 - g. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
 - h. kelembagaan pangan efektif;
 - i. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - j. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - k. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - l. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - m. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - n. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
 - o. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk
 - p. menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; serta
 - q. penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan:
- a. peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - b. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
 - c. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
 - d. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - e. peningkatan produksi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - f. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
 - g. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
 - h. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
 - i. peningkatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - j. peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana;
 - k. peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
 - l. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
 - m. mendorong produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
 - n. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
 - o. mendorong kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - p. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM; serta
 - q. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:
- a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerja sama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
 - b. pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun dengan pemerataan akses layanan pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta evaluasi dan pelaksanaan SMK Boarding dan Semi Boarding;
 - c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi sarpras pendidikan;
 - d. penguatan pendidikan karakter dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan bullying;

- e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perijinan penyelenggaraan pendidikan;
- f. pemerataan akses layanan kesehatan melalui identifikasi perencanaan pengembangan layanan kesehatan lanjutan dan primer;
- g. pengembangan program rekrutmen dan seleksi untuk SDM kesehatan;
- h. pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah;
- i. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
- j. pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan kesehatan;
- k. pemetaan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial;
- l. pemetaan dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah;
- m. penyediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat;
- n. peningkatan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- o. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
- p. pemetaan kerjasama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
- q. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan; mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif; peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
- r. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar stakeholder; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat; peningkatan kapasitas SDM perpustakaan; peningkatan sarpras perpustakaan;
- s. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip;
- t. peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;
- u. peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
- v. peningkatan pembangunan berbasis gender;
- w. peningkatan ketahanan keluarga;
- x. peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 8,70% hingga 8,53%.
2. Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan sebesar 92,00,
3. Indeks Integritas Nasional ditargetkan sebesar 81,78.
4. Indeks Demokrasi Indonesia, target berada pada rentang 86,46 hingga 89,50.
5. Otonomi Fiskal Daerah ditargetkan sebesar 65,72%.
6. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 5,00% hingga 6,00%.
7. Indeks Modal Manusia ditargetkan sebesar 0,61.
8. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan menurun hingga kisaran 4,71% sampai 4,27%.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026 ditujukan untuk ***“Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM***

sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan”, dengan prioritas dan fokus pembangunan meliputi:

1. Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan regulasi dan SDM dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis outcome;
 - b. Peningkatan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas untuk pengelola keuangan daerah dan pengelola BMD;
 - c. Peningkatan pemahaman ASN tentang nilai-nilai integritas;
 - d. Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian guna mendukung penerapan sistem merit dan corporate university;
 - e. Peningkatan SDM, kepemimpinan, dan literasi digital.
2. Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkeadilan dan religius, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan SDM pendidik dan tenaga kependidikan, Peningkatan profil lulusan, pemenuhan sarpras pendukung Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan perluasan SKB, dukungan program Wajib Belajar 13 (tiga belas) tahun, dukungan perwujudan pembangunan Sekolah Rakyat;
 - b. Penyiapan pendidik dalam pendidikan karakter dan keagamaan
 - c. Peningkatan kualitas pendidik keagamaan informal melalui kegiatan bimbingan teknis;
 - d. Penguatan SDM pendidikan, pembentukan kebijakan *smart education*, dan pendidikan karakter.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan / pembinaan / pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan, dengan fokus pada:
 - a. Penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten;
 - b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan primer dan rujukan;
 - c. Penguatan SDM dalam mendukung peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan;
 - d. Penguatan SDM kesehatan dan kebijakan pelayanan kesehatan digital terpadu (*Smart Health*).
4. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas, dengan fokus pada:
 - a. Sinkronisasi dan sinergitas pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan rob disertai dengan dukungan terhadap penanganan kawasan kumuh, penyiapan penyediaan akses jalan pelabuhan perikanan onshore dan peningkatan kualitas jalan yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM;
 - b. Menunjang prasarana pendidikan pada ruas jalan kota di Kota Pekalongan;
 - c. Penataan Sistem Drainase Perkotaan;
 - d. Peningkatan koordinasi penyediaan sumber air baku permukaan (sedang dilakukan kajian oleh *Blue Deal*, peluang mengusulkan kegiatan melalui Mercy ZCRA);

- e. Peningkatan koordinasi perwujudan tujuan rencana tata ruang Kota Pekalongan;
 - f. Peningkatan sosialisasi rekayasa lalu lintas dan peningkatan penertiban parkir serta pedagang kaki lima;
 - g. Penguatan SDM dan kebijakan infrastruktur perkotaan berkelanjutan.
5. Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender, dengan fokus pada, dengan fokus pada:
 - a. Sinkronisasi data kesejahteraan sosial untuk mewujudkan data tunggal yang reliabel dan mudah diakses;
 - b. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong perwujudan kemandirian;
 - c. Identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka;
 - d. Peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja melalui kerja sama dengan LPKS dan BLKK;
 - e. Identifikasi data pilah gender;
 - f. Penguatan SDM dan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu;
 - g. Penguatan SDM dan kebijakan ketenagakerjaan;
 - h. Penguatan SDM dan kebijakan layanan berperspektif gender.
 6. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan kapasitas aparatur dan SDM pendukung layanan perizinan dan penanaman modal;
 - b. Peningkatan kualitas SDM mendukung kualitas produk IKM;
 - c. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi kompetensi SDM pengelola koperasi dan usaha mikro;
 - d. Peningkatan kompetensi SDM pelaku perdagangan dalam pemasaran global dan penguatan branding;
 - e. Regenerasi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. Peningkatan kualitas SDM mendukung kualitas produk IKM batik;
 - g. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan Perikanan;
 - h. Penguatan dan kolaborasi SDM dari lembaga riset dan Perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan produk unggulan Kota Pekalongan;
 - i. Penguatan SDM, kebijakan *smart branding*, dan ekosistem investasi digital..
 7. Penguatan SDM pengelola dan pelaku budaya, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan kerjasama dan dukungan stakeholder kebudayaan dan pariwisata dalam meningkatkan SDM pengelola budaya;
 - b. Penguatan SDM Budaya dan kebijakan pelestarian budaya lokal.
 8. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan SDM forum-forum strategi masyarakat, keluarga, sekolah, lembaga pendidikan dan media massa;
 - b. Penerapan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang profesional dan tidak diskrimatif serta sosialisasi edukasi penguatan toleransi masyarakat dalam penanganan kebakaran;
 - c. Peningkatan profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Penguatan komunitas tanggap bencana dan edukasi bencana sejak dini;
 - e. Penguatan SDM dan kebijakan pencegahan Konflik serta pendidikan karakter.

9. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui KIE;
 - b. Memperkuat pelibatan komunitas (kader pengelolaan sampah, PJAS, KSM TPS3R dan TPST)
 - c. Revitalisasi TPS3R dan membangun TPST secara bertahap
 - d. Monitoring dan penanganan TPA pasca penutupan (Pembangunan IPAL Lindi);
 - e. Memperkuat pelibatan komunitas (kader lingkungan)
 - f. Pemetaan dan identifikasi potensi sumber/titik dan tingkat cemaran udara
 - g. Pengembangan Komunitas & Kader Hijau;
 - h. Pemetaan dan identifikasi RTH (publik dan privat);
 - i. Penguatan SDM dan Kebijakan smart environment.

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2026 sesuai RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 - 6,00 persen;
- b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
- c) Tingkat kemiskinan sebesar 5,96 - 6,59 persen;
- d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,88;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,01 - 4,35 persen.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2026. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel IV-4 berikut.

Tabel IV-4
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas
Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2026

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2026
Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas Dan Kolaboratif	Tata Kelola Pemerintahan	1. Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital.
Belum optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter Dan Religius	Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius.
		3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan/ pembinaan/ pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan.
Belum Optimalnya Kemandirian Ekonomi Daerah	Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	6. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi <i>stakeholder</i> yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2026
	Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman	4. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas.
		9. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu.
	Kondusivitas Wilayah	8. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan
	Kelestarian budaya lokal	7. Peningkatan peran stakeholder budaya dalam pelestarian Budaya Lokal
Belum Optimalnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan Masyarakat	5. Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender.

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2026, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2026 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagaimana disajikan dalam Tabel IV-5 berikut.

Tabel IV-5
Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1. Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital, dengan fokus pada: a. Penguatan regulasi dan SDM dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis outcome; b. Peningkatan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas untuk pengelola keuangan daerah dan pengelola BMD; c. Peningkatan pemahaman ASN tentang nilai-nilai integritas; d. Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian guna mendukung penerapan sistem merit dan <i>corporate university</i> ; e. Peningkatan SDM, kepemimpinan, dan literasi digital.	Nilai SAKIP Kota	75,81	Nilai	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	kategori	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP)	82,25	nilai	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	91,39	indeks	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol P3KP
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
				Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
				Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
				Program Pencatatan Sipil	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Set DPRD
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) (IUP)	4,59	indeks	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Program Riset Dan Inovasi Daerah	Bapperida
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinkominfo
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Semua Kecamatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPPA
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
2. Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius, dengan fokus pada: a. Peningkatan SDM pendidik dan tenaga kependidikan, Peningkatan profil lulusan, pemenuhan sarpras pendukung Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan perluasan SKB, dukungan program Wajib Belajar 13 (tiga belas) tahun, dukungan perwujudan pembangunan Sekolah Rakyat; b. Penyiapan pendidik dalam pendidikan karakter dan keagamaan c. Peningkatan kualitas pendidik keagamaan informal melalui kegiatan bimbingan teknis; d. Penguatan SDM pendidikan, pembentukan kebijakan <i>smart education</i> , dan pendidikan karakter.	Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun	9,74	tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00	persen	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinarpus
				Program Pembinaan Perpustakaan	
				Program Pengembangan Kurikulum	
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan/pembinaan/pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	75,08	tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan, dengan fokus pada: a. Penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten; b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan primer dan rujukan; c. Penguatan SDM dalam mendukung peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan; d. Penguatan SDM kesehatan dan kebijakan pelayanan kesehatan digital terpadu (<i>Smart Health</i>).				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Program Pengembangan Perumahan	
				Program Kawasan Permukiman	Dinperkim
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
4. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas, dengan fokus pada: a. Sinkronisasi dan sinergitas pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan rob disertai dengan dukungan terhadap penanganan kawasan kumuh, penyiapan penyediaan akses jalan pelabuhan perikanan <i>onshore</i> dan peningkatan kualitas jalan yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM; b. Menunjang prasarana pendidikan pada ruas jalan kota di Kota Pekalongan; c. Penataan Sistem Drainase Perkotaan; d. Peningkatan koordinasi penyediaan sumber air baku permukaan (sedang dilakukan kajian oleh <i>Blue Deal</i> , peluang mengusulkan kegiatan melalui Mercy ZCRA); e. Peningkatan koordinasi perwujudan tujuan rencana tata ruang Kota Pekalongan;	Nilai realisasi investasi tahun N	170,68	Rp. Milyar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
				Program Penataan Bangunan Gedung	
				Program Penyelenggaraan Jalan	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Setda (Bagian Perekonomian dan PBJ)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
f. Peningkatan sosialisasi rekayasa lalu lintas dan peningkatan penertiban parkir serta pedagang kaki lima; g. Penguatan SDM dan kebijakan infrastruktur perkotaan berkelanjutan.					
5. Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender, dengan fokus pada: a. Sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan data tunggal yang reliabel dan mudah diakses; b. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat untuk mendorong perwujudan kemandirian; c. Identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka; d. Peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja melalui kerja sama dengan LPKS dan BLKK; e. Identifikasi data pilah gender; f. Penguatan SDM dan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu; g. Penguatan SDM dan kebijakan ketenagakerjaan; h. Penguatan SDM dan kebijakan layanan berperspektif gender.	Persentase populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	7,22	persen	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinsos P2KB
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,91-4,40	persen	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial	Dinperinaker
	Indeks Ketimpangan Gender	0,2 -0.18	indeks	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPMPPA
	Kategori Kota Layak Anak	Nindya	kategori	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak	
	Nilai realisasi investasi tahun N	170,68	Rp. Milyar	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
a. Penguatan kapasitas aparatur dan SDM pendukung layanan perizinan dan penanaman modal; b. Peningkatan kualitas SDM mendukung kualitas produk IKM; c. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi kompetensi SDM pengelola koperasi dan usaha mikro; d. Peningkatan kompetensi SDM pelaku perdagangan dalam pemasaran global dan penguatan branding; e. Regenerasi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif; f. Peningkatan kualitas SDM mendukung kualitas produk IKM batik; g. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan Perikanan; h. Penguatan dan kolaborasi SDM dari lembaga riset dan Perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan produk unggulan Kota Pekalongan; i. Penguatan SDM, kebijakan <i>smart branding</i> , dan ekosistem investasi digital.				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinperpa
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Program Perizinan Usaha Pertanian	
				Program Penyuluhan Pertanian	
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,00	persen	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dindagkop UKM
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
				Program Pengembangan UMKM	
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
				Program Pengembangan Ekspor	
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan	3,20	persen	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKP
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
7. Penguatan SDM pengelola dan pelaku budaya, dengan fokus pada: a. Penguatan kerjasama dan dukungan <i>stakeholder</i> kebudayaan dan pariwisata dalam meningkatkan SDM pengelola budaya; b. Penguatan SDM Budaya dan kebijakan pelestarian budaya lokal.	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum	10,00	persen	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
				Program Pemasaran Pariwisata	
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
				Program Pengembangan Kebudayaan	
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
				Program Pembinaan Sejarah	
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Program Pengelolaan Permuseuman	
8. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga,	Nilai realisasi investasi tahun N	170,68	Rp. Milyar	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol P3KP

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan, dengan fokus pada: a. Penguatan SDM forum-forum strategi masyarakat, keluarga, sekolah, lembaga pendidikan dan media massa; b. Penerapan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang profesional dan tidak diskriminatif serta sosialisasi edukasi penguatan toleransi masyarakat dalam penanganan kebakaran; c. Peningkatan profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum; d. Penguatan komunitas tanggap bencana dan edukasi bencana sejak dini; e. Penguatan SDM dan kebijakan pencegahan Konflik serta pendidikan karakter.				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
				Program Penanggulangan Bencana	BPBD
9. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu, dengan fokus pada: a. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui KIE; b. Memperkuat pelibatan komunitas (kader pengelolaan sampah, PJAS, KSM TPS3R dan TPST) c. Revitalisasi TPS3R dan membangun TPST secara bertahap	Nilai realisasi investasi tahun N	170,68	Rp. Milyar	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	DLH

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
d. Monitoring dan penanganan TPA pasca penutupan (Pembangunan IPAL Lindi); e. Memperkuat pelibatan komunitas (kader lingkungan) f. Pemetaan dan identifikasi potensi sumber/titik dan tingkat cemaran udara g. Pengembangan Komunitas & Kader Hijau; h. Pemetaan dan identifikasi RTH (publik dan privat); i. Penguatan SDM dan Kebijakan <i>smart environment</i> .				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				Program Pengelolaan Persampahan	

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.2.4 Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional

Dukungan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terhadap prioritas pembangunan nasional dilakukan melalui penyalarsan sebagaimana disajikan pada sub bab 1.3.3. Selanjutnya, dukungan tersebut dijabarkan lebih detil melalui program-program yang mendukung prioritas nasional sebagaimana disajikan pada Tabel IV-6 berikut.

Tabel IV-6
Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
01. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	08. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen	1.518.386.000	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan yang memahami etika dan budaya politik	16 lembaga	1.187.320.000	
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 01					2.705.706.000	
02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	08. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen	258.000.000	Bakesbangpol
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 Persen	98.197.000	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kejadian Konflik SARA (IUP)	0 kali	288.930.000	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	84 persen	4.972.176.000	Satpol P3KP
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 02					5.617.303.000	
03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan	03. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan/	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	2.29 persen	27.293.916.000	Dinperkim
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni pada kawasan rawan bencana	75.22 Persen	1.643.712.000	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	pembinaan/ pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	76.34 Persen	8.377.397.000	
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	10 hektar	8.516.098.000	
	04. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan	86 persen	1.215.180.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah yang terlayani Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di daerah Kab/Kota	88.66 Persen	1.895.415.000	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi mantap	40.94 Persen	2.244.722.000	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di daerah kab/kota	35.07 Persen	1.324.112.000	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100 Persen	13.611.558.000	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pembinaan jasa konstruksi dengan kinerja baik	98.67 Persen	58.280.000	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase penambahan sarpras persampahan	16.67 Persen	617.685.000	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang	83.00 Nilai	535.540.000	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	0.3 Persen	15.940.920.000	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat pelayanan ruas jalan kota dengan kategori baik (LOS A dan B)	28.24 Persen	19.208.487.000	DINHUB
			Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0.44 Ratio		
			Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	77 Persen		
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Return on Aset (ROA) BUMD,	0.3 Persen	894.156.000	Setda
			Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB,	0.35 Persen		
			Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	0.49 Persen		
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	7 persen		
			Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100.00 persen		
	05. Sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan data tunggal dan pilah gender serta identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Kota Layak Anak	769.9 Skor	176.534.000	DPMPPA
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Teradvokasi	14.29 Persen	89.364.000	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Layanan Permasalahan Keluarga Yang Terlayani	100 Persen	23.900.000	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pengaduan Kasus Anak Yang Terlayani	100 Persen	72.544.000	
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	18.46 Rasio per 100.000	93.221.000	
	06. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	33.15 Persen	29.200.000	Dindagkop UKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	54.61 Persen	129.800.000	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha	30.78 Persen	733.300.000	DLH
	09. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase tingkat pelanggaran kategori berat terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan	11.11 persen	29.590.000	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	10.630.000	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penambahan Luasan RTH Publik	0.05 persen	4.794.592.000	
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	46.75 persen	19.943.406.000	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha/ Kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan	75 persen	1.640.000	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase air sungai yang memenuhi baku mutu	45.83 persen	1.136.972.000	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah yang memenuhi standar Adiwiyata	6.91 Persen	44.350.000	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase komunitas peduli LH yang aktif	33.33 persen	352.500.000	
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana	100 persen	1.520.382.000	BPBD
	Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 03					132.559.103.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	50.92 indeks	926.814.000	Dinarpus
			Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	32 persen		
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	64 Persen	15.528.450.000	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	93.15 Persen	53.579.684.700	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	99.72 Persen		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	96.72 Persen		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	35.92 Persen		
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	20 Persen	83.800.000	
	03. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan, serta pemenuhan hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Rumah Tangga Sehat	95.5 Persen	2.775.831.000	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	79.6 Persen	76.680.958.000	
			Presentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98.54 Persen		
			Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi (IKK Outcome)	100 Persen		
			Presentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	87 persen		
			Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	13 Persen		Semua Puskesmas, BPSJ
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di fasyankes (Standar Kemenkes)	36.36 Persen	608.582.000	Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			Presentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 Persen	492.237.000	RSUD Bendan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmasi yang menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan regulasi	100 Persen		Dinas Kesehatan
			Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100 Persen		
			Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat	46 Persen		
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 04					150.676.356.700	
05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	06. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	90.02 Persen	709.871.000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	5 Stakeholder	93.356.000	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100 persen	26.300.000	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku usaha yang melaporkan LKPM	41.14 Persen	99.016.000	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	15.000.000	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	526.21 Ton	256.208.000	DKP
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	9893.24 Ton	3.026.580.000	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 persen	301.534.000	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan jumlah industri pengolahan yang melaporkan secara lengkap di SIINAS	9 persen	37.730.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	60.45 persen	135.154.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Volume Ekspor	3.4 Persen	96.100.000	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.88 Persen	2.281.425.000	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penataan, pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat)	8.33 Persen	6.829.665.000	
			Persentase Pembinaan terhadap pedagang kaki lima	37.5 Persen		
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Perdagangan yang Sesuai dengan Ketentuan	2.22 Persen	3.000.000	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting minimal 8 kali dalam sebulan	100 Persen	76.200.000	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	82.49 Persen	219.826.000	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen	541.480.000	Dinperpa
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	75.59 Miliar rupiah	317.100.000	
			Nilai produksi peternakan pertahun	201.65 Miliar rupiah		
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5 persen	31.000.000	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100 persen	15.000.000	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen	22.500.000	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	87.2 persen	21.500.000	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	12.000.000	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular yang Tertangani	100 persen	305.880.000	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93.12 angka	337.680.000	
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	300 orang	442.244.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pendaftaran HAKI di sektor ekonomi kreatif	100 persen	15.000.000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	100 persen	998.780.000	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	12.05 persen	2.976.634.000	
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 05					20.243.763.000	
06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi,	05. Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	12.8 persen	480.238.000	Dinperinaker

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
dan Pemberantasan Kemiskinan	kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	52114366.27 Rupiah per orang	4.493.492.000	Dinsos P2KB
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	40.05 persen	173.433.000	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Angka kelahiran pada Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	9.5 persen	1.597.160.000	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	75 persen	186.900.000	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) (IKK)	13 persen	1.704.300.000	
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	310.540.000	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen	57.360.000	
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (IKK)	84.55 persen	201.080.000	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53.73 persen	1.318.780.000	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1.696.992.000	
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 06					12.220.275.000	
07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan	01. Penguatan regulasi dan peningkatan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Dengan Kriteria *Cepat Berkembang*	100 Persen	43.792.000	DPMPPA

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	100 Persen	878.880.000	
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	100 Persen	337.468.000	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100 Persen	26.958.639.000	Sekretariat DPRD
			Persentase Perda yang disetujui	100 Persen		
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	70 persen	880.056.000	BKPSDM
			Persentase keterisian jabatan manajerial ASN	95 persen		
			Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan	100 persen		
			Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	100 persen		
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	426.350.000	Bapperida
			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Perekonomian	100 persen		
			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen		

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen	803.169.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen	16.657.366.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
			Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		Semua Kelurahan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen	18.129.904.000	Setda
			Indeks Reformasi Hukum (IUP)	96.76 indeks		
			Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 persen		
		Program Pencatatan Sipil	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil	100 Persen	361.611.000	Dindukcapil
		Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	98 Persen	334.561.000	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	13 OPD	71.000.000	Satpol P3KP
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100 persen	831.972.000	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.45 persen	2.306.178.000	Dinkominfo
			Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan pusat data pemerintah daerah kabupaten/kota	100 persen		
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (IKK)	100 persen		
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 Persen	4.174.867.000	Dinarpus
		Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	74.2 Persen	254.461.000	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	794.650.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pesentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	100 persen	4.976.045.000	
			Persentase penatausahaan keuangan OPD sesuai dengan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100 persen		
			Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD yang sesuai SAP	100 persen		

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen potensi pendapatan asli daerah; dan Persentase Realisasi PAD	100 persen	1.421.069.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabor yang memiliki Sarpras Olahraga	43 persen	6.599.504.000	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase anggota Organisasi Kepemudaan yang dibina	56 persen	4.083.000.000	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan pada tahun n	100 Persen	100.000.000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN berkembang kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional	52 persen	984.340.000	BKPSDM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 Persen	622.336.671.300	Setda
			Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100 Persen		Semua OPD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 Persen		
			Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen		
			Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen		Setda
			Persentase pelayanan keprotokoleran	100 Persen		RSUD Bendan, Semua Puskesmas, BPSJ
			Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	100 Persen		

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen	39.995.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selesai ditindaklanjuti	85 persen	300.000.000	Inspektorat Daerah
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen		
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD)	96.05 indeks	500.000.000	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	presentase sistem elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik	76 persen	179.773.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 Persen	107.460.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen	17.467.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 Persen	644.720.000	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 Persen	9.093.000	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	365.155.000	Bapperida
			Skor Satu Data Indonesia (SDI)	72.44 persen		
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 persen		
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	66.67 persen	1.025.238.000	Dinarpus
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	66.67 Persen	152.318.000	
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 07					718.086.772.300	
08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	07. Peningkatan peran stakeholder budaya dalam pelestarian Budaya Lokal	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (IUP)	23 persen	20.000.000	Dinparbudpora
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	20.000.000	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan jumlah pengunjung museum batik	5 persen	1.584.018.000	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	1.511.990.000	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen	130.550.000	
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 08					3.266.558.000	
Total Dukungan Program terhadap Prioritas Nasional					1.045.375.837.000	

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.2.5 Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Dukungan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui penyelarasan sebagaimana disajikan pada sub bab 1.3.2. Selanjutnya, dukungan tersebut dijabarkan lebih detil melalui program-program yang mendukung prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada Tabel IV-7 berikut.

Tabel IV-7
Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
01. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	01. Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100 Persen	26.958.639.000	Sekretariat DPRD
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	70 persen	880.056.000	BKPSDM
			Persentase keterisian jabatan manajerial ASN	95 persen		
			Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan	100 persen		
			Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	100 persen		
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	426.350.000	Bapperida
			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Perekonomian	100 persen		
			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD,	100 persen		

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) Bidang Infrastruktur Wilayah			
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen	803.169.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	100 Persen	878.880.000	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Dengan Kriteria *Cepat Berkembang*	100 Persen	43.792.000	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen	16.657.366.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
			Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		Semua Kelurahan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen	18.129.904.000	Setda
			Indeks Reformasi Hukum (IUP)	96.76 indeks		
			Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 persen		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100 persen	831.972.000	Satpol P3KP
		Program Pencatatan Sipil	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil	100 Persen	361.611.000	Dindikcapil
		Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	98 Persen	334.561.000	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	13 OPD	71.000.000	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.45 persen	2.306.178.000	Dinkominfo
			Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan pusat data	100 persen		

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			pemerintah daerah kabupaten/kota			
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (IKK)	100 persen		
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 Persen	4.174.867.000	Dinarpus
		Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	74.2 Persen	254.461.000	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pesentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	100 persen	4.976.045.000	BPKAD
			Persentase penatausahaan keuangan OPD sesuai dengan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100 persen		
			Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD yang sesuai SAP	100 persen		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen potensi pendapatan asli daerah; dan Persentase Realisasi PAD	100 persen	1.421.069.000	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang- undangan	100 persen	794.650.000	

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabor yang memiliki Sarpras Olahraga	43 persen	6.599.504.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase anggota Organisasi Kepemudaan yang dibina	56 persen	4.083.000.000	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan pada tahun n	100 Persen	100.000.000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN berkembang kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional	52 persen	984.340.000	BKPSDM
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	100 Persen	337.468.000	DPMPPA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 Persen	622.336.671.300	Setda
			Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100 Persen		Semua OPD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 Persen		
			Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen		
			Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan,	100 Persen		Setda

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah			RSUD Bendan, Semua Puskesmas, BPSJ
			Persentase pelayanan keprotokoleran	100 Persen		
			Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	100 Persen		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen	39.995.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selesai ditindaklanjuti	85 persen	300.000.000	Inspektorat Daerah

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen		
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	presentase sistem elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik	76 persen	179.773.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 Persen	107.460.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen	17.467.000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	365.155.000	Bapperida
			Skor Satu Data Indonesia (SDI)	72.44 persen		
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan	100 persen		

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			pelaporan triwulanan tepat waktu			
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	66.67 Persen	152.318.000	Dinarpus
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD)	96.05 indeks	500.000.000	Inspektorat Daerah
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 Persen	644.720.000	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah <i>Absentee</i>	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	50 Persen	9.093.000	
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	66.67 persen	1.025.238.000	Bapperida
	08. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	84 persen	4.972.176.000	Satpol P3KP
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang	100 Persen	98.197.000	Bakesbangpol

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
	komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan	Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen	1.518.386.000	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen	258.000.000	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kejadian Konflik SARA (IUP)	0 kali	288.930.000	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan yang memahami etika dan budaya politik	16 lembaga	1.187.320.000	
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah 01					726.409.781.300	
02. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	04. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan	86 persen	1.215.180.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah yang terlayani Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di daerah Kab/Kota	88.66 Persen	1.895.415.000	

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi mantap	40.94 Persen	2.244.722.000	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di daerah kab/kota	35.07 Persen	1.324.112.000	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100 Persen	13.611.558.000	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pembinaan jasa kontruksi dengan kinerja baik	98.67 Persen	58.280.000	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase penambahan sarpras persampahan	16.67 Persen	617.685.000	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	0.3 Persen	15.940.920.000	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang	83.00 Nilai	535.540.000	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat pelayanan ruas jalan kota dengan kategori baik (LOS A dan B)	28.24 Persen	19.208.487.000	Dinas Perhubungan
			Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0.44 Ratio		
			Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	77 Persen		
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Return on Aset (ROA) BUMD,	0.3 Persen	894.156.000	Setda
			Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB,	0.35 Persen		

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	0.49 Persen		
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	7 persen		
			Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100.00 persen		
	06. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	90.02 Persen	709.871.000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	5 Stakeholder	93.356.000	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100 persen	26.300.000	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku usaha yang melaporkan LKPM	41.14 Persen	99.016.000	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	15.000.000	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	9893.24 Ton	3.026.580.000	DKP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	526.21 Ton	256.208.000	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 persen	301.534.000	

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan jumlah industri pengolahan yang melaporkan secara lengkap di SIINAS	9 persen	37.730.000	Dinperinaker
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	60.45 persen	135.154.000	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	33.15 Persen	29.200.000	Dindagkop UKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	54.61 Persen	129.800.000	
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Volume Ekspor	3.4 Persen	96.100.000	
		Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha	30.78 Persen	733.300.000	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.88 Persen	2.281.425.000	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Perdagangan yang Sesuai dengan Ketentuan	2.22 Persen	3.000.000	

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting minimal 8 kali dalam sebulan	100 Persen	76.200.000	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	82.49 Persen	219.826.000	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penataan, pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat)	8.33 Persen	6.829.665.000	
			Persentase Pembinaan terhadap pedagang kaki lima	37.5 Persen		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen	541.480.000	Dinperpa
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	75.59 Miliar rupiah	317.100.000	
			Nilai produksi peternakan pertahun	201.65 Miliar rupiah		
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5 persen	31.000.000	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100 persen	15.000.000	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93.12 angka	337.680.000	

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	12.000.000	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular yang Tertangani	100 persen	305.880.000	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	87.2 persen	21.500.000	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen	22.500.000	
	07. Penguatan SDM pengelola dan pelaku budaya	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	300 orang	442.244.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pendaftaran HAKI di sektor ekonomi kreatif	100 persen	15.000.000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	100 persen	998.780.000	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	12.05 persen	2.976.634.000	
	09. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana	100 persen	1.520.382.000	BPBD

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penambahan Luasan RTH Publik	0.05 persen	4.794.592.000	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	46.75 persen	19.943.406.000	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha/ Kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan	75 persen	1.640.000	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase tingkat pelanggaran kategori berat terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan	11.11 persen	29.590.000	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	10.630.000	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase air sungai yang memenuhi baku mutu	45.83 persen	1.136.972.000	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah yang memenuhi standar Adiwiyata	6.91 Persen	44.350.000	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase komunitas peduli LH yang aktif	33.33 persen	352.500.000	
		Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah 02				
03. Penguatan Landasan	02. Peningkatan SDM pendidikan untuk	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	50.92 indeks	926.814.000	Dinarpus

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius		Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	32 persen		
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	64 Persen	15.528.450.000	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	93.15 Persen	53.579.684.700	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	99.72 Persen		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	96.72 Persen		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	35.92 Persen		
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	20 Persen	83.800.000	
	03. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan/ pembinaan/ pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Rumah Tangga Sehat	95.5 Persen	2.775.831.000	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	79.6 Persen	76.680.958.000	Dinas Kesehatan
			Presentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98.54 Persen		Dinas Kesehatan
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	79.6 Persen		Dinas Kesehatan

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi (IKK Outcome)	100 Persen		RSUD Bendan
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	87 persen		RSUD Bendan
			Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	13 Persen		Semua Puskesmas, BPSJ
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di fasyankes (Standar Kemenkes)	36.36 Persen	608.582.000	Dinas Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 Persen		RSUD Bendan
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	10 hektar	8.516.098.000	Dinperkim
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni pada kawasan rawan bencana	75.22 Persen	1.643.712.000	
		Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	2.29 persen	27.293.916.000	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	76.34 Persen	8.377.397.000	

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmasi yang menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan regulasi	100 Persen	492.237.000	Dinas Kesehatan
			Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100 Persen		
			Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat	46 Persen		
	05. Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	12.8 persen	480.238.000	Dinperinaker
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	52114366.27 Rupiah per orang	4.493.492.000	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	40.05 persen	173.433.000	
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (IKK)	64,55 persen	201.080.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Angka kelahiran pada Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	9.5 persen	1.597.160.000	

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan unmeed need KB	13 persen	1.704.300.000	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	75 persen	186.900.000	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53.73 persen	1.318.780.000	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1.696.992.000	
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	310.540.000	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen	57.360.000	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Teradvokasi	14.29 Persen	89.364.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	18.46 Rasio per 100.000	93.221.000	

PRIORITAS JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS KOTA PEKALONGAN 2026	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Layanan Permasalahan Keluarga Yang Terlayani	100 Persen	23.900.000	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pengaduan Kasus Anak Yang Terlayani	100 Persen	72.544.000	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Kota Layak Anak	769.9 Skor	176.534.000	
	07. Peningkatan peran stakeholder budaya dalam pelestarian Budaya Lokal	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (IUP)	23 persen	20.000.000	Dinparbudpora
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	20.000.000	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan jumlah pengunjung museum batik	5 persen	1.584.018.000	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	1.511.990.000	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen	130.550.000	
	Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah 03				212.449.875.700	
	Total Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah				1.045.375.837.000	

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.2.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Beberapa Pokok-pokok pikiran DPRD menyoroti beberapa hal diantaranya bagaimana upaya yang akan dilakukan Kota Pekalongan dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan bisa bersaing dengan daerah lainnya. Pemerintah harus mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien, terutama menyikapi kebijakan efisiensi anggaran agar program-program yang telah direncanakan tetap berjalan dengan baik, meskipun terjadi perubahan atau keterbatasan fiskal. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi kunci untuk memastikan bahwa efisiensi ini tidak mengurangi kualitas layanan, tetapi justru mendorong tercapainya target-target pembangunan yang lebih tinggi.

Visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan lima tahun ke depan harus menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan. Misi pertama adalah taat hukum, menegakkan hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat dan memastikan adanya kesetaraan di mata hukum. Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan sosial menjadi landasan penting dalam pembangunan.

Selanjutnya, sektor pendidikan dengan memberikan pendidikan di semua jenjang dengan merata. Pemerintah harus menjamin akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Setiap anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun anak berkebutuhan khusus, harus memperoleh hak yang sama dalam mengenyam pendidikan berkualitas. Hal ini penting untuk menciptakan sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di masa depan. Pada bidang kesehatan, Pemerintah Kota Pekalongan telah berupaya memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas dan menjamin pembiayaan layanan tersebut agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Fasilitas kesehatan harus ditingkatkan baik dari sisi infrastruktur, tenaga medis, maupun sistem layanannya, agar setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk hidup sehat.

Pengembangan infrastruktur menjadi penopang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta mempercepat perputaran ekonomi lokal. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Di sisi lain, pelayanan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan harus terus ditingkatkan. Masih terdapat masyarakat di Kota Pekalongan yang hidup dalam kondisi kurang layak, terutama dalam hal sanitasi dan tempat tinggal. Oleh karena itu, program seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sosial lainnya harus diperkuat, disertai verifikasi data penerima yang ketat agar tepat sasaran dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara signifikan.

Pemerintah juga harus mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kota Pekalongan yang dikenal sebagai kota kreatif berbasis budaya memiliki potensi besar dari sektor seni, batik, dan pariwisata. Kemitraan yang erat antara pemerintah dan para pelaku seni budaya lokal akan memperkuat identitas kota sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Dari sisi stabilitas sosial dan politik, Pekalongan patut berbangga karena pada Pilkada 2024 tidak terjadi konflik yang signifikan. Kota ini bahkan termasuk dalam sedikit daerah yang tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi modal sosial yang kuat untuk menjaga kondusivitas wilayah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Akhirnya, salah satu tantangan besar yang akan dihadapi ke depan adalah pengelolaan sampah dan perbaikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani persoalan ini secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan krisis lingkungan.

Dengan landasan visi yang kuat dan implementasi misi yang konsisten, Kota Pekalongan berpeluang besar menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan. Tentu, pencapaian ini hanya akan terwujud jika seluruh elemen pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan bekerja bersama dengan komitmen dan integritas yang tinggi.

4.3 Inovasi Kebijakan Pembangunan

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah secara kontinyu. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, dan salah satu kategori kinerja dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang Perencanaan, Kelembagaan, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Sanksi Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Peraturan Wali Kota tersebut akan mendorong inovasi kebijakan Pembangunan dengan merumuskan ruang lingkup Sistem Inovasi Daerah yang lebih terarah. Dalam hal perencanaan, Pemerintah Kota Pekalongan telah merumuskan *Road Map* SIDA yang melingkupi Kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang SIDA, Kondisi SIDA yang akan dicapai, Strategi dan Arah Kebijakan SIDA dan Rencana aksi penguatan SIDA.

Selanjutnya, telah dirumuskan juga kelembagaan SIDA yang mengatur pembentukan Tim Penguatan SIDA, dengan ruang lingkup tugas antara lain, mengintegrasikan program inovatif SIDA dengan RPJMD, melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA, mempersiapkan rumusaan kebijakan penyelenggaraan SIDA, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan SIDA, melakukan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan SIDA.

Dalam hal penyelenggaraan SIDA, Peraturan Wali Kota memperkuat munculnya inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Adanya kebijakan tersebut akan mendorong munculnya inovasi kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah dan keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat.

Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan) dan pengelolaan fungsi manajemen (sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja).

Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi. Inovasi ini dimaksud untuk mendorong tumbuh kembang iklim inovasi masyarakat dan ekosistem inovasi daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Lebih lanjut, seluruh rangkaian inovasi ini akan dilakukan proses evaluasi penyelenggaraan SIDA secara rutin. Evaluasi Penyelenggaraan SIDA dilakukan melalui penilaian kapasitas inovatif daerah. Penilaian kapasitas inovatif dilaksanakan guna mengetahui capaian implementasi program inovatif SIDA dan sebagai tolak ukur kemajuan SIDA. Pelaksanaan penilaian kapasitas inovatif daerah tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan mengikutsertakan perguruan tinggi, industri/UMKM, dan masyarakat.

Disisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan juga fokus menyelenggarakan fungsi kelitbang pada tema-tema strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan kota. Penyelenggaraan fungsi litbang ini dilakukan melalui tema yang dikompertisikan dalam Riset Unggulan Daerah dengan mengambil isu strategis pada tahun perencanaan N+1.

Inovasi Kebijakan Pembangunan juga sedang dirintis melalui kegiatan riset bersama, yang melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi. Tidak hanya melalui riset unggulan dan riset bersama, dorongan inovasi kebijakan pembangunan juga dilakukan dalam perwujudan program unggulan atau program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021-2026.

4.4 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2026 Dengan Menerapkan Konsep Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Sebagai bagian dari rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026 menerapkan konsep teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Konsep tersebut merupakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses yang diuraikan sebagai berikut.

4.4.1 Teknokratik

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses awal dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan teknokratik oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bapperida. Hasil dari proses ini yaitu Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026 secara teknokratik mempedomani arah kebijakan dan sasaran tahun 2026 pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 yang selaras dengan program perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel IV-8
Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2026
Dengan Pendekatan Teknokratik

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1. Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian, peningkatan kompetensi dan literasi digital ASN, internalisasi nilai-nilai integritas serta penguatan SDM perencana dan keuangan dalam perencanaan, pengukuran, pengelolaan keuangan, pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis outcome	Nilai SAKIP Kota	75,81	Nilai	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	kategori	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP)	82,25	nilai	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	91,39	indeks	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol P3KP
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
				Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
				Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
				Program Pencatatan Sipil	
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Set DPRD
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) (IUP)	4,59	indeks	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinparbudpora
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Program Riset Dan Inovasi Daerah	Bapperida
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinkominfo
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Semua Kecamatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMPPA
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
				Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
2. Peningkatan SDM pendidikan yang memenuhi kualifikasi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius	Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun	9,74	tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00	persen	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
3. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan, serta pemenuhan hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	75,08	tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
				Program Kawasan Permukiman	
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
4. Peningkatan kualitas SDM dan koordinasi perwujudan tujuan rencana tata ruang, sarpas perkotaan dan manajemen rekayasa lalu lintas	Nilai realisasi investasi tahun N	170,68	Rp. Milyar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
				Program Penataan Bangunan Gedung	
				Program Penyelenggaraan Jalan	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Setda (Bagian Perekonomian dan PBJ)
5. Sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan data tunggal dan pilah gender serta identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka	Persentase populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	7,22	persen	Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos P2KB
				Program Rehabilitasi Sosial	
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				Program Penanganan Bencana	
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
				Program Pengendalian Penduduk	
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,91-4,40	persen	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
				Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Program Hubungan Industrial	
	Indeks Ketimpangan Gender	0,2 -0.18	indeks	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
				Program Perlindungan Perempuan	
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
	Kategori Kota Layak Anak	Nindya	kategori	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
				Program Perlindungan Khusus Anak	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
6. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Nilai realisasi investasi tahunan	170,68	Rp. Milyar	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Program Perizinan Usaha Pertanian	
				Program Penyuluhan Pertanian	
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,00	persen	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dindagkop UKM
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
				Program Pengembangan Umkm	
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
				Program Pengembangan Ekspor	
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan	3,20	persen	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKP
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
7. Peningkatan peran stakeholder budaya dalam pelestarian Budaya Lokal	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum	10,00	persen	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
				Program Pemasaran Pariwisata	
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
				Program Pengembangan Kebudayaan	
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
				Program Pembinaan Sejarah	
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Program Pengelolaan Permuseuman	
8. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau	Nilai realisasi investasi tahun N	170,68	Rp. Milyar	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol P3KP
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026			PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan				Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
				Program Penanggulangan Bencana	BPBD
9. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu	Nilai realisasi investasi tahun N	170,68	Rp. Milyar	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				Program Pengelolaan Persampahan	

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.4.2 Partisipatif

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melalui tahapan dari tingkat basis sampai dengan tingkat kota sebagaimana Tabel IV-9 berikut.

Tabel IV-9
Penyusun RKPD Melalui Pendekatan Partisipatif

No.	Tahapan Penyusunan RKPD	Keterlibatan Stakeholder
1	Konsultasi publik rancangan awal RKPD	OPD, Forkopimda, perwakilan organisasi profesi, forum anak, perempuan, media, seni, komunitas, kelompok difabel, organisasi masyarakat, keagamaan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kota Pekalongan.
2	Pra musrenbang (penjaringan usulan masyarakat di tingkat RT dan RW)	Warga masyarakat
3	Musrenbang kelurahan	Melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti: unsur perempuan (TP-PKK); unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unsur Pemuda (Karang Taruna); unsur anak; unsur difabel; unsur partai politik; unsur pendidikan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan kelurahan
4	Musrenbang tingkat kecamatan	Melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti: unsur perempuan (TP-PKK); unsur pemuda (Karang Taruna); unsur anak; unsur difabel; unsur partai politik; unsur pendidikan, unsur kesehatan dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan kecamatan
5	Forum Perangkat Daerah	OPD dan stakeholder yang terkait dengan tema forum perangkat daerah
6	Musrenbang tingkat kota	OPD, Forkopimda, perwakilan organisasi profesi, forum anak, perempuan, media, seni, komunitas, kelompok difabel, organisasi masyarakat, keagamaan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kota Pekalongan.

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2024

4.4.3 Politis

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Visi Wali Kota Pekalongan, yaitu **“Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”**, selanjutnya, visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui penyelarasan program, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel IV-10
Penjabaran Visi dan Misi Wali Kota ke Dalam Program RKPD

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
Misi 1: Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945		
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Bapperida
	Skor Satu Data Indonesia (SDI)	Bapperida
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Bapperida
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bapperida
	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Perekonomian	Bapperida
	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) Bidang Infrastruktur Wilayah	Bapperida
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	Bagian Pemerintahan
	Indeks Reformasi Hukum (IUP)	Bagian Hukum
	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Bagian Kesra
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	Bagian Organisasi
	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bagian Umum
	Persentase pelayanan keprotokoleran	Bagian Prokompim
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Dinarpus
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Dinarpus
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	BPKAD
	Persentase penatausahaan keuangan OPD sesuai dengan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD yang sesuai SAP	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan	BPKAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen potensi pendapatan asli daerah; dan Persentase Realisasi PAD	BPKAD

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Inspektorat Daerah
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD)	Inspektorat Daerah
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Satpol P3KP
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	Dinperkim
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dinperkim
Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	Dindikcapil
Program Pencatatan Sipil	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil	Dindikcapil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	Dindikcapil
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Set DPRD
	Persentase Perda yang disetujui	Set DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Semua OPD
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	RSUD Bendan, Semua Puskesmas dan BPSJ
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	BKPSDM
	Persentase keterisian jabatan manajerial ASN	
	Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan	
	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN berkembang kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional	BKPSDM
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase anggota Organisasi Kepemudaan yang dibina	Dinparbudpora
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabor yang memiliki Sarpras Olahraga	Dinparbudpora
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan pada tahun n	Dinparbudpora
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Dinkominfo
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan pusat data pemerintah daerah kabupaten/kota	

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (IKK)	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	presentase sistem elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	
Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Bapperida
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Kec. Utara
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	Kec. Selatan
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik di Wilayah Barat	Kec. Barat
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	Kec. Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Kec. Utara
	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	Kec. Selatan
	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	Kec. Barat
	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	Kec. Timur
	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Semua Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Kec. Utara
	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	Kec. Selatan
	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	Kec. Barat
	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	Kec. Timur
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Kec. Utara
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	Kec. Selatan
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	Kec. Barat
	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	Kec. Timur
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	DPMPPA
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Dengan Kriteria *Cepat Berkembang*	DPMPPA
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	DPMPPA
Misi 2: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata		
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	Dindik
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinarpus

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	Dindik
Misi 3: Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	Dinkes
	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi (IKK Outcome)	
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	RSUD Bendan
	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	Semua Puskesmas dan BPSJ
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di fasyankes (Standar Kemenkes)	Dinkes
	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	RSUD Bendan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmasi yang menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan regulasi	Dinkes
	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	Dinkes
	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat	Dinkes
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	Dinkes
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni pada kawasan rawan bencana	Dinperkim
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	
Misi 4: Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	DPUPR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di daerah kab/kota	
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase penambahan sarpras persampahan	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah yang terlayani Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di daerah Kab/Kota	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi mantap	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan	

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pembinaan jasa konstruksi dengan kinerja baik	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat pelayanan ruas jalan kota dengan kategori baik (LOS A dan B)	Dinhub
	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	
	Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	
Misi 5: Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat		
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Dinsos P2KB
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	
Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) (IKK)	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>) (IKK)	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Angka kelahiran pada Remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Dinperinaker
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	DPMPPA
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Teradvokasi	
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Layanan Permasalahan Keluarga Yang Terlayani	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Kota Layak Anak	
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pengaduan Kasus Anak Yang Terlayani	
Misi 6: Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Setda (Bagian Perekonomian)
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku usaha yang melaporkan LKPM	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Return on Aset (ROA) BUMD,	
	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB,	
	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	
	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	Dinperpa
	Nilai produksi peternakan pertahun	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular yang Tertangani	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	Dindagkop UKM
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	
Program Pengembangan Umkm	Persentase pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha	
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Perdagangan yang Sesuai dengan Ketentuan	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penataan, pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat)	
	Persentase Pembinaan terhadap pedagang kaki lima	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting minimal 8 kali dalam sebulan	
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Volume Ekspor	DKP
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinperpa
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan jumlah industri pengolahan yang melaporkan secara lengkap di SIINAS	
Misi 7: Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Dinparbudpora
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pendaftaran HAKI di sektor ekonomi kreatif	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	
Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (IUP)	
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan jumlah pengunjung museum batik	
Misi 8. Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah		
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Satpol P3KP
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Bakesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan yang memahami etika dan budaya politik	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kejadian Konflik SARA (IUP)	

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana	BPBD
Misi 9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan		
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase air sungai yang memenuhi baku mutu	DLH
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penambahan Luasan RTH Publik	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha/ Kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase tingkat pelanggaran kategori berat terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase komunitas peduli LH yang aktif	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah yang memenuhi standar Adiwiyata	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Pendekatan secara politis juga dilakukan melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026.

4.4.4 Atas-bawah dan bawah-atas

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Bentuk penyelarasan dalam proses perencanaan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi usulan rencana pembangunan pada tahapan forum perangkat daerah, yaitu menyelaraskan antara usulan musrenbang kelurahan/kecamatan, rencana kerja perangkat daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan berpedoman pada prioritas dan fokus pembangunan Kota Pekalongan.
2. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.
3. Penyelarasan kebijakan Pusat dengan kondisi Kota Pekalongan dalam rapat TAPD.

4.5 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2026 Dengan Menerapkan Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial

Pendekatan lain sebagai satu kesatuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026 yaitu berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

4.5.1. Holistik-Tematik

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Konsep tematik yang diterapkan dalam kebijakan pembangunan Kota Pekalongan dapat dilihat melalui tema pembangunan setiap tahunnya sebagaimana Gambar IV-2 berikut.



Gambar IV-2
Konsep Tematik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

Selanjutnya, tema kebijakan pembangunan dijabarkan ke dalam prioritas dan fokus pembangunan sebagaimana diuraikan pada sub bab 4.2.3, yang secara holistik telah mencakup aspek pembangunan sebagai berikut.

Tabel IV-11
Konsep Holistik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

Prioritas Kota 2026	Aspek Pembangunan
1. Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian, peningkatan kompetensi dan literasi digital ASN, internalisasi nilai-nilai integritas serta penguatan SDM perencana dan keuangan dalam perencanaan, pengukuran, pegelolaan keuangan, pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis outcome.	tata kelola pemerintahan
2. Peningkatan SDM pendidikan yang memenuhi kualifikasi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius.	sumber daya manusia
3. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan, serta pemenuhan hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan.	kesehatan

Prioritas Kota 2026	Aspek Pembangunan
4. Peningkatan kualitas SDM dan koordinasi perwujudan tujuan rencana tata ruang, sarpras perkotaan dan manajemen rekayasa lalu lintas	Infrastruktur perkotaan dan permukiman
5. Sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan data tunggal dan pilah gender serta identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka	Kesejahteraan sosial
6. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi.	ekonomi
7. Peningkatan peran stakeholder budaya dalam pelestarian Budaya Lokal	kebudayaan
8. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan	kondusivitas wilayah
9. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu	lingkungan hidup

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

4.5.2. Integratif

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini diterapkan melalui pencapaian sasaran kinerja pembangunan tingkat kota yang didukung oleh kinerja lintas OPD sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagaimana disajikan pada Tabel IV-12 berikut.

Tabel IV-12
Konsep Integratif Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INTERVENSI PROGRAM	OPD PELAKSANA
1	2	3	4
1. Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital, dengan fokus pada: a. Penguatan regulasi dan SDM dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis outcome; b. Peningkatan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas untuk pengelola keuangan daerah dan pengelola BMD; c. Peningkatan pemahaman ASN tentang nilai-nilai integritas; d. Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian guna mendukung penerapan sistem merit dan corporate university; e. Peningkatan SDM, kepemimpinan, dan literasi digital.	Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INTERVENSI PROGRAM	OPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol P3KP
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
		Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Set DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Bapperida
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Semua Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INTERVENSI PROGRAM	OPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	DPMPPA
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
2. Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius, dengan fokus pada: a. Peningkatan SDM pendidik dan tenaga kependidikan, Peningkatan profil lulusan, pemenuhan sarpras pendukung Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan perluasan SKB, dukungan program Wajib Belajar 13 (tiga belas) tahun, dukungan perwujudan pembangunan Sekolah Rakyat; b. Penyiapan pendidik dalam pendidikan karakter dan keagamaan c. Peningkatan kualitas pendidik keagamaan informal melalui kegiatan bimbingan teknis; d. Penguatan SDM pendidikan, pembentukan kebijakan smart education, dan pendidikan karakter.	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta pendidikan karakter	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinarpus
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dindik
		Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan/pembinaan/pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan, dengan fokus pada: a. Penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten; b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan primer dan rujukan; c. Penguatan SDM dalam mendukung peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan;	Meningkatnya derajat kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Program Pengembangan Perumahan	
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinperkim

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INTERVENSI PROGRAM	OPD PELAKSANA
1	2	3	4
d. Penguatan SDM kesehatan dan kebijakan pelayanan kesehatan digital terpadu (Smart Health).		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
4. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas, dengan fokus pada: a. Sinkronisasi dan sinergitas pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan rob disertai dengan dukungan terhadap penanganan kawasan kumuh, penyiapan penyediaan akses jalan pelabuhan perikanan onshore dan peningkatan kualitas jalan yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM; b. Menunjang prasarana pendidikan pada ruas jalan kota di Kota Pekalongan; c. Penataan Sistem Drainase Perkotaan; d. Peningkatan koordinasi penyediaan sumber air baku permukaan (sedang dilakukan kajian oleh Blue Deal, peluang mengusulkan kegiatan melalui Mercy ZCRA); e. Peningkatan koordinasi penyediaan sumber air baku permukaan (sedang dilakukan kajian oleh Blue Deal, peluang mengusulkan kegiatan melalui Mercy ZCRA); f. Peningkatan koordinasi perwujudan tujuan rencana tata ruang Kota Pekalongan; g. Peningkatan sosialisasi rekayasa lalu lintas dan peningkatan penertiban parkir serta pedagang kaki lima; h. Penguatan SDM dan kebijakan infrastruktur perkotaan berkelanjutan.	Meningkatnya investasi daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
		Program Penataan Bangunan Gedung	
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
5. Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender, dengan fokus pada: a. Sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan data tunggal yang reliabel dan mudah diakses; b. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat untuk mendorong perwujudan kemandirian; b. Identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka;	Menurunnya populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos P2KB
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		Program Penanganan Bencana	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
		Program Pengendalian Penduduk	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
	Menurunnya angka pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INTERVENSI PROGRAM	OPD PELAKSANA
1	2	3	4
c. Peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja melalui kerja sama dengan LPKS dan BLKK; d. Identifikasi data pilah gender; e. Penguatan SDM dan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu; f. Penguatan SDM dan kebijakan ketenagakerjaan; g. Penguatan SDM dan kebijakan layanan berperspektif gender.		Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial	
	Optimalnya pengarusutamaan gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada: a. Penguatan kapasitas aparatur dan SDM pendukung layanan perizinan dan penanaman modal; b. Peningkatan kualitas SDM mendukung kualitas produk IKM; c. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi kompetensi SDM pengelola koperasi dan usaha mikro; d. Peningkatan kompetensi SDM pelaku perdagangan dalam pemasaran global dan penguatan branding; e. Regenerasi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif; f. Peningkatan kualitas SDM mendukung kualitas produk IKM batik; g. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan Perikanan; h. Penguatan dan kolaborasi SDM dari lembaga riset dan Perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan produk unggulan Kota Pekalongan; i. Penguatan SDM, kebijakan smart branding, dan ekosistem investasi digital.	Meningkatnya investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinperpa
		Program Penyuluhan Pertanian	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
		Program Pengembangan Umkm	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		Program Pengembangan Ekspor	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INTERVENSI PROGRAM	OPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKP
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
7. Penguatan SDM pengelola dan pelaku budaya, dengan fokus pada: a. Penguatan kerjasama dan dukungan stakeholder kebudayaan dan pariwisata dalam meningkatkan SDM pengelola budaya; b. Penguatan SDM Budaya dan kebijakan pelestarian budaya lokal.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
		Program Pengembangan Kebudayaan	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		Program Pembinaan Sejarah	
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
		Program Pengelolaan Permuseuman	
8. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan, dengan fokus pada: a. Penguatan SDM forum-forum strategi masyarakat, keluarga, sekolah, lembaga pendidikan dan media massa; b. Penerapan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang profesional dan tidak diskrimatif serta sosialisasi edukasi penguatan toleransi	Meningkatnya investasi daerah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol P3KP
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran

Indikasi rencana program tahun 2026 didasarkan pada prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026, RPJMD Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung pembangunan secara menyeluruh, dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan. Konsistensi antara prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan pagu anggaran disajikan pada Tabel V-1 berikut.

Tabel V-1
Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran Tahun 2026

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
01. Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	365.155.000	Bapperida
		Skor Satu Data Indonesia (SDI)	72.44 persen		
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 persen		
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	426.350.000	
		Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Perekonomian	100 persen		
		Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan	100 persen		

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
		pada Renja-Renstra) Bidang Infrastruktur Wilayah			
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen	18.129.904.000	Setda
		Indeks Reformasi Hukum (IUP)	96.76 indeks		
		Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 persen		
	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	74.2 Persen	254.461.000	Dinarpus
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	66.67 Persen	152.318.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	100 persen	4.976.045.000	BPKAD
		Persentase penatausahaan keuangan OPD sesuai dengan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100 persen		
		Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD yang sesuai SAP	100 persen		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	794.650.000	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen potensi pendapatan asli daerah; dan Persentase Realisasi PAD	100 persen	1.421.069.000	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selesai ditindaklanjuti	85 persen	300.000.000	Inspektorat Daerah
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD)	96.05 indeks	500.000.000	

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100 persen	831.972.000	Satpol P3KP
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 Persen	644.720.000	Dinperkim
	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 Persen	9.093.000	Dindukcapil
	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	98 Persen	334.561.000	
	Program Pencatatan Sipil	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil	100 Persen	361.611.000	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	13 OPD	71.000.000	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100 Persen	26.958.639.000	Set DPRD
		Persentase Perda yang disetujui	100 Persen		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100 Persen	622.336.671.300	Semua OPD
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen		
		Presentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		
		Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 Persen		RSUD Bendan, Semua Puskesmas dan BPSJ Setda
		Persentase ketersediaan layanan administrasi	100 Persen		

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
		keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
		Persentase pelayanan keprotokoleran	100 Persen		
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	70 persen	880.056.000	BKPSDM
		Persentase keterisian jabatan manajerial ASN	95 persen		
		Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan	100 persen		
		Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	100 persen		
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN berkembang kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional	52 persen	984.340.000	BKPSDM
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase anggota Organisasi Kepemudaan yang dibina	56 persen	4.083.000.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabor yang memiliki Sarpras Olahraga	43 persen	6.599.504.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan pada tahun n	100 Persen	100.000.000	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 Persen	4.174.867.000	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.45 persen	2.306.178.000	Dinkominfo
		Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan pusat data pemerintah daerah kabupaten/kota	100 persen		
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (IKK)	100 persen		
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	presentase sistem elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik	76 persen	179.773.000	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 Persen	107.460.000	

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen	1.025.238.000	Bapperida
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen	39.995.000	Kec. Pekalongan Utara
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100 persen		Kec. Pekalongan Selatan
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik di Wilayah Barat	100 persen		Kec. Pekalongan Barat
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100 persen		Kec. Pekalongan Timur
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen	16.657.366.000	Kec. Pekalongan Utara
		Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen		Kec. Pekalongan Selatan
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		Kec. Pekalongan Barat
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		Kec. Pekalongan Timur
		Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		Semua Kelurahan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen	803.169.000	Kec. Pekalongan Utara
		Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 persen		Kec. Pekalongan Selatan
		Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	100 persen		Kec. Pekalongan Barat
		Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	100 persen		Kec. Pekalongan Timur
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen	17.467.000	Kec. Pekalongan Utara
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan	100 persen		Kec. Pekalongan Selatan

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
		Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan			Kec. Pekalongan Barat
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100 persen		
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100 persen		
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	100 Persen	337.468.000	DPMPPA
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Dengan Kriteria *Cepat Berkembang*	100 Persen	43.792.000	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	100 Persen	878.880.000	
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 01				718.086.772.300	
02. Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	93.15 Persen	53.579.684.700	Dindik
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	99.72 Persen		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	96.72 Persen		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	35.92 Persen		
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	64 Persen	15.528.450.000	Dinarpus
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	50.92 indeks	926.814.000	
		Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	32 persen		
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	20 Persen	83.800.000	Dindik
	Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 02				70.118.748.700
03. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan/ pembinaan/ pengembangan SDM kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	79.6 Persen	76.680.958.000	Dinkes
		Presentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98.54 Persen		
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi (IKK Outcome)	100 Persen		

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	79.6 Persen		
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	87 persen		RSUD Bendan
		Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	13 Persen		Semua Puskesmas dan BPSJ
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di fasyankes (Standar Kemenkes)	36.36 Persen	608.582.000	Dinkes
		Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 Persen		RSUD Bendan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmasi yang menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan regulasi	100 Persen	492.237.000	Dinkes
		Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100 Persen		
		Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat	46 Persen		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	95.5 Persen	2.775.831.000	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni pada kawasan rawan bencana	75.22 Persen	1.643.712.000	Dinperkim
	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	2.29 persen	27.293.916.000	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	10 hektar	8.516.098.000	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	76.34 Persen	8.377.397.000	
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 03				126.388.731.000	
04. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100 Persen	13.611.558.000	DPUPR

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di daerah kab/kota	35.07 Persen	1.324.112.000	
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase penambahan sarpras persampahan	16.67 Persen	617.685.000	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah yang terlayani Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di daerah Kab/Kota	88.66 Persen	1.895.415.000	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi mantap	40.94 Persen	2.244.722.000	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan	86 persen	1.215.180.000	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	0.3 Persen	15.940.920.000	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pembinaan jasa kontruksi dengan kinerja baik	98.67 Persen	58.280.000	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang	83.00 Nilai	535.540.000	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase tingkat pelayanan ruas jalan kota dengan kategori baik (LOS A dan B)	28.24 Persen	19.208.487.000
Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)			0.44 Ratio		
Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala			77 Persen		
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 04				56.651.899.000	
05. Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran,	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	75 persen	186.900.000	Dinsos P2KB
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1.696.992.000	

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
serta peningkatan kesetaraan gender	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53.73 persen	1.318.780.000	
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	310.540.000	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen	57.360.000	
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) (IKK)	64.55 persen	201.080.000	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) (IKK)	13 persen	1.704.300.000	
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Angka kelahiran pada Remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	9.5 persen	1.597.160.000	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	52114366.27 Rupiah per orang	4.493.492.000	Dinperinaker
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	40.05 persen	173.433.000	
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	12.8 persen	480.238.000	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Teradvokasi	14.29 Persen	89.364.000	DPMPPA
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	18.46 Rasio per 100.000	93.221.000	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Layanan Permasalahan Keluarga Yang Terlayani	100 Persen	23.900.000	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Kota Layak Anak	769.9 Skor	176.534.000	

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pengaduan Kasus Anak Yang Terlayani	100 Persen	72.544.000	
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 05				12.675.838.000	
06. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100 persen	26.300.000	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	15.000.000	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	90.02 Persen	709.871.000	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku usaha yang melaporkan LKPM	41.14 Persen	99.016.000	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	5 Stakeholder	93.356.000	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Return on Aset (ROA) BUMD,	0.3 Persen	894.156.000	Setda (Bagian Perekonomian, Bagian PBJ & Minbang)
		Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB,	0.35 Persen		
		Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	0.49 Persen		
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	7 persen		
		Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100.00 persen		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	75.59 Miliar rupiah	317.100.000	Dinperpa
		Nilai produksi peternakan pertahun	201.65 Miliar rupiah		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen	541.480.000	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular yang Tertangani	100 persen	305.880.000	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan	100 persen	12.000.000	

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Bencana Pertanian	penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota			Dindagkop UKM
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100 persen	15.000.000	
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5 persen	31.000.000	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	54.61 Persen	129.800.000	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	33.15 Persen	29.200.000	
	Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha	30.78 Persen	733.300.000	
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Perdagangan yang Sesuai dengan Ketentuan	2.22 Persen	3.000.000	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penataan, pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat)	8.33 Persen	6.829.665.000	
		Persentase Pembinaan terhadap pedagang kaki lima	37.5 Persen		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting minimal 8 kali dalam sebulan	100 Persen	76.200.000	
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Volume Ekspor	3.4 Persen	96.100.000	
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	82.49 Persen	219.826.000	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.88 Persen	2.281.425.000	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	9893.24 Ton	3.026.580.000	DKP

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	526.21 Ton	256.208.000	Dinperpa
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 persen	301.534.000	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93.12 angka	337.680.000	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen	22.500.000	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	87.2 persen	21.500.000	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	60.45 persen	135.154.000	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan jumlah industri pengolahan yang melaporkan secara lengkap di SIINAS	9 persen	37.730.000	
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 06				17.597.561.000	
07. Penguatan SDM pengelola dan pelaku budaya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	12.05 persen	2.976.634.000	Dinparbudpora
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	300 orang	442.244.000	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pendaftaran HAKI di sektor ekonomi kreatif	100 persen	15.000.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	100 persen	998.780.000	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	1.511.990.000	

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen	130.550.000	
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	20.000.000	
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (IUP)	23 persen	20.000.000	
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan jumlah pengunjung museum batik	5 persen	1.584.018.000	
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 07				7.699.216.000	
08. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	84 persen	4.972.176.000	Satpol P3KP
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen	1.518.386.000	Bakesbangpol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan yang memahami etika dan budaya politik	16 lembaga	1.187.320.000	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen	258.000.000	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 Persen	98.197.000	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kejadian Konflik SARA (IUP)	0 kali	288.930.000	

Prioritas Kota Tahun 2026	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana	100 persen	1.520.382.000	BPBD
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 08				9.843.391.000	
09. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase air sungai yang memenuhi baku mutu	45.83 persen	1.136.972.000	DLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penambahan Luasan RTH Publik	0.05 persen	4.794.592.000	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha/ Kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan	75 persen	1.640.000	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase tingkat pelanggaran kategori berat terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan	11.11 persen	29.590.000	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase komunitas peduli LH yang aktif	33.33 persen	352.500.000	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah yang memenuhi standar Adiwiyata	6.91 Persen	44.350.000	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	10.630.000	
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	46.75 persen	19.943.406.000	
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 09				26.313.680.000	
Total Dukungan Program terhadap Prioritas Kota Pekalongan Tahun 2026				1.045.375.837.000	

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026

5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD); pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar; pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama; pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 sebesar 93,15 persen; Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 sebesar 99,72 Persen; Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 sebesar 96,72 persen; Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (kesetaraan) sebesar 35,92 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu Bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan. Selain itu program ini juga mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa sekolah unggulan perkecamatan dan program pengembangan sekolah Inklusif di setiap Kecamatan.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar; penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase satuan pendidikan yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan sebesar 20 persen.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, paud, dan pendidikan nonformal/kesetaraan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM sebesar 64 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu beasiswa studi lanjut bagi guru sekolah dan madrasah.

5.2.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota; penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi; penerbitan izin Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar sebesar 79,60 persen; persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 98,54 persen; persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar sebesar 79,50 persen; persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi (IKK Outcome) sebesar 100 persen; persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 87 persen; persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota sebesar 13 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Pekalongan (berobat cukup

bawa KTP) dan peningkatan bantuan operasional posyandu. Selain itu program ini juga mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Pelayanan kesehatan keliling, Puskesmas pembantu dan Pelayanan kesehatan di setiap desa, dan program Cek Kesehatan Gratis dan program peningkatan operasional kader Posyandu, serta program peningkatan kualitas hidup lansia.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota; pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar di fasyankes (standar Kemenkes) sebesar 36,36 persen, persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 100 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap puskesmas pembantu.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT); penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga; penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu sarana farmasi yang menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan regulasi sebesar 100 persen; persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran sebesar 100 persen; Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sebesar 46,00 persen.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota; pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rumah Tangga Sehat sebesar 95,5 persen.

5.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota; pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 100 persen.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu rumah yang terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan di daerah Kab/Kota sebesar 35,07 Persen.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penambahan sarpras persampahan yang dilaksanakan sebesar 16,67 persen.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase rumah yang terlayani Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di daerah kabupaten/kota sebesar 88,66 persen.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase drainase dalam kondisi mantap sebesar 40,94 persen.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus program adalah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan sebesar 86 persen.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus program adalah penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase peningkatan kemantapan jalan sebesar 0,3 persen.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pembinaan jasa konstruksi dengan kinerja baik sebesar 98,67 persen.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Fokus program adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota; koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota; koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; koordinasi penyelenggaraan penataan ruang. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang sebesar 83 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa.

5.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota; sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota; pembangunan dan

rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota; pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan rumah layak huni pada kawasan rawan bencana sebesar 75,22 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) korban rob dan korban kebakaran/bencana.

2. Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani sebesar 2,29 persen. Selain itu program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kab/kota yang berupa pembangunan infrastruktur permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 10 hektar. Selain itu program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa pembangunan infrastruktur permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah urusan penyelenggaraan PSU Perumahan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) sebesar 63,04 persen.

5.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Wali Kota; pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase perda dan perkara yang ditegakkan (IKK outcome) sebesar 84 persen.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus program adalah pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; inspeksi peralatan proteksi kebakaran; pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM/IKK Outcome) sebesar 100 persen.

5.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan sebesar 75 persen.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus program adalah rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial; rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome) sebesar 100 persen.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial sebesar 53,73 persen.

4. Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota; penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial sebesar 100 persen.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Fokus program adalah pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pemeliharaan taman makam pahlawan sebesar 100 persen.

5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.1.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu produktivitas tenaga kerja sebesar Rp 52.114.366,27 per orang.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan informasi pasar kerja; perlindungan pmi (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota; penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota sebesar **40,05** persen.

3. Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) sebesar 12,80 persen.

5.1.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota; pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang teradvokasi sebesar 14,29 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa pembentukan kecamatan berdaya (pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) aset dari pemerintah kab/kota, dan mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota; penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) sebesar 18,46 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan dan program memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Fokus program adalah penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase layanan permasalahan keluarga yang terlayani sebesar 100 persen.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu skor Kota Layak Anak sebesar 769,9 skor.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota; penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota; penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan

koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan dan program memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak.

5.1.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota; pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 93,12.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pangan segar asal tumbuhan aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 87,20 persen.

5.1.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Fokus program adalah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100 persen.

2. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Fokus program adalah penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase tindak lanjut penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebesar 50 persen.

5.1.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota; penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase sungai yang memenuhi baku mutu sebesar 45,83 persen.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Fokus program adalah pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penambahan luasan RTH publik sebesar 0,05 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah kelurahan.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Fokus program adalah penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase usaha/ kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan sebesar 75 persen.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase tingkat pelanggaran kategori berat terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan sebesar 11,11 persen.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase komunitas peduli LH yang aktif sebesar 33,33 persen.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Fokus program adalah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase sekolah yang memenuhi standar Adiwiyata sebesar 6,91 persen.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah pengelolaan sampah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pengelolaan sampah sebesar 46,75 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu menumbuhkan kegiatan ekonomi sirkular (pemanfaatan limbah, daur ulang dan lain-lain).

5.1.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah pelayanan pendaftaran penduduk. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 98,00 persen.

2. Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah penyelenggaraan pencatatan sipil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil sebesar 100 persen.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu jumlah opd yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*) sebesar 13 OPD.

5.1.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Fokus program adalah fasilitasi kerja sama antar desa. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 100 persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase kelurahan dengan kriteria cepat berkembang sebesar 100 persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase fasilitasi penataan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebesar 100 persen.

5.1.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk

Fokus program adalah pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (IKK) sebesar 64,55 persen.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*) (IKK) sebesar 13 persen.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu angka kelahiran pada remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) sebesar 9,50 persen.

5.1.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota; persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota; penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota; pengelolaan terminal penumpang tipe C; audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan; penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; pengujian berkala kendaraan bermotor. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat pelayanan ruas jalan kota dengan kategori baik (LOS A dan B) sebesar 28,24 persen; V/C Rasio (IKK Outcome) sebesar 0,44; Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala sebesar 77 persen.

5.1.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100 Persen.

2. Program Aplikasi Informatika

Fokus program adalah pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota; pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi sebesar 3,45 persen; Perangkat Daerah yang memanfaatkan pusat data pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 100 persen; Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominformasi (IKK) sebesar 100 persen.

5.1.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus program adalah pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase koperasi yang aktif sebesar 54,61 persen.

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 33,15 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa/kelurahan.

3. Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha sebesar 30,78 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke kabupaten/kota yang berupa pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis.

5.1.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu penyediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal sebesar 100 persen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kotasebesar 100 persen.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebesar 90,02 persen.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM sebesar 41,14 persen.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Fokus program adalah pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun

2026 yaitu jumlah *stakeholder* yang memanfaatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi sebesar 5 *stakeholder* yang memanfaatkan data.

5.1.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda Pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase anggota organisasi kepemudaan yang dibina sebesar 56 persen.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada Jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase cabor yang memiliki sarpras olahraga sebesar 43 persen. Program ini mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa pembangunan infrastruktur melalui pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan dan gelanggang olah raga Internasional, program meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan pada tahun n sebesar 100 persen.

5.1.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Fokus program adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100 persen.

5.1.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota; penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu sistem elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik sebesar 76 persen.

5.1.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota; pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100 persen.

3. Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah pembinaan Sejarah lokal dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya sebesar 100 persen.

4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus program adalah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan sebesar 23 persen.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah pengelolaan museum kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase peningkatan jumlah pengunjung museum batik sebesar 5 persen.

5.1.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota; pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar **50,92**; rasio pengunjung perpustakaan per tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) sebesar **32 persen**.

5.1.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip

Fokus program adalah pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota; pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota; pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota; pengawasan kearsipan di kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) sebesar 74,20 persen.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome) sebesar 66,67 Persen.

5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

5.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota; Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 9.893,24 ton.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah pemberdayaan pembudi daya ikan kecil; pengelolaan pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 526,21 ton. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dibina sebanyak 20 persen.

5.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota; pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota; penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 12,05 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu menambah ruang kreatif dan seni budaya. selain itu program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa pembangunan infrastruktur melalui pengembangan pusat rekreasi dan promosi

pembangunan dan untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa membangun 1.000 desa/kampung wisata baru dan program mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dan program melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu jumlah tamu wisatawan mancanegara sebesar 300 orang.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak

Fokus program adalah penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu pendaftaran HAKI di sektor ekonomi kreatif sebesar 100 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya sebesar 100 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata.

5.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan penggunaan sarana pertanian; pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota; peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota; pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu nilai produksi pertanian pertahun sebesar 75,59 Miliar Rupiah dan nilai produksi peternakan pertahun sebesar 201,65 Miliar Rupiah.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100 persen.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota; pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota; pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota; penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu kasus penyakit hewan

menular yang tertangani sebesar 100 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota sebesar 100 persen.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Fokus program penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki izin sebesar 100 persen.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5 persen.

5.2.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan tanda daftar gudang. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu pelaku usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) sektor perdagangan yang sesuai dengan ketentuan sebesar 2,22 persen.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu penataan, pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat) sebesar 8,33 persen serta persentase pembinaan terhadap pedagang kaki lima sebesar 37,5 persen.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota; pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting minimal 8 kali dalam sebulan sebesar 100 persen.

4. Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase peningkatan volume ekspor sebesar 3,4 persen.

5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 82,49 persen.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran sebesar 0,88 persen.

5.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK sebesar 60,45 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu menumbuhkan kegiatan ekonomi sirkular (pemanfaatan limbah, daur ulang dan lain-lain).

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu peningkatan jumlah industri pengolahan yang melaporkan secara lengkap di SIINAS sebesar 9 persen.

5.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.2.4.1 Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program administrasi tata pemerintahan; fasilitasi kerja sama daerah; pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100%; indeks reformasi hukum (IUP) sebesar 96,76 persen; capaian fasilitasi lembaga kemasyarakatan sebesar 100 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu Peningkatan bantuan RT/RW. Selain itu program ini juga mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Fokus program adalah pelaksanaan administrasi pembangunan; pengelolaan pengadaan barang dan jasa; pelaksanaan kebijakan perekonomian; pemantauan kebijakan sumber daya alam. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Return on Aset (ROA) BUMD sebesar 0,30 persen; total dana pihak ketiga pada bank milik Kabupaten/Kota per PDRB sebesar 0,35 persen; total kredit pada bank milik Kabupaten/Kota per PDRB sebesar 0,49 persen; deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome) sebesar 7 persen; persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa sebesar 100 persen.

5.2.4.2 Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah pembahasan kebijakan anggaran; peningkatan kapasitas dprd; penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat; fasilitasi tugas dprd; pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100 persen; persentase perda yang disetujui sebesar 100 persen.

5.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.2.5.1 Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 persen; skor Satu Data Indonesia (SDI) sebesar 72,44 persen; persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 persen.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sda (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan kegiatan/sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebesar 100 persen; Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan kegiatan/sub kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Perekonomian sebesar 100 persen; Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan kegiatan/sub kegiatan pada Renja-Renstra) Bidang Infrastruktur Wilayah sebesar 100 persen.

5.2.5.2 Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD sebesar 100 persen; Persentase penatausahaan keuangan OPD sesuai dengan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100 persen; Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD yang sesuai SAP sebesar 100 persen.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus program adalah pengelolaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan sebesar 100 persen.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus program adalah kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu ketersediaan dokumen potensi pendapatan asli daerah sebesar 100 persen. Realisasi PAD sebesar 100 persen.

5.2.5.3 Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian asn; mutasi dan promosi asn; pengembangan kompetensi asn; penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu keterpenuhan formasi ASN sebesar 70 persen; keterisian jabatan manajerial ASN sebesar 95 persen; peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan sebesar 100 persen; pelaporan kinerja ASN sebesar 100 persen.

5.2.5.4 Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah pengembangan kompetensi teknis; sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase ASN berkembang kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional sebesar 51,72 persen. Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu beasiswa studi lanjut bagi tenaga kesehatan. selain itu program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan aparat penegak hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK, dan untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa melahirkan pemerintahan yang good clear government dan collaborative governance melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa/kelurahan.

5.2.5.5 Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Riset dan Inovasi Daerah

Fokus program adalah invensi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah sebesar 66,67 persen.

5.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.2.6.1 Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu; Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selesai ditindaklanjuti sebesar 85 persen; persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selesai ditindaklanjuti sebesar 100 persen.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pendampingan dan asistensi. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) sebesar 96,05.

5.2.7 Unsur Kewilayahan

5.2.7.1 Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah timur sebesar 100 persen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Fokus program adalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan; pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di wilayah timur sebesar 100 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat dan program desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go internasional*, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana dan program Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, *hydro*, maupun tenaga surya dan program peningkatan operasional kader posyandu.

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kinerja trantibum wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja trantibum wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja trantibum wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja trantibum wilayah timur sebesar 100 Persen.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum wilayah timur sebesar 100 persen.

5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

5.2.8.1 Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke kabupaten/kota yang berupa moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 partai politik dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan yang memahami etika dan budaya politik sebesar 16 lembaga.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari provinsi ke kabupaten/kota yang berupa mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sebesar 100 persen.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Fokus program adalah Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu kejadian konflik SARA sebesar 0 kali.

5.2.9 Non Urusan

5.2.9.1 Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah; layanan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD; penyediaan layanan BLUD; penyediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah sebesar 100 persen; persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan sebesar 100 persen; persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen; persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi sebesar 100 persen; persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan sekretariat daerah sebesar 100 persen; Persentase pelayanan keprotokoleran sebesar 100 persen; Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 100 persen serta Presentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100 persen.

.

Tabel V-2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Pendidikan				229.598.861.000								237.375.831.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				229.598.861.000								237.375.831.000	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			229.598.861.000								237.375.831.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	160.406.926.300							100 Persen 100 Persen 100 Persen	164.996.516.000	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	94.725.300			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	100persen	95.050.000	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	3.295.300	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.250.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	2 Dokumen	4.350.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan	87.180.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	16 Laporan	87.200.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	158.866.207.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	100 persen	163.444.290.000	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1383 Orang/bulan	1319 Orang/bulan	158.343.015.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BBNKB, DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PPPK, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	1348 Orang/bulan	162.919.990.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	519.292.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	12 Dokumen	520.300.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	1 Laporan	4.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	88.240.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	100 persen	88.000.000	
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	186 Laporan	186 Laporan	88.240.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	186 Laporan	88.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	100 persen	5.000.000	
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	1 Paket	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 persen	506.573.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	100 persen	508.176.000	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	4 Paket	8.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	143.322.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	4 Paket	143.322.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.217.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	4 Paket	11.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	82.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	4 Paket	82.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	15.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	13 Paket	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	100 Laporan	117.454.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	100 Laporan	117.454.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	127.180.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	1 Dokumen	127.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 persen	677.298.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	100 persen	687.000.000	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	7.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	4 Laporan	7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	290.798.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	12 Laporan	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	379.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	12 Laporan	380.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 persen	168.883.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	100 persen	169.000.000	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	27 Unit	60.030.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	27 Unit	59.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	58.853.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	4 Unit	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	114 Unit	120 Unit	50.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	115 Unit	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS)7-12	99,72 Persen	99,72 Persen	53.579.684.700							99,72 Persen	56.797.865.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD berakreditasi A	70,87persen	63,11 Persen	24.168.361.000			PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	66,99persen	24.388.011.000	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	1 Unit	70.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	3 Unit	225.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	71 Paket	80 Paket	322.400.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	71 Paket	235.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	71 Unit	71 Unit	719.960.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	71 Unit	725.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	8450 Peserta Didik	5025 Peserta Didik	331.250.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	8350 Peserta Didik	335.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1091 Orang	1091 Orang	2.768.796.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	1091 Orang	2.772.876.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	103 Orang	103 Orang	7.680.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	103 Orang	8.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	103 Satuan Pendidikan	103 Satuan Pendidikan	207.200.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	103 Satuan Pendidikan	216.840.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	103 Satuan Pendidikan	103 Satuan Pendidikan	18.046.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	103 Satuan Pendidikan	18.546.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	309 Orang	206 Orang	25.600.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	309 Orang	26.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	206 Orang	206 Orang	13.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	206 Orang	14.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	30.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Kegiatan	32.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1500 Paket	470 Paket	85.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	1100 Paket	73.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	4 Unit	840.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	10 Unit	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	103 Satuan Pendidikan	103 Satuan Pendidikan	73.575.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	103 Satuan Pendidikan	73.395.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	3 Ruang	626.100.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Ruang	605.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP berakreditasi A	90,00persen	76,67 Persen	15.389.405.000			PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	83,33persen	18.956.970.000	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	1 Ruang	262.200.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	10 Ruang	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	2 Unit	328.600.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Unit	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							YA BIDANG PENDIDIKAN							
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	17 Paket	17 Paket	34.400.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	17 Paket	34.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	17 Paket	19 Paket	191.250.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	17 Paket	255.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	6 Unit	331.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	6 Unit	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	850 Peserta Didik	327.400.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	960 Peserta Didik	332.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	105 Orang	105 Orang	293.650.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	105 Orang	294.670.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	17 Orang	17 Orang	9.630.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	17 Orang	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30 Satuan Pendidikan	103 Satuan Pendidikan	169.300.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	30 Satuan Pendidikan	173.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	12.940.400.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	30 Satuan Pendidikan	12.940.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	90 Orang	60 Orang	15.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	90 Orang	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	60 Orang	20.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	60 Orang	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	35.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Kegiatan	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	40.600.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	30 Satuan Pendidikan	42.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1500 Paket	650 Paket	142.475.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	1500 Paket	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	6 Paket	248.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Paket	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang terakreditasi	94,74persen	93,23 Persen	9.313.291.000			PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	93,98persen	8.128.754.000	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	1 Unit	99.064.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Unit	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	13.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Paket	13.750.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	4 Paket	3 Paket	76.014.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Paket	33.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2 Orang	2 Orang	55.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Orang	55.440.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4 Orang	4 Orang	3.950.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Orang	3.950.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	267 Satuan Pendidikan	268 Satuan Pendidikan	400.064.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	267 Satuan Pendidikan	250.064.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	264 Satuan Pendidikan	264 Satuan Pendidikan	5.901.600.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	264 Satuan Pendidikan	5.901.600.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	528 Orang	528 Orang	54.200.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	528 Orang	54.200.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	200 Orang	18.250.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	200 Orang	18.250.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	56.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	56.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	21.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	21.900.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	100.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Ruang	225.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	14.600.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Kegiatan	14.600.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	750 Paket	1300 Paket	73.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	750 Paket	73.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit	4 Unit	92.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Unit	95.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	3 Unit	60.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Unit	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4 Paket	35 Paket	1.794.849.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Paket	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	264 Satuan Pendidikan	268 Satuan Pendidikan	223.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	264 Satuan Pendidikan	73.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	2 Ruang	256.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	8 Ruang	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi	71,43persen	57,14 Persen	4.708.627.700			PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	64,29persen	5.324.130.000	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Orang	17 Orang	433.590.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Orang	321.680.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	1 Orang	2.950.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Orang	2.950.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	103.387.700	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	14 Satuan Pendidikan	104.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	3.001.200.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	14 Satuan Pendidikan	3.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	28 Orang	28 Orang	8.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	28 Orang	8.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	28 Orang	3.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	30 Orang	3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	9.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	850.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Ruang	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	300 Paket	300 Paket	50.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	300 Paket	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	15.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Paket	17.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1826 Peserta Didik	14 Peserta Didik	103.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	1826 Peserta Didik	103.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket	50 Paket	60.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	50 Paket	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	2 Unit	19.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							YA BIDANG PENDIDIKAN							
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	1 Paket	50.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Paket	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	100.00persen	100,00 persen 20 Persen	83.800.000							60.00persen	80.000.000	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan dasar yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	100 Persen	20 Persen	47.125.000			PN-04	PP-03	PK-02	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	60persen	73.500.000	
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	1 Dokumen	6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	200 Buku	200 Buku	20.625.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	200 Buku	-	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	134 Orang	10 Orang	13.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	134 Orang	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	1 Dokumen	7.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang mengembangkan program kurikulum muatan lokal kebencanaan berbasis karakter dan keagamaan	100 Persen	20 Persen	36.675.000			PN-04	PP-03	PK-02	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	100 persen	6.500.000	
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	1 Dokumen	6.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	200 Buku	200 Buku	25.675.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	PN-04	PP-03	PK-02	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	200 Buku	-	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	1 Dokumen	-	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	64 Persen	64 Persen	15.528.450.000							64 Persen	15.501.450.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF	70,89persen	56,57 Persen	15.528.450.000			PN-04	PP-03	PK-02	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	63,73persen	15.501.450.000	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24 Dokumen	25 Dokumen	641.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	24 Dokumen	614.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	5 Laporan	14.887.450.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	5 Laporan	14.887.450.000	DINAS PENDIDIKAN
	Dinas Kesehatan				123.964.003.000								121.332.062.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				123.964.003.000								121.332.062.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				123.964.003.000								121.332.062.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	67.391.207.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	61.322.578.000	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 persen	22.650.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	100 persen 100 persen	24.850.000	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.734.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	2.750.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.916.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	1.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	15 Laporan	20.450.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 persen	65.454.977.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	100 persen 100 persen	59.246.370.000	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720 Orang/bulan	715 Orang/bulan	65.366.432.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS , DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PPPK	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	717 Orang/bulan	59.164.320.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	85.315.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	80.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.230.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	1 Laporan	1.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	100 persen	9.500.000	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	1 Paket	9.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 persen	274.780.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	100 persen	325.000.000	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.650.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	4 Paket	5.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	110.000.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	4 Paket	100.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.480.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	4 Paket	7.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	64.420.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	4 Paket	70.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	14.600.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	13 Paket	20.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.300.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290 Laporan	280 Laporan	75.330.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	285 Laporan	120.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 persen	1.173.455.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	100 persen	1.109.892.000	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	440.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	1 Laporan	600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	625.383.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	12 Laporan	753.750.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	547.632.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	12 Laporan	355.542.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 persen	460.345.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	100 persen	606.966.000	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	30 Unit	163.520.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	35 Unit	434.616.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	246.975.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan	3 Unit	93.075.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70 Unit	49.850.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kesehatan		79.275.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	79,6 persen	79,6 persen	52.754.309.000							79,6 persen	57.407.061.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan dengan capaian ASPAK di atas70%	100 Persen	60 persen	17.160.256.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	78persen 100 persen	18.973.274.000	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	7.030.970.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit	5.500.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6948 Orang	4331 Orang	91.250.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	6816 Orang	127.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5785 Orang	3878 Orang	264.600.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	5698 Orang	26.070.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22310 Orang	16144 Orang	114.190.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	20888 Orang	208.745.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48772 Orang	46294 Orang	72.380.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	47569 Orang	144.446.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236222 Orang	195730 Orang	82.820.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	231024 Orang	44.950.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38305 Orang	35669 Orang	19.750.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	37594 Orang	39.415.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65936 Orang	62294 Orang	4.810.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	64989 Orang	8.830.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16306 Orang	16317 Orang	4.600.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	15529 Orang	8.550.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1322 Orang	1013 Orang	8.410.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1240 Orang	15.380.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10887 Orang	5569 Orang	30.160.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	10550 Orang	41.305.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	189599 Orang	15360 Orang	24.170.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	178243 Orang	33.105.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							YA BIDANG KESEHATAN							
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	149.370.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	617.300.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	43.770.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	83.550.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	128.440.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	230.116.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	2 Dokumen	962.369.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KO TA	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	1.347.035.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	301.190.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.113.784.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	31.555.545.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DBH-CHT, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	31.799.476.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	34.490.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	87.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1.533.851.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	1.391.061.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	21.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	15 Unit	765.534.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	2 Dokumen	50.588.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	80.620.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang mengirim data resources ke Aplikasi SATUSEHAT di atas50%	100 Persen	50 persen	22.500.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	70persen	78.360.000	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	78.360.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	100 Persen	100 persen	72.900.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen 75persen	141.755.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	70 Unit	52 Unit	72.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	69 Unit	141.755.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di fasyankes (Standar Kemenkes)	36,36 persen	36,36 persen	550.419.000							36,36 persen	114.039.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan di fasyankes yang memiliki Surat Ijin Praktek	96.5 persen	94,8 persen	550.419.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen 100 persen	114.039.000	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	550.419.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	114.039.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi yang menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan regulasi	100 persen	100 persen	492.237.000							100 persen	678.502.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan	100 Persen	100 persen	47.583.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	119.277.000	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	47.583.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	119.277.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	100 Persen	100 persen	409.064.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	481.023.000	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat	1 Dokumen	1 Dokumen	409.064.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	481.023.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang dilakukan pengawasan	98persen	96 persen	35.590.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	97persen	78.202.000	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	35.590.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	78.202.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	95,5 persen	95,5 persen	2.775.831.000							95,5 persen	1.809.882.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Posyandu aktif siklus hidup	65Persen	61 persen	2.730.791.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	63Persen	1.681.882.000	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	2.730.791.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.681.882.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian promosi kesehatan program prioritas di puskesmas dan pustu	95Persen	91 persen	45.040.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	93Persen	128.000.000	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	45.040.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	128.000.000	DINAS KESEHATAN
	RSUD Bendan				119.161.969.000								124.335.062.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				119.161.969.000								124.335.062.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				119.161.969.000								124.335.062.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	104.062.826.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	109.203.112.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.050.000.000	Pekalongan Barat, Medono	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	PN-07	PP-01	PK-01	Puskesmas Medono Kota Pekalongan	1 Unit Kerja	1.050.000.000	PUSKESMAS MEDONO
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,54 persen	98,54 persen	724.061.000							98,54 persen	724.061.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	100 Persen	100 persen	724.061.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 60persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	724.061.000	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	724.061.000	Pekalongan Barat, Medono Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Dokumen	724.061.000	PUSKESMAS MEDONO
	Puskesmas Noyontaan				1.594.369.000								1.563.835.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.594.369.000								1.563.835.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.594.369.000								1.563.835.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.140.000.000							100 persen	1.120.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 Persen	100 persen	1.140.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Puskesmas Noyontaan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1.120.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.075.000.000	Pekalongan Timur, Gamer Pekalongan Timur, Poncol	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	PN-07	PP-01	PK-01	Puskesmas Tondano	1 Unit Kerja	1.050.000.000	PUSKESMAS TONDANO
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,54 persen	98,54 persen	580.197.000							98,54 persen	580.197.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	100 Persen	100 persen	580.197.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 60persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	580.197.000	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	580.197.000	Pekalongan Timur, Gamer Pekalongan Timur, Poncol	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Dokumen	580.197.000	PUSKESMAS TONDANO
	Puskesmas Klego				1.664.413.000								1.739.413.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.664.413.000								1.739.413.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.664.413.000								1.739.413.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.000.000.000							100 persen	1.075.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	100 Persen	100 persen	1.000.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Puskesmas Klego Kota Pekalongan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1.075.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.973.375.000	Pekalongan Timur, Kali Baros Pekalongan Timur, Setono	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	PN-07	PP-01	PK-01	Puskesmas Sokorejo Kota Pekalongan	1 Unit Kerja	1.767.000.000	PUSKESMAS SOKOREJO
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,54 persen	98,54 persen	586.075.000							98,54 persen	586.075.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	100 Persen	100 persen	586.075.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 60persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	586.075.000	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	586.075.000	Pekalongan Timur, Kali Baros Pekalongan Timur, Setono	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat	4 Dokumen	586.075.000	PUSKESMAS SOKOREJO
	Puskesmas Dukuh				1.807.460.000								1.807.460.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.807.460.000								1.807.460.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.807.460.000								1.807.460.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.250.000.000							100 persen	1.250.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 Persen	100 persen	1.250.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Puskesmas Dukuh	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1.250.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.250.000.000	Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton Pekalongan Utara, Bandengan	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	PN-07	PP-01	PK-01	Puskesmas Dukuh	1 Unit Kerja	1.250.000.000	PUSKESMAS DUKUH
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,54 persen	98,54 persen	557.460.000							98,54 persen	557.460.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	100 Persen	100 persen	557.460.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 60persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	557.460.000	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	557.460.000	Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton Pekatongan Utara, Bandengan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat	4 Dokumen	557.460.000	PUSKESMAS DUKUH
	Puskesmas Kusuma Bangsa				2.859.306.000								2.973.556.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.859.306.000								2.973.556.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.859.306.000								2.973.556.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	2.170.750.000							100 persen	2.285.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 Persen	100 persen	2.170.750.000			PN-07	PP-01	PK-01	Puskesmas Kusuma Bangsa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	2.285.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Nasional	Provinsi	Kota					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
												100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.170.750.000	Pekalongan Utara, Panjang Baru Pekalongan Utara, Kandang Panjang Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	PN-07	PP-01	PK-01	Puskesmas Kusuma Bangsa	1 Unit Kerja	2.285.000.000	PUSKESMAS KUSUMA BANGSA	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,54 persen	98,54 persen	688.556.000							98,54 persen	688.556.000		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	100 Persen	100 persen	688.556.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 60persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	688.556.000		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	688.556.000	Pekalongan Utara, Panjang Baru Pekalongan Utara, Kandang Panjang Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Dokumen	688.556.000	PUSKESMAS KUSUMA BANGSA	
	Puskesmas Jenggot				2.214.942.000								2.164.942.000		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.214.942.000								2.164.942.000		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.214.942.000								2.164.942.000		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	1.650.000.000							100 persen	1.600.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100 persen	220.000.000							100 persen	421.661.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 Persen	100 persen	220.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	421.661.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	220.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit Kerja	421.661.000	BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,54 persen	98,54 persen	233.074.000							98,54 persen	900.225.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan BPSJ	100 Persen	100 persen	233.074.000			PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 60persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	900.225.000	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	1 Dokumen	233.074.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-04	PP-03	PK-03	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Dokumen	900.225.000	BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				51.654.024.000								89.260.177.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				51.654.024.000								89.260.177.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				51.654.024.000								89.260.177.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	14.210.612.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	27.716.587.000	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	19.680.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	22.720.000	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.220.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	5.220.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.460.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	15 Laporan	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	6.715.832.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	6.847.500.000	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	6.618.552.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN, DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	59 Orang/bulan	6.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							PENGGAJIAN PPPK							
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	95.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Dokumen	95.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.280.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	2.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	25.110.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	30.000.000	
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	25.110.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Laporan	30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 persen	13.420.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	22.000.000	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	5.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Paket	9.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	180 Orang	8.420.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	180 Orang	12.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 persen	498.176.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	608.000.000	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.650.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Paket	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	182.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Paket	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	134.636.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Paket	120.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	21.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Paket	35.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.190.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	146.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	50 Laporan	225.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	7.300.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	9 Dokumen	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 persen	-			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	4.200.000.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 persen	6.184.779.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	15.006.367.000	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.190.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Laporan	2.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.778.290.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Laporan	14.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	404.299.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Laporan	503.867.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 persen	753.615.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	980.000.000	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	43 Unit	571.848.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	45 Unit	630.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	43.670.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	9 Unit	125.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	101.597.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	123 Unit	123 Unit	36.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	45 Unit	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	13.611.558.000							100 persen	25.300.000.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	39Unit	39 unit	12.264.748.000			PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	39Unit	24.000.000.000	
1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	3.000.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Unit	10.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	6 Unit	10 Unit	979.238.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	8 Unit	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		1.3 KM	2.862.720.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	39 Unit	39 Unit	5.122.790.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	39 Unit	12.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan		0.136 KM	300.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dan tersier dalam kondisi Mantap	23.27Persen	19.27 Persen	1.346.810.000			PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	21.27Persen	1.300.000.000	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.3 KM	0,469 KM	1.346.810.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	0.3 KM	1.300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di daerah kab/kota	35.07 persen	35.07 persen	1.324.112.000							35.07 persen	1.200.000.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kab/kota	100 Persen	100 Persen	1.324.112.000			PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	1.200.000.000	
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	5 Unit	1 Unit	330.412.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	27470 SR	60 SR	993.700.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	100 SR	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase penambahan sarpras persampahan	16.67 Persen	16.67 Persen	617.685.000							16.67 Persen	650.000.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Sistem pengelolaan persampahan di daerah kab/Kota	31Unit	28 Unit	617.685.000			PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	29Unit	650.000.000	
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0.408 Ton/hari	0,408 Ton/hari	617.685.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	0.408 Ton/hari	650.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah yang terlayani Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah Kab/Kota	88.66 persen	88.66 persen	1.895.415.000							88.66 persen	16.235.000.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang terlayani Pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik di daerah Kab/Kota	100 Persen	100 Persen	1.895.415.000			PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	16.235.000.000	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	83.125.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	150 Rumah Tangga	85.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit	68592 Rumah Tangga	116 Rumah Tangga	1.812.290.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	40 Rumah Tangga	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI2398) atau unit pengolahan setempat aerob.												
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi mantap	40.94 persen	40.94 persen	2.244.722.000							40.94 persen	2.368.190.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Mantap	45695Meter	41695 Meter	2.244.722.000			PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	43695Meter	2.368.190.000	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	1.568.952.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	8 Sistem Drainase Perkotaan	1.300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	675.770.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	8 Sistem Drainase Perkotaan	1.068.190.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan	86 persen	86 persen	1.215.180.000							86 persen	1.160.000.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah permohonan perijinan bangunan gedung	440Pengajuan	100 Pengajuan	1.215.180.000			PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	110Pengajuan	1.160.000.000	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5 Bangunan Gedung	6 Bangunan Gedung	1.075.180.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	5 Bangunan Gedung	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	10 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	494 Dokumen	86 Dokumen	115.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	97 Dokumen	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	0.3 persen	0.3 persen	15.940.920.000							0.3 persen	13.520.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	120.54KM	119.10 KM	15.940.920.000			PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	119.82KM	13.520.000.000	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	70.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	150 KM	150 KM	140.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	150 KM	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM	2 KM	4.109.680.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	2 KM	4.300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.25 KM	1.1 KM	2.900.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	0.25 KM	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	50 Meter	20 Meter	2.150.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	10 Meter	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2.5 KM	1.45 KM	6.327.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB, INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	0.5 KM	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	5 Jembatan	254.240.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	5 Jembatan	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa kontruksi dengan kinerja baik	98.46 persen	98.67 Persen	58.280.000							98.57 persen	285.400.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	40Orang	1 kali 40 orang	26.960.000			PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	40Orang	160.400.000	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	4 Lembaga	26.960.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Lembaga	33.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2Dokumen	100 Persen 2 Dokumen	31.320.000			PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	2Dokumen	125.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	31.320.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	125.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang	83 Nilai	83 Nilai	535.540.000							83 Nilai	825.000.000	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan dokumen pendukung rencana tata ruang	100 Persen	50 persen	210.000.000			PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	500.000.000	
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	1 Peta	210.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Peta	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	2dokumen	2 dokumen	300.540.000			PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	2dokumen	325.000.000	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	10 Dokumen	2 Dokumen	250.540.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	10 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kesesuaian pelaksanaan KKPR dan/atau pernyataan mandiri UMK	95persen	91 persen	25.000.000			PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	93persen	-	
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	24 Dokumen	25.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Masyarakat Kota Pekalongan	24 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				51.058.038.000								39.954.699.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.404.225.000								38.854.414.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				50.404.225.000								38.854.414.000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	4.573.102.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.004.493.000	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	15.723.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan	100 persen	17.350.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2.165.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		2.750.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.558.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		1.650.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		12.950.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.889.015.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan	100 persen	3.504.754.000	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23 Orang/bulan	2.836.795.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		3.473.104.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	50.700.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.520.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		1.650.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan	100 persen	9.500.000	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		9.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	181.521.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan	100 persen	209.568.000	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	3.650.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	45.791.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		48.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	1.460.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		2.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	25.200.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		49.068.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	3.650.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	1.770.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		2.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		73 Laporan	100.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		98.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	1.175.560.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan	100 persen	976.720.000	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	1.300.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		1.800.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	948.300.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		758.200.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	225.960.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		216.720.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	306.283.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan	100 persen	286.601.000	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		17 Unit	131.176.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		90.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	36.692.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		76.601.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	138.415.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		120.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Rawan Bencana	75.89 persen	75.22 persen	1.643.712.000							75.22 persen	1.521.292.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	21.900.000			PN-03	PP-03	PK-03	Kota Pekalongan	1 Dokumen	60.000.000	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Dokumen	21.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	-		60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	3 kegiatan	3 kegiatan	32.850.000			PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat Berpenghasilan rendah	3 kegiatan	40.000.000	
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		60 Orang	7.300.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat Berpenghasilan rendah		10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		6 Orang	18.250.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat Berpenghasilan rendah		30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		2 Orang	7.300.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat Berpenghasilan rendah		-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	169.410.000			PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat menjadi Korban Bencana	100 persen	281.292.000	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		6 Unit Rumah	96.410.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat menjadi Korban Bencana		181.292.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		2 Unit Rumah	73.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat menjadi Korban Bencana		100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 persen	100 persen	1.419.552.000			PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	100 persen	1.200.000.000	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		3 Laporan	1.419.552.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		1.200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	2.29 persen	1.43 persen	27.293.916.000							2.29 persen	25.600.475.000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (Sepuluh) Ha	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	100 persen	100 persen	150.000.000			PN-03	PP-03	PK-03	Kota Pekalongan	100 persen	109.500.000	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		2 Dokumen	150.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Kota Pekalongan		109.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (Sepuluh) Ha	Persentase dokumen penataan kawasan	100 persen	100 persen	27.143.916.000			PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	100 persen	25.490.975.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		permukiman kumuh yang disusun												
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		100 Unit Rumah	2.327.491.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		2.327.491.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		5 Ha	21.630.850.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		19.977.909.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (Sepuluh) Ha		71 Unit	3.185.575.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		3.185.575.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	10 hektar	10 hektar	8.516.098.000							10 hektar	549.712.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	1.04 persen	1.04 persen	8.516.098.000			PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1.04 persen	549.712.000	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		100 Unit Rumah	8.516.098.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		549.712.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	100 persen	76.34 persen	8.377.397.000							76.34 persen	6.178.442.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU	68.48 persen	68.48 persen	8.377.397.000			PN-03	PP-03	PK-03	Dinperkim Kota Pekalongan	68.48 persen	6.178.442.000	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		1 Dokumen	403.276.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Dinperkim Kota Pekalongan		230.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		1 Laporan	105.724.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Dinperkim Kota Pekalongan		105.045.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 lokasi	1 Lokasi	5.563.397.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Dinperkim Kota Pekalongan	1 Lokasi	5.563.397.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		8 Lokasi	2.305.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-03	Dinperkim Kota Pekalongan		280.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				653.813.000								1.100.285.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				653.813.000								1.100.285.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen	100 persen	644.720.000							100 persen	1.091.192.000	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luasan bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya	73,35 persen	73,35 persen	644.720.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan	73,35 persen	1.091.192.000	
2.10.05.2.01.0003	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah		1 Laporan	644.720.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		1.091.192.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen	50 persen	9.093.000							50 persen	9.093.000	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen	50 persen	9.093.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan	50 persen	9.093.000	
2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota		2 Laporan	9.093.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperkim Kota Pekalongan		9.093.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				12.472.155.000								12.131.650.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.472.155.000								12.131.650.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.472.155.000								12.131.650.000	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	6.668.007.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.445.107.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah												
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 persen	13.110.000			PN-07	PP-01	PK-01	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100 persen	62.450.000	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2.320.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	10.750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.650.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	1.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	9.140.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	15 Laporan	50.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 persen	6.013.778.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	4.578.591.000	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	52 Orang/bulan	5.962.128.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	43 Orang/bulan	4.524.941.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Dokumen	52.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.650.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	1.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	100 persen	9.500.000	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	1 Paket	9.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 persen	187.076.000			PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	100 persen	225.441.000	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 Paket	4 Paket	5.480.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	4 Paket	7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Bangunan Kantor yang Disediakan												KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	17.636.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	4 Paket	35.941.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.840.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	4 Paket	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	70.810.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	4 Paket	97.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.480.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	2 Paket	7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.830.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	100 Laporan	80.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	130 Laporan	65.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 persen	126.433.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	129.125.000	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.278.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Laporan	2.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	125.155.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Laporan	127.125.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 persen	322.610.000			PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	100 persen	440.000.000	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	29 Unit	314.610.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	29 Unit	400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	10 Unit	8.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	25 Unit	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	84 persen	84 persen	4.972.176.000							84 persen	5.526.253.000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	100 Persen	100 persen	953.300.000			PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	1.360.140.000	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40 Dokumen	40 Dokumen	726.994.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan	40 Dokumen	1.020.410.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	2 Dokumen	24.544.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	91.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	155 Orang	155 Orang	15.410.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan	155 Orang	48.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 laporan	300 laporan	28.002.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan	300 laporan	31.390.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	155.850.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Laporan	155.850.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		2 Laporan	2.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan		13.240.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	20Perda	20 perda	4.016.945.000			PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan	20Perda	4.155.163.000	
1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		48 laporan	471.932.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH-CHT	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan		250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	28.933.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Laporan	37.750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	24 Laporan	24 Laporan	3.505.130.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan	24 Laporan	3.856.463.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	10.950.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Laporan	10.950.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	14 persen	14 persen	1.931.000			PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan	14 persen	10.950.000	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		1 Laporan	1.931.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat Kota Pekalongan		10.950.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 persen	100,00 persen	831.972.000							100,00 persen	1.160.290.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen	100 persen	645.412.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	1.010.239.000	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		1 Dokumen	15.580.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan		53.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran		12 Laporan	608.882.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan		837.239.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dalam Daerah Kabupaten/Kota												
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		36 Orang	10.950.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		10 Unit	10.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan		100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100 persen	100 persen	24.200.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	45.466.000	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		12 Dokumen	24.200.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan		45.466.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen	100 persen	122.360.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	31.839.000	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		23 Desa/Kelurahan	122.360.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan		31.839.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen	100 persen	40.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	72.746.000	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		12 Laporan	40.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan		72.746.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				4.069.379.000								3.571.351.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.069.379.000								3.571.351.000	
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.069.379.000								3.571.351.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2.548.997.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.919.111.000	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	17.984.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	100 persen	17.722.000	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.836.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.148.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan		1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	15 Laporan	13.722.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	2.177.040.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	100 persen	1.509.642.000	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.142.076.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	14 Orang/bulan	1.476.592.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	33.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	12 Dokumen	31.550.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.064.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	1 Laporan	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	12.650.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	100 persen	20.097.000	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	9.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	2 Paket	9.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	50 Orang	3.150.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	51 Orang	10.597.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	113.790.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	100 persen	135.534.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	4 Paket	2.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	4 Paket	58.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.100.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	4 Paket	5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.710.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	4 Paket	29.700.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	2 Paket	6.400.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	13 Paket	9.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.580.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	110 Laporan	75.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	50 Laporan	28.434.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	112.983.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	100 persen	100.299.000	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.200.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	4 Laporan	1.800.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57.513.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	12 Laporan	58.399.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54.270.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	12 Laporan	40.100.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	114.550.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	100 persen	135.817.000	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	29 Unit	73.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	11 Unit	79.859.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	9.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	2 Unit	9.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	57 Unit	66 Unit	32.050.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPBD Kota Pekalongan	57 Unit	46.458.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan bencana pada pra bencana,	100 persen	100 persen	1.520.382.000							100 persen	1.652.240.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		saat bencana dan pasca bencana												
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen	100 persen	74.668.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	51.180.000	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama1 (satu) tahun	100 Orang	100 Orang	74.668.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	100 Orang	51.180.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen	100 Persen	921.454.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	1.027.830.000	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	14 Unit	1 Unit	42.544.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	3 Unit	10.830.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	8.760.000	-	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	100 Orang	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	20 Kawasan	4 Kawasan	845.150.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Kawasan	867.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100 Persen	100 Persen	494.980.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	515.850.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		korban bencana (SPM/IKK Outcome)												
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	100 Orang	124.980.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	100 Orang	130.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2500 Orang	2500 Orang	370.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	2500 Orang	385.850.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	100 Persen	100 Persen	29.280.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	57.380.000	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	24.520.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Kegiatan	27.380.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	30 Lembaga	10 Lembaga	4.760.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	10 Lembaga	30.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				10.672.255.000								11.163.357.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.169.715.000								7.669.545.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.169.715.000								7.669.545.000	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	3.599.143.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	4.163.404.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah												
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 persen	21.272.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 persen	26.007.000	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	3.132.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2 Dokumen	2.750.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.720.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2 Dokumen	1.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.420.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15 Laporan	21.607.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 persen	2.563.180.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 persen	3.352.604.000	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.520.497.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20 Orang/bulan	3.302.654.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	39.300.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Dokumen	48.300.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.383.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Laporan	1.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 persen	8.639.000	
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Paket	8.639.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 persen	260.800.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 persen	312.853.000	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.300.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4 Paket	10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	60.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4 Paket	100.766.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4 Paket	7.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	75.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4 Paket	75.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4 Paket	10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	2.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	100.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150 Laporan	107.087.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 persen	386.641.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 persen	196.050.000	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4 Laporan	2.400.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	177.561.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Laporan	128.450.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	208.080.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Laporan	65.200.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 persen	362.250.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 persen	267.251.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	68 Unit	68 Unit	237.250.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	68 Unit	223.351.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	75.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8 Unit	25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68 Unit	25 Unit	50.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	68 Unit	18.900.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	75 persen	186.900.000							75 persen	353.700.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	95persen	75 persen 91 persen	186.900.000			PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	93persen	353.700.000	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	7 Lembaga	30.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	7 Lembaga	176.550.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	19 Orang	19 Orang	22.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat		42.750.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	40 Orang	134.400.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	40 Orang	134.400.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	100 persen	1.696.992.000							100 persen	903.685.000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 Persen	100 Persen	1.198.512.000			PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 persen	155.635.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	458.472.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	60 Orang		- DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	11.215.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	60 Orang	54.035.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	668.225.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	60 Orang		- DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	30 Orang	18.190.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	20 Orang	10.250.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	60.600.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	60 Orang	73.160.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	100 Persen	100 Persen	498.480.000			PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 persen	748.050.000	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1766 Orang	1766 Orang	358.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	1766 Orang	631.300.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	20.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	10 Orang	22.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		50 Orang	17.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat			- DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota												KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	52.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	10 Orang	-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	50.180.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 Orang	52.750.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 Orang	22.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	100 Orang	100 Orang	-	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 Orang	20.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase individu miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	90 persen	90 persen	1.318.780.000							90 persen	2.137.618.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah data kesejahteraan sosial yang sudah di verwal	100 persen	100 persen	1.318.780.000			PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	0persen	2.137.618.000	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	16000 Orang	16000 Orang	331.080.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	16000 Orang	577.716.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	242.700.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	20 Orang	409.702.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	2000 Orang	745.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	2000 Orang	1.150.200.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	100 persen	310.540.000							100 persen	18.250.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	100 persen	310.540.000			PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 persen	18.250.000	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	350 Orang	300.540.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	500 Orang		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	350 Orang	10.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	500 Orang	18.250.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	100 persen	57.360.000							100 persen	92.888.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	100 persen	57.360.000			PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 persen	92.888.000	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	57.360.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	1 Makam	92.888.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.502.540.000								3.493.812.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.502.540.000								3.493.812.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen	100,00 persen	201.080.000							100,00 persen	217.866.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	100 persen	201.080.000			PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 persen	217.866.000	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	50.180.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	1 Dokumen	72.746.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	27 Laporan	122.100.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	27 Laporan	145.120.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 Dokumen	8 Dokumen	28.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	8 Dokumen		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah21 tahun	7,20 persen	7,20 persen	1.704.300.000							7,20 persen	1.789.146.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase ketersediaan dokumen Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 persen	100 persen	866.376.000			PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 persen	969.070.000	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	486.456.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	2 Laporan	80.010.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	16 Laporan	96.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	4 Laporan	196.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	40 Laporan	48 Laporan	83.120.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	40 Laporan	111.360.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	76.100.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	1 Dokumen	381.700.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi	3 Organisasi	123.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	3 Organisasi	200.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	100 persen	20.8 persen	837.924.000			PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 persen	820.076.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	78.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	12 Laporan	62.452.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 Orang	1026 Orang	517.624.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	1026 Orang	517.624.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	1 Laporan	241.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	1 Laporan	240.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	12,00 persen	12,00 persen	1.597.160.000							12,00 persen	1.486.800.000	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	100 persen	1.597.160.000			PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 persen	1.486.800.000	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	11 laporan	708.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	11 laporan	708.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	10 laporan	778.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	10 laporan	778.800.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	5 Laporan	3 Laporan	110.360.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Masyarakat	5 Laporan	-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Dinas Lingkungan Hidup				40.635.550.000								35.873.237.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.635.550.000								35.873.237.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				40.635.550.000								35.873.237.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	14.321.870.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	13.330.509.000	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	27.470.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	100 persen	23.051.000	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.480.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2.750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.640.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	1.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	22.350.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	15 Laporan	18.651.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	9.603.463.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	100 persen	10.280.620.000	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	93 Orang/bulan	9.497.763.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	98 Orang/bulan	10.172.970.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	104.180.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	12 Dokumen	106.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.520.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	1.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 Persen	12.330.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	100 persen	28.531.000	
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	12.330.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	28.531.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 Persen	373.123.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	100 persen	250.975.000	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.026.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	4 Paket	5.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	43.678.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	4 Paket	57.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	730.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	5 Paket	8.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	141.700.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	12 Paket	82.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	35.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	2 Paket	24.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.580.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	95 Laporan	140.409.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	95 Laporan	70.075.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	557.271.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	100 persen	554.735.000	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.760.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	4 Laporan	2.400.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	264.628.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan	263.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	290.883.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan	289.335.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	3.748.213.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	100 persen	2.192.597.000	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	145.110.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	20 Unit	162.982.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	69 Unit	69 Unit	3.307.093.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	69 Unit	1.899.315.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	277.760.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	105.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47 Unit	43 Unit	18.250.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Lingkungan Hidup	46 Unit	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase air sungai yang memenuhi baku mutu	45.83 persen	45.83 persen	1.136.972.000							45.83 persen	3.516.106.000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencemaran Air	40.33persen	40.53 persen	736.064.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	40.43persen	873.604.000	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	516.134.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	570.018.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.250.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	300 Paket	300 0	14.400.000	-	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	300 Paket	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	187.280.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	253.586.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Usaha/Kegiatan yang mengelola limbahnya	13.89persen	12.05 persen	400.908.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	12.97persen	2.642.502.000	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	2 Laporan	48.180.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	66.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Titik	5 Titik	352.728.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	5 Titik	2.576.502.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Penambahan Luasan RTH Publik	0,05 persen	0,05 persen	4.794.592.000							0,05 persen	4.191.994.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luasan RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.37855persen	2.37424 persen	4.794.592.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	2.37639persen	4.191.994.000	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	110.41 Ha	110.21 Ha	4.033.632.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	110.31 Ha	3.929.494.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Unit	7 Unit	760.960.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	7 Unit	262.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	Persentase Usaha/ Kegiatan yang mengelola limbah B3	75 persen	75 persen	1.640.000							75 persen	2.273.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	sesuai ketentuan peraturan perundangan												
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Usaha/ Kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan	60.42persen	10.42 persen	1.640.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	31.25persen	2.273.000	
2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	10 Usaha	9 Usaha	1.640.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	10 Usaha	2.273.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase tingkat pelanggaran kategori berat terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan	11,11 persen	11,11 persen	29.590.000							11,11 persen	41.728.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (IKK Outcome)	100 persen	100 persen	29.590.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	41.728.000	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.230.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	23.368.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	70 Badan Usaha	45 Badan Usaha	18.360.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	68 Badan Usaha	18.360.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas peduli LH yang aktif	33,33 persen	33,33 persen	352.500.000							33,33 persen	322.836.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	100 persen	352.500.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	322.836.000	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	90.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	700 Orang	700 Orang	161.415.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	700 Orang	232.836.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	6 Lembaga	138.585.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	8 Lembaga	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang memenuhi standar Adiwiyata	6,91 persen	6,91 persen	44.350.000							6,91 persen	86.386.000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	4penghargaan	3 entitas	44.350.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	3penghargaan	86.386.000	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	3 Entitas	44.350.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Entitas	86.386.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tingkat pelanggaran kategori berat terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan	11,11 persen	11,11 persen	10.630.000							11,11 persen	9.310.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6kasus	6 kasus	10.630.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	6kasus	9.310.000	
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	20 Pengaduan	18 Pengaduan	9.310.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	18 Pengaduan	9.310.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Sanksi	1 Sanksi	1.320.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Sanksi	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	46,75 persen	46,75 persen	19.943.406.000							46,75 persen	14.372.095.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	55persen	7 persen	19.943.406.000			PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	45persen	14.372.095.000	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	55 Kelompok	35 Kelompok	727.970.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	45 Kelompok	427.734.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen	10.641.277.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	7.170.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		51562,09 Ton	8.574.159.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-09	Masyarakat Kota Pekalongan		6.774.361.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				5.268.242.000								5.966.616.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.268.242.000								5.966.616.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.268.242.000								5.966.616.000	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	4.501.070.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.144.947.000	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	21.050.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	31.219.000	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2.523.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.189.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	17.338.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	15 Laporan	26.819.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	3.473.894.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	3.439.120.000	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.435.060.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	29 Orang/bulan	3.374.470.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	37.200.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Dokumen	63.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.634.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	1.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 Persen	8.880.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	21.500.000	
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Paket	9.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	51 Orang	3.880.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	52 Orang	12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 Persen	588.797.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	1.254.736.000	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Paket	1.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	451.147.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Paket	1.069.736.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.290.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Paket	4.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.980.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Paket	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	25.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	13 Paket	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.580.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	4.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	78.300.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	45 Laporan	100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	257.356.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	297.801.000	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.840.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Laporan	3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	146.263.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Laporan	110.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	109.253.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Laporan	184.701.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	151.093.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	100.571.000	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	88.433.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	13 Unit	56.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	25.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	3 Unit	23.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit	37.660.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	28 Unit	21.571.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	98 persen	98 persen	334.561.000							98 persen	351.135.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	390908Dokumen	390508 dokumen	334.561.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	390708Dokumen	351.135.000	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	50000 Dokumen	50000 Dokumen	303.561.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	50000 Dokumen	283.635.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	31.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	11.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Laporan	36.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	98,00 Persen	98,00 Persen	361.611.000							98,00 Persen	291.975.000	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil	100 persen	100 Persen	361.611.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	291.975.000	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	4 Laporan	4 Laporan	340.611.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Laporan	279.975.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	21.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	13,00 OPD	13,00 OPD	71.000.000							13,00 OPD	178.559.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	4Laporan	4 kali	71.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	4Laporan	178.559.000	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	22.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Laporan	76.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	18.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Laporan	80.559.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	2 Dokumen	31.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak				5.514.798.000								5.735.781.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.514.798.000								5.735.781.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				455.563.000								382.734.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Teradvokasi	14.29 Persen	14.29 Persen	89.364.000							14.29 Persen	97.798.000	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	9.47Persen	7.47 Persen	7.207.000			PN-03	PP-03	PK-05	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	8.47Persen	47.785.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	3 Laporan	3 Laporan	7.207.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	3 Laporan	47.785.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	100Lembaga	100 Lembaga	43.171.000			PN-03	PP-03	PK-05	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	100Lembaga	36.373.000	
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	81 orang	81 orang	43.171.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	81 orang	36.373.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kegiatan Dharma Wanita	100 persen	100 Persen	38.986.000			PN-03	PP-03	PK-05	Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan	100 persen	13.640.000	
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	38.986.000	Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan	1 Lembaga	13.640.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	18.46 Rasio per100.000	18.46 Rasio per100.000	93.221.000							18.46 Rasio per100.000	64.476.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	100 Persen	28.650.000			PN-03	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 persen	28.639.000	
2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	28.650.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Masyarakat	3 Dokumen	28.639.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani	100 persen	100 Persen	64.571.000			PN-03	PP-03	PK-05	Masyarakat/Korban Tindak Kekerasan	100 persen	35.837.000	
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	12 orang	12 orang	64.571.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Masyarakat/Korban Tindak Kekerasan	12 orang	35.837.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Permasalahan Keluarga Yang Terlayani	100 persen	100 persen	23.900.000							100 persen	32.943.000	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus permasalahan keluarga yang terlayani	100 persen	100 Persen	23.900.000			PN-03	PP-03	PK-05	Mayarakat	100 persen	32.943.000	
2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	21.175.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Mayarakat	25 Orang	24.893.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	2.725.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Mayarakat	50 Orang	8.050.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Ketercapaian Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	100 persen	100 persen	176.534.000							100 persen	137.872.000	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	100 Persen	176.534.000			PN-03	PP-03	PK-05	Lembaga pemenuhan hak anak	100 persen	137.872.000	
2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	94.753.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Lembaga pemenuhan hak anak	5 Dokumen	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga	1 Lembaga	68.056.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Lembaga pemenuhan hak anak	2 Lembaga	42.872.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	2 Lembaga	13.725.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Lembaga pemenuhan hak anak	1 Lembaga	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Kasus Anak Yang Terlayani	100 Persen	100 Persen	72.544.000							100 Persen	49.645.000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	100 Persen	18.900.000			PN-03	PP-03	PK-05	Masyarakat	100 persen	15.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	80 Orang	80 Orang	18.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Masyarakat	80 Orang	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)	100 persen	100 Persen	40.284.000			PN-03	PP-03	PK-05	Anak Korban Kekerasan	100 persen	23.225.000	
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	40.284.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Anak Korban Kekerasan	12 Orang	23.225.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	100 Persen	13.360.000			PN-03	PP-03	PK-05	Lembaga Penyedia Layanan	100 persen	11.420.000	
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	27 Orang	27 Orang	13.360.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-03	PK-05	Lembaga Penyedia Layanan	27 Orang	11.420.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.059.235.000								5.353.047.000	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	3.799.095.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	3.412.954.000	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 Persen	15.762.000			PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	100 persen	19.686.000	
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.204.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	2 Dokumen	4.186.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.558.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	2 Dokumen	1.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	15 Laporan	14.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 Persen	3.121.822.000			PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	100 persen	2.823.407.000	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.080.848.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	21 Orang/bulan	2.775.257.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	39.530.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	12 Dokumen	46.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.444.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	1 Laporan	1.650.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 Persen	3.650.000			PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	100 persen	8.639.000	
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	3.650.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	1 Paket	8.639.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 Persen	202.205.000			PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	100 persen	198.220.000	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.710.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	4 Paket	750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	44.952.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	4 Paket	26.720.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.050.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	4 Paket	750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	38.244.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	4 Paket	22.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	4.380.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	13 Paket	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	2.530.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	85 Laporan	108.339.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	85 Laporan	140.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen	309.031.000			PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	100 persen	184.956.000	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.520.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	4 Laporan	2.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	107.400.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	12 Laporan	78.856.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	199.111.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	12 Laporan	103.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen	146.625.000			PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	100 persen	178.046.000	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	71.960.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	16 Unit	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	60.175.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	2 Unit	102.246.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 Unit	52 Unit	14.490.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMPPA	52 Unit	10.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	100 Persen	100 Persen	337.468.000							100 Persen	1.240.847.000	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan	100 persen	20 Persen	337.468.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat	60persen	1.240.847.000	
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	337.468.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat	4 Dokumen	1.240.847.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan Dengan Kriteria *Cepat Berkembang* Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan	100.00persen	100 Persen 20 persen	43.792.000							100.00persen	50.922.000	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan Persentase Kinerja Administrasi Kelurahan	100 persen	20 persen 100 Persen	43.792.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan	100 persen	50.922.000	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	43.792.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan	2 Dokumen	50.922.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitas Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	100.00persen	100 Persen 14.29 persen	878.880.000							100.00persen	648.324.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas												
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas	14.29Persen	14.29 Persen	878.880.000			PN-07	PP-01	PK-01	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	14.29Persen	648.324.000	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	113.286.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	1 Dokumen	165.475.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	53.834.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	1 Lembaga	158.375.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	49.770.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	1 Laporan	86.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	34.980.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	1 Laporan	68.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	627.010.000	Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	1 Dokumen	170.274.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Dinas Perhubungan				25.698.043.000								14.578.079.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				25.698.043.000								14.578.079.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				25.698.043.000								14.578.079.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	6.489.556.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	6.551.302.000	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	17.580.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	17.580.000	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.741.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.741.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.763.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.763.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.076.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	15 Laporan	12.076.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	4.448.935.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	4.636.841.000	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.363.005.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PPPK	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	40 Orang/bulan	4.548.511.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	84.296.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	12 Dokumen	86.696.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.634.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	1 Laporan	1.634.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	22.400.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	25.000.000	
2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	22.400.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	1 Laporan	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	150.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	5.000.000	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	150.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	2 Paket	5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	618.812.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	661.230.000	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	4 Paket	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	90.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	4 Paket	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.730.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	4 Paket	14.730.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	298.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	4 Paket	330.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	112.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	13 Paket	120.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	96.582.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 Laporan	97.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	719.999.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	721.651.000	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.170.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	4 Laporan	2.170.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	370.348.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	12 Laporan	372.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	347.481.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	12 Laporan	347.481.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	511.830.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	484.000.000	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajainya	36 Unit	34 Unit	340.850.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	36 Unit	342.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	125.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	3 Unit	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	75 Unit	45.980.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	79 Unit	52.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 Rasio	0,44 Rasio	19.208.487.000							0,44 Rasio	8.026.777.000	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen penetapan rencana induk jaringan LLAJ	100 persen	100 Persen	2.927.995.000			PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	100 persen	2.951.700.000	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	1 Dokumen	60.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	14 Dokumen	14 Dokumen	2.892.995.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	14 Dokumen	2.891.700.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan	3Jenis	3 Jenis	15.042.762.000			PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	3Jenis	3.728.727.000	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	99 Unit	99 Unit	912.660.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	99 Unit	912.660.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	9 Unit	260.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	15 Unit	1.302.067.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15 Unit	59 Unit	13.441.102.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	15 Unit	1.214.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	36 Unit	15 Unit	429.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	36 Unit	300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase juru parkir yang menerima pembinaan dan penertiban dibagi jumlah total juru parkir yang berizin*100%	97,32persen	97,32 Persen	298.000.000			PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	97,32persen	298.000.000	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	4 Laporan	298.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	12 Laporan	298.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan	1persen	1 Unit	217.530.000			PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	1persen	327.350.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B												
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	50.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	1 Unit	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2096 Dokumen	2096 Dokumen	53.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	2096 Dokumen	53.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit	98.180.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	9 Unit	108.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	16.350.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	1 Laporan	16.350.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	100 persen	100 Persen	567.800.000			PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	100 persen	566.000.000	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	4 Dokumen	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	16.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	2 Laporan	16.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	476.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	12 Laporan	475.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)	100 persen	100 Persen	10.000.000			PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	100 persen	10.000.000	
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	4 Laporan	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pelaksanaan kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100 persen	100 persen	29.400.000			PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	100 persen	30.000.000	
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	1 Laporan	20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	1 Laporan	9.400.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	1 Laporan	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	Persentase fasilitas angkutan umum laik jalan	100 persen	100 persen	115.000.000			PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	100 persen	115.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	1 Laporan	50.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan	2 Laporan	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Unit	65.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	PN-03	PP-02	PK-04	Kota Pekalongan		65.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Dinas Komunikasi dan Informatika				13.041.780.000								13.131.452.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.041.780.000								13.131.452.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.754.547.000								12.842.559.000	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	6.273.502.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.701.565.000	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	17.405.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinkominfo	100 persen	26.000.000	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3.642.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinkominfo		12.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	1.763.000	-	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinkominfo	2 Dokumen	1.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinkominfo	15 Laporan	12.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	4.678.913.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	100 persen	4.345.471.000	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.626.671.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	34 Orang/bulan	4.300.101.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50.570.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	12 Dokumen	43.870.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.672.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	1 Laporan	1.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	143.110.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	100 persen	10.000.000	
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	2 Paket	10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	138.110.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH-CHT	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	100 Orang	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	347.870.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	100 persen	343.960.000	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.000.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	4 Paket	6.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	116.460.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	4 Paket	71.460.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	4 Paket	10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	82.420.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	4 Paket	121.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13 Paket	29.200.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	2 Paket	29.200.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	12.150.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	2 Dokumen	16.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	91.640.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	80 Laporan	90.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	632.940.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	100 persen	613.920.000	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.700.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	4 Laporan	2.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	501.000.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	12 Laporan	501.220.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	129.240.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	12 Laporan	110.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	453.264.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	100 persen	362.214.000	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit	210.320.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	24 Unit	220.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	150.614.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	3 Unit	54.614.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	92.330.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	50 Unit	87.600.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 Persen	100 Persen	4.174.867.000							100 Persen	4.522.566.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	100 persen	100 persen	4.174.867.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	4.522.566.000	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut:1. terverifikasi dewan pers, dan2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12 Laporan	709.440.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Laporan	836.152.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	2 Komunitas	43.660.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Komunitas	43.660.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	30 Permohonan	30 Permohonan	112.328.000	-	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	30 Permohonan	151.980.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	442.172.000	-	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Rekomendasi	433.710.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	2 Media	2.739.284.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Media	2.927.568.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	9500 Konten	9500 Konten	127.983.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	9500 Konten	129.496.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan pusat	100 Persen	100 Persen	2.306.178.000							100 Persen	2.618.428.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		data pemerintah daerah kabupaten/kota												
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan domain yang disediakan Dinas Kominfo	100 persen	100 persen	20.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	100 persen	20.000.000	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	3 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Dinas Kominfo	3 Dokumen	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	41,45persen	24,36 persen	2.286.178.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	32,91persen	2.598.428.000	
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	1 Aplikasi	79.420.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Aplikasi	79.420.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	3 Dokumen	2 Dokumen	107.850.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	3 Dokumen	107.850.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	181 Perangkat Daerah	80 Perangkat Daerah	1.092.100.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	181 Perangkat Daerah	1.404.350.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	5 Layanan	5 Layanan	49.470.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	5 Layanan	49.470.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	3 Aplikasi	2 Aplikasi	395.158.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	3 Aplikasi	395.158.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	10 Laporan	10 Laporan	167.900.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	10 Laporan	167.900.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi	1 Dokumen	1 Dokumen	94.280.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	94.280.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah												
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				107.460.000								109.120.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 Persen	100 Persen	107.460.000							100 Persen	109.120.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1Dokumen	1 Dokumen	107.460.000			PN-07	PP-01	PK-01	Pemerintah Kota Pekalongan	1Dokumen	109.120.000	
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	100 %	107.460.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Pemerintah Kota Pekalongan	100 %	109.120.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				179.773.000								179.773.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase sistem elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik	41,18 Persen	41,18 Persen	179.773.000							41,18 Persen	179.773.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	11,54Persen	8,12 persen	149.773.000			PN-07	PP-01	PK-01	pemerintah daerah Kota Pekalongan	9,83Persen	149.773.000	
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	4 Laporan	33.000.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	pemerintah daerah Kota Pekalongan	4 Laporan	33.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	pemerintah daerah Kota Pekalongan	2 Laporan	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	50.546.000	-	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	pemerintah daerah Kota Pekalongan	30 Perangkat Daerah	50.546.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik	2 Dokumen	2 Dokumen	16.227.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	pemerintah daerah Kota Pekalongan	2 Dokumen	16.227.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian												
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100 persen	100 Persen	30.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	30.000.000	
2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Pemerintah Kota Pekalongan	1 Kegiatan	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				5.054.216.000								6.409.559.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.054.216.000								6.409.559.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.054.216.000								6.409.559.000	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	4.110.673.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	4.851.668.000	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	37.965.000			PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	100 persen	52.450.000	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.198.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.271.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	32.496.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	15 Laporan	48.450.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	2.900.901.000			PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	100 persen	3.843.656.000	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.863.423.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD, DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PPPK	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	22 Orang/bulan	3.793.556.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	36.300.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	12 Dokumen	48.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.178.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	1 Laporan	1.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 Persen	28.083.000			PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	100 persen	8.639.000	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	28.083.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan		8.639.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 Persen	233.500.000			PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	100 persen	338.724.000	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	4 Paket	2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	55.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	4 Paket	126.224.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	4 Paket	2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	45.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	4 Paket	45.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	41.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	13 Paket	60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	40 Laporan	85.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	50 Laporan	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	777.656.000			PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	100 persen	516.770.000	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	4 Laporan	12.800.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	435.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	12 Laporan	306.941.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	339.656.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	12 Laporan	197.029.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	132.568.000			PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	100 persen	91.429.000	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	100.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	14 Unit	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	17.968.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	3 Unit	20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	26 Unit	14.600.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DPMTSP Kota Pekalongan	35 Unit	21.429.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penyediaan Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100 Persen	100 Persen	26.300.000							100 Persen	54.800.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/ Keputusan Kepala Daerah/ Keputusan Perangkat Daerah dalam rangka pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1Dokumen	1 Dokumen	4.800.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1Dokumen	14.800.000	
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	14.800.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi Penanaman Modal yang dipublikasikan	1Dokumen	1 Dokumen	21.500.000			PN-05	PP-02	PK-06	Penanam Modal	1Dokumen	40.000.000	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	21.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Penanam Modal	1 Dokumen	40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	15.000.000							100,00 persen	81.839.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	2Kegiatan	81.839.000	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Dokumen	81.839.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	90,02 persen	90,02 persen	709.871.000							90,02 persen	867.470.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha	3550Dokumen	3086 Dokumen	709.871.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	3402Dokumen	867.470.000	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	10 Dokumen	7.888.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	35 Dokumen	20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui	1700 Pelaku Usaha	3086 Pelaku Usaha	441.699.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1600 Pelaku Usaha	558.820.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik												TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	365 Pelaku Usaha	55 Pelaku Usaha	46.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	345 Pelaku Usaha	62.460.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	80 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	213.784.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	70 Kegiatan Usaha	226.190.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku usaha yang melaporkan LKPM	41,14 persen	41,14 persen	99.016.000							41,14 persen	434.297.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dikunjungi dan tervalidasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	99.016.000			PN-05	PP-02	PK-06	Pelaku usaha di Kota Pekalongan	100Pelaku Usaha	434.297.000	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Kegiatan Usaha.	25 Kegiatan Usaha.	35.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Pelaku usaha di Kota Pekalongan	30 Kegiatan Usaha.	64.686.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	44.016.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Pelaku usaha di Kota Pekalongan	225 Pelaku Usaha	267.231.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	20.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Pelaku usaha di Kota Pekalongan	120 Kegiatan Usaha	102.380.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	5 stakeholder	5 stakeholder	93.356.000							5 stakeholder	119.485.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Jenis data yang dimanfaatkan stakeholder	4Dokumen	4 Dokumen	93.356.000			PN-05	PP-02	PK-06	DPMPTSP Kota Pekalongan	4Dokumen	119.485.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	93.356.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	DPMP TSP Kota Pekalongan	4 Dokumen	119.485.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				5.109.921.000								7.338.719.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.109.921.000								7.338.719.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				926.814.000								-	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia5 -60 tahun)	28 indeks	28 indeks	926.814.000							28 indeks	-	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	3.33persen	2.33 persen	558.723.000			PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	3.0persen	-	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	29 Perpustakaan	3 Perpustakaan	101.330.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	26 Perpustakaan	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	5 Layanan	1 Layanan	157.225.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	5 Layanan	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	47.904.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Orang	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	900 Eksemplar	300 Eksemplar	130.464.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	200 Eksemplar	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan	1 Perpustakaan	121.800.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Perpustakaan	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan Nilai Budaya Baca	42,01persen	36.01 persen	368.091.000			PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	40,01persen	-	
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	3 Orang	1 Orang	15.568.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	3 Orang	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dipilih dan didukung kegiatannya												
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3 Perpustakaan	1 Perpustakaan	286.173.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	3 Perpustakaan	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	1 Lokus	66.350.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-04	PP-03	PK-02	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Lokus	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				4.183.107.000								7.338.719.000	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	3.776.328.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	6.839.719.000	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	26.663.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan	100 persen	46.890.000	
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	5.403.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan		15.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.300.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan		1.950.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	19.960.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan		29.940.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.317.399.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan	100 persen	3.802.038.000	
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16 Orang/bulan	2.273.349.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		3.736.288.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	42.750.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		64.125.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.300.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		1.625.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan	100 persen	7.500.000	
2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		7.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	185.928.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan	100 persen	713.930.000	
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	3.000.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		5.085.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	62.200.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		515.317.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	1.500.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		2.250.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	34.728.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		64.242.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	6.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		10.036.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	3.000.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		4.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	75.000.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		112.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	622.565.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan	100 persen	857.985.000	
2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	900.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		1.350.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	462.000.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		621.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	159.665.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		235.635.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	618.773.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan	100 persen	1.411.376.000	
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajainya		12 Unit	100.310.000	-	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		150.720.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	490.363.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		1.216.750.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		40 Unit	28.100.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan		43.906.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	100 persen	100 persen	254.461.000							100 persen	326.000.000	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dibuatkan daftar berkas di aplikasi srikandi	75Persen	60 Persen	225.366.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan	70Persen	255.000.000	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	4 Berkas	3 Berkas	144.390.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan	4 Berkas	170.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Laporan	30 Laporan	80.976.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan	30 Laporan	85.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah OPD yang menyerahkan Arsip Statis ke Depo Arsip	23,33Persen	13,33 persen	25.155.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan	20Persen	45.000.000	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	7 Arsip	4 Arsip	25.155.000	-	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan	6 Arsip	45.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase arsip yang diunggah dalam SIKN/JIKN	19Persen	16,67 Persen	3.940.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan	18Persen	26.000.000	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	3.940.000	-	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan	2 Laporan	26.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	66,67 persen	66,67 persen	152.318.000							66,67 persen	173.000.000	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah10 (Sepuluh) Tahun	Presentase Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100 persen	100 persen	91.934.000			PN-07	PP-01	PK-01	Pemerintah Kota Pekalongan	100 persen	110.000.000	
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah10 Tahun yang Dimusnahkan	640 Berkas	600 Berkas	11.403.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Pemerintah Kota Pekalongan	630 Berkas	25.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan	950 Arsip	900 Arsip	80.531.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Pemerintah Kota Pekalongan	900 Arsip	85.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah10 (Sepuluh) Tahun	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah10 (Sepuluh) Tahun												
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	100 persen	100 Persen	60.384.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan	100 persen	63.000.000	
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	950 Arsip	900 Arsip	60.384.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinarpus Kota Pekalongan	900 Arsip	63.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Dinas Kelautan dan Perikanan				8.439.420.000								11.271.489.865	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.439.420.000								11.271.489.865	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				8.439.420.000								11.271.489.865	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	4.855.098.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	7.180.943.000	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	24.639.000			PN-07	PP-01	PK-01	-	100 persen	40.000.000	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	-	2 Dokumen	19.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	-	2 Dokumen	6.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	13.139.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	-	15 Laporan	15.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	3.736.620.000			PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	100 persen	5.061.500.000	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.683.510.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA, DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	25 Orang/bulan	5.000.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	51.510.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	12 Dokumen	60.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	1.600.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	1 Laporan	1.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 Persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	100 persen	9.500.000	
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	1 Paket	9.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 Persen	251.234.000			PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	100 persen	422.750.000	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.500.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	4 Paket	9.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	46.658.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	4 Paket	155.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.250.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	4 Paket	6.750.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	68.496.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	4 Paket	70.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	2 Paket	7.500.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	13 Paket	8.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.830.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	115.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	100 Laporan	170.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	564.162.000			PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	100 persen	585.193.000	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.600.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	4 Laporan	2.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	196.376.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	12 Laporan	200.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	366.186.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	12 Laporan	383.193.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	273.443.000			PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	100 persen	1.062.000.000	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	26 Unit	124.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	20 Unit	146.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	120.121.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	3 Unit	883.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	30 Unit	29.322.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	DKP Kota Pekalongan	25 Unit	33.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	11.022,14 Ton	11.022,14 Ton	3.026.580.000							11.022,14 Ton	3.374.946.865	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peresentase penyediaan data, prasarana dan sarpras perikanan tangkap yang tersedia	70PERSEN	70 PERSEN	69.926.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	70PERSEN	94.500.000	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	46.616.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	42.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1 Unit	1 Unit	23.310.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit	52.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Kecil yang dibina	100 persen	100 persen	77.850.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	130.000.000	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	25 Orang	30 Orang	35.850.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	25 Orang	65.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	15 Kelompok	42.000.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	5 Kelompok	65.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang di kelola di Kota Pekalongan	1LOKASI	1 LOKASI	2.878.804.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1LOKASI	3.150.446.865	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	1 Layanan	2.878.804.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA, DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Layanan	3.150.447.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	526,21 ton	526,21 ton	256.208.000							526,21 ton	345.000.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan ikan	100 persen	100 PERSEN	256.208.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan; Pembudidaya Ikan	100 persen	345.000.000	
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	8.470.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan; Pembudidaya Ikan	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	16.340.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan; Pembudidaya Ikan	1 Unit	70.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen	4 Dokumen	10.037.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan; Pembudidaya Ikan	4 Dokumen	20.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	210.591.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	RETRIBUSI JASA USAHA, DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan; Pembudidaya Ikan	1 Unit	200.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	25 Unit	20 Unit	10.770.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan; Pembudidaya Ikan	25 Unit	40.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 PERSEN	1 PERSEN	301.534.000							1 PERSEN	370.600.000	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang telah memenuhi kualitas mutu dan keamanan hasil perikanan	5Pelaku usaha	5 Pelaku usaha	74.294.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	5Pelaku usaha	20.600.000	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	74.294.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	20 Unit Usaha	20.600.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70PERSEN	70 PERSEN	227.240.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	70PERSEN	350.000.000	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	65 Pelaku Usaha	65 Pelaku Usaha	227.240.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	65 Pelaku Usaha	350.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga				23.954.167.000								19.931.655.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.049.062.000								9.615.582.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				10.782.504.000								6.044.630.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase anggota Organisasi Kepemudaan yang dibina	56 Persen	56 Persen	4.083.000.000							56 Persen	366.970.000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (IKK)	0,55 persen	0.51 persen	4.083.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	0,53persen	366.970.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	30 Orang	287.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	30 Orang	10.950.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3.796.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBB P2, DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Kegiatan	356.020.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabor yang memiliki Sarpras Olahraga	43 Persen	43 Persen	6.599.504.000							43 Persen	5.577.660.000	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor POPDA yang sarprasnya difasilitasi / Jumlah cabor POPDA pada tahun n	75persen	75 Persen	1.408.980.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	75persen	893.370.000	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	5 Unit	3 Unit	1.408.980.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB P2, DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	5 Unit	893.370.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan pada tahun n	6event	6 Event	1.417.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	6event	1.453.700.000	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10 Kegiatan	10 Kegiatan	1.107.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBB P2, DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	10 Kegiatan	1.110.240.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Kegiatan	56.420.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	70 Orang	70 Orang	275.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	70 Orang	287.040.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi	25persen	25 Persen	3.728.524.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	25persen	3.056.450.000	
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	150 Orang	178.524.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	150 Orang	186.460.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu	1 Pelatda	1 Pelatda	100.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Pelatda	100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)												KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	150 Orang	150 Orang	3.450.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PBB P2, DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	150 Orang	2.769.990.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah organisasi olahraga rekreasi yang dikembangkan pada tahun N	16organisasi	15 Organisasi	45.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	16organisasi	174.140.000	
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	3 Laporan	45.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	174.140.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan pada tahun n	100 persen	100 persen	100.000.000							100 persen	100.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kwarcab Pramuka Kota Pekalongan	1 Organisasi	100.000.000	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1 Organisasi	100.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-		100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.266.558.000								3.570.952.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	100 persen	1.511.990.000							100 persen	1.748.642.000	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan	4event	4 Event	904.900.000			PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	4event	998.642.000	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	904.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBB P2, DAU	PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Objek	998.642.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event tradisi budaya yang dilestarikan	7event	7 Event	607.090.000			PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	7event	750.000.000	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	607.090.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBB P2, DAU	PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Objek	750.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen	100 persen	130.550.000							100 persen	495.593.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	6komunitas	6 Komunitas	130.550.000			PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	6komunitas	495.593.000	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	130.550.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Lembaga	495.593.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	100 persen	20.000.000							100 persen	68.199.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sejarah yang dipublikasikan	100 persen	100 Persen	20.000.000			PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	68.199.000	
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	68.199.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (IUP)	23 persen	23 persen	20.000.000							23 persen	50.000.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	31persen	23 persen	20.000.000			PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	27persen	50.000.000	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	2 Objek	20.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	2 Objek	50.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan jumlah pengunjung museum batik	5 persen	5 persen	1.584.018.000							5 persen	1.208.518.000	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	65864orang	53864 orang	1.584.018.000			PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	57864orang	1.208.518.000	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1310 Unit	1310 Unit	241.000.000	Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	1310 Unit	210.684.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4 Unit	4 Unit	1.229.968.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBB P2	PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Unit	876.623.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	9 Unit	9 Unit	113.050.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	PN-08	PP-03	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	9 Unit	121.211.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.905.105.000								10.316.073.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				9.905.105.000								10.316.073.000	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.472.447.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.861.261.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah												
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	21.988.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	100 persen	22.850.000	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	738.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	2 Dokumen	2.750.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	2 Dokumen	1.650.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	18.750.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	15 Laporan	18.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	4.252.393.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	100 persen	4.930.177.000	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.192.023.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PAD, DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	30 Orang/bulan	4.848.077.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	57.900.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	12 Dokumen	80.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.470.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	1 Laporan	1.650.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 Persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	100 persen	9.500.000	
3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	1 Paket	9.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	12bulan	12 Bulan	204.170.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	12bulan	294.166.000	
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.500.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	4 Paket	7.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	35.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	4 Paket	40.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.300.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	4 Paket	10.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	4 Paket	58.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	2 Paket	20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan	230 Laporan	102.370.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	230 Laporan	158.166.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	665.706.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	100 persen	447.400.000	
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.400.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	4 Laporan	2.400.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	405.306.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	12 Laporan	268.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	258.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	12 Laporan	177.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	323.190.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	100 persen	157.168.000	
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	101.410.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	19 Unit	74.840.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	191.780.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	1 Unit	62.328.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	30.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinparbudpora	20 Unit	20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	12.05 persen	12.05 persen	2.976.634.000							12.05 persen	3.104.107.000	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dikelola dan ditata (lokasi)	100 persen	100 persen	2.976.634.000			PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	3.104.107.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		2 Unit	502.514.000	Pekalongan Utara, Panjang Baru Pekalongan Utara, Krapyak	DAU	PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan		488.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Lokasi	2.474.120.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan		2.615.657.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	300 orang	300 orang	442.244.000							300 orang	949.205.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	10 persen	10 persen	442.244.000			PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	10 persen	949.205.000	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Dokumen	200.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan		279.205.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		1 Dokumen	127.244.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan		495.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Kegiatan	100.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan		50.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		2 Promosi	15.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan		125.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pendaftaran HAKI di sektor ekonomi kreatif	100 persen	100 persen	15.000.000							100 persen	15.000.000	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB kota pekalongan	12.36 persen	12.16 persen	15.000.000			PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	12.21 persen	15.000.000	
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		15 Produk	15.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan		15.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	100 persen	100 persen	998.780.000							100 persen	386.500.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar	20 persen	20 persen	948.780.000			PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan	20 persen	386.500.000	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		1 Laporan	363.780.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan		100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		100 Orang	350.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBB P2	PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan		250.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		24 Orang	235.000.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-05	PP-02	PK-07	Masyarakat Kota Pekalongan		36.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 persen	100 persen	50.000.000			PN-05	PP-02	PK-07	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	100 persen	-	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		100 Orang	50.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-07	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif		-	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Dinas Pertanian dan Pangan				6.997.152.000								6.899.663.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				381.680.000								356.500.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				381.680.000								356.500.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	92,14 angka	92,14 angka	337.680.000							92,14 angka	312.500.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	134.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	109.000.000	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	115.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	90.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	12 Laporan	12 Laporan	9.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Laporan	9.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertohario	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	100 persen	100 persen	173.680.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	173.500.000	
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	3.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	10 Ton	170.180.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	10 Ton	170.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk penyediaan pangan B2SA	3Kegiatan	3 Kegiatan	30.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	3Kegiatan	30.000.000	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	30.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen	100 persen	22.500.000							100 persen	22.500.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1Dokumen	1 Dokumen	22.500.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1Dokumen	22.500.000	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	22.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	87,20 persen	87,20 persen	21.500.000							87,20 persen	21.500.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	26sampel	26 sampel	21.500.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	26sampel	21.500.000	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	21.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Dokumen	21.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.615.472.000								6.543.163.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				6.615.472.000								6.543.163.000	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.393.012.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.882.863.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah												
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	19.883.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	100 persen	19.883.000	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.915.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.915.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.690.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.690.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.278.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	15 Laporan	12.278.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	4.649.677.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	100 persen	5.140.800.000	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.596.367.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	40 Orang/bulan	5.087.490.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	51.600.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	12 Dokumen	51.600.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.710.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	1 Laporan	1.710.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	100 persen	5.000.000	
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	1 Paket	5.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	243.298.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	100 persen	243.298.000	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.000.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	4 Paket	1.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	46.094.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	4 Paket	43.279.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.000.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	4 Paket	2.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.519.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	4 Paket	30.519.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.185.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	2 Paket	10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	155.000.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	150 Laporan	155.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	342.992.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	100 persen	341.720.000	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	4 Laporan	1.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	131.520.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	4 Laporan	131.520.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	210.472.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	12 Laporan	209.200.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	132.162.000			PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	100 persen	132.162.000	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	65.000.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	19 Unit	65.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	45.229.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan		45.229.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25 Unit	21.933.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Dinperpa Kota Pekalongan	3 Unit	21.933.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian pertahun	75,59 Miliar rupiah	75,59 Miliar rupiah	317.100.000							75,59 Miliar rupiah	256.020.000	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen	100 persen	105.540.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	105.000.000	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	105.540.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Laporan	105.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota	100 persen	100 persen	58.380.000			PN-05	PP-02	PK-06	Dinperpa Kota Pekalongan	100 persen	58.020.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	58.380.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Dinperpa Kota Pekalongan	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	58.020.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1Laporan	1 Laporan	69.180.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1Laporan	69.000.000	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	6 Laporan	25.180.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	6 Laporan	44.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	44.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan pelayanan ULIB	100 persen	100 persen	84.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	24.000.000	
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	200 Laporan	84.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	24.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen	100 persen	541.480.000							100 persen	91.480.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	1Unit	3 Unit	541.480.000			PN-05	PP-02	PK-06	Dinperpa Kota Pekalongan	1Unit	91.480.000	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		2 Unit	450.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Dinperpa Kota Pekalongan		-	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	91.480.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Dinperpa Kota Pekalongan	1 Unit	91.480.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular yang Tertangani	100 persen	100 persen	305.880.000							100 persen	254.800.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100kasus	800 kasus	95.180.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	500kasus	45.000.000	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	12 Laporan	95.180.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	45.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan	1laporan	1 Laporan	10.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1laporan	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota												
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 laporan	6 laporan	10.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	4 laporan	10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1laporan	1 Laporan	15.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1laporan	15.000.000	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Laporan	15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 persen	100 persen	185.700.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	184.800.000	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	165.700.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit Usaha	164.800.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	100 persen	12.000.000							100 persen	12.000.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan	4kali	4 kali	12.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	4kali	12.000.000	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	4 Ha	1 Ha	12.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Ha	12.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100 persen	100 persen	15.000.000							100 persen	15.000.000	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1laporan	1 Laporan	15.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1laporan	15.000.000	
3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Laporan	15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5 persen	5 persen	31.000.000							5 persen	31.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 persen	100 persen	31.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	31.000.000	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	11.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit	11.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	20.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit	20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				21.491.211.000								25.991.274.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				892.300.000								890.628.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				892.300.000								890.628.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	76,09 Persen	76,09 Persen	129.800.000							76,09 Persen	176.428.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Aktif	84,78Persen	58,20 Persen	129.800.000			PN-03	PP-02	PK-06	KSP/USP/KSPPS	80,43Persen	176.428.000	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	78 Unit Usaha	70 Unit Usaha	129.800.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-03	PP-02	PK-06	KSP/USP/KSPPS	74 Unit Usaha	176.428.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi bidang perkoperasian	4,14 Persen	4,14 Persen	29.200.000							4,14 Persen	29.200.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi aktif yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	38,96Persen	38,96 Persen	29.200.000			PN-03	PP-02	PK-06	Koperasi	38,96Persen	29.200.000	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	60 Orang	29.200.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-03	PP-02	PK-06	Koperasi	60 Orang	29.200.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	30,78 Persen	30,78 Persen	733.300.000							30,78 Persen	685.000.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan	Persentase UMKM Binaan yang difasilitasi	5,65Persen	5,89 Persen	733.300.000			PN-03	PP-02	PK-06	UMKM	5,77Persen	685.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	pendampingan pengembangan usaha												
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	130 Unit Usaha	130 Unit Usaha	733.300.000	Pekalongan Barat, Podosugih	PBB P2, DAU	PN-03	PP-02	PK-06	UMKM	130 Unit Usaha	685.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				20.598.911.000								25.100.646.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				20.598.911.000								25.100.646.000	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	11.092.695.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	13.023.183.000	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	18.084.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	100 persen	24.534.000	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	3.132.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	2 Dokumen	3.132.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.952.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	2 Dokumen	2.952.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	15 Laporan	18.450.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	6.742.577.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	100 persen	7.956.649.000	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	6.673.059.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	61 Orang/bulan	7.881.731.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	67.800.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	12 Dokumen	73.200.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.718.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	1 Laporan	1.718.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 Persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	100 persen	14.500.000	
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	5.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	2 Paket	14.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 Persen	449.560.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	100 persen	667.000.000	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	4 Paket	6.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	49.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	4 Paket	205.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	4 Paket	6.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	54.320.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	4 Paket	95.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	60.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	13 Paket	80.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	2 Dokumen	3.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	180 Laporan	278.740.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	180 Laporan	272.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	3.428.370.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	100 persen	3.753.000.000	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	4 Laporan	3.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.877.350.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	12 Laporan	3.100.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	548.520.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	12 Laporan	650.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	449.104.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	100 persen	607.500.000	
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	39 Unit	402.704.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	39 Unit	510.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	20.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM, DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	2 Unit	60.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit	26.400.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-07	PP-01	PK-01	ASN dan Pegawai di Lingkungan OPD	45 Unit	37.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Perdagangan yang Sesuai dengan Ketentuan	2,22 Persen	2,22 Persen	3.000.000							2,22 Persen	12.500.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Surat Rekomendasi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	80Persen	80 Persen	2.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko dan Swalayan, serta Toko dan Swalayan Berjejaring	80Persen	10.000.000	
3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	4 laporan	4 laporan	2.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko dan Swalayan, serta Toko dan Swalayan Berjejaring	4 laporan	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	50Persen	50 persen	1.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	Gudang	50Persen	2.500.000	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Gudang	1 Dokumen	2.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penataan, pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat)	8.33 Persen	8.33 Persen	6.829.665.000							8.33 Persen	10.090.925.000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat Secara Profesional	100 persen	25 Persen	6.779.665.000			PN-05	PP-02	PK-06	Pasar Rakyat	58.33Persen	9.970.925.000	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	100.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM	PN-05	PP-02	PK-06	Pasar Rakyat	1 Unit	1.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	12 Unit	6.679.665.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Pasar Rakyat	12 Unit	8.470.925.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	77.33Persen	46.67 Persen	50.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	ASN dan Pengelola Pasar Rakyat	60Persen	120.000.000	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	ASN dan Pengelola Pasar Rakyat	4 Dokumen	120.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting minimal8 kali dalam sebulan	100 Persen	100 Persen	76.200.000							100 Persen	164.100.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Objek Sasaran Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 persen	100 Persen	72.200.000			PN-05	PP-02	PK-06	Bahan Pokok dan Barang Penting	100 persen	157.500.000	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam1 (Satu) Kabupaten/Kota	19 Laporan	19 Laporan	72.200.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Bahan Pokok dan Barang Penting	19 Laporan	157.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	90Persen	90 Persen	4.000.000			PN-05	PP-02	PK-06	Distributor dan Kios Tani Penyalur Pupuk Bersubsidi	90Persen	6.600.000	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal90%	3 Laporan	3 Laporan	4.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Distributor dan Kios Tani Penyalur Pupuk Bersubsidi	3 Laporan	6.600.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	3,4 persen	3,4 persen	96.100.000							3,4 persen	160.000.000	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir	1Pelaku Eksportir	1 pelaku usaha	96.100.000			PN-05	PP-02	PK-06	UMKM dan Eksportir	1Pelaku Eksportir	160.000.000	
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	96.100.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	UMKM dan Eksportir	2 Pelaku Usaha	160.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	82,49 Persen	82,49 Persen	219.826.000							82,49 Persen	334.938.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat - alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86.99Persen	82,99 Persen	219.826.000			PN-05	PP-02	PK-06	Pemilik peralatan UTTP	84.99Persen	334.938.000	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5294 Unit	5190 Unit	194.826.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Pemilik peralatan UTTP	5242 Unit	307.475.000	DINAS PERDAGANGAN,KOP ERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	100 Orang	25.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Pemilik peralatan UTTP	100 Orang	27.463.000	DINAS PERDAGANGAN,KOP ERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,88 Persen	0,88 Persen	2.281.425.000							0,88 Persen	1.315.000.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	17.54Persen	51,58 persen	2.281.425.000			PN-05	PP-02	PK-06	UMKM dan Eksportir	27.03Persen	1.315.000.000	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	170 UMKM	170 UMKM	2.207.200.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	UMKM dan Eksportir	170 UMKM	1.150.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOP ERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	30 UMKM	74.225.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	UMKM dan Eksportir	30 UMKM	165.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOP ERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				12.720.297.000								12.770.786.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.147.163.000								5.119.647.000	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.147.163.000								5.119.647.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	52114366,27 Rupiah per orang	52114366,27 Rupiah per orang	4.493.492.000							52114366,27 Rupiah per orang	4.493.492.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,25Persen	1,15 persen	4.477.159.000			PN-06	PP-03	PK-05	Pencaker Kota Pekalongan, Masyarakat	1,20Persen	4.477.159.000	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	6850 Orang	1356 Orang	4.317.676.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU, DBH-CHT	PN-06	PP-03	PK-05	Pencaker Kota Pekalongan, Masyarakat	1370 Orang	4.317.676.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	449 Unit	89 Unit	159.483.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Pencaker Kota Pekalongan, Masyarakat	90 Unit	159.483.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 persen	91 persen	9.303.000			PN-06	PP-03	PK-05	LPKS Kota Pekalongan	96Persen	9.303.000	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	20 Lembaga	9.303.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	LPKS Kota Pekalongan	20 Lembaga	9.303.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase jumlah wirausaha baru yang dibina	2,01Persen	1,14 persen	7.030.000			PN-06	PP-03	PK-05	Wira usaha baru Kota Pekalongan	1,58Persen	7.030.000	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	150 Perusahaan	30 Perusahaan	7.030.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Wira usaha baru Kota Pekalongan	30 Perusahaan	7.030.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	40,05 persen	40,05 persen	173.433.000							40,05 persen	173.433.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pencari kerja	7,14Persen	6,63 Persen	101.583.000			PN-06	PP-03	PK-05	1.Perusahaan dan Pencaker,2. Siswa SMK,3. Disabilitas,4. lokasi Padat Karya Kota Pekalongan	6,89Persen	101.583.000	
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	200 Orang	40 Orang	6.026.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	1.Perusahaan dan Pencaker,2. Siswa SMK,3. Disabilitas,4. lokasi Padat Karya Kota Pekalongan	40 Orang	6.026.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	400 Orang	80 Orang	14.211.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	1.Perusahaan dan Pencaker,2. Siswa SMK,3. Disabilitas,4. lokasi Padat Karya Kota Pekalongan	80 Orang	14.211.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	100 Orang	20 Orang	11.389.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	1.Perusahaan dan Pencaker,2. Siswa SMK,3. Disabilitas,4. lokasi Padat Karya Kota Pekalongan	20 Orang	11.389.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	180 Orang	36 Orang	69.957.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	1.Perusahaan dan Pencaker,2. Siswa SMK,3. Disabilitas,4. lokasi Padat Karya Kota Pekalongan	36 Orang	69.957.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	12Buku	12 buku	63.964.000			PN-06	PP-03	PK-05	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker,2. Layanan dan Leaflet,3. Perusahaan Kota Pekalongan	12Buku	63.964.000	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 Orang	100 Orang	63.964.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker,2. Layanan dan Leaflet,3. Perusahaan Kota Pekalongan	100 Orang	63.964.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang mendaftar sebagai CPMI	120Orang	112 Orang	7.886.000			PN-06	PP-03	PK-05	CPMI Kota Pekalongan	116Orang	7.886.000	
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	630 Orang	100 Orang	7.886.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	CPMI Kota Pekalongan	126 Orang	7.886.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	12,80 persen	12,80 persen	480.238.000							12,80 persen	452.722.000	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP atau PKB	45,61Persen	43,51 Persen	43.050.000			PN-06	PP-03	PK-05	Perusahaan di Kota Pekalongan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan	44,91Persen	43.050.000	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	200 Perusahaan	40 Perusahaan	8.050.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Perusahaan di Kota Pekalongan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan	40 Perusahaan	8.050.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	45 Laporan	6 Laporan	35.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Perusahaan di Kota Pekalongan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan	7 Laporan	35.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	45,02Persen	38,93 persen	437.188.000			PN-06	PP-03	PK-05	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan, Pekerja Rentan	41,38Persen	409.672.000	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	40 Perkara	8.420.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan, Pekerja Rentan	20 Perkara	8.420.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	28 Perkara	6 Perkara	5.480.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan, Pekerja Rentan	6 Perkara	5.480.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000	Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan, Pekerja Rentan	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	22.484.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	22.568.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-06	PP-03	PK-05	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan, Pekerja Rentan	1 Lembaga	22.568.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1700 Orang	1700 Orang	350.720.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DBH-CHT	PN-06	PP-03	PK-05	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan, Pekerja Rentan	1700 Orang	350.720.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.573.134.000								7.651.139.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				7.573.134.000								7.651.139.000	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	7.400.250.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	7.474.950.000	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	25.287.000			PN-07	PP-01	PK-01	-	100 persen	25.287.000	
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	2 Dokumen	6.249.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	2 Dokumen	6.249.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2.132.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	2 Dokumen	2.132.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75 Laporan	15 Laporan	16.906.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	15 Laporan	16.906.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.974.236.000			PN-07	PP-01	PK-01	-	100 persen	6.028.036.000	
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	48 Orang/bulan	5.914.760.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	46 Orang/bulan	5.968.560.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	57.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	12 Dokumen	57.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1.976.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	1 Laporan	1.976.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	3.650.000			PN-07	PP-01	PK-01	-	100 persen	3.650.000	
3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1 Paket	3.650.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	1 Paket	3.650.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	302.297.000			PN-07	PP-01	PK-01	-	100 persen	323.197.000	
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	4 Paket	4.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	85.947.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	4 Paket	85.947.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	35.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	4 Paket	35.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	65.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	4 Paket	85.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	65 Paket	13 Paket	7.850.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	13 Paket	8.750.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	2 Dokumen	4.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128 Laporan	20 Laporan	100.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI JASA USAHA	PN-07	PP-01	PK-01	-	25 Laporan	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	909.480.000			PN-07	PP-01	PK-01	-	100 persen	909.480.000	
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	4 Laporan	3.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	4 Laporan	3.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	261.100.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	12 Laporan	261.100.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	644.880.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	12 Laporan	644.880.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	185.300.000			PN-07	PP-01	PK-01	-	100 persen	185.300.000	
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	27 Unit	109.300.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	23 Unit	109.300.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	50.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	PN-07	PP-01	PK-01	-	2 Unit	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	54 Unit	26.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	50 Unit	26.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	60,45 persen	60,45 persen	135.154.000							60,45 persen	135.154.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/ sentra industri pengolahan yang difasilitasi	15Lembaga/Sentra	3 Lembaga/ Sentra	135.154.000			PN-05	PP-02	PK-06	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan	3Lembaga/Sentra	135.154.000	
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5 Dokumen	1 Dokumen	9.890.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan	1 Dokumen	9.890.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Dokumen	1 Dokumen	6.575.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan	1 Dokumen	6.575.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	1 Dokumen	104.649.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan	1 Dokumen	104.649.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	7.355.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan	1 Dokumen	7.355.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Dokumen	1 Dokumen	6.685.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan	1 Dokumen	6.685.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan jumlah industri pengolahan yang melaporkan secara lengkap di SIINAS	9 Persen	9 Persen	37.730.000							9 Persen	41.035.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	13299 (Jumlah IKM)IKM	100 IKM	37.730.000			PN-05	PP-02	PK-06	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan	100IKM	41.035.000	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5 Dokumen	1 Dokumen	21.035.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan	1 Dokumen	21.035.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Dokumen	1 Dokumen	16.695.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-05	PP-02	PK-06	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan	1 Dokumen	20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Sekretariat Daerah				15.990.368.000								15.977.091.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				15.990.368.000								15.977.091.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				15.990.368.000								15.977.091.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	15.990.368.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	15.977.091.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	15.990.368.000			PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	15.977.091.000	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	115 Orang/bulan	15.990.368.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PPPK	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	110 Orang/bulan	15.977.091.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Bagian Pemerintahan				495.983.000								796.876.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				495.983.000								796.876.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				495.983.000								796.876.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen	100 persen	495.983.000							100 persen	796.876.000	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	100 persen	100 persen	403.801.000			PN-07	PP-01	PK-01	Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	100 persen	796.876.000	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	82.910.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	1 Dokumen	349.417.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	179.906.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	3 Dokumen	248.389.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	140.985.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	2 Dokumen	199.070.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase efektivitas kerja sama daerah	100 persen	100 Persen	92.182.000			PN-07	PP-01	PK-01	Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	100 persen	-	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	92.182.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	20 Dokumen	-	BAGIAN PEMERINTAHAN
	Bagian Hukum				361.809.000								361.809.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				361.809.000								361.809.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				361.809.000								361.809.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum (IUP)	96,76 indeks	96,76 indeks	361.809.000							96,76 indeks	361.809.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 persen	100 persen	361.809.000			PN-07	PP-01	PK-01	Bagian Hukum, Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	361.809.000	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	75.630.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bagian Hukum, Masyarakat Kota Pekalongan	9 Dokumen	75.630.000	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	6 Kasus	196.823.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bagian Hukum, Masyarakat Kota Pekalongan	6 Kasus	196.823.000	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1200 Dokumen	1200 Dokumen	89.356.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bagian Hukum, Masyarakat Kota Pekalongan	1200 Dokumen	89.356.000	BAGIAN HUKUM
	Bagian Organisasi				257.715.000								447.662.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				257.715.000								447.662.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				257.715.000								447.662.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	97.74 Angka	97.74 Angka	257.715.000							97.74 Angka	447.662.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	44Indeks	43 Skor	257.715.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	43.5Indeks	447.662.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.01.2 .13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	60.428.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	2 Dokumen	110.662.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2 .13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	106.787.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	2 Laporan	157.000.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2 .13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	36 Dokumen	36 Dokumen	90.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	36 Dokumen	180.000.000	BAGIAN ORGANISASI
	Bagian Perekonomian Dan SDA				516.390.000								894.822.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				516.390.000								894.822.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				516.390.000								894.822.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Return on Aset (ROA) BUMD Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	1.00 Persen 0.39 Persen 0.53 Persen	0,30 Persen 0,35 Persen 0,49 Persen	516.390.000							0.40 Persen 0.36 Persen 0.50 Persen	894.822.000	
4.01.03.2 .01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100 persen	100 Persen	157.670.000			PN-03	PP-02	PK-04	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Tim TPAKD, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan	100 persen	237.665.000	
4.01.03.2 .01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	30.109.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Tim TPAKD, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan	2 Dokumen	76.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
4.01.03.2 .01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	65.965.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Tim TPAKD, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan	4 Laporan	63.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
4.01.03.2 .01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	61.596.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Tim TPAKD, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian	1 Dokumen	98.665.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											dan SDA Kota Pekalongan			
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Kegiatan Koordinasi DBHCHT	100 persen	100 Persen	358.720.000			PN-03	PP-02	PK-04	OPD Penerima DBHCHT, Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Pekalongan	100 persen	657.157.000	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	358.720.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DBH-CHT	PN-03	PP-02	PK-04	OPD Penerima DBHCHT, Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Pekalongan	2 Dokumen	657.157.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan				377.766.000								622.867.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				377.766.000								622.867.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				377.766.000								622.867.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6 Persen	6 Persen	377.766.000							6 Persen	622.867.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	100 persen	100 persen	57.340.000			PN-03	PP-02	PK-04	Semua OPD se Kota Pekalongan	100 persen	110.029.000	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	30.556.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Semua OPD se Kota Pekalongan	2 Laporan	42.681.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	26.784.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Semua OPD se Kota Pekalongan	2 Laporan	67.348.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	100 persen	100 persen	320.426.000			PN-03	PP-02	PK-04	Semua OPD se Kota Pekalongan	100 persen	512.838.000	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	4 Dokumen	62.484.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Semua OPD se Kota Pekalongan	4 Dokumen	224.984.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen	257.942.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-03	PP-02	PK-04	Semua OPD se Kota Pekalongan	4 Dokumen	287.854.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				17.272.112.000								16.039.090.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				17.272.112.000								16.039.090.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				17.272.112.000								16.039.090.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen	17.272.112.000							100 persen	16.039.090.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 persen	100 persen	17.272.112.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	16.039.090.000	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	34 Dokumen	34 Dokumen	16.340.704.770	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	34 Dokumen	14.436.520.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	17 Dokumen	17 Dokumen	438.443.800	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, DBH-CHT	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	17 Dokumen	660.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	31 Dokumen	31 Dokumen	492.963.430	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	31 Dokumen	942.570.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Bagian Umum				18.278.586.000								15.624.424.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				18.278.586.000								15.624.424.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				18.278.586.000								15.624.424.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	18.278.586.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	15.624.424.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	56.851.000			PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	75.250.000	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.842.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.009.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 Dokumen	12.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	52.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	15 Laporan	59.750.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	199.712.000			PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	231.100.000	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4 Dokumen	197.850.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 Dokumen	211.600.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.862.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	1 Laporan	19.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 Persen	87.250.000			PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	87.250.000	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	87.250.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 Paket	87.250.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 Persen	8.541.763.000			PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	6.460.376.000	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	70.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	4 Paket	80.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.020.725.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	4 Paket	1.020.725.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	170.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	4 Paket	170.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.388.525.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	4 Paket	1.591.721.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	2 Paket	66.825.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	13 Paket	257.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	83.345.000	Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 Dokumen	77.500.000	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	1.085.258.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	4 Laporan	1.085.258.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan	1500 Laporan	4.582.085.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2400 Laporan	2.102.672.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	1 Dokumen	75.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen	2.910.930.000			PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	2.376.180.000	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	27.600.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	4 Laporan	26.600.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.182.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 Laporan	969.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	1.701.330.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 Laporan	1.380.580.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen	3.968.704.000			PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	4.866.312.000	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	70 Unit	1.674.740.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	70 Unit	1.456.080.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	1.893.464.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	7 Unit	3.009.732.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	190 Unit	400.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	150 Unit	400.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	100 persen	100 Persen	833.376.000			PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	717.956.000	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	812.876.000	Pekalongan Barat, Podosugih	PAJAK REKLAME	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 Orang/Bulan	687.956.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Orang	2 Orang	20.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	3 Orang	30.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen	100 Persen	1.680.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	810.000.000	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	960.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 Paket	480.000.000	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	720.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 Paket	330.000.000	BAGIAN UMUM
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				957.014.000								1.244.310.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				957.014.000								1.244.310.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				957.014.000								1.244.310.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Keprotokoleran	100 Persen	100 Persen	957.014.000							100 Persen	1.244.310.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase ketercapaian kinerja Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 persen	100 persen	957.014.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	1.244.310.000	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	229.345.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	12 Laporan	283.728.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	211 Laporan	191 Laporan	429.769.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	201 Laporan	610.582.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	297.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	12 Laporan	350.000.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	Sekretariat DPRD				63.858.172.000								58.805.254.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				63.858.172.000								58.805.254.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD				63.858.172.000								58.805.254.000	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	36.899.533.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	29.910.264.000	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	20.356.000			PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	100 persen	16.500.000	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	3.308.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	3 Dokumen	7.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.558.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	2 Dokumen	1.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15.490.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	15 Laporan	8.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	3.199.533.000			PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	100 persen	3.399.971.000	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.097.833.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	25 Orang/bulan	3.328.071.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.200.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	12 Dokumen	70.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	1 Laporan	1.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 Persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	100 persen	9.500.000	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	2 Paket	9.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 Persen	2.805.474.000			PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	100 persen	2.710.411.000	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.131.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	4 Paket	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	173.226.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	5 Paket	255.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	13.200.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	4 Paket	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	702.659.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	4 Paket	627.911.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	33.027.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	4 Paket	142.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	25.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	2 Dokumen	35.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	293.650.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	12 Laporan	1.544.781.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	450 Laporan	1.300.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 Persen	1.475.721.000			PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	100 persen	940.937.000	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.800.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	4 Laporan	1.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	426.150.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.047.771.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	739.137.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	1.060.434.000			PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	100 persen	1.431.640.000	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	541.091.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	23 Unit	911.640.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	401.833.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	2 Unit	400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	143 Unit	143 Unit	117.510.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	143 Unit	120.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen	100 Persen	27.124.805.000			PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	100 persen	20.401.305.000	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	26.185.543.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	35 Orang/Bulan	19.471.305.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	140 Paket	4 Paket	348.790.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	140 Paket	400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	590.472.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	35 Orang	530.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 persen	100 Persen	1.208.210.000			PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat DPRD	100 persen	1.000.000.000	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	488.210.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat DPRD	12 Laporan	400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	720.000.000	-	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat DPRD	12 Paket	600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang disetujui	100 Persen	100 Persen	26.958.639.000							100 Persen	28.894.990.000	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100 persen	100 persen	6.829.788.000			PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat DPRD	100 persen	8.300.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	3.451.456.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	3.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	11 Dokumen	12 Dokumen	3.378.332.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Sekretariat DPRD	11 Dokumen	5.300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	persentase pembahasan kebijakan anggaran	100,00persen	100 persen	108.358.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat	100,00persen	409.197.000	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	47.944.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat	2 Dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	47.994.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat	2 Dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.420.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat	1 Dokumen	109.197.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD	100,00persen	100 Persen	3.423.176.000			PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	100,00persen	3.165.557.000	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	6 Dokumen	2.157.900.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	4 Dokumen	2.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dokumen	10 Dokumen	142.350.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	20 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	140.107.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	1 Dokumen	65.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	9 Dokumen	18 Dokumen	982.819.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	9 Dokumen	800.557.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 persen	100 Persen	1.569.718.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat	100 persen	1.700.000.000	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan	12 Laporan	127.498.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat	4 Laporan	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	1.442.220.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat	3 Dokumen	1.400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 persen	100 Persen	15.027.599.000			PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	100 persen	15.320.236.000	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen	12 Dokumen	15.027.599.000	Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	SEKRETARIAT DPRD	4 Dokumen	15.320.236.000	SEKRETARIAT DPRD
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah				7.123.425.000								9.229.966.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.123.425.000								9.229.966.000	
5.01	PERENCANAAN				6.098.187.000								8.637.566.000	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.306.682.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	6.725.961.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah												
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	14.916.000			PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	100 persen	320.211.000	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	2 Dokumen	1.972.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.716.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	1.394.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.630.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75 Laporan	15 Laporan	11.550.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	15 Laporan	315.865.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	4.585.175.000			PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	100 persen	5.827.228.000	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.547.883.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	31 Orang/bulan	5.784.450.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	36.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	12 Dokumen	41.321.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1.292.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	1 Laporan	1.457.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	100 persen	8.639.000	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	1 Paket	8.639.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	420.952.000			PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	100 persen	332.253.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	2.120.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	4 Paket	1.359.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	70.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	4 Paket	59.254.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	2.580.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	4 Paket	2.717.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	40.463.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	4 Paket	48.920.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	13 Paket	15.750.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	2 Paket	13.589.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	1 Dokumen	2.580.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.582.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1625 Laporan	350 Laporan	287.459.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	325 Laporan	203.832.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	168.421.000			PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	100 persen	157.932.000	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	4 Laporan	990.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	4 Laporan	1.363.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	4 Laporan	75.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	4 Laporan	67.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	92.431.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	12 Laporan	89.569.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	112.218.000			PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	100 persen	79.698.000	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit	15 Unit	92.648.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	15 Unit	59.238.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	205 Unit	41 Unit	19.570.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Bapperida Kota Pekalongan	41 Unit	20.460.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	100 persen	365.155.000							100 persen	1.119.483.000	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100.00persen	100 persen	300.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100.00persen	997.062.000	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	28 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000	Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	5 Dokumen	997.062.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen	100 persen	20.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	109.690.000	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	1 Dokumen	109.690.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	45.155.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	12.731.000	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	20 Laporan	4 Laporan	45.155.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	4 Laporan	12.731.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	100 persen	426.350.000							100 persen	792.122.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	206.660.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	216.705.000	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	1 Laporan	14.965.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	1 Laporan	8.727.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	6 Laporan	1 Laporan	88.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	1 Laporan	76.798.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	2 Laporan	14.965.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	2 Laporan	26.181.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	1 Laporan	88.230.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	2 Laporan	104.999.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kegiatan Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen	100 persen	47.530.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	166.220.000	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	1 Laporan	47.530.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	1 Laporan	166.220.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	100 persen	172.160.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	100 persen	409.197.000	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10 Laporan	2 Laporan	136.660.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	2 Laporan	200.052.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Laporan	1 Laporan	35.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kota Pekalongan	1 Laporan	209.145.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.025.238.000								592.400.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	66,67 persen	66,67 persen	1.025.238.000							66,67 persen	592.400.000	
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Persentase pelaksanaan kegiatan Riset dan Koordinasi Inovasi	100 persen	100 persen	1.025.238.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalonga	100 persen	592.400.000	
5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	7 Laporan	2 Laporan	500.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalonga	2 Laporan	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	25 Laporan	5 Laporan	175.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalonga	5 Laporan	175.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	5 Laporan	1 Laporan	8.400.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalonga	1 Laporan	8.400.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	10 Kegiatan	2 Kegiatan	115.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalonga	2 Kegiatan	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	10 Laporan	2 Laporan	164.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalonga	2 Laporan	164.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.05.03.2.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	5 Laporan	1 Laporan	62.838.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalonga	1 Laporan	65.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah				23.820.158.000								23.868.058.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				23.820.158.000								23.868.058.000	
5.02	KEUANGAN				23.820.158.000								23.868.058.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	16.628.394.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	14.927.384.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah												
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	15.513.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	18.150.000	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	2 Dokumen	3.176.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	2 Dokumen	4.700.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2.337.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.250.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75 Laporan	15 Laporan	10.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	15 Laporan	11.200.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	13.975.813.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	13.167.565.000	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	13.852.247.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	56 Orang/bulan	13.030.315.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	121.400.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	12 Dokumen	135.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	2.166.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	1 Laporan	2.250.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 Persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	9.500.000	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	2 Paket	5.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	1 Paket	9.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 Persen	662.038.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	754.935.000	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	20 Paket	4 Paket	7.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	4 Paket	7.500.000	BADAN PENDAPATAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Bangunan Kantor yang Disediakan												KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	192.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	4 Paket	241.935.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	13.995.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	4 Paket	18.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	113.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	4 Paket	110.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	52 Paket	2 Paket	36.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	13 Paket	50.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Laporan	250 Laporan	297.268.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	200 Laporan	325.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen	734.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	-	
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	734.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	1 Unit	-	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	828.816.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	725.464.000	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	4 Laporan	3.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	4 Laporan	3.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	514.816.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	12 Laporan	506.400.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	311.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	12 Laporan	216.064.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	407.214.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	100 persen	251.770.000	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	185 Unit	37 Unit	151.214.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	37 Unit	136.770.000	BADAN PENDAPATAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	200.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	1 Unit	75.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	350 Unit	70 Unit	56.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan	70 Unit	40.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	100 persen	100 persen	4.976.045.000							100 persen	6.095.342.000	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan dokumen KUA PPAS; Persentase Ketersediaan Dokumen Perda dan Perwal APBD ; dan Persentase Ketersedian Dokumen Kebijakan Anggaran.	100 persen	100 persen	903.596.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	100 persen	934.119.000	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	15.451.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	2 Dokumen	35.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	15.451.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	2 Dokumen	35.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	10 Dokumen	2 Dokumen	21.518.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	2 Dokumen	62.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	736.628.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	2 Dokumen	631.182.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	75.548.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	2 Dokumen	144.937.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	2 Dokumen	39.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	2 Dokumen	26.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan dan pencairan SP2D atas pengajuan SPM terverifikasi dari OPD; Persentase Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK; dan Persentase Verifikasi SPM	100 persen	100 persen	293.609.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	100 persen	262.900.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	35000 Dokumen	7000 Dokumen	211.900.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	7000 Dokumen	87.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	120 Dokumen	24 Dokumen	7.091.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	24 Dokumen	23.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	240 Dokumen	48 Dokumen	8.856.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	48 Dokumen	25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10 Laporan	2 Laporan	39.830.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	2 Laporan	70.900.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	1 Dokumen	8.890.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	1 Dokumen	25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	200 Orang	17.042.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	150 Orang	32.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan raperda dan raperwal pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu; dan Persentase ketersediaan laporan penerimaan dan pengeluaran yang tepat waktu	100 persen	100 persen	278.840.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	100 persen	398.323.000	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	20 Dokumen	4 Dokumen	26.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan	4 Dokumen	59.000.000	BADAN PENDAPATAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban									Unit Kerja se-Kota Pekalongan			KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	65 Laporan	13 Laporan	5.840.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	13 Laporan	8.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	35 Laporan	7 Laporan	60.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	7 Laporan	95.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	2 Dokumen	90.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	60 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	12 Dokumen	10.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	1 Dokumen	20.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	99.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	120 Orang	116.323.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Bansos tidak terencana	100 persen	100 persen	3.500.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen	4.500.000.000	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	60 Laporan	12 Laporan	3.500.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Laporan	4.500.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	794.650.000							100 persen	1.212.565.000	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Aset Tetap dan Persediaan semua OPD; dan Persentase Ketersediaan Laporan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	794.650.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	100 persen	1.212.565.000	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	58.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan	2 Dokumen	55.000.000	BADAN PENDAPATAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											Unit Kerja se-Kota Pekalongan			KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	22.390.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	4 Dokumen	30.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	54.860.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	12 Laporan	165.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	2 Laporan	47.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	2 Laporan	65.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	151.400.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	2 Dokumen	325.480.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	405 Laporan	81 Laporan	461.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan	81 Laporan	572.085.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen potensi pendapatan asli daerah; dan Persentase Realisasi PAD Persentase Realisasi PAD	100 persen 100 persen	100 persen 100 Persen	1.421.069.000							100 persen 100 persen	1.632.767.000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase jumlah tagihan yang dibayar Persentase ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola BPKAD dan pengajuan keberatan yang diproses Persentase pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah Persentase Pemutakhiran database pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola BPKAD; Persentase ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola BPKAD dan pengajuan keberatan yang diproses; Persentase jumlah tagihan yang dibayar; Persentase pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah; dan IUP : Rasio Pajak terhadap PDRB ADHB	43,91Persen	10,69 persen 100 persen 100 persen 44,15 persen	1.421.069.000			PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	43,90Persen	1.632.767.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	16.200.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	1 Dokumen	25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20 Laporan	12 Laporan	66.261.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	4 Laporan	163.040.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	60 Laporan	12 Laporan	118.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	12 Laporan	30.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60 Laporan	12 Laporan	49.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	12 Laporan	59.837.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	15000 Obyek Pajak	6000 Obyek Pajak	78.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	3000 Obyek Pajak	176.550.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	575600 Dokumen	115000 Dokumen	207.400.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	115200 Dokumen	300.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	72000 Layanan	14400 Layanan	339.758.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	14400 Layanan	396.077.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12500 Dokumen	2500 Dokumen	20.450.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	2500 Dokumen	67.632.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	23500 Dokumen	3500 Dokumen	426.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	5000 Dokumen	227.681.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	760 Dokumen	200 Dokumen	72.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	200 Dokumen	159.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan	2 Laporan	27.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	2 Laporan	27.450.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				6.348.898.000								8.034.244.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.348.898.000								8.034.244.000	
5.03	KEPEGAWAIAN				5.364.558.000								6.324.244.000	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	4.484.502.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.156.664.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah												
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	24.155.000			PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	100 persen	28.627.000	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	1.740.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.780.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2.460.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.657.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75 Laporan	15 Laporan	19.955.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	15 Laporan	21.190.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	3.795.959.000			PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	100 persen	4.303.533.000	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.760.019.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	28 Orang/bulan	4.257.597.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	12 Dokumen	44.286.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1.140.000	Pekatongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	1 Laporan	1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekatongan	100 persen	9.500.000	
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekatongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	1 Paket	9.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 Persen	187.894.800			PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	100 persen	218.000.000	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	1.194.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Paket	2.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	20.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Paket	32.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	1.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Paket	2.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	35.370.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Paket	39.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	65 Paket	13 Paket	8.000.800	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	13 Paket	8.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	120.830.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan		132.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	401.002.000			PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	100 persen	432.004.000	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	4 Laporan	1.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Laporan	2.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	200.004.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	12 Laporan	200.004.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	199.998.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	12 Laporan	230.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	70.491.200			PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	100 persen	165.000.000	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	47.161.200	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	13 Unit	52.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	14.200.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	2 Unit	103.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	9.130.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	BKPSDM Kota Pekalongan	10 Unit	10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	70 persen	70 persen	880.056.000							70 persen	1.167.580.000	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ketersediaan data ASN	100 persen	100 persen	417.156.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	100 persen	435.000.000	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	1 Dokumen	300.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	60 Dokumen	12 Dokumen	117.156.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	12 Dokumen	135.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ketersediaan data talent pool atau pemetaan talenta ASN	80Persen	85 persen	278.500.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	85Persen	430.210.000	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	199.376.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	1 Dokumen	360.950.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	30 Dokumen	6 Dokumen	35.081.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	6 Dokumen	36.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	44.043.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	1 Dokumen	32.610.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang berkembang kompetensinya	100 persen	100 persen	79.400.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	100 persen	197.870.000	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	1 Dokumen	118.970.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4 Orang	4 Orang	29.400.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	4 Orang	78.900.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tingkat Disiplin ASN	100 persen	100 Persen	105.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	100 persen	104.500.000	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	650 Orang	130 Orang	12.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	130 Orang	13.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	1 Orang	93.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	1 Orang	91.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				984.340.000								1.710.000.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN berkembang kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional	52 persen	52 persen	984.340.000							52 persen	1.710.000.000	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN berkembang kompetensi teknis	100 persen	100 persen	589.340.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	100 persen	860.000.000	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1085 Orang	210 Orang	589.340.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	230 Orang	860.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional,kepemimpinan dan prajabatan	71Persen	7 persen	395.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	23Persen	850.000.000	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15 Laporan	3 Laporan	395.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Kota Pekalongan	3 Laporan	850.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Inspektorat Daerah				16.370.443.000								13.081.689.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				16.370.443.000								13.081.689.000	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				16.370.443.000								13.081.689.000	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	15.570.443.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	12.478.948.000	
6.01.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	150.457.000			PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	12.730.000	
6.01.01.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6 Dokumen	37.030.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	3 Dokumen	1.930.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.435.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.300.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	22 Laporan	111.992.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	15 Laporan	9.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	6.416.943.000			PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	5.074.828.000	
6.01.01.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.370.443.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	36 Orang/bulan	5.040.328.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	12 Dokumen	33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	1 Laporan	1.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 Persen	765.500.000			PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	8.639.000	
6.01.01.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	9.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	1 Paket	1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26 Dokumen	26 Dokumen	6.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	26 Dokumen	1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	38 Orang	750.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	36 Orang	6.639.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 Persen	742.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	204.416.000	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	4 Paket	2.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	407.200.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	4 Paket	40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	4 Paket	7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	55.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	4 Paket	40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	2 Paket	6.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.300.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.700.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	250.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	90 Laporan	106.216.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	6.742.427.000			PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	100persen	7.000.000.000	
6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	6.742.427.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	1 Unit	7.000.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	414.500.000			PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	60.335.000	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	3.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan		3.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	366.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan		34.835.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	45.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan		22.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	338.616.000			PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	100 persen	118.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	16 Unit	144.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	17 Unit	70.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	144.616.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	2 Unit	15.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	50 Unit	50.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	70 Unit	33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selesai ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	300.000.000							100 persen	73.123.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	85persen 85persen 85persen	100 persen	230.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	85persen 85persen 85persen	56.755.000	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	97 Laporan	17 Laporan	50.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	97 Laporan	12.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	42 Laporan	118 Laporan	50.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	42 Laporan	12.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	71 Laporan	98 Laporan	50.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	71 Laporan	12.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	97 Laporan	110 Laporan	50.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	97 Laporan	11.755.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	30.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	3 Kesepakatan	9.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	85persen	100 persen	70.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	85persen	16.368.000	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	2 Laporan	15.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	3 Laporan	8.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	6 Laporan	55.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	12 Laporan	8.368.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD)	96,05 indeks	96,05 indeks	500.000.000							96,05 indeks	529.618.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	75persen 97.00indeks	100 persen	500.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	75persen 96.50indeks	529.618.000	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	150.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	30 perangkat daerah	250.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21 perangkat daerah	10 perangkat daerah	100.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	21 perangkat daerah	15.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	19 Kegiatan	15 Kegiatan	100.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	19 Kegiatan	139.618.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	150.000.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	3 perangkat daerah	125.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	Kecamatan Pekalongan Utara				10.054.702.000								9.921.610.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				10.054.702.000								9.921.610.000	
7.01	KECAMATAN				10.054.702.000								9.921.610.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	9.695.550.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	9.563.164.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	112.396.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	112.396.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.899.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.899.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.927.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.927.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	108.570.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	15 Laporan	108.570.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	8.173.770.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	7.855.245.000	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	70 orang Orang/bulan	7.976.084.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PPPK	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	66 Orang/bulan	7.657.559.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	195.900.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	12 Dokumen	195.900.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.786.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	1 Laporan	1.786.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	3.825.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	7.300.000	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	3.825.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	2 Paket	7.300.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	267.523.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	307.252.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.175.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	4 Paket	6.450.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	86.000.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	4 Paket	99.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.140.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	4 Paket	5.140.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	131.808.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	4 Paket	139.362.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	18.400.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	13 Paket	30.300.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	1 Dokumen	12.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	12 Laporan	15.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	891.383.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	894.053.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	4 Laporan	7.670.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	140.184.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	12 Laporan	140.184.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	746.199.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	12 Laporan	746.199.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	246.653.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	386.918.000	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	37 Unit	149.803.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	37 Unit	149.803.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	64.000.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	12 Unit	192.115.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	75 Unit	32.850.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	75 Unit	45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen	100 persen	9.700.000							100 persen	13.590.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	6.964.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan	100 persen	9.130.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	6.964.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan	2 Laporan	9.130.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	2.736.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan	100 persen	4.460.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	2.736.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan	4 Laporan	4.460.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan /Kelurahan di wilayah Utara	100 persen	100 persen	82.132.000							100 persen	79.156.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	37.306.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan, dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	100 persen	37.306.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	37.306.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan, LKK, dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	4 Lembaga Kemasyarakatan	37.306.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	44.826.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan	100 persen	41.850.000	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	440 Keluarga	400 Keluarga	44.826.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan	420 Keluarga	41.850.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen	100 persen	262.350.000							100 persen	260.730.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen	262.350.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan	100 persen	260.730.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	262.350.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan	11 Laporan	260.730.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100,00 persen	100,00 persen	4.970.000							100,00 persen	4.970.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	4.970.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	100 persen	4.970.000	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.970.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DBH	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	1 Dokumen	4.970.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	Kelurahan Kandang Panjang				737.018.000								453.846.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				737.018.000								453.846.000	
7.01	KECAMATAN				737.018.000								453.846.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	737.018.000							100 persen	453.846.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen 100 persen	100 persen	737.018.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 persen 100 persen	453.846.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen									100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN KANDANG PANJANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	11 Unit	332.256.000	Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	3 Unit	131.882.000	KELURAHAN KANDANG PANJANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	362.262.000	Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	9 Pokmas / Ormas	309.464.000	KELURAHAN KANDANG PANJANG
	Kelurahan Panjang Wetan				630.123.000								570.542.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				630.123.000								570.542.000	
7.01	KECAMATAN				630.123.000								570.542.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	630.123.000							100 persen	570.542.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen	630.123.000			PN-07	PP-01	PK-01	masyarakat	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	570.542.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	masyarakat		12.500.000	KELURAHAN PANJANG WETAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	8 Unit	186.295.000	Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	masyarakat	3 Unit	224.244.000	KELURAHAN PANJANG WETAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	401.328.000	-	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	masyarakat	9 Pokmas / Ormas	333.798.000	KELURAHAN PANJANG WETAN
	Kelurahan Degayu				740.913.000								500.272.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				740.913.000								500.272.000	
7.01	KECAMATAN				740.913.000								500.272.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	740.913.000							100 persen	500.272.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen	740.913.000			PN-07	PP-01	PK-01	LKK dan Masyarakat Kota Pekalongan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	500.272.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Utara, Degayu	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	LKK dan Masyarakat Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN DEGAYU
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	420.619.000	Pekalongan Utara, Degayu	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	LKK dan Masyarakat Kota Pekalongan	3 Unit	243.886.000	KELURAHAN DEGAYU
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	277.794.000	Pekalongan Utara, Degayu	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	LKK dan Masyarakat Kota Pekalongan	9 Pokmas / Ormas	243.886.000	KELURAHAN DEGAYU
	Kelurahan Bandengan				410.356.000								347.722.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				410.356.000								347.722.000	
7.01	KECAMATAN				410.356.000								347.722.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 persen	100 persen	410.356.000							100 persen	347.722.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen	410.356.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan Bandengan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	347.722.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Utara, Bandengan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan Bandengan		12.500.000	KELURAHAN BANDENGAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2 Unit	118.684.000	Pekalongan Utara, Bandengan	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan Bandengan	3 Unit	124.244.000	KELURAHAN BANDENGAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	249.172.000	Pekalongan Utara, Bandengan	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan Bandengan	9 Pokmas / Ormas	210.978.000	KELURAHAN BANDENGAN
	Kelurahan Krapyak				898.149.000								792.226.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				898.149.000								792.226.000	
7.01	KECAMATAN				898.149.000								792.226.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	898.149.000							100 persen	792.226.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen	898.149.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	792.226.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Utara, Krapyak	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN KRAPYAK
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	6 Unit	301.197.000	Pekalongan Utara, Krapyak	BPHTB, DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK	3 Unit	304.244.000	KELURAHAN KRAPYAK
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	554.452.000	Pekalongan Utara, Krapyak	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK	9 Pokmas / Ormas	475.482.000	KELURAHAN KRAPYAK
	Kelurahan Padukuhan Kraton				648.955.000								513.155.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				648.955.000								513.155.000	
7.01	KECAMATAN				648.955.000								513.155.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 persen	100 persen	648.955.000							100 persen	513.155.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen	648.955.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	513.155.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	6 Unit	219.546.000	Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	3 Unit	169.546.000	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	386.909.000	Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	9 Pokmas / Ormas	331.109.000	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
	Kelurahan Panjang Baru				502.172.000								502.172.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	UNSUR KEWILAYAHAN				502.172.000								502.172.000	
7.01	KECAMATAN				502.172.000								502.172.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	502.172.000							100 persen	502.172.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen	502.172.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	502.172.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Utara, Panjang Baru	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK		42.500.000	KELURAHAN PANJANG BARU
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2 Unit	123.586.000	Pekalongan Utara, Panjang Baru	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK	3 Unit	123.586.000	KELURAHAN PANJANG BARU
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	336.086.000	Pekalongan Utara, Panjang Baru	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK	9 Pokmas / Ormas	336.086.000	KELURAHAN PANJANG BARU
	Kecamatan Pekalongan Selatan				9.693.012.000								9.078.523.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				9.693.012.000								9.078.523.000	
7.01	KECAMATAN				9.693.012.000								9.078.523.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	9.352.028.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	8.732.064.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	103.442.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	105.510.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	3.828.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 Dokumen	3.904.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.804.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 Dokumen	1.840.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	97.810.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	15 Laporan	99.766.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	7.916.703.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	7.203.698.000	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	7.742.531.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	62 Orang/bulan	7.029.493.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	172.500.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 Dokumen	172.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.672.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 Laporan	1.705.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 Persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	5.000.000	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 Paket	5.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 Persen	234.177.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	287.007.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.900.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 Paket	3.978.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	69.925.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	BPHTB, DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 Paket	120.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	735.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 Paket	749.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	113.117.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan		114.280.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	21.000.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	13 Paket	21.420.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 Dokumen	11.580.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	5 Laporan	15.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	897.124.000			PN-07	PP-01	PK-01	-	100 persen	892.464.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	3.840.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	4 Laporan	6.400.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	135.020.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	12 Laporan	135.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	758.264.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	BPHTB, DAU	PN-07	PP-01	PK-01	-	12 Laporan	751.064.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	195.582.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	238.385.000	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit	38 Unit	129.082.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	38 Unit	147.385.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	7 Unit	37.500.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	9 Unit	62.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	90 Unit	29.000.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	90 Unit	29.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100 Persen	100 Persen	8.015.000							100 Persen	8.174.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	100 Persen	4.139.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	4.221.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	4.139.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 Laporan	4.221.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 Persen	3.876.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	3.953.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	3.876.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	4 Laporan	3.953.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 Persen	100 Persen	88.050.000							100 Persen	88.383.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen	100 Persen	39.650.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	40.443.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	39.650.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	40.443.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	48.400.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	47.940.000	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	370 Keluarga	390 Keluarga	48.400.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	370 Keluarga	47.940.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 Persen	100 Persen	239.727.000							100 Persen	244.521.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 Persen	239.727.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	244.521.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	239.727.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	9 Laporan	244.521.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100 persen	100 persen	5.192.000							100 persen	5.381.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	5.192.000			PN-07	PP-01	PK-01	Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 persen	5.381.000	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.192.000	Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	1 Dokumen	5.381.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	Kelurahan Jenggot				572.719.000								503.719.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				572.719.000								503.719.000	
7.01	KECAMATAN				572.719.000								503.719.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	572.719.000							100 persen	503.719.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	572.719.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK	100 persen	503.719.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Selatan, Jenggot	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN JENGGOT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	197.812.000	Pekalongan Selatan, Jenggot	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK		197.812.000	KELURAHAN JENGGOT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	332.407.000	Pekalongan Selatan, Jenggot	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK		293.407.000	KELURAHAN JENGGOT
	Kelurahan Buaran Kradenan				486.999.000								565.157.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				486.999.000								565.157.000	
7.01	KECAMATAN				486.999.000								565.157.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	486.999.000							100 persen	565.157.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	486.999.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 persen	565.157.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN BUARAN KRADENAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	122.554.000	Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		275.144.000	KELURAHAN BUARAN KRADENAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	321.945.000	Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		277.513.000	KELURAHAN BUARAN KRADENAN
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo				455.358.000								347.693.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				455.358.000								347.693.000	
7.01	KECAMATAN				455.358.000								347.693.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	455.358.000							100 persen	347.693.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	455.358.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 persen	347.693.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	169.458.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		124.244.000	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	243.400.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		210.949.000	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO
	Kelurahan Kuripan Yosorejo				486.720.000								407.772.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				486.720.000								407.772.000	
7.01	KECAMATAN				486.720.000								407.772.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	486.720.000							100 persen	407.772.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	486.720.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 persen	407.772.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	133.188.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		135.004.000	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	311.032.000	Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		260.268.000	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO
	Kelurahan Soko Duwet				484.713.000								381.336.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				484.713.000								381.336.000	
7.01	KECAMATAN				484.713.000								381.336.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	484.713.000							100 persen	381.336.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	484.713.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 persen	381.336.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN SOKO DUWET
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4 Unit	170.877.000	Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		131.882.000	KELURAHAN SOKO DUWET

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	271.336.000	Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		236.954.000	KELURAHAN SOKO DUWET
	Kelurahan Banyurip				491.152.000								426.111.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				491.152.000								426.111.000	
7.01	KECAMATAN				491.152.000								426.111.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	491.152.000							100 persen	426.111.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	491.152.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 persen	426.111.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Selatan, Banyurip	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN BANYURIP
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 Unit	122.941.000	Pekalongan Selatan, Banyurip	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		131.882.000	KELURAHAN BANYURIP
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	325.711.000	Pekalongan Selatan, Banyurip	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		281.729.000	KELURAHAN BANYURIP
	Kecamatan Pekalongan Barat				10.748.638.000								9.929.455.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				10.748.638.000								9.929.455.000	
7.01	KECAMATAN				10.748.638.000								9.929.455.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	10.493.185.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	9.674.134.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	114.586.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	115.659.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.089.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	2 Dokumen	4.089.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.927.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	108.570.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	15 Laporan	108.570.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	8.860.771.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	8.045.711.000	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	8.663.085.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	67 Orang/bulan	7.846.811.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	195.900.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	12 Dokumen	195.900.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.786.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	5.000.000	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	1 Paket	5.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	231.211.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	224.947.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.280.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	4 Paket	6.280.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	72.261.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	4 Paket	27.309.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	840.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	4 Paket	3.660.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	120.324.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	4 Paket	142.006.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.796.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	2 Paket	27.692.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.710.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	12 Laporan	15.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	999.659.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	1.000.859.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	7.080.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	4 Laporan	7.080.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	117.900.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	12 Laporan	117.900.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	874.679.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	12 Laporan	875.879.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	281.958.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	281.958.000	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	33 Unit	129.108.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	33 Unit	129.108.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	8 Unit	120.000.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	15 Unit	120.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	82 Unit	67 Unit	32.850.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	82 Unit	32.850.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100 persen	100 persen	8.650.000							100 persen	13.590.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 persen	100 Persen	4.830.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	9.130.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	4.830.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	2 Laporan	9.130.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	3.820.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	4.460.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	3.820.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	4 Laporan	4.460.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen	100 persen	83.576.000							100 persen	83.576.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100 persen	100 Persen	39.350.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	39.350.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	39.350.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	4 Lembaga Kemasyarakatan	39.350.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	44.226.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	44.226.000	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	844 Keluarga	824 Keluarga	44.226.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	844 Keluarga	44.226.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	100 persen	100 persen	160.892.000							100 persen	153.185.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	160.892.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	153.185.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	160.892.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	11 Laporan	153.185.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100 persen	100 persen	2.335.000							100 persen	4.970.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	2.335.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	100 persen	4.970.000	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.335.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Barat	1 Dokumen	4.970.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	Kelurahan Medono				557.168.000								464.468.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				557.168.000								464.468.000	
7.01	KECAMATAN				557.168.000								464.468.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	557.168.000							100 persen	464.468.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	557.168.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK	100 persen	464.468.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Barat, Medono	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN MEDONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	141.433.000	Pekalongan Barat, Medono	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK		133.933.000	KELURAHAN MEDONO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas / Ormas	373.235.000	Pekalongan Barat, Medono	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK		318.035.000	KELURAHAN MEDONO
	Kelurahan Podosugih				624.288.000								530.247.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				624.288.000								530.247.000	
7.01	KECAMATAN				624.288.000								530.247.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 persen	100 persen	624.288.000							100 persen	530.247.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	624.288.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 persen	530.247.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN Podosugih
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	318.515.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		242.382.000	KELURAHAN Podosugih
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas / Ormas	263.273.000	Pekalongan Barat, Podosugih	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		275.365.000	KELURAHAN Podosugih
	Kelurahan Tirto				595.463.000								403.876.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				595.463.000								403.876.000	
7.01	KECAMATAN				595.463.000								403.876.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 persen	100 persen	595.463.000							100 persen	403.876.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	595.463.000			PN-07	PP-01	PK-01	kelurahan Tirto	100 persen	403.876.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Barat, Tirto	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	kelurahan Tirto		12.500.000	KELURAHAN TIRTO
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		46 Unit	258.393.000	Pekalongan Barat, Tirto	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	kelurahan Tirto		131.882.000	KELURAHAN TIRTO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	294.570.000	Pekalongan Barat, Tirta	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	kelurahan Tirta		259.494.000	KELURAHAN TIRTO
	Kelurahan Sapuro Kebulen				613.399.000								513.869.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				613.399.000								513.869.000	
7.01	KECAMATAN				613.399.000								513.869.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen	100 Persen	613.399.000							100 Persen	513.869.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 Persen	613.399.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan	100 persen	513.869.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN SAPURO KEBULEN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		31 Unit	216.860.000	Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		182.994.000	KELURAHAN SAPURO KEBULEN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	354.039.000	Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		318.375.000	KELURAHAN SAPURO KEBULEN
	Kelurahan Bendan Kergon				745.769.000								705.769.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				745.769.000								705.769.000	
7.01	KECAMATAN				745.769.000								705.769.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	745.769.000							100 persen	705.769.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 Persen	745.769.000			PN-07	PP-01	PK-01	kelurahan dan masyarakat	100 persen	705.769.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	kelurahan dan masyarakat		12.500.000	KELURAHAN BENDAN KERGON
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		12 Unit	244.649.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	kelurahan dan masyarakat		234.649.000	KELURAHAN BENDAN KERGON
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	458.620.000	Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	kelurahan dan masyarakat		458.620.000	KELURAHAN BENDAN KERGON
	Kelurahan Pasirkratonkramat				724.551.000								724.551.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				724.551.000								724.551.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01	KECAMATAN				724.551.000								724.551.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	724.551.000							100 persen	724.551.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	724.551.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK	100 persen	724.551.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK		42.500.000	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	217.138.000	Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	BPHTB, DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK		217.138.000	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	464.913.000	Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat dan LKK		464.913.000	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT
	Kelurahan Pringrejo				764.579.000								564.450.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				764.579.000								564.450.000	
7.01	KECAMATAN				764.579.000								564.450.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	100 %	764.579.000							100 %	564.450.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 Persen	764.579.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan Pringrejo	100 persen	564.450.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Barat, Pringrejo	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan Pringrejo		12.500.000	KELURAHAN PRINGREJO
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 Unit	245.907.000	Pekalongan Barat, Pringrejo	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan Pringrejo		152.994.000	KELURAHAN PRINGREJO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	476.172.000	Pekalongan Barat, Pringrejo	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Kelurahan Pringrejo		398.956.000	KELURAHAN PRINGREJO
	Kecamatan Pekalongan Timur				13.135.085.000								10.133.323.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				13.135.085.000								10.133.323.000	
7.01	KECAMATAN				13.135.085.000								10.133.323.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	12.878.346.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	9.783.605.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah												
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	115.276.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	112.669.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.779.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	2 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.927.000	-	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	2 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	108.570.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	15 Laporan	95.669.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	8.402.989.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	8.132.827.000	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	66 Orang/bulan	8.207.053.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	68 Orang/bulan	8.095.827.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	194.150.000	-	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	12 Dokumen	34.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.786.000	-	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	18.505.000	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	5.000.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	2 Paket	18.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	296.204.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	398.464.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.500.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	4 Paket	10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	69.625.000	Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	4 Paket	131.964.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.500.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	4 Paket	10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	144.759.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	4 Paket	185.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	32.000.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	4 Paket	32.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	16.320.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	2 Dokumen	16.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	12.500.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	7 Laporan	12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	2.500.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	-	
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.500.000.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	1 Unit	-	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	1.289.243.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	904.955.000	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	10.400.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	4 Laporan	10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	151.140.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	12 Laporan	94.408.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.127.703.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	12 Laporan	800.047.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	269.634.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	216.185.000	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	41 Unit	164.774.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	35 Unit	141.185.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	74.500.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	10 Unit	45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95 Unit	120 Unit	30.360.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	95 Unit	30.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100,00 persen	100,00 persen	13.630.000							100,00 persen	40.229.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	9.130.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	9.130.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	9.130.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	2 Laporan	9.130.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	4.500.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	31.099.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	4.500.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	4 Laporan	31.099.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen	100 persen	97.939.000							100 persen	98.570.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	41.220.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat, Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	41.220.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	41.220.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat, Kecamatan Pekalongan Timur	4 Lembaga Kemasyarakatan	41.220.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	56.719.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	57.350.000	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	410 Keluarga	410 Keluarga	56.719.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur	410 Keluarga	57.350.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	100,00 persen	100,00 persen	140.200.000							100,00 persen	204.554.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	140.200.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	204.554.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	11 Laporan	11 Laporan	140.200.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur	11 Laporan	204.554.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100,00 persen	100,00 persen	4.970.000							100,00 persen	6.365.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	4.970.000			PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	100 persen	6.365.000	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.970.000	Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Kecamatan Pekalongan Timur	1 Dokumen	6.365.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	Kelurahan Kauman				724.435.000								509.405.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				724.435.000								509.405.000	
7.01	KECAMATAN				724.435.000								509.405.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 persen	100 persen	724.435.000							100 persen	509.405.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	724.435.000			PN-07	PP-01	PK-01	RT,RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu, PKK, FKSS Poktan, Tagana	100 persen	509.405.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Timur, Kauman	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	RT,RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu, PKK, FKSS Poktan, Tagana		12.500.000	KELURAHAN KAUMAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4 Unit	203.681.000	Pekalongan Timur, Kauman	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	RT,RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu, PKK, FKSS Poktan, Tagana		92.227.000	KELURAHAN KAUMAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	478.254.000	Pekalongan Timur, Kauman	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	RT,RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu, PKK, FKSS Poktan, Tagana		404.678.000	KELURAHAN KAUMAN
	Kelurahan Poncol				680.799.000								459.959.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				680.799.000								459.959.000	
7.01	KECAMATAN				680.799.000								459.959.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	680.799.000							100 Persen	459.959.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	680.799.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Poncol	100 persen	459.959.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Timur, Poncol	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Poncol		12.500.000	KELURAHAN PONCOL
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		9 Unit	249.643.000	Pekalongan Timur, Poncol	DAU, DAU TAMBAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Poncol		132.643.000	KELURAHAN PONCOL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN							
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	388.656.000	Pekalongan Timur, Poncol	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Poncol		314.816.000	KELURAHAN PONCOL
	Kelurahan Klego				528.493.000								411.835.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				528.493.000								411.835.000	
7.01	KECAMATAN				528.493.000								411.835.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	528.493.000							100 persen	411.835.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	528.493.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kelurahan Klego Kota Pekalongan	100 persen	411.835.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	-	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kelurahan Klego Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN KLEGO
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2 Unit	122.528.000	Pekalongan Timur, Klego	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kelurahan Klego Kota Pekalongan		124.244.000	KELURAHAN KLEGO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	363.465.000	Pekalongan Timur, Klego	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kelurahan Klego Kota Pekalongan		275.091.000	KELURAHAN KLEGO
	Kelurahan Gamer				405.572.000								354.222.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				405.572.000								354.222.000	
7.01	KECAMATAN				405.572.000								354.222.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 persen	100 persen	405.572.000							100 persen	354.222.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	405.572.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gamer	100 persen	354.222.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Timur, Gamer	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gamer		12.500.000	KELURAHAN GAMER
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	119.858.000	Pekalongan Timur, Gamer	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gamer		124.244.000	KELURAHAN GAMER
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	243.214.000	Pekalongan Timur, Gamer	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gamer		217.478.000	KELURAHAN GAMER

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kelurahan Noyontaansari				594.700.000								455.287.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				594.700.000								455.287.000	
7.01	KECAMATAN				594.700.000								455.287.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	594.700.000							100 persen	455.287.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	594.700.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Noyontaansari	100 persen	455.287.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 LKK Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Timur, Noyontaansari	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Noyontaansari		12.500.000	KELURAHAN NOYONTAANSARI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 unit Unit	215.973.000	Pekalongan Timur, Noyontaansari	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Noyontaansari		149.244.000	KELURAHAN NOYONTAANSARI
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas / Ormas Pokmas / Ormas	336.227.000	Pekalongan Timur, Noyontaansari	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Noyontaansari		293.543.000	KELURAHAN NOYONTAANSARI
	Kelurahan Setono				760.973.000								465.379.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				760.973.000								465.379.000	
7.01	KECAMATAN				760.973.000								465.379.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	760.973.000							100 persen	465.379.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	760.973.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kelurahan Setono Kota Pekalongan	100 persen	465.379.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Timur, Setono	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kelurahan Setono Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN SETONO
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	300.314.200	Pekalongan Timur, Setono	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kelurahan Setono Kota Pekalongan		131.882.000	KELURAHAN SETONO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	418.158.800	Pekalongan Timur, Setono	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat Kelurahan Setono Kota Pekalongan		320.997.000	KELURAHAN SETONO
	Kelurahan Kalibaros				440.133.000								425.347.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				440.133.000								425.347.000	
7.01	KECAMATAN				440.133.000								425.347.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	440.133.000							100 persen	425.347.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	440.133.000			PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kalibaros	100 persen	425.347.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang		7 Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000	Pekalongan Timur, Kali Baros	DAU, DAU TAMBAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kalibaros		12.500.000	KELURAHAN KALIBAROS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN							
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	114.486.000	Pekalongan Timur, Kali Baros	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kalibaros		138.366.000	KELURAHAN KALIBAROS
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	283.147.000	Pekalongan Timur, Kali Baros	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	PN-07	PP-01	PK-01	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kalibaros		274.481.000	KELURAHAN KALIBAROS
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				6.224.617.000								4.020.117.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				6.224.617.000								4.020.117.000	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.224.617.000								4.020.117.000	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2.873.784.000							100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.964.829.000	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	14.779.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	100 persen	10.912.000	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1.631.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.148.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	12.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	15 Laporan	6.912.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.390.713.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	100 persen	1.748.274.000	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.353.774.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	15 Orang/bulan	1.713.774.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	35.875.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	12 Dokumen	33.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.064.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	1 Laporan	1.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.000.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	100 persen	9.500.000	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	1 Paket	9.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	129.319.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	100 persen	94.413.000	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	4 Paket	3.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	39.189.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	4 Paket	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.650.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	4 Paket	4.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	18.500.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	4 Paket	19.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.060.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	2 Paket	8.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.080.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	1 Dokumen	2.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	59.340.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	40 Laporan	27.113.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	267.360.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	100 persen	61.561.000	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	730.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	4 Laporan	1.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	12 Laporan	29.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	208.730.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	12 Laporan	30.961.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik	100 persen	100 persen	66.613.000			PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	100 persen	40.169.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	48.924.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	10 Unit	24.669.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	9.939.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	1 Unit	8.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	17 Unit	7.750.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-07	PP-01	PK-01	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan	17 Unit	7.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100 persen	100 persen	1.518.386.000							100 persen	755.688.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100 persen	100 persen	1.518.386.000			PN-01	PP-01	PK-08	Masyarakat etnis/suku/agama/orma s/generasi muda	100 persen	755.688.000	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190 Orang	190 Orang	19.560.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-01	PP-01	PK-08	Masyarakat etnis/suku/agama/orma s/generasi muda	190 Orang	26.792.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1340 Orang	1340 Orang	233.900.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-01	PP-01	PK-08	Masyarakat etnis/suku/agama/orma s/generasi muda	1340 Orang	142.056.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamatan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	100 Keluarga	731.340.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-01	PP-01	PK-08	Masyarakat etnis/suku/agama/orma s/generasi muda	100 Keluarga	95.340.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen	533.586.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-01	PP-01	PK-08	Masyarakat etnis/suku/agama/orma s/generasi muda	1 Dokumen	491.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100 persen	100 persen	1.187.320.000							100 persen	859.496.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100 persen	100 persen 100 persen	1.187.320.000			PN-01	PP-01	PK-08	Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	100 persen	859.496.000	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	150 Orang	830.980.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-01	PP-01	PK-08	Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	150 Orang	774.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	180 Orang	180 Orang	356.340.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-01	PP-01	PK-08	Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	180 Orang	84.796.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100.00persen	100,00 persen 100 persen	258.000.000							100.00persen	136.399.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100 persen	100 persen	258.000.000			PN-02	PP-01	PK-08	Organisasi Kemasyarakatan	100 persen	136.399.000	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	250 Orang	258.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Organisasi Kemasyarakatan	150 Orang	136.399.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya persentase pelaksanaan kegiatan perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100.00persen	100,00 persen 100 persen	98.197.000							100.00persen	212.054.000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase pelaksanaan kegiatan perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen	100 persen	98.197.000			PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat etnis/suku/agama/ormas/generasi muda	100 persen	212.054.000	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 Orang	250 Orang	98.197.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat etnis/suku/agama/ormas/generasi muda	250 Orang	212.054.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Kejadian Konflik SARA (IUP)	0 kali	0 kali	288.930.000							0 kali	91.651.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 persen	100 persen	288.930.000			PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat etnis/suku/agama/ormas/generasi muda	100 persen	91.651.000	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	200 Orang	288.930.000	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	PN-02	PP-01	PK-08	Masyarakat etnis/suku/agama/ormas/generasi muda	200 Orang	91.651.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					1.045.375.837.000								1.057.410.024.000	
*)KETERANGAN														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas*)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prioritas Nasional PN-01. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) PN-02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PN-03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi PN-04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas PN-05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri PN-06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PN-07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan PN-08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur														
Prioritas Provinsi PP-01. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PP-02. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan" PP-03. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter"														
Prioritas Kota Pekalongan PK-01. Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital PK-02. Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius PK-03. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan/ pembinaan/ pengembangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan PK-04. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas PK-05. Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender PK-06. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi PK-07. Penguatan SDM pengelola dan pelaku budaya PK-08. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan PK-09. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu														

Sumber: Bapperida Kota Pekalongan, 2025

5.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan dan pagu indikatif belanja daerah untuk tahun 2026 disajikan dalam Tabel V-3 berikut.

Tabel V-3
Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	298.540.254.000
4.1.01	Pajak Daerah	141.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	145.046.320.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.226.934.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.267.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	733.835.583.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	681.822.828.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.012.755.000
	Jumlah Pendapatan	1.032.375.837.000
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	949.291.042.924
5.1.01	Belanja Pegawai	435.576.508.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.141.091.924
5.1.05	Belanja Hibah	32.427.343.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.146.100.000
5.2	BELANJA MODAL	92.597.794.076
5.2.01	Belanja Modal Tanah	703.380.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.895.939.934
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.423.795.710
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.361.019.432
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	166.788.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	46.871.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.487.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.487.000.000
	Jumlah Belanja	1.045.375.837.000
	Total Surplus/(Defisit)	-13.000.000.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000
	Pembiayaan Netto	13.000.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

Sumber: Bapperida, B{KAD Kota Pekalongan, 2025

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2026, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel VI-1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2026
1	2	3	4
1	Nilai SAKIP Kota	Nilai	75,81
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	indeks	91,39
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP) (IUP)	indeks	4,59
4	Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP)	nilai	82,25
5	Opini BPK atas laporan keuangan	kategori	WTP
6	Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	tahun	75,08
7	Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun	tahun	9,74
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00
9	Nilai realisasi investasi tahun N	Rp Milyar	170,68
10	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	persen	5,00
11	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan	persen	3,20
12	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	persen	10,00
13	Persentase populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	persen	7,22
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP)	persen	4,91-4,40
15	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,2 - 0,18
16	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 (diolah), 2025

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan dalam Tabel VI-2 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD Kota Pekalongan.

Tabel VI-2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2026

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA 2026	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IUP)	indeks	64,16	IUP	DLH
	- Timbulan Sampah Terolah di fasilitas pengolahan sampah (IUP)	persen	46,75	IUP	DLH
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (IUP)	persen	29.040,00	IUP	DPUPR
B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	- Tingkat Kemiskinan (IUP)	persen	6,50-6,14	Indikator Tujuan Kota / IUP	Dinsos P2KB
	- Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,70 - 6,20	Indikator Tujuan Kota / IUP	Kota
	- Indeks Gini	indeks	0,32 - 0,3	IUP	Bapperida
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP)	persen	4,91-4,40	IUP/IKU Kota	Bapperida
	- Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	indeks	64,81 - 66,33	IUP	Dinsos P2KB
	- Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,2 - 0,18	IKU Kota	Kota
	- Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	tahun	75,08	IUP/IKU Kota	Dinkes
	- Jumlah Kasus Kematian Ibu (IUP)	kasus	5,00	IUP	Dinkes
	- Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (IUP)	persen	17,58	IUP	Dinkes
	- Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (treatment coverage) (IUP)	persen	90,55	IUP	Dinkes
	- Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate) (IUP)	persen	90,51	IUP	Dinkes
	- Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (IUP)	persen	98,54	IUP	Dinkes
	- Indeks Keluarga Sehat (IUP)	indeks	0,39	IUP	Dinkes
	- Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (IUP)	persen	4,70	IUP	Dinperpa
	- Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (IUP)	indeks	80,50	IUP	Dinperpa
	- Harapan Lama Sekolah (IUP)	tahun	13,20	IUP	Dindik
	- Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun	tahun	9,74	IUP/IKU Kota	Dindik
	- Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (IUP)	persen	93,15	IUP	Dindik
	- Literasi Membaca SD/Sederajat (IUP)	persen	73,30	IUP	Dindik
	- Literasi Membaca SMP/Sederajat (IUP)	persen	80,10	IUP	Dindik
	- Numerasi SD/Sederajat (IUP)	persen	72,20	IUP	Dindik
	- Numerasi SMP/Sederajat (IUP)	persen	77,86	IUP	Dindik
	- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	IKU Kota	Kota
	- Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (IUP)	persen	19,00	IUP	Dinparbudpora
	- Jumlah pengunjung tempat bersejarah (IUP)	orang	56.864	IUP	Dinparbudpora
	- Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (IUP)	persen	21,62	IUP	Dinparbudpora
	- Persentase populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	persen	7,22	IKU Kota	Kota
	- Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	IKU Kota	Kota
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH					

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA 2026	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	- Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,21	Indikator Tujuan Kota / IUP	Bapperida
	- Kapabilitas Inovasi (IUP)	angka	2,93 - 3,06	IUP	Bapperida
	- Indeks Daya Saing Daerah (IUP)	indeks	3,63 - 3,73	IUP	Bapperida
	- Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP)	persen	3,11	IUP	Dindagkop-UKM
	- Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (IUP)	persen	1,88	IUP	Dindagkop-UKM
	- Return on Aset (ROA) BUMD (IUP)	persen	0,30	IUP	Bagian Perekonomian
	- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (IUP)	persen	40,73	IUP	Dinperinaker
	- Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	orang	307,50	IUP	Dinparbudpora
	- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (IUP)	Juta Rupiah	55,75 - 58,15	IUP	Bapperida
	- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (IUP)	persen	100,00	IUP	Dinkominfo
	- Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (IUP)	persen	22,26 - 22,86	IUP	Bagian Perekonomian
	- Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (IUP)	persen	37,75	IUP	Bagian Perekonomian
	- Nilai realisasi investasi tahun N	Rp Milyar	170,68	IKU Kota	Kota
	- Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP)	persen	79,26	IUP	DPUPR
	- Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten / kota (IUP)	persen	44,20	IUP	Dinhub
	- Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (IUP)	persen	44,20	IUP	Dinperkim
	- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	persen	76,87	IUP	DPUPR
	- Disparitas Harga (IUP)	persen	1,00	IUP	Bagian Perekonomian
	- Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (IUP)	persen	0,44	IUP	BPKAD
	- Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB (IUP)	persen	28,24	IUP/Indikator Program	Bagian Perekonomian
	- Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB (IUP)	persen	0,44	IUP/Indikator Program	Bagian Perekonomian
	- Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	persen	77,00	IKU Kota	Kota
	- Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan	persen	100,00	IKU Kota	Kota
	- Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	persen	100,00	IKU Kota	Kota
D. ASPEK PELAYANAN UMUM					
	- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (IUP)	indeks	3,87	IUP	Dinkominfo
	- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	94,32	Indikator Tujuan Kota / IUP	Bagian Organisasi
	- Nilai SAKIP Kota	Nilai	75,81	IKU Kota	Kota
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	indeks	91,39	IKU Kota	Kota
	- Indeks Pelayanan Publik (IPP) (IUP)	indeks	4,59	IKU Kota	Kota
	- Indeks Integritas Nasional (IIN) (IUP)	nilai	82,25	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA 2026	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	- Indeks Reformasi Hukum (IUP)	indeks	96,76	Indikator Tujuan Kota / IUP	Bagian Hukum
	- Opini BPK atas laporan keuangan	kategori	WTP	IKU Kota	Kota
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	- Indeks SPM Pendidikan	indeks	100,00	IKU Renstra	Dindik
	- Persentase satuan pendidikan yang memiliki dan mengimplementasikan dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) untuk pengembangan karakter dan keagamaan	persen	55,00	IKU Renstra	Dindik
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	78,42	IKU Renstra	Dindik
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	98,51	IKK	Dindik
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	100,00	IKK	Dindik
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	99,25	IKK	Dindik
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	56,40	IKK	Dindik
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	- Indeks SPM Kesehatan	indeks	98,10	IKU Renstra	Dinkes
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	83,52	IKU Renstra	Dinkes
1.b.1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	rasio	0,25	IKK	Dinkes
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	100,00	IKK	Dinkes
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	100,00	IKK	Dinkes
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	100,00	IKK	Dinkes
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	100,00	IKK	Dinkes
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100,00	IKK	Dinkes
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100,00	IKK	Dinkes
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	91,25	IKK	Dinkes
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	99,64	IKK	Dinkes
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	82,68	IKK	Dinkes
1.b.11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100,00	IKK	Dinkes

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA 2026	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	1.b.12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100,00	IKK	Dinkes
	1.b.13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100,00	IKK	Dinkes
	1.b.14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100,00	IKK	Dinkes
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	- Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP)	persen	79,26	IUP	DPU-PR
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (IUP)	persen	29.040,00	IUP	DPU-PR
	- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	persen	0.96	IUP	DPU-PR
	- Persentase pemenuhan prasarana persampahan	persen	84,85	IKU Renstra	DPU-PR
	- Persentase wilayah kota yang bebas dari genangan banjir / rob	persen	94,24	IKU Renstra	DPU-PR
	- Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap ijin yang diberikan sesuai rencana tata ruang dan memenuhi persyaratan teknis bangunan	persen	83,00	IKU Renstra	DPU-PR
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	84,67	IKU Renstra	DPU-PR
	1.c.1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	persen	87,12	IKK	DPUPR
	1.c.2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	92,83	IKK	DPUPR
	1.c.4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persen	100,00	IKK	DPUPR
	1.c.5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	100,00	IKK	DPUPR
	1.c.6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	persen	100,00	IKK	DPUPR
	1.c.7 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	persen	79,26	IKK	DPUPR
	1.c.8.1 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	15,59	IKK	DPUPR
	1.c.8.2 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	100,00	IKK	DPUPR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	- Persentase pemenuhan sarpras dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	persen	62,49	IKU Renstra	Dinperkim
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	74,72	IKU Renstra	Dinperkim
	1.d.1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	100,00	IKK	Dinperkim
	1.d.2 Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	persen	100,00	IKK	Dinperkim

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA 2026	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	1.d.3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	persen	2,29	IKK	Dinperkim
	1.d.5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	71,00	IKK	Dinperkim
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	- Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	persen	91,50	IKU Renstra	Satpol P3KP
	- Rata-rata response time rate (tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen kebakaran	persen	15,00	IKU Renstra	Satpol P3KP
	- Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,60	IKU Renstra	BPBD
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	75,52	IKU Renstra	Satpol P3KP
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	76,52	IKU Renstra	BPBD
	1.e.1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100,00	IKK	Satpol P3KP
	1.e.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100,00	IKK	Satpol P3KP
	1.e.3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100,00	IKK	BPBD
	1.e.4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100,00	IKK	BPBD
	1.e.5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100,00	IKK	BPBD
	1.e.6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100,00	IKK	Satpol P3KP
	1.e.7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	≤15	IKK	Satpol P3KP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	- Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	100,00	IKU Renstra	Dinsos P2KB
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	75,17	IKU Renstra	Dinsos P2KB
	1.f.1 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	100,00	IKK	Dinsos P2KB
	1.f.2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100,00	IKK	Dinsos P2KB
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
	- Persentase calon tenaga kerja hasil pelatihan yang bersertifikat kompetensi	persen	37,00	IKU Renstra	Dinperinaker
	2.a.1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	100,00	IKK	Dinperinaker
	2.a.2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	16,45	IKK	Dinperinaker
	2.a.3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	52.114.366,27	IKK	Dinperinaker
	2.a.4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	14,12	IKK	Dinperinaker

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA 2026	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	2.a.5 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	persen	33,61	IKK	Dinperinaker
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	- Persentase kasus perempuan yang ditangani	persen	100,00	IKU Renstra	DPMPPA
	- Persentase pendampingan pemenuhan hak anak (pendidikan, kesehatan, forum anak, cluster informasi, pengasuhan, perlindungan khusus)	persen	55,56	IKU Renstra	DPMPPA
	2.g.1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	7,47	IKK	DPMPPA
	2.g.2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	persen		IKK	DPMPPA
	2.g.3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan per 100.000	18,46	IKK	DPMPPA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
	- Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	80,34	IKU Renstra	Dinperpa
	2.h.1 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	persen	52,50	IKK	Dinperpa
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
	- Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (IKK)	Persen	100,00	IKU Renstra	Dinperkim
	2.i.1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	persen	100,00	IKK	Dinperkim
	2.i.2 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	persen	100,00	IKK	Dinperkim
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	- Indeks Kualitas Air (IKK)	indeks	59,47	IKU Renstra	DLH
	- Indeks Kualitas Udara	indeks	82,85	IKU Renstra	DLH
	- Indeks Kualitas Lahan (IKK)	indeks	37,66	IKU Renstra	DLH
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)	persen	46,75	IUP	DLH
	- Tertib hukum lingkungan hidup	persen	64,44	IKU Renstra	DLH
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	86,57	IKU Renstra	DLH
	2.j.3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	persen	64,44	IKK	DLH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	93,60	IKU Renstra	Dindukcapil
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	82,82	IKU Renstra	Dindukcapil
	2.k.1.1 Perekaman KTP elektronik	persen	98,27	IKK	Dindukcapil
	2.k.1.2 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	71,08	IKK	Dindukcapil

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA 2026	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	2.k.1.3 Kepemilikan akta kelahiran	persen	99,37	IKK	Dindukcapil
	2.k.1.4 Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	persen	13,00	IKK	Dindukcapil
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	- Persentase LKK yang aktif dalam pembangunan	persen	100,00	IKU Renstra	DPMPPA
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	83,57	IKU Renstra	DPMPPA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	- Total Fertility Rate	angka	2,17	IKU Renstra	Dinsos P2KB
	2.m.2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	71,02	IKK	Dinsos P2KB
	2.m.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	13,00	IKK	Dinsos P2KB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
	- Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	persen	44,20	IUP	Dinhub
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	76,87	IKU Renstra	Dinhub
	2.n.1 Rasio konektivitas kabupaten/kota	indeks	1,00	IKK	Dinhub
	2.n.2 V/C rasio di jalan kabupaten/kota	rasio	0,44	IKK	Dinhub
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	- Indeks domain tata kelola SPBE	indeks	3,40	IKU Renstra	Dinkominfo
	- Kinerja unit pelayanan informasi publik	persen	83,00	IKU Renstra	Dinkominfo
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	87,82	IKU Renstra	Dinkominfo
	2.o.1 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100,00	IKK	Dinkominfo
	2.o.2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	36,40	IKK	Dinkominfo
	2.o.3 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	persen	30,74	IKK	Dinkominfo
	4.e.1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	persen	100,00	IKK	BPKAD
	4.e.2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	persen	100,00	IKK	BPKAD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
	- Persentase Koperasi Berkualitas	persen	57,10	IKU Renstra	Dindagkop-UKM
	- Pertumbuhan UMKM	persen	2,00	IKU Renstra	Dindagkop-UKM
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	85,82	IKU Renstra	Dindagkop-UKM
	2.p.1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	persen	45,45	IKK	Dindagkop-UKM
	2.p.2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	persen	30,78	IKK	Dindagkop-UKM
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	- Nilai investasi baru tahun N	Rp. Milyar	795,81	IKU Renstra	DPMPTSP
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	78,12	IKU Renstra	DPMPTSP
	2.q Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	persen	0,40	IKK	DPMPTSP

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA 2026	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	- Persentase partisipasi kader kepemudaan dalam pembangunan	Dokumen	1.41	IKU Renstra	Dinparbudpora
	2.r.1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	2,58	IKK	Dinparbudpora
	2.r.2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	20,61	IKK	Dinparbudpora
	2.r.3 Peningkatan prestasi olahraga	persen	25,00	IKK	Dinparbudpora
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
	- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	90,00	IKU Renstra	Dinkominfo
	2.s.1 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100,00	IKK	Dinkominfo
	2.s.2 Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100,00	IKK	Dinkominfo
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
	- indeks tata kelola KAMI	indeks	85,00	IKU Renstra	Dinkominfo
	2.t Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	75,96	IKK	Dinkominfo
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
	- Persentase kelompok budaya yang aktif terlibat / mengadakan aktivitas budaya dalam 1 tahun terakhir	persen	42,54	IKU Renstra	Dinparbudpora
	2.u Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	100,00	IKK	Dinparbudpora
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
	- Tingkat pemanfaatan perpustakaan (IUP)	persen	80,77	IUP	Dinarpus
	2.v.1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	indeks	82,67	IKK	Dinarpus
	2.v.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	94,37	IKK	Dinarpus
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
	- Persentase OPD dengan nilai pengawasan kearsipan kategori serendah rendahnya memuaskan	persen	63,33	IKU Renstra	Dinarpus
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	76,52	IKU Renstra	Dinarpus
	2.w.1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	persen	75,13	IKK	Dinarpus
	- URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	- Realisasi produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	ton	11.548,35	IKU Renstra	DKP
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	83,29	IKU Renstra	DKP
	3.a Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	persen	100,00	IKK	DKP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
	- Tingkat Kunjungan Wisata	orang	1.236.000,00	IKU Renstra	Dinparbudpora
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	78,32	IKU Renstra	Dinparbudpora

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA 2026	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	3.b.1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	persen	10,00	IKK	Dinparbudpora
	3.b.2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	persen	10,00	IKK	Dinparbudpora
	3.b.3 Tingkat hunian akomodasi	persen	60,90	IKK	Dinparbudpora
	3.b.4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	6,78	IKK	Dinparbudpora
	3.b.5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	11,59	IKK	Dinparbudpora
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
	- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	277,24	IKU Renstra	Dinperpa
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	76,52	IKU Renstra	Dinperpa
	3.c.1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Rata-rata Ton Per Hektar Per Tahun	11,68	IKK	Dinperpa
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	- Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	persen	8,57	IKU Renstra	Dindagkop-UKM
	- Nilai Ekspor Perdagangan	US \$	14.600.000,00	IKU Renstra	Dindagkop-UKM
	3.f.3 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	71,80	IKK	Dindagkop-UKM
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
	- Pertumbuhan Industri Pengolahan	persen	2,38	IKU Renstra	Dinperinaker
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	75,52	IKU Renstra	Dinperinaker
	3.g.2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	persen	100,00	IKK	Dinperinaker
	3.g.3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100,00	IKK	Dinperinaker
	3.g.4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100,00	IKK	Dinperinaker
	3.g.6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	indeks	100,00	IKK	Dinperinaker
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	- Persentase OPD dengan pelaporan kinerja sangat baik	persen	46,67	IKU Renstra	Setda
	- Rata-rata capaian standar pelayanan minimal	persen	100,00	IKU Renstra	Setda
	- Persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa	persen	100,00	IKU Renstra	Setda
	3.f.2 Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	82,49	IKK	Dindagkop-UKM
	SEKRETARIAT DPRD				
	- Persentase fasilitas persetujuan Raperda	persen	100,00	IKU Renstra	Set DPRD
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	76,02	IKU Renstra	Set DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	PERENCANAAN				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA 2026	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	- Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan-Sub Kegiatan Renja-Renstra, serta nilai pengukuran kinerja)	persen	100,00	IKU Renstra	Bapperida
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	88,82	IKU Renstra	Bapperida
	KEUANGAN				
	- Indeks pengelolaan keuangan daerah dimensi kualitas anggaran belanja, transparansi pengelolaan keuangan, dan penyerapan anggaran	indeks	50,00	IKU Renstra	BPKAD
	- Persentase peningkatan PAD	persen	-0,54	IKU Renstra	BPKAD
	- Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian laporan BMD	persen	50,00	IKU Renstra	BPKAD
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	84,70	IKU Renstra	BPKAD
	4.a.1 Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	persen	≤ 30	IKK	BPKAD
	4.a.2 Rasio PAD	persen	26,76	IKK	BPKAD
	4.a.5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	102,33	IKK	BPKAD
	4.a.6 Opini Laporan Keuangan	indeks	WTP	IKK	BPKAD
	4.d.1 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	< 5,00	IKK	BPKAD
	4.d.2 Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	0,00	IKK	BPKAD
	4.d.3 Assets Management	persen	4,00	IKK	BPKAD
	4.d.4 Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	persen	< 5,00	IKK	BPKAD
	KEPEGAWAIAN				
	- Rata-rata skor nilai merit sistem komponen manajemen ASN	persen	3,00	IKU Renstra	BKPSDM
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	84,02	IKU Renstra	BKPSDM
	4.c.1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	69,53	IKK	BKPSDM
	4.c.2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	27,37	IKK	BKPSDM
	4.c.3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	45,91	IKK	BKPSDM
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	- Rata-rata skor nilai sistem merit komponen pengembangan kompetensi ASN	persen	3,00	IKU Renstra	BKPSDM
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	- Inovasi daerah yang dikirim ke Kemendagri	Dokumen	150,00	IKU Renstra	Bapperida
	PENGADAAN				
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
	INSPEKTORAT DAERAH				
	- Kapabilitas APIP	level	3,00	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	84,75	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	4.a.3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	indeks	3,00	IKK	Inspektorat Daerah
	UNSUR KEWILAYAHAN				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA 2026	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	KECAMATAN				
	- Rata-rata capaian program layanan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Utara
	- Rata-rata capaian program layanan Pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Selatan
	- Rata-rata capaian program layanan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Barat
	- Rata-rata capaian program layanan Pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Timur
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	77,02	IKU Renstra	Kec. Utara
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	76,52	IKU Renstra	Kec. Selatan
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	76,52	IKU Renstra	Kec. Barat
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	75,67	IKU Renstra	Kec. Timur
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	- Persentase konflik SARA yang terselesaikan	persen	100,00	IKU Renstra	Bakesbangpol
	- Nilai SAKIP OPD	nilai	73,97	IKU Renstra	Bakesbangpol

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, 2025

BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 merupakan periode pertama RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan RKP Tahun 2026, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang relevan. Tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026 ditujukan untuk “ ***Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan***”, dan akan dicapai melalui 9 (sembilan) prioritas pembangunan dengan pendekatan mengikuti prinsip *money follows program* dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), yaitu:

1. Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian, peningkatan kompetensi dan literasi digital ASN, internalisasi nilai-nilai integritas serta penguatan SDM perencana dan keuangan dalam perencanaan, pengukuran, pengelolaan keuangan, pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis outcome.
2. Peningkatan SDM pendidikan yang memenuhi kualifikasi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius.
3. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan, serta pemenuhan hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan.
4. Peningkatan kualitas SDM dan koordinasi perwujudan tujuan rencana tata ruang, sarpas perkotaan dan manajemen rekayasa lalu lintas.
5. Sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan data tunggal dan pilah gender serta identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka.
6. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi
7. Peningkatan peran stakeholder budaya dalam pelestarian Budaya Lokal,
8. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan.
9. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu.

Melalui 9 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, diharapkan target-target pembangunan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini akan tercermin dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada angka 5,70-6,20 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,50-6,14 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka 78,21. Selain itu, diharapkan juga terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,91-4,40 persen, yang menandakan penciptaan lapangan kerja yang semakin luas. Pencapaian ini diikuti dengan hasil positif pada indikator kinerja daerah, yang secara keseluruhan akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan. Dengan hasil pembangunan yang optimal, Kota Pekalongan diharapkan

BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 merupakan periode pertama RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan RKP Tahun 2026, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang relevan. Tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2026 ditujukan untuk “ ***Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan***”, dan akan dicapai melalui 9 (sembilan) prioritas pembangunan dengan pendekatan mengikuti prinsip *money follows program* dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), yaitu:

1. Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian, peningkatan kompetensi dan literasi digital ASN, internalisasi nilai-nilai integritas serta penguatan SDM perencana dan keuangan dalam perencanaan, pengukuran, pengelolaan keuangan, pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis outcome.
2. Peningkatan SDM pendidikan yang memenuhi kualifikasi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius.
3. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan SDM Kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan, serta pemenuhan hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan.
4. Peningkatan kualitas SDM dan koordinasi perwujudan tujuan rencana tata ruang, sarpas perkotaan dan manajemen rekayasa lalu lintas.
5. Sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan data tunggal dan pilah gender serta identifikasi faktor penyebab dan rencana penanganan pengangguran terbuka.
6. Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi
7. Peningkatan peran stakeholder budaya dalam pelestarian Budaya Lokal,
8. Penguatan pendidikan toleransi terhadap agama dan kebhinekaan secara dini pada keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, media massa atau melalui komunitas-komunitas keagamaan, dan kebudayaan.
9. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah cair dari hulu.

Melalui 9 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, diharapkan target-target pembangunan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini akan tercermin dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada angka 5,70-6,20 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,50-6,14 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka 78,21. Selain itu, diharapkan juga terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,91-4,40 persen, yang menandakan penciptaan lapangan kerja yang semakin luas. Pencapaian ini diikuti dengan hasil positif pada indikator kinerja daerah, yang secara keseluruhan akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan. Dengan hasil pembangunan yang optimal, Kota Pekalongan diharapkan

dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Pekalongan, Juli 2025
WALI KOTA PEKALONGAN

TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



DAM MUHAMAD, S.H.
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2025.

Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2025.

www.bps.go.id, 2025.

<https://idsdjateng.id>, 2025.

<https://indeks-inovasi.brin.go.id>, 2025.

